SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang :

a. bahwa hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Madiun yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 merupakan bahan pembahasan lebih lanjut Tim Anggaran Pemerintah Kota Madiun dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 18 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 1/G, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 117);
31. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
32. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 3/D);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

33. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 12/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2026.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Madiun Tahun 2026 yang dilaksanakan bersama *stakeholders*.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 14 Juli 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 14 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025 NOMOR 19/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen perencanaan merupakan kewajiban bagi setiap pemerintah daerah dan menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah daerah wajib merancang pembangunan yang terarah, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Dokumen perencanaan tersebut meliputi tiga jenis, yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun. Di antara ketiganya, RKPD memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan pemerintahan daerah, sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1.1.

Gambar 1. 1 Kedudukan, Peran dan Fungsi RKPD

Berdasarkan gambar di atas, RKPD memiliki empat aspek penting yang berkaitan dengan kedudukan, peran, dan fungsinya.

1. Secara substansial, RKPD berisi arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, termasuk rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, serta Perangkat Daerah yang bertanggung jawab. Semua elemen ini harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu satu tahun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Secara normatif, RKPD menjadi dasar dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini diajukan kepala daerah untuk disepakati bersama DPRD sebagai pijakan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).
3. Secara operasional, RKPD memberikan arahan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, baik dalam pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat. Setiap kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.
4. Secara faktual, RKPD menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah, terutama dalam merealisasikan program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD dilakukan dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta mengikuti tahapan, tata cara penyusunan, perubahan, pengendalian, dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini juga memastikan adanya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD bertujuan menjamin keterpaduan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RKPD juga menjadi bagian integral dari rangkaian tahapan perencanaan pembangunan yang berlanjut hingga proses penyusunan anggaran.

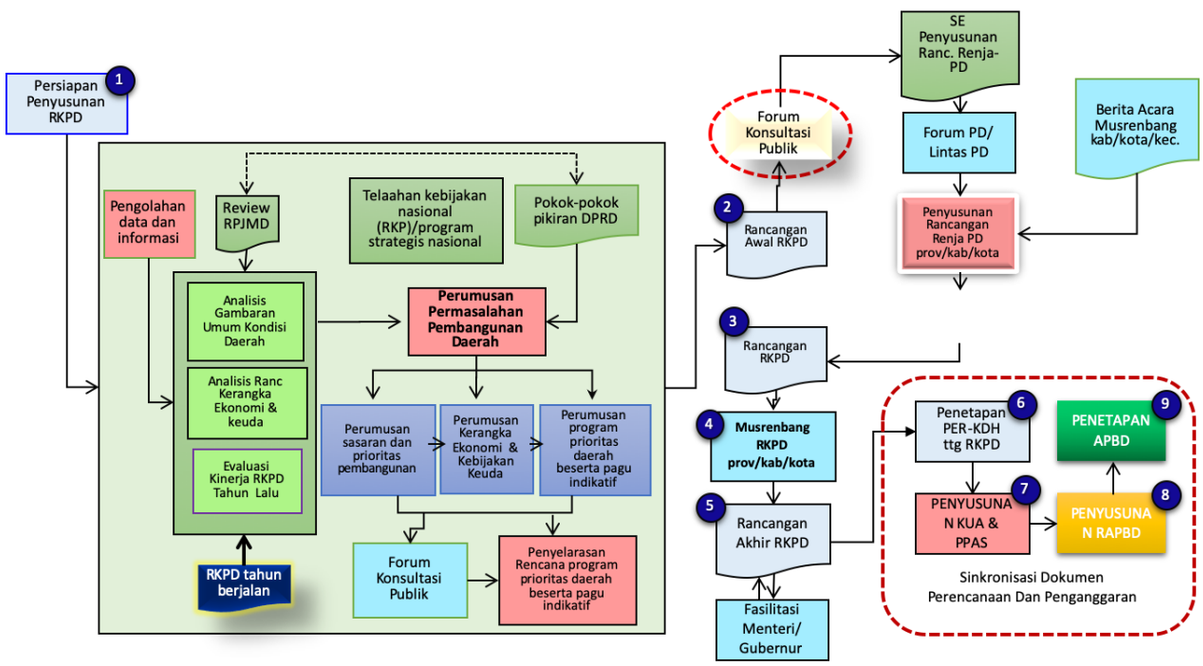

Sumber: Permendagri 86/2017

Gambar 1. 2 Tahapan Penyusunan RKPD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Berdasarkan Gambar 1.2, Dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2025 disusun melalui enam tahapan utama sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahapan penyusunan RKPD meliputi :

(1) persiapan penyusunan RKPD;
(2) penyusunan rancangan awal RKPD;
(3) penyusunan rancangan RKPD;
(4) pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota;
(5) perumusan rancangan akhir RKPD; dan
(6) penetapan RKPD.

Dalam penyusunan RKPD Kota Madiun Tahun 2026, terdapat empat pendekatan utama yang diterapkan, yaitu: (1) pendekatan politik, (2) pendekatan teknokratik, (3) pendekatan partisipatif, dan (4) pendekatan *bottom up* serta *top down*. Pendekatan politik bertujuan untuk mengakomodasi program pembangunan yang diajukan oleh kepala daerah. Pendekatan teknokratik mengandalkan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga/unit organisasi terkait. Pendekatan partisipatif berfokus pada pengumpulan masukan dari pemangku kepentingan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Sementara itu, pendekatan *bottom up* dan *top down* mencerminkan hasil perencanaan yang diselaraskan melalui musyawarah pembangunan yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, hingga Nasional.

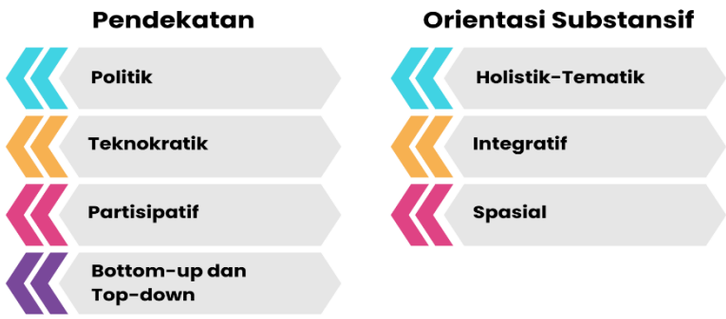

Gambar 1. 3 Pendekatan Penyusunan dan Orientasi RKPD Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Berdasarkan pada Gambar 1.3, selain empat pendekatan yang telah disebutkan, perencanaan pembangunan di Kota Madiun juga mengedepankan pendekatan yang bersifat substansial, yaitu Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial. Pendekatan Holistik-Tematik menekankan pentingnya penanganan yang menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas. Dalam hal ini, koordinasi antar perangkat daerah terkait memiliki peran yang sangat penting. Selanjutnya, perencanaan pembangunan di Kota Madiun juga mengadopsi pendekatan integratif, yang mengutamakan keterpaduan seluruh program dan kegiatan yang saling mendukung dan sejalan dalam mencapai sasaran prioritas daerah. Pendekatan spasial, di sisi lain, mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan, sehingga kegiatan yang direncanakan dapat didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta lokasi yang jelas, yang pada gilirannya mempermudah integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

Penyusunan RKPD Kota Madiun Tahun 2026 melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan menggunakan Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) sebagai basisnya. Para pemangku kepentingan berpartisipasi melalui Forum Konsultasi Publik, yang bertujuan untuk mengumpulkan masukan dan harapan mereka terkait rumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan, serta rancangan program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, lokasi, dan pemangku kepentingan yang relevan sebagai penerima manfaat. Selain itu, keterlibatan para pihak juga dilakukan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang dilaksanakan secara partisipatif mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan. Forum Musrenbang ini berfungsi untuk mengumpulkan usulan dari masyarakat dan pemerintahan tingkat dasar (Kelurahan) berdasarkan prioritas yang ada. Tujuan dari Musrenbang Kecamatan adalah untuk memperjelas, menyelaraskan, mengklarifikasi, dan mencapai kesepakatan mengenai usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan, yang kemudian diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di tingkat kecamatan. Forum ini juga melibatkan Perangkat Daerah (PD), dan hasilnya diformulasikan lebih lanjut dalam forum Musrenbang RKPD di tingkat Kota. Melalui pelaksanaan Musrenbang, diharapkan aspirasi masyarakat di tingkat dasar dapat terjaring dengan baik dan selaras dengan program kegiatan masing-masing PD, sehingga menghasilkan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat tersebut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Penyusunan RKPD Tahun 2026 merupakan tahap awal dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan Kota Madiun, yang merujuk pada RPJMD Kota Madiun Tahun 2025-2029 yang sedang disusun, sebagaimana diamanatkan pada pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri 10 Tahun 2025 bahwa penyusunan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam RPJMD 2025-2029. Proses ini juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, serta RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045. Dalam merumuskan perencanaan tahunan tersebut, Pemerintah Kota Madiun melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat di tingkat Kelurahan, Perangkat Daerah (PD), LSM, DPRD, lembaga masyarakat, hingga akademisi.

RKPD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Setelah KUA dan PPAS disepakati, keduanya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD untuk Tahun Anggaran 2026. RKPD mencakup berbagai elemen penting, antara lain kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun. Penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan RKPD Kota Madiun Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan, Kawasan Bromo–Tengger–Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tantang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022;
35. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 110);
37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 12/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 130);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kota Madiun Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan daerah yang terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun daerah. Dokumen perencanaan dan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah antara lain: (1) RPJPD; (2) RPJMD; (3) Renstra-PD; (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Sedangkan dokumen di luar Kota Madiun yang terkait dengan dokumen ini antara lain: (1) RPJP Nasional dan Provinsi; (2) RPJM Nasional dan Provinsi; dan (3) RKP Nasional dan Provinsi.

Diagram keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:

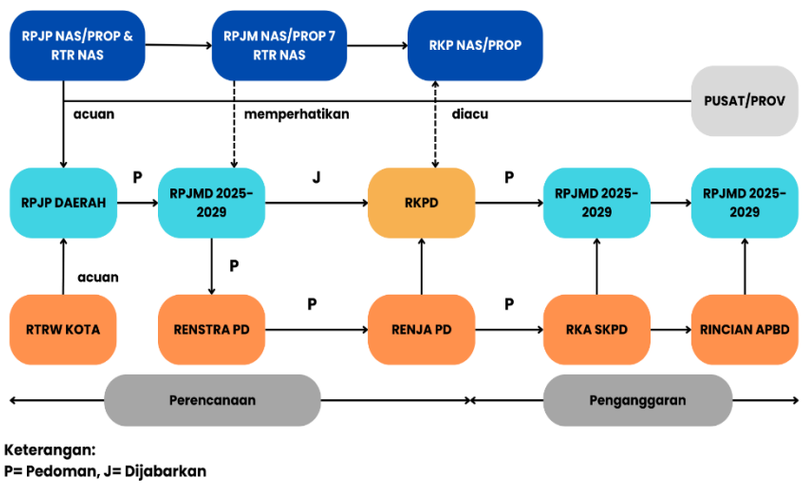

Gambar 1. 4 Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sebagaimana termuat pada Gambar 1.4 diatas, RKPD Kota Madiun Tahun 2026 memuat rincian dari arah kebijakan pembangunan RPJMD Kota Madiun Tahun 2025-2029. RKPD Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029; Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026; RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2045. Selanjutnya Dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2026 akan menjadi acuan penyusunan Rancangan APBD dan Renja perangkat daerah Tahun 2026 Kota Madiun. Keterkaitan antar dokumen ini penting bagi penyusunan kebijakan daerah yang konsisten demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Keterkaitan dokumen sebagaimana gambar 1.4 merupakan keselarasan yang harus dijaga serta konsistenitas dokumen perencanaan, RKPD Kota Madiun yang selaras dan mendukung Prioritas Nasional dalam RKP dan Prioritas Provinsi dalam RKPD Provinsi Jawa Timur, selaras dan konsisten dengan RPJMD Kota Madiun terkait Program serta melihat RPJPD Kota Madiun, selain itu juga berpedoman pada RTRW Kota Madiun.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2026 adalah sebagai pedoman perencanaan bagi semua *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam pembangunan Kota Madiun Tahun 2026. Secara khusus, maksud penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang selaras, terintegrasi dan bersinergi dengan rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam dokumen RKP Tahun 2026;
2. Meningkatkan koordinasi dan menyamakan persepsi perencanaan pembangunan antar *stakeholder*, sehingga dokumen perencanaan Tahun 2026 memuat kebijakan publik untuk dapat dijadikan acuan seluruh komponen masyarakat Kota Madiun dalam melaksanakan perannya;
3. Menyediakan dokumen kebijakan Pemerintah Daerah dan menginformasikan arah pelaksanaan pembangunan Tahun 2026; dan
4. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026;
2. Menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam menyusun Dokumen Renja 2026;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2026; dan
4. Terwujudnya keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan untuk mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2026 mengikuti sistematika penulisan Sesuai dengan ketetapan dalam Pasal Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini mencakup informasi mengenai latar belakang penyusunan RKPD Kota Madiun, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan RKPD, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Dalam Bab II menjabarkan tentang gambaran umum kondisi daerah yang terkait dengan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Selain itu pada bab II ini juga menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2024.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab III menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjabarkan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Bab ini juga menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas pembangunan daerah Tahun 2026, dan program pembangunan daerah Tahun 2026.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII : PENUTUP

Pada bab penutup dikemukakan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa, Pemerintah Kota Madiun ditetapkan sebagai salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Timur.

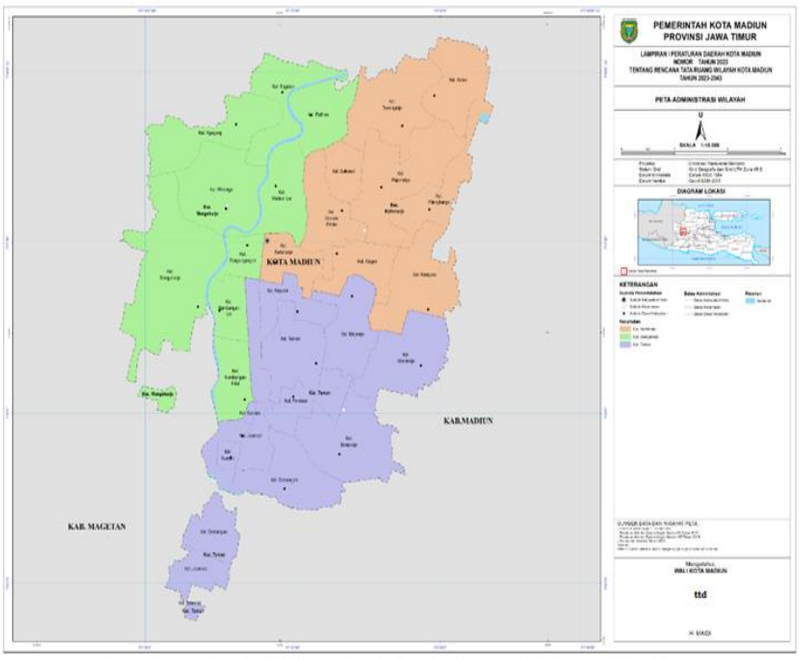

Gambar 2. 1 Wilayah Administrasi Kota Madiun
Sumber: RTRW Kota Madiun Tahun 2023-2043

Kota Madiun merupakan kota yang sangat penting di wilayah Jawa Timur bagian barat. Posisi Kota Madiun menjadikan kota tersebut sebagai pusat berbagai kepentingan seperti layanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan kesehatan. Letak Kota Madiun sebagai kota transit yang cukup strategis karena kondisi topografi tanah yang datar, menjadikan Kota Madiun sebagai pilihan jalur transportasi yang mudah dilalui oleh bus maupun kereta api. Selain itu, Kota Madiun juga mendukung sebagai daerah *hinterland* karena memiliki potensi budaya dan pariwisata yang cukup terkenal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Wilayah Kota Madiun berada di daerah dataran dengan bagian tengah terletak di ketinggian 63 meter dari permukaan laut, bagian selatan terletak di ketinggian 67 meter dari permukaan laut. Kota Madiun secara astronomis berada pada titik koordinat 7° 35' 43.690" LS - 7° 40' 49.826" LS dan 111° 29' 46.553" BT -111° 33'5.272" BT. Kota Madiun memiliki rentang temperatur udara di antara 20℃ hingga 35℃, dengan curah hujan di Kota Madiun rata-rata mencapai 320 mm per tahun. Kota Madiun memiliki luas wilayah 36,1 km^2. Berdasarkan luas tersebut, Kota Madiun terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Madiun Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase (%)	Jarak ke Ibu Kota (Km)
1.	Manguharjo	12,48	34,57	2,9
2.	Taman	12,2	33,8	4,6
3.	Kartoharjo	11,42	31,36	3

Sumber : Badan informasi Geospasial, 2021

Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas di Kota Madiun adalah Kecamatan Manguharjo dengan luas sebesar 12,48 km^2. Kecamatan Taman dengan luas sebesar 12,2 km^2. Sementara itu, kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Kartoharjo dengan luas sebesar 11,42 km^2. Salah satu faktor yang menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan adalah jarak kecamatan ke ibu kota kecamatan. Kecamatan Kartoharjo memiliki jarak terpendek dari kecamatan ke ibu kota yaitu sejauh 2,9 km, sedangkan kecamatan Taman memiliki jarak terjauh dari kecamatan ke ibukota dengan jarak 4,6 km.

Tabel 2. 2 Kecamatan dan Kelurahan di Kota Madiun

No.	Kecamatan	Kelurahan
1	2	3
1.	Taman	Banjarejo
		Demangan
		Josenan
		Kejuron
		Kuncen
		Manisrejo
		Mojorejo
		Pandean
		Taman
2.	Kartoharjo	Kanigoro
		Kartoharjo
		Kelun
		Klegen
		Oro-Oro Ombo
		Pilangbango
		Rejomulyo
		Sukosari
		Tawangrejo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3
3.	Manguharjo	Madiun Lor
		Manguharjo
		Nambangan Kidul
		Nambangan Lor
		Ngengong
		Pangonganan
		Patihan
		Sogaten
		Winongo

Sumber: RTRW Kota Madiun Tahun 2023-2043

Kota Madiun memiliki 3 kecamatan dengan masing-masing kecamatan terbagi ke dalam sembilan (9) kelurahan. Oleh karena itu, Kota Madiun secara keseluruhan memiliki 27 kelurahan di Kota Madiun. Wilayah Kota Madiun secara administratif hampir keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Madiun dan sebagian kecil oleh Kabupaten Magetan. Kota Madiun memiliki batas-batas administratif sebagai berikut:

a. Sebelah utara: Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun;
b. Sebelah selatan: Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
c. Sebelah timur: Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;
d. Sebelah barat: Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun; dan
e. Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

2.1.1.2 Kondisi Topografi

Apabila dilihat dari karakteristik topografinya, wilayah Kota Madiun sebagian besar terdiri dari dataran rendah yang landai dan membentang dari utara ke selatan. Kota Madiun secara umum berada pada ketinggian sekitar 63 m di atas permukaan laut. Bagian selatan ketinggian wilayah mencapai 67 m di atas permukaan laut dan menurun hingga 63 m di atas permukaan laut. Sementara itu di bagian utara, ketinggian rata-rata mencapai 64 m di atas permukaan laut.

Perbedaan ketinggian antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan lahan rata-rata 0-2˚ atau dapat dikatakan relatif datar. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik Kota Madiun di masa yang akan datang.

Tabel 2. 3 Tinggi di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kota Madiun

Kecamatan	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) (meter)			
	2020	2021	2022	2023
Manguharjo	70	76	76	76
Taman	70	77	77	77
Kartoharjo	70	68	68	68

Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kondisi (*state*) topografi yang datar di wilayah Kota Madiun memberikan dampak *(impact*) terhadap kecepatan aliran permukaan yang rendah sehingga potensi terjadi genangan air tinggi. Sebaliknya dengan topografi yang datar potensi terjadi proses pasokan air tanah (*recharge water*) yang besar, sehingga ketersediaan air tanah dangkal dapat terjadi keberlanjutan. Kota Madiun berada di sekitar 30 km dari lembah sungai Madiun atau Kali Madiun yang merupakan anak sungai paling besar dari Sungai Bengawan Solo. Apabila dilihat dari daerah sekitarnya, maka terdapat rangkaian pegunungan, yaitu di sebelah timur terdapat Gunung Wilis dengan ketinggian 2.169 m, di sebelah selatan membujur Pegunungan Kapur Selatan yang mempunyai ketinggian antara 500 m hingga 1.000 m di atas permukaan laut, di sebelah barat Kota Madiun terdapat Gunung Lawu dengan ketinggian 3.285 m, dan di sebelah utara terdapat Pegunungan Kendeng dengan ketinggian antara 100 m–500 m.

Tabel 2. 4 Tinggi Wilayah Tiap Kelurahan Pada Masing-Masing Kecamatan

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah berdasarkan Kelas Ketinggian Permukaan (Ha)			Total (Ha)
		60-70 m	70-80 m	80-90 m	
Kartoharjo	Kanigoro	0.32	172.10		172.41
	Kartoharjo	6.43	72.62		79.04
	Kelun	124.55			124.55
	Klegen	40.76	45.59		86.35
	Oro-Oro Ombo	71.23	16.10		87.33
	Pilangbango	109.97	4.95		114.92
	Rejomulyo	203.25	0.62		203.87
	Sukosari	70.71	0.79		71.51
	Tawangrejo	153.53			153.53
	Total (Ha)	780.75	312.77	0.00	1143,5
Manguharjo	Madiun Lor	128.15	13.84		141.99
	Manguharjo	91.23	240.45		331.67
	Nambangan Kidul	24.39	62.65		87.05
	Nambangan Lor	55.29	13.69		68.98
	Ngegong	128.16			128.16
	Pangongangan	32.48	36.16		68.64
	Patihan	130.17			130.17
	Sogaten	124.70			124.70
	Winongo	162.78	37.91		200.69
	Total (Ha)	877.35	404.70	0.00	1248,5
Taman	Banjarejo		131.31	50.83	182.14
	Demangan		184.36	43.18	227.54
	Josenan	11.52	127.25		138.76
	Kejuron		77.50		77.50
	Kuncen	0.06	34.70		34.76
	Manisrejo		176.25		176.25
	Mojorejo		141.14		141.14
	Pandean		107.15		107.15
	Taman		134.23		134.23
	Total (Ha)	11.57	1113.89	94.01	1220,6
Total (Ha)	1669.67	1831.36	94.01	3612,6	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Wilayah di Kecamatan Kartoharjo mayoritas memiliki rentang ketinggian 60-70 meter di atas permukaan laut dengan luas area 780,75 Ha. Hal tersebut berarti 71,4% wilayah di Kecamatan Kartoharjo memiliki ketinggian 60-70 meter dpl. Kelurahan Kelun, Oro-Oro Ombo, Pilangbango, Rejomulyo, Sukosari, dan Tawangrejo merupakan wilayah yang didominasi dengan rentang ketinggian 60-70 meter dpl.

Adapun wilayah di Kecamatan Kartoharjo dengan ketinggian 70-80 meter di atas permukaan laut seluas 312,77 Ha atau 28,6% dari total luas wilayah. Kecamatan Kartoharjo. Kelurahan Kanigoro dan Kelurahan Kartoharjo merupakan wilayah yang didominasi dengan rentang ketinggian 70-80 meter dpl. Kelurahan Klegen memiliki wilayah dengan ketinggian 60-70 dan 70-80 meter dpl yang cukup berimbang, meskipun sebagian wilayahnya lebih banyak yang memiliki ketinggian 70-80 meter dpl. Kecamatan Kartoharjo diketahui tidak memiliki wilayah dengan rentang ketinggian 80-90 meter dpl.

Kecamatan Manguharjo didominasi oleh wilayah dengan rentang ketinggian 60-70 meter dpl, dengan luas total 877,35 Ha atau 68,4% total luas wilayah kecamatan tersebut. Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Nambangan Lor, dan Kelurahan Winongo merupakan daerah yang sebagian besar wilayahnya memiliki rentang ketinggian 60-70 meter dpl. Adapun Kelurahan Ngegong, Kelurahan Patihan, dan Kelurahan Sogaten merupakan kelurahan yang seluruh wilayahnya berada pada rentang ketinggian 60-70 meter dpl. Sementara itu, wilayah di Kecamatan Manguharjo dengan rentang ketinggian 70-80 meter dpl seluas 404,70 Ha atau 31,6% total luas wilayah kecamatan tersebut. Kelurahan yang sebagian wilayahnya didominasi dengan rentang ketinggian 70-80 meter dpl yaitu Kelurahan Manguharjo dan Kelurahan Nambangan Kidul. Kelurahan Pangongangan memiliki wilayah yang dengan distribusi ketinggian cukup berimbang, baik pada rentang 60-70 meter dpl maupun 70-80 meter dpl. Wilayah di Kecamatan Manguharjo tidak terdapat area dengan rentang ketinggian 80- 90 meter dpl.

Kecamatan Taman memiliki distribusi ketinggian yang lebih beragam baik 60-70, 70-80, maupun 80-90 meter dpl. Wilayah Kecamatan Taman didominasi oleh rentang ketinggian 70-80 meter dpl dengan luas area yaitu 1113,89 Ha atau 91,4% dari total luas area Kecamatan Taman. Seluruh kelurahan di wilayah Kecamatan Taman tercatat didominasi dengan rentang ketinggian 70-80 meter dpl. Adapun wilayah Kecamatan Taman dengan rentang ketinggian 60-70 meter dpl seluas 11,57 Ha atau hanya 0,9% dari total luas area kecamatan tersebut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Hanya Kelurahan Josenan dan Kelurahan Kuncen yang memiliki area pada ketinggian ini. Sedangkan wilayah dengan rentang ketinggian 80-90 meter dpl seluas 94,01 Ha atau 7,7% dari total luas area Kecamatan Taman. Kelurahan Banjarejo dan Kelurahan Demangan merupakan wilayah yang didalamnya terdapat rentang ketinggian 80-90 meter dpl.

2.1.1.3 Kondisi Geologi

Berdasarkan aspek geologisnya, mayoritas wilayah Kota Madiun memiliki struktur, karakteristik lahan, dan potensi berupa kandungan Aluvium serta jenis tanah kategori Alluvial. Kondisi tanah tersebut memiliki kadar mineral dan organisme yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan jenis tanah tersebut merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam kelabu dengan daya penahanan air yang cukup baik dan dapat menyerap air. Tanah di Kota Madiun sebagian besar mempunyai kedalaman efektif di atas 90 cm, memiliki kemiringan lahan yang relatif datar sehingga kondisi lahan di kota ini relatif tidak mengalami erosi.

Tabel 2. 5 Sebaran Jenis Batuan di Kota Madiun

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah berdasarkan Jenis Batuan (Ha)
		Alluvium
Kertoharjo	Kanigoro	172.41
	Kartoharjo	79.04
	Kelun	124.55
	Klegen	86.35
	Oro-Oro Ombo	87.33
	Pilangbango	114.92
	Rejomulyo	203.87
	Sukosari	71.51
	Tawangrejo	153.53
Manguharjo	Madiun Lor	141.99
	Manguharjo	331.67
	Nambangan Kidul	87.05
	Nambangan Lor	68.98
	Ngegong	128.16
	Pangongangan	68.64
	Patihan	130.17
	Sogaten	124.70
	Winongo	200.69
Taman	Banjarejo	182.14
	Demangan	227.54
	Josenan	138.76
	Kejuron	77.50
	Kuncen	34.76
	Manisrejo	176.25
	Mojorejo	141.14
	Pandean	107.15
	Taman	134.23
Total		3612,6

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Wilayah Kota Madiun sebagian besar termasuk dalam zona pusat depresi Jawa (zona Solo), yang ditempati oleh batuan gunung api kuarter. Pada bagian selatan dari zone Solo merupakan lajur pegunungan selatan Jawa Timur dan bagian wilayah utaranya termasuk di dalam rangkaian pegunungan Kendeng.

Sementara itu, Berdasarkan peta hidrogeologi Yogyakarta (Jawa), komposisi litologi dan kelolosannya, untuk wilayah Kota Madiun didominasi oleh struktur tanah aluvium endapan sungai yang umumnya tersusun oleh material berbutir halus (lempung, lanau, diselingi pasiran) atau lempung pasiran. Tingkat kelulusan sedang sampai rendah. Wilayah Kota Madiun bagian utara merupakan tanah aluvium endapan rawa dan danau yang tersusun terutama oleh lempung yang kedap air.

Berdasarkan peta tersebut, wilayah Kota Madiun bagian utara didominasi oleh akuifer dengan produktifitas sedang sampai tinggi dengan penyebaran luas. Tinggi pisometri air tanah diatas atau dekat air tanah, debit sumur bisa mencapai lebih dari 10-50 liter/detik, terutama wilayah Madiun bagian utara.

2.1.1.4 Kondisi Hidrologi

Berdasarkan kondisi hidrologinya, debit air tanah sepanjang tahun di Kota Madiun hampir tetap. Kondisi tersebut dikarenakan struktur tanah Kota Madiun yang cukup baik dan dapat menyerap air hujan dengan baik. Oleh karena itu masyarakat dapat dengan mudah untuk memperoleh air bersih yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sumber air dangkal terdapat pada kedalaman 8 meter sedang sumber air dalam/artesis terdapat pada kedalaman 90 meter. Kota Madiun berada dalam daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo pada Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo.

Di bagian barat Kota Madiun, mengalir sungai besar, yaitu Sungai Madiun yang membelah kota menjadi 2 bagian. Bagian timur sungai mencakup 82% wilayah kota, sedangkan di bagian barat sungai mencakup 18 persen wilayah. Sumber air tanah dan air permukaan tanah di Kota Madiun berasal dari dasar tanah, permukaan tanah, serta berasal dari 2 (dua) sungai yang melewati Kota Madiun yaitu Sungai Catur dan Sungai Madiun. Sungai Madiun memiliki 2 anak sungai, yaitu Sungai Piring dan Sungai Sono yang dijadikan sebagai saluran. irigasi lahan pertanian di wilayah Kota Madiun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kota Madiun memiliki struktur tanah yang cukup baik sehingga dapat menyerap air hujan dengan baik. Hal tersebut menyebabkan debit air tanah sepanjang tahun hampir tetap, sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan air bersih guna keperluan sehari- hari. Sumber air dangkal terdapat pada kedalaman 8 meter sedang sumber air dalam/artesis terdapat pada kedalaman 90 meter. Kota Madiun berada dalam daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo pada Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo. Di bagian barat Kota Madiun, mengalir sungai besar, yaitu Sungai Madiun yang membelah kota menjadi 2 bagian. Bagian timur sungai mencakup 82% wilayah kota, sedangkan di bagian barat sungai mencakup 18% wilayah. Sungai Madiun memiliki 2 anak sungai, yaitu Sungai Catur dan Sungai Sono. Pada saat musim hujan, Sungai Madiun sering menimbulkan banjir di beberapa daerah rendah dalam kota. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tinggi antara daerah rendah Kota Madiun yang lebih rendah sekitar 2-5 meter dengan dasar Sungai Madiun.

Kota Madiun memiliki sistem drainase perkotaan yang terbagi menjadi 2, yaitu drainase makro dan drainase mikro yang berjumlah 32 saluran. Sistem drainase Kota Madiun menggunakan sistem gravitasi dan sistem pemompaan (terdapat 8 rumah pompa yang sekaligus berfungsi sebagai pengendali banjir).

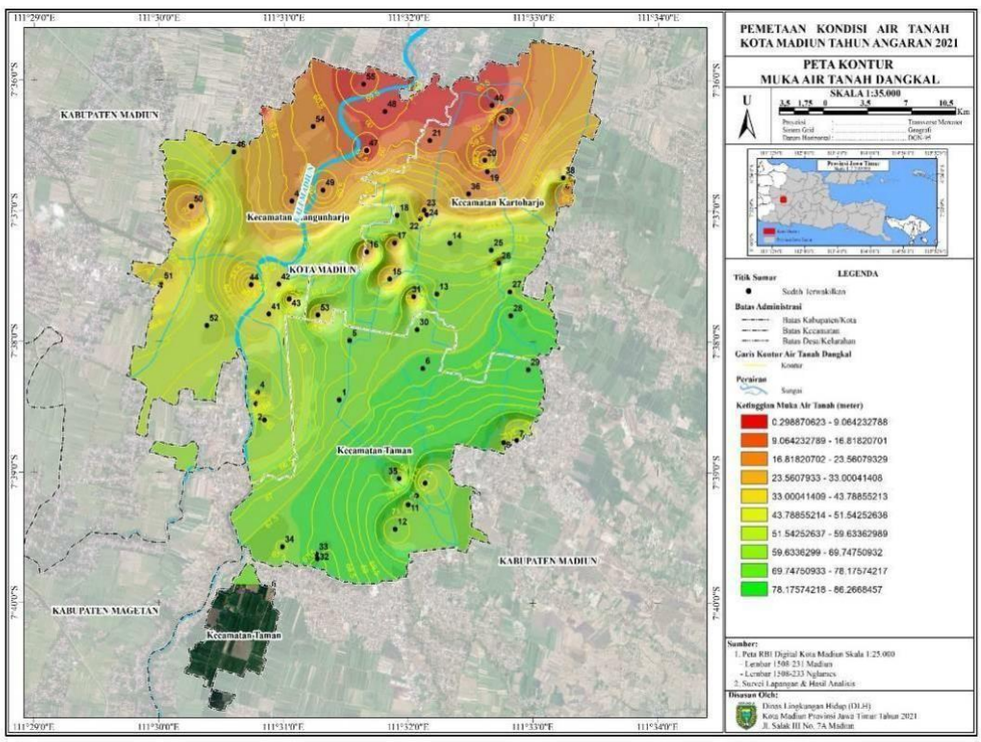

Gambar 2. 2 Peta Kontur Air Tanah Dangkal di Kota Madiun
Sumber: DIKPLHD Kota Madiun, 2021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

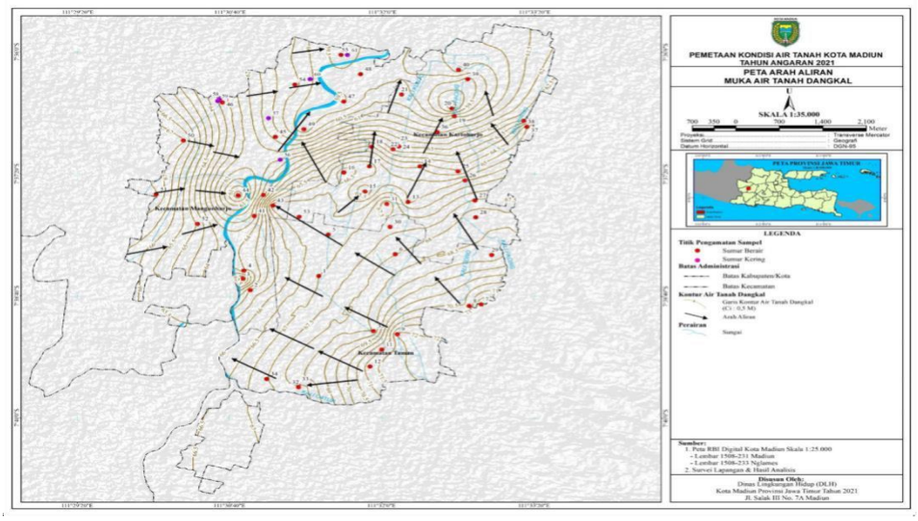

Gambar 2. 3 Peta Arah Aliran Air Tanah di Kota Madiun
Sumber: DIKPLHD Kota Madiun, 2021

Hasil kajian Tahun 2021 tentang Pemetaan Kondisi Air Tanah di Kota Madiun Tahun 2021 diperoleh hasil bahwa muka air tanah di Kota Madiun mempunyai ketinggian antara 58,18 m dpal - 72,12 m dpal yang dapat disajikan dalam Peta Kontur Air Tanah Dangkal. Berdasarkan pada ketinggian muka air tanah dangkal maka pola aliran air tanah dangkal di Kota Madiun, di setiap wilayah Kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Wilayah Kecamatan Taman, aliran air tanah dari arah Tenggara menuju Barat Laut, yang mempunyai hulu di Kelurahan Demangan, Banjarejo, Manisrejo mengalir ke arah Kelurahan Nambangan Kidul dan Nambangan Lor yang berakhir di aliran Sungai Madiun. Pola aliran air tanah akan berubah arah selatan menuju ke utara mulai dari Kelurahan Kejuron. Gradien hidrolik (perbedaan tinggi permukaan air tanah) homogen dan terjadi secara gradual.
2. Wilayah Kecamatan Kartoharjo, arah aliran air tanah dari selatan menuju ke utara yang dimulai dari Kelurahan Kartoharjo, Klegen dan Kanigoro yang berakhir di Kelurahan Tawangrejo dan Kelun. Gradien hidrolik (perbedaan tinggi permukaan air tanah) heterogen, sebelah selatan mempunyai gradien hidrolik yang tinggi, sedangkan bagian utara mempunyai gradien hidrolik yang rendah.
3. Wilayah Kecamatan Manguharjo, arah aliran air tanah dangkal mempunyai 2 (dua) pola yaitu: (a) Sebelah barat Sungai Madiun mempunyai arah aliran air tanah dari barat ke timur dari Kelurahan Ngegong dan Manguharjo mengarah ke Kelurahan Winongo, dengan gradien hidrolik yang sedang dan (b) Sebelah timur Sungai Madiun arah alirannya dari tenggara menuju barat laut serta dari selatan mengalir ke utara, dengan gradien hidrolik yang tinggi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologis Kota Madiun Tahun 2023 berdasarkan data BPS Kota Madiun, Kota Madiun dapat dikatakan memiliki suhu udara maksimum yang masih tergolong stabil yang berkisar antara 29,20°C34,2°C. Rata-rata suhu udara di Kota Madiun sebesar 31,4 °C. Kecepatan angin maksimum di Kota Madiun cukup bervariasi, pada Tahun 2023 kecepatan tertinggi terjadi pada Bulan Desember sebesar 20 m/detik, sedangkan kecepatan angin terendah terjadi pada Bulan Juni yang hanya sebesar 4 m/detik. Kelembaban udara tertinggi di Kota Madiun pada Tahun 2022 terjadi pada Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Desember sebesar 100%. Kelembaban terendah juga terjadi di Bulan Juni yaitu sebesar 95%. Curah hujan yang terjadi di Kota Madiun Tahun 2023 yang tercatat dari 3 (tiga) stasiun pengamatan curah hujan, dapat diketahui bahwa curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Maret 471,8 m3/bulan dan curah hujan terendah 0 m3/bulan terjadi pada Bulan Agustus, September, Oktober. Keberadaan curah hujan ini akan memberikan impact terhadap air tanah dan air permukaan (sungai).

Rata-rata curah hujan yang berkisar 144,06 m3/bulan. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, curah hujan bulanan Kota Madiun dapat dikatakan termasuk dalam kategori menengah karena berada pada rentang 100-300 mm/bulan.

Tabel 2. 6 Curah Hujan Menurut Kelurahan pada Setiap Kecamatan

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah Berdasarkan Curah Hujan (Ha)
		100 - 300 (mm/bulan)
1	2	3
Kartoharjo	Kanigoro	172.41
	Kartoharjo	79.04
	Kelun	124.55
	Klegen	86.35
	Oro-Oro Ombo	87.33
	Pilangbango	114.92
	Rejomulyo	203.87
	Sukosari	71.51
	Tawangrejo	153.53
	Total	1143,35
Manguharjo	Madiun Lor	141.99
	Manguharjo	331.67
	Nambangan Kidul	87.05
	Nambangan Lor	68.98
	Ngegong	128.16
	Pangongangan	68.64
	Patihan	130.17
	Sogaten	124.70
	Winongo	200.69
	Total	1248,5
Taman	Banjarejo	182.14
	Demangan	227.54
	Josenan	138.76
	Kejuron	77.50
	Kuncen	34.76
	Manisrejo	176.25

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3
	Mojorejo	141.14
	Pandean	107.15
	Taman	134.23
	Total	1220,6
Total		3612,6

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Curah hujan di wilayah Kecamatan Kartoharjo sebesar 100-300 mm/tahun mencakup luas wilayah 1093,52 Ha. Wilayah di Kecamatan Kartoharjo yang paling luas terkena hujan adalah Kelurahan Rejomulyo dengan luas 203,87 Ha, sedangkan wilayah yang paling kecil yaitu Kelurahan Sukosari dengan luas area 71,51 Ha.

Sementara itu, wilayah Kecamatan Manguharjo turut terkena hujan dengan curah 100-300 mm tiap bulan dengan luas 1282,06 Ha. Kelurahan Winongo merupakan wilayah terluas di Kecamatan Manguharjo yang mendapatkan curah hujan 100-300 mm/bulan dengan luas 200,69 Ha, sedangkan Kelurahan Pangongangan merupakan kelurahan dengan area paling kecil yang terkena curah hujan dengan luasan 68,64 Ha. Kecamatan Taman yang terliputi oleh hujan tercatat seluas 1219,47 Ha. Kelurahan Demangan di Kecamatan Taman merupakan kelurahan dengan luas paling besar yang mendapat hujan dengan curah 100-300 mm/bulan dengan area 227,54 Ha, sedangkan Kelurahan Kuncen adalah wilayah dengan area paling kecil di Kecamatan Taman yang mendapatkan hujan dengan curah yang sama tiap bulannya dengan area 34,76 Ha.

2.1.1.6 Kondisi Geografi

1. Persentase Pemanfaatan Ruang (RTRW)

   Nilai ketaatan terhadap RTRW dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan angka 100%. Hal ini menandakan pembangunan yang dilakukan telah sesuai dengan keterpaduan dan keserasian antara kondisi lapangan dengan kondisi yang telah ditetapkan. Maka, pembangunan yang telah direncanakan di masa depan dapat dilaksanakan.

Tabel 2. 7 Ketaatan Terhadap RTRW, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun, 2025

2. Alih Fungsi Lahan

   Perubahan fungsi dan penggunaan lahan sejatinya terjadi di seluruh Indonesia, karena pada dasarnya penggunaan lahan memiliki sifat yang dinamis dan mengikuti kebutuhan pasar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Setiap Tahunnya, penggunaan lahan berpotensi untuk berubah tergantung dengan aktivitas dominan masyarakat yang berkegiatan di atasnya. Penggunaan lahan di Kota Madiun berdasarkan *review* Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2020–2024, diidentifikasi bahwa wilayah Kota Madiun sebagian besar lahannya digunakan sebagai lahan non-pertanian. Terdapat peningkatan luas lahan non pertanian dan penurunan luas lahan pertanian dari tahun ke tahun yang dapat dilihat lebih jelas melalui tabel berikut:

Tabel 2. 8 Luas Lahan Non-Pertanian Kota Madiun Tahun 2020-2024

PENGGUNAAN LAHAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Luas lahan non-pertanian (Ha)	2.375	2.383	2.571	2.576,61	2.576,61
Luas lahan pertanian (Ha)	1.085	1.078	890	884	884

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2025

Terjadi peningkatan dengan jumlah yang sedikit pada luasan lahan non-pertanian di Kota Madiun yang mengindikasikan bahwa tetap terjadi pergeseran fungsi lahan eksisting menjadi lahan nonpertanian di Kota Madiun.

2.1.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.2.1 Daya Dukung Air Permukaan

1. Perbandingan Antara Ketersediaan dan Kebutuhan Air

   Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air menjadi esensial. Dalam memastikan bahwa dalam pemenuhannya terdapat akses yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota dengan mempertimbangkan perlindungan dan pemeliharaan ekosistem air yang rentan. Berikut disajikan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan air dilakukan dengan tahapan:

   a. Perhitungan Ketersediaan (*Supply*) Air

      Perhitungan dengan menggunakan metode koefisien limpasan yang dimodifikasi dari metode nasional.

      Rumus:

$$C = \sum (ci \times Ai) / \sum Ai$$

$$R = \sum Ri / m$$

$$SA = 10 \times C \times R \times A$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Keterangan:

SA : ketersediaan air (m^3/tahun)

C : koefisien limpasan tertimbang

Ci : koefisien limpasan penggunaan lahan i

Ai : luas penggunaan lahan (ha) dari data pemetaan Revisi RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030

R : Rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah (mm/tahun) 2022 sebesar 3.837,9 mm/tahun (hasil olah data BPS, 2023)

Ri : Curah hujan tahunan pada stasiun i

m : Jumlah stasiun pengamatan curah hujan

A : Luas wilayah (3612,60 ha)

10 : Faktor konversi dari mm.ha menjadi m^3

b. Koefisien Limpasan

Koefisien limpasan dihitung berdasarkan tata guna lahan di masing-masing wilayah sebagai berikut :

Tabel 2. 9 Koefisien Limpasan Tiap Jenis Lahan

No.	Deskripsi jenis Permukaan/Guna Lahan	Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan (Ci)
1.	Kota, Jalan Aspal, Atap Genteng	0,7-0,9
2.	Kawasan industri	0,5-0,9
3.	Permukiman multi unit, pertokoan	0,6-0,7
4.	Kompleks perumahan	0,4-0,6
5.	Taman, pemakaman	0,3-0,5
6.	Pekarangan tanah berat	
	• > 7%	0,25-0,35
	• 2-7%	0,18-0,22
	• < 2%	0,13-0,17
7.	Pekarangan ringan	
	• > 7%	0,15-0,2
	• 2-7%	0,10-0,15
	• < 2%	0,05-0,10
8.	Lahan berat	0,4
9.	Padang rumput	0,35
10.	Lahan budidaya pertanian	0,3
11.	Hutan produksi	0,18
12.	Hutan tropis basah	0,03
13.	Semak belukar	0,07
14.	Sawah-sawah	0,15
15.	Daerah pertanian	0,4
16.	Daerah permukiman	0,7
17.	Bangunan padat	0,70-0,90
18.	Bangunan terpencar	0,30-0,90
19.	Jalan aspal	0,95
20.	Jalan tanah	0,13-0,50

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Deskripsi jenis Permukaan/Guna Lahan	Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan (Ci)
21.	Lapir keras kerikil batu pecah	0,35-0,70
22.	Lapis keras beton	0,70-0,90
23.	Taman, halaman	0,05-0,25
24.	Tanah, lapang	0,10-0,30
25.	Kebun, ladang	0,00-0,20

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

c. Ketersediaan Air Tahun 2023 (SA)

Dalam menghitung ketersediaan air, disajikan perhitungan koefisien limpasan tertimbang sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang pada Tutupan Lahan

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha) (Ai)	Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan	(AixCi)
Badan Jalan	220,217751	0,9	198,2
Fasilitas Kesehatan	13,1038368	0,7	9,17
Fasilitas Olahraga	27,9809063	0,7	19,59
Fasilitas Pemerintahan	84,828345	0,7	59,38
Fasilitas Pendidikan	97,5198312	0,7	68,26
Fasilitas Peribadatan	9,71376695	0,7	6,8
Fasilitas Transportasi	11,1643817	0,7	7,82
Industri	41,8495258	0,9	37,66
Infrastruktur Perkotaan	10,428435	0,7	7,3
Jalur Hijau	15,9420191	0,5	7,97
Pariwisata	1,54913675	0,7	1,08
Pemakaman	26,6178228	0,5	13,31
Perdagangan dan Jasa	47,5593749	0,7	33,29
Pergudangan	32,1811268	0,7	22,53
Perkantoran Swasta	2,95063059	0,7	2,07
Permukiman	1571,55275	0,7	1100,09
Pertahanan dan Keamanan	27,9653785	0,7	19,58
Pertanian Tanah Basah	1176,69641	0,15	176,5
Pertanian Tanah Kering	2,13792498	0,2	0,43
Pulau Jalan	0,65061536	0,5	0,33
Sempadan Rel KA	7,00684455	0,35	2,45
Sempadan Sungai	56,8690027	0,3	17,06
Sungai	43,5332837	0,1	4,35
Taman	21,0251544	0,25	5,26
Tanah Kosong	56,8582972	0,3	17,06
Waduk	2,10901504	0,1	0,21
Total	3.612,60		1837,7

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Ketersediaan air Kota Madiun berdasarkan persamaan rasional Permen Lingkungan Hidup (LH) No. 17 Tahun 2009 diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$C = \sum (ci \times Ai) / \sum Ai$

$= 1837,74/3612,60$

$= 0,51$

$R = 3.837,9$ mm/tahun

$SA = 10 \times C \times R \times A$

$= 10 \times 0,51 \times 3.387,9 \times 3610,011564$

$= 62.419.550,5\ m^3$/tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Potensi limpasan air maksimal yang dapat disimpan di dalam tanah sebesar 62.419.550,5 m^3/tahun. Potensi tersebut dimungkinkan tidak seluruhnya tersimpan di dalam tanah karena dipengaruhi beberapa faktor fisik alam seperti jenis tanah, geologi dan kelerengan.

d. Ketersediaan Air Tahun 2030 (SA)

Tabel 2. 11 Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang pada Tutupan Lahan

No.	Substansi	Luas Rencana (Ha)	Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan (Ci)	Ci x Ai
1.	Badan Air	43,05	0,1	4,31
2.	Kawasan Perlindungan Setempat	92,38	0,3	27,71
3.	Ruang Terbuka Hijau	124,01	0,25	31
4.	Badan Jalan	59,88	0,7	41,92
5.	Kawasan Pertanian	569,05	0,15	85,36
6.	Kawasan Peruntukan Industri	85,1	0,9	76,59
7.	Kawasan Pariwisata	18,14	0,7	12,7
8.	Kawasan Permukiman	2.068,89	0,7	1448,22
9.	Kawasan Perdagangan Jasa	422,88	0,7	296,02
10.	Kawasan Perkantoran	55,4	0,7	38,78
11.	Kawasan Transportasi	13,92	0,7	9,74
12.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	59,9	0,7	41,93
Total Jumlah		3.612,60		2114,3

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Perhitungan koefisien limpasan tertimbang pada rencana pola ruang yang sudah terkonversi:

C = $\sum$ (ci x Ai)/ $\sum$Ai = 2.114,28/3.612,60 = 0,59

R = 3.837,9 mm/tahun

SA = 10 x C x R x A = 10 x 0,59 x 3.837,9 x 3.612,60

= 81.802,305,5 m^3/tahun

Potensi limpasan air maksimal yang dapat disimpan di dalam tanah sebesar 81.802,305,5 m^3/tahun. Potensi tersebut dimungkinkan tidak seluruhnya tersimpan di dalam tanah karena dipengaruhi beberapa faktor fisik alam seperti jenis tanah, geologi dan kelerengan.

2. Perhitungan Kebutuhan (*Demand*) Air (DA)

Kebutuhan air untuk hidup dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan standar kebutuhan air berpedoman pada standar yaitu:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Kebutuhan air penduduk sebesar 120 liter/orang/hari atau 43,8 m^3/kapita/tahun. Berdasarkan NDAS dan Buku Daya Dukung Lingkungan untuk perencanaan wilayah, 2012;
- Kebutuhan air untuk kegiatan pertanian sebesar 0,231 liter/detik/ha dengan jenis penggunaan lahan sawah irigasi dan kebun campur. Berdasarkan Modul 10 Kebutuhan Air, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, 2000;
- Kebutuhan air untuk kegiatan industri 0,2-0,8 liter/detik/ha. Berdasarkan standar Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, 2000;
- Kebutuhan air untuk ternak meliputi sapi/kerbau (40 liter/detik/ternak), domba/kambing (5 liter/detik/ternak), babi (6 liter/detik/ternak) dan unggas (0,6 liter/detik/ternak).

Kebutuhan air total dirumuskan sebagai berikut:

DA = N x KHLA

Dimana:

DA = Total kebutuhan air (m^3/tahun)

N = Jumlah penduduk = 199.192 jiwa

KHLA = Kebutuhan air untuk hidup layak

3. Kebutuhan Air Tahun 2023

Tabel 2. 12 Perhitungan Kebutuhan Air

Uraian	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan air (liter/orang/hari)	Kebutuhan air (m^3/tahun)
Jumlah Penduduk	199.192	orang	120	8.724.610
Uraian	Besaran Luas Lahan	Satuan	Kebutuhan air (liter/detik/ha)	Kebutuhan air (m^3/tahun)
Sawah	1.176,70	Ha	0,231	12.200.025,60
Kawasan Industri	41,85	Ha	0,75	989.836,20
Uraian	Jumlah Ternak	Satuan	Kebutuhan air (liter/ternak/hari)	Kebutuhan air (m^3/tahun)
Sapi	318	ekor	40	4.642,80
Kerbau	8	ekor	40	1.16,8
Kambing	2.918	ekor	5	5.325,35
Domba	992	ekor	5	1.810,40
Unggas	87.762	ekor	0,6	19.219,88
Total				21.945.586,63

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Kota Madiun membutuhkan air untuk pemenuhan kebutuhan penduduk, kegiatan pertanian, industri dan peternakan sebesar 21.945.586,63 m^3/tahun. Hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan air tahun 2023 lebih kecil dari ketersediaan air tahun 2023 (62.419.550,5 m^3/tahun), sehingga dapat diartikan bahwa daya dukung air Kota Madiun Tahun 2023 memiliki status **surplus**.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Kebutuhan Air Tahun 2045

Tabel 2. 13 Kebutuhan Air Kota Madiun Tahun 2045

Uraian	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan air (liter/orang/hari)	Kebutuhan air (m^3/tahun)
Proyeksi Jumlah Penduduk	260.293	orang	120	31.235,16
Uraian	Besaran Luas Lahan	Satuan	Kebutuhan air (liter/detik/ha)	Kebutuhan air (m3/tahun)
Kawasan Peruntukan pertanian	569,05	Ha	0,231	5.899.910,40
Kawasan peruntukan industri	85,1	Ha	0,231	2.012.785,20
Uraian	Jumlah Ternak	Satuan	Kebutuhan air (liter/ternak/ha)	Kebutuhan air (m3/tahun)
Sapi	318	ekor	40	4.642,80
Kerbau	8	ekor	40	1.16,8
Kambing	2.918	ekor	5	5.325,35
Domba	992	ekor	5	1.810,40
Unggas	87.762	ekor	0,6	19.219,88
Total				7.975.045,99

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Pemenuhan kebutuhan air di Kota Madiun untuk kebutuhan penduduk, kegiatan pertanian, industri dan peternakan sebesar 7.975.045,99 m3/tahun. Hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan air tahun 2045 lebih kecil dari ketersediaan air tahun 2045 (81.802,305,5 m3/tahun). Kebutuhan air yang sangat jauh berkurang dibandingkan dengan tahun 2023 disebabkan menyusutnya lahan pertanian yang semula seluas 1.176,7 Ha (kondisi eksisting) menjadi hanya 569,05 (Rencana Pola Ruang Kota Madiun dalam Revisi RTRW Kota Madiun, 2022) yang berpengaruh terhadap jumlah kebutuhan air pada sektor pertanian. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa daya dukung air Kota Madiun tahun 2045 berstatus surplus.

2.1.2.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Pertanian

Analisis daya dukung pertanian menjadi hal yang penting karena jumlah penduduk yang semakin meningkat mendorong permintaan tanaman pangan yang meningkat pula. Daya dukung wilayah untuk lahan pertanian merupakan kemampuan suatu wilayah guna memenuhi kebutuhan pangan penduduk setempat untuk dapat hidup sejahtera. Analisis daya dukung terkait dengan kegiatan pertanian perlu dilakukan khususnya berkaitan dengan kebutuhan akan pangan. Hal ini berguna untuk kemudian mempersiapkan skenario kebutuhan bukan hanya untuk sekarang namun juga kebutuhan untuk masa depan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Hal ini dikarenakan daya dukung merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Daya dukung lahan pertanian adalah kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi beras guna memenuhi kebutuhan pangan penduduk setempat untuk hidup sejahtera atau mencapai kondisi swasembada beras.

Konsep yang digunakan untuk memahami ambang batas kritis daya dukung ini adalah suatu jumlah populasi yang terbatas dan dapat didukung tanpa menurunkan derajat lingkungan yang alami sehingga ekosistem dapat terpelihara. Secara khusus, kemampuan daya dukung pada sektor pertanian diperoleh dari perbandingan antara lahan yang tersedia dengan jumlah petani, sehingga data yang perlu diketahui adalah luas panen, jumlah penduduk, kebutuhan fisik minimum dan produksi lahan rata-rata per hektar. Perhitungan daya dukung wilayah untuk pertanian menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\tau = \frac{\frac{LP}{Pd}}{\frac{KFM}{Pr}}$$

Keterangan:

τ = daya dukung wilayah pertanian

Lp = luas panen (ha)

Pd = jumlah penduduk (jiwa)

KFM = Kebutuhan Fisik Minimum (kg/kapita/tahun),
480 kg/kapita/tahun

Pr = produksi lahan rata-rata per hektar (kg/ha)

Sebagai indikator yang digunakan adalah ketersediaan bahan makanan utama yaitu beras, dengan asumsi bila:

τ < 1 berarti suatu wilayah tidak mampu melaksanakan swasembada pangan, atau dapat diartikan bahwa jumlah penduduknya telah melebihi jumlah penduduk optimal.

τ > 1 berarti suatu wilayah mampu melaksanakan swasembada pangan, dalam arti jumlah penduduknya di bawah jumlah penduduk optimal.

τ = 1 berarti suatu wilayah memiliki daya dukung lingkungan optimal.

1. Daya Dukung Lingkungan Lahan Pertanian Tahun 2024

   Daya dukung lingkungan lahan pertanian Kota Madiun berdasarkan daya dukung lingkungan tiap kabupaten yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 14 Daya Dukung Lahan Pertanian Kota Madiun Tahun 2024

Kecamatan/ Kelurahan	Luas Panen (Ha)	KFM (kg/kapita/th)	Produksi Lahan Rata-rata (kg/ha)	DDL	STATUS
Kota Madiun	2,251		7.00		

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2025

Secara umum, kabupaten/kota di Kota Madiun memiliki luas lahan 2.251 Ha dan produksi lahan rata-rata sebesar 7 kg/ha. Namun untuk data status daya dukung lahan pertanian tahun 2024 datanya belum tersedia.

2. Daya Dukung Lingkungan Lahan Pertanian Tahun 2045

Daya dukung lingkungan lahan pertanian tahun 2045 Kota Madiun dilakukan dengan memproyeksikan jumlah penduduk pada tahun tersebut, sedangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi daya dukung lingkungan lahan pertanian diasumsikan tetap. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Madiun ialah 1,17%. Secara rinci kondisi daya dukung lahan pertanian Kota Madiun disajikan pada tabel di bawah ini.

3. Daya Dukung Lahan Pertanian Kota Madiun Tahun 2045

Tabel 2. 15 Daya Dukung Lahan Pertanian Kota Madiun Tahun 2045

Proyeksi Jumlah Penduduk	Luas Panen (Ha)	KFM (kg/kapita/th)	Produksi Lahan Rata-rata (kg/ha)	DDL	STATUS
260.293	2.174	480	5.331,19	0,09	Defisit

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Secara umum, Kota Madiun memiliki status daya dukung lahan pertanian < 1, yang berarti statusnya defisit atau masih belum mampu melakukan swasembada pangan.

2.1.2.3 Daya Dukung Lahan Terbangun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tentang kumpulan rumah sebagai bagian dari Daya Dukung Lahan Permukiman baik dan masih mampu mendukung permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Secara umum karakteristik permukiman yang ada di Kota Madiun cenderung mendekati pusat-pusat kegiatan. Hal ini terjadi karena pertimbangan efisiensi jarak dan waktu. Selain itu sejumlah kemudahan yang ditawarkan dari adanya fasilitas pelayanan dan utilitas kota yang lebih banyak terdapat pada pusat kota merupakan salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Apabila tidak diikuti dengan pembangunan fasilitas dan utilitas kota yang lebih merata, hal ini akan berdampak buruk pada struktur ruang kota, dimana perkembangan kota akan semakin tidak merata karena tersentralisasi pada suatu wilayah.

Tabel 2. 16 Daya Dukung Lahan Permukiman di Kota Madiun Tahun 2023

KECAMATAN	DESA	Luas Wilayah (Ha)	Luas Bangunan (Ha)	Luas Lahan Terbangun (Ha)	DDLB
1	2	3	4	5	6
Kartoharjo	Kanigoro	164,09	91,12	99,88	1,15
	Kartoharjo	76,56	59,72	67,57	0,79
	Kelun	125,83	31,79	39,00	2,26
	Klegen	89,08	62,01	69,93	0,89
	Oro-oro Ombo	117,74	76,94	88,81	0,93
	Pilangbango	115,45	49,36	56,22	1,44
	Rejomulyo	216,19	84,44	98,76	1,53
	Sukosari	57,65	27,42	32,47	1,24
	Tawangrejo	179,96	55,59	63,99	1,97
Total		1143,54	538,39	616,63	1,30
Manguharjo	Madiun Lor	124,02	89,53	109,76	0,79
	Manguharjo	337,79	116,39	140,99	1,68
	Nambangan Kidul	84,99	62,61	74,21	0,80
	Nambangan Lor	67,05	56,28	62,09	0,76
	Ngegong	156,33	67,96	81,21	1,35
	Pangongangan	66,67	34,15	45,30	1,03
	Patihan	107,23	69,30	80,65	0,93
	Sogaten	119,26	43,12	59,41	1,41
	Winongo	184,35	58,96	77,71	1,66
Total		1247,69	598,29	731,33	1,19
Taman	Banjarejo	189,98	101,49	112,76	1,18
	Demangan	216,79	101,52	113,77	1,33
	Josenan	160,87	66,82	75,32	1,50
	Kejuron	72,09	56,52	64,81	0,78
	Kuncen	23,73	14,55	15,85	1,05
	Manisrejo	162,52	121,61	132,36	0,86
	Mojorejo	125,17	102,46	114,00	0,77
	Pandean	141,22	99,26	114,63	0,86
	Taman	127,39	102,34	120,17	0,74
Total		1219,79	766,58	863,67	0,99
Kota Madiun		36126	1903,26	2211,63	1,14

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Nilai daya dukung lahan bangunan (DDLB) di Kota Madiun dan semua kecamatannya termasuk dalam kategori sedang atau bersyarat. Apabila dilihat dari lingkup kelurahan diketahui bahwa Kelurahan Kelun merupakan kelurahan dengan nilai DDLB tertinggi sebesar 2,26 sedangkan Kelurahan Taman merupakan kelurahan dengan skor DDLB terendah yaitu 0,74 yang menandakan nilai DDLB di Kelurahan Taman berkategori buruk. Secara keseluruhan terdapat 12 kelurahan di Kota Madiun yang berada dalam kategori DDLB buruk, dan setengahnya berada di WP Taman yang memiliki kelurahan dengan kategori buruk sejumlah 6 kelurahan. Kota Madiun perlu menjaga kualitas lingkungan terbangun dalam pengembangannya dan harus diikuti dengan upaya menjaga kualitas lingkungan, sehingga lahan tetap mempunyai kemampuan dalam mendukung aktivitas yang ada di atasnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.1.2.4 Daya Dukung Fungsi Lindung

1. Menghitung tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung

Daya dukung fungsi lindung memiliki kisaran nilai antara 0 (minimal) hingga 1 (maksimal). Artinya Ketika nilai mendekati angka 1, maka semakin baik fungsi lindung yang ada dalam wilayah, sementara itu Ketika nilai mendekati – maka fungsi lindung semakin buruk atau lebih berfungsi sebagai Kawasan budidaya.

Tabel 2. 17 Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung

Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	Rentang Nilai DDL
Sangat rendah	0 – 0,20
Rendah	0,20 – 0,40
Sedang	0,40 – 0,60
Baik	0,60 – 0,80
Sangat Baik	0,80 - 1

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Tabel 2. 18 Koefisien Lindung Lahan Berdasarkan Jenis Guna Lahan

Jenis tata guna lahan	Koefisien
Cagar alam	1
Hutan Lindung	1
Hutan Cadangan	0,61
Hutan Produksi	0,68
Perkebunan rakyat	0,42
Persawahan	0,46
Ladang/tegalan	0,21
Padang rumput	0,28
Danau/tambak	0,98
Tanaman kayu	0,37
Permukiman	0,18
Tanah kosong	0,01

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

2. Perhitungan luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kota Madiun

Rumus perhitungan Daya Dukung fungsi lindung yaitu:

$$DDL = \frac{\sum Lgl1.\alpha 1 + Lgl2.\alpha 2 + Lgl3.\alpha 3 + \cdots + Lgln.\alpha n}{LW}$$

Keterangan:

DDL = Daya Dukung Fungsi Lindung

Lgln = Luas Guna Lahan Jenis n (Ha)

an = Koefisien Lindung untuk Guna Lahan

LW = Luasan wilayah (Ha)

Luas Guna Lahan jenis n dianalisis dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2045 pada peta pola ruang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 19 Hasil Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kota Madiun

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha) (Ai)	Luas (%)	Koefisien Lindung (Ci)	(Ai*Ci)
1	2	3	4	5
Badan Jalan	220,21	6,1	0,18	39,6392
Fasilitas Kesehatan	13,10	0,36	0,18	2,3587
Fasilitas Olahraga	27,98	0,78	0,18	5,0366
Fasilitas Pemerintahan	84,82	2,35	0,18	15,2691
Fasilitas Pendidikan	97,51	2,7	0,18	17,5536
Fasilitas Peribadatan	9,71	0,27	0,18	1,7485
Fasilitas Transportasi	11,16	0,31	0,18	2,0096
Industri	41,84	1,16	0,18	7,5329
Infrastruktur Perkotaan	10,42	0,29	0,18	1,8771
Jalur Hijau	15,94	0,44	1	15,9420
Pariwisata	1,54	0,04	0,82	1,2703
Pemakaman	26,61	0,74	1	26,6178
Perdagangan dan Jasa	47,55	1,32	0,18	8,5607
Pergudangan	32,18	0,89	0,18	5,7926
Perkantoran Swasta	2,95	0,08	0,18	0,5311
Permukiman	1571,55	43,53	0,18	282,8795
Pertahanan dan Keamanan	27,96	0,77	0,18	5,0338
Pertanian Tanah Basah	1176,6	32,6	0,46	541,2803
Pertanian Tanah Kering	2,13	0,06	0,46	0,9834
Pulau Jalan	0,65	0,02	0,18	0,1171
Sempadan Rel KA	7,00	0,19	0,18	1,2612
Sempadan Sungai	56,86	1,58	0,98	55,7316
Sungai	43,53	1,21	0,98	42,6626
Taman	21,02	0,58	1	21,0252
Tanah Kosong	56,85	1,58	0,01	0,5686
Waduk	2,10	0,06	0,98	2,0668
Total	3612,61	100	10,57	1105,3500

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

DDL Fungsi Lindung = 1105,35/3612,6 = 0,30

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diketahui bahwa daya dukung fungsi lindung di Kota Madiun tergolong dalam kelas rendah sehingga dapat dikatakan bahwa Kota Madiun lebih berfungsi sebagai kawasan budidaya.

2.1.2.5 Daya Tampung Wilayah

Daya tampung wilayah dalam pendekatan ini adalah sebuah kebalikan dari kepadatan penduduk yaitu dengan menggunakan perbandingan atau standar yang ada tentang kebutuhan lahan. Menurut Yeates (1980) dalam Muta'ali (2021) daya dukung lahan dapat diidentifikasi dari daya tampung dan dihitung berdasarkan luasan fungsi lahan dibagi dengan jumlah penduduk eksisting dihitung dari kebutuhan lahan per kapita. Rumus tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

A = L / P

A = daya dukung lahan

L = luas lahan (ha)

P = populasi penduduk (jiwa)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Nilai A dibandingkan dengan konsumsi lahan, apabila nilai daya dukung lahan (A) melebihi nilai konsumsi lahan yang ditentukan (standar Yates) maka dikatakan populasi penduduk pada wilayah tersebut sudah melebihi daya dukung lingkungannya (diluar ambang batas). Nilai daya dukung lahan ditunjukkan dengan konsumsi lahan per kapita untuk berbagai ukuran populasi kota.

Tabel 2. 20 Konsumsi Lahan Per Kapita

No.	Populasi Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Lahan (ha/jiwa)
1.	10.000	0,100
2.	25.000	0,091
3.	50.000	0,086
4.	100.000	0,076
5.	250.000	0,070
6.	500.000	0,066
7.	1.000.000	0,061
8.	2.000.000	0,057

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Berdasarkan persamaan rumus dan standar di atas, hasil perhitungan daya tampung wilayah Kota Madiun sebagai berikut:

L = 3612.6 ha (BPS Kota Madiun)

P (2022) = 199.192 jiwa (BPS, 2023)

P (2045) = 263.068 jiwa (hasil perhitungan proyeksi)

Sehingga dihasilkan:

Daya dukung lahan tahun 2022

A tahun 2022 = L / P

= 3.612,6/ 199.192

= 0,016 ha/jiwa

Adapun proyeksi daya tampung wilayah Kota Madiun tahun 2030-2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 21 Proyeksi Daya Tampung Wilayah Kota Madiun menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Penduduk (Jiwa)			DDT Demografis		
			2030	2035	2045	2030	2035	2045
1	Mangunharjo	1248	61178	64795	72682	0.0204	0.0193	0.0172
2	Taman	1220	88488	93719	105127	0.0138	0.0130	0.0116
3	Kartoharjo	1143	56510	59850	67136	0.0202	0.019	0.017
Kota Madiun		3612,6	206176	218364	244945	0,175	0.0165	0.0147

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Hasil Perhitungan di atas menghasilkan daya dukung lahan di Kota Madiun pada tahun 2022 sebesar 0,016 ha/jiwa dan tahun 2044 sebesar 0,014 ha/jiwa. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan standar kriteria Yeates maka Kota Madiun memiliki daya tampung wilayah yang masih mampu untuk menampung jumlah penduduk hingga akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2045.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 22 Kesimpulan Hasil Analisis Daya Dukung Lingkungan Kota Madiun

No	Daya Dukung	Kondisi
1	Pangan (Beras)	Kota Madiun mengalami defisit dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang berarti Kota Madiun belum dapat melakukan swasembada pangan karena ketersediaan beras lebih kecil dibandingkan kebutuhan beras. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk maupun luas lahan ditanami padi menurun sehingga menjadi faktor bahwa Kota Madiun akan mengalami defisit beras dari tahun 2023 hingga tahun 2045
2	Fungsi Lindung	Secara keseluruhan daya dukung lingkungan untuk fungsi lindung di Kota Madiun kategori rendah sehingga dapat diartikan sebagai kemampuan kawasan dengan berbagai penggunaan lahan di dalamnya kurang mampu memberikan perlindungan dan menjaga keseimbangan ekosistem dan lebih cenderung menjadi kawasan budidaya.
3	Air	Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa daya dukung air Kota Madiun tahun 2023-2045 berstatus surplus.
4	Daya Dukung Lahan Permukiman	Nilai daya dukung lahan untuk bangunan (DDLB) sebesar 1,17 yang termasuk dalam daya dukung lahan terbangun bersyarat atau sedang
5	Daya Tampung Wilayah	Berdasar standar kriteria Yeates maka Kota Madiun memiliki daya tampung wilayah yang masih mampu untuk menampung jumlah penduduk hingga akhir tahun perencanaan yaitu pada tahun 2045.

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

2.1.2.6 Perkiraan Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

1. Kerusakan Lingkungan

   Kerusakan lingkungan berkaitan dengan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari aspek fisik, ekonomi, sosial, dan budaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang terjadi akibat kurangnya pengelolaan dan pengawasan ataupun perlindungan oleh berbagai pihak. Kerusakan lingkungan di Kota Madiun dapat diindikasikan dari lahan kritis dan alih fungsi lahan.

   a. Lahan Kritis

      Lahan kritis adalah lahan yang secara penggunaan sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, sementara dari aspek kemampuannya lahan tersebut sudah tidak mampu untuk mendukung aktivitas yang dilakukan di atasnya akibat mengalami kerusakan pada aspek fisik, kimia, dan biologi. Dampak dari lahan kritis adalah terancamnya fungsi hidrologis, orologis, produksi pertanian, dan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya yang berlangsung di atasnya atau pada unit wilayah yang dipengaruhinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lahan kritis dapat disebabkan oleh faktor alam dan faktor non-alam. Faktor alam meliputi erosi, banjir, dan kekeringan. Faktor non-alam meliputi pencemaran dari penggunaan bahan pupuk atau pestisida yang berlebihan dan juga akibat limbah dan perubahan penggunaan lahan yang terjadi sebagai dampak dari kegiatan pembangunan.

Berdasarkan IKPLHD Kota Madiun pada Tahun 2021, munculnya lahan kritis di Kota Madiun tidak teridentifikasi pada kawasan hutan maupun kawasan non-hutan. Lahan kritis yang tercatat adalah seluas 0 ha sehingga secara data tidak terdapat lahan kritis di Kota Madiun. Mengingat fungsi perkotaan yang dimiliki oleh Kota Madiun, walaupun tidak ada lahan kritis yang tercatat namun bisa saja tetap ada lahan kritis eksisting dan tentunya berpotensi mengalami peningkatan pada masa yang akan datang apabila tidak terdapat upaya pengelolaan dan pengawasan lingkungan yang baik.

b. Alih Fungsi Lahan

Perubahan fungsi dan penggunaan lahan sejatinya terjadi di seluruh Indonesia, karena pada dasarnya penggunaan lahan memiliki sifat yang dinamis dan mengikuti kebutuhan dari pasar. Setiap tahunnya, penggunaan lahan berpotensi untuk berubah tergantung dengan aktivitas dominan masyarakat yang berkegiatan di atasnya. Penggunaan lahan di Kota Madiun berdasarkan review IKPLHD Kota Madiun tahun 2021, diidentifikasi bahwa wilayah Kota Madiun sebagian besar lahannya digunakan sebagai lahan non-pertanian, dimana luasan lahan non-pertanian tersebut berkisar sekitar 70% dari total luas wilayah dengan luasan sebesar 2.383,06 ha. Dibandingkan secara waktu, terdapat peningkatan luas lahan non-pertanian dan penurunan luas lahan pertanian dari 2020 hingga 2024 yang dapat dilihat lebih jelas melalui tabel berikut:

Tabel 2. 23 Luas Lahan Non-Pertanian Kota Madiun Tahun 2020-2024

PENGGUNAAN LAHAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Luas lahan non-pertanian (Ha)	2,375	2,383	2,571	2,576.61	2,576.61
Luas lahan pertanian (Ha)	1,085	1,078	890	884	884

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pada tahun 2020 hingga 2022 terjadi peningkatan pada luasan lahan non pertanian dan penurunan luas lahan pertanian yang mengindikasikan bahwa tetap terjadi pergeseran fungsi lahan eksisting menjadi lahan non-pertanian di Kota Madiun. Sedangkan pada tahun 2023 luas lahan non-pertanian mengalami sedikit peningkatan dan luas lahan pertanian yang mengalami sedikit penurunan. Namun di tahun 2024, luas penggunaan lahan baik pertanian dan non-pertanian tidak mengalami perubahan atau sama seperti tahun 2023.

2.1.3 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.3.1 Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah (kab/kota). Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota).

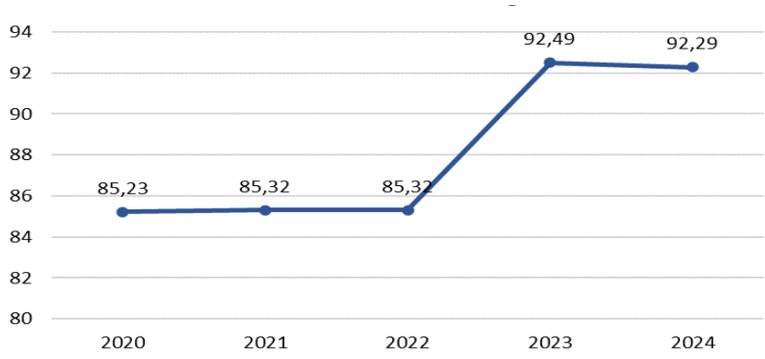

Gambar 2. 4 Indeks Ketahanan Pangan Kota Madiun 2020-2024
Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Indeks Ketahanan Pangan dari tahun 2020-2024 perkembangannya cenderung meningkat. Pada tahun 2020, skor IKP berada di angka 85,23. Angka ini menurun pada tahun 2021 hingga 82,32. Tahun 2022, angka IKP tidak mengalami perubahan. Namun di tahun-tahun berikutnya skor IKP menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hingga tahun 2023, skor IKP Kota Madiun mencapai 92,49. Tahun 2024, terjadi sedikit penurunan skor IKP, yaitu turun sebesar 0,2% atau sebesar 92,29 persen.

2.1.3.2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau (*Prevalence of Undernourishment*) adalah proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat dan aktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan pada tahun tertentu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

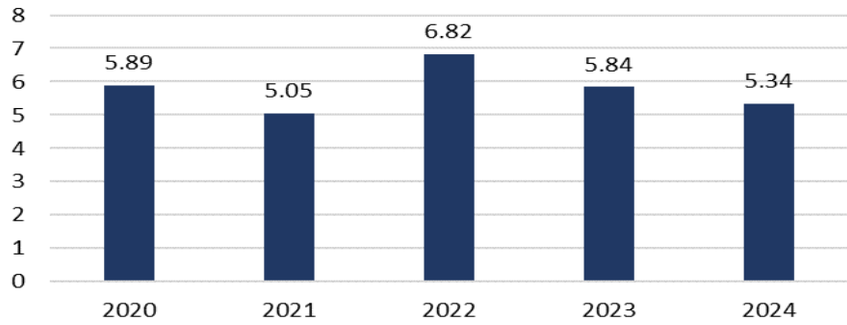

Gambar 2. 5 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kota Madiun dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang fluktuatif. Di tahun 2020, prevalensi ketidakcukupan pangan berada di angka 5,89. Angka ini menurun menjadi 5,05 di tahun 2021 dan meningkat kembali menjadi 6,82 di tahun 2022. Di tahun 2023 capaian ini menjadi 5,84. Adapun data prevalensi ketidakcukupan pangan tahun 2024 sebesar 5,34.

2.1.3.3 Penduduk Berakses Air Minum

Penduduk berakses air minum Kota Madiun dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan. Data menunjukan bahwa dari tahun 2020 persentase penduduk yang berakses air minum mencapai 96,58 persen. Angka ini terus meningkat hingga tahun 2023 dan 2024, yang mana persentase penduduk berakses air minum mencapai 100 persen. Hal ini berarti bahwa seluruh penduduk Kota Madiun sudah memiliki akses air minum.

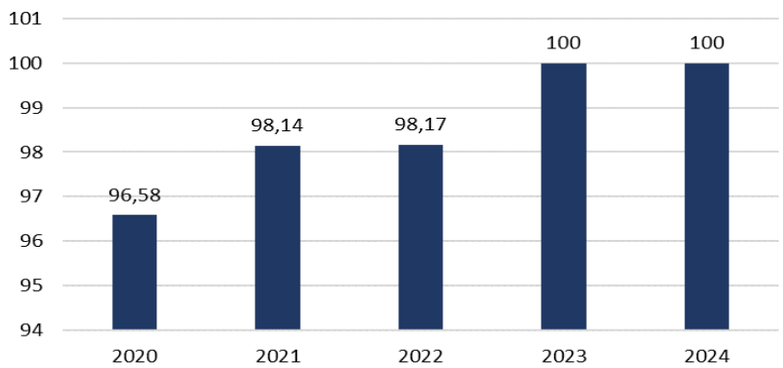

Gambar 2. 6 Penduduk Berakses Air Minum Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Lebih lanjut, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan di Kota Madiun berada pada angka yang stagnan, yaitu pada kisaran 99%. Di tahun 2020, persentase rumah tangga dengan akses terhadap air siap minum Kota Madiun adalah 99,71%. Angka tersebut naik pada tahun berikutnya dan stagnan hingga tahun 2023 dan tahun 2024 pada angka 99,86%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.1.4 Lingkungan Hidup Berkualitas

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dihitung berdasarkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Nilai dari IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi untuk meningkatkan fungsi lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

2.1.4.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nilai IKLH Kota Madiun tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan penurunan setiap tahun, yaitu 63,87 pada tahun 2019 dan menurun hingga 57,9 pada tahun 2023. Namun demikian, pada tahun 2024 skor IKLH menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 62,21. Tren yang fluktuatif ini terjadi akibat perhitungan komponen IKLH yang terdiri atas Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Dalam mencapai IKLH terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi termasuk faktor penghambat dan pendorong, salah satu bentuk faktor penghambat adalah salah satunya adalah kurangnya ketaatan pelaku usaha utk melakukan pengelolaan limbah cair, selain itu kurangnya sarpras untuk pengelolaan air limbah dari rumah tangga juga menambah panjang daftar faktor penghambat tersebut, akan tetapi hal tersebut dapat. faktor pendorong adalah anggaran yang memadai, hal ini memberikan dukungan dalam mengintervensi dan mengontrol pencemaran lingkungan.

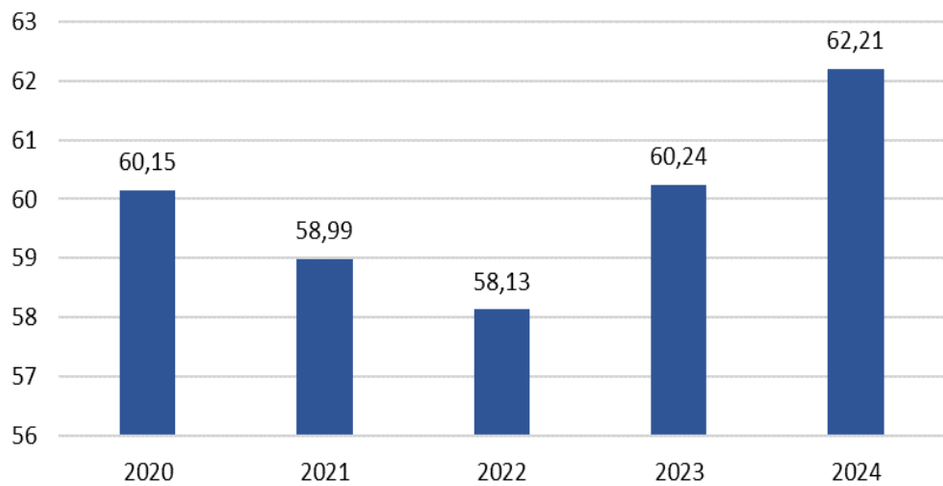

Gambar 2. 7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2025

2.1.4.2 Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air dapat diukur dengan metode indeks pencemaran air sungai (PI).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Metode ini digunakan untuk menilai kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Dari hasil perhitungan metode ini juga dapat dilihat kandungan apa saja yang terdapat di sampel air tersebut dan dapat digunakan untuk dasar tindakan jika terjadi penurunan kualitas karena adanya senyawa pencemar. Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Indeks Kualitas Air mengalami tren penurunan, yaitu dari 78,3 pada tahun 2020 menjadi 21,14 pada tahun 2024. Pada tahun 2024, terjadi penurunan signifikan dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 51,43.

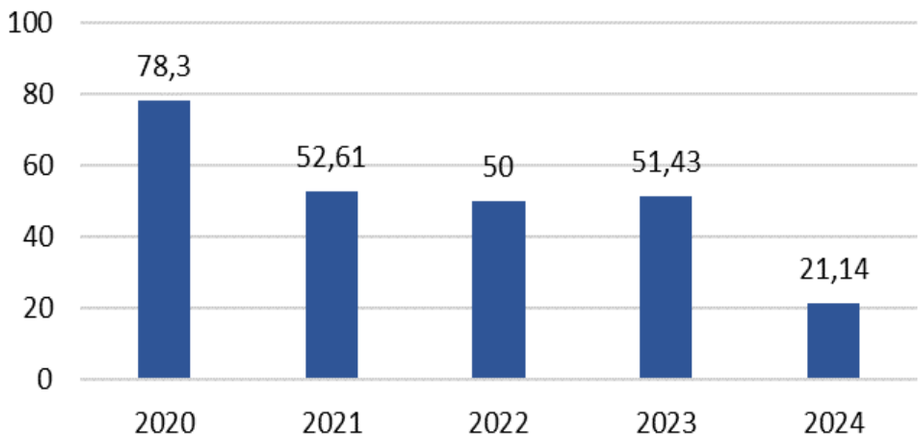

Gambar 2. 8 Indeks Kualitas Air Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2025

2.1.4.3 Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) dihitung berdasarkan kadar kandungan Sulfur Dioksida (SO2) dan Nitrogen Dioksida (NO2) di udara. Penghitungan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Hasil dari perhitungan indeks ini dapat dimanfaatkan untuk memberi informasi yang mudah dipahami bagi masyarakat terkait kualitas udara dan dasar dalam penyusunan terkait kebijakan untuk memperbaiki maupun menjaga kualitas udara untuk manusia dan ekosistem. Pada tahun 2020 Indeks Kualitas Udara berada di angka 87,94. Namun pada tahun 2021 angka ini turun menjadi 83,78. Indeks Kualitas Udara kembali meningkat secara konstan pada tahun setelahnya. Pada tahun 2024 Indeks Kualitas Udara meningkat sebesar 92,12 dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 87,94. Indeks Kualitas Udara pada tahun 2024 menjadi angka tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

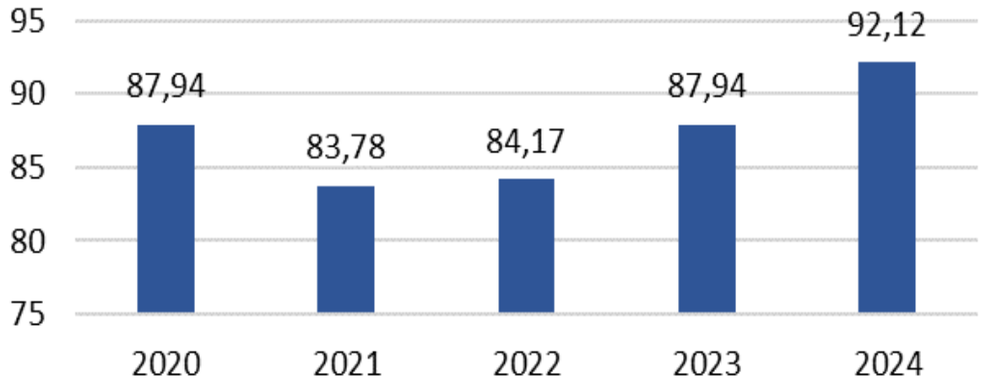

Gambar 2. 9 Indeks Kualitas Udara Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2025

2.1.4.4 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks tutupan lahan di Kota Madiun diperoleh berdasarkan perhitungan ruang terbuka hijau dan lahan perkebunan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) berperan untuk membantu menyerap emisi yang dihasilkan oleh penduduk Kota, memperbaiki iklim mikro kota dan mempercantik keindahan kota (fungsi estetika). RTH di Kota Madiun terdiri dari RTH publik dan RTH privat.

Hutan di wilayah Kota Madiun berupa hutan kota yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan dan lahan perkebunan merupakan kebun campuran yang sebagian besar milik masyarakat. Selain dari hutan kota dan perkebunan, tutupan lahan juga diperhitungkan dari taman pada jalur jalan kota, taman pada monumen dan gerbang kota, taman pada makam dan lapangan olahraga, taman lintasan kereta api, taman kantor, taman gedung komersial, daerah penyangga industri, sempadan SUTT, sempadan sungai dan sempadan mata air.

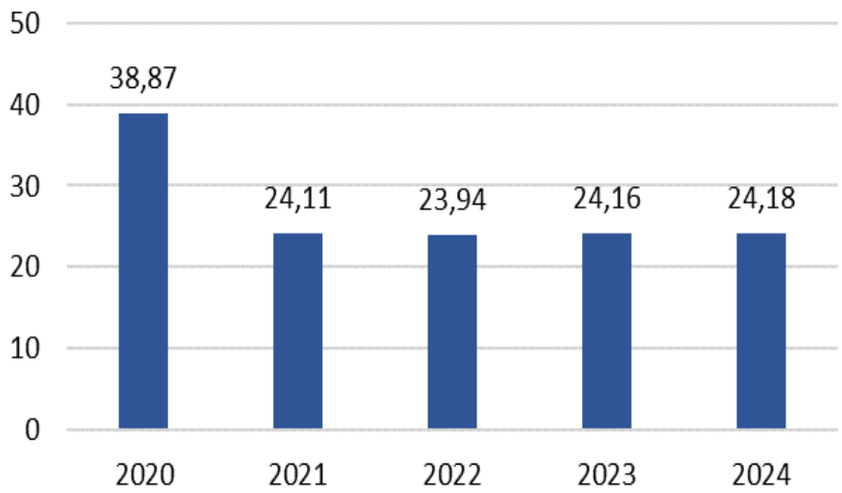

Gambar 2. 10 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Madiun pada tahun 2020 mencapai 38,87. Angka ini menurun secara signifikan pada tahun 2021 yang mencapai 24,11 dan 23,94 pada tahun 2022.

Tahun 2023 dan 2024 Indeks Kualitas Tutupan Lahan sedikit meningkat menjadi 24,16 dan 24,18. Turunnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan secara signifikan dari tahun 2021 ini perlu mendapat perhatian serius, meskipun juga harus dipahami bahwa Kota Madiun merupakan sebuah kota dengan berarti besaran luasan yang sangat kecil dan merupakan Kawasan padat penduduk dan didominasi oleh area/kawasan terbangun.

2.1.4.5 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dan Aman

Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Kota Madiun sangat tinggi dan stabil di atas 99% dari tahun 2020 hingga 2024. Ini menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Kota Madiun memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang memenuhi standar.

Pada tahun 2020 dan 2021, akses sanitasi aman belum tercatat atau masih 0%. Tahun 2022, terjadi peningkatan dengan 15% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman. Tahun 2023, angka ini naik signifikan menjadi 32,3%, menunjukkan kemajuan dalam peningkatan kualitas sanitasi. Data tahun 2024 tidak mencantumkan akses sanitasi aman, kemungkinan belum tersedia atau masih dalam proses pengukuran.

Kota Madiun telah berhasil mempertahankan akses sanitasi layak di hampir seluruh rumah tangga. Tren peningkatan akses sanitasi aman menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam pengelolaan limbah domestik agar lebih higienis dan aman. Tantangan ke depan adalah meningkatkan lagi akses sanitasi aman agar semakin banyak rumah tangga yang mendapatkan fasilitas sanitasi yang lebih berkualitas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

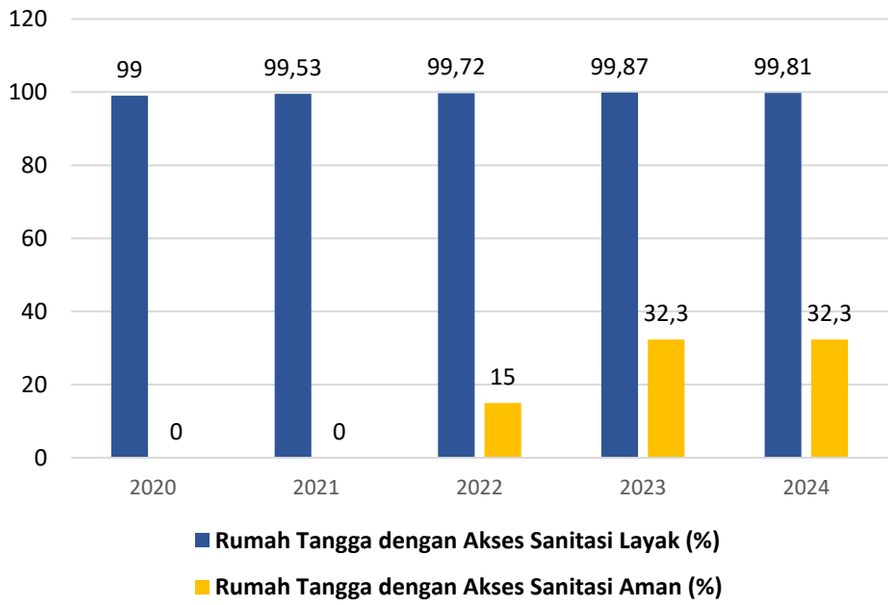

Gambar 2. 11 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dan Aman Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim), 2025

2.1.4.6 Persentase Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Secara keseluruhan, tren pengelolaan sampah rumah tangga menunjukkan perbaikan dari tahun 2020 hingga tahun 2023, tetapi mengalami sedikit penurunan di tahun 2024.

Meskipun ada sedikit penurunan di tahun 2024, persentase pengelolaan sampah masih tetap berada di angka yang tinggi.

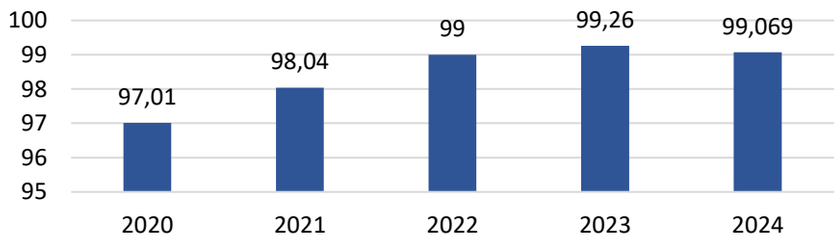

Gambar 2. 12 Persentase Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2025

2.1.5 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Potensi rawan bencana alam di wilayah Kota Madiun berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Tahun 2019, masuk kelas risiko bencana multi ancaman kategori sedang. Pada tahun 2024 hingga tahun 2025 terdapat beberapa kejadian yang telah ditangani seperti pada gambar di bawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

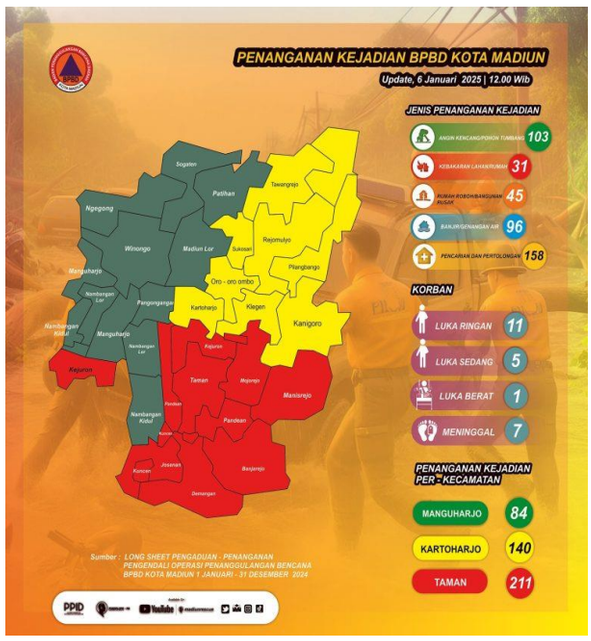

Gambar 2. 13 Gambar Peta Rawan Bencana dan Penanganan
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

Kawasan–kawasan yang memiliki potensi terjadinya bencana alam dan non alam di Kota Madiun adalah sebagai berikut.

2.1.5.1 Kawasan Rawan Angin Puting Beliung

Wilayah di Kota Madiun sebagai kawasan rawan bencana alam angin puting beliung terdapat di wilayah dengan dataran landai, yaitu Kecamatan Taman (Kelurahan Manisrejo dan Kelurahan Banjarejo), Kecamatan Manguharjo (Kelurahan Sogaten dan Kelurahan Ngegong), serta Kecamatan Kartoharjo (Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Kelun, Kelurahan Kanigoro).

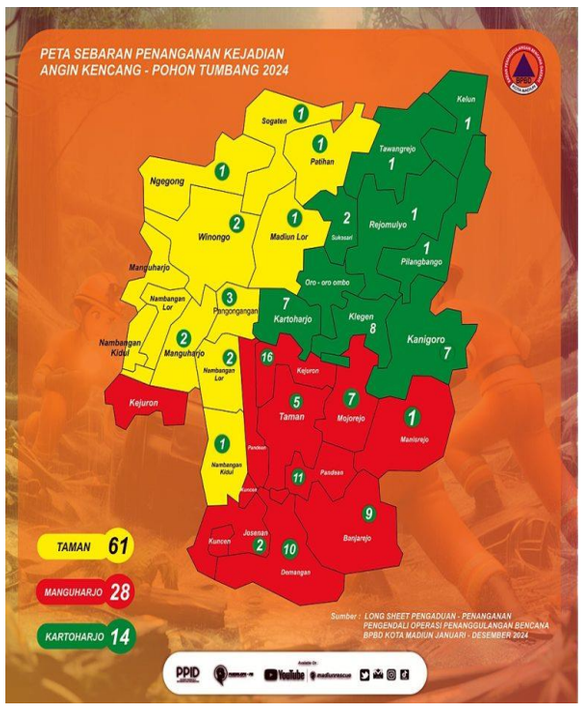

Gambar 2. 14 Gambar Peta Rawan Bencana dan Penanganan
Angin Putting Beliung
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.1.5.2 Kawasan Rawan Banjir

Kota Madiun termasuk dalam wilayah rawan banjir yang disebabkan karena tingginya curah hujan, sehingga menyebabkan terjadinya banjir atau genangan di beberapa tempat. Kondisi ini juga disebabkan kondisi fisik wilayah Kota Madiun yang umumnya datar. Adanya Kali Madiun di tengah kota juga mempengaruhi terjadinya bencana banjir ini, karena adanya luapan air sungai di saat curah hujan yang tinggi.

Keberadaan anak sungai lainnya di Kota Madiun, serta kondisi sistem drainase kota yang kurang mendukung juga berpengaruh terhadap adanya kawasan-kawasan yang mengalami banjir atau genangan. Adapun genangan air kawasan di Kota Madiun terjadi di seluruh kecamatan di Kota Madiun dengan intensitas yang berbeda. Daerah rawan banjir di Kota Madiun meliputi Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Tawangrejo, dan Kelurahan Kelun. Banjir terjadi diakibatkan karena luapan Sungai Piring, Sungai Maling, dan Sungai Sono yang berhulu di wilayah Kabupaten Madiun.

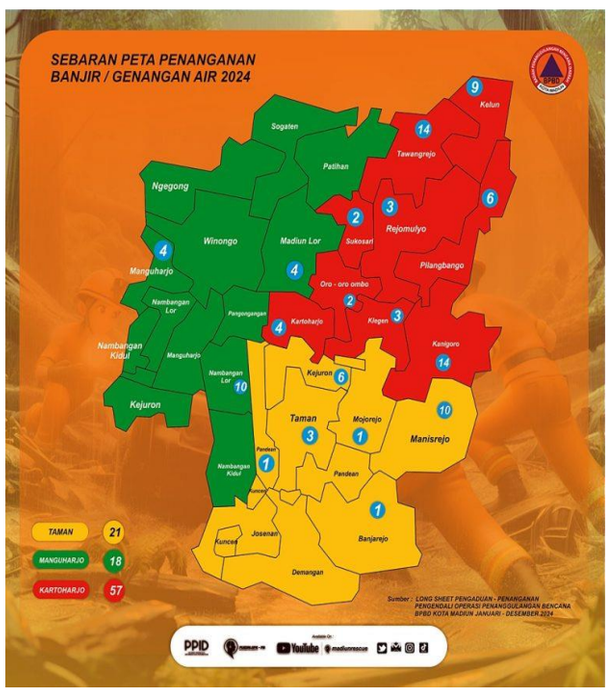

Gambar 2. 15 Gambar Peta Rawan Bencana dan Penanganan Banjir/Genangan Air
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

2.1.5.3 Kawasan Rawan Bencana Kebakaran

Kota Madiun yang memiliki kondisi alam yang cukup kering, menjadikan Kota Madiun menjadi wilayah rawan terjadinya kebakaran. Namun, bencana kebakaran sebagian besar ditimbulkan oleh akibat aktivitas manusia.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kejadian kebakaran tersebut sebagian besar terjadi pada lahan terbuka ataupun perumahan padat, apabila terjadi pada perumahan padat diperlukannya alat pemadam kebakaran yang mumpuni membelah kepadatan perumahan ataupun penyediaan alat pemadam kebakaran mandiri tiap kelurahan. Adapun lokasi yang memiliki rawan bencana kebakaran ialah hampir berada di seluruh kelurahan yang ada di Kota Madiun.

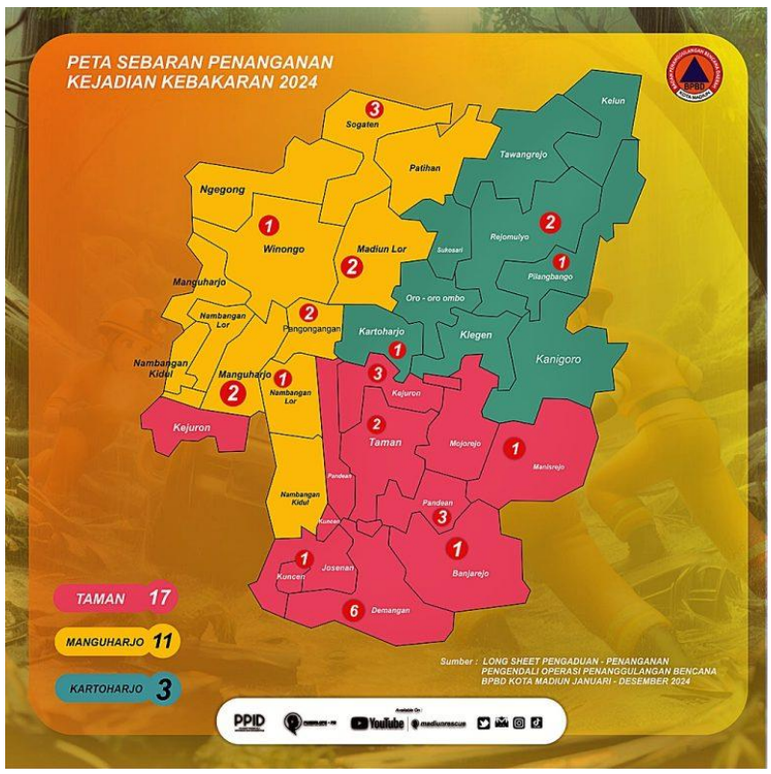

Gambar 2. 16 Gambar Peta Rawan Bencana dan Penanganan Kebakaran
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

2.1.5.4 Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2019, Kota Madiun termasuk wilayah yang memiliki kelas risiko bencana multi ancaman dalam kategori sedang.

Menurut jenis bencana, kelas risiko bencana yang tinggi di Kota Madiun adalah untuk bencana banjir, gempa bumi, kebakaran lahan dan hutan, dan kekeringan. Sedang kelas risiko bencana pada kategori sedang adalah tanah longsor dan cuaca ekstrim. Terdapat beberapa kawasan masih mengalami bencana alam berskala kecil. Kawasan yang rawan terjadi bencana alam di Kota Madiun diantaranya adalah:

1. Banjir berupa genangan air di Kelurahan Rejomulyo, Pilangbango, Tawangrejo, dan Kelun yang diakibatkan oleh luapan dari Sungai Piring, Maling, dan Sono yang berhulu di wilayah Kabupaten Madiun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Angin puting beliung di Kelurahan Rejomulyo, Pilangbango, Tawangrejo, dan Kelun.
3. Kebakaran di wilayah Kota Madiun.

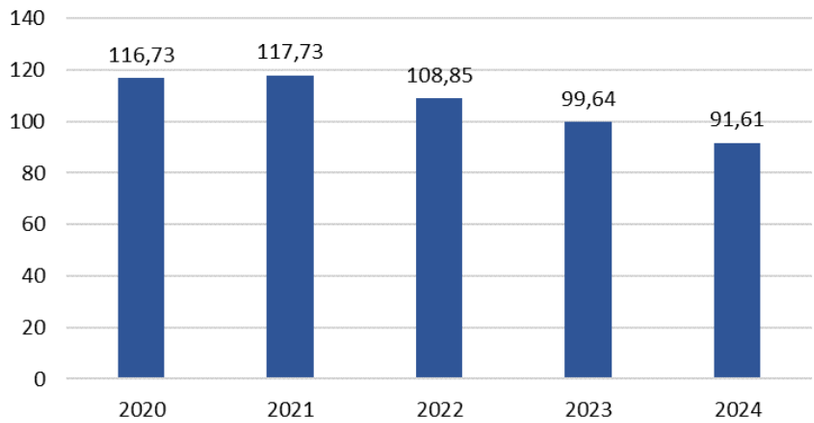

Gambar 2. 17 Indeks Risiko Bencana Kota Madiun 2020-2024
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2025

Adapun capaian Indeks Risiko Bencana Kota Madiun cenderung menurun dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, Indeks Risiko Bencana mencapai 116,73 menjadi 91,61 pada tahun 2024.

Lebih jauh, adapun intensitas bencana di Kota Madiun dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa bencana banjir banyak terjadi pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 96 bencana banjir pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sebanyak 13 bencana banjir yang melanda. Sedangkan bencana angin puting beliung hanya terjadi sekali pada tahun 2024. Bencana kebakaran menurun signifikan pada tahun 2024 sebanyak 40 bencana kebakaran dibandingkan tahun 2023 yang sebanyak 70 bencana kebakaran. Meskipun terjadi penurunan, namun ini masih perlu menjadi catatan agar intensitas bencana kebakaran terus menurun.

Tabel 2. 24 Intensitas Bencana Kota Madiun Tahun 2020-2024

No.	Jenis Bencana	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Banjir	5	5	9	13	96
2.	Angin Puting Beliung	33	0	0	0	1
3.	Kebakaran	29	13	21	70	40

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2025

2.1.5.5 Indeks Ketahanan Daerah

Menurut Badan Penanggulangan Bencana, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

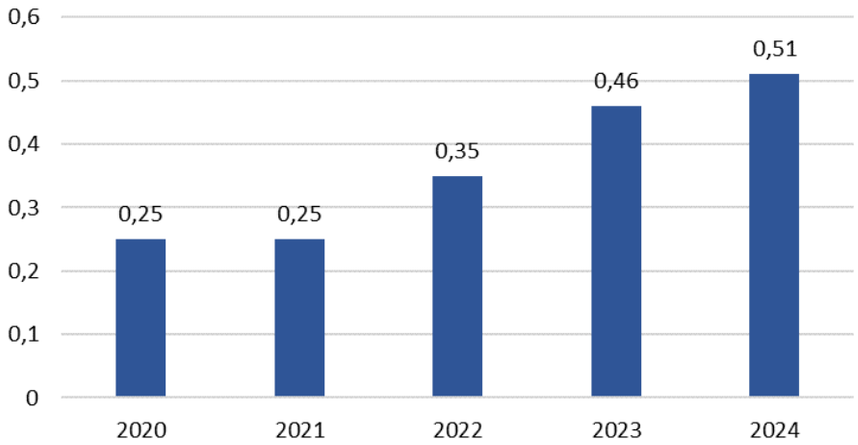

Gambar 2. 18 Indeks Ketahanan Daerah Kota Madiun 2020-2024
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

2.1.5.6 Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi gas rumah kaca (GRK) mengacu pada pelepasan gas-gas ke atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca, yaitu fenomena di mana panas dari matahari terperangkap di atmosfer bumi sehingga menyebabkan peningkatan suhu global atau perubahan iklim. Gas-gas yang memicu efek rumah kaca diantaranya seperti karbon dioksida, metana, gas-gas fluorinasi, dll. Emisi GRK ini sangat berdampak ke lingkungan seperti memicu pemanasan global, perubahan iklim, kenaikan permukaan air laut, hingga kerusakan ekosistem. Sumber-sumber emisi GRK ini berasal dari berbagai sektor termasuk transportasi, industri, pembangkit listrik menggunakan batubara dan gas alam, pertanian melalui penggunaan pupuk kimia, serta limbah.

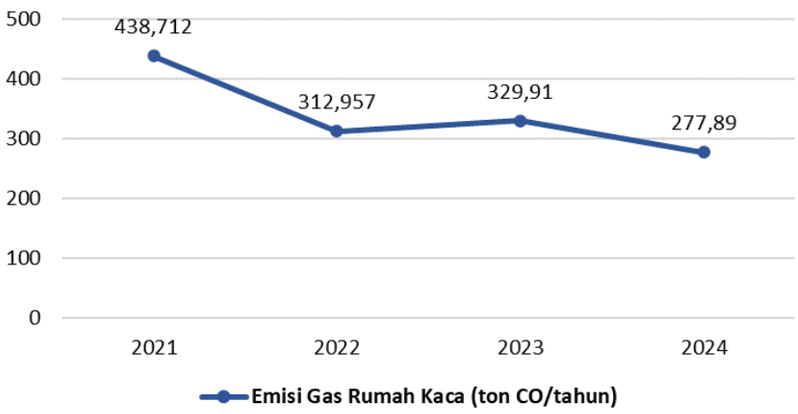

Gambar 2. 19 Inventarisasi Emisi Gas Rumah Rumah Kaca Kota Madiun, Tahun 2021-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Grafik di atas menunjukkan tren emisi gas rumah kaca (GRK) di Kota Madiun dalam satuan ton CO per tahun dari tahun 2021 hingga 2024. Secara keseluruhan, emisi GRK di Kota Madiun mengalami tren penurunan dari tahun 2021 hingga 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pada tahun 2021, emisi GRK berada pada angka 438,712 ton CO per tahun. Namun pada perkembangannya tahun 2022, terjadi penurunan drastis menjadi 312,957 ton CO, yang berarti terdapat pengurangan emisi sekitar 28,7% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2023, terjadi sedikit kenaikan pada 202 menjadi 329,91 ton CO, naik sekitar 5,4% dari tahun 2022. Ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas atau faktor lain yang berkontribusi terhadap emisi GRK di tahun tersebut. Lebih lanjut, pada tahun 2024 terjadi penurunan kembali pada 2024 menjadi 277,89 ton CO, turun sekitar 15,8% dibandingkan tahun 2023. Tren ini mengindikasikan adanya upaya yang lebih efektif dalam pengurangan emisi atau perubahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi emisi di Kota Madiun.

2.1.6 Kondisi Demografi

2.1.6.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Madiun, jumlah penduduk Kota Madiun dari tahun 2020 hingga 2024 selalu mengalami tren yang meningkat. Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kota Madiun mencapai 195,2 ribu. Jumlah ini meningkat menjadi 196,9 ribu jiwa di tahun 2021 dan 199,1 ribu jiwa di tahun 2022. Jumlah penduduk terus bertumbuh menjadi 200 ribu jiwa di tahun 2023. Adapun di tahun 2024, pertumbuhan penduduk ini mencapai 201,8 jiwa.

Sementara laju pertumbuhan penduduk mengalami perkembangan yang fluktuatif. Laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2020 sebesar 1,29%. Angka ini terus menurun hingga 2021 dan 2022 sebesar 1,19% dan 1,17%. Sedangkan di tahun 2023 laju pertumbuhan penduduk meningkat hingga 2,45%. Namun di tahun 2024, laju pertumbuhan penduduk turun menjadi -0,40.

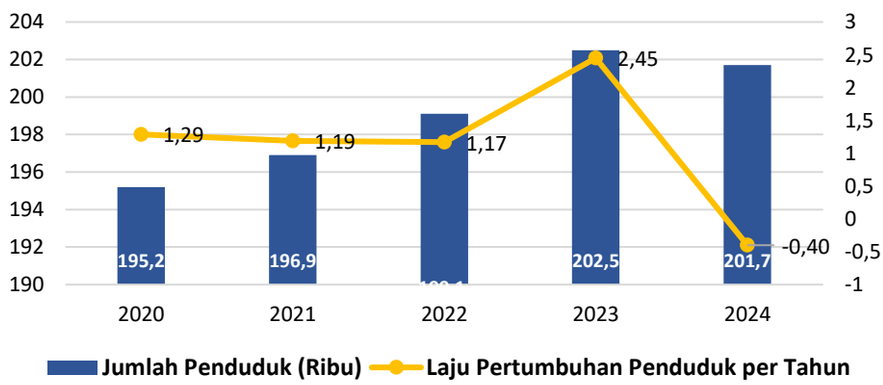

Gambar 2. 20 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.1.6.2 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Kota Madiun selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tahun 2020-2021 merupakan puncak kepadatan atau kepadatan penduduk tertinggi. Kepadatan penduduk mengalami peningkatan dari 5.754/km² pada 2020 menjadi 5.805/km² pada 2021. Ini menunjukkan bahwa populasi meningkat atau ada perubahan dalam penggunaan lahan. Tahun 2022 terjadi Penurunan Signifikan. Penduduk turun tajam menjadi 5.514/km² pada 2022. Pada 2023, kepadatan meningkat sedikit menjadi 5.536/km², dan terus meningkat menjadi 5.585/km² pada 2024. Secara keseluruhan, tren menunjukkan adanya lonjakan kepadatan hingga 2021, diikuti oleh penurunan tajam pada 2022, dan kemudian pemulihan bertahap dalam dua tahun berikutnya (2023-2024).

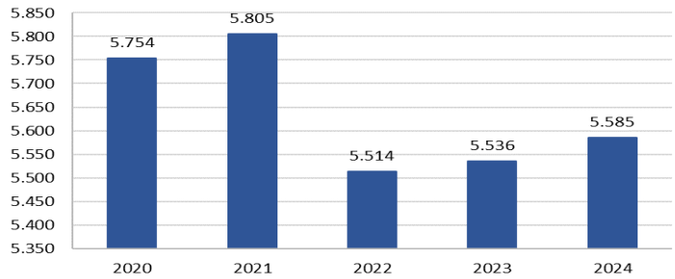

Gambar 2. 21 Kepadatan Penduduk Kota Madiun per Kilometer Persegi Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

2.1.6.3 Rasio Penduduk

Rasio jenis kelamin penduduk menunjukkan jumlah laki-laki per 100 perempuan. Secara umum, rasio jenis kelamin penduduk Kota Madiun menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, tetapi selisihnya tidak terlalu signifikan. Hal ini ditandai dengan data pada 2020 dan 2021, rasio jenis kelamin penduduk stabil di 95,7, artinya terdapat sekitar 95-96 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Sedangkan pada 2022, rasio turun menjadi 95,63, yang menunjukkan sedikit peningkatan proporsi perempuan dibandingkan laki-laki.Adapun pada tahun 2023 dan 2024, rasio meningkat menjadi 95,9, yang bisa mengindikasikan pertumbuhan populasi laki-laki atau penurunan jumlah perempuan relatif terhadap laki-laki.

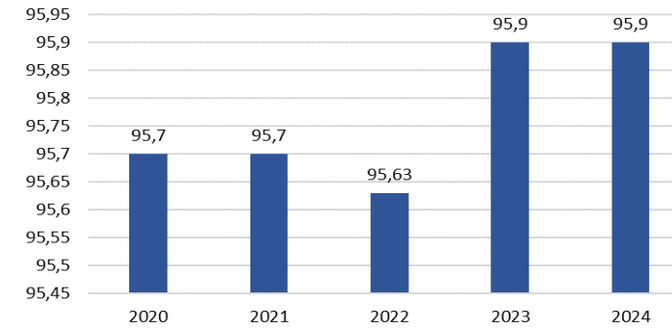

Gambar 2. 22 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.1.6.4 Komposisi Penduduk

Grafik berbentuk piramida penduduk yang cenderung menyerupai bentuk granat atau berlian. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok usia produktif (15-64 tahun) memiliki populasi yang lebih besar dibandingkan kelompok usia anak-anak dan lansia. Perbandingan laki-laki dan perempuan cukup seimbang di hampir semua kelompok usia, dengan sedikit perbedaan di kelompok usia tua (perempuan lebih banyak). Populasi lansia (65 tahun ke atas) didominasi oleh perempuan, yang sesuai dengan kecenderungan global bahwa perempuan memiliki usia harapan hidup lebih panjang daripada laki-laki.

Struktur penduduk ini mengindikasikan bahwa wilayah ini memiliki potensi tenaga kerja yang besar, karena kelompok usia produktif mendominasi. Perlu ada perhatian terhadap kesejahteraan lansia, karena jumlah mereka mulai meningkat, terutama perempuan. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan tren demografi yang relatif stabil, dengan komposisi usia yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan gender yang cukup baik.

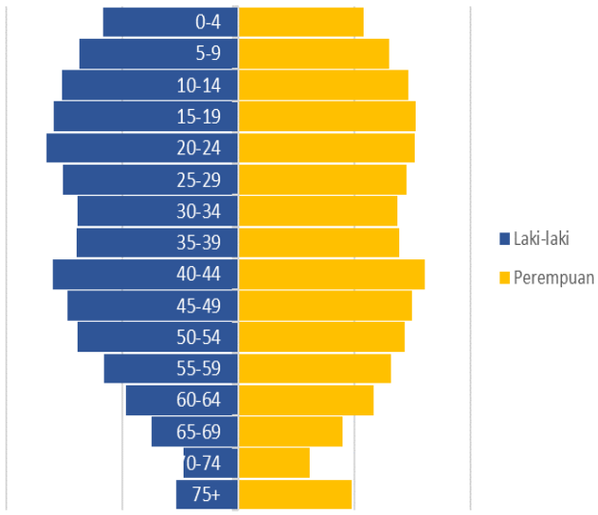

Gambar 2. 23 Komposisi Penduduk Kota Madiun Tahun 2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

2.1.6.5 Komposisi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Pembagian jumlah penduduk yang bekerja dapat dilihat dari beberapa perspektif, dilihat dari jenis pekerjaan maka penduduk dapat dikategorikan sebagai :

1. Buruh/Karyawan
2. Buruh tidak tetap
3. Berusaha sendiri
4. Pekerja keluarga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pada tabel dibawah ini akan diperinci jumlah penduduk yang bekerja menurut pekerjaan sesuai data kependudukan Kota Madiun:

Tabel 2. 25 Penduduk yang Bekerja berdasarkan Jenis Kelamin/Gender
Tahun 2024

NO	PEKERJAAN	JUMLAH		
		L	P	JML
1	2	3	4	5
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	18.233	16.826	35.059
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	32.553	32.556
3	PELAJAR/MAHASISWA	20.663	19.134	39.797
4	PENSIUNAN	3.423	2.559	5.982
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	2.758	2.956	5.714
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	1.597	32	1.629
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	897	84	981
8	PERDAGANGAN	294	214	508
9	PETANI/PEKEBUN	356	136	492
10	PETERNAK	17	1	18
11	NELAYAN/PERIKANAN	2	0	2
12	INDUSTRI	19	6	25
13	KONSTRUKSI	29	2	31
14	TRANSPORTASI	26	1	27
15	KARYAWAN SWASTA	30.520	16.065	46.585
16	KARYAWAN BUMN	1.125	404	1.529
17	KARYAWAN BUMD	116	76	192
18	KARYAWAN HONORER	270	208	478
19	BURUH HARIAN LEPAS	3.404	851	4.255
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	258	90	348
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	0	0	0
22	BURUH PETERNAKAN	4	1	5
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	4	246	250
24	TUKANG CUKUR	19	0	19
25	TUKANG LISTRIK	16	1	17
26	TUKANG BATU	271	3	274
27	TUKANG KAYU	60	0	60
28	TUKANG SOL SEPATU	8	0	8
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	36	0	36
30	TUKANG JAHIT	50	97	147
31	TUKANG GIGI	4	0	4
32	PENATA RIAS	1	15	16
33	PENATA BUSANA	0	0	0
34	PENATA RAMBUT	5	18	23
35	MEKANIK	69	0	69
36	SENIMAN	30	6	36

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5
37	TABIB	3	1	4
38	PARAJI	2	1	3
39	PERANCANG BUSANA	0	0	0
40	PENTERJEMAH	0	1	1
41	IMAM MASJID	5	0	5
42	PENDETA	47	3	50
43	PASTOR	5	0	5
44	WARTAWAN	28	2	30
45	USTADZ/MUBALIGH	3	1	4
46	JURU MASAK	6	12	18
47	PROMOTOR ACARA	0	0	0
48	ANGGOTA DPR RI	1	0	1
49	ANGGOTA DPD RI	0	0	0
50	ANGGOTA BPK	0	0	0
51	PRESIDEN	0	0	0
52	WAKIL PRESIDEN	0	0	0
53	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0	0
54	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN	0	0	0
55	DUTA BESAR	0	0	0
56	GUBERNUR	0	0	0
57	WAKIL GUBERNUR	0	0	0
58	BUPATI	0	0	0
59	WAKIL BUPATI	0	0	0
60	WALIKOTA	0	0	0
61	WAKIL WALIKOTA	0	1	1
62	ANGGOTA DPRD PROP.	0	0	0
63	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	7	3	10
64	DOSEN	190	193	383
65	GURU	543	1.326	1.869
66	PILOT	1	1	2
67	PENGACARA	13	4	17
68	NOTARIS	4	11	15
69	ARSITEK	5	1	6
70	AKUNTAN	2	0	2
71	KONSULTAN	18	3	21
72	DOKTER	136	176	312
73	BIDAN	0	106	106
74	PERAWAT	91	263	354
75	APOTEKER	9	44	53
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	0	4	4
77	PENYIAR TELEVISI	0	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5
78	PENYIAR RADIO	1	1	2
79	PELAUT	34	1	35
80	PENELITI	2	1	3
81	SOPIR	299	0	299
82	PIALANG	2	1	3
83	PARANORMAL	0	0	0
84	PEDAGANG	1.010	1.037	2.047
85	PERANGKAT DESA	3	2	5
86	KEPALA DESA	0	0	0
87	BIARAWAN/BIARAWATI	1	35	36
88	WIRASWASTA	11.941	6.792	18.733
89	ANGGOTA LEMB. TINGGI LAINNYA	72	39	111
90	ARTIS	0	0	0
91	ATLIT	0	0	0
92	CHEFF	0	0	0
93	MANAJER	0	0	0
94	TENAGA TATA USAHA	1	0	1
95	OPERATOR	0	0	0
96	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	0	0	0
97	TEKNISI	0	0	0
98	ASISTEN AHLI	0	0	0
99	PEKERJAAN LAINNYA	5	5	10
JUMLAH		**99.077**	**102.656**	**201.733**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang melihat kemampuan pembangunan ekonomi pada suatu Daerah. Pertumbuhan ekonomi pada suatu Daerah dapat diukur menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Daerah tersebut. PDRB dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian atau unit ekonomi di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. PDRB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga periode berjalan, sedangkan PDRB harga tetap dihitung dengan menggunakan harga Tahun tertentu pada Tahun dasar yakni menggunakan Tahun dasar 2010. Dengan mengetahui laju pertumbuhan ekonomi, dapat digunakan untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan yang akan datang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

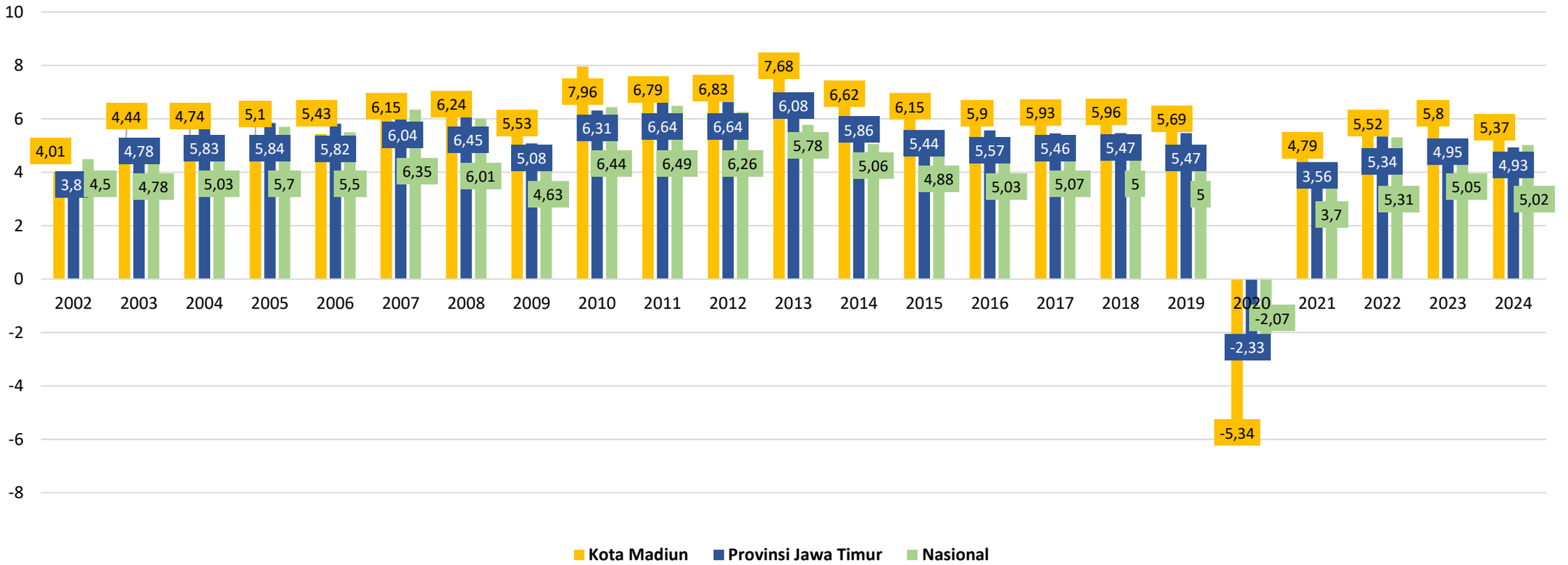

Gambar 2. 24 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2002-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Indonesia, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada lima Tahun terakhir mengalami tren yang fluktuatif namun berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional kecuali pada Tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi Kota Madiun selama lima tahun terjadi pada tahun 2023 dengan nilai 5,8% sedangkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional adalah sebesar 4,95% dan 5,05%.

Pada Tahun 2020 pertumbuhan Kota Madiun terkontraksi hingga -5,34% berada di bawah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur -2,33% dan Nasional sebesar -2,1% akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan melambatnya kondisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada Tahun 2021 hingga Tahun 2023 sudah mulai pulih kembali bahkan lebih tinggi nilainya dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Tabel 2. 26 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	Tahun					Rata - Rata
	2020	2021	2022	2023	2024	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,57	-7,26	-5,67	4,79	5,04	1,69
Pertambangan dan Penggalian	-5,65	-4,12	-8,49	-5,53	-29,43	-10,64
Industri Pengolahan	-23,84	7,1	2,17	7,98	6,36	-0,05
Pengadaan Listrik dan Gas	1,98	2,95	7,95	5,38	6,39	4,93
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,86	6,28	3,5	4,21	4,81	4,73
Konstruksi	-4,71	-0,9	8,24	4,83	8,06	3,10
Perdagangan Besar dan Eceran; dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-11,18	10,16	7,98	5,6	4,59	3,43
Transportasi dan Pergudangan	-4,38	7,17	16,9	11,64	10,95	8,46
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-7,98	3,21	9,96	6,93	7,6	3,94
Informasi dan Komunikasi	16,12	4,75	5,94	6,17	4,93	7,58
Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,66	0,47	0,32	2,82	3,87	1,36
Real Estate	0,33	1,19	5,09	4,35	3,91	2,97
Jasa Perusahaan	-3,18	0,77	5,26	6,12	8,37	3,47
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-2,23	-0,99	-0,43	0,51	7,1	0,79
Jasa Pendidikan	1,97	0,54	0,59	3,17	5,96	2,45
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,98	5,46	3,29	3,2	5,1	5,41
Jasa lainnya	-10,68	4,08	12,11	9,39	7,18	4,42
Produk Domestik Regional Bruto	-5,34	4,79	5,52	5,8	5,73	3,30

Sumber: BPS Kota Madiun

Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun menurut lapangan usaha pada periode Tahun 2020-2024 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Saat pandemi Covid-19 Tahun 2020, banyak sektor yang mengalami kontraksi dan perlambatan pertumbuhan kecuali pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (11,57%), sektor Informasi dan Komunikasi (16,12%), serta sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (4,86%).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Secara keseluruhan terdapat tiga sektor dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi selama tahun 2020-2024. Sektor tersebut berupa transportasi dan pergudangan dengan nilai sebesar 8,46% per Tahun, sektor informasi dan komunikasi sebesar 7,58% per Tahun, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 5,41% per Tahun. Sementara itu, sektor dengan rata-rata pertumbuhan terendah yakni sektor pertambangan dan penggalian yang terkontraksi sebesar -10,64% per Tahun.

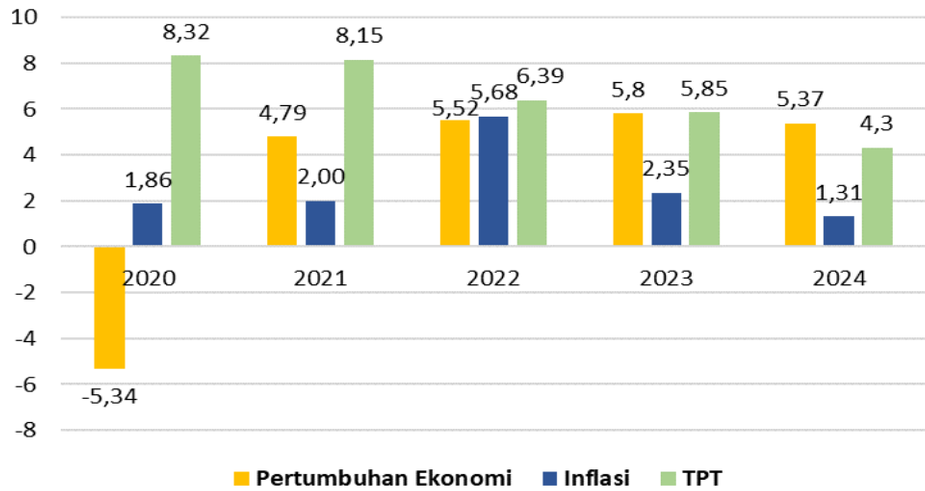

Gambar 2. 25 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2024
Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, (diolah)

Kinerja pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan TPT di Kota Madiun. Inflasi bergerak menuju pertumbuhan ekonomi. Inflasi merupakan harga yang harus dibayar oleh suatu Daerah jika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Gambar tersebut menunjukkan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, demikian pula inflasi. Ini merupakan efek dari inflasi permintaan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan *agregat* dengan cara yang mempengaruhi kenaikan harga. Pandemi yang merebak di Tahun 2020 mengguncang perekonomian kota Madiun dan pertumbuhan ekonomi menyusut hingga ke level -5,34. Kekhasan kota Madiun dan faktor ekonomi utama sektor perdagangan, industri, dan jasa membuat Kota Madiun sangat rentan terhadap gangguan permintaan. Perdagangan, industri, dan jasa menjadi sektor yang buruk bersama dengan usaha transportasi, hotel, dan pariwisata, menyebabkan inflasi berada di level 1,86 pada Tahun 2020. Menurunnya penyebaran Covid-19 dan perekonomian yang kembali bangkit ditunjukkan pada Tahun 2021 hingga Tahun 2023. Pada Tahun 2021 laju pertumbuhan bangkit sebesar 4,79% dan mencapai 5,52% pada Tahun 2022. Pada Tahun 2023, inflasi menurun menjadi sebesar 2,35, begitu pula TPT yang mengalami penurunan menjadi 5,85%. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan di Tahun 2023 sebesar 5,8%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Adapun di tahun 2024, inflasi turun menjadi 1,31% dan TPT juga turun menjadi 4,3%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi turun menjadi 5,37%. Hal tersebut tidak luput dari program-program Pemerintah Kota Madiun yang telah mendukung pergerakan perekonomian Kota Madiun menjadi lebih baik.

2.2.1.2 Indeks Gini

Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat ketimpangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah yakni indeks gini. Nilai indeks gini berkisar nol sampai satu. Semakin nilai indeks gini mendekati angka nol maka pemerataan pendapatan semakin baik atau setiap orang memiliki pendapatan yang hampir sama. Sedangkan jika nilai indeks gini semakin mendekati angka satu maka menunjukkan kesenjangan pendapatan dan ketimpangan yang tinggi di Daerah tersebut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

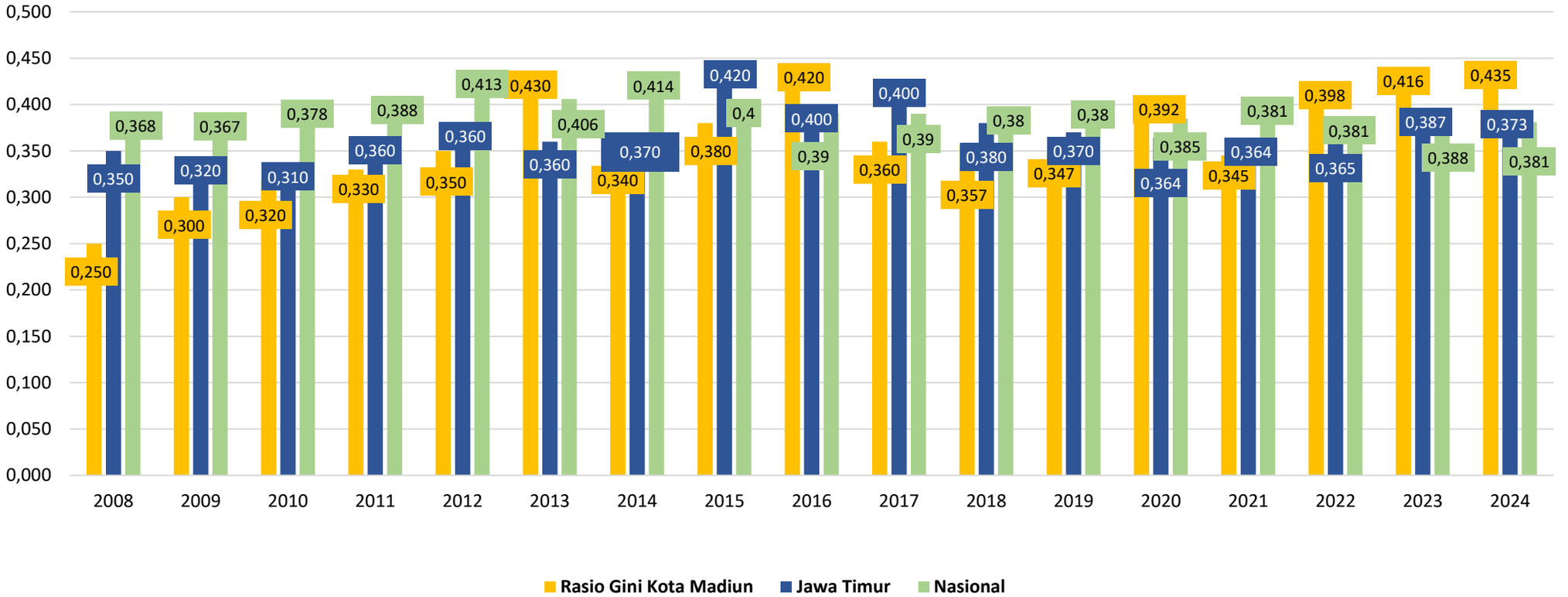

Gambar 2. 26 Indeks Gini Kota Madiun Tahun 2008-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Indonesia, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Indeks ini Kota Madiun secara umum selama lima Tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 indeks gini Kota Madiun mencapai 0,392 dan menurun menjadi 0,345 pada tahun 2021. Indeks gini pada Tahun 2022 pencapaian indeks gini Kota Madiun naik menjadi 0,398. Tahun 2023 indeks gini Kota Madiun terus meningkat menjadi 0,416 dan masih dalam kisaran ketimpangan sedang. Indeks gini Kota Madiun dari Tahun 2024 meningkat menjadi 0,435. Capaian ini fluktuatif namun berada diatas Indeks Gini Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

2.2.1.3 Tingkat Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Tingkat kemiskinan menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu Daerah. Tingkat kemiskinan dapat menjadi salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan menjadi salah satu masalah terbesar di berbagai tempat, tidak hanya di Kota Madiun. Penduduk dianggap miskin jika pengeluaran bulanannya berada di bawah garis kemiskinan.

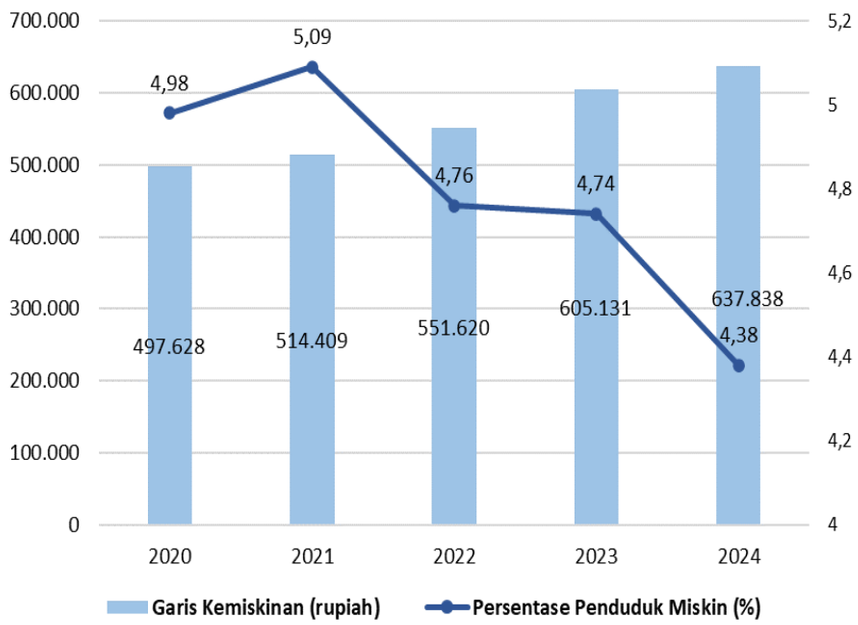

Gambar 2. 27 Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Madiun Tahun 2020-2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, diolah

Secara umum, garis kemiskinan Kota Madiun dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya, yaitu dari 478.304 rupiah pada tahun 2020 menjadi 637.838 rupiah pada tahun 2024. Namun dari sisi persentase penduduk miskin mengalami tren yang cukup fluktuatif. Tahun 2020, persentase penduduk miskin berada di angka 4,98 persen. Angka ini meningkat pada tahun 2021 sebesar 5,09 persen, yang mana tahun 2021 menjadi persentase penduduk miskin tertinggi dibandingkan tahun-tahun lainnya. Persentase penduduk miskin kemudian secara berangsur-angsur turun hingga tahun 2024, yaitu turun hingga 4,76 persen pada tahun 2022, 4,74 persen pada tahun 2023, serta 4,38 persen pada tahun 2024.

Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indek Keparahan Kemiskinan adalah Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

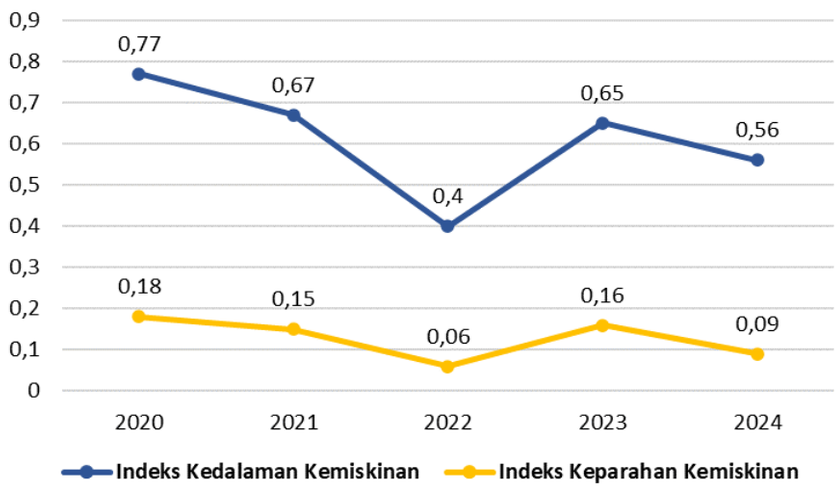

Gambar 2. 28 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, diolah

Apabila ditinjau dari sisi indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan, Kota Madiun menunjukkan dinamika yang cenderung naik turun. Indeks kedalaman kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 0,77. Angka ini secara berangsur menurun hingga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

tahun 2022 yaitu sebesar 0,4. Di tahun 2022, indeks kedalaman kemiskinan mencapai angka paling rendah selama lima tahun.

Sedangkan pada tahun 2024 indeks kedalaman kemiskinan menurun sebesar 0,56 meskipun pada tahun 2023 sempat meningkat di angka 0,65. Demikian pula indeks keparahan kemiskinan yang perkembangannya sejalan dengan indeks kedalaman kemiskinan. Pada tahun 2020 indeks kedalaman kemiskinan mencapai titik tertinggi, yaitu 0,18. Angka ini kemudian berangsur-angsur turun hingga tahun 2022 di titik 0,06. Pada tahun 2024, indeks kedalaman kemiskinan berada pada angka 0,09, meskipun di tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 0,16. Terkait perkembangan kemiskinan ekstrim di wilayah Kota Madiun pada Tahun 2024 sudah *zero* (0), hal ini mengindikasikan penanggulangan yang komprehensif telah dilakukan pemerintah Kota Madiun dalam penanganannya. Factor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di kota Madiun diantaranya adalah terbatasnya lapangan kerja dengan jumlah pengangguran yang ada, tidak adanya sumber daya alam, pendapatan masyarakat yang rendah dan upah minimum yang membatasi kemampuan untuk lebih jauh dari hidup layak, serta ketrampilan pekerja individu yang kurang sehingga membatasi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan bergaji tinggi.

Adapun perkembangan tingkat kemiskinan Kota Madiun dari tahun ke tahun disajikan pada gambar berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

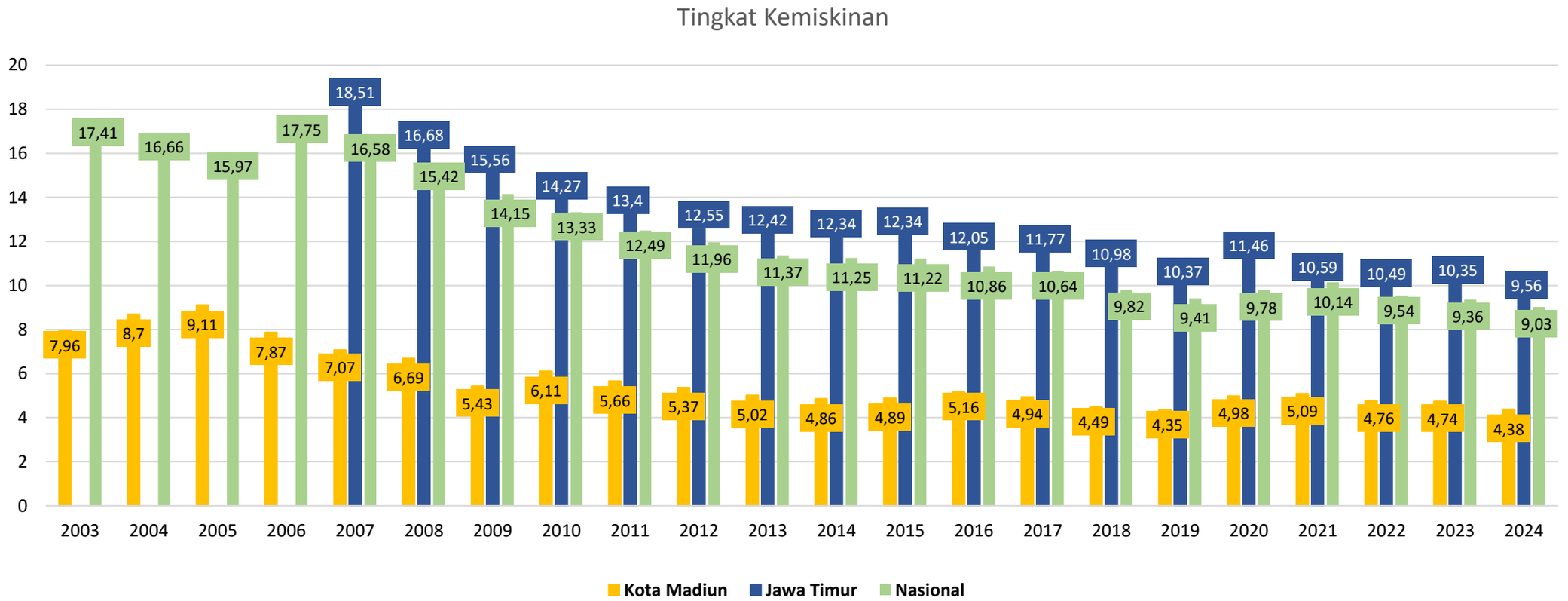

Gambar 2. 29 Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2003-2024
Sumber: BPS Kota Madiun dan BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Kondisi ketenagakerjaan di suatu Daerah dapat digambarkan melalui salah satu indikator yaitu pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi menunjukkan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja tidak baik, tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang ideal untuk suatu daerah untuk mendukung ekspansi ekonomi yang sehat berkisar antara 3,5%-4,5%, di Kota Madiun TPT berangsur-angsur menurun sejak merebaknya pandemic covid-19 pada tahun 2020 dengan TPT sebesar 8,32%, kondisi ini terus menurun sampai pada tahun 2024 dengan capaian TPT sebesar 4,3%, sehingga dapat disimpulkan selain factor pemulihan dampak pandemic yang tidak dapat selesai dalam beberapa tahun untuk kota madiun dengan dukungan program pemerintah dapat mencapai batas TPT pada kondisi yang ideal. Pengangguran terbuka, merupakan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan diri untuk berwirausaha atau yang merasa tidak dapat memperoleh pekerjaan atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum bekerja. Pada Gambaran mengenai data tingkat pengangguran terbuka di Kota Madiun Tahun 2002-2024 sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

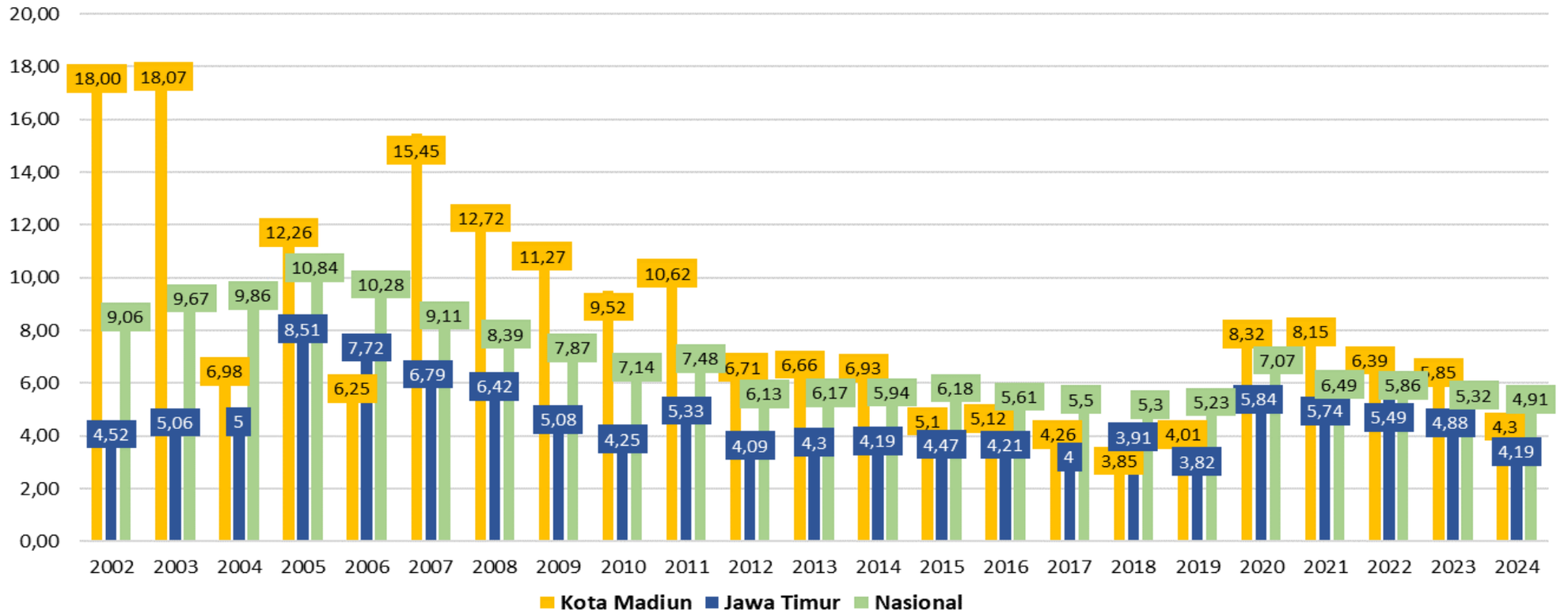

Gambar 2. 30 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2002-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, BPS Provinsi Jawa Timur, diolah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tingkat pengangguran terbuka Kota Madiun pada Tahun 2018 sebesar 3,80% kemudian meningkat pada Tahun 2019 sebesar 3,96%. Pada Tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 8,32% karena adanya peningkatan jumlah penduduk usia kerja (15 Tahun lebih) serta terjadinya pandemi yang menyebabkan banyak perusahaan melakukan pemberhentian kerja. Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 tingkat pengangguran mengalami penurunan sebesar 8,15% dan 6,39%. Perbandingan antara tingkat pengangguran terbuka laki-laki dan perempuan adalah sebesar 9,85% dan 2,30%. Tingkat pengangguran Kota Madiun berada diatas nilai Provinsi Jawa Timur dan Nasional mulai dari Tahun 2020 hingga Tahun 2023. Pada Tahun 2024 nilai tingkat pengangguran Kota Madiun sebesar 4,3% dengan Jumlah TPT Laki-laki sebesar 4,60% dan TPT Perempuan sebesar 4,96% dominasi tersebut disebabkan prioritas pekerjaan yang tersedia dan kondisi ekonomi dalam keluarga. Pada Tahun yang sama TPT Kota Madiun masih diatas TPT Jawa Timur dengan nilai 4,19% akan tetapi TPT Kota Madiun dibawah nasional dengan nilai 4,91%.

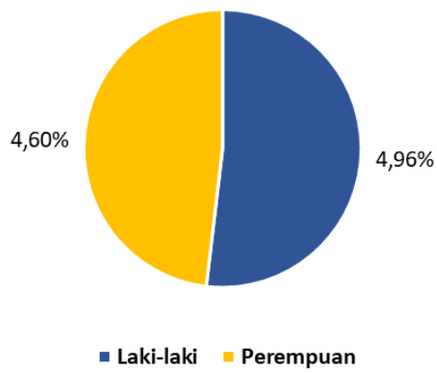

Gambar 2. 31 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024 (%)
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia berdasarkan sejumlah komponen kualitas hidup. Dimensi dasar yang membentuk IPM adalah umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. IPM menjelaskan bagaimana pendapatan penduduk, perawatan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain dapat mengarah pada hasil pembangunan. Peningkatan atau penurunan angka IPM merupakan indikator kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah tertentu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

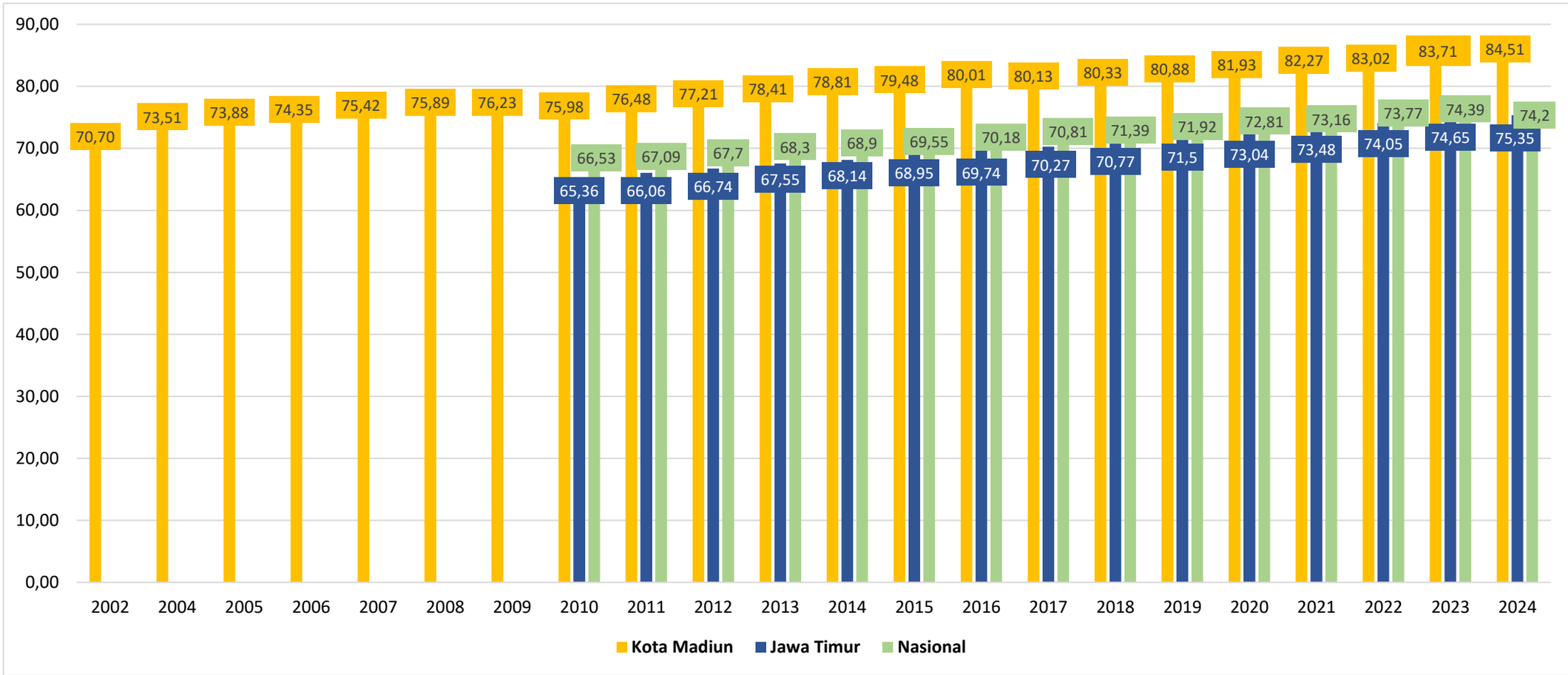

Gambar 2. 32 IPM Kota Madiun Tahun 2002-2024
Sumber: BPS Kota Madiun; Statistik Indonesia dalam Angka 2025, diolah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pada grafik diatas IPM Kota Madiun mengalami tren yang cenderung terus meningkat dari tahun 2002 hingga 2024. Nilai IPM Kota Madiun tetap diatas nilai rata-rata IPM Provinsi dan Nasional. Pada tahun 2024 IPM Kota Madiun berada di angka 84,51. Secara umum peningkatan IPM menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kota Madiun semakin maju ke arah yang lebih baik. Kota Madiun termasuk Daerah dengan IPM sangat tinggi dengan nilai di atas 80.

Mulai Tahun 2020, penghitungan IPM menggunakan hasil Sensus Penduduk Long Form (SP LF Tahun 2020). Berdasarkan hasil SP LF 2020, IPM penyesuaian hasil SP LF mengalami peningkatan.

Tabel 2. 27 Komponen IPM Kota Madiun dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Indeks	Kota Madiun	Provinsi Jawa Timur
Umur Harapan Hidup	75,67	75,07
Harapan Lama Sekolah	14,54	13,43
Rata-rata Lama Sekolah	12,11	8,28
Pengeluaran per kapita (Rp 000)	17.518	12.852
IPM	84,51	78,6

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka Tahun 2024, diolah

Tabel di atas menunjukkan nilai dari masing-masing dimensi pembentuk dari IPM. Umur harapan hidup di Kota Madiun pada Tahun 2024 yakni sebesar 75,67 tahun, harapan lama sekolah sebesar 14,54 Tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 12,11 tahun, dan pengeluaran per kapita sebesar Rp17.518.000, sehingga IPM Kota Madiun pada tahun 2024 mencapai 84,51 menandakan seluruh dimensi pembentuk IPM Kota Madiun terkategori tinggi jika dibandingkan Kab/Kota lain di Provinsi Jawa Timur.

2.2.2 Kesehatan Untuk Semua

2.2.2.1 Indeks Keluarga Sehat

Terdapat 12 indikator indeks keluarga sehat. Indikator tersebut adalah (1) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB); (2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas Kesehatan; (3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap; (4) Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif selama 6 bulan; (5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan; (6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar; (7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur; (8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan; (9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok; (10) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih dan (12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Indeks Keluarga Sehat Kota Madiun dari tahun 2020 hingga 2024 selalu menunjukkan peningkatan, dari tahun 2020 sebesar 0,43 menjadi 0,57 pada tahun 2023. Sedangkan tahun 2024, Indeks Keluarga Sehat meningkat menjadi 0,59.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

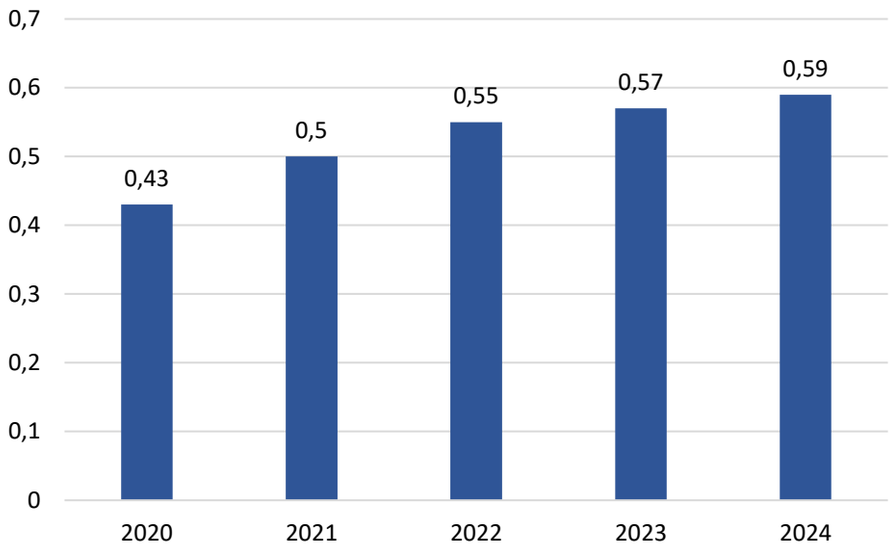

Gambar 2. 33 Indeks Keluarga Sehat Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

2.2.2.2 Usia Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah indikator penting yang digunakan untuk mengukur kualitas kesehatan masyarakat di suatu wilayah. UHH mencerminkan rata-rata jumlah tahun hidup yang diharapkan oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa kondisi kesehatan saat ini akan terus berlanjut sepanjang hidupnya. Tujuan pengukuran UHH adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai tingkat kesehatan masyarakat, serta efektivitas sistem kesehatan dalam memperpanjang harapan hidup penduduk. UHH juga berfungsi sebagai referensi penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang bertujuan meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Umur Harapan Hidup Kota Madiun dari tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2020, UHH Kota Madiun berada di titik 72,81. Angka ini kemudian terus meningkat hingga tahun 2024 sebesar 75,67.

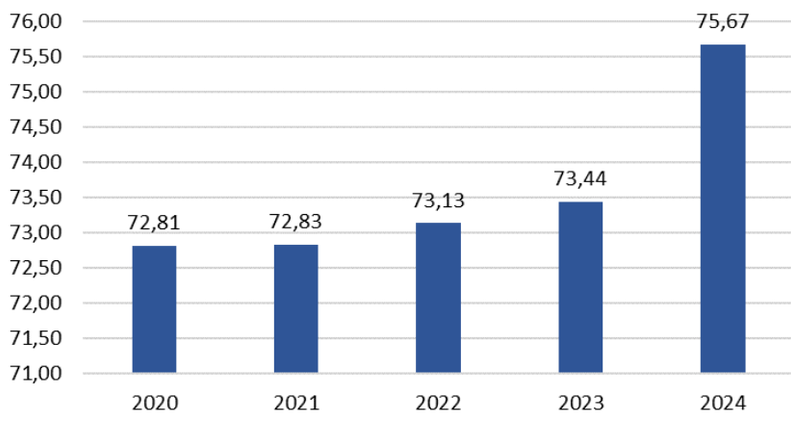

Gambar 2. 34 Umur Harapan Hidup Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.2.2.3 Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

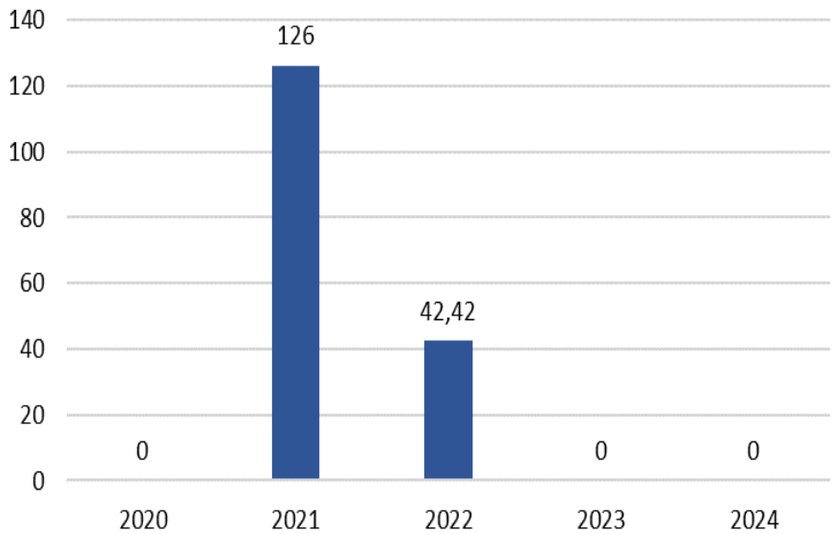

Gambar 2. 35 Angka Kematian Ibu Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Madiun, 2025

Angka kematian ibu menjadi salah satu indikator mengenai kualitas kesehatan di masyarakat. Pada Tahun 2020 tidak ada kematian ibu. Namun angka ini meningkat secara signifikan pada tahun 2021 sebanyak 126 per 100.000 kelahiran hidup. Tahun 2022 angka kematian ibu turun menjadi 42,42. Pada Tahun 2023 dan 2024, Angka kematian ibu tercatat tidak ada kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup.

2.2.2.4 Angka Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada saat bayi lahir sampai satu hari sebelum hari ulang tahun pertama. Berdasarkan penyebabnya, kematian bayi dibedakan oleh faktor endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen (kematian neonatal) adalah kejadian kematian yang terjadi pada bulan pertama sejak bayi dilahirkan umumnya disebabkan oleh faktor yang dibawa sejak lahir, diwarisi oleh orangtua pada saat konsepsi atau didapat dari ibunya selama kehamilan. Angka kematian bayi adalah jumlah kematian penduduk kurang dari 1 tahun yang dicatat selama satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

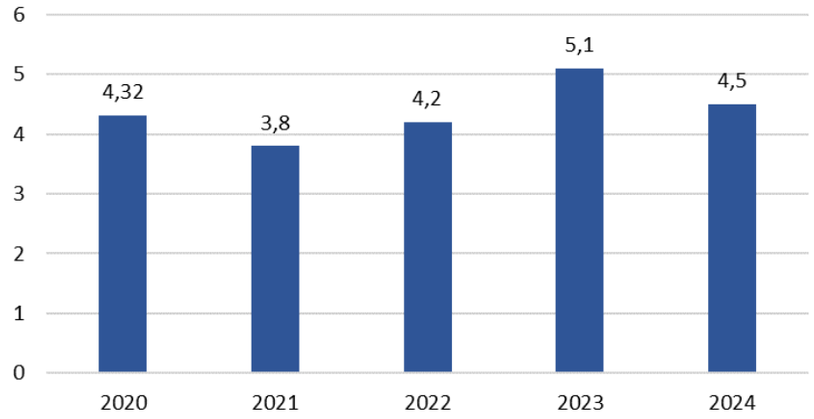

Gambar 2. 36 Angka Kematian Bayi Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Madiun, 2025

Kualitas kesehatan ibu, balita, dan bayi baru lahir salah satunya dapat diukur dengan indikator angka kematian bayi. Pada tahun 2020 angka kematian bayi sebesar 4,32 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini menurun di tahun 2021 sebesar 3,8. Namun di tahun 2022 dan 2023 angka kematian bayi meningkat menjadi 4,2 dan 5,1. Adapun angka kematian bayi di tahun 2024 adalah 4,5 per 1.000 kelahiran hidup.

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar dengan penetapan anggaran sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang sebesar 20 persen dari APBD. Pelayanan aspek pendidikan diharapkan mampu mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan dan memperluas pembangunan antar wilayah, serta mampu menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan cerdas.

Kualitas dan akses pendidikan khususnya pendidikan formal dipresentasikan dari tingkat Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) khususnya pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah.

2.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah Tahun yang dihabiskan penduduk berumur 25 Tahun ke atas pada semua jenis pendidikan formal. Berbeda dengan metode lama yang menghitung rata-rata lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah pada jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 Tahun ke atas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Realisasi angka rata-rata lama sekolah Kota Madiun mengalami peningkatan dari Tahun 2002 sebesar 9,9 menjadi 12,11 pada Tahun 2024 atau setingkat dengan SMA kelas 3. Nilai rata-rata lama sekolah Kota Madiun tahun 2024 bahkan lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional yang sebesar 8,28 dan 8,85. Peningkatan dan tingginya angka tersebut disebabkan semakin menyadari pentingnya pendidikan dan dukungan pemerintah kota Madiun, khususnya program pendidikan dasar, peningkatan sarana dan prasarana sekolah dasar dan menengah, serta program BOS dari pemerintah pusat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

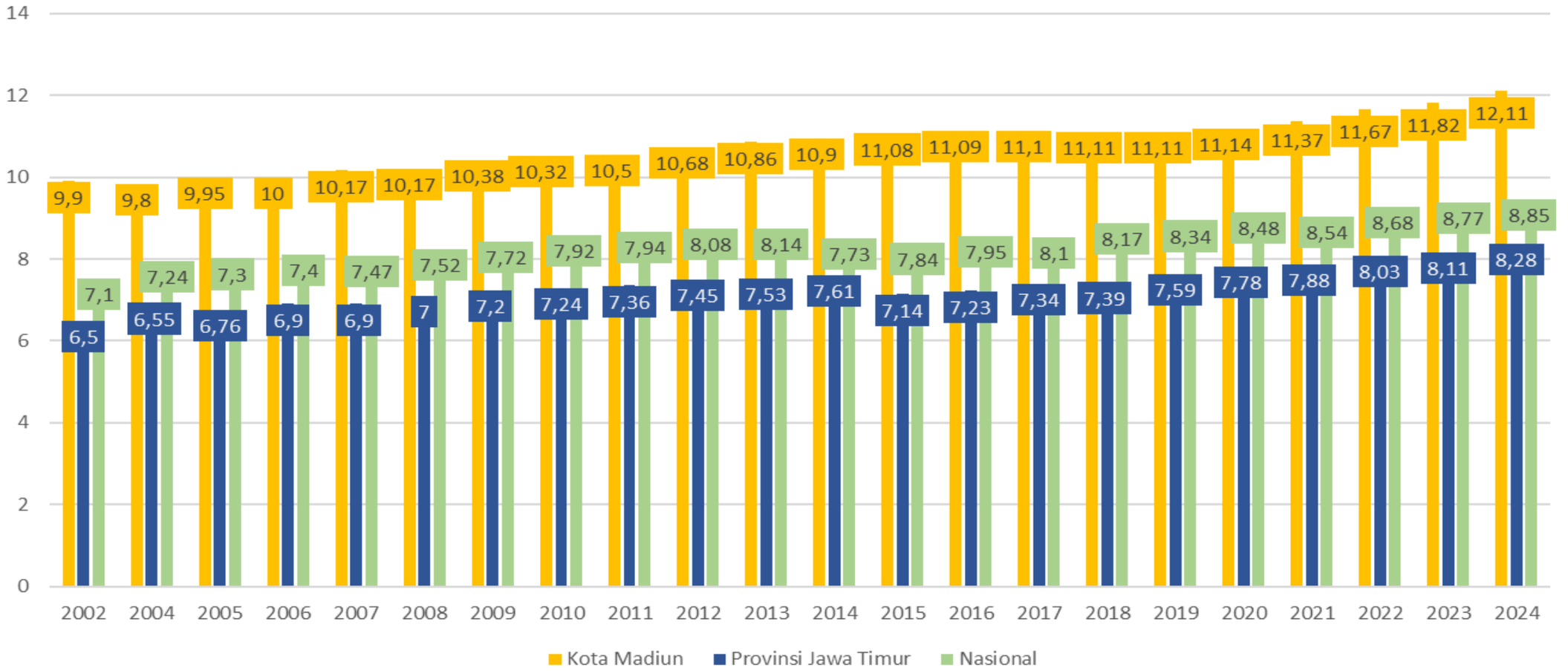

Gambar 2. 37 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Madiun Tahun 2002-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.2.3.2 Harapan Lama Sekolah

Lama bertahannya seorang anak dalam pendidikan dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan suatu Daerah. Angka harapan lama sekolah merupakan lama belajar (dalam Tahun) yang mungkin dialami seorang anak pada usia tertentu di masa depan. Capaian harapan lama sekolah Kota Madiun selama periode Tahun 2005-2024 mengalami peningkatan setiap Tahunnya. Angka Harapan Lama sekolah pada Tahun 2005 sebesar 9,62 Tahun, kemudian pada Tahun 2024 mencapai 14,54 Tahun. Hal tersebut menunjukkan lamanya sekolah yang akan dicapai oleh anak umur tertentu di masa depan telah mencapai pada jenjang perguruan tinggi. Ini disebabkan karena adanya dukungan dari Pemerintah Kota Madiun dengan Program Bantuan Beasiswa Mahasiswa, bantuan Laptop gratis, dan bantuan seragam gratis serta ongkos jahit bagi siswa baru jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

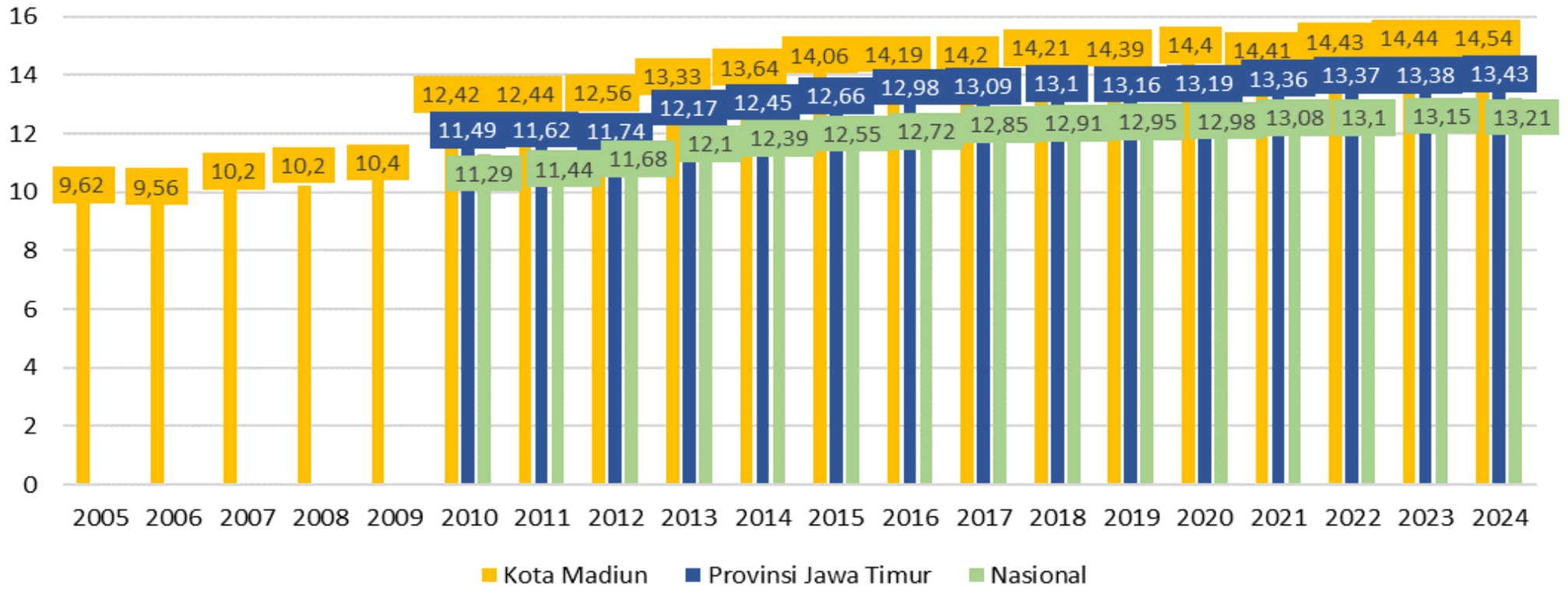

Gambar 2. 38 Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Madiun Tahun 2005-2024
Sumber: BPS Kota Madiun; Statistik Indonesia dalam Angka 2025, diolah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.2.3.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/ kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat terdiri dari 7 komponen, yaitu Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Jumlah Perpustakaan berstandar Nasional Perpustakaan (SNP), Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi, dan Anggota Perpustakaan. Aspek masyarakat (AM) terdiri dari 4 komponen, yaitu Jumlah Penduduk, Jumlah Civitas Sekolah, Jumlah Civitas Akademika, Jumlah Penduduk yang Bekerja.

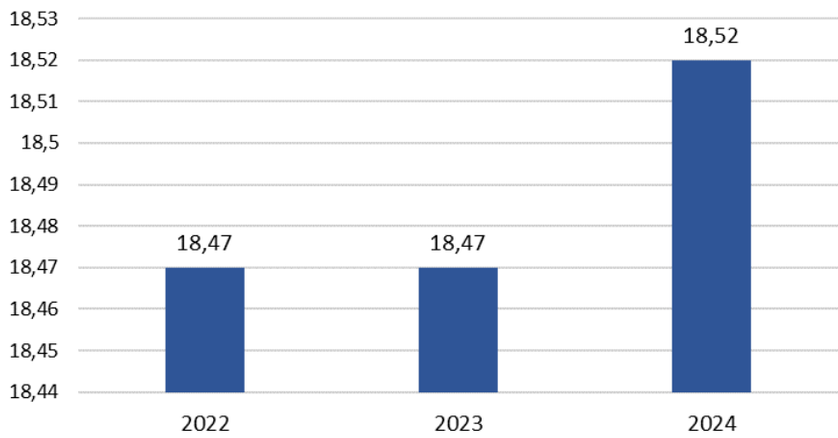

Gambar 2. 39 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun Tahun 2022-2024
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, 2025

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Madiun selama tiga tahun terakhir menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2022 dan 2023 IPLM Kota Madiun konsisten berada di angka 18,47. Sedangkan di tahun 2024, IPLM Kota Madiun mengalami peningkatan hingga 18,52.

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.2.4.1 Jumlah Pekerja yang Menerima Jaminan Sosial

Kota Madiun selama Tahun 2020 hingga Tahun 2023 menunjukkan peningkatan jumlah pekerja yang telah menerima jaminan sosial tenaga kerja. Pada Tahun 2020 jumlah pekerja yang telah menerima jaminan sosial tenaga kerja sebanyak 23.294 pekerja. Tahun 2022 jumlah penerima jaminan sosial tenaga kerja di Kota Madiun sudah mencapai 25.506 pekerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tahun 2023 terdapat kenaikan yang cukup signifikan sebesar 2.644 pekerja yang menerima jaminan sosial tenaga kerja sehingga jumlah penerima menjadi 28.150 pekerja.

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.2.5.1 Indeks Kerukunan

Indeks Kerukunan Kota Madiun dari tahun 2020 hingga 2024 selalu menunjukkan peningkatan, dari tahun 2020 sebesar 74,03 menjadi 77,8 pada tahun 2023. Sedangkan tahun 2024, Indeks Kerukunan meningkat menjadi 78,04 dengan kategori “Harmonis”.

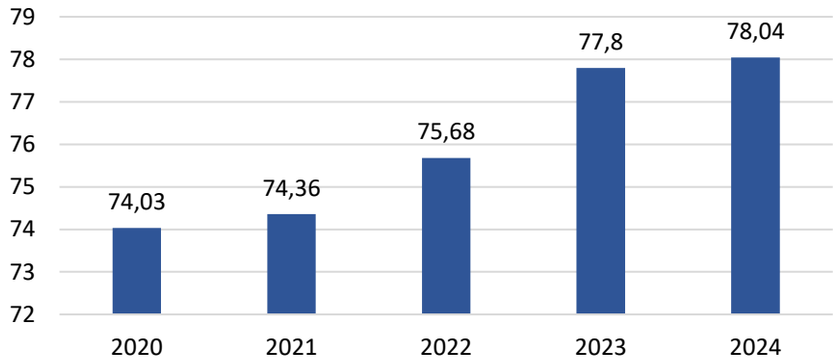

Gambar 2. 40 Indeks Kerukunan Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, 2025

2.2.5.2 Seni Budaya dan Bangunan Budaya

Aspek budaya di Kota Madiun dicerminkan melalui dua indikator, yaitu persentase seni budaya yang dilestarikan dan persentase benda/bangunan cagar budaya yang dilestarikan. Adapun capaian tersebut di Kota Madiun yaitu sebesar 200% pada indikator persentase seni budaya yang dilestarikan pada tahun 2022 dan 2023. Sedangkan indikator persentase benda/bangunan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 100%.

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.2.6.1 Indeks Pembangunan Gender

Berdasarkan data laporan pengaduan di Pusat Pelayanan Terpadu, tidak terdapat kekerasan terhadap perempuan dan anak selama Tahun 2019 hingga Tahun 2024. Kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah ditangani dengan baik, dengan capaian sebesar 100%. Dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG), IPG merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur capaian dengan indikator yang sama seperti IPM, namun lebih fokus menunjukkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

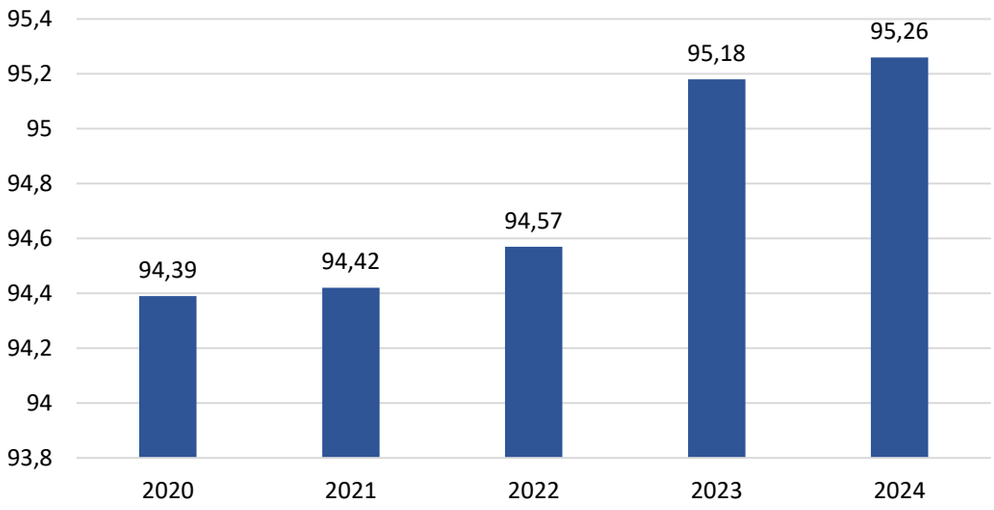

Gambar 2. 41 Indeks Pembangunan Gender di Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, BPS Kota Madiun, diolah

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Madiun mengalami perkembangan yang positif dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Indeks Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun Tahun 2020 sebesar 94,39. Tahun 2021, Indeks Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun mengalami kenaikan menjadi sebesar 94,42, hingga Tahun 2023 terus mengalami kenaikan menjadi sebesar 95,18. Namun pada tahun 2024 Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengalami kenaikan sebesar 0,08 yaitu menjadi 95,26. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi perempuan, serta mendorong tingkat partisipasi dalam ekonomi dan politik semakin baik.

Adapun perbandingan capaian IPG Nasional dan Provinsi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 28 Perbandingan Capaian IPG Kota Madiun, Provinsi dan Nasional 2017-2024

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
NASIONAL	90,96	90,99	91,07	91,06	91,27	91,63	91,85	91,85
PROP JATIM	90,76	90,77	90,91	91,91	91,67	92,08	92,15	92,19
KOTA MADIUN	93,66	93,47	94,05	94,05	94,42	94,57	95,18	95,26

2.2.6.2 Indeks Pemberdayaan Gender

Kemudian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Madiun pada tahun 2020 sebesar 77,18 dan menurun menjadi 76,75 pada tahun 2021. Tahun 2022, IPG Kota Madiun mengalami kenaikan menjadi 78,03 dan meningkat signifikan pada tahun 2023 sebesar 78,91, akan tetapi pada tahun 2024 ketimpangan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dan politik semakin besar dengan capaian IDG turun menjadi 76,51.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Adapun perbandingan capaian IDG Nasional dan Provinsi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 29 Perbandingan Capaian IDG Kota Madiun, Provinsi dan Nasional 2019-2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indonesia	75,24	75,57	76,26	76,59	76,9	77,62
Jawa Timur	73,04	73,03	72,36	74,42	74,9	75,32
Kota Madiun	77,07	77,18	76,75	78,03	78,94	76,51

capaian IDG Kota Madiun Tahun 2020-2024 sebagaimana gambar dibawah ini :

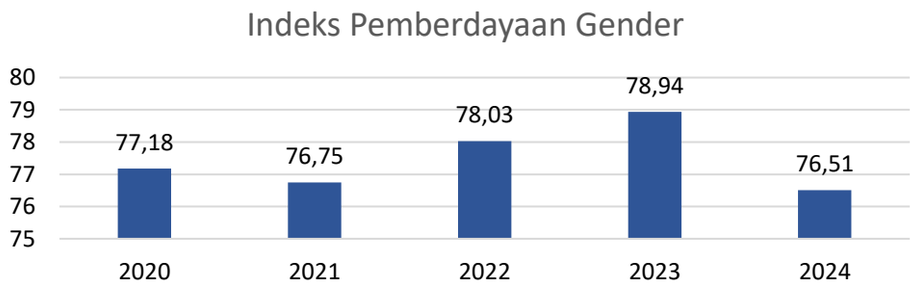

Gambar 2. 42 Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Madiun Tahun 2020-2023
Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, BPS Kota Madiun, diolah

2.2.6.3 Indeks Ketimpangan Gender

Salah satu indikator yang dapat melihat kesenjangan gender yakni Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IKG merujuk pada metodologi yang digunakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam menyusun *Gender Inequality Index* (GII) 2010 dengan menyesuaikan data yang tersedia. IKG berfokus mengukur kesenjangan pencapaian antara perempuan dengan laki-laki dalam tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

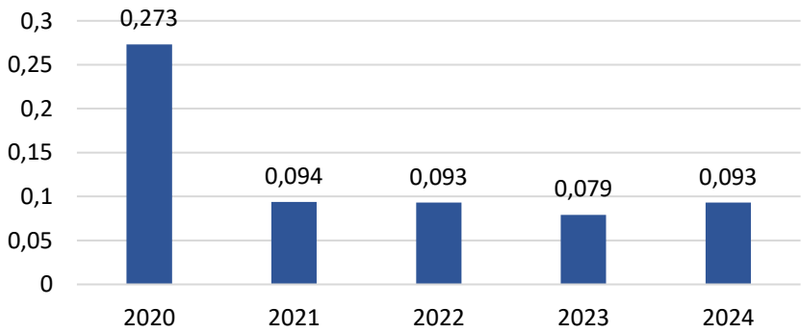

Gambar 2. 43 Indeks Ketimpangan Gender di Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, BPS Kota Madiun, diolah

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kota Madiun pada Tahun 2020 mencapai 0,273. IKG Tahun 2021 dan Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,09. Adapun pada tahun 2023, IKG mengalami penurunan hingga 0,079. Namun pada tahun 2024 IKG kembali mengalami kenaikan menjadi 0,093.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk menurunnya keterwakilan perempuan dalam politik, meningkatnya proporsi perempuan yang melahirkan di usia muda, serta rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar dengan penetapan anggaran sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang sebesar 20 persen dari APBD. Pelayanan aspek pendidikan diharapkan mampu mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan dan memperluas pembangunan antar wilayah, serta mampu menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan cerdas.

Kualitas dan akses pendidikan khususnya pendidikan formal dipresentasikan dari tingkat Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) khususnya pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah. IPM Kota Madiun selama lima tahun berturut-turut terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, IPM Kota Madiun mencapai 84,51.

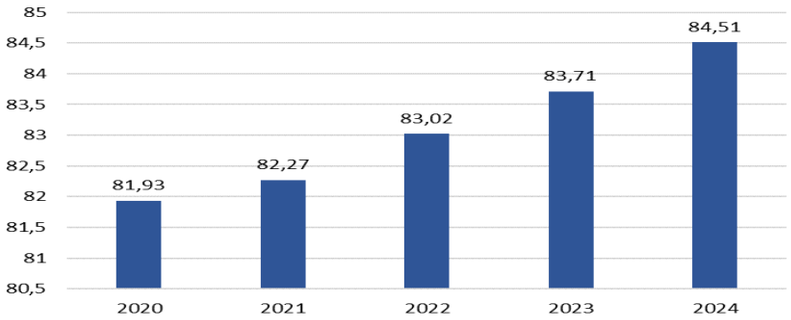

Gambar 2. 44 Indeks Pembangunan Manusia di Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, BPS Kota Madiun, diolah

2.3.1.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merepresentasikan perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Sehingga Rasio Ketergantungan juga mencerminkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Semakin tinggi persentase Rasio Ketergantungan, maka semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Adapun Rasio Ketergantungan Kota Madiun pada tahun 2024 adalah 42,77% yang berarti bahwa setiap 100 orang usia produktif di Kota Madiun harus menanggung sekitar 43 orang usia tidak produktif. Angka ini relatif rendah, menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kota Madiun berada dalam usia produktif, yang merupakan kondisi demografis yang menguntungkan untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, tetap perlu kebijakan untuk meningkatkan lapangan kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan, terutama untuk penduduk tidak produktif agar beban ekonomi tidak semakin berat.

2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

2.3.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Bruto (ADHB)

PDRB dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian atau unit ekonomi di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. PDRB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga periode berjalan, sedangkan PDRB harga tetap dihitung dengan menggunakan harga Tahun tertentu pada Tahun dasar yakni menggunakan Tahun dasar 2010.

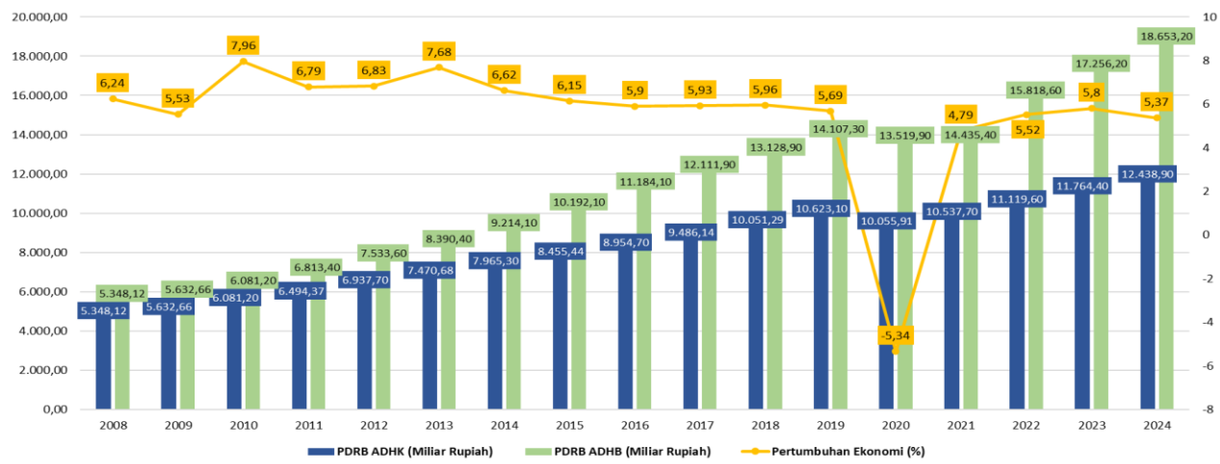

Gambar 2. 45 PDRB ADHK, PDRB ADHB, Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2008-2024
Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, BPS Kota Madiun, diolah

PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Kota Madiun menunjukkan pertumbuhan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2024. Meskipun mengalami kontraksi di tahun 2020, PDRB ADHK terus meningkat setiap tahun setelahnya. Demikian pula PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Madiun juga menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sedangkan dari sisi pertumbuhan ekonomi Kota Madiun, tahun 2020 mengalami kontraksi ekonomi dengan pertumbuhan -5,34%, yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Tahun 2021 terjadi pemulihan dengan pertumbuhan 4,79% dan meningkat menjadi 5,52% pada tahun 2022. Tahun 2023 mencapai puncak pertumbuhan sebesar 5,8% dan sedikit menurun menjadi 5,37% pada tahun 2024. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun menunjukkan tren pemulihan dan stabilisasi setelah mengalami kontraksi di tahun 2020.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 30 Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Madiun (%) Tahun 2008-2024

No.	Sektor/Kategori	TAHUN																	Rata - Rata
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.22	1.2	1.09	1.09	1.05	0.98	0.93	0.89	0.85	0.79	0.76	0.71	0.84	0.74	0.66	0.66	0.71	0.89
2	Pertambangan dan Penggalian	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02
3	Industri Pengolahan	17.8	17.34	17.18	17.18	16.93	16.9	17.08	17.14	17.35	17.68	17.86	17.68	14.23	14.54	14.08	14.37	13.63	16.41
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0.28	0.27	0.25	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.23	0.24	0.23	0.23	0.21	0.23
6	Konstruksi	6.95	6.82	6.64	6.64	6.63	6.63	6.53	6.49	6.4	6.38	6.14	6.09	6.13	5.8	5.95	5.89	5.93	6.36
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Sepeda Motor	24.24	24	23.78	23.78	24.01	24.05	23.79	23.41	23.24	23.21	23.56	23.67	22.21	23.35	23.89	23.84	26.37	23.79
8	Transportasi dan Pergudangan	2.99	2.89	2.84	2.84	2.82	2.81	2.85	2.87	2.9	2.97	3.04	3.11	3.17	3.24	3.59	3.79	4.72	3.14
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.67	4.71	4.75	4.75	4.74	4.74	4.77	4.82	4.89	4.96	5.11	5.26	5.12	5.04	5.25	5.31	5.4	4.96
10	Informasi dan Komunikasi	13.29	13.74	14.69	14.69	15.01	15.25	15.47	15.76	15.87	15.99	15.9	15.73	19.3	19.29	19.37	19.44	15.04	16.11
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.53	8.47	8.51	8.51	8.7	9.02	9.12	9.23	9.34	9.16	9	8.92	9.36	8.97	8.53	8.29	9.49	8.89
12	Real Estate	2.49	2.5	2.56	2.56	2.57	2.56	2.56	2.57	2.57	2.53	2.47	2.48	2.62	2.53	2.52	2.49	2.46	2.53
13	Jasa Perusahaan	0.74	0.74	0.71	0.71	0.7	0.7	0.71	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.74	0.72	0.71	0.72	0.69	0.72
14	Administrasi Pemerintahaan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.27	4.31	4.04	4.04	3.84	3.6	3.4	3.33	3.24	3.13	3.09	3.03	3.13	2.96	2.79	2.65	2.82	3.39
15	Jasa Pendidikan	7	7.46	7.46	7.46	7.4	7.29	7.36	7.37	7.32	7.22	7.1	7.24	7.79	7.48	7.13	6.95	7.05	7.30
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.1	1.11	1.21	1.21	1.24	1.22	1.24	1.27	1.27	1.27	1.29	1.31	1.53	1.54	1.5	1.47	1.47	1.31
17	Jasa Lainnya	4.32	4.33	4.17	4.17	4.03	3.9	3.85	3.78	3.72	3.66	3.65	3.69	3.48	3.46	3.68	3.8	3.92	3.86
	PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, diolah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kontribusi sektor yang paling besar terhadap perekonomian Kota Madiun yakni sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan rata-rata kontribusi sebesar 23,79% setiap Tahunnya. Setiap Tahunnya sektor tersebut memiliki tren yang meningkat dalam berkontribusi terhadap perekonomian Kota Madiun kecuali saat pandemi Covid-19 yang sempat mengalami penurunan kontribusi. Kontribusi besar tersebut dapat mendorong Kota Madiun menjadi kota perdagangan di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Kontribusi terbesar kedua yakni sektor Industri Pengolahan dengan rata-rata kontribusi setiap Tahunnya sebesar 16,41%. Selama periode Tahun 2008-2024 sektor ini berkontribusi paling besar pada Tahun 2018. Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor Industri Pengolahan Kota Madiun memiliki potensi pengembangan yang besar karena kontribusinya yang cukup besar terhadap perekonomian. Selain sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta informasi dan komunikasi, sektor yang memiliki kontribusi cukup besar juga terhadap perekonomian Kota Madiun yakni sektor Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, serta Jasa Pendidikan dengan masing-masing rata-rata kontribusinya sebesar 16,11%, 8,89%, serta 7,3% per Tahun.

Apabila ditinjau melalui kontribusi sektor terbesar terhadap PDRB, terdapat 5 (lima sektor) yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi, serta Jasa Pendidikan. Adapun perkembangan dari masing-masing sektor dari tahun 2008 hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

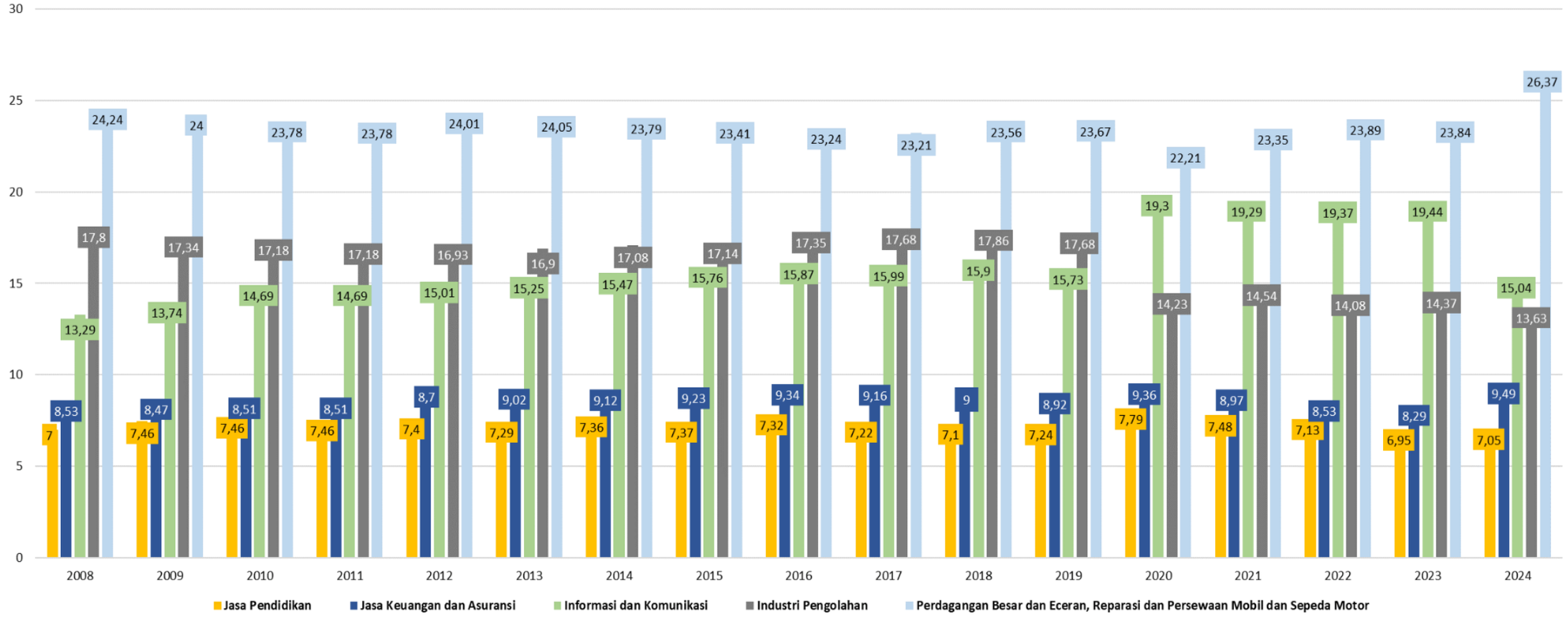

Gambar 2. 46 Kontribusi 5 Sektor / Kategori Terbesar PDRB ADHB Tahun 2008-2024
Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, diolah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Struktur perekonomian Kota Madiun tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu Tahun 2008-2024, dimana sektor tersier masih mendominasi perekonomian bahkan terus berkembang. Pada Tahun 2008 kontribusi sektor tersier di Kota Madiun sebesar 73,75% dan terus meningkat menjadi 79,72% pada Tahun 2024. Kontribusi sektor primer terhadap perekonomian Kota Madiun terus mengalami penurunan dari sebesar 1,17% pada Tahun 2008 menjadi sebesar 0,98% pada Tahun 2024. Sektor sekunder sendiri selama periode 2008-2024 juga mengalami penurunan. Pada Tahun 2008, kontribusi sektor sekunder yakni sebesar 25,08% dan menurun menjadi sebesar 19,30% pada Tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 31 Struktur Perekonomian Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha Primer, Sekunder, dan Tersier (%) Tahun 2008-2024

Sektor	Tahun																
	2008	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Primer (%)	1.25	1.23	1.12	1.12	1.08	1.01	0.96	0.92	0.88	0.81	0.78	0.73	0.86	0.76	0.68	0.67	0,98
Sekunder (%)	25.11	24.52	24.16	24.16	23.88	23.85	23.92	23.92	24.04	24.36	24.29	24.06	20.68	20.66	20.35	20.58	19,30
Tersier (%)	73.64	74.25	74.72	74.72	75.04	75.14	75.13	75.16	75.09	74.83	74.93	75.17	78.46	78.58	78.97	78.75	79,72

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, diolah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.3.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita ADHB

PDRB per kapita merupakan PDRB suatu Daerah dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah tertentu. PDRB dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi PDRB per Kapita, maka tingkat kesejahteraan semakin baik.

Berdasarkan data PDRB per kapita ADHB Kota Madiun dalam ribu rupiah untuk periode 2021-2024, terlihat adanya tren peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, PDRB per kapita tercatat sebesar 53,66 juta rupiah per kapita. Tahun 2022, angka ini mengalami lonjakan tajam menjadi 79,82 juta rupiah. Sementara tahun 2023, PDRB per kapita kembali meningkat menjadi 86,29 juta rupiah, meskipun laju pertumbuhannya lebih moderat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, PDRB per kapita diperkirakan mencapai 92,45 juta rupiah, melanjutkan tren kenaikan yang stabil.

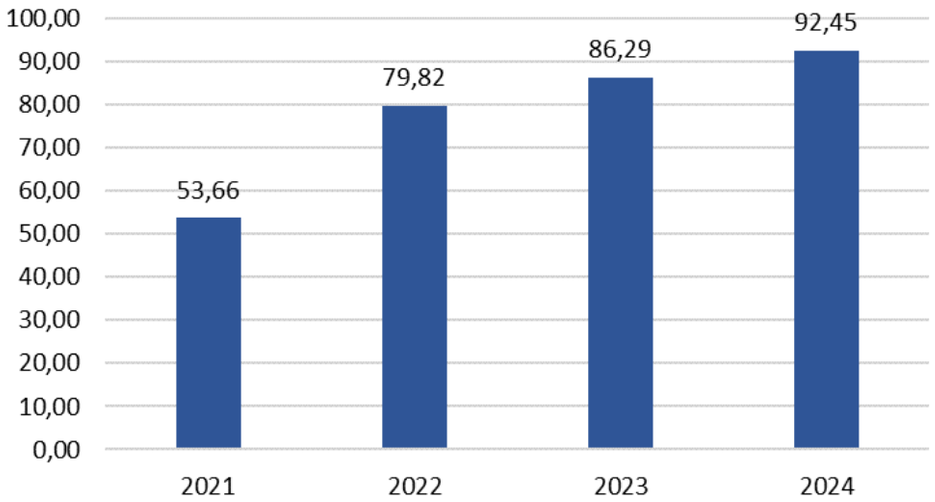

Gambar 2. 47 PDRB Per Kapita ADHB di Kota Madiun (Juta Rupiah) Tahun 2021-2024

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, diolah

2.3.2.3 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB industri pengolahan dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Tahun 2020 mencatat rasio tertinggi sebesar 4,46 dan kemudian menurun drastis pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,39. Meski pada 2023 dan 2024 mengalami kenaikan kembali sebesar 1,38 dan 1,11, namun capaian ini belum kembali ke level sebelum pandemi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

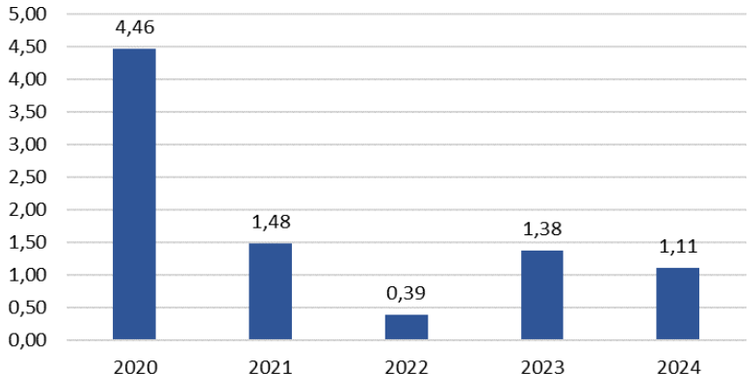

Gambar 2. 48 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, diolah

2.3.2.4 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kota Madiun dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pemulihan yang lebih cepat dibanding industri pengolahan. Setelah mengalami penurunan tajam pada 2021 sebesar 0,67, sektor ini melonjak ke 1,80 pada 2022, mencerminkan pemulihan aktivitas ekonomi. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada 2023 sebesar 1,19, sektor ini tetap menunjukkan tren positif hingga 2024 hingga 1,33.

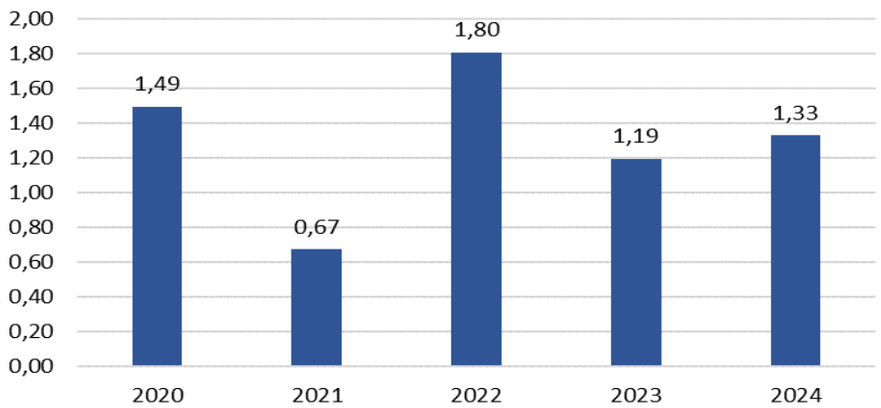

Gambar 2. 49 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, diolah

2.3.2.5 Indeks Ekonomi Inklusif

Peningkatan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan antar kelompok dan wilayah dapat tercapai dengan pembangunan ekonomi yang menciptakan peluang dan kesempatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) mengalami kenaikan signifikan dari 6,69 pada tahun 2020 menjadi 6,87 sejak tahun 2021 dan stabil hingga 2024. Hal ini menunjukkan adanya kebijakan inklusif yang berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara lebih merata.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

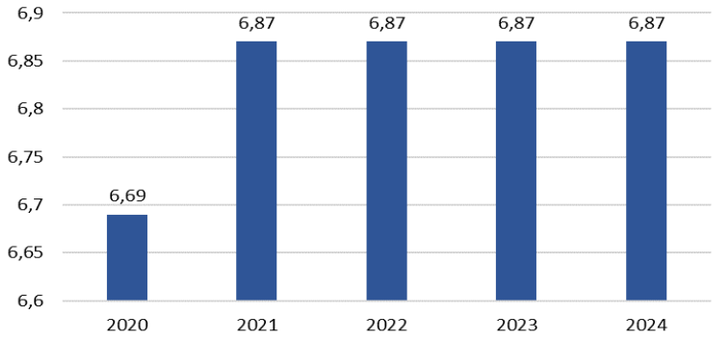

Gambar 2. 50 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas

2.3.2.6 Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat inovasi suatu daerah dalam berbagai aspek, seperti kebijakan, ekonomi, teknologi, dan pelayanan publik. Indeks ini dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih inovatif dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah.

Indeks Inovasi Daerah Kota Madiun menunjukkan peningkatan dari 52,99 pada tahun 2021 menjadi 67,08 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan peningkatan upaya inovasi daerah dalam kebijakan, teknologi, dan ekonomi kreatif. Namun, pada tahun 2023 sempat mengalami sedikit penurunan sebesar 52,62.

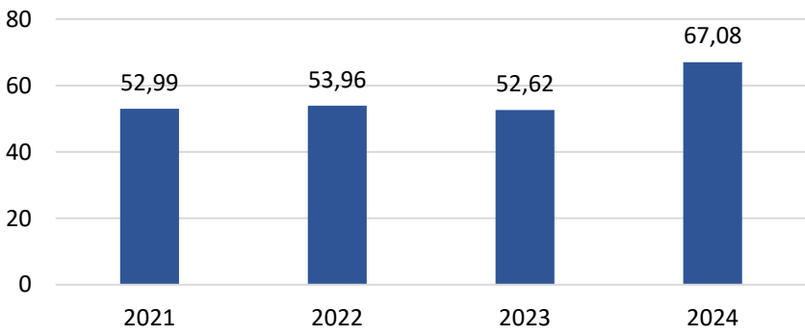

Gambar 2. 51 Indeks Inovasi Daerah Kota Madiun Tahun 2021-2024
Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

2.3.2.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPAK menunjukkan tren yang positif setelah mengalami penurunan pada 2021-2022 sebesar 66,87 pada tahun 2021 dan 66,85 pada tahun 2022. Sedangkan tahun 2023 dan 2024 mencatat peningkatan signifikan sebesar 69,29% dan 70,6%, menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk usia kerja yang masuk dalam pasar tenaga kerja, menandakan perbaikan dalam kesempatan kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

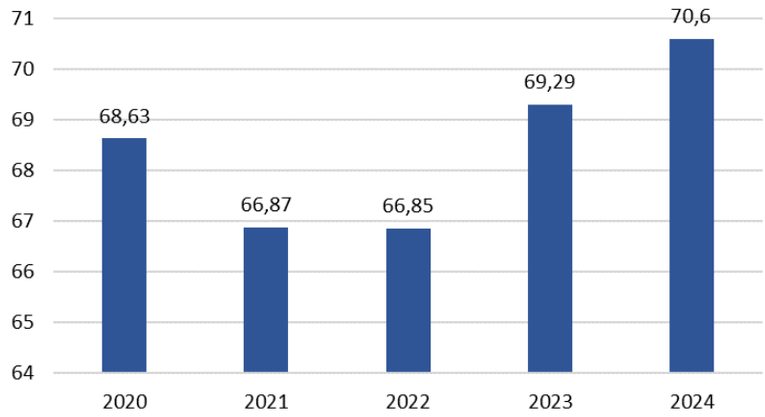

Gambar 2. 52 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

2.3.3 Transformasi Digital

2.3.3.1 Tingkat Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan poin penting bagi terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik agar masyarakat mengetahui apa saja yang telah diperbuat oleh penyelenggara pelayanan publik, khususnya terkait dengan standar operasional.

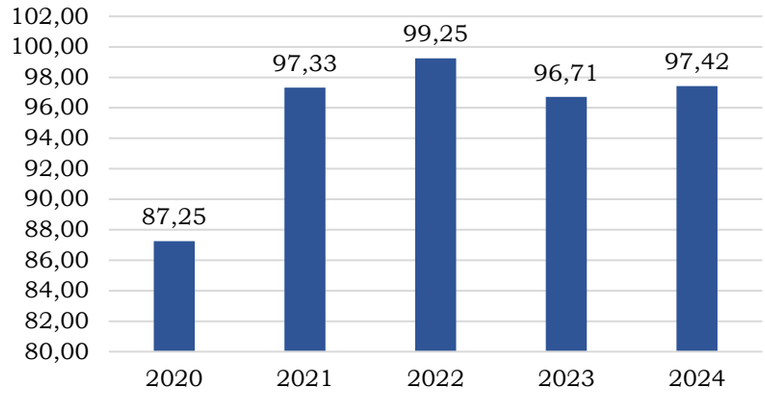

Gambar 2. 53 Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2025

2.3.4 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.3.4.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kota Madiun mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, PMTB tercatat sebesar Rp2.038,80 miliar dan meningkat secara konsisten setiap tahunnya hingga mencapai Rp2.526,40 miliar pada tahun 2024. Tren ini mencerminkan pertumbuhan investasi di sektor aset tetap seperti infrastruktur, bangunan, dan peralatan produksi, yang menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Peningkatan PMTB ini menunjukkan adanya optimisme pelaku usaha dan pemerintah dalam memperkuat perekonomian daerah melalui investasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

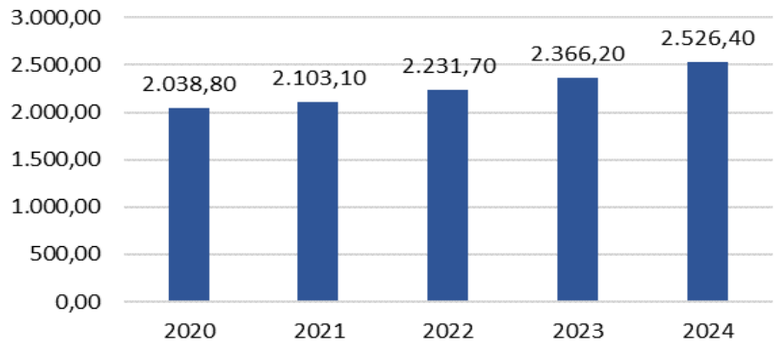

Gambar 2. 54 Pembentukan Model Tetap Bruto Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

Sedangkan kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, dari 20,97 pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 sebesar 20,66, nilai kontribusi PMTB mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2022 sebesar 20,80. Pada tahun 2023 mengalami penurunan hingga sebesar 20,11 dan kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar 20,26. Peningkatan kontribusi PMTB ini mengindikasikan adanya pertumbuhan investasi dalam aset tetap seperti infrastruktur, peralatan, dan bangunan yang mendukung aktivitas ekonomi di Kota Madiun. Hal ini berkontribusi positif terhadap PDRB, mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan daya saing ekonomi daerah.

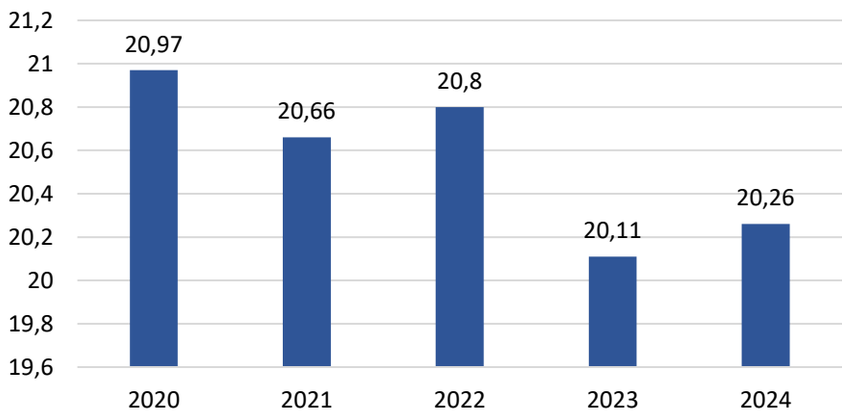

Gambar 2. 55 Kontribusi Pembentukan Model Tetap Bruto Terhadap PDRB Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

2.3.4.2 Net Ekspor Barang dan Jasa

Net ekspor barang dan jasa di Kota Madiun menunjukkan tren defisit dari tahun 2020 hingga 2024, meskipun mengalami perbaikan yang signifikan. Pada tahun 2020, defisit net ekspor mencapai Rp211,8 miliar, yang kemudian menurun menjadi Rp174,6 miliar pada 2021, Rp178,1 miliar pada 2022, dan Rp46,7 miliar pada 2023. Pada tahun 2024, defisit net ekspor hampir mendekati keseimbangan dengan hanya Rp5,2 miliar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan Kota Madiun terhadap impor semakin berkurang, atau ekspor barang dan jasa dari Kota Madiun semakin meningkat. Perbaikan dalam neraca perdagangan ini dapat mencerminkan adanya peningkatan daya saing produk lokal atau efisiensi dalam rantai distribusi.

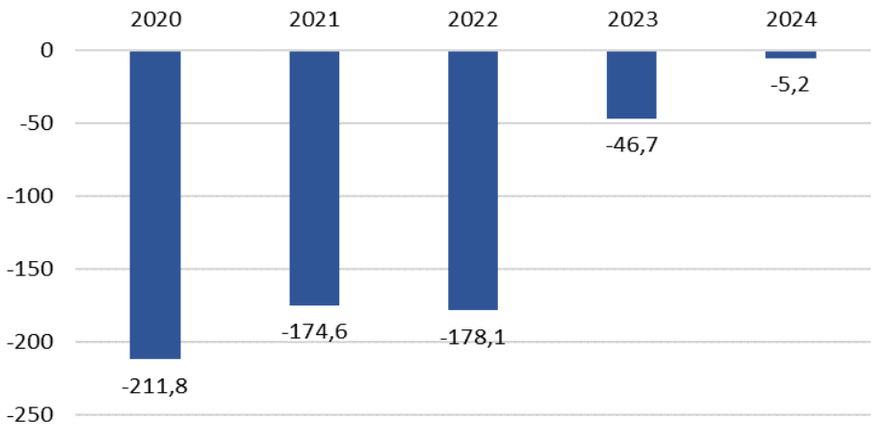

Gambar 2. 56 Net Ekspor Barang dan Jasa Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

Sementara kontribusi net ekspor menunjukkan tren negatif sepanjang periode 2020-2024, meskipun mengalami perbaikan dari -5,26 pada tahun 2020 menjadi -3,57 pada tahun 2024. Defisit net ekspor yang terus berlanjut menunjukkan bahwa impor masih lebih tinggi dibandingkan ekspor. Namun, tren perbaikan ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja ekspor atau penurunan impor, yang bisa menjadi indikasi peningkatan daya saing produk lokal atau efisiensi dalam konsumsi barang impor. Meskipun kontribusinya terhadap PDRB masih negatif, perbaikan ini dapat membantu mengurangi tekanan terhadap keseimbangan perdagangan daerah.

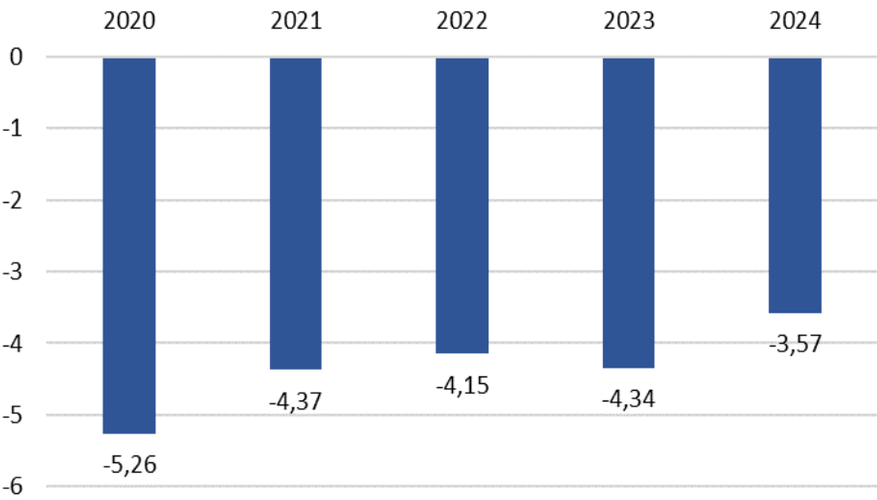

Gambar 2. 57 Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.3.5 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.3.5.1 Indeks Infrastruktur

Dalam mengukur kinerja infrastruktur digunakan indikator indeks Infrastruktur. Indikator ini mempresentasikan kinerja infrastruktur Kota. Infrastruktur yang menjadi faktor yang mempengaruhi capaian indeks infrastruktur antara lain: kualitas infrastruktur jalan beraspal, cakupan layanan air bersih perpipaan, dan cakupan layanan sanitasi aman bagi masyarakat. Indeks Infrastruktur Kota Madiun dari tahun 2020 hingga 2023 terus mengalami peningkatan, dari 96,15 pada tahun 2020 hingga 98,44 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur di Kota Madiun terus mengalami perbaikan. Adapun data Indeks Infrastruktur untuk tahun 2024 yaitu 98,62.

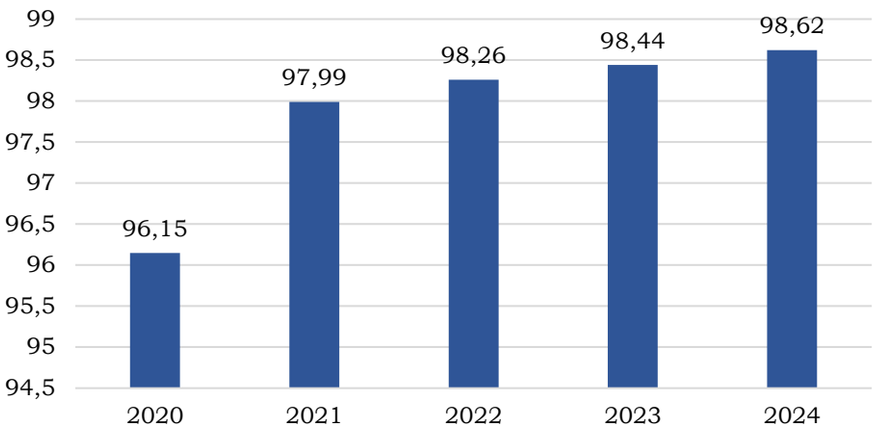

Gambar 2. 58 Indeks Infrastruktur Kota Madiun 2020-2024
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025 (data diolah)

2.3.5.2 Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni merupakan rasio perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk, rasio rumah layak huni juga menggambarkan tentang rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan di wilayah Kota Madiun. Rasio rumah layak huni Kota Madiun dari tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Tahun 2020-2022, rasio rumah layak huni menunjukkan penurunan. Namun pada tahun 2023 dan 2024, rasio rumah layak huni mengalami peningkatan, yaitu sebesar 99,72 pada tahun 2023 dan 99,9 pada tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

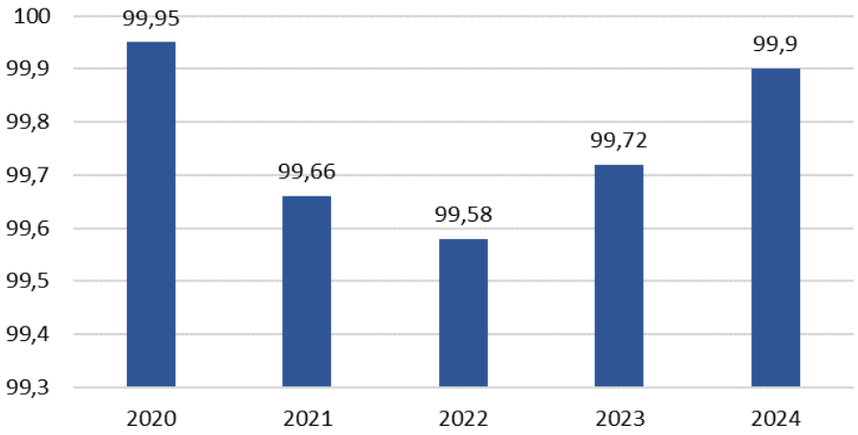

Gambar 2. 59 Rasio Rumah Layak Huni Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

2.3.6 Stabilitas Ekonomi Makro

2.3.6.1 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama periode waktu tertentu. Inflasi menjadi salah satu indikator yang terkait langsung dengan kemampuan daya beli dari yang yang dimiliki masyarakat, terutama yang berpenghasilan tetap. Laju inflasi di Kota Madiun mengalami perkembangan yang fluktuatif. Tingkat inflasi Kota Madiun pada tahun 2005 sebesar 12,27% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tingkat inflasi pada tahun 2024 yang mencapai 1,31%. Posisi inflasi Kota Madiun tahun 2024 senilai berada di bawah provinsi Jawa Timur (1,51%) serta berada di atas tingkat nasional (1,57%). Inflasi tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

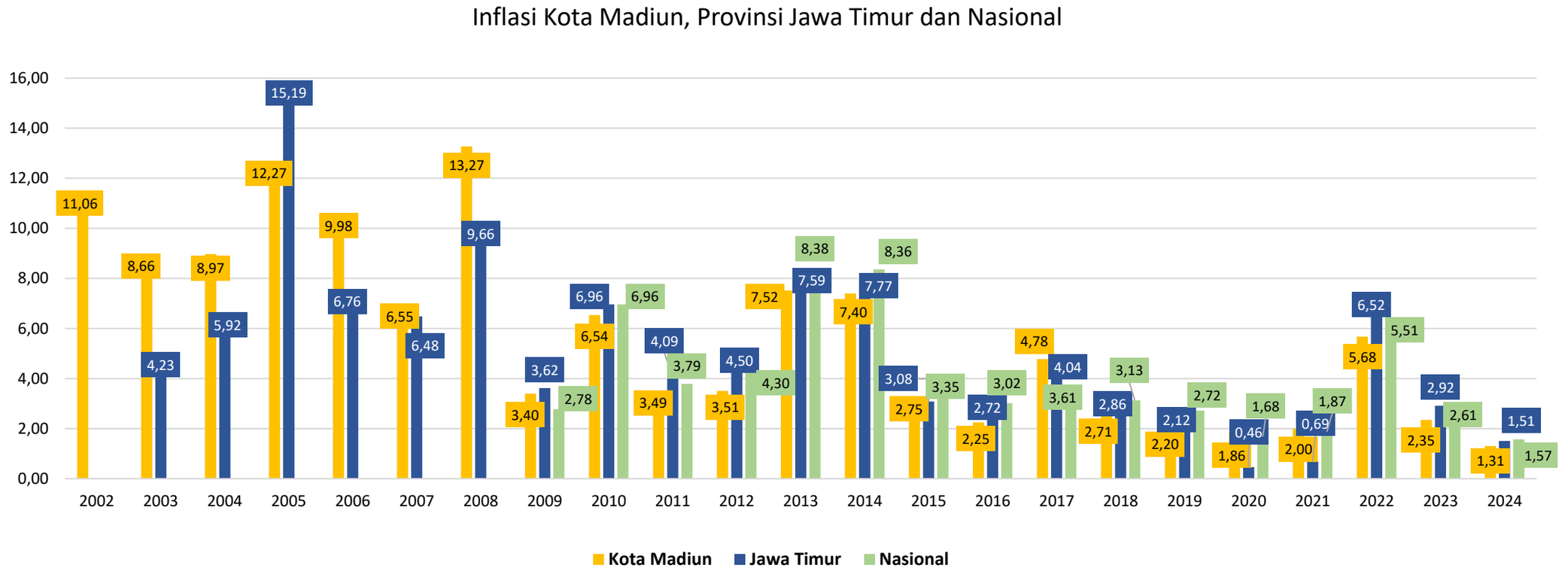

Gambar 2. 60 Tingkat Inflasi Kota Madiun Tahun 2002-2024
Sumber: BPS Jawa Timur, BPS Kota Madiun, diolah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.3.6.2 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Berdasarkan data rasio pajak terhadap PDRB Kota Madiun dalam periode 2020-2024, terlihat adanya fluktuasi dalam kontribusi pajak terhadap PDRB. Pada tahun 2020, rasio pajak terhadap PDRB tercatat sebesar 0,0090. Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,0083 dan kembali meningkat signifikan menjadi 0,0095 pada tahun 2022. Tren kenaikan berlanjut pada tahun 2023 dengan rasio sebesar 0,0096 dan mencapai 0,0098 pada tahun 2024.

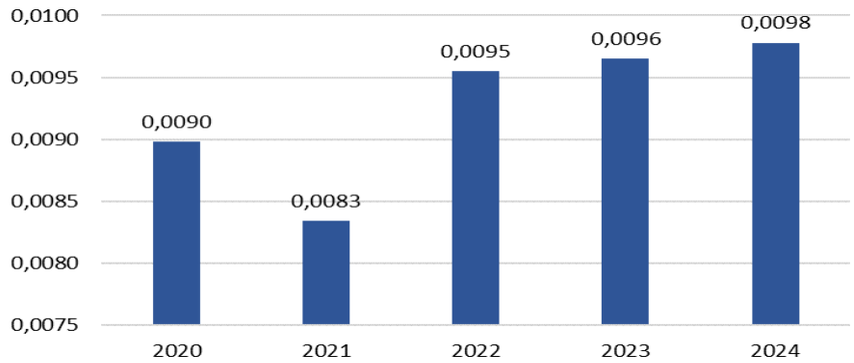

Gambar 2. 61 Rasio Pajak Terhadap PDRB Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Sekretariat Daerah Kota Madiun, 2025

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.4.1.1 Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas. Berdasarkan hasil capaian Indeks Reformasi Hukum Kota Madiun menunjukkan bahwa dari tahun 2022 hingga 2024, angka indeks IRH secara konstan meningkat dari tahun 2022 sebesar 64; tahun 2023 sebesar 76,23; serta tahun 2024 sebesar 98,20.

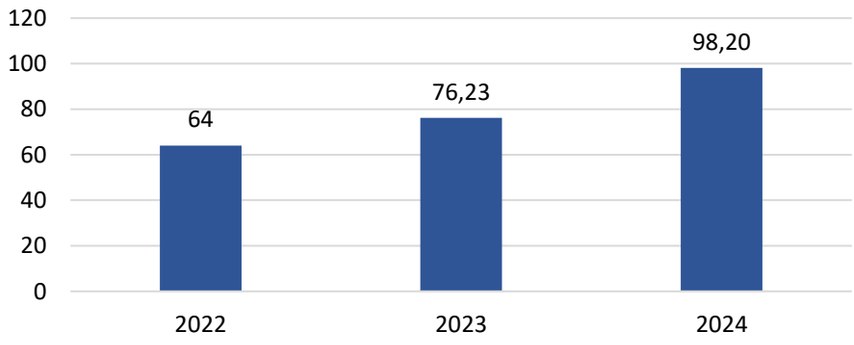

Gambar 2. 62 Indeks Reformasi Hukum Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Sekretariat Daerah Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.4.1.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan optimal, merupakan amanat pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres SPBE). Melalui penerapan SPBE secara terpadu dan menyeluruh, diharapkan dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

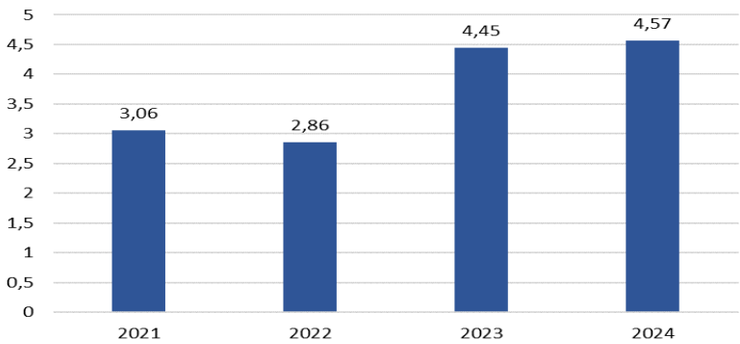

Gambar 2. 63 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Sekretariat Daerah Kota Madiun, 2025

Hasil capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Madiun menunjukkan tren yang fluktuatif. Di tahun 2020 tidak terdapat data untuk Indeks SPBE. Sementara di tahun 2021 Indeks SPBE sebesar 3,06. Angka ini kemudian menurun di tahun 2022 sebesar 2,86. Namun di tahun 2023 dan 2024, Indeks SPBE menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar 4,45 dan 4,57. Peningkatan selama dua tahun terakhir ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah meningkat sehingga kualitas layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik Kota Madiun lebih baik, efisien dan optimal.

2.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan salah satu instrumen penting dalam menilai kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpanrb) Nomor 4 Tahun 2023, IPP dirancang sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan bahwa masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Adapun komponen utama penyusun IPP adalah kebijakan pelayanan yang meliputi regulasi, standar operasional prosedur (SOP), dan instrumen-instrumen yang digunakan untuk memastikan pelayanan publik dilaksanakan dengan baik; profesionalisme SDM yang meliputi kompetensi dan kinerja sumber daya manusia (SDM); sarana dan prasarana pelayanan berupa fasilitas fisik dan teknologi; inovasi pelayanan; serta kepuasan pengguna layanan.

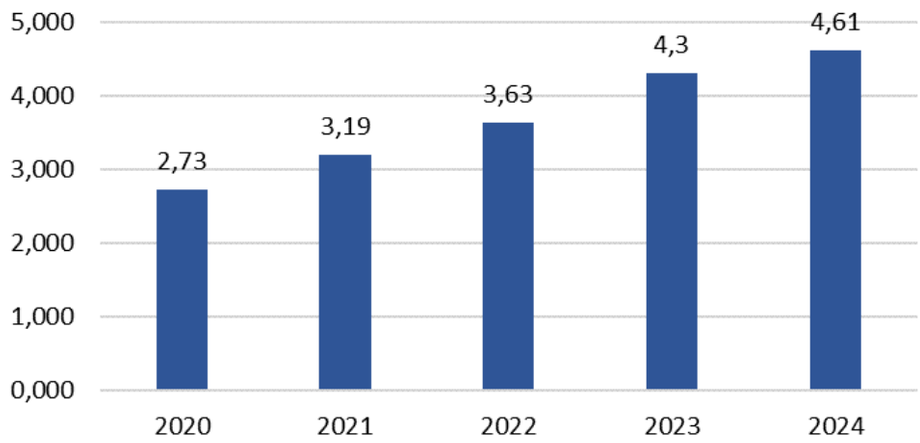

Gambar 2. 64 Indeks Pelayanan Publik Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Sekretariat Daerah Kota Madiun, 2025

Hasil Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kota Madiun dari tahun 2020-2024 secara konstan menunjukkan peningkatan. Di tahun 2020, IPP menunjukkan angka 2,73 dan kemudian meningkat menjadi 3,19 di tahun 2021. Angka ini sedikit meningkat pada tahun 2022 sebesar 3,63 dan tahun 2023 sebesar 4,3. Adapun IPP di tahun 2024 adalah sebesar 4,61. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kota Madiun selalu menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Perolehan Indeks Pelayanan Publik di Kota Madiun dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor pendorong maupun faktor penghambat. Faktor pendorong Keberhasilan tercapainya indeks Pelayanan Publik adalah :

1. Komitmen pimpinan;
2. Tersedianya tim evaluasi pelayanan public yang kompeten; dan
3. Pembinaan pelayanan public secara berkala

Faktor penghambat

1. Kebijakan pemerintah pusat yang sering kali berubah sehingga membutuhkan sinkronisasi antar dokumen;
2. Jumlah anggota tim evaluasi pelayanan publik terbatas dibandingkan jumlah UPP yang dievaluasi; dan
3. Kemungkinan adanya rotasi pegawai yang menangani pelaynan public pada masing-masing UPP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rencana Tindak lanjut kedepan untuk meningkatkan capaian Indeks Pelayanan Publik di Kota Madiun, guna meningkatkan kinerja adalah :

1. koordinasi dan memberikan layanan konsultasi pelayanan publik keseluruh UPP; dan
2. peningkatan komitmen pimpinan dan system kerja yang adaptif dan kolaboratif.

2.4.1.4 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah Suatu indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur.

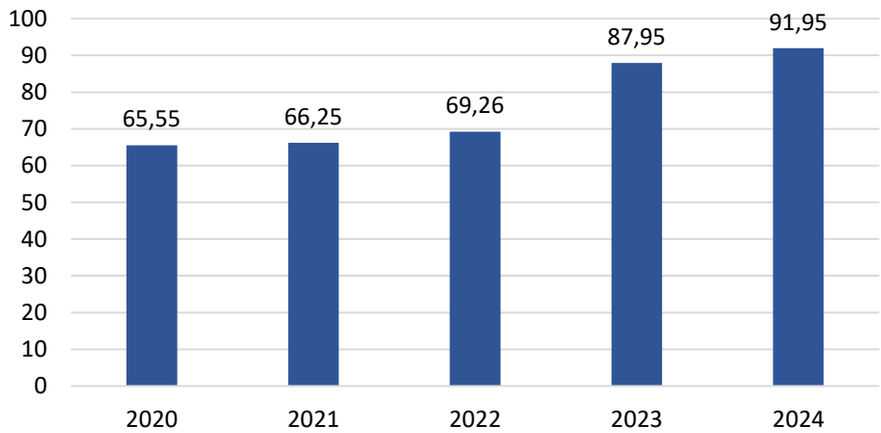

Gambar 2. 65 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Sekretariat Daerah Kota Madiun, 2025

Indeks Reformasi Birokrasi Kota Madiun dari tahun 2020-2023 selalu menunjukkan peningkatan. Tahun 2020 capaiannya sebesar 65,55 dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 66,25. Di tahun 2022 Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 69,26 dan tahun 2023 sebesar 87,95. Adapun tahun 2024 data Indeks Reformasi Birokrasi kembali meningkat menjadi 91,95. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Madiun memiliki beberapa permasalahan yang mempengaruhinya yaitu :

1. Masih terdapatnya penetapan target atas kegiatan utama belum didasarkan pada target reformasi birokrasi nasional (kepmenpan RB nomor 182 Tahun 2024);
2. Belum adanya perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan/atau penyesuaian SOP terkait dengan system kerja dan penyederhanan birokrasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Pengelolaan komunikasi kebijakan kepada seluruh stakeholder sasaran pada seluruh proses kebijakan yang belum optimal;
4. Belum terdapat kebijakan atau kaidah baku terkait aspek data statistik yang berlaku untuk seluruh produsen data di Kota Madiun;
5. Belum optimalnya kerja sama antara lima elemen masyarakat, yaitu pemerintah, masyarakat akademisi, dunia usaha, dan media dalam pengendalian inflasi; dan
6. Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran SPBE berbasis arsitektur SPBE dengan indeks dan menerapkan mekanisme evaluasi/*clearance* belanja SPBE di perangkat daerah.

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

2.4.2.1 Persentase Penegakan Perda

Capaian persentase penegakan Perda Kota Madiun selama lima tahun dari 2020 hingga 2024 menunjukkan 100% atau dengan kata lain semua gangguan dan pengaduan sudah tertangani dengan baik.

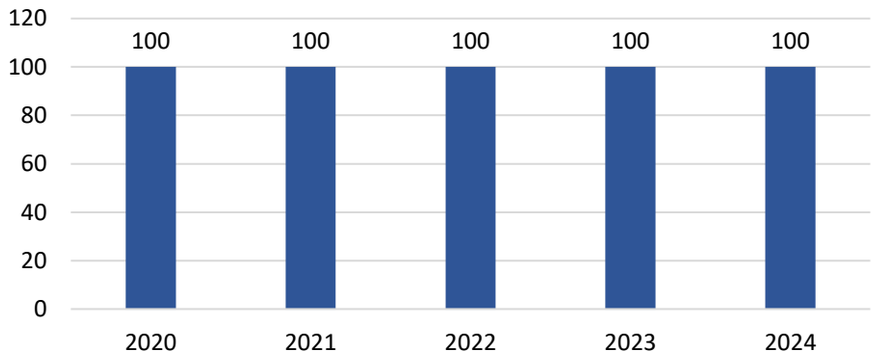

Gambar 2. 66 Persentase Penegakan Perda Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Satpol PP Kota Madiun, 2025

2.4.2.2 Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman mengukur sejauh mana masyarakat merasa aman dalam lingkungan sosialnya. Hal ini mencakup indikator-indikator seperti tingkat kejahatan, tingkat kepuasan terhadap pelayanan keamanan, dan tingkat kepercayaan antarwarga dalam membangun suasana aman dan nyaman.

Indeks Rasa Aman Kota Madiun tahun 2020 dan tahun 2022 berada di angka 77,02 dan 81,00. Indeks Rasa Aman mengalami kenaikan hingga tahun 2024 terjadi peningkatan yang signifikan hingga 84,16.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

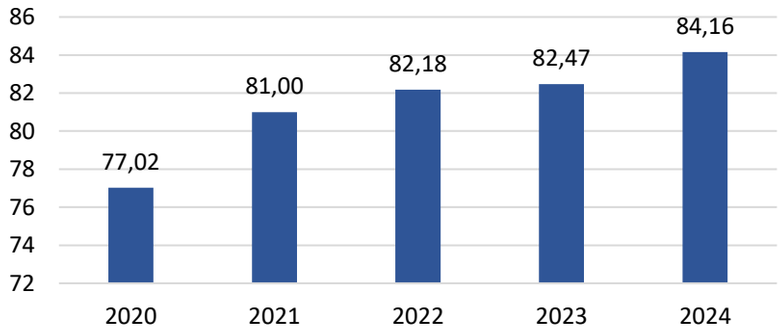

Gambar 2. 67 Indeks Rasa Aman Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Satpol PP Kota Madiun, 2025

2.4.2.3 Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang dicerminkan oleh Indeks Ketentraman dan Ketertiban. Capaian Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota Madiun menunjukkan tren yang meningkat. Tahun 2020 Indeks Ketentraman dan Ketertiban sebesar 76,87. Angka ini meningkat menjadi 78,74 di tahun 2021 dan 81,25 di tahun 2022. Adapun di tahun 2023 dan 2024, Indeks Ketentraman Ketertiban meningkat kembali menjadi 82,88 dan 84,23.

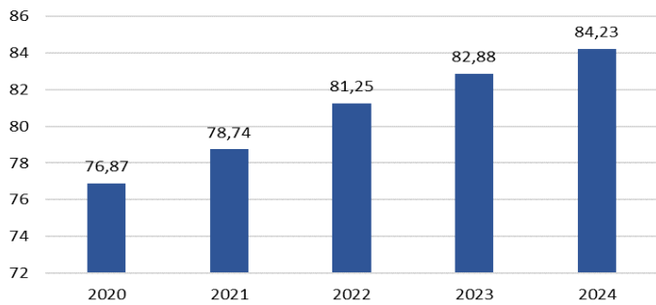

Gambar 2. 68 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Satpol PP Kota Madiun, 2025

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

2.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah

IDSD mengukur produktivitas dan kemajuan daerah menggunakan kerangka *Global Competitiveness Index* (GCI) dari *World Economic Forum* (WEF). Secara singkat, daya saing sebuah entitas wilayah ditentukan oleh kemampuannya dalam meningkatkan produktivitas di tiga lini yaitu produktivitas dalam faktor produksi, produktivitas yang didorong oleh efisien dan produktivitas yang didorong oleh inovasi.

Faktor pendorong produktivitas tersebut dituangkan ke dalam 4 komponen utama dan dijabarkan melalui 12 pilar daya saing. Pada IDSD 2024, dilakukan beberapa penyesuaian dan penyempurnaan baik pada level indikator maupun metode pengukuran sehingga diharapkan dapat lebih merepresentasikan kondisi nyata daya saing daerah di seluruh Indonesia.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

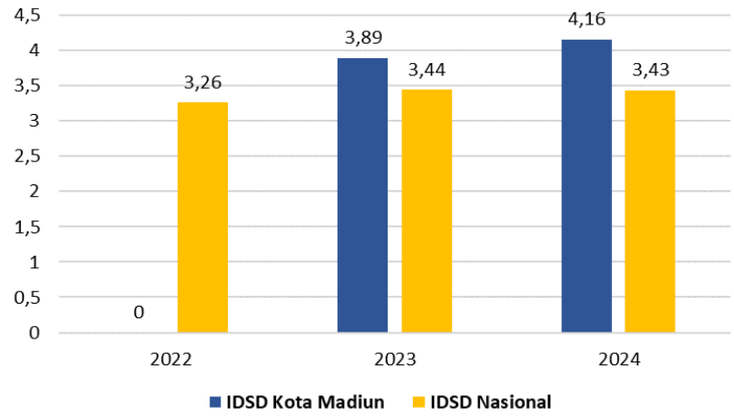

Gambar 2. 69 Indeks Daya Saing Daerah Kota Madiun Tahun 2022-2024
Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Berdasarkan data Indeks Daya Saing Daerah yang dirilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), capaian IDSD Kota Madiun mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 4,61 dibandingkan capaian IDSD tahun 2023 sebesar 3,89. Hal ini menunjukkan produktivitas dan kemajuan Kota Madiun yang semakin membaik dalam dua tahun terakhir, meskipun data di tahun 2022 tidak ada.

Daya Saing Daerah merupakan kemampuan perekonomian Daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan Provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing Daerah terdiri dari kemampuan ekonomi Daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.4 Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah

2.4.4.1 Pelayanan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang anggaranya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu sebesar 20 persen dari APBD yang harapannya dapat mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan dan memperluas pembangunan antar wilayah serta menciptakan SDM yang cerdas dan terampil.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Kota Madiun sudah memetakan jumlah sekolah, jumlah tenaga pendidik jenjang pendidikan terendah yaitu PAUD dan TK, serta jumlah peserta didik yang dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 32 Jumlah Bangunan, Peserta, dan Tenaga Pendidik PAUD Menurut Kecamatan Tahun 2024

No.	Uraian	Kecamatan		
		Kartoharjo	Manguharjo	Taman
PAUD				
1.	Bangunan PAUD (unit)	61	67	75
2.	Peserta PAUD	579	535	581
3.	Tenaga Pendidik	74	76	85
TK				
1.	Jumlah Siswa (Orang)	1537	1264	1812
2.	Jumlah TK Bangunan Baik (Unit)	112	104	150

Sumber: Laporan Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2025

Sebagaimana termuat pada tabel di atas, data pada Tahun 2024 menunjukkan fasilitas pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Madiun dapat dikatakan merata di setiap kecamatan dengan ketersediaan pendidik yang memadai, meskipun bangunan PAUD pada 2024 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2023.

Jumlah bangunan PAUD di Kecamatan Kartoharjo sebanyak 61 unit dengan jumlah peserta didik 579 anak, Kecamatan Manguharjo sebanyak 67 unit dengan jumlah peserta didik 535 anak, dan Kecamatan Taman sebanyak 581 unit dengan jumlah peserta didik sebanyak 581 anak. Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) untuk wilayah kecamatan Kartoharjo terdapat 112 unit bangunan sekolah dengan jumlah siswa 1.537 anak, untuk kecamatan Manguharjo terdapat 104 unit bangunan sekolah dengan jumlah siswa 1.264 anak, dan untuk kecamatan Taman terdapat 150 unit bangunan dengan jumlah siswa 1.812 anak.

Tabel 2. 33 Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Madiun Tahun 2024

Jenjang Pendidikan	Kecamatan			Jumlah
	Mangunharjo	Taman	Kartoharjo	
Sekolah Dasar (SD)	20	25	22	67
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	7	7	3	17
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	11	10	3	24
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1	3	0	4
Sekolah Mengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK)	13	15	12	40
Madrasah Aliyah (MA)	0	4	1	5

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2025

Sebagaimana termuat pada tabel di atas, jumlah sekolah dasar (SD) di Kota Madiun tahun 2024 sebanyak 67 unit dan Madrasah Ibtidaiyah 17 unit. Jumlah sekolah jenjang SMP sebanyak 24 unit dan MTs sebanyak 4 unit. Jumlah sekolah menurut SMA/SMK sebanyak 40 unit dan MA sebanyak 5 unit.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kecamatan Taman menjadi kecamatan terbanyak yang memiliki jumlah unit sekolah, mengingat jumlah penduduk terbanyak juga terdapat pada Kecamatan Taman. Kondisi dan jumlah bangunan di beberapa jenjang pendidikan akan mendorong meningkatnya angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang merupakan indikator dimensi pengetahuan pada IPM, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di sisi pendidikan perlahan mengalami kemajuan di Kota Madiun, peningkatan tersebut selanjutnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

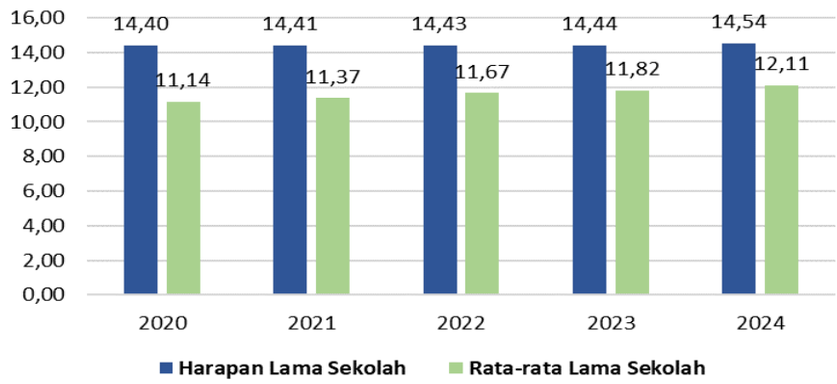

Gambar 2. 70 Perkembangan Indikator IPM Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2025

Sebagaimana termuat pada gambar di atas, angka HLS terus menunjukkan peningkatan. Ini menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Tahun 2024, HLS di Kota Madiun telah mencapai 14,54 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 Tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D3.

Pada periode yang sama, capaian RLS di Kota Madiun juga terus meningkat. Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan di Kota Madiun. Artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan. RLS Kota Madiun Tahun 2024 mencapai 12,11 tahun yang menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Kota Madiun usia 25 tahun keatas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas XII (SMA Kelas 3).

Pada Aspek Pelayanan Umum, ada beberapa Indikator Pendidikan yang terdapat Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar, di antaranya adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 34 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
1	Pendidikan					
1.1	Pendidikan Dasar					
1.1.1	Angka partisipasi sekolah	113.75	119.83	119.83	111.9	114.8
1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah per 10.000 penduduk	1:56	1:16	1:37	1:42	1:32
1.1.3	Rasio guru/murid	1:16	1:16	1:15	1:13	1:16
1.1.4	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	1:24	1:15	1:25	1:15	1:23
1.1.5	Angka Partisipasi Murni SD/SMP	174.89	130	114.99	107.71%	111.06 %
1.2	Fasilitas Pendidikan					
1.2.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	98.48	97.2	89%	99.80%	98.99%
1.2.2	Sekolah pendidikan SMP/Mts	92.63	99.5	95%	99.70%	98.85%
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
1.3.1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	95.61	90.04	198.27	104.06%	132.48 %
1.4	Angka Putus Sekolah					
1.4.1	Angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs	0.7	0	0	0	0
1.4.2	Rata-rata Angka Putus Sekolah	0.7	0	0	0	0
1.5	Angka Kelulusan					
1.5.1	Angka kelulusan SD/MT, SMP/MTs dan	100	100	100	100	100
1.5.2	Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100	100
1.5.3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/S2/S3.	96.83	97	99.6	93.3	97.2
1.5.4	Rata-rata Angka Kelulusan	100	100	100	100	100
1.6	Manajemen Pelayanan Pendidikan					
1.6.1	Pengolahan database informasi pendidikan, dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	100	100	100	100	100
1.6.2	Satuan pendidikan semua jenjang melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS)	100	100	100	100	100
1.6.3	Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti Pelatihan Profesional	398	1,212	1,200	1,215	1,153
1.6.1	Pengolahan database informasi pendidikan, dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kota Madiun, LKPJ Kota Madiun, LPPD Kota Madiun, diolah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel di atas, selanjutnya dapat diuraikan pada materi sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS)

   Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS) dapat digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah pendidikan dasar yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan baik jenjang SD/MI, SMP/MTs.

   Capaian Angka APS pada pada tahun 2020 sebesar 113.75%. Pada Tahun 2021 capaian APS meningkat mencapai 119.83%. Angka ini tetap hingga tahun 2022. Sementara itu, tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 111,9%. Tahun 2024 capaian APS sebesar 114,8% Secara umum APS ini menunjukkan bahwa semua anak usia sekolah pendidikan dasar di Kota Madiun telah mendapat akses layanan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan baik SD/MI maupun SMP/MTs. Hal ini juga disebabkan karena pembangunan pendidikan di Kota Madiun sudah sesuai sasaran yaitu meningkatkan akses dan mutu pendidikan melalui kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan di Kota Madiun.

2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

   Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah digunakan untuk mengukur jumlah penduduk sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini merupakan jumlah sekolah berdasarkan jenjang pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Untuk tahun 2020 capaiannya sebesar 1:56 dan tahun 2021 menurun menjadi 1:16. Angka ini terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya, yaitu 1:37 pada tahun 2022, 1:42 pada tahun 2023 dan 1:32 pada tahun 2024. Capaian pada tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 1 (satu) lembaga pada jenjang pendidikan dasar menampung 32 siswa per 10.000 penduduk usia sekolah.

3. Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar

   Rasio guru-murid merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan guru dalam menangani siswa. Capaian rasio guru murid pada tahun 2020 yaitu 1:16, angka ini tetap untuk tahun 2021 yang artinya bahwa satu orang guru menangani 16 siswa. Pada tahun 2022, capaian ini menurun menjadi 1:15. Kondisi ini menurun kembali pada tahun 2023 menjadi 1:16. Sementara itu, pada tahun 2024 rasionya menjadi 1:16, yang berarti satu orang guru menangani 16 siswa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata pada 2020 sebesar 1:24, artinya 1 guru menangani 1 kelas/rombel dengan rata-rata siswa sebanyak 24 siswa. Tahun 2021 sedikit mengalami peningkatan dibanding capaian tahun sebelumnya.

Sedangkan pada Tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu 1:25, yang artinya 1 guru dapat menangani 1 kelas/rompel dengan rata-rata siswa sebanyak 25 siswa. Tahun 2023 menjadi 1:15 dan tahun 2024 menjadi 1:23. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas.

5. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SMP

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. APM berisi persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM SD/SMP tahun 2020 sebesar 174,89%. dan menurun menjadi 130%. pada tahun 2021. Penurunan ini konsisten hingga tahun 2023, yaitu sebesar 114,99%. pada tahun 2022 dan 107,71% pada tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2024, capaiannya menjadi 111,06%. Angka tersebut mencerminkan sekitar 111,06% anak usia 7-15 Tahun yang mengikuti pendidikan dasar (SD/MI) di Kota Madiun.

6. Kondisi Sekolah Pendidikan Dasar Kondisi Bangunan Baik

Kondisi sekolah pendidikan dasar dengan kondisi bangunan baik akan mendorong terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif. Capaian kondisi sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik pada tahun 2020 sebesar 98,48%. Angka ini sedikit menurun hingga tahun 2022, yaitu sebesar 97,2% pada tahun 2021 dan 89% pada tahun 2022, hal ini terjadi karena untuk rehab serta pembangunan hanya mengandalkan dana DAK dalam pelaksanaannya. Pada tahun 2023 angka ini meningkat menjadi 99,8% dan sedikit menurun pada tahun 2024 yaitu sebanyak 98,99%.

7. Angka Pendidikan Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD) dalam hal ini APK PAUD Formal atau Taman Kanak-Kanak.

APK PAUD pada tahun 2020 sebesar 95,61% dan menurun menjadi 90,04% pada tahun 2021. Akan tetapi pada Tahun 2022 APK PAUD mengalami peningkatan secara signifikan mencapai 108,23 poin sehingga menjadi 198,27% dan pada tahun 2023 menjadi 104,06%. Sedangkan pada tahun 2024, peningkatan ini terus berlanjut menjadi 132,48%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8. Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar Dan Rata-Rata Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah dan rata-rata putus sekolah pendidikan dasar pada tahun 2020 sebesar 0,7. Angka ini kemudian menurun menjadi 0 pada tahun 2021-2024. Hal ini dapat diartikan bahwa di Kota Madiun tidak ada pelajar yang putus sekolah. Hal ini disebabkan karena Masyarakat Kota Madiun sudah menyadari akan pentingnya pendidikan dan karena adanya dukungan anggaran dari pemerintah Kota Madiun melalui Program Pendidikan dasar dan Program BOS dari Pemerintah Pusat.

9. Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs Melanjutkan (AM)

Angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs Melanjutkan (AM) merupakan persentase yang menunjukkan jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2020 hingga tahun 2024 secara konsisten menunjukkan angka 100, yang berarti bahwa semua lulusan SD/MI dan SMP/MTs melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

10. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kualifikasi pendidikan selain menjadi tuntutan profesi juga merupakan tuntutan yuridis formal bagi tenaga pendidik. Tuntutan tersebut wajib dipenuhi oleh setiap guru agar memiliki legalitas dan dapat menunjukkan kredibilitasnya sebagai agen pembelajaran, sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional.

Guru merupakan aset strategis yang dituntut terus mengalami proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengajar (*on going formation*) serta memiliki kemampuan untuk melihat ke depan.

Itu semua dapat terpenuhi jika guru berusaha meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Kualifikasi pendidikan berhubungan erat dengan kinerja guru dalam mengemban peran sebagai agen pembelajaran (*learning agent*). Sebagai agen pembelajaran guru memiliki peran sentral dan strategis sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, selama kurun waktu 5 (lima) Tahun, jenjang Pendidikan guru yang ada di Kota Madiun sesuai pada tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 35 Jumlah Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Kualifikasi	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	SMA	0	0	0	0	0
2	D1	0	0	0	0	0
3	D2	0	0	0	0	0
4	D3	19	32	7	50	50
5	DIV/S1	1,804	1,956	1,849	2,274	2,301
6	S2	93	102	125	108	113

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2025

Sebagaimana termuat pada tabel di atas, capaian guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 sebanyak 1.804 orang. Jumlah ini meningkat menjadi 1.956 orang pada tahun 2021 dan kemudian menurun menjadi 1.849 orang pada tahun 2022. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan menjadi 2.274 orang dan 2.301 orang pada tahun 2024.

Sedangkan pada jenjang S2 pada tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan, yaitu dari 93 orang pada tahun 2020 menjadi 125 pada tahun 2022. Sedangkan capaian pada tahun 2023 adalah 108 orang dan tahun 2024 menjadi 113 orang.

Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, terutama pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Madiun berusaha meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan kualitas guru yang mengajar.

11. Pengolahan *database* informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK

Pengelolaan *database* informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan TIK merupakan pengembangan sistem dan teknologi informasi terpadu yang memuat seluruh data dan informasi pendidikan tingkat kota secara terpadu.

Capaian pengolahan data base informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK pada tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah 100%. Data dan informasi ini dipergunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan pendidikan bagi para pemangku kepentingan dan penyelenggara pendidikan secara tepat, transparan, akuntabel dan efisien.

Mulai tahun 2013 semua pendataan sudah berbasis internet dan terkoneksi dengan Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dimana semua bantuan BOS, KIP dan Sertifikasi Guru serta data peserta Ujian Nasional data bersumber pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sejak Tahun 2015 hingga saat ini DAPODIK menjadi satu-satunya basis data bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam menentukan jumlah penerima BOS, Sertifikasi Guru, Program Indonesia Pintar maupun bantuan lain yang bersumber dari dana APBN. Oleh karena itu keakuratan dan ketepatan data dari sekolah merupakan suatu keharusan dan harus di *update* terus menerus.

Data tersebut harus diperbaharui setiap saat dengan sistem online yang terkoneksi langsung dengan server Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan di *upload* secara Nasional. Semua sekolah SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta di Kota Madiun sudah berbasis *web* dan terkoneksi dengan Pusat Data Statistik Pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

12. Sekolah semua jenjang melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

    Pelaksanaan MBS di sekolah merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi sekolah Standar Nasional. Penerapan MBS pada lembaga sekolah SD dan SMP dapat dilihat dari, yaitu:

    a) sekolah memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan;
    b) sekolah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS); dan
    c) sekolah memiliki Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi dari sekolah. RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Pendidikan setelah memperhatikan pertimbangan Komite sekolah dan disahkan oleh SKP Pendidikan Kota.

    Sekolah di wilayah Kota Madiun memiliki dokumen Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Dokumen tersebut selalu diperbaharui setiap Tahun anggaran dan Tahun ajaran. Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian satuan pendidikan semua jenjang telah melaksanakan manajemen berbasis sekolah sebesar 100% mulai dari Tahun 2020 hingga tahun 2023.

13. Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti pelatihan profesional

    Capaian pada tahun 2020 adalah 398 guru. Sedangkan pada Tahun 2021 hingga Tahun 2024 capaian tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan profesional terus mengalami peningkatan dengan capaian 1.212 orang guru Tahun 2021, sebanyak 1.200 guru di Tahun 2022, sebanyak 1.215 guru di Tahun 2023 serta sebanyak 1.153 guru di tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

14. Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, maka jenis pelayanan dasar bidang Pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 36 Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN											
			2021			2022			2023			2024		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
PENDIDIKAN														
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)	23,184	21,803	94.04%	26,323	30,270	114.99%	25,902	28,417	109.71%	26,011	28,888	111.06%
		Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	89.56	85.99	96.01%	89.56	89.06	99.44%	89.56	91.01	101.62%	89.56	88.23	98.51%
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	72.69	56.5	77.73%	72.69	72.29	99.45%	72.69	79.2	108.96%	72.69	82.65	113.70%
		Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	92.48	86.66	93.71%	92.48	92.37	99.88%	92.48	92	99.48%	92.48	96.95	104.83%
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	73.84	63.34	85.78%	73.84	73.74	99.86%	73.84	88.89	120.38%	73.84	93.65	126.83%
		Iklim keamanan SD	75.13	75.13	100.00%	75.13	74.97	99.79%	75.13	75.59	100.61%	75.13	78.51	104.50%
		Iklim keamanan SMP	73.41	79.5	108.30%	73.41	73.31	99.86%	73.41	75.89	103.38%	73.41	76.3	103.94%
		Iklim kebinekaan SD	72.83	61.66	84.66%	72.83	72.73	99.86%	72.83	76.93	105.63%	72.83	76.67	105.27%
		Iklim kebinekaan SMP	70.98	62.99	88.74%	70.98	70.88	99.86%	70.98	77.14	108.68%	70.98	75.91	106.95%
		Iklim inklusivitas SD	60.14	56.8	94.45%	60.14	58.94	98.00%	60.14	58.25	96.86%	60.14	61.37	102.05%
		Iklim inklusivitas SMP	58.46	54.3	92.88%	58.46	58.26	99.66%	58.46	61.96	105.99%	58.46	67.17	114.90%
2	Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan	1,381	176	12.74%	175	273	156%	225	320	142.22%	161	305	189.44%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN											
			2021			2022			2023			2024		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
		kesetaraan												
3	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	2,582	2,483	96.17%	2,607	3,030	116.23%	5,162	5,395	104.51%	5,271	5,273	100.04%
		Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	94.81		0.00%	94.81		0.00%	94.81	94.71	99.89%	94.81	95.64	100.88%

Sumber : Laporan Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2024

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2024 secara keseluruhan sebesar 133,51% atau masuk dalam kategori Tuntas Paripurna.

2.4.4.2 Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar selain pendidikan. Jumlah puskesmas, jumlah rumah sakit, jumlah dokter serta tenaga kesehatan yang memadai dapat meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat untuk menjaga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Persebaran jumlah rumah sakit, puskesmas, dokter dan tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 37 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2020-2024

Tahun	Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Puskermas Pembantu per 1.000 Penduduk
2020	0.11
2021	0.11
2022	0.12
2023	0.12
2024	0.12

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, 2025

Sebagaimana termuat pada tabel di atas, selama tahun 2020 hingga 2024, rasio jumlah puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu per 1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Pada Tahun 2020 hingga 2021, rasio ini menunjukkan nilai sebesar 0,11. Pada tahun 2022-2024, rasio sedikit mengalami peningkatan sehingga rasio jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu stabil di angka 0,12. Berikut tren rasio Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu per 1.000 penduduk di Kota Madiun tahun 2020-2024, yaitu sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

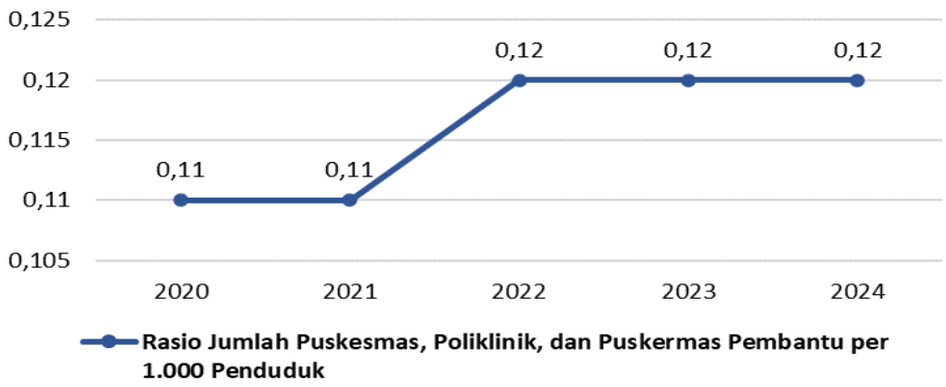

Gambar 2. 71 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, 2025

Selanjutnya terdapat tabel rasio dokter dan tenaga medis per jumlah penduduk yang dijabarkan pada tabel dibawah ini, yaitu:

Tabel 2. 38 Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2020-2024

Tahun	Dokter	Tenaga Kesehatan Lainnya
2020	171,93	1.094,71
2021	124,2	1.364,82
2022	129	1.414,77
2023	287,16	1.792,92
2024	258.3	1,479.18

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, 2025

Sebagaimana termuat pada tabel di atas, rasio dokter dan tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk.

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 hingga 2024, rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Madiun pada tahun 2020 berkisar antara 171,93 dan menurun menjadi 124,2 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 capaiannya menjadi 129. Angka ini kemudian naik secara signifikan, yaitu sebesar 287,16 pada tahun 2023 dan 258,3 pada tahun 2024. Secara keseluruhan rasio dokter mengalami fluktuasi. Rasio tenaga kesehatan dalam lima Tahun terakhir menunjukkan tren meningkat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

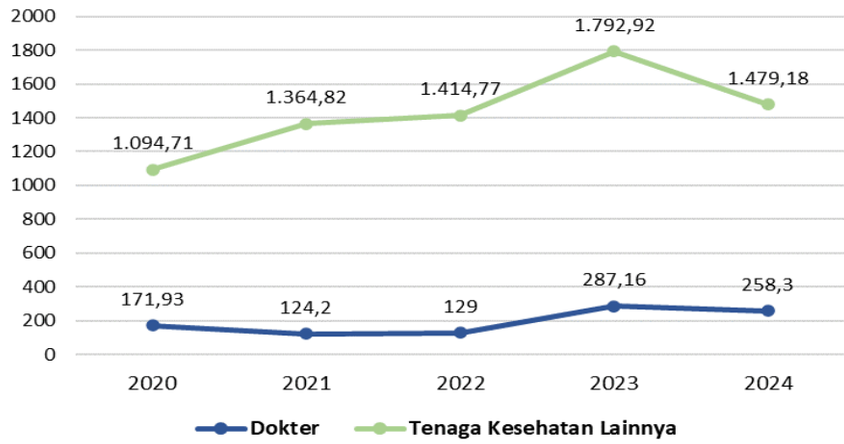

Gambar 2. 72 Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, diolah

Sebagaimana yang termuat pada Gambar diatas, setelah mengetahui rasio puskesmas dan rasio dokter serta tenaga kesehatan, berikut tabel rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kota Madiun, yaitu pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 39 Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk Kota Madiun Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Rumah Sakit Terhadap 1.000 Penduduk
2020	8	209.950	0,0380
2021	8	201.452	0,0397
2022	8	201.760	0,0397
2023	9	202.544	0,0444
2024	10	201,733	0.05

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2025

Sebagaimana termuat pada tabel diatas, selama tahun 2020 hingga tahun 2022 di Kota Madiun sebanyak 8 rumah sakit masih beroperasi yang kemudian mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 9 rumah sakit dan kemudian meningkat kembali menjadi 10 rumah sakit pada tahun 2024.

Adapun rasio rumah sakit per 1.000 penduduk pada tahun 2020 menuju 2024 di Kota Madiun mengalami peningkatan dari 0,0380 menjadi 0,05. Perubahan tersebut terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan secara absolut jumlah rumah sakit turut bertambah.

Salah satu aspek kesehatan direpresentasikan oleh Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang direpresentasikan oleh UHH saat lahir. UHH di Kota Madiun terus meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

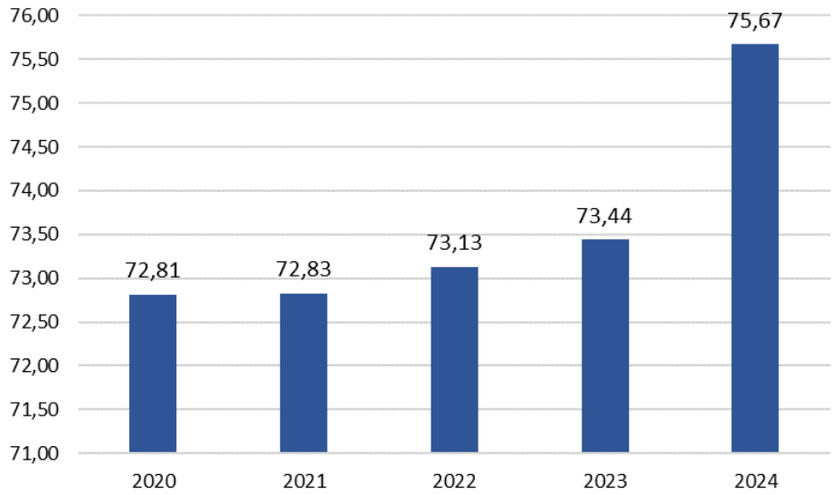

Gambar 2. 73 Umur Harapan Hidup saat Lahir Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

Aspek kesehatan juga menangani kasus Kejadian Luar Biasa, Jumlah kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) pada tahun 2022 terjadi pada 2 kelurahan. Pada tahun 2023, kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) terjadi di 27 kelurahan. Sampai dengan bulan April Tahun 2024 kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) terjadi di 26 kelurahan. Namun pada tahun 2024, kasus KLB terjadi di 4 kelurahan.

Tabel 2. 40 Jumlah Kasus KLB Kota Madiun Tahun 2022-2024

No	Jenis Kasus KLB	Waktu Kejadian Diketahui	Kelurahan Tempat Kejadian
1	Demam Berdarah Dengue (DBD)	Januari – Desember 2022	2 Kelurahan
		Januari – Desember 2023	27 Kelurahan
		Januari – April 2024	26 Kelurahan
		Desember 2024	4 Kelurahan

Sumber : Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, diolah

Selanjutnya kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan angka kejadian KLB di masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan cakupan imunisasi untuk mempertahankan kekebalan kelompok sehingga kasus Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) dapat ditekan/menurun;
2. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh jejaring surveilans epidemiologi;
3. Meningkatkan Surveilans Aktif Rumah Sakit guna kewaspadaan dini dan respon; dan
4. Pemberantasan sarang nyamuk di tempat yang berpotensi terjadinya perkembang biakan nyamuk.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Berikutnya yang harus diperhatikan yakni pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar, data pelayanan kesehatan ibu hamil pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2. 41 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar di Kota Madiun Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Jumlah Ibu Hamil	2.614	2.490	2.470	2.450	2,861
2	Pelayanan Bumil Sesuai Standar	2.596	2.490	2.470	2.453	2,861
3	Persentase Pelayanan Bumil Sesuai Standar	99,3	100	100	100,1	100

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, 2025

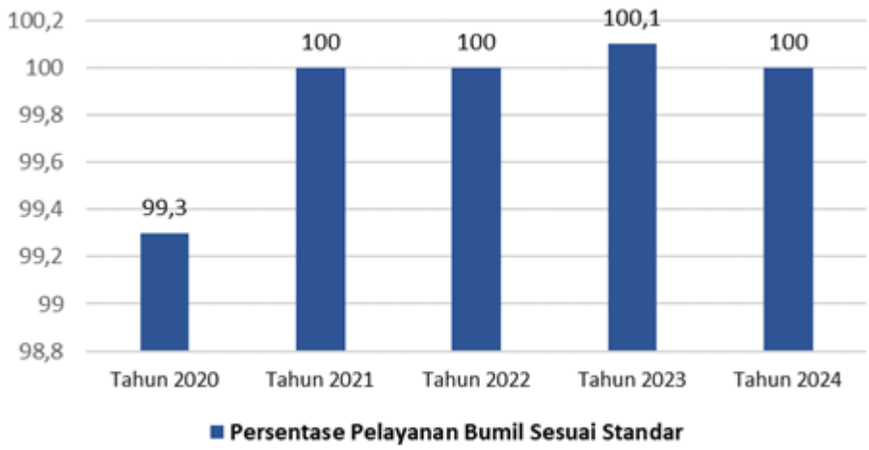

Gambar 2. 74 Capaian Persentase Pelayanan Ibu Hamil, Tahun 2020-2024
Sumber : Laporan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, diolah

Sebagaimana termuat pada tabel dan gambar diatas, terlihat bahwa capaian persentase pelayanan ibu hamil sesuai standar di tahun 2024 sebesar 100%. Pelayanan Ibu hamil sesuai standar sudah mencapai target yang diharapkan yaitu bahwa 100% ibu hamil sudah mendapat pelayanan secara paripurna dengan minimal 4 kali kunjungan dan terlaksananya ANC terpadu di fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Madiun.

Indikator ini merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, sehingga dalam pencapaiannya harus melingkupi semua ibu hamil yang ada di Kota Madiun.

Sedangkan, Strategi kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target adalah sebagai berikut:

a. sosialisasi kesehatan bagi calon pengantin;
b. optimalisasi kelas ibu hamil di Puskesmas;
c. terjalin kerja sama yang baik dengan SpOG terkait pelayanan ANC terpadu;
d. pendampingan ibu hamil oleh kader kesehatan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

e. edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman; dan
f. pentingnya pemeriksaan selama kehamilan dan setelah persalinan.

Penduduk Kota Madiun harus dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa/Kelurahan, peran Kelurahan siaga aktif berstrata puri sangat dibutuhkan. Berikut terdapat data kelurahan siaga pada Tahun 2024:

Tabel 2. 42 Capaian Kelurahan Siaga Aktif Berstrata Puri di Kota Madiun Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Jumlah Kelurahan Siaga	27	27	27	27	27
2	Jumlah Kelurahan Siaga Puri	15	16	23	25	27
3	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Puri	55.55	59.26	85.19	92.59	100

Sumber : Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana termuat pada Tabel di atas, jumlah desa siaga puri setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sehingga, capaian persentase kelurahan siaga aktif puri juga meningkat.

Sebagaimana termuat pada tabel diatas, terlihat bahwa cakupan kelurahan siaga aktif di tahun 2024 yaitu sebesar 100% dari 27 kelurahan menjadi kelurahan siaga aktif. Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian tersebut dikarenakan:

1. peran aktif kader kelurahan siaga aktif dalam upaya menghidupkan kegiatan kelurahan siaga aktif;
2. adanya kegiatan inovasi sangat membantu tercapainya kelurahan siaga berstrata PURI; dan
3. kerja sama lintas sektor dengan OPD terkait menggerakkan pemberdayaan masyarakat terutama Kelurahan Siaga Aktif sebagai induk UKBM di kelurahan.

Rasio jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu pada Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 43 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kota Madiun Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Jumlah Puskesmas	6	6	6	6	6
2	Jumlah Puskesmas Pembantu	18	18	18	18	18
3	Jumlah Penduduk	209.950	201.452	201.760	202.544	201.733
4	Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik Dan Puskesmas Pembantu Per 1.000 Penduduk	0,11	0,35	0,119	0,12	0,12

Sumber : Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sebagaimana termuat pada tabel diatas, terlihat bahwa dari tahun 2020 hingga 2024 tidak ada penambahan jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kota Madiun. Rasio jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 1.000 penduduk pada tahun 2020 hingga 2024 tidak ada perubahan di kisaran 0,11. Rasio tersebut meningkat pada Tahun 2021 menjadi 0,35, Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,119, dan kembali meningkat di Tahun 2023 menjadi 0,12. Sedangkan capaian di tahun 2024 tetap pada angka 0,12. Pada saat ini di setiap kelurahan di Kota Madiun sudah terdapat pelayanan kesehatan berupa Puskesmas dan rumah sakit sehingga aksesibilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan cukup mudah. Kota Madiun terdapat 9 (sembilan) Rumah Sakit (RS) sehingga kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Madiun sudah terpenuhi.

1. Jumlah Puskesmas Poned

   Puskesmas yang masuk dalam kategori Pelayanan Mampu PONED (Pelayanan *Obstreti Neonatal Emergency* Dasar) terdapat 1 (satu) Puskesmas yaitu Puskesmas Banjarejo.

2. Rasio Rumah Sakit (RS) per 1.000 Penduduk

   Pada tahun jumlah RS di Kota Madiun sebanyak 10 (sepuluh) RS dan rasio jumlah rumah sakit terhadap per 1.000 penduduk adalah 0,05. Rasio RS di Kota Madiun dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 2. 44 Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Kota Madiun Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Rumah Sakit Milik Pemerintah Kota	1	1	1	1	1
2	Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi	1	1	1	1	1
3	Rumah Sakit Milik TNI/AD	1	1	1	1	1
4	Rumah Sakit Swasta	3	3	3	4	5
5	Rumah Sakit Khusus	2	2	2	2	2
6	Jumlah Rumah Sakit	8	8	8	9	10
7	Jumlah Penduduk	209.950	201.452	201.760	202.544	201.733
8	Rasio Jumlah Rumah Sakit Terhadap 1.000 Penduduk	0,0380	0,0397	0,0397	0,04443	0,05

Sumber : Laporan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, diolah

Sebagaimana termuat pada tabel diatas, terlihat bahwa tahun 2020 rasio jumlah rumah sakit terhadap 1000 penduduk adalah 0,0380. Pada Tahun 2021 dan 2022 rasio jumlah rumah sakit meningkat menjadi 0,0397 dikarenakan adanya penurunan jumlah penduduk. Lebih lanjut di Tahun 2023, mengalami peningkatan menjadi 0,0444 dikarenakan adanya tambahan satu rumah sakit swasta. Di tahun 2024, terjadi penambahan 1 (satu) rumah sakit swasta kembali sehingga rasionya menjadi 0,05.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Adapun perkembangan pencapaian kinerja sasaran pada Aspek Pelayanan Umum yang diukur dengan indikator kinerja sasaran Fokus pada bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 45 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah pada Aspek Pelayanan Umum Fokus Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	4	5	6	7	8
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
1	Kesehatan					
2.1	Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 1.000 penduduk	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12
2.2	Jumlah Puskesmas PONED	1	1	1	1	1
2.3	Rasio jumlah rumah sakit per 1.000 penduduk	0.038	0.0397	0.0397	0.0444	0.05
2.4	Rasio dokter per 100.000 penduduk	171.93	116.9	129	287.16	258.3
2.5	Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk	1,094.71	132.83	1,414.77	1,792.92	1,479.18
2.6	Puskesmas berstandar ISO	0	0	0	0	0
2.7	SOP Pelayanan	478	0	195	67	78
2.8	Cakupan masyarakat miskin yang terlayani	100	100	100	100	100
2.9	Cakupan kelurahan siaga aktif	100	100	100	100	100
2.10	Persentase rumah tangga ber-PHBS	69	69.43	64.88	70.94	71.49
2.11	Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	62.96	100	100	100	100
2.12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	48	100	100	100
2.13	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	126	42.42	0	0
2.14	Persentase rumah tangga sehat	69	99.92	88.41	89.25	89.8
2.15	Persentase penduduk yang memiliki jaminan pra bayar	95.17	113	98.73	100.61	101.02
2.16	Jumlah kasus KLB	162	2	2	4	4
2.17	Persentase penanganan penyakit	100	100	100	83.34	100
2.18	Persentase kelurahan ber STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	40.74	74.1	100	100	100
2.19	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	100	100	85	100	100
2.20	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Madiun	74.94	84.917	86.02	85.98	84.1
2.21	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100	100	50	100	100
2.22	Persentase produk makanan olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi syarat	86.63	100	90.72	95	93.9
2.23	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	100	100	100	110	100
2.24	Persentase penduduk yang di skrining faktor resiko PTM	90.25	118.4	110.81	110.62	108.3
2.25	Persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI	55.55	59.26	85.19	92.59	100
2.26	Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi	502	550	252	161	257

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	4	5	6	7	8
	sesuai perundangan					
2.27	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100	100	100	100.12	100
2.28	Persentase TTU dan TPM sehat	86.32	TTU : 95,3	TTU : 81	TTU : 95,7	TTU : 99,26
			TPM: 95,2	TPM : 96,67	TPM : 89,7	TPM : 93,9
2.29	Angka kematian bayi	4.32	3.8	4.2	5.1	4.5
2.30	Angka kesehatan orang dengan resiko terinfeksi kusta	0.3	0.6	0.1	0.4	0.2
2.31	IKM rumah sakit	80.19	83.39	88.94	89.56	89.49
2.32	Capaian pemenuhan SPM Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	81.52	79.35	88.17	89.13	90.32
2.33	Persentase desa ODF	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPS Kota Madiun, LKPJ Kota Madiun, LPPD Kota Madiun, diolah

Sebagaimana data yang termuat pada tabel di atas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk

   Salah satu upaya pemerintah untuk menyehatkan masyarakat adalah dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan. Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan puskesmas pembantu di masyarakat dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selama tahun 2020 hingga 2024, rasio jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu per 1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Pada Tahun 2020 hingga Tahun 2021, rasio berada di angka sebesar 0,11 meningkat sedikit di Tahun 2022 - 2024 menjadi 0,12.

2. Jumlah Puskesmas PONED

   Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas berperan dalam menurunkan angka kematian ibu. Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan kunci keberhasilan pelayanan PONED. Selama tahun 2020 hingga 2024 jumlah puskesmas yang menyediakan layanan PONED sebanyak 1 puskesmas.

3. Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk

   Selama Tahun 2020 hingga Tahun 2022 rumah sakit yang beroperasi sebanyak 8 rumah sakit. Rumah sakit tersebut terdiri dari 1 (satu) rumah sakit milik Pemerintah Kota Madiun, 1 (satu) rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 1 (satu) rumah sakit milik TNI/AD, 1 (satu) rumah sakit swasta, dan 1 (satu) rumah sakit khusus. Rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kota Madiun pada tahun 2020 sebesar 0,0380. Sedikit mengalami peningkatan pada Tahun 2021 dan 2022 sehingga nilainya mencapai 0,0397. Pada 2023 peningkatan juga terjadi dan nilai rasio rumah sakit per 1.000 penduduk menjadi 0,0444 meningkat kembali menjadi 0,05 pada tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Rasio Dokter per 100.000 Penduduk

Rasio dokter per 100.000 penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan per 100.000 jumlah penduduk. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020 hingga Tahun 2024, rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 171,93 hingga 258,3. Rasio tertinggi terjadi pada Tahun 2024. Secara keseluruhan, dalam lima tahun rasio dokter mengalami peningkatan.

5. Rasio Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk

Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh tenaga kesehatan lainnya per 100.000 jumlah penduduk. Data menunjukkan bahwa pada Tahun 2020 dan 2021, rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar 1.094,71 hingga 132,83. Adapun pada Tahun 2022, rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk Kota Madiun adalah 1.414,77 dan mengalami peningkatan di Tahun 2023 menjadi 1.792,92. Pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 1.479,18.

6. Puskesmas Berstandar ISO

Fungsi utama puskesmas sebagai unit pelayanan masyarakat adalah upaya promotif dan preventif terhadap resiko penyakit di tengah masyarakat yang dilayani. Puskesmas berstandar ISO adalah Puskesmas plus yang dapat menjalankan rawat inap dan rawat jalan secara simultan. Berdasarkan data, sejak tahun 2020 hingga 2024 belum mempunyai puskesmas yang telah mempunyai standar ISO.

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan dasar dalam melakukan pekerjaan dan sistem penghargaan yang diberikan kepada pegawai untuk menunjang pelayanan. Skor SOP Pelayanan di Kota Madiun Tahun 2020 sebesar 478. Sedangkan pada Tahun 2021, skor SOP Kota Madiun tercatat sudah mencapai angka 0. Sedangkan pada Tahun 2022 skor mencapai 195 dan menurun menjadi 67 pada Tahun 2023. Pada tahun skor SOP mencapai 78.

8. Cakupan Masyarakat Miskin Terlayani

Tahun 2020 hingga 2024, di Kota Madiun penanganan masyarakat miskin yang terlayani telah mencapai 100%. Hal ini didukung oleh adanya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Madiun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

9. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif

Kelurahan/Desa siaga aktif adalah Kelurahan/Desa yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa/Kelurahan. Kota Madiun pada tahun 2020 hingga 2024 cakupan kelurahan siaga aktif sebesar 100% yang berarti seluruh Kelurahan/Desa aktif beroperasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

10. Persentase Rumah Tangga ber-PHBS

Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) akan menciptakan suatu Rumah Tangga Sehat dimana setiap anggota menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Persentase rumah tangga yang mempraktikan rumah tangga ber-PHBS yaitu sebesar 69% pada Tahun 2020 mencapai 69,43% pada tahun 2021. Tahun 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi 64,88% namun pada Tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 70,94. Sedangkan di tahun 2024 mencapai 71,49. Penurunan capaian di Tahun 2022 disebabkan adanya perubahan definisi operasional penilaian pada indikator Tidak Merokok.

Definisi operasional dari "apabila tidak ada anggota rumah tangga umur 10 Tahun keatas yang merokok didalam rumah" menjadi "tidak ada anggota rumah tangga umur 10 Tahun keatas yang merokok".

11. Cakupan Kelurahan *Universal Chilf Immunizazion* (UCI)

Cakupan kelurahan *Universal Chilf Immunizazion* di Kota Madiun, pada 2020 telah mencapai 62,96%. Dengan demikian, diharapkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat dari suatu penyakit dapat diminimalisir. Adapun pada Tahun 2021 hingga 2024, cakupan kelurahan *Universal Chilf Immunizazion* di Kota Madiun kembali mencapai 100%.

12. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penyelesaian dan penanganan DBD diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pada tahun 2020 dan 2022-2024 kota Madiun berhasil menangani kasus DBD dengan persentase mencapai 100%. Hal ini didukung oleh keterlibatan lintas program dan lintas sektor, seperti koordinasi dengan rumah sakit, puskesmas, dan lingkungan dalam melaporkan kasus serta adanya penanganan yang cepat. Meskipun pada tahun 2021, capaian ini hanya mencapai 48%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

13. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu menjadi salah satu indikator mengenai kualitas kesehatan di masyarakat. Pada Tahun 2020 tercatat angka kematian ibu sebesar 0 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada tahun 2021 mencapai 126 dan 42,42 pada tahun 2022. Akan tetapi, angka kematian ibu di tahun 2023 dan 2024 mengalami perbaikan sehingga skornya 0 dari 100.000 kelahiran hidup.

14. Persentase Rumah Tangga Sehat

Rumah tangga sehat akan mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Persentase rumah tangga sehat tahun 2020 sebesar 69%. Capaian ini meningkat tajam pada tahun 2021 meningkat tajam mencapai 99,92%, akan tetapi menurun menjadi 88,41% pada Tahun 2022. Faktor melandasinya pandemi Covid-19 menyebabkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat menurun. Namun, di Tahun 2023, terjadi peningkatan persentase rumah tangga sehat menjadi 89,25%. Angka iini meningkat menjadi 89,8% pada tahun 2024.

15. Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Pra Bayar

Persentase penduduk yang memiliki jaminan pra bayar Kota Madiun Tahun 2020 sebanyak 95,17%. Sebagian besar masyarakat Kota Madiun telah memiliki Jaminan Pra Bayar.

Tahun 2021, persentase penduduk yang memiliki Jaminan Pra Bayar Kota Madiun telah mencapai 113%, dan menurun menjadi 98,73% pada Tahun 2022. Di Tahun 2023, terjadi peningkatan kembali pada persentase penduduk yang memiliki jaminan prabayar menjadi 100,61%. Sedangkan pada tahun 2024, terjadi peningkatan menjadi 101,02%.

16. Jumlah Kasus KLB

KLB adalah timbulnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu Daerah dalam waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Jumlah kasus KLB di Kota Madiun tahun 2020 sangat tinggi mengingat pada 2020 terjadi fenomena wabah yang dapat menular yaitu kasus terjadinya virus corona. Adapun berselang setahun saat 2021 hingga 2022 dimana Tahun ketiga Covid-19 melanda Indonesia, jumlah KLB di Kota Madiun mencapai 2 kejadian. Selanjutnya, di Tahun 2023 jumlah kasus luar biasa meningkat menjadi 4 kejadian. Capaian ini tetap hingga tahun 2024, yaitu sebanyak 4 kejadian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

17. Persentase Penanganan Penyakit

Persentase penanganan penyakit Kota Madiun tahun 2020 - 2022 pemerintah berhasil meningkatkan persentase penanganan penyakit menjadi 100%. Adapun di masa Tahun ketiga Covid-19 melanda Indonesia, pemerintah Kota Madiun mendapatkan persentase penanganan penyakit sebesar 100%. Namun, pada Tahun 2023, diketahui terdapat penurunan persentase penurunan penyakit menjadi 83,34%. Namun pada tahun 2024, capaian ini mencapai 100%.

18. Persentase Kelurahan ber STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

Masalah kesehatan lingkungan merupakan suatu masalah yang perlu diperhatikan, salah satunya masalah sanitasi yang erat hubungannya dengan timbulnya atau menularnya suatu penyakit. Pada tahun 2020 capaian ini mencapai 40,74%. Adapun pada Tahun 2021, STBM Kota Madiun mencapai 74,1% dan telah mencapai 100% pada Tahun 2022 hingga 2024.

19. Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Ketersediaan obat merupakan salah satu komoditi kesehatan yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Persentase ketersediaan obat dan perbekalan obat di Kota Madiun tahun 2020 hingga 2021 mencapai angka 100%, artinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun pada Tahun 2022, persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Kota Madiun hanya mencapai 85% dan di Tahun 2023 dan 2024 ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Kota Madiun meningkat menjadi 100%.

20. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kesehatan Kota Madiun

Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh atas pelayanan yang dilakukan dinas kesehatan Kota Madiun tahun 2020 IKM sebesar 74,94. Sedangkan Pada Tahun 2021, 2022, 2023 dan tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh atas pelayanan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Madiun berturut-turut mencapai 84,917; 86,02; dan 85,98.

21. Persentase Pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pencapaian Kinerja BLUD kota Madiun tahun 2020 hingga 2021 telah mencapai 100%. Pencapaian Kinerja BLUD kota Madiun terbilang baik hingga saat ini. Adapun pada Tahun 2022 pencapaian kinerja BLUD Kota Madiun turun secara signifikan menjadi hanya sebesar 50%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Penyebab dari tidak tercapainya target tersebut adalah tidak tercapainya *Bed Occupancy Rate* (BOR), semakin banyak fasilitas kesehatan rawat inap yang baru kasus covid yang tetap masih ada, meskipun memiliki tren menurun, sehingga ketersediaan fasilitas untuk Covid-19 masih dipersiapkan dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan: selalu berinovasi terkait layanan yang ada di rumah sakit dan berupaya dalam pemanfaatan TT (Tempat Tidur) dengan melakukan analisa dan evaluasi untuk penyediaan TT. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, pencapaian kinerja BLUD Kota Madiun kembali meningkat signifikan menjadi 100%.

22. Persentase Produk Makanan Lahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang Dinilai

    IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Kota Madiun Tahun 2020 sebesar 86,63%. Pada tahun 2021 produk olahan IRTP Kota Madiun telah mencapai 100%, akan tetapi kembali menurun menjadi 90,72% pada Tahun 2022. Meskipun capaian Tahun 2022 menurun, namun melebihi target dari yang direncanakan sebesar 87,88. Kemudian, capaian pada Tahun 2023, meningkat menjadi 95%. Adapun pada tahun 2024, capaiannya turun menjadi 93,9%.

23. Persentase Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit yang sesuai Standar

    Sarana dan Prasarana rumah sakit merupakan peralatan yang mendukung pelayanan mendasar perawatan kesehatan yang aman. Persentase sarana dan prasarana rumah sakit di Kota Madiun Tahun 2020 hingga 2024 telah memenuhi standar dengan capaian sebesar 100%.

24. Persentase Penduduk yang di Skrining Faktor Resiko PTM

    Penduduk yang di skrining faktor resiko PTM tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 90,25%, yang mana menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 persentase penduduk yang terkena faktor resiko PTM adalah sebesar 118,4% dan 110,81%. Sementara itu, pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan menjadi 110,62% dan 108,3%.

25. Persentase Kelurahan Siaga Aktif Berstrata PURI

    Persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI tahun 2020 sebesar 55,55% dan meningkat menjadi 59,26%. Pada Tahun 2022, persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI di Kota Madiun mencapai 85,19% dan 92,59 pada Tahun 2023. Sementara itu, pada tahun 2024 capaian ini sebesar 100%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

26. Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang Beroperasi Sesuai Perundangan

Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan pada tahun 2020 sejumlah 502 dan meningkat lagi pada tahun 2021 sebesar 550 sarana. Meningkatnya sarana pelayanan kesehatan diharapkan semakin banyak masyarakat yang terpenuhi haknya dalam mendapat layanan kesehatan. Namun pada tahun 2022, jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan mengalami penurunan hampir 50% hingga mencapai 252 sarana. Namun pada tahun 2023, sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan sebesar 161 sarana kesehatan. Sementara itu, tahun 2024 capaian ini meningkat menjadi 257 sarana.

27. Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Madiun tahun 2020 hingga tahun 2022 telah sesuai standar serta mendapatkan persentase sebesar 100%. Pada tahun 2023, persentase ini meningkat menjadi 100,12% dan turun kembali menjadi 100% pada tahun 2025.

28. Persentase TTU dan TPM sehat

Persentase tempat-tempat umum (TTU) dan tempat pengolahan makanan (TPM) sehat mencapai 86,32% pada tahun 2020. Diharapkan tempat-tempat umum yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan serta tempat pengolahan makanan seperti warung makan, toko penjual makanan, dan lokasi jajanan makanan dapat dilakukan pengawasan lebih lanjut agar persentase mengalami peningkatan. Tahun 2021 persentase tempat-tempat umum (TTU) dan tempat pengolahan makanan (TPM) yang sudah dalam kategori sehat di Kota Madiun sudah mencapai 95,3% TTU dan 95,2% TPM. Dan pada Tahun 2022 (TTU) turun menjadi 81% akan tetapi (TPM) meningkat menjadi 96,67%. Pada Tahun 2023 untuk TTU telah menggunakan istilah baru TFU (Tempat Fasilitas Umum) dengan capaian 95,7% begitu pula dengan TPM disebut dengan istilah baru TPP (Tepat Pengelolaan Pangan) dengan capaian 2023 mencapai 89,7%. Sementara itu, pada tahun 2024 TTU meningkat menjadi 99,26% dan TPM meningkat sebesar 93,9%.

29. Angka Kematian Bayi

Kualitas kesehatan ibu, balita, dan bayi baru lahir salah satunya dapat diukur dengan indikator angka kematian bayi. Pada tahun 2020 angka kematian bayi menjadi sebesar 4,32. Adapun angka kematian bayi Kota Madiun pada Tahun 2021 mencapai 3,8 dan meningkat menjadi 4,2 pada Tahun 2022 dan kembali meningkat pada 2023 menjadi 5,1. Sementara itu, pada tahun 2024, angka kematian bayi turun di angka 4,5.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

30. Angka Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Kusta

Penghitungan angka kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Kusta menggunakan angka prevalensi kusta per 10.000 penduduk, di Kota Madiun capaiannya cenderung fluktuatif, akan tetapi pada Tahun 2022 merupakan capaian terendah diantara periode Tahun 2020-2024 yaitu mencapai 0,1 saja. Namun pada Tahun 2023, mengalami peningkatan menjadi 0,4 resiko orang terinfeksi kusta. Pada tahun 2024, angka ini turun menjadi 0,2.

31. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Umum Daerah

Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik pada RSUD Kota Madiun mengalami peningkatan dari 80,19 pada tahun 2020 menjadi 89,49 pada tahun 2024. Ini terjadi karena RSUD Kota Madiun dalam penerapan pelayanan melakukan beberapa inovasi untuk menunjang kepuasan masyarakat.

32. Capaian SPM RSUD

Capaian standar pelayanan minimal pada RSUD Kota Madiun juga cenderung meningkat seiring meningkatnya capaian IKM pada RSUD Kota Madiun. Capaian SPM tahun 2020 adalah sebesar 81,52 dan pada tahun 2021 turun menjadi 79,35. Pada tahun 2022 capaian SPM RSUD mencapai 88,17 dan kembali meningkat pada 2023 menjadi 89,13. Angka ini sedikit menurun pada tahun 2024 hingga 89,49 namun secara kategori masuk dalam Tuntas Madya.

33. Persentase Desa ODF

Pemerintah Kota Madiun telah mencanangkan bebas ODF pada Tahun 2014. Program unggulan untuk mendukung pencapaian ODF adalah program JAMBANISASI (pembangunan jamban untuk masyarakat tidak mampu). Capaian persentase desa ODF di Kota Madiun dari tahun 2020-2024 mencapai 100%.

34. Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka jenis pelayanan dasar bidang Kesehatan yang diterapkan di Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 46 Capaian SPM Bidang Kesehatan Kota Madiun Tahun 2021-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian											
			2021			2022			2023			2024		
			Target	Hasil	Capaian	Target	Hasil	Capaian	Target	Hasil	Capaian	Target	Hasil	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KESEHATAN														
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	2,490	2,490	100%	2,470	2,470	100%	2,450	2,453	100.12%	2,847	2,861	100.50%
2	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	2,377	2,384	100.29%	2,357	2,360	100.13%	2,338	2,347	100.38%	2,847	2,851	100.10%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	2,264	2,991	101.19%	2,245	2,257	100.53%	2,227	2,256	101.30%	2,690	2,719	101.10%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	9,218	9,198	99.78%	9,145	9,202	100.62%	9,081	9,099	100.20%	10,611	10,684	100.70%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	32,074	28,629	89.26%	31,855	31,855	100%	31,582	31,582	100%	31,650	31,650	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	115,489	136,729	118.39%	115,110	127,548	110.81%	114,664	126,836	100.00%	129,392	140,124	108.30%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	25,597	28,406	99.33%	29,585	30,187	102.03%	30,573	31,360	102.57%	33,407	34,940	104.60%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	68,685	37,767	54.99%	68,973	38,781	56.23%	69,278	42,970	62.03%	12,731	12,752	100.20%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	8,111	9,574	118.04%	8,143	9,890	121.45%	7,741	8,425	108.84%	10,755	11,012	102.40%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	338	389	115.09%	339	360	106.19%	339	374	110.32%	383	403	105.20%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulusis	Jumlah warga negara terduga tuberculusis yang mendapatkan layanan kesehatan	3,261	1,718	52.68%	5,184	6,553	126.41%	5,076	5,763	113.53%	6,597	6,684	101.30%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodefiviency virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	5,845	5,968	102.10%	5,780	6,849	118.49%	5,828	6,664	114.34%	6,240	7,482	119.90%

Sumber : Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pada Tahun 2024 capaian Kesehatan secara keseluruhan adalah 103.69% atau dikategorikan Tuntas Paripurna**.** Secara keseluruhan dari 12 indikator capaian kesehatan tahun 2024 sudah memenuhi target.

Data capaian pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya tujuan pembangunan berkelanjutan 3 (tiga) Kehidupan Sehat dan Sejahtera sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 2. 47 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tahun 2024

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs		Satuan	2024	
				Target Pencapaian	Realisasi
1	2	3	4	5	6
3.1 Pada Tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.					
	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinkes, PP dan KB	per 100.000 kelahiran hidup	183/100.000 KH	0/100.000 KH
	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 Tahun yang proses melahirkan terakhirnya : (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	Dinkes, PP dan KB	%	100	100.14
3.2 Pada Tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.					
	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes, PP dan KB	per 1000 kelahiran hidup	AKB = 16/1000 KH	AKBa = 5.2/1000 KH AKB = 4.5/1000 KH
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes, PP dan KB	per 1000 kelahiran hidup	10/1000 KH	AKN = 3.7/1000 KH
3.3 Pada Tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.					
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	Dinkes, PP dan KB	%		
	Jumlah kasus baru HIV		kasus		156
	Presentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai standart		%	100	120,13
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinkes, PP dan KB	%	673	629,9
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinkes, PP dan KB	%		0,07
3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Dinkes, PP dan KB		1	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Dinkes, PP dan KB	%	<2%	3.71%
	Jumlah kasus hepatitis B		kasus		DDHB Bumil = 28; Umum (faktor resiko) = 176
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	Dinkes, PP dan KB	per 100.000 penduduk	<1	Filariasis: 0,04 Kusta : 0,22
3.3.5 (a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	Dinkes, PP dan KB	Program eliminasi merupakan program nasional, indikator menanyakan jumlah kab/kota jadi merupakan indikator provinsi	1	1 (eliminasi tahap I)
3.3.5 (b)	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.	Dinkes, PP dan KB	Program eliminasi merupakan program nasional, indikator menanyakan jumlah kab/kota jadi merupakan indikator provinsi	1	1
3.4 Pada Tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.					
3.4.1 (a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 Tahun.	Dinkes, PP dan KB	Data tidak tersedia karena memerlukan survei		
3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinkes, PP dan KB	%	47.7	11.5
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan esehatan sesuai standar	Dinkes, PP dan KB	%	100	100.16
3.4.1 (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 Tahun.	Dinkes, PP dan KB	%	90%	108.3
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.					
3.5.1 (a)	Jumlah penyalahgunaan napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis.	Dinkes, PP dan KB	kasus		0
3.5.1 (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Dinkes, PP dan KB	kasus		0
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 Tahun dalam satu Tahun terakhir.	———	orang		
3.6 Pada Tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.					
3.6.1*	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.	Polres Madiun Kota	orang		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6
3.7 Pada Tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.					
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Dinkes, PP dan KB	%	68	70.5
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 Tahun; umur 15-19 Tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	Dinkes, PP dan KB	%	4.6	5.4
3.7.2 (a)	*Total Fertility Rate (TFR).*	Dinkes, PP dan KB	%	<2.1	1.85
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.					
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.	Dinkes, PP dan KB	Tidak ada data		
3.8.1 (a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	Dinkes, PP dan KB	%	<7	5.58
3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.	BPS	Tidak ada data		
3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinkes, PP dan KB, BPJS	%	100	101.02
3.9 Pada Tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.					
3.9.3*	Angka kematian akibat keracunan.	Dinkes, PP dan KB	%	0	0
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.					
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 Tahun.	Dinkes, PP dan KB, BPS			
		Dinkes PP dan KB	Tidak Ada Data		
		BPS	%		
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.					
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	Dinkes, PP dan KB			
	Capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	Dinkes, PP dan KB	%	100% (dari 95% SI)	92.9
3.b.2*	*Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.*	Dinkes, PP dan KB	Indikator ini tidak ada		
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Dinkes, PP dan KB	%	100	100
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinkes, PP dan KB	%	11.6	19.7
3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.					
3.d.1*	Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan.	Dinkes, PP dan KB	SK	1	1

Sumber : LPPD Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2024

2.4.4.3 Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2020 hingga 2024 dilakukan dalam rangka mencapai beberapa sasaran pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar. Adapun perkembangan pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 48 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
4.1	Rasio rumah layak huni	99.95	99.66	99.58	99.72	99.9
4.2	Rasio permukiman layak huni	100	99.66	99.58	99.72	99.9
4.3	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	87.12	89.22	90.55	94.05	99.05
4.4	Luasan Kawasan Kumuh yang Tertangani (Ha)	12.08	31.98	20.43	0.91	45,01

Sumber : BPS Kota Madiun, LKPJ Kota Madiun, diolah

Sebagaimana data yang termuat pada tabel diatas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Rasio rumah layak huni

   Rasio rumah layak huni merupakan rasio perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Rasio rumah layak huni di Kota Madiun tahun 2020 hingga 2024 mengalami perkembangan fluktuatif. Semakin tinggi rasio berarti semakin banyak penduduk yang memiliki rumah layak huni. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2020 mencapai 99,95. Tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan menjadi 99,66 dan 99,58. Tahun 2023 dan 2024 mengalami kenaikan menjadi 99,72 dan 99,9. Hal tersebut disebabkan adanya peraturan baru mengenai Hibah dan Bansos sehingga baru Tahun 2018 program bantuan RTLH tersebut dilaksanakan. Adanya usulan-usulan baru mengakibatkan jumlah perkembangan rasio menjadi fluktuatif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Rasio permukiman layak huni

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, definisi dari Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Mengacu pada hal diatas tentang lingkungan permukiman kumuh bahwa sampai dengan tahun 2024 rasio permukiman layak huni mencapai 99,9% atau dengan kata lain tidak ada lagi permukiman tidak layak huni.

3. Indeks Sarana Prasarana Permukiman

Indeks Sarana Prasarana Permukiman adalah indikator yang menjadi tujuan dari dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, penopang indikator ini adalah Indeks Perumahan Permukiman dan Indeks Pengelolaan PSU, RTH, PJU dan Permakaman. Untuk menghitung Indeks perumahan terdapat 3 (tiga) indikator kunci yaitu Persentase RTH yang dikelola kondisi baik, persentase penerangan jalan yang dikelola, dan persentase peningkatan fasilitas permakaman.

Selain itu untuk menghitung indeks pengelolaan PSU, RTH, PJU dan Permakaman terdapat 3 (tiga) indikator kunci yaitu persentase Rumah Layak Huni, Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi dan Cakupan Lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU. Capaian Indeks Sarana Prasarana Permukiman dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar 87,12 pada tahun 2020 menjadi 99,05 pada tahun 2024.

4. Kawasan Kumuh yang Tertangani

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Madiun nomor: 360-401.206/193/2020 tentang Penetapan Lokasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Madiun, telah ditentukan terdapat sebesar 64,49 Ha untuk lokasi yang perlu peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 sudah terealisasi sebesar 65,4 Ha lokasi yang sudah dilakukan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Sedangkan pada tahun 2024, belum tersedia data realisasi peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka jenis pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 49 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Tahun 2021-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN											
			2021			2022			2023			2024		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah darurat layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah kabupaten/kota	jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah Daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan	65	65	100%	105	105	100%	105	105	100%	140	140	100%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2025

Adapun Capaian standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman pada tahun 2021-2024 secara keseluruhan mencapai 100% atau termasuk kategori Tuntas Paripurna.

2.4.4.4 Pelayanan Sosial

Untuk indikator Fasilitas penyediaan rumah yang Pelayanan Sosial Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk:

1. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tabel 2. 50 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum Fokus Pelayanan Sosial Tahun 2020-2024

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
6	Sosial					
6.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	16	16	16	16	16
6.2	Jumlah Penerima Bantuan	49.075	52.260	19.094	26.670	11.437
6.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	30.295	27.358	30.690	33.716	24.493
6.4	Persentase PMKS yang tertangani	99.80%	99.66%	99.95 %	99.90 %	99,69 %
6.5	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	49.075	52.260	19.094	26.670	11.437
6.6	Tingkat Kemiskinan	4.98	5.09	4.76	4.74	4,38
6.7	Indeks Gini	0.39	0.345	0.398	0.416	0.435

Sumber : Dinas Sosial, 2025

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel diatas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

   Data menunjukkan bahwa di Kota Madiun pada tahun 2020 hingga 2024 terdapat 16 lembaga sarana sosial, terdiri dari 15 Panti Asuhan dan 1 (satu) Panti Jompo yang terdaftar sedangkan yang aktif dan menerima bantuan sosial permakanan sebanyak 8 (delapan) lembaga,. Jumlah bantuan sosial untuk Panti Asuhan menyesuaikan dengan jumlah masing-masing anak yang diasuh.

2. Jumlah penerima bantuan

   Jumlah penerima bantuan di wilayah Kota Madiun pada tahun 2020 sebanyak 49.075 orang dan meningkat menjadi 52.260 orang pada tahun 2021.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pada Tahun 2022 jumlah penerima bantuan telah menurun drastis menjadi 19.094 orang. Namun, setelah adanya penurunan drastis tersebut, pada Tahun 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi 26.670 penerima bantuan. Capaian ini menurun dua kali lipat lebih pada tahun 2024, yaitu sebesar 11,437 orang penerima bantuan.

3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Jumlah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2020 sebesar 30.295, kemudian menurun menjadi 27.358 pada tahun 2021. Capaian ini mengalami peningkatan hingga tahun 2022, yaitu sebesar dan meningkat sebesar 33.690. Sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 capaian ini meningkat menjadi 33.716 dan 24.493. Tujuan dari penanganan tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sementara dalam faktanya, masih begitu banyak masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga berdampak pada upaya untuk mencapai hidup layak. susah. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang dahulu disebut dengan PMKS.

Penanganan PPKS dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Jumlah PPKS di Kota Madiun sebanyak 10.702 orang atau sebesar 5,1% dari total jumlah penduduk.

Sebanyak 2.536 orang PPKS atau 1,2 % dari jumlah penduduk, memerlukan penanganan khusus sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan sedangkan PPKS lainnya (Fakir Miskin) sejumlah 3,9% dari jumlah penduduk memerlukan penanganan berupa bantuan sosial dan pemberdayaan sosial sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meningkatkan kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

4. PMKS yang tertangani

Dalam kurun waktu dari tahun 2020 hingga 2024, persentase PMKS yang tertangani konsisten berada di atas 99%. Seperti pada tahun 2020 capaian penanganan sebesar 99,8%. Sedangkan pada tahun 2021, capaiannya meningkat menjadi 99,66. Sedangkan pada Tahun 2022, 2023 dan 2024 cakupan PMKS yang tertangani berturut-turut sebesar 99,95%; 99,90%; dan 99,69%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Data PMKS yang memperoleh bantuan sosial Tahun 2024 ditampilkan pada tabel dibawah ini, yaitu:

Tabel 2. 51 Rincian PMKS yang Menerima Bantuan Sosial Tahun 2024

JENIS PPKS		JUMLAH	BANTUAN
1.	Lanjut Usia Terlantar/ Nonpotensial	200	Rp1,600,000,000
2.	Anak Terlantar	-	-
3.	Fakir Miskin dengan rincian:		
-	Fakir Miskin KPM BPNT	7.414	Rp17.793.600,000
-	Fakir Miskin KPM PKH	3.168	Rp9.491.090.590
-	Fakir Miskin KPM BLTD, BLT	3.410	Rp7.437.900.000
Jumlah		14.192	Rp36.322.590.590

Sumber : Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun Tahun 2025

Sebagaimana termuat pada Tabel diatas, pada Tahun 2024 jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial sebanyak 14.192 orang. Jenis PMKS yang diberi bantuan yaitu lanjut usia terlantar/non potensial berupa bantuan uang tunai sebesar Rp8.000.000,- per orang. Jumlah penerima bantuan terbanyak yaitu jenis PMKS fakir miskin dengan jumlah 13.992 orang dengan total bantuan sebesar Rp34,722,590,590,- .

6. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan bukan makanan).

Sesuai data BPS tingkat kemiskinan Kota Madiun Tahun 2021 sebesar 5,09% atau sekitar 9.060 penduduknya berada dibawah garis kemiskinan (Rp514.409/jiwa/bln). Tahun 2022 tingkat kemiskinan kota madiun mengalami penurunan sebesar 0,33 poin atau berada pada 4,76% atau sebanyak 8.490 penduduk miskin. Berbagai bantuan sosial baik dari APBN maupun dari APBD dan pemberdayaan sosial yang diterima masyarakat ditujukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat demi menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Madiun. Pada Tahun 2023, terjadi penurunan tingkat kemiskinan menjadi sebesar 4,74. Tingkat kemiskinan pada tahun 2024 menurun kembali menjadi 4,38%.

7. Realisasi SPM Bidang Sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kab/Kota, maka jenis pelayanan dasar Bidang Sosial yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 52 Capaian SPM Bidang Sosial Kota Madiun Tahun 2021-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN											
			2021			2022			2023			2024		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
SOSIAL														
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	93	100	107.53%	100	95	107.53%	97	117	120.60%	198	198	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	457	628	137.42%	460	736	160.22%	465	613	131.82%	470	470	100%
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	135	276	204.44%	137	213	155.47%	139	251	180.57%	253	253	100%
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara / gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	50	50	100%	92	72	78.26%	94	105	111.70%	96	96	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	3,300	5,734	173.75%	36	17	47.22%	36	58	161.11%	49	49	100%

Sumber : Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun Tahun 2025

Capaian SPM urusan bidang Sosial secara keseluruhan Tahun 2024 adalah 100% sehingga dapat dikategorikan Tuntas Paripurna.

2.4.4.5 Pelayanan Tenaga Kerja

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan di Kota Madiun berorientasi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan tersebut bertujuan untuk penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis pengembangan ekonomi untuk mencapai sasaran menurunnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan Daerah serta perkembangannya pada aspek tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 53 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
7	Tenaga Kerja					
7.1	Angka sengketa pengusaha pekerja per Tahun	100	18	13	14	12
7.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	68.63%	66.87%	66.85%	69.29%	70,60%%
7.3	Pencari kerja yang ditempatkan	73.04	79.15	91.76	92.43%	91,90%
7.4	Tingkat pengangguran terbuka	8.32%	8.15%	6.39%	5.85%	4,30%
7.5	Keselamatan dan perlindungan	23,294	25,218	25,505	28,150	37,884
7.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah Daerah	100	0	0	0	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel diatas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Angka sengketa pengusaha pekerja per Tahun

   Indikator ini menunjukkan capaian kinerja penyelesaian sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Dalam era industrialisasi, masalah sengketa pengusaha dan pekerja menjadi semakin meningkat dan kompleks sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil. Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan perlu diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai- nilai pancasila. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terus memperkuat peranan mediator hubungan industrial. Hal ini dilakukan untuk mencegah, meredam dan mempercepat penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja atau buruh dan pengusaha.

   Mediator hubungan industrial berperan sebagai ujung tombak dalam membina dan mengembangkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan yang ditandai ketenangan bekerja para pekerja atau buruh dan stabilitas dunia usaha. Dengan peran mediator tersebut, di Kota Madiun perselisihan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha dengan jumlah pengaduan sengketa pekerja atau buruh dengan pengusaha di Tahun 2020 yang terdaftar pengaduan dan dapat terselesaikan dengan capaian kinerja 100% Penyelesaian pengaduan ini dapat diselesaikan melalui cara mediasi dan perjanjian bersama.

   Pada tahun 2021 sampai 2024 terjadi penurunan yang signifikan terhadap angka sengketa pengusaha pekerja per tahun. Dilihat dari data yang ada ternyata angka sengketa hanya mencapai 18% pada Tahun 2021, 13% pada Tahun 2022, 14% pada Tahun 2023 serta 12% pada tahun 2024. Dengan kata lain penurunan angka sengketa ini dapat sukses dilaksanakan saat terjadi implementasi Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di suatu perusahaan.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

   Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah salah satu indikator ketenagakerjaan yang merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. TPAK tahun 2020 sebesar 68,63% da meningkat menjadi 68,63% pada tahun 2021. Angka ini menurun di tahun berikutnya. Pada Tahun 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Madiun terealisasi sebesar 66,85%. Hal ini menunjukkan dari 100 orang dari penduduk usia kerja (usia 15 Tahun ke atas), terdapat angkatan kerja sebanyak 67 orang yang terdiri dari mereka yang bekerja dan pengangguran. Berarti yang sisanya sebanyak 33 orang adalah bukan angkatan kerja yang terdiri dari usia sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

Pada Tahun 2023, Capaian TPAK mengalami peningkatan menjadi 69,29%. Sedangkan pada tahun 2024, TPAK mengalami peningkatan hingga 70,60%. Perkembangan TPAK di Kota Madiun dalam kurung waktu Tahun 2020-2024 mengalami perkembangan fluktuatif naik. Hal ini dikarenakan tersedianya lowongan pekerjaan dan pencari kerja yang telah dilatih melalui pelatihan keterampilan berbasis kompetensi dan kewirausahaan yang bisa mengembangkan keterampilan serta menciptakan wirausaha baru.

3. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan dapat dihitung dengan cara persentase dari jumlah pencari kerja dibandingkan dengan pencari kerja yang terdaftar. Persentase pencari kerja yang ditempatkan Tahun 2020 pencari kerja yang ditempatkan sebesar 73,04%. Pada Tahun 2021, jumlah pencari kerja yang ditempatkan adalah sebesar 79,15% dan pada Tahun 2023 kembali secara signifikan di posisi lebih dari 90% yaitu 92,43%. Hal ini disebabkan pandemi yang sudah dapat penanganan dan teratasi dengan baik sehingga perekonomian perlahan berangsur normal karena perekrutan tenaga kerja baru pada perusahaan. Sedangkan pada tahun 2024, capaian ini berada di angka 91,90%.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka atau sering juga diistilahkan dengan pengangguran penuh merupakan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. TPT merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari Tahun ke Tahun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain tingkat kemiskinan. TPT Kota Madiun juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran. Pada Tahun 2020 capaian TPT sebesar 8,32%.

Angka TPT di Kota Madiun mengalami penurunan 0,17 poin di Tahun 2021 dan penurunan 1,76 poin di Tahun 2022. Data dari BPS untuk TPT Kota Madiun pada Tahun 2021, 2022 dan 2023 sebesar 8,15%, 6,39% dan 5,85%. Sedangkan pada tahun 2024 TPT sebesar 4,3%.

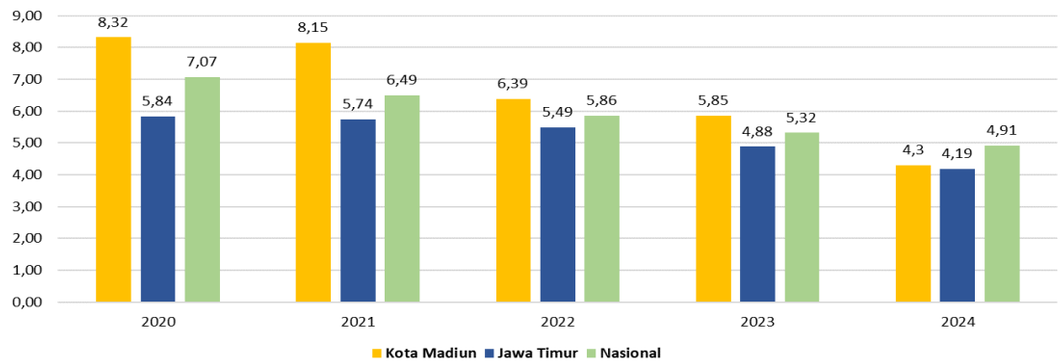

Gambar 2. 75 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kota Madiun

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun dari tahun 2020-2024 selalu berada di atas TPT Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

5. Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja

Sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan, menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, begitu juga dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja meletakkan prinsip dasar pelaksanaan keselamatan kerja. Setiap perusahaan wajib menaati peraturan tersebut guna memberikan kenyaman dan keamanan bagi pekerja di lingkungan pekerjaannya. Sedangkan bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kota Madiun selama tahun 2020-2024 selalu menunjukkan peningkatan jumlah pekerja yang telah menerima jaminan sosial tenaga kerja. Pada tahun 2020 jumlahnya sebanyak 23.294 pekerja. Tahun 2022 jumlah penerima jaminan sosial tenaga kerja di Kota Madiun sudah mencapai 25.506 pekerja. Tahun 2023 terdapat kenaikan yang cukup signifikan sebesar 2.644 pekerja yang menerima jaminan sosial tenaga kerja sehingga jumlah penerima menjadi 28.150 pekerja. Serta sebanyak 37.884 pekerja pada tahun 2024.

6. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah Daerah

Reformasi telah membukakan pemikiran bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan Negara yang lebih demokratis, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya *good governance*. Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 E ayat (3), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP/16/MEN/2001, merupakan dasar hukum dalam melaksanakan Organisasi Serikat Pekerja (SP). Dalam konteks Ketenagakerjaan kita menerapkan sistem Hubungan Industrial Pancasila, yang harus dipahami secara mendalam substansi dan implikasinya oleh Pekerja dan Pengusaha.

Pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah bersama sama menegakkan dan mematuhi undang-undang ketenagakerjaan dengan mengadakan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan segala perselisihan yang terjadi dengan berdasarkan perjanjian kerja dan perjanjian bersama (PB). Meskipun sudah adanya PB yang disepakati antara pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah, namun masih terdapat sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha.

Untuk Kota Madiun jumlah pengaduan sengketa pekerja atau buruh dengan pengusaha di 2020 yang terdaftar dapat terselesaikan semua. Pada Tahun 2021 dan 2024, permasalahan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah Daerah ternyata tidak terdapat permasalahan berarti. Hal itu terjadi mengingat penyelesaian masalah yang berjumlah 0, dalam arti lain tidak ada permasalahan mengenai perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah Daerah Kota Madiun yang terjadi pada Tahun 2021-2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.4.4.6 Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kebijakan publik yang konstruktif dan dinamis sebagai dasar menuju harmonisasi pembangunan untuk mencapai tujuan mengembangkan pengarusutamaan gender dengan sasaran meningkatkannya peran serta perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya perlindungan hak-hak anak dan perempuan. Perkembangan pencapaian kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 54 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang PPPA Kota Madiun Tahun 2020-2024

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
8.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	12.72	7.83	13.47	11.73	12,70
8.2	Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	0.016	0.032	0.00023	0.00024	
8.3	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	100	100
8.4	Indeks Pemberdayaan Gender	77.18	76.75	78.03	78.94	Belum rilis BPS
8.5	Indeks Pembangunan Gender	95.3	95.34	95.52	95.87	Belum rilis BPS

Sumber : Dinas Sosial PPPA Kota Madiun, 2025

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel diatas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Jumlah persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

   Persentase realisasi partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi dari Tahun ke Tahun. Untuk realisasi tahun 2020 sebesar 12,72%, dan Tahun 2021 sebesar 7,83%. Beberapa alasan yang menyebabkan penurunan adalah pensiun, mutasi, ataupun meninggal dunia. Adapun pada Tahun 2022 jumlah realisasi partisipasi perempuan di lembaga pemerintah secara signifikan naik menjadi sebesar 13,47%, hal ini dikarenakan terdapat mutasi masuk dan pengangkatan ASN. Namun, pada Tahun 2023, mengalami penurunan menjadi 11,73%. Namun pada tahun 2024 terjadi sedikit peningkatan menjadi 12,7%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

   Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan perbandingan jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga. Realisasi tahun 2020 sebesar 0,016 sedangkan tahun 2021 mencapai 0,032. Rasio KDRT menggambarkan jika semakin tinggi rasio maka kesadaran kaum perempuan untuk melapor apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Adapun pada Tahun 2022 turun signifikan menjadi 0,00023 dan pada Tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,000204, hal ini dikarenakan edukasi dan pendampingan di dalam keluarga telah berhasil dilakukan lewat kegiatan pada dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan data tahun 2024 belum tersedia.

3. Jumlah persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

   Semua laporan pengaduan yang masuk di Pusat Pelayanan Terpadu tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Tahun 2020 hingga 2024 didata dan tertangani semuanya, sehingga capaiannya 100%. Penanganan tersebut secara umum meliputi mediasi kekeluargaan, melaporkan kepada pihak yang berwajib, memberikan pendampingan hukum, memberikan konseling terhadap korban, melakukan penjangkauan ke rumah korban maupun pelaku.

4. Jumlah Indek Pemberdayaan Gender (IDG)

   Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan apakan perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Nilai IDG Kota Madiun tahun 2020-2022 menunjukkan tren yang fluktuatif. Tahun 2020 capaiannya sebesar 77,18%. Angka ini menurun di tahun 2021 menjadi 76,75% dan naik kembali di tahun 2022 menjadi 78,03%. Di tahun 2023 terjadi sedikit peningkatan menjadi 78,94. Hal ini mengindikasikan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Madiun diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Adapun data untuk tahun 2024 belum dirilis oleh BPS.

5. Jumlah Indek Pembangunan Gender (IPG)

   Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun tercatat mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 94,38 dan Tahun 2021 sebesar 94,42. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antara penduduk laki-laki dan perempuan semakin mengecil, dibuktikan dengan data di lapangan yang di dapat oleh BPS bahwasannya IPG Kota Madiun sudah mencapai 94,57 pada Tahun 2022. Tahun 2023 sebesar 95,18. Adapun data IPG untuk tahun 2024 belum dirilis oleh BPS.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.4.4.7 Pelayanan Perhubungan

Untuk mengetahui capaian kinerja meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dapat dilihat dari perkembangan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. 55 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perhubungan Kota Madiun Tahun 2020-2024

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
14	Perhubungan					
14.1	Persentase Jumlah Pemasangan rambu-rambu	94%	100%	100%	100%	100%
14.2	Persentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik	90	93	98%	98%	100%
14.3	IKM terhadap pelayanan pelayanan angkutan dan lalu lintas	85.9	85.903	87.289	87.36	89.13
14.4	Persentase Perlengkapan Jalan	67%	84%	100%	100%	100%
14.5	Kinerja Angkutan Umum	35%	40%	70%	70%	70%
14.6	Kinerja Lalu Lintas		38,05	39,26	41	41,2

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Madiun, 2024

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel diatas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Persentase jumlah pemasangan rambu-rambu

   Data menyatakan bahwasannya persentase jumlah pemasangan rambu-rambu di Kota Madiun pada tahun 2020 sebesar 94%. Sedangkan pada tahun 2021-2024 realisasinya mencapai 100%.

2. Persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik

   Persentase sarana dan fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) yang berfungsi baik pada tahun 2020 sebesar 90%. Sedangkan tahun 2021 adalah 93% dan Tahun 2022 adalah 98%, sedangkan Tahun 2023 dan 2024 realisasinya mencapai 98% dan 100%. Lebih detailnya sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 56 Persentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik di Kota Madiun Tahun 2022-2024

No.	NAMA	2022			2023			2024		
		JUMLAH TOTAL	JUMLAH BAIK	%	JUMLAH TOTAL	JUMLAH BAIK	%	JUMLAH TOTAL	JUMLAH BAIK	%
1	TRAFFIC LIGHT	30	30	100%	30	30	100%	31	31	100%
2	HALTE	12	10	83%	12	11	91%	13	13	100%
3	CCTV	25	25	100%	25	25	100%	75	75	100%
4	WARNING LIGHT	65	65	100%	65	65	100%	70	70	100%
JUMLAH		132	130	98%	132	131	98%	189	189	100%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sebagaimana yang ditampilkan pada tabel diatas diatas dapat dilihat bahwa persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang yang berfungsi baik selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu 98% di tahun 2022, 98% di tahun 2023 dan 100% di tahun 2024.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan angkutan dan lalu lintas

IKM terhadap pelayanan angkutan dan lalu lintas tahun 2020 IKM terhadap layanan angkutan dan lalu lintas mencapai 85,9. Sedangkan pada Tahun 2021 IKM masyarakat kembali meningkat walau tidak signifikan dengan angka sebesar 85,903 dan terjadi peningkatan sebesar 1,457 poin dengan realisasi 87,360 di Tahun 2023. Sedangkan di tahun 2024 capaiannya naik menjadi 89,13.

Beberapa poin catatan perbaikan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 57 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Hasil SKM Tahun 2024

No.	Prioritas Unsur	Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut/Klarifikasi OPD	Status Penyelesaian
1	**Sistem, Mekanisme, Prosedur**	1. Fisik : Membuat *pamflet, leaflet* atau *X banner* terkait prosedur pelayanan.	Sudah ada banner, leaflet, dan X banner terkait prosedur pelayanan	Selesai
		2. Non Fisik : Membuat konten dalam bentuk *pamflet, leaflet* atau video interaktif terkait prosedur pelayanan yang di*upload* di seluruh media *online* milik Dinas Perhubungan.	Sudah ada konten atau informasi pelayanan secara online yang di upload di media sosial terkait prosedur pelayanan.	Selesai
		3. Menyampaikan informasi mengenai layanan secara jelas, terbuka, dan mudah diakses. Menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, situs web resmi, dan papan pengumuman untuk mencapai lebih banyak masyarakat.	Sudah tersedia informasi layanan secara online melalui media sosial, situs web maupun saluran komunikasi melalui WhatsApp	Selesai
2	**Waktu**	1. Agar lebih efisien dan efektif, perlu dipertimbangkan untuk memperluas layanan secara *online*. Hal lni bisa meliputi pengajuan dokumen secara elektronik, dan lain-lain.	Sudah tersedia layanan secara online bagi masyarakat untuk melakukan pendaftaran online	Selesai
		2. Melaksanakan kegiatan pelatihan *service excellent* (pelayanan prima),	Selalu mengadakan evaluasi rutin bulanan untuk menjaga dan meningkatkan etos	Selesai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Prioritas Unsur	Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut/Klarifikasi OPD	Status Penyelesaian
		untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja petugas serta sikap layanan dan disiplin kerja.	kerja bagi para pegawai dalam Melayani masyarakat	
		3. Melaksanakan pemberian *reward* dan *punishment* untuk meningkatkan kinerja pegawai.	Sudah dilaksanakan pemberian reward dan *punishment* untuk pegawai	Selesai
3	**Kompetensi Pelaksana**	1. Memberikan pelatihan rutin kepada petugas untuk mengembangkan keterampilan mereka dalam hal pelayanan, komunikasi, dan manajemen. lni akan membantu petugas menjadi lebih kompeten dalam memenuhi	Sudah melaksanakan diklat untuk pengembangan kompetensi pegawai	Selesai

Sumber : Laporan Akhir Survei Kepuasan Masyrakat, 2024

4. Persentase Perlengkapan Jalan

Setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Jenis perlengkapan jalan yang wajib tersedia berupa: rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan dan di luar badan jalan, dan penyelenggaraan perlengkapan jalan.

Persentase perlengkapan jalan Kota Madiun 67% pada tahun 2020 dan 84% pada tahun 2021. Sedangkan tahun 2022-2024, persentase perlengkapan jalan di Kota Madiun sudah mencapai 100%. Hal itu berarti semua jalan sudah dilengkapi beberapa fasilitas perlengkapan jalan.

5. Kinerja Angkutan Umum

Kinerja angkutan umum di Kota Madiun ditandai dengan indikator *Load Factor* pada Angkutan Sekolah Gratis. *Load Factor* angkutan umum dihitung dengan rumus : $\frac{Jumlah\ Total\ Penumpang\ yang\ Terangkut}{Jumlah\ Kapasitas\ Total\ Angkutan\ Umum}$. Sehingga dapat diketahui kinerja angkutan umum pada Dinas Perhubungan Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Kinerja pada tahun 2020 adalah sebesar 35%. Angka ini meningkat menjadi 40% pada tahun 2021. Peningkatan di tahun 2021 merupakan dampak kebijakan untuk angkutan umum gratis khusus Pendidikan membuat kinerja angkutan umum. Pada tahun 2022-2024, kinerja load factor angkutan umum dapat terealisasi secara signifikan mencapai 70% dikarenakan angkutan umum sudah beroperasi secara penuh.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Cakupan dari Pelayanan Angkutan Umum dihitung dengan Persentase populasi yang memiliki akses (≤ 500 Meter) terhadap transportasi umum sebanyak :

$$\frac{Populasi\ yang\ memiliki\ akses\ (\leq\ 500\ Meter)\ terhadap\ transportasi\ umum}{Jumlah\ populasi}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{73.741}{201.733}\ x\ 100\% = 36{,}55\%$$

Sehingga, total populasi yang memiliki akses $\leq 500\ meter$ terhadap transportasi umum adalah sebesar 36,55%

6. Kinerja Lalu Lintas

Untuk mendukung capaian sasaran "meningkatnya kelancaran lalu lintas" maka digunakan indikator Kecepatan Lalu Lintas yang diperoleh dari dari rata-rata kecepatan lalu lintas di beberapa ruas jalan Kota Madiun. Kecepatan lalu lintas rata – rata di Kota Madiun mulai tahun 2021 s.d. 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Sumber : Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan, 2024

Dari grafik diatas, dapat dilihat tren kecepatan ruas jalan rata–rata di Kota Madiun mengalami kenaikan.

7. Kondisi Terminal Tipe C dan Kondisi Perparkiran

Terminal Tipe C yang menjadi pelayanan Dinas Perhubungan adalah Terminal Tipe C Manisrejo Kota Madiun. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, ketersediaan fasilitas utama pada Terminal Tipe C Manisrejo sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal untuk presentase Ketersediaannya yaitu 64% menyatakan ada pada indikator Fasilitas Utama Terminal dan 36% menyatakan tidak ada. Kondisi Fasilitas Utama pada Terminal Tipe C Manisrejo yaitu telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal Terminal karena presentase kondisinya yaitu 64% yang menyatakan kondisinya baik dan 36% yang menyatakan kondisinya tidak baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Ketersediaan Fasilitas Penunjang Terminal Tipe C Manisrejo belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal yaitu sebanyak 73 % menyatakan tidak ada pada indicator Ketersediaan Fasilitas Penunjang dan 27 % menyatakan ada pada Fasilitas Penunjang.

Kondisi Fasilitas Penunjang Terminal Tipe C Manisrejo belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal yaitu sebanyak 73 % menyatakan tidak baik pada indikator Ketersediaan Fasilitas Penunjang dan 27 % menyatakan baik pada Fasilitas Penunjang.

Di Kota Madiun terdapat 5 lokasi parkir *off* street dan 65 ruas jalan yang menjadi lokasi parkir *on street*. Persentase Luasan Area Parkir Dibandingkan dengan Total Area Kabupaten/Kota adalah sebesar : 22.864 / 33.120.000 **= 0.069%**

2.4.4.8 Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Data menunjukan bahwa pada 2020 hingga 2022, sekitar lebih dari 90% penduduk di Kota Madiun telah memiliki akses air minum atau terus meningkat dari Tahun ke Tahun. Sedangkan pada tahun 2023 hingga 2024 persentasenya sudah mencapai 100%.

Tabel 2. 58 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kota Madiun Tahun 2020-2024

Tahun	Penduduk Berakses Air Minum
2020	96,58
2021	98,14
2022	98,17
2023	100
2024	100

Sumber: Dinas PUPR Kota Madiun, 2025

Drainase merupakan infrastruktur dasar pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang, sistem drainase yang baik akan memperlancar aliran air dan juga mencegah terjadinya penumpukan air di permukaan tanah untuk masuk dalam selokan/saluran air. Persentase *draine* baik yang ada di kota madiun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 59 Persentase drainase dalam kondisi baik Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jaringan Sistem Drainase (Km)	60.72	72.78	72.78	72.776	72.78
Panjang Drainase Tersumbat (Km)	20.24	14.53	13.8	13.346	13.15
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	90.4	80.03	80.06	80.09	80.12

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Selain drainase, Jalan juga merupakan infrastruktur dasar pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang. Selama periode 2021 hingga 2024, terjadi peningkatan kondisi jalan baik, dengan angka yang tertinggi pada tahun 2021, yaitu 448,82 km.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Namun, pada tahun 2022, panjang jalan rusak ringan meningkat menjadi 1,751 km, dan jalan rusak berat meningkat tajam pada tahun 2023 dengan 5,187 km. Pada tahun 2024, panjang jalan dalam kondisi baik sedikit menurun menjadi 409,945 km, dengan jalan rusak ringan mencapai 6,499 km, tetapi jalan rusak berat tidak tercatat. Total panjang jalan pada tahun 2024 tercatat 433,485 km, setara dengan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, meskipun ada fluktuasi, data ini menunjukkan bahwa kualitas jalan di Kota Madiun secara keseluruhan mengalami peningkatan, meskipun masih ada tantangan dalam mengurangi jalan yang rusak.

Sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/ 201/013/2025 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Fungsinya dalam Sistem Jaringan Jalan Primer dan Sistem Jaringan Sekunder sebagai Jalan Kolektor Primer-2, Jalan Kolektor Primer-3, Jalan Kolektor Primer-4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Sekunder, dan Jalan Lingkungan Sekunder Provinsi Jawa Timur. untuk Kota Madiun memiliki 1.929 Ruas Jalan, 398,537 Panjang Jalan dengan rincian 8,902 Jalan Arteri Sekunder, 36,475 Jalan Kolektor Sekunder, 32,794 Jalan Lokal Sekunder, dan 320,366 Jalan Lingkungan Sekunder.

Dengan rincian sebagaimana Keputusan Gubernur tersebut diatas maka Kota Madiun tidak mempunyai Ruas Jalan berstatus sebagai Jalan Provinsi dengan terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/202/013/2025 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 60 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kota Madiun Tahun 2021-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN											
			2021			2022			2023			2024		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	41,409	40,637	98.14%	44,831	44,011	98.17%	42,650	42,728	100.20%	47.702	47.702	100%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	41,409	40,591	98.02%	44,831	42,706	95.25%	44,706	46,141	103.20%	47.702	47.612	99.81%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Secara umum Tahun 2024 capaian indikator SPM bidang Pekerjaan Umum mencapai 99,9% sehingga dikategorikan Tuntas Paripurna.

2.4.4.9 Pelayanan Pertanahan

Salah satu pelayanan urusan pertanahan adalah fasilitasi terkait tanah yang bersengketa di Kota Madiun, pada kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan 2024 terdapat beberapa kali mediasi terkait konflik masalah pertanahan yang ada di Kota Madiun.

Tabel 2. 61 Data Layanan Pertanahan Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Layanan	Penyelesaian
1	2020	0 layanan	-
2	2021	1 layanan	Mediasi dengan kesepakatan
3	2022	5 layanan	Mediasi dengan kesepakatan
4	2023	5 layanan	Mediasi dengan kesepakatan
5	2024	5 layanan	Mediasi dengan kesepakatan

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2025

2.4.4.10 Pelayanan Kepemudaan dan Olah Raga

Perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga Kota Madiun pada tahun 2020-2024 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sasarannya berikut:

Tabel 2. 62 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun Tahun 2020-2024

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
8	Pemuda dan Olahraga					
8.1	Jumlah organisasi pemuda	6	5	5	5	5
8.2	Jumlah kegiatan kepemudaan	1	1	1	1	1
8.3	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3
8.4	Lapangan olahraga	83	83	83	83	83
8.5	Jumlah Organisasi Olah Raga	28	28	28	28	28
8.6	Jumlah Prestasi di Bidang Pemuda dan Olah Raga Tingkat Nasional	3	4	6	8	13
8.7	Jumlah Prestasi Olah Raga Tingkat Regional dan Nasional	79	97	205	212	222
8.8	Jumlah Peserta Olah Raga	2,015	2,895	7,835	7,965	7965
8.9	Rasio Kondisi Sarpras Olah Raga yang layak	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Penjelasan untuk masing-masing indikator tersebut adalah:

1) Jumlah organisasi pemuda

Jumlah organisasi kepemudaan Kota Madiun Tahun 2024 antara lain:

a. Anggota KONI;
b. Anggota Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI);
c. OSIS Tingkat SMP dan SMA Kota Madiun;
d. Gugus Pramuka Tingkat SMP Kota Madiun; dan
e. Anggota Dewan Kesenian.

2) Jumlah kegiatan kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan di Kota Madiun dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) kegiatan yaitu Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Paskibraka.

3) Gelanggang/ balai remaja

Gelanggang/balai remaja di Kota Madiun Tahun 2020 sampai 2024 berjumlah 3 (tiga) gelanggang/balai remaja dan tidak mengalami penambahan. Adapun gelanggang/balai remaja yang dikelola pemerintah Kota Madiun, yaitu :

a. Lapangan Sepak bola Stadion Wilis Jl. Mastrip Kota Madiun;
b. GOR Basket Jl. Mastrip Kota Madiun;
c. Gedung Kesenian Jl. Ringin Kota Madiun; dan
d. Lapangan di setiap kelurahan Kota Madiun.

4) Lapangan olahraga

Jumlah lapangan olahraga yang tersebar di Kota Madiun Tahun 2020 hingga 2024 tidak mengalami perubahan, hingga saat ini Tahun 2024 masih berjumlah 83 lapangan.

5) Jumlah organisasi olahraga

Tahun 2024 jumlah organisasi olahraga tetap sama dari tahun 2020, yaitu terdapat 28 organisasi olahraga.

Tabel 2. 63 Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Madiun Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah		No	Uraian	Jumlah	
1	Bulu Tangkis	9	Klub	15	Angkat Besi	1	Klub
2	Tenis Lapangan	18	Klub	16	Taekwondo	1	Klub
3	Renang	5	Klub	17	Panjat Tebing	1	Klub
4	Atletik	1	Klub	18	Judo	3	Klub
5	Wushu	1	Klub	19	Senam	3	Klub
6	Pencak Silat	13	Klub	20	Balap sepeda	1	Klub
7	Catur	1	Klub	21	Tinju	1	Klub
8	Tenis Meja	4	Klub	22	Menembak	5	Klub
9	Panahan	2	Klub	23	Karate	3	Klub
10	Basket	3	Klub	24	Sepatu Roda	2	Klub
11	Bola Volly	5	Klub	25	Drumband	1	Klub
12	Sepak Bola	8	Klub	26	Bilyard	1	Klub
13	Sepak Takraw	1	Klub	27	Sepak Bola Futsal	2	Klub
14	Gulat	1	Klub	28	KONI	46	Klub

Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6) Jumlah Prestasi di Bidang Pemuda dan Olahraga Tingkat Nasional

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga telah memberangkatkan para atlet berprestasi untuk mengikuti berbagai pertandingan di tingkat Provinsi, nasional maupun internasional pada Tahun 2024. Jumlah prestasi di bidang pemuda dan olahraga tingkat nasional meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 13 prestasi dibandingkan tahun 2023 sebanyak 8.

7) Jumlah prestasi olahraga tingkat regional dan nasional

Prestasi olahraga untuk Tahun 2024 di tingkat regional dan nasional juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 222 dibandingkan tahun 2023 sebanyak 212 prestasi.

8) Rasio kondisi sarpras olahraga yang layak

Rasio kondisi sarpras olahraga yang layak Kota Madiun Tahun 2020-2023 telah mencapai 100%. Adapun kondisi sarpras olahraga di Tahun 2024 juga mencapai 100%.

2.4.4.11 Pelayanan Perpustakaan

Bidang urusan perpustakaan, merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perpustakaan, dapat diukur melalui indikator (i) jumlah perpustakaan; (ii) jumlah koleksi buku perpustakaan; (iii) jumlah pustakawan; dan (iv) jumlah pengunjung perpustakaan.

Tabel 2. 64 Data Urusan Perpustakaan di Kota Madiun Tahun 2019-2024

No.	Uraian Data	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Perpustakaan yang dibina/ didampingi (unit)	36	36	217	218	212
2.	Jumlah Koleksi Buku (eksemplar)	85,518	88,765	90,674	98,396	100,180
3.	Jumlah Pustakawan	7	7	8	8	8
4.	Jumlah Arsiparis	6	6	12	12	11
5.	Jumlah Pengunjung (orang)	108,211	56,178	94,986	83,682	152,433

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, 2025

Tabel 2. 65 Laporan Perpustakaan Digital dan Media Sosial di Kota Madiun Tahun 2019-2024

NO	TAHUN	Sumber Data									
		I-MADIUN						Instagram	Facebook	X	Google Bisnis
		Penambahan Koleksi		Pengunjung	Peminjam	Pembaca	Penambahan Anggota				
		Judul	Eksemplar								
1.	2020	3.025	64.413	6.511	311	398	603	17.780	16.501	201	1.131
2.	2021	-	-	6.349	301	363	506	22.320	18.763	196	1.336
3.	2022	1.278	1.278	2.491	220	344	135	18.566	20.880	289	1.504
4.	2023	-	-	1.196	77	325	185	20.105	19.388	274	1.717
5.	2024	1.364	1.413	2.162	219	322	201	59.911	62.863	2.084	1.806

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun memberikan penyediaan bantuan taman bacaan yang ada di kelurahan. Jumlah perpustakaan masyarakat yang dibina pada 2024 ada sebanyak 212 unit. Adanya perpanjangan jam pelayanan di Perpustakaan Umum pada hari Sabtu dan Minggu dapat meningkatkan tren jumlah pengunjung. Namun data jumlah kunjungan dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Yaitu 108.211 di tahun 2020 dan menurun drastis di tahun 2021, yaitu sebanyak 56.178 orang. Di tahun 2022 pengunjung meningkat menjadi 94.986 dan turun kembali di tahun 2023 menjadi 83.682 orang. Di tahun 2024, jumlah pengunjung meningkat signifikan menjadi 152.433 orang.

2.4.4.12 Pelayanan Pangan

Urusan pemerintahan bidang pangan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaran urusan pemerintahan bidang pangan di Kota Madiun berorientasi untuk “memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan” dengan sasaran “meningkatnya ketersediaan pangan”. Indikator utama dalam mencapai tujuan memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan tersebut diukur dengan indikator neraca bahan makanan.

Sedangkan indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan pangan dihitung menggunakan indikator rasio ketersediaan bahan pangan utama (beras). Sedangkan indikator pelaksanaan program di bidang ketahanan pangan dinilai dengan persentase ketersediaan energi dan protein.

Adapun perkembangan indikator kinerja pembangunan Daerah urusan pemerintahan bidang pangan dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 2. 66 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pangan Kota Madiun Tahun 2020-2024

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
9	Pangan					
9.1	Regulasi ketahanan pangan	ada	ada	ada	ada	ada
9.2	ketersediaan pangan utama	138.56	139	217	152	159
9.3	Ketersediaan Energi dan Protein	138.63	126.77	126,77*	132,23*	136.68

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Berdasarkan tabel perkembangan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Regulasi ketahanan pangan

   Adapun regulasi bidang ketahanan pangan yang telah disusun adalah sebagai berikut:

   a. Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 501-401.113/67/2017 Tanggal 31 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Subsidi Pangan Beras Sejahtera Daerah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Madiun;
   b. Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 520-401.113/110/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun menggantikan Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 520-401.204/23/2010 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun;
   c. Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 188-401.113/129/2017 Tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Berbasis Sumber Daya Lokal Kota Madiun;
   d. Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 188-401.113/126/2017 Tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Kegiatan Rumah Pangan Lestari Kota Madiun menggantikan Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 188-401.2014/27/2015 tentang Pembentukan Tim Bina Kegiatan Rumah Pangan Lestari;
   e. Surat Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun No. 188-401.113/01/2017 Tanggal 24 November 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Madiun menggantikan Surat Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun Nomor 060-401.204/001/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Madiun.

2. Ketersediaan pangan utama

   Berdasarkan perhitungan diperoleh rasio ketersediaan pangan utama di tahun 2020 adalah 138,56. Adapun pada tahun 2021 ketersediaan bahan pangan utama di Kota Madiun meningkat sedikit di posisi 139 dan meningkat signifikan di Tahun 2022 yang berada pada posisi 217 namun mengalami penurunan pada Tahun 2023 sebesar 65 basis poin menjadi 152. Adapun ketersediaan pangan utama di tahun 2024 adalah 159, naik 7 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Jumlah ketersediaan energi dan protein

Standar kecukupan energi dan protein yang ditetapkan oleh Widyakarya Pangan Nasional Pangan dan Gizi dimana acuan yang digunakan saat ini yakni WNPG X Tahun 2012, yaitu AKE (angka kecukupan energi) di tingkat ketersediaan sebesar 2400 kkal/kapita/hari dan AKP (angka kecukupan protein) di tingkat ketersediaan sebesar 63 gram/ kapita/hari.

Jumlah ketersediaan energi dan protein per kapita per hari pada Tahun 2020 sebanyak 138,63 Kkal. Sedangkan untuk Tahun 2021 dan 2022 adalah sebesar 126,77% dan tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 132,23%. Sedangkan tahun 2024 meningkat kembali menjadi 136,68%

2.4.4.13 Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang diamanatkan dalam undang-undang, Cakupan petugas satuan polisi pamong praja dan pelindung masyarakat sangat berpengaruh dalam terciptanya suasana tertib dan tentram dalam masyarakat. Pemerintah Kota Madiun akan memperkecil rasio petugas dan jumlah penduduk dengan mengagendakan perekrutan petugas Satuan Polisi Polisi Pamong Praja (Satpol PP) per kelurahan. Untuk mengetahui besar cakupan petugas Tahun 2024 Satpol PP dan Linmas dengan jumlah penduduk dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

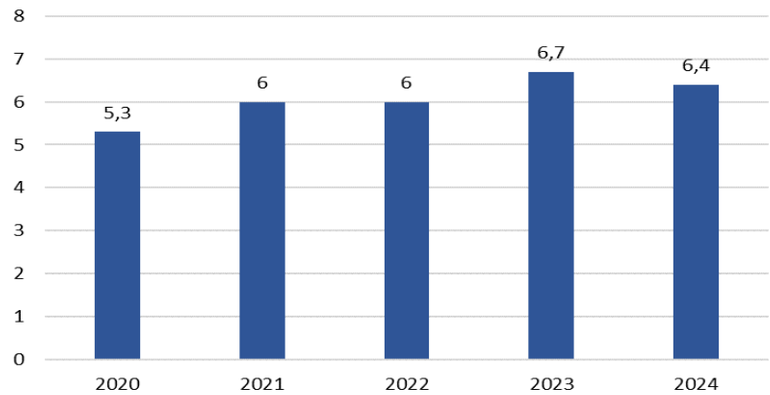

Gambar 2. 76 Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, 2025

Berdasarkan gambar di atas, rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk Kota Madiun sedikit fluktuatif. Capaian tahun 2020 adalah 5,3. Sedangkan tahun 2021 dan 2022 tetap berada di rasio 6. Tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 6,7. Sedangkan tahun 2024 rasio jumlah Linmas menjadi 6,4 per 10.000 penduduk di Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

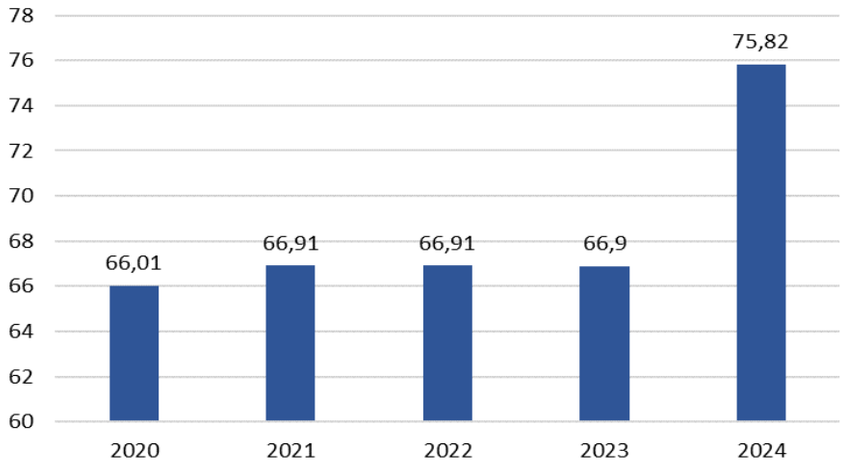

Gambar 2. 77 Rasio Petugas Pol PP per 10.000 Penduduk Kota Madiun Tahun 2020-2024
Sumber: Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar diatas, rasio petugas Satpol PP per 10.000 penduduk selama tahun 2020 hingga 2024 cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2023 ke 2024 yang meningkat dari menjadi 6,99 menjadi 75,82. Adapun pada Tahun 2020 capaiannya mencapai 66,01. Sedangkan tahun 2021 dan 2022 capaiannya tetap di angka 66,91. Pada tahun hingga 2023, angka rasio petugas Pol PP di Kota Madiun sedikit turun di angka 66,9. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja juga mengampu penanganan kejadian kebakaran, pelayanan penanganan kebakaran ditunjukkan dengan persentase kejadian kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap yang dicapai petugas pemadam kebakaran pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran di kisaran waktu 15 menit untuk realisasi capaian setiap Tahunnya.

Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat juga mencakup pelayanan kebencanaan, yang menjadi kewenangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Intensitas Bencana yang ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama kurun waktu Tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 67 Intensitas Bencana di Kota Madiun Tahun 2020-2024

No.	Jenis Bencana	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Banjir	5	5	9	13	96
2.	Angin Puting Beliung	33	0	0	0	1
3.	Kebakaran	29	13	21	70	40

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Kebakaran Daerah Kab/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kab/Kota. Maka jenis pelayanan dasar bidang Sub bidang bencana Daerah dan sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diterapkan oleh Pemerintah Kota Madiun adalah

Tabel 2. 68 Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun Tahun 2021-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN											
			2021			2022			2023			2024		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	45	45	100%	45	45	100%	41	41	100%	40	40	100%
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	2,575	2,575	100%	153,367	153,367	100%	950	950	100%	400	400	100%
2	Pelayanan pencehan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2,575	2,575	100%	2,395	2,395	100%	252	252	100%	261	261	100%
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	12%	12	100%	156	156	100%	42	42	100%	12	12	100%

Sumber: Laporan Satpol PP dan BPBD Kota Madiun Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Capaian SPM untuk bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat secara keseluruhan yakni 100% atau termasuk kategori Tuntas Paripurna.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.4.4.14 Pelayanan Perizinan

Pada saat ini pengurusan perizinan sudah sangat efektif. Rata-rata lama mengurus perizinan di Kota Madiun membutuhkan proses selama 5 (lima) hari kerja. Jumlah persyaratan yang harus dilengkapi jumlahnya berbeda-beda sesuai perizinan yang akan diurus. Hal ini dapat dilihat sesuai tabel dibawah terkecuali untuk perizinan yang melibatkan beberapa rekomendasi dari berbagai instansi dikarenakan harus ada survei lapangan.

Tabel 2. 69 Lama Proses Perizinan di Kota Madiun Tahun 2024

No.	Uraian	Lama Mengurus Izin	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Retribusi (Rp)
1	2	3	4	5
A	Pelayanan Perizinan Non Berusaha			
1	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Bahu Badan Jalan	3(tiga)	3(tiga)	Tidak Ada
2	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Penurunan Trotoar	3(tiga)	4(empat)	Tidak Ada
3	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Gedung dan/atau Lapangan	2(dua)	3(tiga)	Tidak Ada
4	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah dan/atau Bangunan	3(tiga)	4(empat)	Tidak Ada
5	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Lahan Parkir	3(tiga)	5(lima)	Tidak Ada
6	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) non Berusaha	12(dua belas)	9(sembilan)	Tidak Ada
7	Izin Penempatan Bangunan Reklame	9(sembilan)	13(tiga belas)	Tidak Ada
8	Izin Reklame Insidentil	3(tiga)	5(lima)	Tidak Ada
9	Izin Reklame Permanen	3(tiga)	9(sembilan)	Tidak Ada
10	Izin Praktik Psikolog Klinis	9(sembilan)	7(tujuh)	Tidak Ada
11	Izin Praktik Perawat	9(sembilan)	5(lima)	Tidak Ada
12	Izin Praktik Bidan	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
13	Izin Praktik Tenaga Gizi	9(sembilan)	5(lima)	Tidak Ada
14	Izin Kerja Tenaga Gizi	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
15	Izin Praktik Apoteker	9(sembilan)	8(delapan)	Tidak Ada
16	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
17	Izin Praktik Fisioterapis	9(sembilan)	5(lima)	Tidak Ada
18	Izin Kerja Fisioterapis	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
19	Izin Praktik Okupasi Terapis	9(sembilan)	5(lima)	Tidak Ada
20	Izin Kerja Okupasi Terapis	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
21	Izin Praktik Terapis Wicara	9(sembilan)	5(lima)	Tidak Ada
22	Izin Kerja Terapis Wicara	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
23	Izin Praktik Akupuntur Terapis	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
24	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
25	Izin Kerja Perekam Medis	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
26	Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
27	Izin Kerja Refraksionis Optisien	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
28	Izin Kerja Optometris	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
29	Izin Kerja Teknisi Gigi	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
30	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
31	Izin Praktik Penata Anestesi	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
32	Izin Kerja Radiografer	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
33	Izin Praktik Ahli Teknologi	9(sembilan)	5(lima)	Tidak Ada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5
	Laboratorium Medik			
34	Izin Praktik Fisikawan Medis	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
35	Izin Praktik Ortotis Prostetis	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
36	Izin Praktik Elektromedis	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
37	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental;	9(sembilan)	5(lima)	Tidak Ada
38	Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah	9(sembilan)	6(enam)	Tidak Ada
39	Izin Tukang Gigi	9(sembilan)	5(lima)	Tidak Ada
40	Izin Praktik Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis	4(empat)	9(sembilan)	Tidak Ada
41	Izin Penempatan Pedagang Pasar;	3(tiga)	7(tujuh)	Tidak Ada
42	Izin Promosi dalam Pasar;	9(sembilan)	5(lima)	Tidak Ada
43	Izin Reklame dalam Pasar;	9(sembilan)	4(empat)	Tidak Ada
44	Izin Pengelolaan Parkir Pasar;	9(sembilan)	3(tiga)	Tidak Ada
45	Izin Pengelolaan Kamar Mandi/WC Pasar;	3(tiga)	3(tiga)	Tidak Ada
46	Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG);			
	-Fungsi Hunian	30(tiga puluh)	2(dua)	(L Gedung x Indeks Lokalitas x SHST x Indeks terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Terbangun) + (L Prasarana Penunjang x Indeks x Lingkup Pembangunan x HS Retribusi)
	-Fungsi Usaha	30(tiga puluh)	2(dua)	(L Gedung x Indeks Lokalitas x SHST x Indeks terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Terbangun) + (L Prasarana Penunjang x Indeks x Lingkup Pembangunan x HS Retribusi)
	-Fungsi Sosbud	30(tiga puluh)	2(dua)	(L Gedung x Indeks Lokalitas x SHST x Indeks terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Terbangun) + (L Prasarana Penunjang x Indeks x Lingkup Pembangunan x HS Retribusi)
	-Fungsi Keagamaan	30(tiga puluh)	2(dua)	Tidak Ada
	-Fungsi Campuran	30(tiga puluh)	2(dua)	(L Gedung x Indeks Lokalitas x SHST x Indeks terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Terbangun) + (L Prasarana Penunjang x Indeks x Lingkup Pembangunan x HS Retribusi)
47	Pencabutan Surat Izin Tenaga Kesehatan	9(sembilan)	4(empat)	Tidak Ada
48	Konsultasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);	1(satu)	1(satu)	Tidak Ada
49	Pengaduan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha;	3(tiga)	Konsultasi dan Pengaduan Secara Langsung/ Tatap muka : 3 (Tiga) Konsultasi dan Pengaduan Secara Online : 3 (Tiga)	Tidak ada
50	Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP)	3(tiga)	Penelitian Perorangan : 6 (enam) Penelitian	Tidak ada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5
			Kelompok : 6 (enam)	
			Penelitian Badan Usaha : 6 (enam)	
			Penelitian Ormas Tidak Berbadan Hukum : 7 (tujuh)	
			Penelitian Ormas Berbadan Hukum : 7(tujuh)	
B	Pelayanan Perizinan Berusaha			
1	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar;	32(tiga puluh dua)	9(sembilan)	Tidak ada
2	Izin Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal;	32(tiga puluh dua)	9(sembilan)	Tidak ada
3	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi Kewenangan DPMPTSP Kota Madiun;	Sesuai Service Level Agreement pada sistem OSS berdasarkan sektor	UMK Perorangan : 3 (Tiga)	Tidak ada
			UMK Badan Usaha : 6 (Enam)	
			Non UMK : 6 (Enam)	

Sumber: Dinas Penenaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun, 2025

2.4.4.15 Pelayanan Perindustrian

Jika dilihat dari jumlah industri yang tercatat dan tenaga kerjanya menurut kecamatan di Kota Madiun Tahun 2024, kecamatan yang memiliki jumlah industri terbanyak yakni Kecamatan Taman yaitu 13 industri yang hanya dapat menyerap tenaga kerja sebesar 271 orang. Namun kecamatan Manguharjo dengan jumlah industri hanya sebanyak 12 industri mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang sangat besar yaitu sebanyak 4819 orang, yang juga merupakan penyerapan tenaga kerja terbanyak dibanding kecamatan lain.

Tabel 2. 70 Jumlah Industri yang Tercatat dan Tenaga Kerjanya Menurut Kecamatan Kota Madiun, Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	Industri Besar Sedang					Tenaga Kerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Manguharjo	5	6	9	12	14	1874	2818	4782	4819	4847
2	Taman	9	10	11	13	14	325	412	238	271	290
3	Kartoharjo	7	7	7	8	8	294	311	369	371	371
Jumlah		21	23	27	33	36	2493	3541	5389	5461	5508

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, KUKM, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.4.4.16 Pelayanan Perdagangan

Orientasi pembangunan pada penyelenggaraan urusan perdagangan di Kota Madiun adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan kapasitas pasar. Jumlah pasar umum di Kota Madiun Tahun 2024 terdapat 9 unit, pasar khusus 2 unit, dan pasar desa 6 unit dengan jumlah pedagang tetap sebanyak 3.567 pedagang.

Tabel 2. 71 Sarana Perdagangan dan Jumlah Pedagang di Kota Madiun, 2020-2024

No.	Sarana Perdagangan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pasar Umum	9	9	9	9	9
2.	Pasar Khusus	2	2	2	2	2
3.	Pasar Desa	6	6	6	6	6
4.	Pedagang Tetap	3.555	3.143	3.320	3.524	3.567

Sumber: Laporan Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2024

2.4.4.17 Pelayanan Kepariwisataan

Pelayanan kepariwisataan di Kota Madiun dilakukan dengan mendata dan membina destinasi pariwisata serta tujuan wisata untuk dikembangkan serta mendata dan membina pelaku ekonomi kreatif, kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2021 mencapai 7,55% dan meningkat terus hingga 18,83% di Tahun 2024, perkembangan data jumlah destinasi pariwisata serta tujuan wisata yang dibina sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 2. 72 Data Jumlah Destinasi Pariwisata yang dibina Tahun 2024

No	Destinasi Pariwisata	Tahun
		2024
1	Lapak/ODTW	35 tempat
2	THM/Karaoke	23 tempat
3	Cafe	66 tempat
4	Rumah Makan	68 tempat
5	Restoran	52 tempat
6	Hotel	36 tempat
7	*Home Stay* dan *Guest House*	37
8	Jumlah Kamar Penginapan	1.502
9	Destinasi Tujuan Wisata	34 Lokasi

Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun, 2025

Pada tahun 2024 Terdapat 22 orang pelaku ekonomi kreatif yang dibina, Sedangkan data jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kota Madiun sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 2. 73 Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun 2024

No	**Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Tahun**
		2023
1	Seni Pertunjukan	15
2	Fesyen	20
3	Kriya (kerajinan tangan)	5
4	Kuliner	39
5	Fotografi	21
6	Musik	15
7	Periklanan	6
8	Seni Rupa	6
9	Film Animasi	-

Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.4.4.18 Pelayanan Kebudayaan

Pelayanan kebudayaan di Kota Madiun dilakukan dengan mendata event budaya yang diselenggarakan serta jumlah seniman, event budaya yang diselenggarakan pada tahun 2020 hanya 6 event seiring perkembangan Kota Madiun yang ingin menjadikan kota madiun sebagai pusat perekonomian maka di tahun 2024 jumlah event meningkat dua kali lipat menjadi 15 event dengan di dukung sejumlah 34 kesenian yang dibina dan 218 seniman bersertifikasi.

2.4.4.19 Pelayanan Kepegawaian

Fungsi pelayanan kepegawaian, Pendidikan, dan pelatihan berperan penting untuk mengatasi permasalahan seperti kurangnya kesesuaian penempatan dan promosi jabatan, serta dinamika kinerja ASN. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan.

Indikator kinerja persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya serta Indeks Profesionalitas ASN dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan pembinaan kepegawaian yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun. Capaian indek profesionalitas asn dan persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 74 Pelayanan Kepegawaian Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1	Indeks Profesionalitas ASN	46,49	49,72	79,88	83,38	84.95
2	Persentase penempatan ASN sesuai dengan Kompetensinya	34,38	71%	63,22%	67,82%	83.61%

Sumber: BKPSDM Kota Madiun, 2025

2.4.4.20 Pelayanan Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kota Madiun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Tingkat keterbukaan informasi publik yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam untuk mengukur keberhasilannya seperti dalam tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 75 Capaian Pelayanan Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	87.25	97.33	99.25	96.71	97.42
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	3.06	2.86	4.45	4.57

Sumber: Dinas Kominfo Kota Madiun, 2025

2.4.4.21 Pelayanan Statistik

Bidang urusan statistik Daerah mempunyai tugas dan fungsi pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah. Hasil pengolahan data dan informasi, selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja Tahunan pemerintah Daerah, yang mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi Daerah, data kondisi geografis dan demografis Daerah, serta data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing Daerah. Dalam pencatatan statistik, Pemerintah Kota Madiun bekerjasama dengan BPS Kota Madiun telah merangkum berbagai statistik Kota Madiun yang selanjutnya merupakan indikator atau tolak ukur yang digunakan untuk menggambarkan kelengkapan urusan statistik yang tersedia oleh Kota Madiun.

Jenis dokumen yang dapat menjadi indikator urusan statistik antara lain Buku Analisis ASPM (Analisa Situasi Pembangunan Manusia) dan Buku Data Sektoral. Penyusunan 2 (dua) buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan dan penyusunan program kegiatan.

Tabel 2. 76 Capaian Pelayanan Statistik Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1	Buku Analisis ASPM	ada	ada	ada	ada	-
2	Buku Data Sektoral	ada	ada	ada	ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2025

2.4.4.22 Pelayanan Persandian

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang perlu diatur oleh perangkat Daerah yakni bidang persandian. Kewenangan Daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam pemetaan urusan persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian sesuai arah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian, dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya.

Tabel 2. 77 Capaian Pelayanan Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	87.25	97.33	99.25	96.71	97.42
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	3.06	2.86	4.45	4.57

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2025

2.4.4.23 Pelayanan Perkoperasian

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian pelaksanaan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah persentase koperasi aktif. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedang koperasi aktif didefinisikan sebagai koperasi yang dalam 2 (dua) Tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan atau koperasi yang dalam Tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Pada kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir yaitu tahun 2020-2024, persentase koperasi aktif, jumlah koperasi, dan persentase koperasi aktif di Kota Madiun menunjukkan tren fluktuatif, peningkatan dan penurunan diakibatkan jumlah koperasi yang mengalami penambahan dan pengurangan selama kurun waktu Tahun 2020-2024 sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 78 Koperasi dan Usaha Miro di Kota Madiun Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Koperasi Keseluruhan	155	156	156	156	155
Jumlah Koperasi Aktif	153	154	156	140	140
Jumlah Koperasi Sehat	-	-	2	3	2
Persentase Koperasi Aktif	98.71	98.71%	100%	89.74%	90.91%
Persentase Koperasi Ber NIB	-	-	15%	47%	59,29%
Usaha Mikro yang dibina	-	170	363	363	363
Usaha Mikro yang dikembangkan dan naik kelas	-	-	60	110	80
Usaha Mikro yang difasilitasi	-	-	148	693	276
Usaha Mikro yang diakses perbankkan	-	-	68	82	77
Jumlah UMKM yang memiliki NIB	-	1.055	5.593	13.577	21.626

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, KUKM Kota Madiun, 2025

2.4.4.24 Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pasal 13 ayat (1) huruf c tentang Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem, pengertian jasa ekosistem adalah ukuran perubahan kemampuan dan kualitas layanan ekosistem dari kondisi awal yang disepakati dengan kondisi aktual saat pemantauan. Jasa ekosistem terdiri dari dua puluh (20) jenis yang terbagi atas empat (4) kelompok utama, yaitu jasa penyediaan (*provisioning*), jasa budaya (*cultural*), jasa pendukung (*supporting*) yang mewakili unsur daya dukung lingkungan dan jasa pengaturan (*regulating*) yang mewakili unsur daya tampung lingkungan.

1. Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan

   Jasa ekosistem penyedia bahan pangan merupakan kemampuan suatu ekosistem dalam memberikan manfaat berupa ketersediaan bahan pangan, yang berasal dari sumber daya alam hayati seperti tanaman dan hewan baik yang diolah maupun tidak diolah sebagai makanan atau minuman bagi manusia. Ketersediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan. Karakteristik ekoregion dan juga tutupan vegetasi merupakan faktor pendukung kemampuan ekosistem dalam penyediaan pangan.

Tabel 2. 79 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	66,40	13,77	230,58	-	503,65	258,60	1.073,00
Manguharjo	126,38	35,46	212,74	0,24	349,62	279,56	1.004,00
Taman	156,80	24,53	434,84	10,86	250,71	368,26	1.246,00
Kota Madiun	348,91	75,84	857,88	9,84	1.127,04	903,49	3.323,00

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jasa ekosistem penyedia bahan pangan kelas sangat tinggi terdapat di Kecamatan Kartoharjo dengan luas sebesar 503,65 Ha dari luas wilayahnya, Kecamatan Manguharjo seluas 349,62 Ha dari luas wilayahnya, dan Kecamatan Taman mempunyai indikasi jasa ekosistem penyedia bahan pangan kelas sangat tinggi seluas 250,71 Ha.

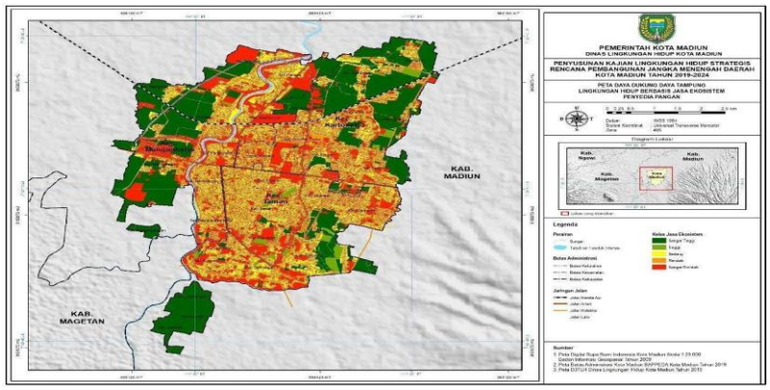

Gambar 2. 78 Peta Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan di Kota Madiun
Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Berdasarkan kajian mengenai jasa ekosistem penyedia bahan pangan, diperoleh hasil bahwa distribusi klasifikasi kelas rendah dan kelas tinggi tersebar secara merata di semua kecamatan di Kota Madiun. Artinya setiap kecamatan di Kota Madiun juga mempunyai wilayah non-tutupan lahan tanaman pangan yang cukup besar seperti permukiman. perdagangan maupun jasa yang dapat mempengaruhi ketersediaan jasa ekosistem penyedia bahan pangan di masa yang akan datang.

2. Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

Jasa ekosistem penyedia air bersih merupakan semua jenis sumber air, baik itu air permukaan, air tanah, maupun air hujan yang dapat dimanfaatkan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Faktor yang menyusun jasa ekosistem penyedia air bersih berasal dari curah hujan, lapisan tanah, jenis batuan yang dapat menyimpan air, bentang lahan, tutupan lahan, dan jenis vegetasi. Jenis penggunaan lahan dengan kerapatan vegetasi yang tinggi pada umumnya memiliki potensi penyedia air bersih yang besar karena memungkinkan ekosistem untuk menyimpan air maupun cadangan air dalam jumlah yang banyak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

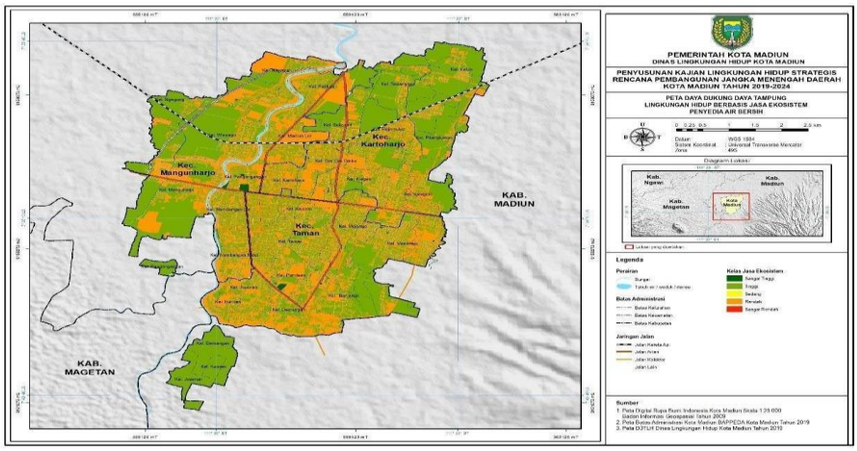

Gambar 2. 79 Peta Jasa Ekosistem Penyedia AIr Bersih di Kota Madiun
Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Tabel 2. 80 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	258,60	62,32	-	232,11	519,97	0,00	1.073,00
Manguharjo	279,56	118,78	11,47	201,51	392,68	0,00	1.004,00
Taman	368,26	152,15	0,07	445,63	279,89	0,00	1.246,00
Kota Madiun	903,49	332,07	13,10	856,16	1.218,18	0,00	3.323,00

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Ketersediaan air bersih dari ekosistem di Kota Madiun dalam kondisi yang relatif baik, diindikasikan melalui penyedia air bersih kelas tinggi seluas 856,16 Ha dan sangat tinggi seluas 1.218,18 Ha. Secara administratif, Kecamatan Kartoharjo memiliki indikasi penyedia air bersih kelas tinggi seluas 232,11 Ha dan sangat tinggi seluas 519,97 Ha, Kecamatan Manguharjo memiliki indikasi penyedia air bersih kelas tinggi sebesar 201,51 Ha dan sangat tinggi seluas 392,68 Ha, dan Kecamatan Taman memiliki indikasi penyedia air bersih kelas tinggi seluas 445,63 Ha dan sangat tinggi seluas 279,89 Ha.

3. Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Pengendalian suhu, kelembaban dan hujan, angin, gas rumah kaca, dan penyerapan karbon merupakan fungsi dari jasa ekosistem pengaturan iklim.

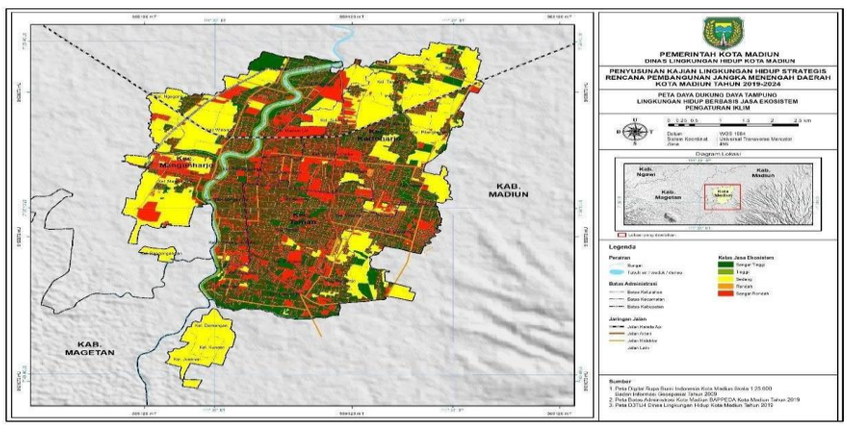

Gambar 2. 80 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Kota Madiun
Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 81 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	278,04	15,30	503,65	-	276,00	0,00	1.073,00
Manguharjo	305,38	35,46	349,48	49,00	264,68	0,00	1.004,00
Taman	435,26	24,53	250,76	6,40	529,04	0,00	1.246,00
Kota Madiun	1.011,53	77,39	1.126,9	61,36	1.045,80	0,00	3.323,00

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Kelas jasa ekosistem pengaturan iklim di Kota Madiun mayoritas tergolong dalam kelas sedang seluas 1.126,92 Ha, yang kemudian diikuti dengan kelas sangat tinggi seluas 1.045,80 Ha. Kontribusi jasa ekosistem pengaturan iklim kelas sedang di Kota Madiun cenderung tinggi karena sebagian besar wilayah ini berada pada dataran yang relatif rendah dan penggunaan lahan didominasi dengan lahan sawah.

4. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir merupakan jasa ekosistem yang digunakan untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir berhubungan langsung dengan siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan pengaliran (flow). Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi (bentang alam) suatu wilayah.

Tabel 2. 82 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir (Ha) Tahun 2020

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	279,58	4,16	41,26	748,00	-	0,00	1.073,00
Manguharjo	306,23	6,23	51,04	561,19	79,30	0,00	1.004,00
Taman	435,11	19,41	74,86	700,14	16,48	0,00	1.246,00
Kota Madiun	1.013,90	28,38	165,66	2.010,35	104,70	0,00	3.323,00

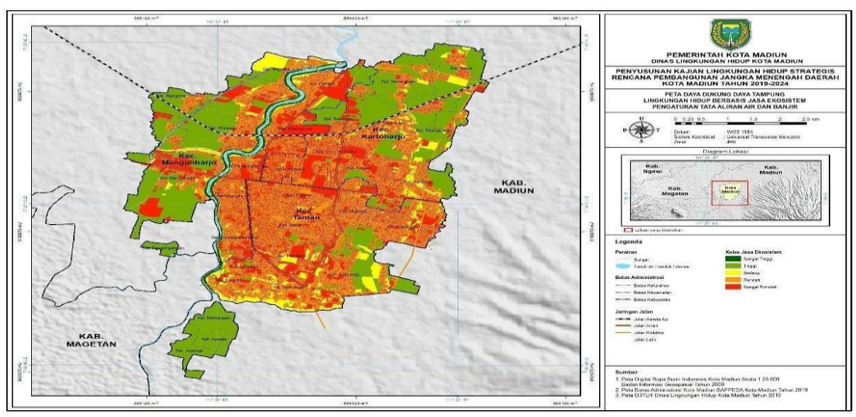

Gambar 2. 81 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kota Madiun

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir di Kota Madiun mayoritas tergolong dalam kelas tinggi seluas 2.010,35 Ha dan kelas sangat rendah seluas 1.013,90 Ha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi pengaturan tata aliran air dan banjir didominasi dengan kelas tinggi karena memiliki tutupan lahan sawah yang cukup besar. Besarnya tutupan lahan tersebut menandakan bahwa ekosistem mampu melakukan penyimpanan air, pemeliharaan ketersediaan air, dan pengendalian air dengan baik.

5. Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana

Daya dukung lingkungan hidup untuk melakukan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana khususnya bencana alam merupakan suatu kemampuan ekosistem berbasis pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana suatu wilayah adalah ekoregion bentang lahan dan tutupan vegetasi. Ekoregion bentanglahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan umumnya rawan terjadi bencana. Perbukitan memiliki kondisi topografi dengan kemiringan lereng yang curam hingga sangat curam sehingga berpotensi mengalami bencana. Keberadaan vegetasi dengan kerapatan tinggi mampu menahan laju air hujan agar dapat mengendalikan bencana, seperti longsor dan banjir.

Tabel 2. 83 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	266,66	11,34	256,40	18,64	519,97	0,00	1.073,00
Manguharjo	287,75	9,22	268,12	53,70	385,21	0,00	1.004,00
Taman	425,26	5,05	475,28	49,61	290,80	0,00	1.246,00
Kota Madiun	971,17	26,38	982,55	123,59	1.219,31	0,00	3.323,00

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

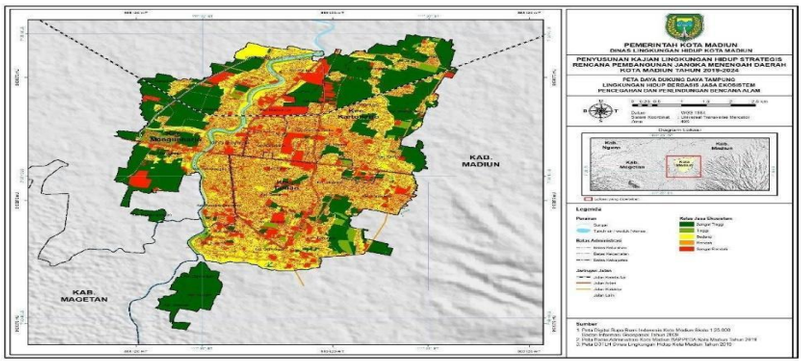

Gambar 2. 82 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana di Kota Madiun

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Luasan jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana di Kota Madiun mayoritas tergolong dalam kelas sangat tinggi seluas 1.219,31 Ha, kelas sedang seluas 982,55 Ha, dan kelas sangat rendah seluas 971,17 Ha. Tingginya jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana di Kota Madiun dipengaruhi dengan kondisi morfologi wilayah yang berada pada dataran rendah sehingga secara faktor endogen Kota Madiun kecil kemungkinan terjadi bencana longsor. Namun, besarnya kelas sedang dan sangat rendah pada jasa ekosistem pengaturan pencegahan perlindungan bencana ini mendapatkan tekanan dari aktivitas manusianya.

6. Jasa Ekosistem Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Jasa ekosistem yang berfungsi untuk tempat tinggal dilihat dari kelas kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi, sehingga mendukung kehidupan dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar. Kondisi bentang alam yang memiliki jasa untuk lokasi tempat tinggal pada umumnya berada pada topografi yang datar hingga landai, didukung oleh material tanah dan batuan dasar yang stabil, terdapat akuifer yang memiliki potensi tinggi dalam penyediaan sumber air bersih, mampu mendukung untuk pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas dengan mudah, serta tidak terdapat ancaman bencana alam, seperti: banjir, tanah longsor, dan berisiko terhadap gempa bumi tektonik maupun vulkanik yang rendah.

Tabel 2. 84 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	0,00	115,79	513,96	67,39	375,86	0,00	1.073,00
Manguharjo	71,91	123,27	378,19	90,05	340,59	0,00	1.004,00
Taman	16,55	179,71	264,44	154,3	630,99	0,00	1.246,00
Kota Madiun	96,36	415,44	1.182,3	306,4	1.322,78	0,00	3.323,00

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

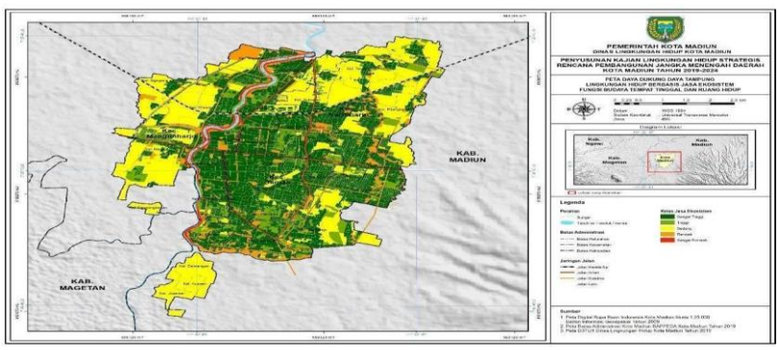

Gambar 2. 83 Peta Jasa Ekosistem Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Kota Madiun
Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Mayoritas jasa ekosistem budaya untuk tempat tinggal di Kota Madiun tergolong dalam kelas sangat tinggi seluas 1.322,78 Ha dan kelas sedang seluas 1.182,03 Ha. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara umum Kota Madiun memiliki ekosistem dengan kemampuan memberikan jasa budaya fungsi tempat tinggal yang tergolong baik.

7. Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas

Jasa ekosistem pendukung biodiversitas dipengaruhi oleh kondisi ekoregion dan penutup lahan di suatu wilayah. Ekoregion merupakan kondisi suatu wilayah berdasarkan pada kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Keberadaan ekoregion mengindikasikan tingkat endemisitas suatu spesies yang dimiliki suatu wilayah. Artinya, tingkat endemisitas yang tinggi akan mempengaruhi keanekaragaman hayati yang tinggi. Sementara itu, penutup lahan merupakan tutupan biofisik pada permukaan bumi yang akan mengandung biota, tanah, topografi, air, tanah, dan permukaan yang akan mempengaruhi keberlanjutan keanekaragaman hayati.

Tabel 2. 85 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	33,22	5,69	17,06	542,37	216,06	258,60	1.073,00
Manguharjo	61,28	6,48	37,73	400,52	218,43	279,56	1.004,00
Taman	91,54	8,55	44,70	320,93	412,02	368,26	1.246,00
Kota Madiun	183,88	20,65	99,52	1.285,88	829,58	903,49	3.323,00

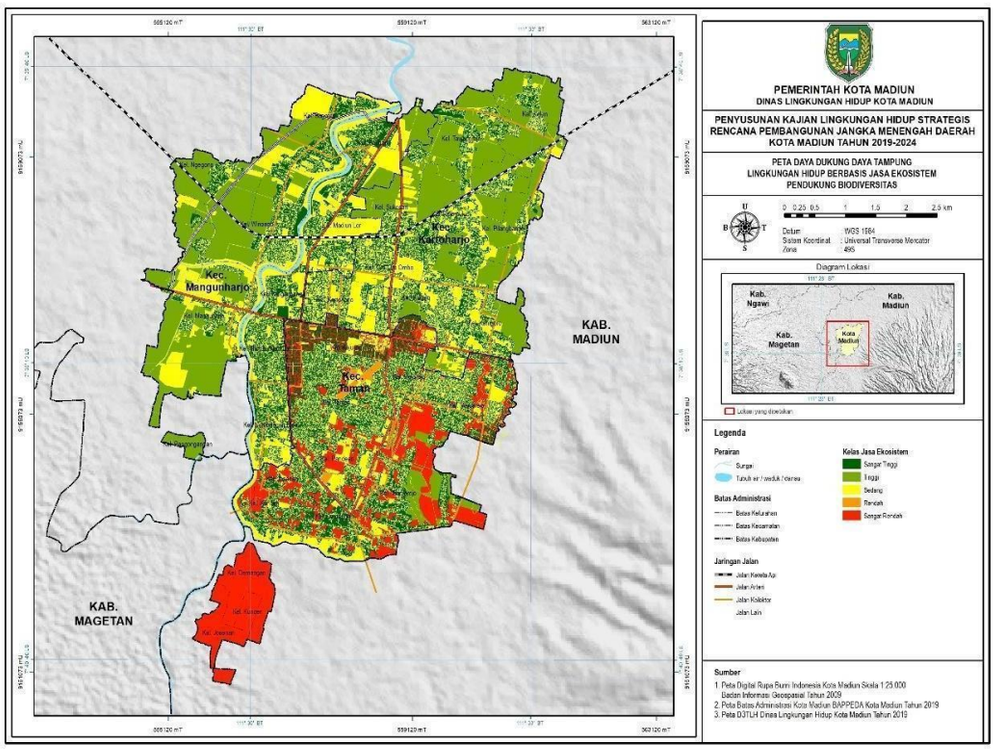

Gambar 2. 84 Peta Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas di Kota Madiun
Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jasa ekosistem pendukung biodiversitas kelas tinggi mendominasi di Kota Madiun seluas 1.285,88 Ha, kelas sangat tinggi seluas 829,58 Ha, dan kelas rendah seluas 20,65 Ha. Kelas jasa tinggi paling luas terdapat pada Kecamatan Kartoharjo yang menempati luasan 542,37 Ha, Kecamatan Taman memiliki luasan kelas jasa sangat tinggi yang tertinggi di Kota Madiun yang mencakup luasan 412,02 Ha.

A. Analisis Daya Tampung Kualitas Air Sungai

Sumber daya air permukaan utama di Kota Madiun berasal dari Sungai Madiun, Sungai Catur dan Sungai Semawur dengan satu (1) Embung Pilangbango. Kota Madiun terletak di bagian tengah Daerah Aliran Sungai (DAS) Madiun yang menjadi titik kumpul air dari kawasan hulunya di daerah sekitarnya. Sumber pencemar pada Sungai Madiun sendiri dapat berasal dari aktivitas pertanian, perkebunan atau domestik dari kawasan sekitarnya atau aktivitas perkotaan yang lebih intensif di Kota Madiun sendiri. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, menunjukkan bahwa kualitas air sungai yang relatif baik jika digunakan untuk kegiatan non domestik namun beberapa lokasi memiliki kualitas air yang kurang baik jika digunakan untuk air minum.

Air sungai di Kota Madiun masih layak digunakan sebagai air bersih karena kadar pH air yang cukup baik, yaitu kisaran 6,5-8,5. Rata-rata pH sungai paling rendah di Kota Madiun terdapat di Sungai Catur sebesar pH 7,04 dan Saluran Setiabudi sebesar 7,24. Kondisi ini menunjukkan bahwa air sungai di Kota Madiun memiliki pH yang relatif normal dengan pH paling rendah umumnya terdapat pada Bulan Februari atau Maret. Kandungan oksigen terlarut atau *Dissolved Oxygen* (DO) berkisar antara 2 sampai 5 yang menunjukkan kecukupan oksigen yang berperan dalam penyerapan makanan organisme perairan sungai di Kota Madiun.

Kualitas air di Kota Madiun dilihat dari parameter fisik, yaitu jumlah padatan terlarut (*Total Dissolved Solid*) menunjukkan nilai kurang dari 500 mg/L. Nilai tersebut masih berada di bawah ambang batas kelayakan, yaitu 1000 mg/L. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah zat padat yang terlarut pada air sungai di Kota Madiun masih belum memberikan dampak pencemaran yang signifikan. Nilai rata-rata TDS paling tinggi terdapat pada Sungai Semawur yakni 295 mg/L dan paling rendah pada Saluran Slarangan sebesar 158 mg/L.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kualitas air di Kota Madiun dilihat dari parameter mikrobiologi diukur melalui jumlah kandungan bakteri *coliform* sebagai salah satu indikator utama pencemaran akibat aktivitas domestik atau lainnya pada tubuh air. Sungai-sungai yang melewati kawasan permukiman atau perkotaan umumnya pasti memiliki kandungan bakteri *coliform* yang tinggi. Secara umum kandungan total *coliform* pada air sungai di Kota Madiun dibawah ambang batas untuk penggunaan non-domestik namun untuk keperluan domestik seperti air minum perlu adanya proses pengolahan air yang lebih lanjut. Rata-rata total *coliform* paling tinggi terdapat di Saluran Sono sebesar 3744 MPN/100 ml dan Saluran Diponegoro Timur sebesar 3752 MPN/100 ml.

Tabel 2. 86 Analisis Pencemaran Air Sungai di Kota Madiun

Lokasi Pengamatan	Peruntukan Air Minum		Peruntukan Budidaya Perairan		Peruntukan Lainnya	
	Indeks Pencemar	Kelas	Indeks Pencemar	Kelas	Indeks Pencemar	Kelas
Sungai Madiun, Jembatan Ngebrak	3.3	Tercemar ringan	1.9	Tercemar ringan	0.7	Aman
Sungai Madiun, Jembatan *Ringroad*	3.8	Tercemar ringan	2.1	Tercemar ringan	0.8	Aman
Sungai Semawur	4.4	Tercemar ringan	2.4	Tercemar ringan	0.7	Aman
Sungai Catur	3.9	Tercemar ringan	2.0	Tercemar ringan	0.8	Aman
Saluran Sono	4.6	Tercemar ringan	2.5	Tercemar ringan	0.9	Aman
Saluran Slarangan	3.2	Tercemar ringan	2.0	Tercemar ringan	0.7	Aman
Saluran Setiabudi	5.5	Tercemar sedang	2.9	Tercemar ringan	1.2	Tercemar ringan
Saluran Diponegoro Timur	5.5	Tercemar sedang	2.5	Tercemar ringan	0.9	Aman

Sumber: Analisis Indeks Pencemar Data IKPLHD, 2021

Kualitas air sungai juga dapat diukur melalui indeks pencemaran air. Berdasarkan hasil analisis indeks pencemaran air sungai, diperoleh bahwa secara umum kualitas air sungai di Kota Madiun yang diamati memiliki kelas tercemar ringan untuk pemanfaatan budidaya perairan maupun domestik kecuali di Saluran Setiabudi dan Saluran Diponegoro Timur.

Sementara itu, kualitas air sungai di Kota Madiun yang dimanfaatkan untuk pengairan tanaman secara umum masih cukup aman untuk digunakan. Lokasi kualitas air yang cukup rendah terdapat di Saluran Setiabudi dan Saluran Diponegoro Timur yang terletak di tengah kota. Kedua saluran tersebut melewati pusat-pusat perkotaan seperti pasar, pusat perdagangan, PKL, pertokoan, hotel dan kegiatan jasa lainnya. Sumber pencemar dapat berasal dari polutan yang berasal dari jalan, pusat-pusat kegiatan serta limbah rumah tangga yang terbuang ke dalam saluran tersebut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Indikator yang berpengaruh terhadap nilai indeks pencemar air sungai di Kota Madiun diantaranya *Total Suspended Solid* (TSS), DO, BOD, COD dan kandungan bakteri coli untuk penggunaan air domestik. Indeks pencemaran juga cenderung mengalami kenaikan pada bulan Januari Februari dan beberapa juga terdapat pada bulan Agustus-September. Umumnya pada aliran sungai terjadi kenaikan kandungan bakteri coli, BO COD serta penurunan kandungan oksigen (DO) pada bulan-bulan tersebut, sedangkan pada saluran air drainase terjadi kenaikan TSS yang cukup signifikan disertai kandungan bakteri coli serta BOD dan COD pada bulan-bulan tersebut.

B. Kondisi dan Analisis Daya Tampung Sampah

Sampah merupakan sisa bahan dari proses produksi yang sudah tidak dimanfaatkan. Bahan sisa tersebut memiliki berbagai wujud seperti padat, cair, dan gas. Pengelolaan sampah di Kota Madiun menghadapi tantangan semakin pesatnya aktivitas ekonomi, makin pesat aktivitas di suatu daerah maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Pertumbuhan penduduk secara umum menjadi faktor pemicu meningkatnya volume timbulan sampah yang dihasilkan di suatu daerah.

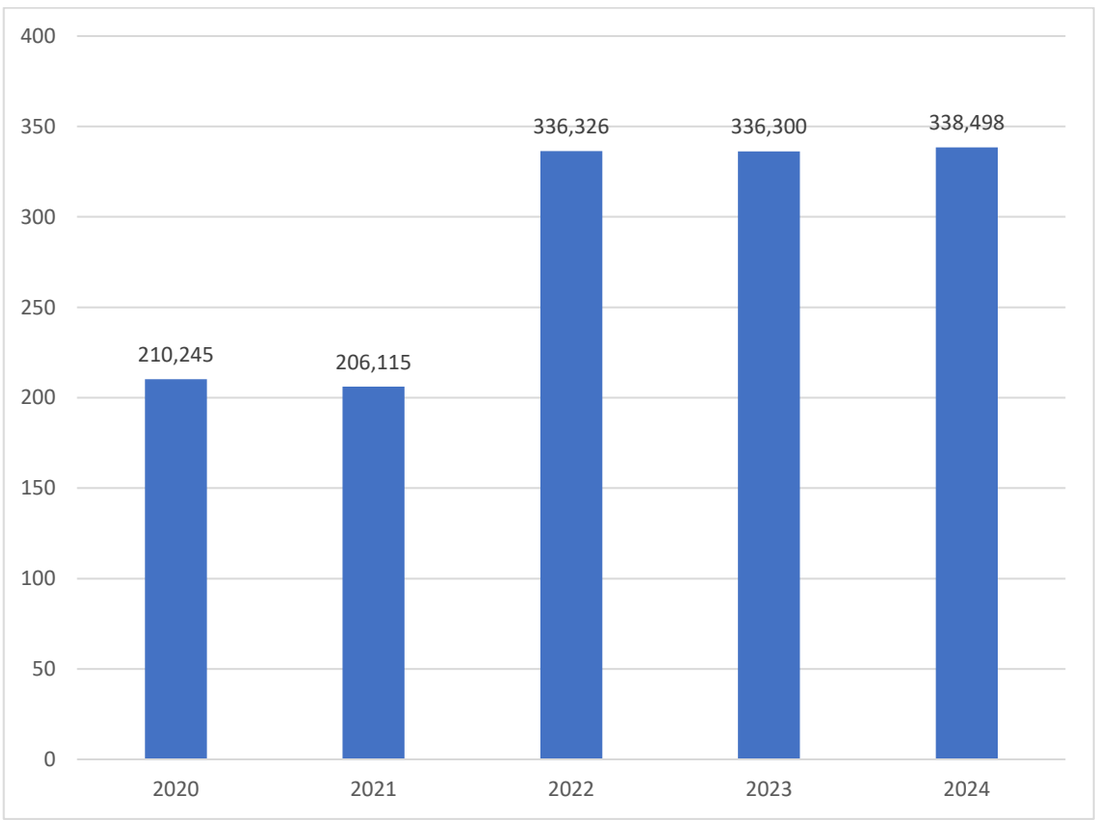

Gambar 2. 85 Perkiraan jumlah timbulan sampah per hari di Kota Madiun, Tahun 2020-2024
Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pada tahun 2020, jumlah timbulan sampah 210.245 m3/hari, hingga 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 206.115 m3/hari. Timbulan sampah per hari di Kota Madiun meningkat pada tahun 2024 menjadi sebesar 338,498 m3/hari. Selain itu, faktor kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah masih rendah. Pengelolaan sampah untuk menuju konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) memerlukan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

Kota Madiun mempunyai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di TPA Winongo dengan luas 6,4 Ha dengan kapasitas daya tampung sampah hingga 100 m3/hari. Kapasitas TPA Winongo saat ini diperkirakan hanya mampu menampung 448,56 m3 sampah dengan volume eksisting saat ini telah mencapai 313,992 m3. Artinya 70% - 80% daya tampung TPA Winongo saat ini sudah terisi, sehingga jika tidak dilakukan strategi pengelolaan sampah yang efektif kapasitas TPA akan terlampaui dalam beberapa tahun ke depan. Mayoritas areal TPA Winongo merupakan zona pasif sampah di TPA Winongo yang sudah diupayakan diubah menjadi bukit hijau. Fasilitas pengolahan sampah di TPA Winongo ada yang belum optimal, sehingga meningkatkan laju penumpukan sampah. Permasalahan yang kerap dialami adalah timbulnya bau dari TPA Winongo khususnya ketika musim penghujan akibat volume tumpukan sampah yang besar.

Pengelolaan sampah di lingkup masyarakat dilakukan melalui berbagai kegiatan fisik oleh instansi dan pendirian bank-bank sampah. Bank sampah banyak didirikan oleh masyarakat, baik yang sudah berbadan hukum maupun belum berbadan hukum. Data tahun 2018 menunjukkan terdapat 10 bank sampah yang sudah berbadan hukum. Bank sampah yang ada saling bersinergi satu sama lain, terdapat bank sampah yang hanya terfokus pada pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang untuk kemudian dijual kepada bank sampah yang telah dapat mengolah sampah yang ada menjadi berbagai macam kerajinan. Namun, masih terdapat terdapat timbulan sampah yang belum dilakukan pengelolaan, sehingga terbuang secara bebas yang akhirnya masuk ke saluran drainase dan/atau sungai yang dapat meningkatkan risiko terhadap banjir

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.5 Evaluasi pelaksanaan program SDGs

SDGs merupakan agenda kesepakatan negara anggota PBB untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, salah satunya indonesia. Secara rinci SDGs mencakup 17 Tujuan dan 169 target untuk mencapai tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2030, dalam mencapai tujuan tersebut diharapkan berkolaborasi dengan pemerintah lainnya, masyarkat sipil, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Pada Tahun 2024 Kota Madiun telah mengidentifikasi capain SDGs dengan rincian sebesar 57% ada data, 29% tidak ada data, 12% bukan kewenangan, dan 2% tidak terisi OPD, dengan hasil 84 indikator yang belum mencapai target progres, 37 indikator bukan kewenangan, dan 7 indikator belum terisi, sehingga dapat disimpulkan Hasil capaian dukungan SDGs di Kota Madiun sebanyak 48% tercapai, 43% tidak ada data, dan 9% progress.

2.6 Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD berfungsi untuk melihat capaian tingkat kemajuan dan kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Prioritas pembangunan daerah di Kota Madiun berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Untuk mengetahui ketercapaian target yang direncanakan oleh pemerintah dengan realisasi yang terjadi, dapat ditinjau dari urusan yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam urusan wajib ataupun urusan pilihan yaitu, sebagaimana ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 87 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai dengan Tahun Berjalan Kota Madiun

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024) PAK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) PAK		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II		III		IV								
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																									
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	349.205.681.734	100	154.251.672.596	100	61.428.004.791	0	1.483.247.990	0	1.356.409.199	0	14.818.377.552	100	9.560.531.092	100	27.218.565.833	100%	44%	100	181.470.238.429	100%	52%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persentase sekolah yang dikelola dengan baik	%	100	198.516.521.837	100	102.737.411.878	100	24.735.867.593	0	996.582.871	0	851.500.628	0	5.651.130.647	100	2.792.224.833	100	10.291.438.979	100%	42%	100	113.028.850.857	100%	5%	
1	1	2	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	1	6.240.200.000	0	49.334.302.848	1	3.120.100.000	0	9.881.160	0	967.500	0	6.000.000	1	47.669.609	1	64.518.269	100%	2%	1	49.398.821.117	100%	792%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Kartoharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.625.769.115	1	815.917.327	1	110.400.000	0	13.600.000	0	16.952.000	0	37.277.800	1	42.570.200	1	110.400.000	100%	100%	1	926.317.327	100%	57%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Kartoharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	627.626.723	1	267.294.129	1	136.800.000	0	19.200.000	0	23.786.000	0	45.400.000	1	43.610.000	1	131.996.000	100%	96%	1	399.290.129	100%	64%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.446.158.150	1	918.673.961	1	124.800.000	0	20.215.000	0	18.432.500	0	38.628.000	1	42.709.500	1	119.985.000	100%	96%	1	1.038.658.961	100%	72%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	814.302.638	1	505.980.906	1	103.200.000	0	14.716.800	0	15.124.800	0	41.812.600	1	31.529.500	1	103.183.700	100%	100%	1	609.164.606	100%	75%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.492.648.000	1	1.109.125.269	1	129.600.000	0	17.197.500	0	19.869.000	0	50.262.000	1	42.201.000	1	129.529.500	100%	100%	1	1.238.654.769	100%	83%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	604.104.965	1	427.917.110	1	72.000.000	0	9.194.400	0	3.200.000	0	22.855.600	1	14.350.000	1	49.600.000	100%	69%	1	477.517.110	100%	79%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Oro - Oro Ombo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.420.023.320	1	915.456.548	1	76.800.000	0	13.728.500	0	11.236.000	0	21.579.500	1	30.245.000	1	76.789.000	100%	100%	1	992.245.548	100%	70%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Rejomulyo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	555.464.400	1	482.295.228	1	136.800.000	0	23.080.000	0	19.660.000	0	47.825.000	1	46.215.000	1	136.780.000	100%	100%	1	619.075.228	100%	111%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Kanigoro)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	881.297.450	1	462.232.324	1	93.700.000	0	6.046.500	0	5.706.000	0	11.865.000	1	33.882.620	1	57.500.120	100%	61%	1	519.732.444	100%	59%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Kanigoro)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	904.402.885	1	613.015.003	1	76.800.000	0	12.935.000	0	13.730.000	0	19.450.000	1	30.685.000	1	76.800.000	100%	100%	1	689.815.003	100%	76%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Kanigoro)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.257.517.533	1	586.549.202	1	96.000.000	0	11.600.000	0	11.600.000	0	15.926.000	1	21.200.000	1	60.326.000	100%	63%	1	646.875.202	100%	51%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Sukosari)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	573.640.200	1	419.006.812	1	79.200.000	0	16.172.000	0	13.233.000	0	21.652.000	1	79.200.000	1	130.257.000	100%	164%	1	549.263.812	100%	96%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Pilangbango)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	845.740.200	1	885.433.315	1	129.594.679	0	17.600.000	0	17.600.000	0	35.775.000	1	58.072.400	1	129.047.400	100%	100%	1	1.014.480.715	100%	120%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Tawangrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.717.043.250	1	657.951.510	1	60.000.000	0	11.238.000	0	8.710.000	0	14.644.000	1	21.429.700	1	56.021.700	100%	93%	1	713.973.210	100%	42%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Tawangrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	627.522.218	1	337.162.879	1	40.800.000	0	7.108.500	0	4.415.000	0	13.154.000	1	16.099.000	1	40.776.500	100%	100%	1	377.939.379	100%	60%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kelun)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	824.560.240	1	489.872.911	1	100.800.000	0	17.263.600	0	15.600.000	0	22.281.500	1	33.337.900	1	88.483.000	100%	88%	1	578.355.911	100%	70%	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Manguharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.466.016.000	1	936.660.329	1	134.400.000	0	17.600.000	0	17.600.000	0	26.800.000	1	72.383.000	1	134.383.000	100%	100%	1	1.071.043.329	100%	73%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.282.983.113	1	754.591.619	1	153.600.000	0	23.383.000	0	27.035.680	0	34.009.320	1	59.425.400	1	143.853.400	100%	94%	1	898.445.019	100%	70%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	679.805.800	1	448.389.626	1	120.600.000	0	22.200.000	0	14.400.000	0	25.400.000	1	47.800.000	1	109.800.000	100%	91%	1	558.189.626	100%	82%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	722.877.300	1	453.863.253	1	79.200.000	0	14.400.000	0	11.508.000	0	19.200.000	1	29.970.000	1	75.078.000	100%	95%	1	528.941.253	100%	73%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	581.275.495	1	346.244.844	1	60.000.000	0	14.437.345	0	7.700.000	0	17.049.500	1	20.790.300	1	59.977.145	100%	100%	1	406.221.989	100%	70%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	2.690.392.875	1	1.298.954.880	1	230.400.000	0	33.888.500	0	36.159.000	0	47.102.500	1	77.369.500	1	194.519.500	100%	84%	1	1.493.474.380	100%	56%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.381.230.200	1	802.268.096	1	72.000.000	0	14.220.000	0	12.040.000	0	16.080.000	1	29.660.000	1	72.000.000	100%	100%	1	874.268.096	100%	63%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 05 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.757.643.500	1	1.003.658.830	1	218.400.000	0	49.920.000	0	29.600.000	0	46.680.000	1	91.908.500	1	218.108.500	100%	100%	1	1.221.767.330	100%	70%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.069.337.553	1	712.066.273	1	96.000.000	0	17.195.000	0	16.166.500	0	13.310.000	1	26.715.870	1	73.387.370	100%	76%	1	785.453.643	100%	73%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	636.543.225	1	261.731.852	1	60.000.000	0	12.910.000	0	6.400.000	0	12.800.000	1	24.773.000	1	56.883.000	100%	95%	1	318.614.852	100%	50%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.325.577.395	1	707.429.002	1	153.600.000	0	30.568.000	0	25.259.500	0	26.368.600	1	30.923.000	1	113.119.100	100%	74%	1	820.548.102	100%	62%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Winongo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.188.359.986	1	692.751.907	1	204.700.000	0	23.324.000	0	10.400.000	0	21.724.000	1	58.071.000	1	113.519.000	100%	55%	1	806.270.907	100%	68%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Winongo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	591.994.750	1	331.377.636	1	60.000.000	0	9.717.000	0	6.517.000	0	16.242.000	1	17.204.000	1	49.680.000	100%	83%	1	381.057.636	100%	64%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Ngegong)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	520.047.600	1	400.266.473	1	60.000.000	0	7.800.000	0	7.862.500	0	21.200.000	1	23.091.600	1	59.954.100	100%	100%	1	460.220.573	100%	88%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Patihan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.240.373.150	1	782.052.457	1	110.400.000	0	22.368.700	0	13.970.700	0	33.010.000	1	40.964.000	1	110.313.400	100%	100%	1	892.365.857	100%	72%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Pangongangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	636.210.350	1	206.577.524	1	218.400.000	0	39.458.000	0	24.884.000	0	25.838.000	1	87.705.000	1	177.885.000	100%	81%	2	384.462.524	200%	60%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Sogaten)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	734.403.705	1	458.116.605	1	60.000.000	0	8.622.500	0	8.750.000	0	19.410.000	1	23.193.500	1	59.976.000	100%	100%	1	518.092.605	100%	71%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Taman)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.703.057.863	1	1.111.485.577	1	230.400.000	0	30.600.000	0	33.522.000	0	72.477.000	1	93.431.000	1	230.030.000	100%	100%	1	1.341.515.577	100%	79%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Taman)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	591.181.585	1	370.201.858	1	72.000.000	0	11.750.000	0	7.200.000	0	18.400.000	1	34.650.000	1	72.000.000	100%	100%	1	442.201.858	100%	75%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Taman)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	926.315.350	1	551.774.228	1	154.300.000	0	14.800.000	0	14.400.000	0	36.582.000	1	37.412.000	1	103.194.000	100%	67%	1	654.968.228	100%	71%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Pandean)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.271.157.983	1	813.509.350	1	124.800.000	0	18.400.000	0	18.450.000	0	27.422.500	1	55.615.000	1	119.887.500	100%	96%	1	933.396.850	100%	73%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Pandean)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.628.458.950	1	921.969.452	1	120.000.000	0	14.418.000	0	15.298.000	0	39.179.160	1	50.990.000	1	119.885.160	100%	100%	1	1.041.854.612	100%	64%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Banjarejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.821.835.770	1	969.687.028	1	153.500.000	0	19.990.916	0	16.088.862	0	19.736.994	1	57.740.706	1	113.557.478	100%	74%	1	1.083.244.506	100%	59%	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Mojorejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	909.208.700	1	564.231.493	1	110.400.000	0	9.600.000	0	11.762.000	0	27.400.000	1	61.617.000	1	110.379.000	100%	100%	1	674.610.493	100%	74%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Mojorejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	2.020.594.865	1	1.220.696.911	1	153.600.000	0	15.996.000	0	15.933.500	0	47.944.000	1	62.354.400	1	142.227.900	100%	93%	1	1.362.924.811	100%	67%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.491.199.660	1	887.263.428	1	127.300.000	0	91.200.000	0	11.663.000	0	25.367.000	1	40.296.000	1	168.526.000	100%	132%	1	1.055.789.428	100%	71%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.193.113.263	1	657.606.975	1	100.800.000	0	13.414.900	0	12.404.000	0	35.712.720	1	36.435.000	1	97.966.620	100%	97%	1	755.573.595	100%	63%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	924.425.620	1	544.338.321	1	52.800.000	0	7.629.000	0	8.698.000	0	14.111.500	1	21.843.300	1	52.281.800	100%	99%	1	596.620.121	100%	65%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.329.776.983	1	698.741.516	1	98.400.000	0	16.804.500	0	17.636.500	0	19.716.000	1	35.956.300	1	90.113.300	100%	92%	1	788.854.816	100%	59%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Demangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	681.716.075	1	422.043.440	1	96.000.000	0	14.097.000	0	15.270.000	0	21.251.000	1	44.268.000	1	94.886.000	100%	99%	1	516.929.440	100%	76%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Demangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	695.837.800	1	436.609.172	1	60.000.000	0	9.232.852	0	8.146.646	0	16.625.938	1	24.371.847	1	58.377.283	100%	97%	1	494.986.455	100%	71%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Josenan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	917.353.700	1	452.203.931	1	105.600.000	0	15.620.000	0	13.720.000	0	24.337.000	1	45.274.800	1	98.951.800	100%	94%	1	551.155.731	100%	60%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Josenan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	743.765.750	1	475.909.573	1	40.800.000	0	4.884.000	0	2.918.000	0	8.466.000	1	17.000.000	1	33.268.000	100%	82%	1	509.177.573	100%	68%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Josenan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	570.522.200	1	305.000.666	1	79.200.000	0	11.476.350	0	10.717.090	0	22.251.950	1	25.082.450	1	69.527.840	100%	88%	1	374.528.506	100%	66%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kejuron)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	666.400.850	1	446.815.625	1	93.600.000	0	16.906.748	0	14.600.000	0	32.864.800	1	28.557.800	1	92.929.348	100%	99%	1	539.744.973	100%	81%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kuncen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	743.524.001	1	405.613.315	1	100.800.000	0	16.433.000	0	17.407.000	0	26.214.000	1	40.746.000	1	100.800.000	100%	100%	1	506.413.315	100%	68%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Bidang Kreatifitas Peserta Didik	14	1.989.882.561	0	961.766.779	14	199.487.733	0	-	2	35.906.000	2	136.406.500	10	14.644.700	14	186.957.200	100%	94%	14	1.148.723.979	100%	58%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	168	2.899.439.479	188	1.587.599.208	69	283.200.000	17	20.829.000	17	32.543.400	17	187.493.100	18	26.871.000	69	267.736.500	100%	95%	257	1.855.335.708	153%	64%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	Unit	12	2.936.577.374	0	-	12	1.813.375.181	4	19.711.600	4	21.141.950	2	3.902.559.565	2	540.113.431	12	4.483.526.546	100%	247%	12	4.483.526.546	100%	153%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	persentase sekolah yang dikelola dengan baik	%	100	108.303.465.718	100	35.092.626.737	100	26.662.295.868	0	471.312.609	0	480.836.171	0	7.109.736.555	0	4.225.828.489	100	12.287.713.824	100%	46%	100	47.380.340.561	100%	11%	
1	1	2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	3.044.205.503	0	-	2	8.416.967.640	0	5.854.100	0	83.878.260	0	2.291.844.560	2	3.264.740.077	2	5.646.316.997	100%	67%	2	5.646.316.997	100%	185%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Siswa	5488	13.537.484.000	0	9.439.171.766	5488	3.975.043.026	5488	13.207.850	0	-	5488	3.514.934.600	0	4.612.500	5488	3.532.754.950	100%	89%	5488	12.971.926.716	100%	96%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 1)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	2	3.810.408.799	1	2.476.651.039	1	206.400.000	0	29.897.000	0	27.860.000	0	75.188.385	1	73.431.615	1	206.377.000	100%	100%	2	2.683.028.039	100%	70%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 2)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	2	4.259.981.150	1	1.885.686.714	1	326.400.000	0	39.982.500	0	39.835.600	0	103.371.800	1	132.873.900	1	316.063.800	100%	97%	2	2.201.750.514	100%	52%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 3)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	2	2.563.605.100	1	1.584.733.686	1	171.600.000	0	30.741.000	0	28.463.000	0	67.563.260	1	44.520.940	1	171.288.200	100%	100%	2	1.756.021.886	100%	68%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 4)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	2	3.365.787.950	1	1.557.783.906	1	161.400.000	0	30.821.000	0	35.166.500	0	67.487.600	1	26.449.000	1	159.924.100	100%	99%	2	1.717.708.006	100%	51%	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1						2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	1	2	2.02	36		Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 5)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	2	2.825.050.505	1	1.799.933.209	1	183.000.000	0	33.034.653	0	29.003.320	0	62.085.616	1	58.779.868	1	182.903.457	100%	100%	2	1.982.836.666	100%	70%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36		Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 6)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	2	3.130.943.545	1	1.769.992.187	1	193.800.000	0	31.100.000	0	30.100.000	0	68.630.000	1	54.700.000	1	184.530.000	100%	95%	2	1.954.522.187	100%	62%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36		Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 7)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	2	3.154.598.650	1	1.626.182.054	1	302.400.000	0	54.915.980	0	40.520.000	0	108.161.160	1	94.548.500	1	298.145.640	100%	99%	2	1.924.327.694	100%	61%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36		Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 8)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	2	2.251.651.760	1	1.113.184.623	1	86.400.000	0	11.880.000	0	7.633.000	0	35.769.000	1	30.920.000	1	86.202.000	100%	100%	2	1.199.386.623	100%	53%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36		Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 9)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	2	3.291.187.255	1	1.840.100.056	1	163.800.000	0	23.088.500	0	22.794.000	0	65.010.000	1	50.876.000	1	161.768.500	100%	99%	2	2.001.868.556	100%	61%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36		Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 10)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	2	3.872.945.545	1	2.210.369.765	1	263.400.000	0	41.129.800	0	44.571.000	0	103.440.500	1	74.132.500	1	263.273.800	100%	100%	2	2.473.643.565	100%	64%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36		Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 11)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	2	3.059.069.867	1	1.817.697.411	1	217.800.000	0	37.837.100	0	31.688.000	0	78.819.000	1	69.455.900	1	217.800.000	100%	100%	2	2.035.497.411	100%	67%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36		Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 12)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	2	3.151.822.350	1	1.383.926.577	1	166.800.000	0	23.935.720	0	15.864.000	0	39.587.160	1	82.023.800	1	161.410.680	100%	97%	2	1.545.337.257	100%	49%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36		Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 13)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	2	2.706.472.233	1	1.444.508.668	1	169.800.000	0	46.310.406	0	18.932.491	0	52.838.914	1	40.847.000	1	158.928.811	100%	94%	2	1.603.437.479	100%	59%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36		Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 14)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	2	2.061.109.818	0	1.102.201.903	1	85.800.000	0	17.577.000	0	14.727.000	0	22.831.000	1	29.787.699	1	84.922.699	100%	99%	1	1.187.124.602	50%	58%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	38		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Bidang Kreatifitas Peserta Didik	14	2.432.946.145	0	1.060.239.645	14	413.777.202	0	-	2	9.800.000	8	326.134.000	4	67.608.190	14	403.542.190	100%	98%	14	1.463.781.835	100%	60%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	41		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	384	731.221.199	48	446.953.326	23	53.278.000	0	-	0	-	11	26.040.000	11	25.521.000	22	51.561.000	96%	97%	70	498.514.326	18%	68%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	persentase sekolah yang dikelola dengan baik	%	100	36.700.778.199	100	14.867.955.984	100	8.627.820.330	0	15.352.510	0	21.447.400	0	2.049.441.850	100	1.905.875.620	100	3.992.117.380	100%	46%	100	18.860.073.364	100%	11%	
1	1	2	2.03	4		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	6	502.508.160	0	-	6	502.508.160	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	13		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Lembaga Peserta Didik	1	1.274.367.075	0	735.016.958	1	403.686.850	0	15.352.510	0	21.447.400	0	297.733.850	1	55.073.120	1	389.606.880	100%	97%	1	1.124.623.838	100%	88%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	16		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	4000	13.995.000.000	2990	9.777.415.050	987	3.564.000.000	0	-	0	-	487	1.728.000.000	547	1.758.300.000	1034	3.486.300.000	105%	98%	4024	13.263.715.050	101%	95%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	17		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	326	20.829.242.964	26	4.355.523.976	160	179.145.320	0	-	0	-	35	23.708.000	125	92.502.500	160	116.210.500	100%	65%	186	4.471.734.476	57%	21%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	18		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	163	99.660.000	0	-	150	3.978.480.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.04			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	persentase lembaga non formal yang dikelola dengan baik	%	100	5.684.915.980	100	1.553.677.997	100	1.402.021.000	0	-	0	2.625.000	0	8.068.500	100	636.602.150	100	647.295.650	100%	46%	100	2.200.973.647	100%	11%	
1	1	2	2.04	16		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	14	1.208.176.750	53	717.074.651	7	673.591.000	0	-	0	2.625.000	0	8.068.500	7	636.602.150	7	647.295.650	100%	96%	60	1.364.370.301	429%	113%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.04	17		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	4	728.430.000	0	-	6	728.430.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	3				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase Sekolah berkurikulum SNP	%	100	14.695.824.830	100	7.550.457.972	100	609.177.212	0	35.797.900	0	101.480.300	0	236.135.926	100	232.792.300	100	606.206.426	100%	100%	100	8.156.664.398	100%	56%	
1	1	3	2.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	persentase sekolah yang berkurikulum sesuai standar mutu	%	100	12.339.730.672	100	6.034.226.576	100	370.936.492	0	11.638.000	0	3.790.300	0	121.550.926	100	231.782.300	100	368.761.526	100%	99%	100	6.402.988.102	100%	3%	
1	1	3	2.01	2		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	2	3.900.453.830	1	1.789.103.670	1	207.848.205	0	9.729.000	0	3.790.300	0	92.751.726	1	99.217.000	1	205.488.026	100%	99%	2	1.994.591.696	100%	51%	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	1	3	2.01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Orang	200	3.524.532.568	97	1.822.496.056	100	163.088.287	0	1.150.000	0	-	0	28.799.200	100	132.565.300	100	162.514.500	100%	100%	197	1.985.010.556	99%	56%	Dinas Pendidikan
1	1	3	2.01	7	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	1	1.641.355.500	0	-	1	592.027.087	0	759.000	0	500.000.000	1	82.944.900	0	8.189.500	1	591.893.400	100%	100%	1	591.893.400	100%	36%	Dinas Pendidikan
1	1	3	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	persentase sekolah yang berkurikulum sesuai standar mutu	%	100	2.356.094.158	100	1.516.231.396	100	238.240.720	0	24.159.900	0	97.690.000	100	114.585.000	0	1.010.000	100	237.444.900	100%	100%	100	1.753.676.296	100%	10%	
1	1	3	2.02	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen	2	2.356.094.158	1	1.516.231.396	1	238.240.720	0	24.159.900	0	97.690.000	1	114.585.000	0	1.010.000	1	237.444.900	100%	100%	2	1.753.676.296	100%	74%	Dinas Pendidikan
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	%	60	8.517.875.000	100	4.053.854.277	67	1.053.205.561	0	5.982.000	0	7.790.600	0	544.105.200	67	285.970.960	67	843.848.760	100%	80%	100	4.897.703.037	167%	57%	
1	1	4	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan bersertifikasi	%	100	8.517.875.000	100	4.053.854.277	67	1.053.205.561	0	5.982.000	0	7.790.600	0	544.105.200	67	285.970.960	67	843.848.760	100%	80%	100	4.897.703.037	100%	10%	
1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	12	5.998.350.000	5	2.861.031.243	1	532.900.000	0	-	0	7.790.600	0	346.875.800	1	169.486.960	1	524.153.360	100%	98%	6	3.385.184.603	50%	56%	Dinas Pendidikan
1	1	4	2.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	4	2.519.525.000	1	1.192.823.034	1	520.305.561	0	5.982.000	0	-	0	197.229.400	1	116.484.000	1	319.695.400	100%	61%	2	1.512.518.434	50%	60%	Dinas Pendidikan
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																										
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	%	77	345.407.002.823	74	230.001.376.045	83	75.171.496.199	0	8.004.889.000	0	7.415.632.177	0	19.619.091.299	100	32.236.435.722	100	67.276.048.198	120%	89%	100	297.277.424.243	130%	86%	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan Mencapai Target	%	90,22	166.658.502.311	0	71.691.474.123	90	19.624.210.614	90,32	-	91,4	1.637.187.250	89,25	5.541.269.904	0	8.434.640.514	89,25	15.613.097.668	99%	80%	89	87.304.571.791	99%	52%	
1	2	2	2.01	6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	6	240.000.000	0	-	6	240.000.000		-	0	-	0		6	186.936.000	6	186.936.000	100%	78%	6	186.936.000	100%	78%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	15	220.326.000	0	-	15	220.326.000			0	-	0	129.740.320	15	83.404.000	15	213.144.320	100%	97%	15	213.144.320	100%	97%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (RSUD)	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	Unit	5	7.985.985.425	2	3.061.442.777	1	621.878.000	0	0	0	0	0	63.182.200	1	553.624.308	1	616.806.508	100%	99%	3	3.678.249.285	60%	46%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	778	8.614.795.149	1196	5.048.279.462	30	1.327.083.000	0	-	0	-	10	352.500.000	20	834.309.400	30	1.186.809.400	100%	89%	1226	6.235.088.862	158%	72%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Unit	81	23.849.613.724	77	8.078.981.316	4	337.124.666	0	0	4	78.090.000	0	228.000.000	3	951.532.400	7	1.257.622.400	175%	373%	84	9.336.603.716	104%	39%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	432	595.584.084	163	87.726.080	432	297.792.042	0	-	0	-	9	43.671.848	423	217.062.790	432	260.734.638	100%	88%	595	348.460.718	138%	59%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	22	Pengembangan Rumah Sakit (RSUD)	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1	3.767.633.613	0	-	1	3.767.633.613	0	0	0	0	1	537.315.000	0	3.096.771.240	1	3.634.086.240	100%	96%	1	3.634.086.240	100%	96%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	20	4.644.460.593	0	-	20	4.644.460.593	0	-	0	3.566.000	10	1.414.540.936	10	2.781.340.376	20	4.199.447.312	100%	90%	20	4.199.447.312	100%	90%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (RSUD)	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	5	8.125.000.000	0	-	5	8.125.000.000			5	1.551.965.250	5	2.762.950.100	5	3.801.047.790	5	8.115.963.140	100%	100%	5	8.115.963.140	100%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket	12	42.912.700	0	-	12	42.912.700			0	3.566.000	3	9.369.500	9	33.541.800	12	46.477.300	100%	108%	12	46.477.300	100%	108%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	%	79	178.748.500.512	0	158.309.901.922	83	55.547.285.585	0	8.004.889.000	25	5.778.444.927	25	14.077.821.395	25	23.801.795.208	75	51.662.950.530	90%	93%	75	209.972.852.452	95%	117%	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4860	9.332.319.974	2453	7.785.512.878	2430	42.912.700	618	-	650	-	725	9.861.200	874	285.088.500	2867	294.949.700	118%	687%	5320	8.080.462.578	109%	87%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	862	21.360.000	435	25.932.000	431	10.680.000	257	-	38	-	41	-	170	10.680.000	506	10.680.000	117%	100%	941	36.612.000	109%	171%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	590	20.240.000	298	30.378.000	295	10.120.000	0	-	173	-	46	-	129	10.120.000	348	10.120.000	118%	100%	646	40.498.000	109%	200%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	824	26.700.000	537	22.668.000	412	13.350.000	0	-	232	-	112	-	140	13.350.000	484	13.350.000	117%	100%	1021	36.018.000	124%	135%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	592	70.092.000	298	21.790.400	296	35.046.000	0	-	148	-	113	-	87	34.992.000	348	34.992.000	118%	100%	646	56.782.400	109%	81%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1046	24.480.000	523	38.950.000	523	12.240.000	0	-	231	-	200	-	179	12.240.000	610	12.240.000	117%	100%	1133	51.190.000	108%	209%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Demangan)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	966	22.880.000	487	24.306.400	483	11.440.000	0	-	241	-	167	-	176	11.360.000	584	11.360.000	121%	99%	1071	35.666.400	111%	156%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4638	216.109.197	2347	130.900.750	2319	13.936.800	586	-	661	-	682	2.141.700	922	11.506.900	2851	13.648.600	123%	98%	5198	144.549.350	112%	67%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	412	51.752.000	0	-	412	51.752.000	251	-	37	-	40	-	177	50.002.000	505	50.002.000	123%	97%	505	50.002.000	123%	97%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	270	68.450.000	0	-	270	68.450.000	0	-	170	-	44	-	131	68.450.000	345	68.450.000	128%	100%	345	68.450.000	128%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	407	66.945.000	0	-	407	66.945.000	0	-	230	-	109	-	142	66.945.000	481	66.945.000	118%	100%	481	66.945.000	118%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	286	36.638.000			286	36.638.000	0	-	146	-	114	-	86	36.610.400	346	36.610.400	121%	100%	346	36.610.400	121%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	505	29.584.000	0	-	505	29.584.000	0	-	229	-	189	-	190	28.284.000	608	28.284.000	120%	96%	608	28.284.000	120%	96%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Demangan)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	451	18.208.500	0	-	451	18.208.500	0	-	231	-	157	-	178	17.558.500	566	17.558.500	125%	96%	566	17.558.500	125%	96%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4418	231.292.367	2256	191.401.980	2209	109.723.000	582	-	658	-	674	50.361.500	805	48.050.000	2719	98.411.500	123%	90%	4975	289.813.480	113%	125%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	18046	729.476.345	9099	340.261.930	9023	535.214.200	2470	-	2571	-	2598	34.776.300	3045	493.882.430	10684	528.658.730	118%	99%	19783	868.920.660	110%	119%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6596	40.000.000	3591	6.000.000	3298	20.000.000	4911	-	1073	-	343	-	3094	20.000.000	4911	20.000.000	149%	100%	8502	26.000.000	129%	65%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	15810	40.800.000	7724	9.400.000	7905	20.400.000	0	-	5925	-	1993	-	-13	20.400.000	7905	20.400.000	100%	100%	15629	29.800.000	99%	73%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2656	8.750.000	0	-	2656	8.750.000	0	-	2567	-	99	-	-6	8.750.000	2660	8.750.000	100%	100%	2660	8.750.000	100%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4098	26.400.000	2048	3.200.000	2049	13.200.000	0	-	1188	-	683	-	180	13.200.000	2051	13.200.000	100%	100%	4099	16.400.000	100%	62%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	15356	32.000.000	7678	6.200.000	7678	16.000.000	0	-	5853	-	1560	-	0	15.250.000	7413	15.250.000	97%	95%	15091	21.450.000	98%	67%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Demangan)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	15760	16.000.000	7754	6.600.000	7880	8.000.000	0	-	0		8145		0	8.000.000	8145	8.000.000	103%	100%	15899	14.600.000	101%	91%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	215621	977.855.817	126836	382.933.700	88785	48.466.000	31573	-	39489	-	64871	-	57	48.466.000	64871	48.466.000	73%	100%	191707	431.399.700	89%	44%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	21510	92.677.318	8425	218.114.050	10755	196.537.500	3436	-	2364	-	2697	150.500.000	3	37.147.000	8499,5	187.647.000	79%	95%	16925	405.761.050	79%	438%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	766	458.160.742	374	206.790.590	383	14.400.000	106	2.400.000	186	3.600.000	74	4.800.000	37	3.600.000	403	14.400.000	105%	100%	777	221.190.590	101%	48%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	9236	537.735.225	5763	255.835.070	4618	813.394.600	950	-	1181	-	3315	-	1238	55.002.400	6684	55.002.400	145%	7%	12447	310.837.470	135%	58%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	464	7.000.000	254	1.750.000	232	3.500.000	0	-	71	-	161	-	25	3.500.000	257	3.500.000	111%	100%	511	5.250.000	110%	75%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	508	2.400.000	290	1.000.000	254	1.200.000	0	-	127	-	314	-	-129	1.200.000	312	1.200.000	123%	100%	602	2.200.000	119%	92%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	228	1.650.000	113	1.250.000	114	400.000	0		52		89		31	400.000	172	400.000	151%	100%	285	1.650.000	125%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	532	11.500.000	356	1.500.000	266	5.750.000	0	-	170		107		89	5.750.000	366	5.750.000	138%	100%	722	7.250.000	136%	63%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Demangan)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	432	3.000.000	563	3.000.000	216	1.500.000	0	-	149		91		66	1.500.000	306	1.500.000	142%	100%	869	4.500.000	201%	150%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	12480	1.841.578.687	6664	485.884.912	6240	105.700.000	1260	10.200.000	2001	15.300.000	2575	20.400.000	1646	53.400.000	7482	99.300.000	120%	94%	14146	585.184.912	113%	32%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	964	4.341.180	524	3.341.180	482	1.000.000	198	-	52	-	21	-	198	1.000.000	469	1.000.000	97%	100%	993	4.341.180	103%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	2135	5.000.000	0	-	2135	5.000.000	0	-	1042	-	1299	-	64	5.000.000	2405	5.000.000	113%	100%	2405	5.000.000	113%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	910	8.000.000	507	1.100.000	455	4.000.000	0	-	244	-	121	-	142	4.000.000	507	4.000.000	111%	100%	1014	5.100.000	111%	64%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1						2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	2	2	2.02	12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	684	4.000.000	389	500.000	342	2.000.000	0		175		79		186	2.000.000	440	2.000.000	129%	100%	829	2.500.000	121%	63%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	662	2.000.000	0	-	662	2.000.000	0		336		250		124	2.000.000	710	2.000.000	107%	100%	710	2.000.000	107%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Demangan)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1018	22.000.000	509	11.000.000	509	11.000.000	0		385		165		241	11.000.000	791	11.000.000	155%	100%	1300	22.000.000	128%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	688.060.500	0	528.285.500	0		0		0		0		0		0		0%	0%	0	528.285.500	-	77%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	4	692.405.000	4	612.165.000	0		0		0		0		0		0		0%	0%	4	612.165.000	100%	88%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	4	511.661.000	4	386.482.500	0		0		0		0		0		0		0%	0%	4	386.482.500	100%	76%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	5	603.791.602	3	5.766.729.579	2	194.174.800	0		1	46.145.000	0	38.133.400	1	103.402.000	2	187.680.400	100%	97%	5	5.954.409.979	100%	986%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	6	1.260.568.600	3	1.090.205.600	3	579.258.000	0		0		0	301.635.000	3	275.293.500	3	576.928.500	100%	100%	6	1.667.134.100	100%	132%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	6	1.266.554.800	3	1.124.513.950	3	520.433.000	0		3		0	288.855.000	0	223.274.300	3	512.129.300	100%	98%	6	1.636.643.250	100%	129%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	19	696.963.210	13	1.347.243.780	3	661.968.600	0		0		0	388.890.000	3	270.321.200	3	659.211.200	100%	100%	16	2.006.454.980	84%	288%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	18	546.383.130	12	1.111.224.680	3	504.863.600	0		0		0	267.720.000	3	236.624.800	3	504.344.800	100%	100%	15	1.615.569.480	83%	296%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	18	1.041.364.070	12	1.999.212.680	3	900.673.200	0		0		0	476.835.000	3	417.510.500	3	894.345.500	100%	99%	15	2.893.558.180	83%	278%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Demangan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	15	735.674.980	12	1.584.495.080	3	825.477.000	0		0		0	451.170.000	3	373.720.800	3	824.890.800	100%	100%	15	2.409.385.880	100%	328%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	6	651.887.986	3	788.916.820	3	139.609.068	0		0		1		2	35.658.000	3	35.658.000	100%	26%	6	824.574.820	100%	126%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	10	2.046.882.964	5	945.840.207	5	210.075.200	0		0		2	202.186.000	3	7.852.900	5	210.038.900	100%	100%	10	1.155.879.107	100%	56%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	2	8.100.000	1	3.949.000	1	4.050.000	0		0		0		1	4.050.000	1	4.050.000	100%	100%	2	7.999.000	100%	99%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	2	6.000.000	1	12.524.000	1	3.000.000	0		1		0		0	3.000.000	1	3.000.000	100%	100%	2	15.524.000	100%	259%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	2	10.600.000	1	14.897.500	1	5.300.000	0		1		0		0	5.300.000	1	5.300.000	100%	100%	2	20.197.500	100%	191%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	2	10.200.000	1	20.640.500	1	5.100.000	0		0		0		1	5.100.000	1	5.100.000	100%	100%	2	25.740.500	100%	252%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	2	4.100.000	1	9.560.600	1	2.050.000	0		1		0		0	2.050.000	1	2.050.000	100%	100%	2	11.610.600	100%	283%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Demangan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	2	10.100.000	1	7.788.100	1	5.050.000	0		1		0		0	5.050.000	1	5.050.000	100%	100%	2	12.838.100	100%	127%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	154.252.800	0	-	1	154.252.800	0		0		0	74.633.675	1	70.554.980	1	145.188.655	100%	94%	1	145.188.655	100%	94%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	4	2.546.700.425	3	2.486.533.625	1	30.083.400	1		0		0	22.055.600	0	8.027.800	1	30.083.400	100%	100%	4	2.516.617.025	100%	99%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	2	67.970.000	2	7.014.000	1	33.985.000	0		0		0		1	33.636.000	1	33.636.000	100%	99%	3	40.650.000	150%	60%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	4	93.520.000	2	2.350.000	2	46.760.000	0		1		1		0	46.310.000	2	46.310.000	100%	99%	4	48.660.000	100%	52%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	4	106.872.400	2	6.800.000	2	53.436.200	0		2		0		0	53.053.000	2	53.053.000	100%	99%	4	59.853.000	100%	56%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	4	73.598.000	2	5.753.600	2	36.799.000	0		0		0		2	36.272.000	2	36.272.000	100%	99%	4	42.025.600	100%	57%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	4	141.207.600	2	1.650.000	2	70.603.800	0		2		0		0	70.278.400	2	70.278.400	100%	100%	4	71.928.400	100%	51%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1						2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	2	2	2.02	20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Demangan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	4	99.365.000	2	3.800.000	2	49.682.500	0	-	2		0		0	48.382.500	2	48.382.500	100%	97%	4	52.182.500	100%	53%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	22		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	400	619.564.467	374	220.965.132	100	27.616.200	0	-	60	2.400.000	60	7.200.000	120	14.073.800	120	23.673.800	120%	86%	494	244.638.932	124%	39%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	3	780.919.926	2	1.186.104.738	1	1.269.019.400	1	31.491.000	0	25.247.500	0	461.686.200	0	544.920.359	1	1.063.345.059	100%	84%	3	2.249.449.797	100%	288%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	72.244.800	1	50.794.800	1	21.450.000	0		0		0		1	21.150.000	1	21.150.000	100%	99%	2	71.944.800	100%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	37.300.000	1	28.108.000	1	18.650.000	0	-	1	-	0		0	18.600.000	1	18.600.000	100%	100%	2	46.708.000	100%	125%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	35.800.000	1	34.452.000	1	17.900.000	0	-	0	-	0		1	17.900.000	1	17.900.000	100%	100%	2	52.352.000	100%	146%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	43.600.000	1	41.152.800	1	21.800.000	0		0		0		1	21.050.000	1	21.050.000	100%	97%	2	62.202.800	100%	143%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	64.200.000	1	45.820.000	1	32.100.000	0	-	1	-	0	-	0	31.550.000	1	31.550.000	100%	98%	2	77.370.000	100%	121%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Demangan)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	52.500.000	1	34.764.000	1	26.250.000	0	-	1		0		0	25.850.000	1	25.850.000	100%	98%	2	60.614.000	100%	115%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	36	112.527.707.750	36	96.328.328.104	36	32.495.324.800	9	7.660.810.000	9	5.061.863.600	9	10.171.638.220	9	7.491.367.850	36	30.385.679.670	100%	94%	72	126.714.007.774	200%	113%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	28		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	18	29.686.000	0	-	18	29.686.000			0	-	19	6.568.100	12	7.945.000	31	14.513.100	172%	49%	31	14.513.100	172%	49%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	29		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	18	1.295.071.863	9	739.524.740	9	402.506.900	1	6.600.000	1	17.480.000	3	43.754.000	4	274.082.500	9	341.916.500	100%	85%	18	1.081.441.240	100%	84%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	8	5.213.818.179	4	3.200.763.179	4	2.013.055.000	3	9.000.000	0	4.500.000	1	11.250.000	0	1.755.025.100	4	1.779.775.100	100%	88%	8	4.980.538.279	100%	96%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	8	4.412.954.181	4	3.062.808.942	4	1.663.606.000	0	18.000.000	0	9.000.000	1	22.500.000	3	1.506.878.850	4	1.556.378.850	100%	94%	8	4.619.187.792	100%	105%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	18	3.162.640.296	14	3.022.104.928	4	1.783.593.000	0	18.000.000	0	9.000.000	0	22.500.000	4	1.594.052.993	4	1.643.552.993	100%	92%	18	4.665.657.921	100%	148%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	18	1.359.336.366	14	3.147.816.114	4	1.826.613.000	0	18.000.000	1	9.000.000	2	22.500.000	1	1.613.055.163	4	1.662.555.163	100%	91%	18	4.810.371.277	100%	354%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	18	2.529.704.450	14	2.488.970.962	4	2.265.412.200	0	36.000.000	0	18.000.000	1	45.000.000	3	2.030.359.579	4	2.129.359.579	100%	94%	18	4.618.330.541	100%	183%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Demangan)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	18	3.126.467.523	14	3.121.071.763	4	2.040.944.600	0	18.000.000	1	9.000.000	0	22.500.000	3	1.816.920.348	4	1.866.420.348	100%	91%	18	4.987.492.111	100%	160%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	14	9.608.906.535	7	8.491.247.518	7	1.117.659.017	0	-	4	544.308.827	2	5.618.500	1	557.105.156	7	1.107.032.483	100%	99%	14	9.598.280.001	100%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	0	0	-	1	7.683.000	0	-	0	-	0	-	1	7.632.400	1	7.632.400	100%	99%	1	7.632.400	100%	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	7.675.000	0	-	1	7.675.000	0	-	0	-	1	-	0	7.661.200	1	7.661.200	100%	100%	1	7.661.200	100%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	7.677.000	0	-	1	7.677.000	0	-	0	-	0	-	1	7.632.400	1	7.632.400	100%	99%	1	7.632.400	100%	99%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas kesehatan Lainnya (Puskesmas Demangan)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	8.070.000	0	-	1	8.070.000	0	-	1	-	0	-	0	6.712.200	1	6.712.200	100%	83%	1	6.712.200	100%	83%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	8.147.000	0	-	1	8.147.000	0	-	0	-	1	-	0	7.402.600	1	7.402.600	100%	91%	1	7.402.600	100%	91%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	12	1.500.000	0	-	12	1.500.000	0		0		9	600.000	3	900.000	12	1.500.000	100%	100%	12	1.500.000	100%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	12	4.800.000	0	-	12	2.400.000	0	-	0	-	0	-	12	2.400.000	12	2.400.000	100%	100%	12	2.400.000	100%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	2	500.000	1	100.000	1	250.000	0	-	1	-	0	-	0	100.000	1	100.000	100%	40%	2	200.000	100%	40%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	2	500.000	1	250.000	1	250.000	0	-	1	-	0		0	250.000	1	250.000	100%	100%	2	500.000	100%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	2	400.000	1	200.000	1	200.000	0	-	1	-	0	-	0	150.000	1	150.000	100%	75%	2	350.000	100%	88%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	2	1.200.000	1	1.200.000	1	600.000	0	-	1	-	6	-	0	600.000	7	600.000	700%	100%	8	1.800.000	400%	150%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Demangan)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	2	600.000	1	500.000	1	300.000	0	-	1	-	0	-	0	300.000	1	300.000	100%	100%	2	800.000	100%	133%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	670.680.000	0		1	670.680.000	1	173.988.000	0		0	423.608.000	0	244.406.000	1	842.002.000	100%	126%	1	842.002.000	100%	126%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	60	3.100.000	28	1.000.000	30	1.550.000	7	-	0	-	0	-	19	1.550.000	26	1.550.000	87%	100%	54	2.550.000	90%	82%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (Puskesmas Ngegong)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	64	1.600.000	21	1.000.000	32	800.000	0	-	17	-	7	-	4	800.000	28	800.000	88%	100%	49	1.800.000	77%	113%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (Puskesmas Sukosari)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	40	1.200.000	1	900.000	20	600.000	0	-	14	-	6		13	600.000	33	600.000	165%	100%	34	1.500.000	85%	125%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	16	800.000	13	400.000	8	400.000	0	-	0	-	2	-	7	400.000	9	400.000	113%	100%	22	800.000	138%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	74	500.000	37	250.000	37	250.000	0	-	14	-	13	-	8	250.000	35	250.000	95%	100%	72	500.000	97%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (Puskesmas Demangan)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	44	3.000.000	20	350.000	22	1.500.000	0	-	14	-	8	-	12	1.500.000	34	1.500.000	155%	100%	54	1.850.000	123%	62%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	506	14.400.000	0	-	506	14.400.000	504	2.400.000	502	3.600.000	533	4.800.000	536	3.600.000	536	14.400.000	106%	100%	536	14.400.000	106%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	8	250.000	0	-	8	250.000	0	-	0	-	0	-	12	250.000	12	250.000	150%	100%	12	250.000	150%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) (Puskesmas Ngegong)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	2	50.000	0	-	2	50.000	0	-	0	-	1	-	1	-	2	-	100%	0%	2	-	100%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) (Puskesmas Sukosari)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	8	1.200.000	0	-	8	1.200.000	0	-	0	-	8		3	1.200.000	11	1.200.000	138%	100%	11	1.200.000	138%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	2	2	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	16	800.000	0	-	8	400.000	0	-	9	-	2	-	0	400.000	11	400.000	138%	100%	11	400.000	69%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	40	1.000.000	0	-	40	1.000.000	0	-	39	-	4	-	0	100.000	43	100.000	108%	10%	43	100.000	108%	10%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) (Puskesmas Demangan)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	2	200.000	0	-	2	200.000	0	-	2	-	0	-	3	200.000	5	200.000	250%	100%	5	200.000	250%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	10	11.402.800	0	-	10	11.402.800	5	-	3	-	2	-	4	10.930.400	14	10.930.400	140%	96%	14	10.930.400	140%	96%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	8.160.000	0	-	1	8.160.000	0	-	0	-	0	-	1	8.160.000	1	8.160.000	100%	100%	1	8.160.000	100%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Ngegong)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	3.360.000			1	3.360.000	0	-	0	-	1	-	0	3.360.000	1	3.360.000	100%	100%	1	3.360.000	100%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Sukosari)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	8.219.200	0	-	1	8.219.200	0	-	1	-	0	-	0	8.215.500	1	8.215.500	100%	100%	1	8.215.500	100%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1.917.400	0	-	1	1.917.400	0	-	1	-	0	-	0	1.899.000	1	1.899.000	100%	99%	1	1.899.000	100%	99%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	10.860.000	0	-	1	10.860.000	0	-	1	-	0	-	0	10.860.000	1	10.860.000	100%	100%	1	10.860.000	100%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Demangan)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	8.590.000	0	-	1	8.590.000	0	-	1	-	0	-	0	8.282.000	1	8.282.000	100%	96%	1	8.282.000	100%	96%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	2	80.161.600	0	-	2	80.161.600	0	-	0	-	1	21.144.000	1	58.624.000	1	79.768.000	50%	100%	1	79.768.000	50%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	35.280.000	0	-	1	35.280.000	0	-	0	-	0	-	1	35.280.000	1	35.280.000	100%	100%	1	35.280.000	100%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Ngegong)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	22.575.000	0	-	1	22.575.000	0	-	1	-	0	-	0	22.575.000	1	22.575.000	100%	100%	1	22.575.000	100%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Sukosari)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	12.800.000	0	-	1	12.800.000	0	-	1	-	0	-	0	12.800.000	1	12.800.000	100%	100%	1	12.800.000	100%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	2	2	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	35.558.000	0	-	1	35.558.000	0		1		0		0	35.558.000	1	35.558.000	100%	100%	1	35.558.000	100%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	18.120.000	0	-	1	18.120.000	0		1		0		0	18.020.000	1	18.020.000	100%	99%	1	18.020.000	100%	99%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Demangan)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	73.940.000	0	-	1	73.940.000	0		1		0		0	73.940.000	1	73.940.000	100%	100%	1	73.940.000	100%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang Sesuai Standar	%	92	933.593.682	90	1.048.874.124	92	442.559.000	89,4		1,3		1,3	203.410.500	4	219.422.000	96	422.832.500	104%	96%	96	1.471.706.624	104%	158%	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas yang dilakukan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	100	138.564.000	100	42.419.000	100	69.282.000	0				90	8.280.000	10	60.540.000	100	68.820.000	100%	99%	200	111.239.000	200%	80%	
1	2	3	2.02	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	12	138.564.000	6	42.419.000	6	69.282.000	0				5	8.280.000	1	60.540.000	6	68.820.000	100%	99%	12	111.239.000	100%	80%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	3	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Teregistrasi	%	92	795.029.682	0	1.006.455.124	92	373.277.000	89,4		1,3		1,3	195.130.500	0	158.882.000	92	354.012.500	100%	95%	92	1.360.467.624	100%	171%	
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	665	795.029.682	615	1.006.455.124	50	373.277.000	14		16		20	195.130.500	0	158.882.000	50	354.012.500	100%	95%	665	1.360.467.624	100%	171%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	%	91	1.103.976.971	87	275.517.241	91	305.327.000	89		89		88,5	169.035.750	91	116.940.950	91	285.976.700	100%	94%	91	561.493.941	100%	51%	
1	2	4	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan farmasi sesuai standar	%	89	802.237.581	0	215.318.851	89	63.786.000	0		87		87	56.291.800	4	4.197.000	91	60.488.800	102%	95%	100	275.807.651	112%	34%	
1	2	4	2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	4	802.237.581	2	215.318.851	1	63.786.000	0		0		0	56.291.800	1	4.197.000	1	60.488.800	100%	95%	3	275.807.651	75%	34%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	4	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sertifikat Produksi Pangan PIRT, dan sertifikat Depot Air Minum (DAM)	%	89	301.739.390	0	60.198.390	89	241.541.000	0		89		89	112.743.950	2	112.743.950	91	225.487.900	102%	93%	100	285.686.290	112%	95%	
1	2	4	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	6	301.739.390	3	60.198.390	3	241.541.000	0		0		0	112.743.950	3	112.743.950	3	225.487.900	100%	93%	6	285.686.290	100%	95%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	%	86,43	9.836.541.904	61	5.310.691.254	86,43	4.658.468.800	66,6	719.456.500	66,6	887.685.000	66,6	781.791.800	88	2.184.004.229	88	4.572.937.529	102%	98%	88	9.883.628.783	102%	100%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	%	100	1.175.985.504	100	998.699.799	100	262.749.600	72,73		18	4.400.000	3	8.800.000	6	224.702.549	99,73	237.902.549	100%	91%	100	1.236.602.348	100%	105%	
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	2	1.175.985.504	1	998.699.799	1	262.749.600	0		0	4.400.000	0	8.800.000	1	224.702.549	1	237.902.549	100%	91%	2	1.236.602.348	100%	105%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri	%	100	8.660.556.400	0	4.311.991.455	100	4.395.719.200	92,59	719.456.500	92,59	883.285.000	92,59	772.991.800	100	1.959.301.680	100	4.335.034.980	100%	99%	100	8.647.026.435	100%	100%	
						Persentase Posbindu PTM Berstrata PURI		100		0		100		63,04		63,04		63,04		100		100		100%		100		100%		
						Persentase Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) berstrata Puri		100		0		100		100		100		100		100		100		100%		100		100%		
						Persentase Poskestren berstrata puri		62,5		0		62,5		73,33		73,33		73,33		100		100		160%		100		160%		
						Persentase Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) Berstrata Puri		63,04		0		63,04		62,5		62,5		62,5		73		73		116%		100		159%		
						Persentase Posyandu Balita Berstrata Puri		73,33		0		73,33		100		100		100		69		69		94%		100		136%		
						Persentase Posyandu Lansia Berstrata Puri		92,59		0		92,59		100		100		100		64		64		69%		100		108%		
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	3	7.250.838.400	1	3.978.741.455	1	3.625.419.200	1	719.456.500	0	883.285.000	0	772.991.800	0	1.199.760.480	1	3.575.493.780	100%	99%	2	7.554.235.235	67%	104%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	2	252.464.000	1	15.009.600	1	126.232.000			0		0		1	123.328.000	1	123.328.000	100%	98%	2	138.337.600	100%	55%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	2	130.882.000	1	42.234.000	1	130.882.000	0		0		0		1	130.849.100	1	130.849.100	100%	100%	2	173.083.100	100%	132%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	2	261.904.000	1	110.544.400	1	130.952.000			1		0			129.695.200	1	129.695.200	100%	99%	2	240.239.600	100%	92%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	2	253.540.000	1	70.702.000	1	126.770.000	0		1		0			126.766.000	1	126.766.000	100%	100%	2	197.468.000	100%	78%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	2	259.958.000	1	61.726.000	1	129.979.000	0		0		0		1	127.950.600	1	127.950.600	100%	98%	2	189.676.600	100%	73%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Demangan)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	2	250.970.000	1	33.034.000	1	125.485.000	0		0		1			120.952.300	1	120.952.300	100%	96%	2	153.986.300	100%	61%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																										
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rawan Banjir/Genangan	%	12	75.799.305.260	10	21.942.385.962	17,34	12.580.676.000	0	309.322.000	0	303.043.800	0	394.926.477	17,5	10.885.968.853	17,5	11.893.261.130	101%	95%	28	33.835.647.092	229%	45%	
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rawan Genangan	%	12	75.799.305.260	10	21.942.385.962	17,34	12.580.676.000	0	309.322.000	0	303.043.800	0	394.926.477	17,5	10.885.968.853	17,5	11.893.261.130	101%	95%	28	33.835.647.092	229%	16%	
1	3	2	2.01	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	Unit	5	2.595.195.580	4	2.131.633.580	1	463.562.000	0	984.500	0	223.243.800	0	0	1	230.458.700	1	454.687.000	100%	98%	5	2.586.320.580	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	3	2	2.01	85	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	2	3.304.730.900	1	2.815.231.786	1	1.390.980.000	0	147.405.000	0	79.800.000	0	354.065.877	1	595.242.531	1	1.176.513.408	100%	85%	2	3.991.745.194	100%	121%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	2.01	93	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	6	57.769.028.780	3	14.878.667.346	1,5	7.600.334.000	0	160.932.500	0	0	0	40.222.000	1,5	7.020.284.142	1,5	7.221.438.642	100%	95%	5	22.100.105.988	75%	38%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	2.01	98	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan	Unit	4	12.130.350.000	4	2.116.853.250	2	3.125.800.000	0	-	0	0	0	638.600	2	3.039.983.480	2	3.040.622.080	100%	97%	6	5.157.475.330	150%	43%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	%	100	101.669.000	100	20.445.000	100	786.635.000	0	-	0	-	0	408.661.980	100	244.999.102	100	653.661.082	100%	83%	200	674.106.082	200%	663%	
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	%	100	101.669.000	100	20.445.000	100	786.635.000	0	-	0	-	0	408.661.980	100	244.999.102	100	653.661.082	100%	83%	200	674.106.082	200%	643%	
1	3	3	2.01	25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen	3	101.669.000	1	20.445.000	1	786.635.000	0	-	0	0	0	408.661.980	1	244.999.102	1	653.661.082	100%	83%	2	674.106.082	67%	663%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	3	2.01	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	100	1.118.688.500	0	-	100	1.118.688.500	0	-	0	0	0	0	100	887.942.508	100	887.942.508	100%	79%	100	887.942.508	100%	79%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	%	95	18.318.686.570	0	8.255.711.214	80,1	3.909.631.400	0	259.910.977	0	697.416.213	0	634.522.572	80	1.882.828.531	80	3.474.678.293	100%	89%	80	11.730.389.507	84%	64%	
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	%	95	18.318.686.570	0	8.255.711.214	80,12	3.909.631.400	0	259.910.977	0	697.416.213	0	634.522.572	80	1.882.828.531	80	3.474.678.293	100%	89%	80	11.730.389.507	84%	19%	
1	3	6	2.01	29	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase	16	115.844.751.460	0	42.376.814.363	18	8.443.117.000	0	66.172.000	12	856.668.350	2	650.881.054	4	6.428.018.376	18	8.001.739.780	100%	95%	18	50.378.554.143	113%	43%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	2.01	30	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Dokumen	32	4.696.654.000	35	1.762.615.568	8	937.950.000	0	-	0	0	0	0	7	752.311.050	7	752.311.050	88%	80%	42	2.514.926.618	131%	54%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	2.01	31	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Sistem Drainase	16	13.622.032.570	0	6.493.095.646	12	2.971.681.400	0	193.738.977	0	697.416.213	6	634.522.572	6	1.130.517.481	12	2.656.195.243	100%	89%	12	9.149.290.889	75%	67%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	%	100	101.829.905.880	100	78.245.546.066	100	23.584.359.814	0	238.263.540	0	365.566.600	0	4.088.556.100	100	18.289.321.602	100	22.981.707.842	100%	97%	100	101.227.253.908	100%	99%	
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	%	100	101.829.905.880	100	78.245.546.066	100	23.584.359.814	25	238.263.540	25	365.566.600	25	4.088.556.100	25	18.289.321.602	100	22.981.707.842	100%	97%	200	101.227.253.908	200%	23%	
1	3	8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	200	524.678.300	145	524.678.300	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	145	524.678.300	73%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	16	77.720.867.766	41	77.720.867.766	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	41	77.720.867.766	256%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8	2.01	18	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	8	352.000.000	0	-	8	352.000.000	0	0	1	98.789.000	0	350.000	3	249.140.200	4	348.279.200	50%	99%	4	348.279.200	50%	99%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8	2.01	21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	8	22.927.318.500	0	-	8	22.927.318.500	0	237.911.640	0	266.777.600	1	4.006.136.000	7	17.856.993.902	8	22.367.819.142	100%	98%	8	22.367.819.142	100%	98%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	3	8	2.01	23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	50	305.041.314	0	-	50	305.041.314	0	351.900	0	-	5	82.070.100	40	183.187.500	45	265.609.500	90%	87%	45	265.609.500	90%	87%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	%	100	63.774.346.360	100	41.728.513.860	100	22.045.832.500	0	394.744.000	0	736.129.090	0	4.960.583.700	100	15.582.584.314	100	21.674.041.104	100%	98%	100	63.402.554.964	100%	99%	
1	3	9	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan sesuai Ketentuan	%	100	63.774.346.360	100	41.728.513.860	100	22.045.832.500	0	394.744.000	0	736.129.090	0	4.960.583.700	100	15.582.584.314	100	21.674.041.104	100%	98%	200	63.402.554.964	200%	34%	
1	3	9	2.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	108	41.057.103.846	95	41.057.103.846	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	95	41.057.103.846	88%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	9	2.01	4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	27	671.410.014	27	671.410.014	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	27	671.410.014	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	9	2.01	8	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kawasan	27	22.045.832.500	0	-	27	22.045.832.500	3	394.744.000	5	736.129.090	4	4.960.583.700	15	15.582.584.314	27	21.674.041.104	100%	98%	27	21.674.041.104	100%	98%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi mantab	%	96	367.274.907.819	95	126.325.419.340	96	38.554.253.532	0	1.239.010.000	0	7.724.507.175	0	15.841.410.550	96	13.376.481.922	96	38.181.409.647	100%	99%	100	164.506.828.987	104%	45%	
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	96	367.274.907.819	95	126.325.419.340	96	38.554.253.532	0	1.239.010.000	0	7.724.507.175	0	15.841.410.550	96	13.376.481.922	96	38.181.409.647	100%	99%	191	164.506.828.987	199%	10%	
1	3	10	2.01	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	M²	1000	90.825.007.130	0	193.844.875	0	-	0	0	0	0	0	-	0		0	-	-	-	0	193.844.875	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	29	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	40	5.776.092.300	32	3.565.056.698	10	585.752.832	0	0	0	0	0	1.050.000	10	440.589.100	10	441.639.100	100%	75%	42	4.006.695.798	105%	69%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	32	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	7	109.884.119.582	4	43.366.822.379	2	1.617.050.000	0	47.520.000	0	0	0	846.770.000	2	695.640.000	2	1.589.930.000	100%	98%	6	44.956.752.379	84%	41%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	34	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	12	79.976.239.815	10	41.555.995.054	17	17.157.476.200	1	408.240.000	5	7.365.854.187	7	8.956.972.450	6	365.516.632	19	17.096.583.269	112%	100%	29	58.652.578.323	238%	73%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	38	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Jembatan	240	950.396.000	38	1.085.706.988	120	279.150.000	2	98.900.000	0	1.278.912	0	500.000	10	175.090.000	12	275.768.912	10%	99%	50	1.361.475.900	21%	143%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	40	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	3	11.034.685.500	1	4.704.146.458	2	10.225.020.000	0	-	0	92.200.000	1	2.900.490.000	1	7.166.610.000	2	10.159.300.000	100%	99%	3	14.863.446.458	100%	135%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	41	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur	KM	4	50.650.594.800	2	19.217.078.409	2	3.005.795.000	0	130.800.000	0	1.274.076	1	2.326.510.000	1	524.084.551	2	2.982.668.627	100%	99%	4	22.199.747.036	100%	44%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	15	1.720.268.700	0	807.384.658	15	406.100.000	0	-	0	0	0	1.400.000	10	401.910.000	10	403.310.000	67%	99%	10	1.210.694.658	67%	70%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	46	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	34	16.457.503.992	8	11.829.383.821	17	5.277.909.500	0	553.550.000	3	263.900.000	6	807.718.100		3.607.041.639	9	5.232.209.739	53%	99%	17	17.061.593.560	50%	104%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1						2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	3	11				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	%	96,5	3.064.087.000	75	1.188.350.887	94,95	1.251.039.058	0	40.006.500	0	204.830.900	0	308.179.370	92	507.234.630	92	1.060.251.400	97%	85%	100	2.248.602.287	104%	73%	
1	3	11	2.01			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Pelaku Jasa Kontruksi yang Memenuhi Standart Kompetensi	%	94,94	1.096.700.000	0	389.763.886	94,95	380.352.058	0	40.006.500	0	-	0	39.464.900	92	160.697.530	92	240.168.930	97%	63%	92	629.932.816	97%	22%	
1	3	11	2.01	4		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Orang	700	1.096.700.000	260	389.763.886	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	260	389.763.886	37%	36%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11	2.01	16		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang	80	380.352.058	0	-	80	380.352.058	0	40.006.500	0	0	0	39.464.900	80	160.697.530	80	240.168.930	100%	63%	80	240.168.930	100%	63%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11	2.03			Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	%	95	1.096.700.000	94	798.587.001	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	94	798.587.001	99%	0%	
1	3	11	2.03	3		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Orang	200	1.096.700.000	155	798.587.001	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	155	798.587.001	78%	73%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11	2.04			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	%	95	870.687.000	0	-	94,95	870.687.000	0	-	0	204.830.900	0	268.714.470	95	346.537.100	95	820.082.470	100%	94%	95	820.082.470	100%	94%	
1	3	11	2.04	7		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Badan Usaha	100	870.687.000	0	-	100	870.687.000	0	-	100	204.830.900	0	268.714.470	0	346.537.100	100	820.082.470	100%	94%	100	820.082.470	100%	94%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	100	7.583.600.000	100	2.680.786.415	100	1.596.253.128	0	63.076.482	0	38.775.515	0	465.725.334	100	938.405.323	100	1.505.982.654	100%	94%	100	4.186.769.069	100%	55%	
1	3	12	2.01			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan	Dokumen	4	5.181.600.000	2	1.661.948.829	1	800.000.000	0	-	0	4.788.260	0	317.777.830	1	471.102.662	1	793.668.752	100%	99%	3	2.455.617.581	75%	15%	
1	3	12	2.01	1		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	4	1.497.800.000	3	941.614.623	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	3	941.614.623	75%	63%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.01	2		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	3	2.078.500.000	2	720.334.206	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	2	720.334.206	67%	35%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.01	3		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	2	1.228.500.000	0	-	1	800.000.000	0	0	0	4.788.260	0	317.777.830	1	471.102.662	1	793.668.752	100%	99%	1	793.668.752	50%	65%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.01	4		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	2	376.800.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.01	5		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.01	12		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.03			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pemanfaatan Ruang	Dokumen	4	829.600.000	2	426.902.285	1	396.480.000	0	32.925.766	0	18.923.468	0	122.129.231	1	191.968.225	1	365.946.690	100%	92%	3	792.848.975	75%	44%	
1	3	12	2.03	1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	4	829.600.000	3	426.902.285	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	3	426.902.285	75%	51%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.03	3		Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen	1	396.480.000			1	396.480.000	0	32.925.766	0	18.923.468	0	122.129.231	1	191.968.225	1	365.946.690	100%	92%	1	365.946.690	100%	92%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.04			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dokumen	4	1.572.400.000	2	591.935.301	1	399.773.128	0	30.150.716	0	15.063.787	0	25.818.273	1	275.334.436	1	346.367.212	100%	87%	3	938.302.513	75%	22%	
1	3	12	2.04	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	4	1.572.400.000	3	591.935.301	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	3	591.935.301	75%	38%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	3	12	2.04	8	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	120	399.773.128	0	-	120	399.773.128	20	30.150.716	10	15.063.787	15	25.818.273	65	275.334.436	110	346.367.212	92%	87%	110	346.367.212	92%	87%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																										
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Pengembangan Perumahan	%	100	12.869.561.000	100	6.305.527.641	100	1.922.750.000	0	143.136.000	0	248.430.100	100	1.100.897.940	0	392.133.200	100	1.884.597.240	100%	98%	100	8.190.124.881	100%	64%	
1	4	2	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang dihasilkan	Dokumen	4	538.350.000	2	497.931.100	1	118.950.000	0	-	0	-	1	91.435.000	0	19.804.000	1	111.239.000	100%	94%	3	609.170.100	75%	21%	
1	4	2	2.01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	4	538.350.000	3	497.931.100	1	118.950.000	0	-	0	0	1	91.435.000	0	19.804.000	1	111.239.000	100%	94%	4	609.170.100	100%	113%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	lokasi	4	8.081.261.000	2	4.661.629.279	3	1.657.900.000	3	143.136.000	3	241.335.200	3	955.488.940	0	293.009.200	3	1.632.969.340	100%	98%	5	6.294.598.619	125%	20%	
1	4	2	2.03	6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	unit rumah	6	8.081.261.000	3	4.661.629.279	3	1.657.900.000	0	143.136.000	3	241.335.200	3	955.488.940	0	293.009.200	3	1.632.969.340	100%	98%	6	6.294.598.619	100%	78%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	%	100	4.249.950.000	100	1.145.967.262	100	145.900.000	0	-	0	7.094.900	100	53.974.000	0	79.320.000	100	140.388.900	100%	96%	200	1.286.356.162	200%	3%	
1	4	2	2.05	1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah	Laporan	2	4.249.950.000	101	1.145.967.262	1	145.900.000	0	-	0	7.094.900	1	53.974.000	0	79.320.000	1	140.388.900	100%	96%	102	1.286.356.162	5100%	30%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	%	100	39.641.977.640	100	17.431.420.496	100	2.928.700.000	0	170.013.750	0	2.819.122.600	0	135.628.200	100	284.360.600	100	3.409.125.150	100%	116%	100	20.840.545.646	100%	53%	
1	4	3	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	%	0,5	751.286.000	0,2	393.316.800	0,5	220.000.000	0	1.955.000	0	4.410.000	0	78.163.700	0,5	132.371.000	0,5	216.899.700	100%	99%	0,5	610.216.500	100%	29%	
1	4	3	2.02	14	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	4	751.286.000	3	393.316.800	1	220.000.000	0	1.955.000	0	4.410.000	1	78.163.700	0	132.371.000	1	216.899.700	100%	99%	4	610.216.500	100%	81%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	%	0,5	38.890.691.640	0,5	17.038.103.696	0,5	2.708.700.000	0	168.058.750	0	2.814.712.600	0	57.464.500	0,5	151.989.600	0,5	3.192.225.450	100%	118%	0,5	20.230.329.146	100%	8%	
1	4	3	2.03	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan /Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Dokumen	12	1.239.264.343	11	819.688.800			0	-							0	-	-	-	11	819.688.800	92%	66%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	unit rumah	380	8.603.895.000	156	6.546.184.320	190	2.708.700.000	0	18.356.500	192	2.478.420.000	192	57.464.500	0	151.989.600	192	2.706.230.600	101%	100%	348	9.252.414.920	92%	108%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3	2.03	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	ha	0	15.782.170.640	16	10.491.919.376	0	-	0		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	16	10.491.919.376	-	66%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3	2.03	9	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Ha	16,41	14.504.626.000	0	-	16,41	14.504.626.000	0	149.702.250	0	336.292.600	16,41	3.361.645.765	0	8.650.450.901	16,41	12.498.091.516	100%	86%	16	12.498.091.516	100%	86%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	100	96.514.035.970	100	63.660.859.400	100	16.746.929.527	0	1.827.603.955	0	3.982.137.314	0	4.784.685.706	100	5.703.587.818	100	16.298.014.793	100%	97%	200	79.958.874.193	200%	83%	
1	4	5	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase penyelenggaraan PSU perumahan yang memadai	%	100	96.514.035.970	100	63.660.859.400	100	16.746.929.527	0	1.827.603.955	100	3.982.137.314	100	4.784.685.706	100	5.703.587.818	100	16.298.014.793	100%	97%	100	79.958.874.193	100%	17%	
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	lokasi	3	96.514.035.970	9	63.660.859.400	3	16.746.929.527	0	1.827.603.955	3	3.982.137.314	3	4.784.685.706	0	5.703.587.818	3	16.298.014.793	100%	97%	12	79.958.874.193	400%	83%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																								
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan	%	97	26.424.522.000	82	13.335.833.975	97	6.161.805.425	98	759.567.000	98	1.105.644.400	98	1.656.536.000	98	1.931.979.960	98	5.453.727.360	101%	89%	98	18.789.561.335	101%	71%	
1	5	2	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	97	20.956.219.000	0	8.755.353.337	97	4.426.395.113	98	756.167.000	98	735.556.300	98	1.043.944.500	98	1.556.302.100	98	4.091.969.900	101%	92%	98	12.847.323.237	101%	20%	
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	16	541.871.000	8	288.288.576	8	102.716.000	1	1.650.000	1	21.785.000	2	35.495.000	3	21.798.000	7	80.728.000	88%	79%	15	369.016.576	94%	68%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	12	13.597.631.000	9	4.248.223.250	6	3.030.068.913	2	531.419.200	1	393.339.100	1	741.444.500	2	1.122.477.900	6	2.788.680.700	100%	92%	15	7.036.903.950	125%	52%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	156	1.525.852.000	165	786.724.704	78	383.500.200	45	106.715.800	43	68.984.200	102	32.850.000	0	151.526.700	102	360.076.700	131%	94%	267	1.146.801.404	171%	75%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	80	4.776.694.000	40	3.432.116.807	12	395.939.000	3	51.760.000	3	62.638.000	3	122.225.000	1	105.090.000	10	341.713.000	83%	86%	50	3.773.829.807	63%	79%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	16	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	12	514.171.000	0	-	12	514.171.000	3	64.622.000	3	188.810.000	1	111.930.000	1	155.409.500	8	520.771.500	67%	101%	8	520.771.500	67%	101%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	%	100	4.698.434.000	100	4.580.480.638	100	1.665.758.700	4	3.400.000	25	362.226.100	50	594.631.500	50	374.667.860	129	1.334.925.460	129%	80%	229	5.915.406.098	229%	28%	
1	5	2	2.02	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	8	5.178.973.276	4	2.890.335.176	4	1.133.741.100	0	-	2	341.368.100	2	411.786.800	1	298.762.860	5	1.051.917.760	125%	93%	9	3.942.252.936	113%	76%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.02	11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	24	2.412.026.662	13	1.690.145.462	12	532.017.600	4	3.400.000	3	20.858.000	3	182.844.700	3	75.905.000	13	283.007.700	108%	53%	26	1.973.153.162	108%	82%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Prosentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang berkualitas	%	80	769.869.000	0	-	80	69.651.612	0	-	20	7.862.000	20	17.960.000	20	1.010.000	60	26.832.000	75%	39%	60	26.832.000	75%	3%	
1	5	2	2.03	6	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	24	769.869.000	0	-	12	69.651.612	0	-	4	7.862.000	4	17.960.000	4	1.010.000	12	26.832.000	100%	39%	12	26.832.000	50%	3%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	%	100	7.296.632.000	100	3.946.733.398	100	1.247.902.000	0	290.027.500	0	218.847.402	0	350.159.700	100	441.676.491	100	1.300.711.093	100%	104%	100	5.247.444.491	100%	72%	
1	5	3	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	784.445.000	100	274.239.073	100	26.948.000	0	25.687.500	0	550.000	0	-	100	-	100	26.237.500	100%	97%	100	300.476.573	100%	3%	
1	5	3	2.01	4	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	600	529.445.000	300	224.355.673	300	26.948.000	100	25.687.500	0	550.000	0	0	0	0	100	26.237.500	33%	97%	400	250.593.173	67%	47%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	5.847.787.000	100	3.338.913.689	100	1.007.098.000	25	205.542.000	25	203.327.402	25	317.469.700	25	407.401.491	100	1.133.740.593	100%	113%	100	4.472.654.282	100%	19%	
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	12	388.686.000	8	178.454.007	9	27.484.000	0	0	3	27.474.000	0	0	0	0	3	27.474.000	33%	100%	11	205.928.007	92%	53%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	74	4.676.790.000	19	2.691.013.160	37	889.410.000	37	148.000.000	37	148.000.000	37	296.000.000	0	297.410.000	37	889.410.000	100%	100%	56	3.580.423.160	76%	77%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	2	96.000.000	0	-	1	48.000.000	1	48.000.000	0	0	0	0	0	0	1	48.000.000	100%	100%	1	48.000.000	50%	50%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	600	117.708.000	300	41.673.600	300	42.204.000	0	0	100	11.838.000	0	0	0	30.081.500	100	41.919.500	33%	99%	400	83.593.100	67%	71%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	5	9.542.000	0	-	5	9.542.000	1	9.542.000	1	0	1	0	2	0	5	9.542.000	100%	100%	5	9.542.000	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	200	117.821.000	0	-	200	117.821.000	0	0	25	16.015.402	25	21.469.700	75	79.909.991	125	117.395.093	63%	100%	125	117.395.093	63%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	564.400.000	100	283.230.636	100	93.410.000	0	22.140.000	0	14.970.000	0	32.690.000	100	23.265.000	100	93.065.000	100%	100%	100	376.295.636	100%	16%	
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	24	233.100.000	18	73.500.000	12	83.460.000	36	14.970.000	47	14.970.000	0	29.940.000	4	23.265.000	47	83.145.000	392%	100%	65	156.645.000	271%	67%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	9	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	24	331.300.000	8	209.730.636	12	9.950.000	5	7.170.000	0	0	2	2.750.000	0	0	7	9.920.000	58%	100%	15	219.650.636	63%	66%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase tersusunnya sistem dasar penanggulangan bencana	%	100	100.000.000	0	50.350.000	100	120.446.000	50	36.658.000	0	-	0	-	50	11.010.000	100	47.668.000	100%	40%	100	98.018.000	100%	48%	
1	5	3	2.04	13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	120.446.000	0	-	1	120.446.000	0	36.658.000	0	0	0	0	1	11.010.000	1	47.668.000	100%	40%	1	47.668.000	100%	40%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	7.545.254.000	100	3.191.745.736	100	1.386.141.000	0	134.072.100	0	194.627.250	100	321.339.050	100	409.122.340	100	1.059.160.740	100%	76%	200	4.250.906.476	200%	56%	
1	5	4	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penangangan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	6.941.154.000	100	3.096.379.876	100	1.384.773.000	25	134.072.100	25	194.627.250	25	321.339.050	25	407.842.340	100	1.057.880.740	100%	76%	200	4.154.260.616	200%	15%	
1	5	4	2.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	12	5.409.480.000	6	2.304.041.270	6	1.084.545.000	0	116.390.950	0	162.806.750	0	268.304.800	6	320.243.040	6	867.745.540	100%	80%	12	3.171.786.810	100%	59%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	1.531.674.000	6	792.338.606	6	300.228.000	0	17.681.150	3	31.820.500	3	53.034.250	1	87.599.300	7	190.135.200	117%	63%	13	982.473.806	108%	64%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	4	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Prosentase Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran	%	90	604.100.000	90	95.365.860	90	1.368.000	0	-	0	-		-	90	1.280.000	90	1.280.000	100%	94%	180	96.645.860	200%	0%	
1	5	4	2.02	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	12	604.100.000	6	95.365.860	6	1.368.000	0	-	0	0			5	1.280.000	5	1.280.000	83%	94%	11	96.645.860	92%	16%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																									
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	%	66	15.258.928.296	58	9.892.105.316	66	3.265.196.184	0	151.521.487	0	292.143.000	0	468.270.200	65	2.219.334.000	65	3.131.268.687	98%	96%	65	13.023.374.003	98%	85%	
1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dibina	%	66	15.258.928.296	0	9.892.105.316	66	3.265.196.184	0	151.521.487	0	292.143.000	0	468.270.200	66	2.219.334.000	66	3.131.268.687	100%	96%	66	13.023.374.003	100%	21%	
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	733	1.044.015.417	557	1.213.708.717	214	386.354.400	208	46.795.000	1	113.020.000	209	66.605.000	209	149.852.200	209	376.272.200	98%	97%	766	1.589.980.917	105%	152%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang	6	268.742.380	3	104.894.980	3	47.564.704	3	6.751.182	0	7.159.400	3	13.003.800	3	20.384.000	3	47.298.382	100%	99%	6	152.193.362	100%	57%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	10	968.296.730	5	314.226.600	5	119.188.280	1	8.645.805	3	7.597.000	3	18.530.500	2	81.855.000	9	116.628.305	180%	98%	14	430.854.905	140%	44%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	28	12.977.873.769	14	8.259.275.019	14	2.712.088.800	14	89.329.500	0	164.366.600	14	370.130.900	14	1.967.242.800	14	2.591.069.800	100%	96%	28	10.850.344.819	100%	84%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	100	7.798.657.826	0	6.458.880.889	100	4.480.889.674	0	271.585.482	0	674.417.540	0	2.631.998.061	100	1.566.583.090	100	5.144.584.173	100%	115%	100	11.603.465.062	100%	149%	
1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	100	5.429.261.451	100	5.383.081.307	100	3.857.533.239	0	172.707.732	0	581.503.300	0	2.452.740.161	0	1.387.362.490	0	4.594.313.683	0%	119%	100	9.977.394.990	100%	85%	
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	650	1.205.594.772	376	725.597.101	170	942.717.903	9	27.103.500	9	27.640.200	141	97.692.500	119	111.603.500	119	264.039.700	70%	28%	495	989.636.801	76%	82%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	183	212.607.726	148	92.713.900	63	313.326.936	0	58.548.232	31	40.127.100	141	32.975.600	119	130.583.750	119	262.234.682	189%	84%	267	354.948.582	146%	167%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	43	208.135.881	39	70.856.900	8	26.269.000	3	9.677.000	0	13.200.000	1	0	3	0	7	22.877.000	88%	87%	46	93.733.900	107%	45%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	47	149.330.000	148	94.138.500	8	18.128.000	3	3.240.000	2	3.500.000	1	1.921.161	1	320.000	7	8.981.161	88%	50%	155	103.119.661	330%	69%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	317	286.874.095	388	82.140.000	30	9.500.000	90	4.500.000	0	1.900.000	30	0	0	1.500.000	30	7.900.000	100%	83%	418	90.040.000	132%	31%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1153	2.844.425.390	1208	4.067.969.006	280	2.144.307.800	0	38.393.000	54	441.130.000	324	2.204.538.300	310	990.748.240	310	3.674.809.540	111%	171%	1518	7.742.778.546	132%	272%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	195	522.293.587	94	249.665.900	12	403.283.600	8	31.246.000	0	54.006.000	4	115.612.600	3	152.607.000	15	353.471.600	125%	88%	109	603.137.500	56%	115%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	100	2.369.396.375	100	1.075.799.582	100	623.356.435	0	98.877.750	0	92.914.240	0	179.257.900	100	179.220.600	100	550.270.490	100%	88%	100	1.626.070.072	100%	23%	
1	6	4	2.02	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	90	876.874.045	67	433.083.742	35	272.075.800	9	31.755.000	4	36.960.000	3	63.190.000	17	83.125.000	33	215.030.000	94%	79%	100	648.113.742	111%	74%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	660	371.144.640	647	194.894.400	160	89.906.700	126	13.650.400	0	15.597.400	324	28.358.300	138	32.300.600	138	89.906.700	86%	100%	785	284.801.100	119%	77%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	4	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	315	202.048.254	270	57.316.040	105	9.284.800	10	3.784.800	0	3.500.000	141	2.000.000	0	0	141	9.284.800	134%	100%	411	66.600.840	130%	33%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	53	71.878.700	34	44.567.100	5	20.134.000	0	0	0	0	1	9.742.000	1	0	2	9.742.000	40%	48%	36	54.309.100	68%	76%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	230	137.967.546	110	33.900.300	85	25.309.635	10	15.854.550	32	1.033.840	141	8.301.600	0	0	141	25.189.990	166%	100%	251	59.090.290	109%	43%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	417	369.946.190	712	159.660.000	160	79.150.000	115	12.300.000	0	13.550.000	348	24.600.000	140	28.700.000	140	79.150.000	88%	100%	852	238.810.000	204%	65%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	155	243.917.000	75	117.792.000	75	118.431.500	75	21.533.000	0	21.533.000	525	43.066.000	75	32.299.500	75	118.431.500	100%	100%	150	236.223.500	97%	97%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	58	95.620.000	20	34.586.000	15	9.064.000	10	0	0	740.000	2	0	3	2.795.500	15	3.535.500	100%	39%	35	38.121.500	60%	40%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	91	46.549.372.750	93	33.475.564.197	91	13.120.631.330	0	877.340.773	0	2.526.271.570	0	2.836.472.038	90	5.889.519.978	90	12.129.604.359	99%	92%	90	45.605.168.556	99%	98%	
1	6	5	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	%	95	33.922.800	92	5.356.647	95	4.183.000	0	400.000	0	-	0	200.000	95	650.000	95	1.250.000	100%	30%	187	6.606.647	197%	4%	
1	6	5	2.01	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	78	15.516.000	27	3.310.000	8	2.100.000	3	350.000	0	0	5	200.000	2	350.000	10	900.000	125%	43%	37	4.210.000	47%	27%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.01	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	64	17.544.800	11	1.946.647	4	1.883.000	0	0	0	0	0	0	1	300.000	1	300.000	25%	16%	12	2.246.647	19%	13%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.01	3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	64	862.000	4	100.000	4	200.000	1	50.000	0	0	2	0	0	0	3	50.000	75%	25%	7	150.000	11%	17%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	46.515.449.950	100	33.470.207.550	100	13.116.448.330	0	876.940.773	0	2.526.271.570	0	2.836.272.038	100	5.888.869.978	100	12.128.354.359	100%	92%	100	45.598.561.909	100%	26%	
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	73.412	4.926.741.250	96052	2.475.819.800	24685	1.105.190.422	25410	85.602.100	0	227.403.000	23993	292.783.400	23762	464.053.000	23993	1.069.841.500	97%	97%	120045	3.545.661.300	164%	72%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	8000	3.456.501.280	36750	1.479.609.800	4000	278.544.300	3600	232.521.000	0	1.350.000	0	0	4153	38.231.600	4153	272.102.600	104%	98%	40903	1.751.712.400	511%	51%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	Keluarga	8000	37.702.271.930	33876	29.392.785.850	4000	10.747.233.693	508	521.539.873	327	2.245.955.110	3772	2.446.412.068	800	4.614.257.594	3772	9.828.164.645	94%	91%	37648	39.220.950.495	471%	104%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	80	429.935.490	56	121.992.100	40	985.479.915	0	37.277.800	17	51.563.460	0	97.076.570	221	772.327.784	221	958.245.614	553%	97%	277	1.080.237.714	346%	251%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	%	100	2.787.910.815	100	1.417.375.794	100	447.562.100	0	51.479.500	0	53.335.200	0	98.761.200	100	129.242.700	100	332.818.600	100%	74%	100	1.750.194.394	100%	63%	
1	6	6	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan	%	100	377.739.777	100	66.402.510	100	52.095.100	0	3.053.500	0	5.500.200	0	10.135.200	100	31.405.700	100	50.094.600	100%	96%	100	116.497.110	100%	13%	
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	7200	151.530.373	3775	31.197.210	1700	27.937.500	5	3.053.500	0	5.500.200	451	2.556.400	1115	23.826.900	1571	34.937.000	92%	125%	5346	66.134.210	74%	44%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2600	68.951.724	1325	30.355.300	17	15.157.600	0	0	0	0	17	7.578.800	0	7.578.800	17	15.157.600	100%	100%	1342	45.512.900	52%	66%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6	2.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	157.257.680	20	4.850.000	17	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%	20	4.850.000	40%	3%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana	%	100	2.410.171.038	100	1.350.973.284	100	395.467.000	0	48.426.000	0	47.835.000	0	88.626.000	100	97.837.000	100	282.724.000	100%	71%	100	1.633.697.284	100%	12%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	6	6	2.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	2	438.160.580	1	285.267.300	1	18.182.000	1	9.091.000	0	0	2	9.091.000	0	0	1	18.182.000	100%	100%	2	303.449.300	100%	69%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	106	1.972.010.458	76	1.065.705.984	26	377.285.000	26	39.335.000	0	47.835.000	23	79.535.000	23	97.837.000	30	264.542.000	115%	70%	106	1.330.247.984	100%	67%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	100	722.680.670	100	412.959.398	100	170.200.600	0	15.065.500	0	19.419.000	0	94.020.600	100	26.665.500	100	155.170.600	100%	91%	100	568.129.998	100%	79%	
1	6	7	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	%	100	722.680.670	100	412.959.398	100	170.200.600	0	15.065.500	0	19.419.000	0	94.020.600	100	26.665.500	100	155.170.600	100%	91%	100	568.129.998	100%	21%	
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	1932	722.680.670	966	412.959.398	966	170.200.600	966	15.065.500	0	19.419.000	0	94.020.600	0	26.665.500	966	155.170.600	100%	91%	1932	568.129.998	100%	79%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2023)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024) PAK	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) PAK	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I	II	III	IV					

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																										
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	%	35	4.375.201.450	23	3.311.987.531	50	2.596.000.000	0	140.930.800	0	633.378.200	0	783.203.870	59	935.789.225	59	2.493.302.095	118%	96%	100	5.805.289.626	286%	133%	
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang mengikuti Uji Kompetensi	Orang	440	4.120.201.450	310	3.226.743.296	112	2.571.900.000	0	140.930.800	0	632.653.700	29	783.203.870	240	917.049.725	269	2.473.838.095	240%	96%	579	5.700.581.391	132%	60%	
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	607	4.120.201.450	457	3.226.743.296	112	2.571.900.000	12	140.930.800	23	632.653.700	30	783.203.870	209	917.049.725	209	2.473.838.095	187%	96%	666	5.700.581.391	110%	138%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase LPKS yang berijin	%	20	55.000.000	0	73.670.235	50	10.480.000	0	-	0	724.500	0	-	50	8.953.600	50	9.678.100	100%	92%	50	83.348.335	250%	18%	
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	120	55.000.000	66	73.670.235	40	10.480.000	0	-	0	724.500	0	0	40	8.953.600	40	9.678.100	100%	92%	106	83.348.335	88%	152%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	3	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan sosialisasi Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	perusahaan	60	200.000.000	0	11.574.000	30	13.620.000	0	-	0	-	0	-	30	9.785.900	30	9.785.900	100%	72%	30	21.359.900	50%	5%	
2	7	3	2.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	2	200.000.000	1	11.574.000	1	13.620.000	0	-	0	0	0	0	1	9.785.900	1	9.785.900	100%	72%	2	21.359.900	100%	11%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan melalui informasi bursa kerja	%	15	2.158.953.378	0	814.411.339	15	253.256.682	0	29.104.920	0	42.287.194	0	89.723.532	15	86.227.305	15	247.342.951	100%	98%	15	1.061.754.290	100%	49%	
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja	Orang	1140	2.158.953.378	752	814.411.339	235	253.256.682	0	29.104.920	0	42.287.194	103	89.723.532	196	86.227.305	299	247.342.951	127%	98%	1051	1.061.754.290	92%	11%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
2	7	4	2.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	4	745.829.416	3	367.747.317	1	123.645.220	0	24.704.920	0	16.126.200	0	31.935.500	0	45.096.105	1	117.862.725	100%	95%	4	485.610.042	100%	65%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	2192	1.355.837.880	1692	446.664.022	150	72.325.380	0	4.400.000	8	26.160.994	103	30.058.332	594	11.588.100	594	72.207.426	396%	100%	2286	518.871.448	104%	38%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	4	2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	50	57.286.082	0	-	50	57.286.082	0	-	0	0	25	27.729.700	27	29.543.100	52	57.272.800	104%	100%	52	57.272.800	104%	100%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	%	16	7.712.488.490	0	4.543.537.836	16	3.667.160.448	0	619.958.790	0	408.381.655	0	999.642.343	15	1.146.595.292	15	3.174.578.080	94%	87%	15	7.718.115.916	94%	100%	
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mendapatkan bimbingan PP dan PKB	Perusahaan	100	1.878.698.170	0	705.996.716	50	154.223.800	0	9.999.000	0	18.921.800	0	112.050.000	50	11.102.000	50	152.072.800	100%	99%	50	858.069.516	50%	8%	
2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	93	791.480.550	53	269.771.350	20	123.973.800	0	9.999.000	0	6.586.800	1	105.000.000	15	267.000	16	121.852.800	80%	98%	69	391.624.150	74%	49%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	2	1.087.217.620	1	436.225.366	1	30.250.000	0	-	0	12.335.000	0	7.050.000	1	10.835.000	1	30.220.000	100%	100%	2	466.445.366	100%	43%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase permasalahan HI yang terselesaikan	%	75	5.833.790.320	0	3.837.541.120	75	3.512.936.648	0	609.959.790	0	389.459.855	0	887.592.343	75	1.135.493.292	75	3.022.505.280	100%	86%	75	6.860.046.400	100%	52%	
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	60	423.042.880	50	203.410.617	15	75.931.500	0	4.400.000	0	5.300.000	2	10.718.000	11	55.513.500	13	75.931.500	87%	100%	63	279.342.117	105%	66%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	31646	5.410.747.440	22646	3.634.130.503	10000	3.437.005.148	971	605.559.790	351	384.159.855	6443	876.874.343	8759	1.079.979.792	16524	2.946.573.780	165%	86%	39170	6.580.704.283	124%	122%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																										
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	%	100	2.002.951.910	18	1.782.038.870	100	690.003.099	0	122.159.710	0	159.997.700	0	189.548.660	100	248.685.566	100	720.391.636	100%	104%	100	2.502.430.506	100%	125%	
2	8	2	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program yang di ARG	%	100	1.168.500.429	20	521.240.892	100	121.083.555	0	42.891.910	0	7.835.300	0	44.012.705	100	23.397.600	100	118.137.515	100%	98%	100	639.378.407	100%	10%	
2	8	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	64	470.005.554	32	295.774.592	34	29.500.900	12	29.500.900	0	0	22	0	0	0	34	29.500.900	100%	100%	66	325.275.492	103%	69%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	68	254.292.689	34	109.433.750	34	49.018.755	10	13.391.010	0	7.835.300	24	9.598.805	0	17.917.600	34	48.742.715	100%	99%	68	158.176.465	100%	62%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	34	290.575.678	34	82.766.600	34	32.647.405	0	0	0	0	34	24.497.405	0	5.480.000	34	29.977.405	100%	92%	68	112.744.005	200%	39%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
2	8	2	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	34	153.626.508	34	33.265.950	34	9.916.495	0	0	0	0	34	9.916.495	0	0	34	9.916.495	100%	100%	68	43.182.445	200%	28%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	%	32,5	270.129.736	13	109.610.900	32,5	9.445.955	0	0	0	-	32	9.445.955	0	-	32	9.445.955	98%	100%	45	119.056.855	138%	3%	
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	16	270.129.736	8	109.610.900	1	9.445.955	0	0	0	0	1	9.445.955	0		1	9.445.955	100%	100%	9	119.056.855	56%	44%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	%	60	564.321.745	50	1.151.187.078	60	559.473.589	0	79.267.800	0	152.162.400	0	136.090.000	60	225.287.966	60	592.808.166	100%	106%	55	1.743.995.244	92%	105%	
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	1380	334.463.509	1073	941.841.428	580	538.961.003	40	79.267.800	144	151.342.400	350	116.417.414	95	225.287.966	629	572.315.580	108%	106%	1702	1.514.157.008	123%	453%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	2	229.858.236	1	209.345.650	1	20.512.586	0	0	0	820.000	1	19.672.586	0	0	1	20.492.586	100%	100%	2	229.838.236	100%	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	%	100	1.266.150.020	0	701.031.731	100	293.133.953	0	63.113.503	0	46.660.500	0	61.779.500	100	118.064.500	100	289.618.003	100%	99%	100	990.649.734	100%	78%	
2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	%	100	328.512.610	67,39	181.765.328	100	83.789.640	0	27.704.600	0	21.060.500	0	6.245.000	100	28.489.000	100	83.499.100	100%	100%	100	265.264.428	100%	25%	
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	218.091.655	1	120.285.593	1	49.710.060	0	-	0	21.060.500	0	0	1	28.489.000	1	49.549.500	100%	100%	2	169.835.093	100%	78%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	27	110.420.955	27	61.479.735	34	34.079.580	27	27.704.600	0	0	0	6.245.000	0	0	27	33.949.600	79%	100%	54	95.429.335	200%	86%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyedia layanan yang melaksanakan rujukan lanjutan	%	95	799.587.270	53	479.293.291	95	196.956.199	0	31.068.919	0	25.600.000	0	52.736.500	95	85.689.500	95	195.094.919	100%	99%	95	674.388.210	100%	24%	
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	40	799.587.270	11	479.293.291	20	196.956.199	20	31.068.919	0	25.600.000	20	52.736.500	6	85.689.500	20	195.094.919	100%	99%	31	674.388.210	78%	84%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	%	100	138.050.140	100	39.973.112	100	12.388.114	0	4.339.984	0	-	0	2.798.000	100	3.886.000	100	11.023.984	100%	89%	100	50.997.096	100%	8%	
2	8	3	2.03	3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	73	138.050.140	57	39.973.112	12	12.388.114	0	4.339.984	6	0	6	2.798.000	1	3.886.000	13	11.023.984	108%	89%	70	50.997.096	96%	37%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
2	8	3	2.03	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	91.177.890	2	33.032.680	1	6.795.800	1	6.666.200	0	0	0	0	0	0	1	6.666.200	100%	98%	3	39.698.880	150%	44%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	%	30	523.507.579	16	451.851.740	30	210.271.527	0	74.753.750	0	23.732.577	0	67.747.700	30	33.785.500	30	200.019.527	100%	95%	40	651.871.267	132%	125%	
2	8	4	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	%	100	188.575.962	80	329.670.410	100	148.802.727	0	55.454.150	0	20.432.577	0	35.478.500	100	27.185.500	100	138.550.727	100%	93%	85	468.221.137	85%	73%	
2	8	4	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	34	188.575.962	34	142.921.430	3	57.905.727	1	36.263.150	2	20.432.577	0	0	0	1.210.000	3	57.905.727	100%	100%	37	200.827.157	109%	106%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	2.01	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	2	678.830.237	1	186.748.980	1	90.897.000	0	19.191.000	0	0	0	35.478.500	1	25.975.500	1	80.645.000	100%	89%	2	267.393.980	100%	39%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang aktif dalam peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak anak	%	100	334.931.617	100	122.181.330	100	61.468.800	0	19.299.600	0	3.300.000	0	32.269.200	100	6.600.000	100	61.468.800	100%	100%	100	183.650.130	100%	18%	
2	8	4	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	300	334.931.617	260	122.181.330	150	61.468.800	30	19.299.600	0	3.300.000	90	32.269.200	0	6.600.000	120	61.468.800	80%	100%	380	183.650.130	127%	55%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Terpenuhinya Data terpilah gender dan anak	Dokumen	3	974.733.426	1	398.530.503	1	67.627.961	0	6.780.000	0	20.769.768	0	24.068.193	1	6.600.000	1	58.217.961	100%	86%	2	456.748.464	67%	47%	
2	8	5	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengumpulan data gender dan anak	%	100	974.733.426	100	398.530.503	100	67.627.961	0	6.780.000	0	20.769.768	0	24.068.193	100	6.600.000	100	58.217.961	100%	86%	100	456.748.464	100%	6%	
2	8	5	2.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	490.365.534	2	241.087.600	1	67.627.961	0	6.780.000	0	20.769.768	2	24.068.193	0	6.600.000	2	58.217.961	200%	86%	4	299.305.561	100%	61%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	%	42,2	1.872.636.980	12,5	830.235.680	42,2	326.795.688	0	61.627.269	0	25.814.000	0	68.188.350	42	108.887.432	42	264.517.051	100%	81%	42	1.094.752.731	100%	58%	
2	8	6	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka pemenuhan hak anak	%	38	242.238.865	15	116.786.751	38	59.474.369	0	31.629.069	0	9.409.200	0	_	35	15.230.000	35	56.268.269	92%	95%	35	173.055.020	92%	23%	
2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	242.238.865	2	116.786.751	1	59.474.369	0	31.629.069	0	9.409.200	0	0	1	15.230.000	1	56.268.269	100%	95%	3	173.055.020	150%	71%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%	27	1.630.398.115	15	713.448.929	27	267.321.319	0	29.998.200	0	16.404.800	0	68.188.350	27	93.657.432	27	208.248.782	100%	78%	27	921.697.711	100%	13%	
2	8	6	2.02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	335	384.540.695	235	125.842.796	100	16.983.948	0	0	0	0	0	7.971.000	100	9.005.532	100	16.976.532	100%	100%	335	142.819.328	100%	37%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
2	8	6	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	552.063.000	1	268.771.299	1	138.169.750	0	16.250.500	0	11.994.800	0	45.782.350	1	20.260.300	1	94.287.950	100%	68%	2	363.059.249	100%	66%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	492.138.250	3	206.585.754	1	71.964.700	0	13.747.700	0	4.410.000	0	10.310.000	1	34.112.500	1	62.580.200	100%	87%	4	269.165.954	100%	55%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	201.656.170	1	112.249.080	1	40.202.921	0	0	0	0	0	4.125.000	1	30.279.100	1	34.404.100	100%	86%	2	146.653.180	100%	73%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	%	0,04	861.023.559	1	314.983.410	0,04	73.268.687	0	2.510.000	0	1.800.000	0	51.738.500	0,04	13.140.000	0,04	69.188.500	100%	94%	1,04	384.171.910	2600%	45%	
2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sekolah yang terlibat dalam perlindungan Anak	%	69,5	261.751.620	43,2	144.106.624	69,5	21.183.822	0	1.200.000	0	1.800.000	0	16.206.500	70	1.600.000	70	20.806.500	101%	98%	70	164.913.124	101%	8%	
2	8	7	2.01	3	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	Kegiatan	1	21.183.822	0	-	1	21.183.822	0	1.200.000	0	1.800.000	1	16.206.500	7	1.600.000	8	20.806.500	800%	98%	8	20.806.500	800%	98%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus	%	100	401.197.341	100	122.991.936	100	28.754.485	0	900.000	0	-	100	14.243.000	0	11.540.000	100	26.683.000	100%	93%	100	149.674.936	100%	7%	
2	8	7	2.02	5	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	12	15.016.000	0	-	12	15.016.000	0	900.000	0	0	2	3.600.000	16	9.790.000	18	14.290.000	150%	95%	18	14.290.000	150%	95%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	2.02	6	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Orang	12	13.738.485	0	-	12	13.738.485	0	0	0	0	10	10.643.000	16	1.750.000	16	12.393.000	133%	90%	16	12.393.000	133%	90%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang terlibat dalam perlindungan Khusus Anak	%	100	198.074.598	100	47.884.850	100	23.330.380	0	410.000	0	-	100	21.289.000		-	100	21.699.000	100%	93%	100	69.583.850	100%	11%	
2	8	7	2.03	5	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kegiatan	1	23.330.380	0	-	1	23.330.380	0	410.000	0	0	1	21.289.000	0	0	1	21.699.000	100%	93%	1	21.699.000	100%	93%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																										
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase Angka Kecukupan Energi	%	100	4.379.600.000	97	2.624.688.416	100	391.234.000	0	69.706.250	0	33.864.000	0	213.933.200	101,4	66.758.350	101,4	384.261.800	101%	98%	198	3.008.950.216	198%	69%	
2	9	3	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Prosentase ketersediaan pangan utama	%	100	1.219.966.000	106	924.012.564	100	226.234.000	0	30.682.200	0	28.241.500	0	111.843.050	100	51.999.650	100	222.766.400	100%	98%	206	1.146.778.964	206%	18%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
2	9	3	2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	Laporan	2	717.816.000	1	713.333.065	1	175.609.000	0	26.907.700	0	18.463.000	0	96.652.050	1	31.788.550	1	173.811.300	100%	99%	2	887.144.365	100%	124%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	2.01	12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Laporan	2	17.200.000	0	-	2	17.200.000	0	574.500	0	5.078.500	1	6.831.000	1	3.056.300	2	15.540.300	100%	90%	2	15.540.300	100%	90%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	2.01	14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Laporan	4	33.425.000	0	-	4	33.425.000	0	3.200.000	0	4.700.000	0	8.360.000	4	17.154.800	4	33.414.800	100%	100%	4	33.414.800	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi / AKE	kkal/kapita	2100	3.159.634.000	2100	1.700.675.852	2000	165.000.000	0	39.024.050	0	5.622.500	0	102.090.150	2028	14.758.700	2028	161.495.400	101%	98%	4128	1.862.171.252	197%	5%	
2	9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	8	195.050.000	8	97.644.480	1	43.700.000	0	-	0	1.622.500	0	34.750.550	1	4.085.200	1	40.458.250	100%	93%	9	138.102.730	113%	71%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	6	2.964.584.000	2	1.603.031.372	2	121.300.000	0	39.024.050	0	4.000.000	1	67.339.600	1	10.673.500	2	121.037.150	100%	100%	4	1.724.068.522	67%	58%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase daerah rentan dan rawan pangan	%	22	60.000.000	0	32.473.700	22	58.200.000	0	8.000.000	0	13.167.600	0	20.340.000	22	15.420.000	22	56.927.600	100%	98%	22	89.401.300	100%	149%	
2	9	4	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan	Dokumen	2	60.000.000	0	32.473.700	1	58.200.000	0	8.000.000	0	13.167.600	0	20.340.000	1	15.420.000	1	56.927.600	100%	98%	1	89.401.300	50%	95%	
2	9	4	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	4	60.000.000	2	32.473.700	1	58.200.000	0	8.000.000	0	13.167.600	0	20.340.000	1	15.420.000	1	56.927.600	100%	98%	3	89.401.300	75%	149%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase pangan segar aman yang teruji	%	80	741.622.000	98	389.947.029	80	85.631.000	0	8.669.800	0	50.707.150	0	14.796.086	92,34	5.791.500	92,34	79.964.536	115%	93%	190	469.911.565	238%	63%	
2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	lokasi	32	741.622.000	16	389.947.029	8	85.631.000	0	8.669.800	0	50.707.150	2	14.796.086	4	5.791.500	6	79.964.536	75%	93%	22	469.911.565	69%	11%	
2	9	5	2.01	7	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	60.656.000	0	-	1	60.656.000	0	856.500	0	49.112.500	0	2.240.836	1	3.324.000	1	55.533.836	100%	92%	1	55.533.836	100%	92%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	5	2.01	9	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	24.975.000	0	-	1	24.975.000	0	7.813.300	0	1.594.650	0	12.555.250	1	2.467.500	1	24.430.700	100%	98%	1	24.430.700	100%	98%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																										
2	10	2			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Prosentase Pengelolaan Izin Lokasi	%	100	464.901.600	100	422.752.225	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	100	422.752.225	100%	91%	
2	10	2	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pemberian izin lokasi	%	100	464.901.600	100	422.752.225	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	100	422.752.225	100%	0%	
2	10	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Persentase pemberian rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) sesuai ketentuan	%	100	464.901.600	300	422.752.225	0	-	0	-	0	0	0		0	0	0	-	-	-	300	422.752.225	300%	91%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	%	100	97.400.000	100	65.207.935	100	32.413.750	0	-	0	-	100	9.200.150	0	19.562.500	100	28.762.650	100%	89%	100	93.970.585	100%	96%	
2	10	4	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	%	100	97.400.000	100	65.207.935	100	32.413.750	0	-	0	-	100	9.200.150	0	19.562.500	100	28.762.650	100%	89%	100	93.970.585	100%	30%	
2	10	4	2.01	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	97.400.000	1	65.207.935	1	32.413.750	0	-			1	9.200.150	0	19.562.500	1	28.762.650	100%	89%	2	93.970.585	100%	96%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Prosentase Penatagunaan Tanah	%	100	360.000.000	100	341.315.563	100	773.378.500	0	88.390.550	100	86.802.410	100	97.301.900	0	376.269.554	100	648.764.414	100%	84%	100	990.079.977	100%	275%	
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah	%	100	360.000.000	100	341.315.563	100	773.378.500	0	88.390.550	100	86.802.410	100	97.301.900	0	376.269.554	100	648.764.414	100%	84%	100	990.079.977	100%	180%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
2	10	10	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	20	360.000.000	10	341.315.563	10	773.378.500	5	88.390.550	2	86.802.410	2	97.301.900	0	376.269.554	9	648.764.414	90%	84%	19	990.079.977	95%	275%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																									
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	%	79,5	1.680.124.000	72	1.059.811.816	79,5	279.440.000	0	3.960.000	0	6.820.000	48,71	224.478.880	0	36.496.000	48,71	271.754.880	61%	97%	121	1.331.566.696	152%	79%	
2	11	2	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia	dokumen	7	1.162.506.000	3	585.718.331	1	119.440.000	0	3.960.000	0	4.470.000	1	72.490.550	1	31.698.500	1	112.619.050	100%	94%	4	698.337.381	57%	10%	
2	11	2	2.01	6	Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	dokumen	1	148.000.000	0	-	1	119.440.000	0	3.960.000	0	4.470.000	1	72.490.550	0	31.698.500	1	112.619.050	100%	94%	1	112.619.050	100%	76%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi kajian LH yang tersedia	dokumen	4	517.618.000	2	474.093.485	1	160.000.000	0	-	0	2.350.000	1	151.988.330	0	4.797.500	1	159.135.830	100%	99%	3	633.229.315	75%	31%	
2	11	2	2.02	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	3	517.618.000	3	474.093.485	1	160.000.000	0	0	0	2.350.000	0	151.988.330	1	4.797.500	1	159.135.830	100%	99%	4	633.229.315	133%	122%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	%	50,1	5.260.125.365	53	3.503.295.074	50,1	1.246.691.086	0	341.088.050	12,39	120.157.450	17,32	357.819.950	33,2	423.825.838	62,88	1.242.891.288	126%	100%	63	4.746.186.362	126%	90%	
2	11	3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya	kegaitan/ usaha	177	3.783.012.365	20	2.343.352.843	79	907.691.086	0	311.811.100	34	91.613.850	18	226.312.350	34	275.849.500	86	905.586.800	109%	100%	86	3.248.939.643	49%	24%	
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	2	2.276.442.000	1	1.221.444.762	1	279.860.708	0	68.361.100	0	52.647.850	0	61.516.250	1	97.217.000	1	279.742.200	100%	100%	2	1.501.186.962	100%	66%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	2	1.506.570.365	1	1.121.908.081	1	627.830.378	0	243.450.000	0	38.966.000	0	164.796.100	1	178.632.500	1	625.844.600	100%	100%	2	1.747.752.681	100%	116%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah usaha / kegiatan yang sudah melakukan pengolahan limbah cair	usaha/ kegaitan	35	1.477.113.000	0	1.159.942.231	18	339.000.000	0	29.276.950	9	28.543.600	8	131.507.600	0	147.976.338	17	337.304.488	94%	99%	17	1.497.246.719	49%	23%	
2	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	laporan	4	1.070.113.000	2	831.682.131	2	245.000.000	0	14.957.950	1	7.065.100	0	109.570.100	1	111.730.538	2	243.323.688	100%	99%	4	1.075.005.819	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.02	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	titik	4	407.000.000	2	328.260.100	2	94.000.000	0	14.319.000	1	21.478.500	1	21.937.500	0	36.245.800	2	93.980.800	100%	100%	4	422.240.900	100%	104%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Prosentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	%	100	481.500.000	97	244.910.300	100	10.000.000	0	0	0	-	0	221.950	100	9.265.000	100	9.486.950	100%	95%	100	254.397.250	100%	53%	
2	11	4	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	spesies	352	481.500.000	340	244.910.300	352	10.000.000	0	0	0	-	0	221.950	100	9.265.000	100	9.486.950	28%	95%	440	254.397.250	125%	2%	
2	11	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	dokumen	4	481.500.000	3	244.910.300	1	10.000.000	0	0	0	0	0	221.950	1	9.265.000	1	9.486.950	100%	95%	4	254.397.250	100%	53%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)	%	78	598.627.000	74	295.252.166	78	50.000.000	0	0	30	-	20	13.750.000	22	35.606.500	72	49.356.500	92%	99%	72	344.608.666	92%	58%	
2	11	5	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)	lokasi	51	598.627.000	16	295.252.166	17	50.000.000	0	0	10	-	2	13.750.000	5	35.606.500	17	49.356.500	100%	99%	33	344.608.666	65%	8%	
2	11	5	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha integrasi	dokumen	17	598.627.000	13	295.252.166	5	50.000.000	0	0	3	0	1	13.750.000	1	35.606.500	5	49.356.500	100%	99%	18	344.608.666	106%	58%	Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	88,2	2.148.065.600	65	943.324.150	88,2	264.150.000	0	10.040.000	80	36.869.500	4	100.825.000	5,41	74.891.000	89,41	222.625.500	101%	84%	89	1.165.949.650	101%	54%	
2	11	6	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	perusahaan	50	2.148.065.600	15	943.324.150	18	264.150.000	0	10.040.000	7	36.869.500	5	100.825.000	8	74.891.000	20	222.625.500	111%	84%	35	1.165.949.650	70%	10%	
2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	dokumen	8	1.407.303.100	5	553.798.900	4	159.150.000	0	10.040.000	2	23.086.500	1	50.691.000	1	74.891.000	4	158.708.500	100%	100%	9	712.507.400	113%	51%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6	2.01	5	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	10	130.000.000	0	-	10	105.000.000	0	0	4	13.783.000	2	50.134.000	4	39.622.300	10	103.539.300	100%	99%	10	103.539.300	100%	80%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	%	100	3.254.550.000	100	1.524.845.934	100	715.786.000	0	41.800.700	30	24.057.500	25	173.958.000	40	462.793.950	95	702.610.150	95%	98%	100	2.227.456.084	100%	68%	
2	11	8	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	umlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	kegiatan	60	3.254.550.000	31	1.524.845.934	15	715.786.000	0	41.800.700	3	24.057.500	5	173.958.000	7	462.793.950	15	702.610.150	100%	98%	46	2.227.456.084	77%	22%	
2	11	8	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	16	3.254.550.000	12	1.524.845.934	4	715.786.000	0	41.800.700	1	24.057.500	1	173.958.000	2	462.793.950	4	702.610.150	100%	98%	16	2.227.456.084	100%	68%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	100	393.000.000	100	316.140.600	100	247.000.000	0	38.233.250	40	50.135.000	0	107.193.000	100	50.145.050	140	245.706.300	140%	99%	100	561.846.900	100%	143%	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	jumlah pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	kasus	20	393.000.000	20	316.140.600	5	247.000.000	0	38.233.250	2	50.135.000	2	107.193.000	3	50.145.050	7	245.706.300	140%	99%	27	561.846.900	135%	63%	
2	11	10	2.01	4	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	5	159.000.000	0	-	5	127.000.000	0	14.386.500	2	19.955.000	2	64.748.500	3	27.150.100	7	126.240.100	140%	99%	7	126.240.100	140%	79%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	2.01	5	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	6	150.000.000	0	-	5	120.000.000	1	23.846.750	2	30.180.000	2	42.444.500	2	22.994.950	7	119.466.200	140%	100%	7	119.466.200	117%	80%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	persen	71	83.599.382.000	72,98	12.712.503.674	71	5.557.300.000	0	471.996.750	66,04	225.764.650	0	2.031.772.092	4,93	1.170.334.080	70,97	3.899.867.572	100%	70%	144	16.612.371.246	203%	20%	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola	ton	163697	83.153.382.000	82783	11.985.159.763	43790	5.452.500.000	0	468.946.750	16932,7	225.764.650	13,591	2.011.007.092	20372,5	1.101.868.430	37318,7	3.807.586.922	85%	70%	1E+05	15.792.746.685	73%	5%	
2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	82	632.582.000	27	90.878.100	41	99.000.000	0	95.432.650	2	0	14	0	29	1.173.500	45	96.606.150	110%	98%	72	187.484.250	88%	30%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	unit	6	57.700.000.000	3	3.350.580.832	3	2.547.500.000	0	55.500.050	2	0	0	1.304.829.165	1	1.100.694.930	3	2.461.024.145	100%	97%	6	5.811.604.977	100%	10%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	19	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Ton	5	750.000.000	0	-	5	468.000.000	0	20.590.000	1,5	11.637.000	0,85	30.089.000	2,25	351.987.060	4,6	414.303.060	92%	89%	5	414.303.060	92%	55%	Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
2	11	11	2.01	20	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten /kota atau TPA/TPST Regional	Ton	32.280	4.266.400.000	0	-	32280	2.338.000.000	0	297.424.050	12029,5	214.127.650	4806,4	676.088.927	9648,4	813.397.850	26484,3	2.001.038.477	82%	86%	26484	2.001.038.477	82%	47%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	jumlah Pihak Swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi	kelompok	140	446.000.000	45	727.343.911	50	104.800.000	0	3.050.000	20	-	8	20.765.000	20	68.465.650	48	92.280.650	96%	88%	93	819.624.561	66%	21%	
2	11	11	2.03	2	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	unit	6	446.000.000	3	727.343.911	3	104.800.000	0	3.050.000	0	0	1	20.765.000	2	68.465.650	3	92.280.650	100%	88%	6	819.624.561	100%	184%	Dinas Lingkungan Hidup
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																									
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	%	85	1.436.352.900	83	694.629.070	85	87.604.025	92,3	12.855.000	100	9.000.000	0	38.604.000	0	27.121.000	100	87.580.000	118%	100%	183	782.209.070	215%	54%	
2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan KTP EL dan KIA	%	99	1.185.282.900	99	630.338.970	100	87.604.025	25	12.855.000	100	9.000.000	0	38.604.000	0	27.121.000	100	87.580.000	100%	100%	199	717.918.970	201%	7%	
2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	laporan	24	753.071.200	12	454.101.673	12	73.068.025	3	11.100.000	2	9.000.000	4	32.889.000	4	20.055.000	13	73.044.000	108%	100%	25	527.145.673	104%	70%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	2	2.01	5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	dokumen	24	432.211.700	12	176.237.297	12	14.536.000	3	1.755.000	2	0	3	5.715.000	6	7.066.000	14	14.536.000	117%	100%	26	190.773.297	108%	44%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	%	94,75	2.024.023.360	0	1.024.390.185	94,76	112.749.995	91,3	4.428.900	0	-	0	66.637.000	0	40.823.400	91,3	111.889.300	96%	99%	91	1.136.279.485	96%	56%	
2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan dan Akta Perceraian Non Muslim	%	95	2.024.023.360	0	1.024.390.185	100	112.749.995	25	4.428.900	0	-	100	66.637.000	0	40.823.400	100	111.889.300	100%	99%	100	1.136.279.485	105%	6%	
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	dokumen	24	562.162.544	12	281.170.600	42	88.880.900	3	0	0	0	62	55.425.000	0	33.790.000	65	89.215.000	155%	100%	77	370.385.600	321%	66%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	layanan	8	1.461.860.816	4	743.219.585	4	23.869.095	1	4.428.900	0	-	1	11.212.000	2	7.033.400	4	22.674.300	100%	95%	8	765.893.885	100%	52%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Akurasi database kependudukan	%	100	-	100	-	99,2	-	0	-	100	-	0	-	0	-	100	-	101%	-	100	-	100%	-	
2	12	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pemenuhan permintaan data kependudukan	%	77	1.047.457.856	92	644.849.723	100	133.291.513	25	23.520.000	25	10.600.000	25	70.780.000	25	28.206.000	100	133.106.000	100%	100%	192	777.955.723	249%	13%	
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	dokumen	24	789.255.057	2	551.496.519	2	97.345.845	0	20.000.000	0	9.000.000	1	58.852.000	1	9.325.000	2	97.177.000	100%	100%	4	648.673.519	17%	82%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	2.01	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan	dokumen	32	258.202.799	17	93.353.204	34	35.945.668	0	3.520.000	34	1.600.000	0	11.928.000	0	18.881.000	34	35.929.000	100%	100%	51	129.282.204	159%	50%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																									
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya Jumlah SSK	SSK	11	2.068.458.784	0	1.497.229.829	11	213.907.000	13	55.362.853	0	26.434.400	0	63.430.300	0	67.622.100	13	212.849.653	118%	100%	13	1.710.079.482	118%	83%	
						Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna	Kampung KB	7		0		7		7		0		0		0		7		100%		7		100%		
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data keluarga yang diupdating	%	100	1.832.191.653	100	1.099.642.475	100	213.907.000	65	55.362.853	11	26.434.400	9	63.430.300	15	67.622.100	99,71	212.849.653	100%	100%	100	1.312.492.128	100%	72%	
2	14	2	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	27	1.742.525.553	81	1.058.522.375	27	165.361.000	27	46.375.000	0	15.575.000	0	47.552.500	0	55.658.000	27	165.160.500	100%	100%	108	1.223.682.875	400%	70%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	24	89.666.100	0	41.120.100	27	48.546.000	6	8.987.853	6	10.859.400	7	15.877.800	8	11.964.100	27	47.689.153	0%	0%	27	88.809.253	113%	99%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya Unmet Need	%	6,74	11.658.445.245	0	5.860.696.033	6,74	479.309.000	5,86	115.335.900	5,91	144.231.300	5,65	290.667.761	5,58	126.321.297	5,58	676.556.258	83%	141%	6	6.537.252.291	83%	56%	
2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase pelaksanaan kegiatan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	%	100	3.440.729.495	100	1.229.039.540	100	140.000.000	66,7	63.760.000	19	71.297.800	7	100.543.900	7	39.202.000	99,67	274.803.700	100%	196%	100	1.503.843.240	100%	44%	
2	14	3	2.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	4		4	75.062.000	2	140.000.000	0		0		1	100.543.900	1	39.202.000	2	139.745.900	100%	100%	6	214.807.900	150%	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	12	364.314.000	0		12	364.314.000	3	62.800.000	4	47.998.300	3	158.804.500	2	93.335.800	12	362.938.600	100%	100%	12	362.938.600	100%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	12	45.000.000	0		12	45.000.000	0		3	4.969.500	9	35.556.000	0	4.200.000	12	44.725.500	100%	99%	12	44.725.500	100%	99%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	2	150.000.000	0		2	150.000.000	0		1	18.330.000	0	63.210.900	1	17.816.000	2	99.356.900	100%	66%	2	99.356.900	100%	66%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	27	250.000.000			27	250.000.000	27	960.000	0		0	124.255.600	0	115.950.600	27	241.166.200	100%	96%	27	241.166.200	100%	96%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Kader yang Melakukan Updating Data	%	100	1.843.287.240	100	261.349.036	100	82.200.000	100	16.300.000	100	2.400.000	0	36.300.000	0	27.200.000	100	82.200.000	100%	100%	100	343.549.036	100%	19%	
2	14	3	2.02	2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit	9	1.569.773.400	3	4.849.036	0		0		0		0		0		0		0%	0%	3	4.849.036	33%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	582	273.513.840	432	252.500.000	150	82.200.000	150	16.300.000	150	2.400.000	150	36.300.000	0	27.200.000	150	82.200.000	100%	100%	582	334.700.000	100%	122%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angka Drop Out	%	18	6.125.514.510	17	3.980.879.607	17,5	253.402.000	18	30.996.500	4	60.924.500	9	115.289.661	10,42	41.433.697	10,42	248.644.358	60%	98%	100	4.229.523.965	556%	69%	
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	56	117.777.499	37	28.358.950	27	15.300.000	0		9	2.400.000	4	8.400.000	14	4.150.000	27	14.950.000	100%	98%	64	43.308.950	114%	37%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	1306	2.682.794.885	2204	901.610.368	661	221.452.000	143	27.751.500	243	54.029.500	158	97.998.661	117	37.283.697	661	217.063.358	100%	98%	2865	1.118.673.726	219%	42%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	10	63.120.900	6	34.140.900	4	16.650.000	1	3.245.000	2	4.495.000	1	8.891.000	0	-	4	16.631.000	100%	100%	10	50.771.900	100%	80%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Poktan, IMP dan Pokja Kampung KB yang menerima pembinaan Kesertaan ber KB	%	100	248.914.000	100	389.427.850	100	3.707.000	0	4.279.400	100	9.609.000	100	38.534.200	3	18.485.600	100	70.908.200	100%	1913%	100	460.336.050	100%	185%	
2	14	3	2.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	0	7.414.000	1	8.960.000	1	3.707.000	0		0		1	3.706.600	0	-	1	3.706.600	100%	100%	2	12.666.600	-	171%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.04	6	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	7	67.243.000	0	-	7	67.243.000	7	4.279.400	0	9.609.000	0	34.827.600	0	18.485.600	7	67.201.600	100%	100%	7	67.201.600	100%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	%	86,16	4.783.104.921	75	2.421.262.169	86,16	1.353.474.000	91	9.530.000	0,45	9.540.000	4,55	339.004.500	1,1	43.576.950	87,51	401.651.450	102%	30%	88	2.822.913.619	102%	59%	
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase angka kepesertaan sasaran dalam kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS	%	32	3.838.104.921	0	2.421.262.169	32	408.474.000	3	9.530.000	11,4	9.540.000	9	339.004.500	9	43.576.950	32	401.651.450	100%	98%	100	2.822.913.619	313%	74%	
2	14	4	2.01	16	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan	8	28.800.000	0	-	8	28.800.000	0		0		5	17.364.500	3	11.300.000	8	28.664.500	100%	100%	8	28.664.500	100%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	17	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	12	79.674.000	0	-	12	79.674.000	3	9.530.000	3	9.540.000	3	23.720.000	3	32.276.950	12	75.066.950	100%	94%	12	75.066.950	100%	94%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	32	300.000.000	0	-	32	300.000.000		-	0	-	32	297.920.000	0	-	32	297.920.000	100%	99%	32	297.920.000	100%	99%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase TPK Kelurahan dalam Mendampingi Keluarga Beresiko Stunting	%	72	945.000.000	0	-	27	945.000.000	0	-	27	-	0	177.830.000	43	732.270.000	43	910.100.000	159%	96%	100	910.100.000	139%	96%	
2	14	4	2.02	5	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	10	450.000.000	0	-	10	450.000.000	0	-	3	-	4		3	415.100.000	10	415.100.000	100%	92%	10	415.100.000	100%	92%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
2	14	4	2.02	6	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan	10	495.000.000	0	-	10	495.000.000	0	-	3	-	4	177.830.000	0	317.170.000	7	495.000.000	70%	100%	7	495.000.000	70%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																									
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	%	96	30.693.521.575	88	16.336.806.826	100	6.817.887.490	0	930.135.515	80	2.838.238.598	0	1.573.914.425	20	1.412.567.029	100	6.754.855.567	100%	99%	188	23.091.662.393	196%	75%	
2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	persentasi perlengkapan jalan yang berfugsi baik	%	90	14.220.829.200	80	7.695.133.867	100	2.618.264.263	10	321.655.115	25	1.791.981.530	25	203.039.040	0	296.198.054	60	2.612.873.739	100%	100%	100	10.308.007.606	111%	18%	
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	4	743.000.000	2	118.100.900	2	150.000.000	0	14.190.240	1	121.091.260	1	13.160.200	0	-	2	148.441.700	100%	99%	4	266.542.600	100%	36%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	400	7.089.651.100	400	3.925.803.747	200	969.662.263	0	55.642.080	200	849.969.420	0	8.650.000	0	54.458.000	200	968.719.500	100%	100%	600	4.894.523.247	150%	69%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	10	6.388.178.100	5	3.651.229.220	5	1.498.602.000	2	251.822.795	3	820.920.850	0	181.228.840	0	241.740.054	5	1.495.712.539	100%	100%	10	5.146.941.759	100%	81%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal berfungsi baik	%	100	441.250.000	100	316.281.082	100	150.000.000	10	21.415.000	90	-	0	124.100.000	0	2.560.000	100	148.075.000	100%	99%	100	464.356.082	100%	34%	
2	15	2	2.03	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	2	150.000.000	0	-	2	150.000.000	0	21.415.000	0	-	2	124.100.000	0	2.560.000	2	148.075.000	100%	99%	2	148.075.000	100%	99%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase fasilitas terselanggaranya pelayanan parkir	%	100	2.315.588.000	100	1.471.552.648	100	1.026.700.000	20	112.612.700	30	172.815.800	20	297.428.325	30	419.869.365	100	1.002.726.190	100%	98%	100	2.474.278.838	100%	43%	
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	4	2.315.588.000	1	1.471.552.648	1	1.026.700.000	0	112.612.700	1	172.815.800	0	297.428.325	0	419.869.365	1	1.002.726.190	100%	98%	2	2.474.278.838	50%	107%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan lulus uji	%	100	1.777.738.540	100	1.003.381.059	100	615.830.000	30	94.064.195	50	295.060.145	0	168.853.390	20	52.818.970	100	610.796.700	100%	99%	100	1.614.177.759	100%	34%	
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	20	1.231.958.540	10	403.236.059	2	106.510.000	1	19.931.715	1	86.100.000	0	0	0	0	2	106.031.715	100%	100%	12	509.267.774	60%	41%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	24	545.780.000	12	600.145.000	12	509.320.000	12	74.132.480	0	208.960.145	0	168.853.390	0	52.818.970	12	504.764.985	100%	99%	24	1.104.909.985	100%	202%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah MRLL	MRLL	160	476.400.000	0	355.111.215	160	333.214.800	25	58.092.780	25	34.224.180	25	153.675.955	25	84.579.465	100	330.572.380	63%	99%	100	685.683.595	63%	69%	
2	15	2	2.06	17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi	laporan	6	333.214.800	0	-	6	333.214.800	2	58.092.780	2	34.224.180	2	153.675.955	0	84.579.465	6	330.572.380	100%	99%	6	330.572.380	100%	99%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase terlaksananya kebijakan	%	100	4.206.326.200	100	2.115.652.756	100	913.360.628	25	93.591.900	25	263.104.893	25	272.382.900	25	274.638.675	100	903.718.368	100%	99%	100	3.019.371.124	100%	21%	
2	15	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	2	216.182.000	1	188.892.098	4	913.360.628	1	93.591.900	1	263.104.893	1	272.382.900	1	274.638.675	4	903.718.368	100%	99%	5	1.092.610.466	250%	505%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan angkutan umum	%	100	5.995.444.635	80	2.996.051.669	70	1.160.517.799	70	228.703.825	0	281.052.050	0	354.434.815	0	281.902.500	70	1.146.093.190	100%	99%	100	4.142.144.859	100%	19%	
2	15	2	2.09	3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	82	5.995.444.635	41	2.996.051.669	33	1.160.517.799	33	228.703.825	0	281.052.050	0	354.434.815	0	281.902.500	33	1.146.093.190	100%	99%	74	4.142.144.859	90%	69%	Dinas Perhubungan
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																									
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	%	82	20.879.881.414	0	12.904.270.922	82	3.421.850.097	82	567.589.164	0	730.911.250	82	923.620.965	0	1.186.355.030	82	3.408.476.409	100%	100%	82	16.312.747.331	100%	78%	
2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	%	100	20.879.881.414	100	12.904.270.922	100	3.421.850.097	100	567.589.164	100	730.911.250	100	923.620.965	100	1.186.355.030	100	3.408.476.409	100%	100%	100	16.312.747.331	100%	16%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	24	10.328.710.000	11	6.989.154.523	12	1.255.000.000	3	321.803.400	3	354.752.750	3	240.226.500	3	337.741.030	12	1.254.523.680	100%	100%	23	8.243.678.203	96%	80%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	24	6.155.192.000	11	4.206.280.733	12	1.063.362.547	3	165.794.934	3	280.587.010	3	286.734.040	3	322.905.896	12	1.056.021.880	100%	99%	23	5.262.302.613	96%	85%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1	703.347.100	0	-	1	703.347.100		-	0	0	1	299.810.000	0	403.155.464	1	702.965.464	100%	100%	1	702.965.464	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	24	1.065.251.314	11	599.322.414	12	232.964.450	3	30.430.830	3	52.565.490	3	59.296.425	3	85.620.640	12	227.913.385	100%	98%	23	827.235.799	96%	78%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	24	1.161.303.000	11	464.690.942	12	45.976.000	3	18.190.000	3	9.150.000	3	1.786.500	3	16.747.000	12	45.873.500	100%	100%	23	510.564.442	96%	44%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	24	1.466.078.000	11	644.822.310	12	121.200.000	3	31.370.000	3	33.856.000	3	35.767.500	3	20.185.000	12	121.178.500	100%	100%	23	766.000.810	96%	52%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	43.717.933.600	100	38.913.177.050	100	16.699.395.275	100	2.470.779.100	100	2.470.850.551	100	5.738.927.619	100	6.161.080.023	100	16.841.637.293	100%	101%	100	55.754.814.343	100%	128%	
2	16	3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD pengguna domain.id	%	100	21.818.547.600	100	25.270.639.184	100	13.112.552.714	100	2.133.005.810	100	2.172.246.496	100	4.391.387.294	100	4.411.933.675	100	13.108.573.275	100%	100%	100	38.379.212.459	100%	60%	
2	16	3	2.01	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	326.800.000	1	197.850.336	1	190.716.714	0	43.457.909	1	7.617.498	1	86.941.798	0	48.963.179	1	186.980.384	100%	98%	2	384.830.720	100%	118%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	6400	21.491.747.600	3000	25.072.788.848	3200	12.921.836.000	3200	2.089.547.901	3200	2.164.628.998	320	4.304.445.496	0	4.362.970.496	3200	12.921.592.891	100%	100%	6200	37.994.381.739	97%	177%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	%	100	21.899.386.000	100	13.642.537.866	100	3.586.842.561	100	337.773.290	100	298.604.055	100	1.347.540.325	100	1.749.146.348	100	3.733.064.018	100%	104%	100	17.375.601.884	100%	17%	
2	16	3	2.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	14.278.200.000	3	8.918.908.299	1	2.050.000.000	0	172.840.000	0	50.000.000	1	1.099.968.000	0	892.122.029	1	2.214.930.029	100%	108%	4	11.133.838.328	100%	78%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	2	1.855.000.000	1	1.259.953.536	1	321.564.001	0	34.809.080	0	73.598.465	1	55.912.015	0	154.735.565	1	319.055.125	100%	99%	2	1.579.008.661	100%	85%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	20	1.840.000.000	20	1.567.286.799	3	680.300.000	3	34.084.830	0	58.298.190	1	49.032.050	0	523.282.644	4	664.697.714	133%	98%	24	2.231.984.513	120%	121%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	layanan	6	1.359.380.960	6	669.250.934	2	180.778.560	2	24.700.000	0	37.050.000	2	64.842.820	0	53.879.700	2	180.472.520	100%	100%	8	849.723.454	133%	63%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	2	1.404.605.000	1	574.080.400	1	50.000.000	0	18.656.000	1	3.482.300	1	16.950.940	0	10.895.410	1	49.984.650	100%	100%	2	624.065.050	100%	44%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	2	636.000.000	1	220.908.500	1	269.200.000	0	47.770.000	1	54.106.000	1	60.834.500	0	106.323.000	1	269.033.500	100%	100%	2	489.942.000	100%	77%	Dinas Komunikasi dan Informatika

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
2	16	3	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	4	526.200.040	3	432.149.398	1	35.000.000	0	4.913.380	1	22.069.100	0	0	0	7.908.000	1	34.890.480	100%	100%	4	467.039.878	100%	89%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																										
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK	%	75	2.669.246.100	0	1.531.350.070	75	444.174.500	0	-	0	127.147.900	75	106.415.000	0	200.158.600	75	433.721.500	100%	98%	75	1.965.071.570	100%	74%	
2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan sertifikat NIK	koperasi	75	2.669.246.100	0	1.531.350.070	40	444.174.500	0	-	0	127.147.900	35	106.415.000	32	200.158.600	35	433.721.500	88%	98%	35	1.965.071.570	47%	16%	
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	1100	2.669.246.100	629	1.531.350.070	90	444.174.500	0	-	29	127.147.900	30	106.415.000	76	200.158.600	76	433.721.500	84%	98%	705	1.965.071.570	64%	74%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	%	2,5	625.589.500	0	437.537.939	2,5	150.586.523	0	-	0	900.000	0	135.499.000	2,5	13.028.400	2,5	149.427.400	100%	99%	3	586.965.339	100%	94%	
2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	koperasi	10	625.589.500	0	437.537.939	5	150.586.523	0	-	0	900.000	0	135.499.000	5	13.028.400	5	149.427.400	100%	99%	5	586.965.339	50%	24%	
2	17	6	2.01	5	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	60		0	-	60	150.586.523	0	-	0	900.000	0	135.499.000	60	13.028.400	60	149.427.400	100%	99%	60	149.427.400	100%	-	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	%	8	2.639.100.279	0	1.362.395.625	8	260.686.759	0	17.538.134	0	20.756.200	4	43.681.200	4	126.945.571	8	208.921.105	100%	80%	8	1.571.316.730	100%	60%	
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina beromzet naik	orang	78	2.639.100.279	41	1.362.395.625	12	260.686.759	0	17.538.134	0	20.756.200	4	43.681.200	8	126.945.571	12	208.921.105	100%	80%	53	1.571.316.730	68%	8%	
				2	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	150	260.686.759	0	-	150	260.686.759	0	17.538.134	37	20.756.200	44	43.681.200	54	126.945.571	135	208.921.105	90%	80%	135	208.921.105	90%	80%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																										
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	persen	100	64.312.500	100	115.578.636	100	109.550.000	0	-	0	-	100	101.264.000	0	1.911.000	100	103.175.000	100%	94%	200	218.753.636	200%	340%	
2	18	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi yang tersedia	buah	2	64.312.500	0	115.578.636	1	109.550.000	0	-	0	-	1	101.264.000	0	1.911.000	1	103.175.000	100%	94%	1	218.753.636	50%	160%	
2	18	2	2.02	4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	109.550.000	0	-	1	109.550.000	0	-	0	0	1	101.264.000	0	1.911.000	1	103.175.000	100%	94%	1	103.175.000	100%	94%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang merealisasikan investasinya	%	39	344.463.900	33	769.821.683	40	421.063.000	16,4	16.423.000	16,4	89.752.506	0	84.632.500	43,8	203.543.250	76,6	394.351.256	192%	94%	110	1.164.172.939	281%	338%	
2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah investor baru	investor	40	344.463.900	20	769.821.683	40	421.063.000	12	16.423.000	12	89.752.506	13	84.632.500	13	203.543.250	50	394.351.256	125%	94%	70	1.164.172.939	175%	114%	
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	2	306.663.900	1	769.821.683	1	383.263.000	0	16.423.000	0	89.752.506	0	48.632.500	1	203.543.250	1	358.351.256	100%	94%	2	1.128.172.939	100%	368%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	3	2.01	3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	1	37.800.000	0	-	1	37.800.000	0	-	0	0	1	36.000.000	0	1.660.000	1	37.660.000	100%	100%	1	37.660.000	100%	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	%	95	2.733.930.000	100	1.900.845.797	95	409.495.000	99,3	57.636.525	99,46	56.688.640	0	172.855.660	99,8	116.972.895	99,8	404.153.720	105%	99%	200	2.304.999.517	210%	84%	
2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemohon Izin	izin	1900	2.733.930.000	0	1.900.845.797	4000	409.495.000	1716	57.636.525	3126	56.688.640	0	172.855.660	6076	116.972.895	6076	404.153.720	152%	99%	6076	2.304.999.517	320%	15%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
2	18	4	2.01	6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	4000	152.455.000	0	-	4000	152.455.000	1705	26.496.635	3109	26.166.640	3927	50.051.125	7447	49.740.600	7447	152.455.000	186%	100%	7447	152.455.000	186%	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	2.01	7	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	25	137.000.000	0	-	20	137.000.000	6	11.787.150	4	8.273.500	6	81.374.000	8	32.483.500	24	133.918.150	120%	98%	24	133.918.150	96%	98%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	2.01	8	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	300	120.040.000	0	-	300	120.040.000	154	19.352.740	196	22.248.500	231	41.430.535	366	34.748.795	366	117.780.570	122%	98%	366	117.780.570	122%	98%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	perusahaan	246	1.919.970.000	126	1.223.307.194	120	462.000.000	73	53.469.000	49	64.357.900	26	218.877.020	0	105.664.305	148	442.368.225	123%	96%	274	1.665.675.419	111%	87%	
2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina	perusahaan	496	1.919.970.000	126	1.223.307.194	370	462.000.000	0	53.469.000	0	64.357.900	0	218.877.020	16	105.664.305	16	442.368.225	4%	96%	142	1.665.675.419	29%	23%	
2	18	5	2.01	4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	kegiatan usaha	7	29.491.000	0	-	8	29.491.000	0	-	0	0	2	9.810.000	0	14.282.000	2	24.092.000	25%	82%	2	24.092.000	29%	82%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	2.01	5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	370	390.107.500	0	-	370	390.107.500	66	47.458.000	125	58.067.900	37	191.810.520	12	78.881.305	240	376.217.725	65%	96%	240	376.217.725	65%	96%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	2.01	6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	20	42.401.500	0	-	20	42.401.500	11	6.011.000	5	6.290.000	0	17.256.500	4	12.501.000	20	42.058.500	100%	99%	20	42.058.500	100%	99%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	%	100	615.661.400	100	348.693.150	100	163.272.400	0	76.586.500	0	12.922.500	0	26.917.335	100	39.440.000	100	155.866.335	100%	95%	200	504.559.485	200%	82%	
2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	jenis izin	110	615.661.400	70	348.693.150	52	163.272.400	0	76.586.500	0	12.922.500	0	26.917.335	52	39.440.000	52	155.866.335	100%	95%	122	504.559.485	111%	25%	
2	18	6	2.01	2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	16	163.272.400	0	-	16	163.272.400	4	76.586.500	2	12.922.500	1	26.917.335	8	39.440.000	15	155.866.335	94%	95%	15	155.866.335	94%	95%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																									
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	%	15	2.666.700.000	0	1.689.902.690	15	100.000.000	0	-	0	29.960.000	15	68.625.100	0	-	15	98.585.100	100%	99%	15	1.788.487.790	100%	67%	
2	19	2	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda/group ditingkat kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat provinsi	Orang	31	2.666.700.000	0	1.689.902.690	31	100.000.000	0	-	0	29.960.000	31	68.625.100	0	-	31	98.585.100	100%	99%	31	1.788.487.790	100%	4%	
2	19	2	2.01	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Orang	400	2.666.700.000	256	1.689.902.690	100	100.000.000	0	-	0	29.960.000	100	68.625.100	0	0	100	98.585.100	100%	99%	356	1.788.487.790	89%	67%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	%	30	12.433.197.280	0	17.868.657.148	30	5.765.938.521	0	492.628.000	0	1.493.386.500	0	1.998.233.621	30	1.736.546.032	30	5.720.794.153	100%	99%	30	23.589.451.301	100%	190%	
2	19	3	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kualitas sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	%	100	12.433.197.280	0	6.925.450.614	100	3.706.085.000	0	434.048.000	0	465.171.500	50	1.420.034.496	50	1.368.933.284	100	3.688.187.280	100%	100%	100	10.613.637.894	100%	30%	
2	19	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	sarana prasarana	12	12.433.197.280	8	6.925.450.614	3	3.706.085.000	0	434.048.000	1	465.171.500	1	1.420.034.496	1	1.368.933.284	3	3.688.187.280	100%	100%	11	10.613.637.894	92%	85%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	3	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	Event	12	7.376.120.000	2	4.249.637.175	3	699.853.521	0	-	0	-	1	439.879.125	2	247.677.748	3	687.556.873	100%	98%	5	4.937.194.048	42%	9%	
2	19	3	2.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	Event	12	7.376.120.000	6	4.249.637.175	3	699.853.521	0	-	0	0	1	439.879.125	2	247.677.748	3	687.556.873	100%	98%	9	4.937.194.048	75%	67%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	3	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Cabang Olahraga	40	7.500.000.000	26	5.771.742.735	31	1.000.000.000	0	-	31	987.400.000	0	-	0	-	31	987.400.000	100%	99%	57	6.759.142.735	143%	13%	
2	19	3	2.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Hasil Pengembangan Keolahragaan	Organisasi	1	7.500.000.000	1	5.771.742.735	1	1.000.000.000	0	-	1	987.400.000	0	0	0	0	1	987.400.000	100%	99%	2	6.759.142.735	200%	90%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	3	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	Festival Olahraga	12	5.300.000.000	8	921.826.624	31	360.000.000	0	58.580.000	1	40.815.000	12	138.320.000	10	119.935.000	23	357.650.000	74%	99%	31	1.279.476.624	258%	7%	
2	19	3	2.05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	Festival Olahraga	12	5.300.000.000	7	921.826.624	3	360.000.000	0	58.580.000	1	40.815.000	1	138.320.000	1	119.935.000	3	357.650.000	100%	99%	10	1.279.476.624	83%	24%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																										
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	dokumen	2	1.208.128.000	0	532.311.719	1	100.000.000	0	24.985.000	1	8.953.900	1	14.807.100	0	49.845.315	1	98.591.315	100%	99%	1	630.903.034	50%	52%	
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	survey	3	1.208.128.000	1	532.311.719	1	100.000.000	1	24.985.000	1	8.953.900	1	14.807.100	0	49.845.315	1	98.591.315	100%	99%	2	630.903.034	67%	8%	
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	2	1.208.128.000	2	532.311.719	3	100.000.000	0	24.985.000	1	8.953.900	1	14.807.100	2	49.845.315	4	98.591.315	133%	99%	6	630.903.034	300%	52%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																										
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	%	100	1.645.502.695	100	693.964.144	100	241.752.000	100	37.912.000	0	110.356.999	100	45.025.500	0	41.624.500	100	234.918.999	100%	97%	100	928.883.143	100%	56%	
2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah JKS (Jaring Komunikasi Sandi) yang digunakan	JKS	4	1.645.502.695	0	693.964.144	2	241.752.000	2	37.912.000	0	110.356.999	2	45.025.500	0	41.624.500	2	234.918.999	100%	97%	2	928.883.143	50%	14%	
2	21	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	2	550.000.000	1	99.570.600	1	41.752.000	0	4.185.000	0	0	1	2.270.500	0	34.784.500	1	41.240.000	100%	99%	2	140.810.600	100%	26%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	2	2.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	34	1.095.502.695	34	594.393.544	34	200.000.000	34	33.727.000	34	110.356.999	34	42.755.000	0	6.840.000	34	193.678.999	100%	97%	68	788.072.543	200%	72%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																										
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	%	100	8.600.000.000	88	6.334.134.838	100	2.357.487.610	0	-	0	450.370.750	0	1.408.742.540	100	438.487.000	100	2.297.600.290	100%	97%	100	8.631.735.128	100%	100%	
2	22	2	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku seni budaya yang melakukan pagelaran	Orang	44	8.600.000.000	0	6.334.134.838	44	2.357.487.610	0	-	0	450.370.750	0	1.408.742.540	40	438.487.000	40	2.297.600.290	91%	97%	40	8.631.735.128	91%	27%	
2	22	2	2.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah obyek pemajuan budaya yang dimanfaatkan	Budaya	37	6.700.000.000	25	5.167.875.573	10	1.935.652.610	0	-	3	335.534.000	2	1.320.833.860	5	219.854.000	10	1.876.221.860	100%	97%	35	7.044.097.433	95%	105%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
2	22	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan	Orang/Group	40	1.900.000.000	0	1.166.259.265	20	421.835.000	0	-	10	114.836.750	3	87.908.680	8	218.633.000	21	421.378.430	105%	100%	21	1.587.637.695	53%	84%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase SDM, lembaga dan pranata kesenian yang dibina	%	100	975.000.000	0	296.330.310	100	50.000.000	0	-	0	-	0	23.504.000	100	25.909.000	100	49.413.000	100%	99%	100	345.743.310	100%	35%	
2	22	3	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah seni budaya yang dibina	Jenis	6	975.000.000	0	296.330.310	3	50.000.000	0	-	0	-	1	23.504.000	1	25.909.000	2	49.413.000	67%	99%	2	345.743.310	33%	5%	
2	22	3	2.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah seniman yang mendapat pembinaan	Orang/Group	90	975.000.000	72	296.330.310	44	50.000.000	0	-	0	0	20	23.504.000	20	25.909.000	40	49.413.000	91%	99%	112	345.743.310	124%	35%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya dan WBTB yang berpotensi menjadi destinasi wisata	Obyek	6	808.200.000	2	332.293.470	100	279.765.000	0	-	0	30.921.000	0	42.268.091	100	204.990.000	100	278.179.091	100%	99%	102	610.472.561	1700%	76%	
2	22	5	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan	Obyek	20	808.200.000	10	332.293.470	20	279.765.000	0	-	0	30.921.000	0	42.268.091	20	204.990.000	20	278.179.091	100%	99%	30	610.472.561	150%	34%	
2	22	5	2.02	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	Obyek	20	808.200.000	22	332.293.470	20	279.765.000	0	-	5	30.921.000	0	42.268.091	15	204.990.000	20	278.179.091	100%	99%	42	610.472.561	210%	76%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																									
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	5,95	3.076.297.880	5,8	1.797.838.631	6	858.836.199	0	223.434.450	0	122.720.099	0	308.429.900	6	195.187.065	6	849.771.514	101%	99%	6	2.647.610.145	101%	86%	
2	23	2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	4,9	531.312.880	4	904.777.619	4,9	295.000.000	0	104.805.000	0	59.760.099	0	68.945.000	5	61.132.065	5	294.642.164	102%	100%	9	1.199.419.783	184%	55%	
2	23	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	layanan	148	531.312.880	0	904.777.619	74	295.000.000	74	104.805.000	74	59.760.099	74	68.945.000	0	61.132.065	74	294.642.164	100%	100%	74	1.199.419.783	50%	226%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	13700	650.190.000	2583	197.089.210	650	70.000.000	0	900.000	0	0	730	68.392.350	0	0	730	69.292.350	112%	99%	3313	266.381.560	24%	41%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca	kali	80	2.544.985.000	20	893.061.012	20	563.836.199	0	118.629.450	7	62.960.000	5	239.484.900	8	134.055.000	20	555.129.350	100%	98%	40	1.448.190.362	50%	22%	
2	23	2	2.02	1	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	lokus	218	2.324.985.000	0	893.061.012	212	474.463.699	212	96.559.450	212	37.910.000	0	205.483.500	0	126.935.000	212	466.887.950	100%	98%	212	1.359.948.962	97%	58%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	perpustakaan	5	220.000.000			5	89.372.500	5	22.070.000	5	25.050.000	5	34.001.400	0	7.120.000	5	88.241.400	100%	99%	5	88.241.400	100%	40%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	38	390.000.000	35	97.495.500	37	80.000.000	0	-	0	9.900.000	0	40.125.000	35	25.548.000	35	75.573.000	95%	94%	70	173.068.500	184%	44%	
2	23	3	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah karya cetak dan karya rekam koleksi daerah yang dilestarikan	Eksemplar	519	390.000.000	168	97.495.500	178	80.000.000	0	-	0	9.900.000	0	40.125.000	179	25.548.000	179	75.573.000	101%	94%	347	173.068.500	67%	19%	
2	23	3	2.01	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian naskah kuno	orang	4	330.000.000	0	97.495.500	2	50.000.000	0	-	0	9.900.000	2	35.105.000	0	1.770.000	2	46.775.000	100%	94%	2	144.270.500	50%	44%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	3	2.01	2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah pengadaan/akuisisi naskah kuno	Eksemplar	4	60.000.000	0	-	2	30.000.000	0	-	0	0	0	5.020.000	2	23.778.000	2	28.798.000	100%	96%	2	28.798.000	50%	48%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																									
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan)	skor	90	2.581.457.105	85	1.027.017.095	90	619.386.636	0	154.130.500	0	95.622.260	0	171.103.250	90	192.542.640	90	613.398.650	100%	99%	175	1.640.415.745	194%	64%	
2	24	2	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip	%	100	1.320.740.815	100	570.774.338	100	369.052.936	12,1	74.988.500	14	64.098.760	33	111.700.000	41	113.212.640	100,07	363.999.900	100%	99%	100	934.774.238	100%	28%	
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	berkas	118000	1.320.740.815	0	570.774.338	60000	369.052.936	7242	74.988.500	6452	64.098.760	18349	111.700.000	29774	113.212.640	61817	363.999.900	103%	99%	61817	934.774.238	52%	71%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	2	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana temu balik arsip	%	100	1.260.716.290	0	456.242.757	100	250.333.700	20	79.142.000	44	31.523.500	0	59.403.250	36	79.330.000	100	249.398.750	100%	100%	100	705.641.507	100%	20%	
2	24	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	arsip	530	1.260.716.290	0	456.242.757	270	250.333.700	54	79.142.000	120	31.523.500	34	59.403.250	55	79.330.000	263	249.398.750	97%	100%	263	705.641.507	50%	56%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	skor	8,8	499.291.000	8,5	114.659.915	8,8	154.000.000	0	29.547.700	0	49.950.000	0	72.573.000	0	-	8,8	152.070.700	100%	99%	9	266.730.615	98%	53%	
2	24	3	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	%	100	499.291.000	100	114.659.915	100	154.000.000	0	29.547.700	92	49.950.000	0	72.573.000	0	-	92	152.070.700	92%	99%	192	266.730.615	192%	30%	
2	24	3	2.01	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	arsip	2100	245.390.000	0	58.068.250	1100	85.000.000	293	29.547.700	1015	49.950.000	0	5.250.000	0	0	1308	84.747.700	119%	100%	1308	142.815.950	62%	58%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	3	2.01	2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	berkas	2100	253.901.000	0	56.591.665	1100	69.000.000	0	-	0	0	1100	67.323.000	0	0	1100	67.323.000	100%	98%	1100	123.914.665	52%	49%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024) PAK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) PAK		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II		III		IV										
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																									
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah total produksi perikanan budidaya	Ton	850	867.406.770	280	373.621.692	290	436.605.000	91,8	54.301.501	56,5	40.083.490	73	31.286.850	68,8	92.295.180	290	217.967.021	100%	50%	570	591.588.713	67%	68%	
3	25	4	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) (RTP)	RTP	500	867.406.770	0	373.621.692	260	436.605.000	60	54.301.501	50	40.083.490	60	31.286.850	92	92.295.180	262	217.967.021	101%	50%	262	591.588.713	52%	25%	
3	25	4	2.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Unit	1	224.955.000	0	-	1	224.955.000	0	-	0	20.036.000	0	532.000	1	202.687.242	1	223.255.242	100%	99%	1	223.255.242	100%	99%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
3	25	4	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	12	192.406.770	10	36.606.770	4	155.800.000	1	21.475.501	1	15.934.990	1	30.754.850	3	84.295.180	6	152.460.521	150%	98%	16	189.067.291	133%	98%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	4	2.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	Orang	140	675.000.000	115	337.014.922	120	55.850.000	50	32.826.000	0	4.112.500	25		0	8.000.000	75	44.938.500	63%	80%	190	381.953.422	136%	57%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah total produksi perikanan tangkap	Ton	267	240.000.000	93	72.258.920	89	70.022.000	25,1	4.000.000	17,5	27.426.200	18,7	18.363.000	19,1	17.441.000	80,4	67.230.200	90%	96%	173	139.489.120	65%	58%	
3	25	5	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan/usaha perikanan tangkap yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	orang	1305	240.000.000	435	72.258.920	435	70.022.000	100	4.000.000	100	27.426.200	100	18.363.000	140	17.441.000	440	67.230.200	101%	96%	875	139.489.120	67%	28%	
3	25	5	2.01	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	6	240.000.000	4	72.258.920	2	70.022.000	0	4.000.000	0	27.426.200	1	18.363.000	1	17.441.000	2	67.230.200	100%	96%	6	139.489.120	100%	58%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Makan Ikan	Kg/Kapita/ tahun	15,9	432.000.000	16,9	959.546.621	16,5	466.054.000	0	7.943.752	0	153.638.204	0	74.895.403	20,5	181.926.886	20,5	418.404.245	124%	90%	37	1.377.950.866	235%	319%	
3	25	6	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengolah dan pemasar ikan yang dibina	orang	200	142.000.000	133	586.399.351	50	75.000.000	12	4.000.000	8	4.000.000	12	56.391.403	12	9.110.000	44	73.501.403	88%	98%	177	659.900.754	89%	52%	
3	25	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	60	142.000.000	30	586.399.351	30	75.000.000	12	4.000.000	8	4.000.000	12	56.391.403	12	9.110.000	44	73.501.403	147%	98%	74	659.900.754	123%	465%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	6	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan skala rumah tangga	ton	76	290.000.000	30	373.147.270	26	391.054.000	9	3.943.752	6	149.638.204	9	18.504.000	9	172.816.886	33	344.902.842	127%	88%	63	718.050.112	83%	119%	
3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	46	290.000.000	23	373.147.270	14	391.054.000	0	3.943.752	0	149.638.204	14	18.504.000	0	172.816.886	14	344.902.842	100%	88%	37	718.050.112	80%	248%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																										
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Destinasi wisata daerah	%	100	7.064.048.300	0	1.188.271.398	30	248.000.000	0	2.400.000	0	121.378.020	0	105.249.306	30	18.700.000	30	247.727.326	100%	100%	30	1.435.998.724	30%	20%	
3	26	2	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola	Destinasi	50	7.064.048.300	4	1.188.271.398	25	248.000.000	0	2.400.000	0	121.378.020	0	105.249.306	25	18.700.000	25	247.727.326	100%	100%	29	1.435.998.724	58%	4%	
3	26	2	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi destinasi pariwisata yang dikembangkan	Lokasi	8	5.874.048.300	7	325.785.423	12	50.000.000	0	-	12	49.930.020	0	0	0		12	49.930.020	100%	100%	19	375.715.443	238%	6%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3	26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Lokasi	38	1.190.000.000	14	862.485.975	12	198.000.000	0	2.400.000	2	71.448.000	6	105.249.306	4	18.700.000	12	197.797.306	100%	100%	26	1.060.283.281	68%	89%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang diselenggarakan	%	20	4.850.000.000	0	2.299.838.778	20	605.500.000	0	-	0	44.164.364	0	341.579.225	0	214.819.467	0	600.563.056	0%	99%	0	2.900.401.834	0%	60%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
3	26	3	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi wisata daerah yang berwawasan lingkungan	Lokasi	25	4.850.000.000	0	2.299.838.778	25	605.500.000	0	-	0	44.164.364	0	341.579.225	0	214.819.467	0	600.563.056	0%	99%	0	2.900.401.834	0%	12%	
3	26	3	2.01	6	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Neger	Kegiatan	4	605.500.000	0	-	4	605.500.000	0	-	1	44.164.364	1	341.579.225	2	214.819.467	4	600.563.056	100%	99%	4	600.563.056	100%	99%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan	%	20	2.524.600.000	19	686.873.399	20	278.000.000	0	-	0	-	0	262.330.200	20	14.400.000	20	276.730.200	100%	100%	39	963.603.599	195%	38%	
3	26	5	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan	%	20	2.524.600.000	8	686.873.399	20	278.000.000	0	-	0	-	0	262.330.200	20	14.400.000	20	276.730.200	100%	100%	28	963.603.599	140%	11%	
3	26	5	2.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif	Orang	50	2.524.600.000	24	686.873.399	24	278.000.000	0	-	0	0	24	262.330.200	0	14.400.000	24	276.730.200	100%	100%	48	963.603.599	96%	38%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																									
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Efektivitas sarana pertanian	%	65	9.290.509.200	55	5.230.505.403	65	2.439.213.000	20	35.873.000	15	1.718.455.300	20	214.227.000	15	450.695.183	70	2.419.250.483	108%	99%	125	7.649.755.886	192%	82%	
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Prosentase ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan petani	%	80	8.532.709.200	75	4.687.266.824	80	2.333.639.000	15	19.598.000	15	1.705.955.300	25	191.132.000	25	399.438.500	80	2.316.123.800	100%	99%	155	7.003.390.624	194%	27%	
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	2	476.588.200	1	362.701.560	1	410.800.000	0	10.850.000	0	12.350.000	0	185.040.000	1	190.910.000	1	399.150.000	100%	97%	2	761.851.560	100%	160%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4	8.056.121.000	1	4.324.565.264	1	1.922.839.000	0	8.748.000	0	1.693.605.300	0	6.092.000	1	208.528.500	1	1.916.973.800	100%	100%	2	6.241.539.064	50%	77%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	2	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik	%	75	757.800.000	75	543.238.579	75	105.574.000	20	16.275.000	20	12.500.000	20	23.095.000	13	51.256.683	73	103.126.683	97%	98%	148	646.365.262	197%	14%	
3	27	2	2.03	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	48	757.800.000	62	543.238.579	12	105.574.000	3	16.275.000	3	12.500.000	3	23.095.000	3	51.256.683	12	103.126.683	100%	98%	74	646.365.262	154%	85%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik	%	100	4.222.564.000	50	684.779.600	100	1.458.468.910	0	87.535.000	0	122.812.925	0	218.300.600	70	969.634.700	70	1.398.283.225	70%	96%	120	2.083.062.825	120%	49%	
3	27	3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase pengembangan prasarana pertanian	%	100	69.653.000	50	1.490.000	100	114.613.000	0	-	0	-	0	36.402.100	70	55.761.000	70	92.163.100	70%	80%	120	93.653.100	120%	132%	
3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian	Laporan	2	69.653.000	1	1.490.000	1	114.613.000	0	-	0	0	0	36.402.100	1	55.761.000	1	92.163.100	100%	80%	2	93.653.100	100%	134%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Prosentase prasarana pertanian yang terbangun /rehabilitasi /dipelihara	%	25	4.152.911.000	0	683.289.600	25	1.343.855.910	0	87.535.000	0	122.812.925	10	181.898.500	15	913.873.700	25	1.306.120.125	100%	97%	25	1.989.409.725	100%	31%	
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	6	755.000.000	4	359.840.625	2	1.296.919.910	0	77.075.000	0	117.452.925	0	164.740.000	2	904.226.500	2	1.263.494.425	100%	97%	6	1.623.335.050	100%	215%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	3	2.02	15	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	1	43.086.000	0	-	1	43.086.000	0	10.460.000	0	5.360.000	0	17.158.500	0	9.647.200	0	42.625.700	0%	99%	0	42.625.700	0%	99%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	10	1.188.050.000	10	839.073.665	10	407.740.090	0	49.172.800	0	85.256.875	5	126.008.440	15	143.249.140	15	403.687.255	150%	99%	25	1.242.760.920	250%	105%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
3	27	4	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Prosentase keberhasilan pelayanan kesehatan hewan	%	80	625.500.000	80	548.672.651	80	316.000.090	10	25.000.000	20	74.771.475	20	86.712.940	30	126.521.890	80	313.006.305	100%	99%	160	861.678.956	200%	50%	
3	27	4	2.01	8	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	4	316.000.090	0	-	4	316.000.090	1	25.000.000	1	74.771.475	1	86.712.940	1	126.521.890	4	313.006.305	100%	99%	4	313.006.305	100%	99%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	4	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase jumlah sampel produk asal hewan yang aman dikonsumsi	%	80	441.700.000	80	290.051.014	80	91.740.000	10	24.172.800	20	10.485.400	20	39.295.500	25	16.727.250	75	90.680.950	94%	99%	155	380.731.964	194%	21%	
3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	20	391.700.000	9	280.816.514	10	91.740.000	3	24.172.800	3	10.485.400	3	39.295.500	3	16.727.250	12	90.680.950	120%	99%	21	371.497.464	105%	95%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase lahan aman bencana pertanian	%	76	692.950.400	72	443.121.595	76	109.800.000	0	-	35	42.275.280	25	58.800.720	25	2.385.000	85	103.461.000	112%	94%	157	546.582.595	207%	79%	
3	27	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan aman bencana pertanian	Ha/Tahun	5650	692.950.400	1750	443.121.595	2000	109.800.000	0	-	2452	42.275.280	0	58.800.720	845	2.385.000	3297	103.461.000	165%	94%	5047	546.582.595	89%	15%	
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	110	692.950.400	67	443.121.595	50	109.800.000	0	-	30,9	42.275.280	0	58.800.720	17	2.385.000	48	103.461.000	96%	94%	115	546.582.595	105%	79%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase kelompok tani yang memiliki izin usaha pertanian	%	15	185.000.000	8	62.572.400	15	33.600.000	0	-	0	-	0	4.478.100	15	7.591.000	15	12.069.100	100%	36%	23	74.641.500	153%	40%	
3	27	6	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha pertanian yang diterbitkan oleh otoritas kompeten	jenis	6	185.000.000	1	62.572.400	2	33.600.000	0	-	0	-	0	4.478.100	1	7.591.000	1	12.069.100	50%	36%	2	74.641.500	33%	7%	
3	27	6	2.01	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	12	185.000.000	2	62.572.400	2	33.600.000	0	-	0	0	0	4.478.100	1	7.591.000	1	12.069.100	50%	36%	3	74.641.500	25%	40%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase jumlah SDM pertanian terlatih	%	20	401.363.000	20	1.727.187.675	40	3.558.495.367	0	134.008.700	45	278.978.000	0	520.172.034	15	1.998.666.875	60	2.931.825.609	150%	82%	80	4.659.013.284	400%	1161%	
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Pertanian terlatih	orang	478	401.363.000	78	1.727.187.675	400	3.558.495.367	0	134.008.700	517	278.978.000	0	520.172.034	121	1.998.666.875	638	2.931.825.609	160%	82%	716	4.659.013.284	150%	730%	
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelompok	76	401.363.000	38	1.727.187.675	38	3.558.495.367	0	134.008.700	38	278.978.000	0	520.172.034	0	1.998.666.875	38	2.931.825.609	100%	82%	76	4.659.013.284	100%	1161%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																									
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase perusahaan yang memperbarui perijinan	%	100	749.725.500	100	735.818.390	100	86.160.400	20	19.197.000	33	13.556.000	27	33.445.900	13	19.880.000	93	86.078.900	93%	100%	100	821.897.290	100%	110%	
3	30	2	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Presentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan	%	100	749.725.500	100	735.818.390	100	86.160.400	20	19.197.000	33	13.556.000	27	33.445.900	13	19.880.000	93	86.078.900	93%	100%	100	821.897.290	100%	11%	
3	30	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	dokumen	150	749.725.500	33	735.818.390	75	86.160.400	15	19.197.000	25	13.556.000	20	33.445.900	10	19.880.000	70	86.078.900	93%	100%	103	821.897.290	69%	110%	Dinas Perdagangan
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	%	100	28.890.161.680	100	17.866.230.275	100	5.643.298.691	25	878.584.700	25	1.108.317.604	25	1.615.661.110	25	1.932.262.089	100	5.534.825.503	100%	98%	200	23.401.055.778	200%	81%	
3	30	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dikelola sarana distribusinya	pasar	17	11.226.501.582	17	6.397.157.931	17	1.307.139.091	17	201.240.700	17	391.008.604	17	302.350.010	17	328.568.089	17	1.223.167.403	100%	94%	17	7.620.325.334	100%	11%	
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	12	6.813.999.725	11	3.774.024.828	3	492.513.313	0	5.855.200	1	290.368.404	1	59.540.400	1	130.789.600	3	486.553.604	100%	99%	14	4.260.578.432	117%	63%	Dinas Perdagangan
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	17	4.412.501.857	34	2.623.133.103	17	814.625.778	17	195.385.500	17	100.640.200	17	242.809.610	17	197.778.489	17	736.613.799	100%	90%	51	3.359.746.902	300%	76%	Dinas Perdagangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
3	30	3	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	17.663.660.098	100	11.469.072.344	100	4.336.159.600	50	677.344.000	0	717.309.000	0	1.313.311.100	50	1.603.694.000	100	4.311.658.100	100%	99%	100	15.780.730.444	100%	24%	
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	6	2.944.960.983	4	1.413.735.654	2	258.922.000	1	33.510.000	0	50.979.000	0	56.150.000	1	106.709.000	2	247.348.000	100%	96%	6	1.661.083.654	100%	56%	Dinas Perdagangan
3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	8	14.718.699.115	3	10.055.336.690	2	4.077.237.600	1	643.834.000	0	666.330.000	0	1.257.161.100	1	1.496.985.000	2	4.064.310.100	100%	100%	5	14.119.646.790	63%	96%	Dinas Perdagangan
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	%	100	7.520.092.326	100	7.103.899.171	100	300.254.200	37,5	38.359.000	12,5	89.823.450	0	74.390.808	13	88.579.977	63	291.153.235	63%	97%	100	7.395.052.406	100%	98%	
3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan bahan pokok dan barang penting	%	100	7.481.695.126	100	7.081.201.171	100	279.621.200	25	35.465.500	25	87.080.450	17	67.640.808	25	80.704.977	92	270.891.735	92%	97%	100	7.352.092.906	100%	4%	
3	30	4	2.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	12	7.020.073.126	8	6.945.563.671	3	111.443.600	0	14.140.000	1	20.466.500	0	33.199.808	0	35.444.977	1	103.251.285	33%	93%	9	7.048.814.956	75%	100%	Dinas Perdagangan
3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	4	461.622.000	2	135.637.500	2	168.177.600	1	21.325.500	0	66.613.950	0	34.441.000	1	45.260.000	2	167.640.450	100%	100%	4	303.277.950	100%	66%	Dinas Perdagangan
3	30	4	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Tersalurnya pupuk dan pestisida kepada petani berhak	%	100	38.397.200	100	22.698.000	100	20.633.000	50	2.893.500	0	2.743.000	0	6.750.000	0	7.875.000	50	20.261.500	50%	98%	100	42.959.500	100%	53%	
3	30	4	2.03	2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	6	38.397.200	4	22.698.000	2	20.633.000	1	2.893.500	0	2.743.000	0	6.750.000	0	7.875.000	1	20.261.500	50%	98%	5	42.959.500	83%	112%	Dinas Perdagangan
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	%	100	1.055.660.135	100	842.867.153	100	224.674.843	25	36.862.900	17	31.060.000	25	75.808.000	17	77.770.000	84	221.500.900	84%	99%	100	1.064.368.053	100%	101%	
3	30	6	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah terlaksananya pelayanan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasannya	bulan	12	1.055.660.135	12	842.867.153	12	224.674.843	3	36.862.900	2	31.060.000	3	75.808.000	2	77.770.000	10	221.500.900	83%	99%	12	1.064.368.053	100%	21%	
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	28000	996.209.155	23842	820.951.263	8186	217.342.843	484	36.262.900	1462	31.060.000	2949	72.976.000	1653	73.910.000	6548	214.208.900	80%	99%	30390	1.035.160.163	109%	104%	Dinas Perdagangan
3	30	6	2.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	300	59.450.980	75	21.915.890	150	7.332.000	0	600.000	0	0	72	2.832.000	35	3.860.000	107	7.292.000	71%	99%	182	29.207.890	61%	49%	Dinas Perdagangan
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	%	100	1.813.521.300	62	865.677.526	100	337.278.650	25	6.434.420	25	55.450.500	25	192.271.776	25	81.406.414	100	335.563.110	100%	99%	100	1.201.240.636	100%	66%	
3	30	7	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah terlaksananya promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.	kali	16	1.813.521.300	8	865.677.526	4	337.278.650	1	6.434.420	1	55.450.500	1	192.271.776	1	81.406.414	4	335.563.110	100%	99%	12	1.201.240.636	75%	19%	
3	30	7	2.01	5	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	8	337.278.650	0	-	8	337.278.650	2	6.434.420	2	55.450.500	2	192.271.776	2	81.406.414	8	335.563.110	100%	99%	8	335.563.110	100%	99%	Dinas Perdagangan
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																										
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	%	5	1.595.264.490	0	938.107.509	5	1.607.187.748	0	54.837.050	0	57.870.000	0	250.716.570	5	901.516.049	5	1.264.939.669	100%	79%	5	2.203.047.178	100%	138%	
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat setelah pembinaan	IKM	22	1.595.264.490	0	938.107.509	15	1.607.187.748	0	54.837.050	0	57.870.000	0	250.716.570	15	901.516.049	15	1.264.939.669	100%	79%	15	2.203.047.178	68%	79%	
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	4	359.752.240	1	237.862.388	3	366.792.000	0	-	4	52.070.000	0	209.012.170	0	103.871.400	4	364.953.570	133%	99%	5	602.815.958	125%	168%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	6	277.713.160	2	133.489.750	2	60.000.000	0	25.336.000	1	1.400.000	0	0	1	29.891.000	2	56.627.000	100%	94%	4	190.116.750	67%	68%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	6	957.799.090	1	566.755.371	1	1.180.395.748	0	29.501.050	0	4.400.000	0	41.704.400	1	767.753.649	1	843.359.099	100%	71%	2	1.410.114.470	33%	147%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	%	10	2.062.682.870	15	1.589.489.367	10	165.600.000	0	19.279.500	0	16.000.000	0	64.978.154	11	65.015.130	11	165.272.784	110%	100%	26	1.754.762.151	260%	85%	
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mengikuti publikasi	IKM	80	2.062.682.870	0	1.589.489.367	80	165.600.000	0	19.279.500	91	16.000.000	0	64.978.154	32	65.015.130	123	165.272.784	154%	100%	123	1.754.762.151	154%	8%	
3	31	4	2.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	10	2.062.682.870	2	1.589.489.367	2	165.600.000	0	19.279.500	0	16.000.000	1	64.978.154	1	65.015.130	2	165.272.784	100%	100%	4	1.754.762.151	40%	85%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024) PAK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) PAK		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II		III		IV										
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4	1				SEKRETARIAT DAERAH																											
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	%	100	9.117.349.000	0	5.382.662.500	100	2.145.966.220	25	277.539.000	25	686.457.200	25	546.162.900	25	525.265.480	100	2.035.424.580	100%	95%	100	7.418.087.080	100%	81%	
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Prosentase Laporan Administrasi Pemerintahan yang disusun tepat waktu	%	100	7.422.377.000	100	4.266.053.492	100	1.801.566.220	20	79.314.000	20	647.425.200	20	499.484.700	40	473.349.480	100	1.699.573.380	100%	94%	100	5.965.626.872	100%	23%	
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	8	6.162.377.000	4	3.372.603.400	10	1.007.424.012	0	11.480.000	3	539.967.050	0	208.441.300	1	288.549.580	4	1.048.437.930	40%	104%	8	4.421.041.330	100%	72%	Bagian Pemerintahan
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	24	1.260.000.000	17	893.450.092	6	794.142.208	0	67.834.000	2	107.458.150	4	291.043.400	0	184.799.900	6	651.135.450	100%	82%	23	1.544.585.542	96%	123%	Bagian Pemerintahan
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase pelaksanaan kebijakan rakyat	%	100	26.301.040.564	100	21.004.165.716	80,1	1.989.287.654	0	189.867.000	0	591.618.300	0	817.012.400	100	255.605.500	100	1.854.103.200	125%	93%	100	22.858.268.916	100%	7%	
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	12	26.301.040.564	6	21.004.165.716	15	1.989.287.654	4	189.867.000	4	591.618.300	3	817.012.400	4	255.605.500	15	1.854.103.200	100%	93%	21	22.858.268.916	175%	87%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pesentase Produk Hukum yang disusun	%	100	3.744.131.160	100	2.212.986.957	100	1.005.640.010	25	307.896.920	25	83.133.500	25	111.236.750	25	478.275.006	100	980.542.176	100%	98%	100	3.193.529.133	100%	26%	
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	73	1.675.943.160	63	845.476.454	8	271.186.476	3	22.319.000	3	73.894.500	2	80.372.000	0	81.878.176	8	258.463.676	100%	95%	71	1.103.940.130	97%	66%	Bagian Hukum
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	50	1.210.180.400	25	564.613.414	25	244.187.334	0	108.320.400	0	6.893.000	7	21.000.000	14	97.942.300	21	234.155.700	84%	96%	46	798.769.114	92%	66%	Bagian Hukum
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	800	858.007.600	248	802.897.089	300	490.266.200	76	177.257.520	91	2.346.000	74	9.864.750	65	298.454.530	306	487.922.800	102%	100%	554	1.290.819.889	69%	150%	Bagian Hukum
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Prosentase Kerjasama yang difasilitasi	%	100	1.694.972.000	100	1.116.609.008	100	344.400.000	0	198.225.000	0	39.032.000	0	46.678.200		51.916.000	0	335.851.200	0%	98%	100	1.452.460.208	100%	20%	
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	20	1.694.972.000	15	1.116.609.008	5	344.400.000	1	198.225.000	1	39.032.000	1	46.678.200	2	51.916.000	5	335.851.200	100%	98%	20	1.452.460.208	100%	86%	Bagian Pemerintahan
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	100	2.665.317.292	0	1.067.630.475	100	463.368.000	25	82.342.585	25	33.390.000	25	51.530.000	25	289.596.434	100	456.859.019	100%	99%	100	1.524.489.494	100%	57%	
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang perekonomian dan pembangunan	Indeks	81	2.368.033.600	0	798.359.373	81	622.150.724	25	76.199.700	25	76.196.000	0	135.617.500	82	282.167.487	82	570.180.687	101%	92%	82	1.368.540.060	101%	24%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	4	1.525.650.000	2	563.033.766	2	300.984.960	1	43.302.000	0,5	49.396.000	1	78.340.000	0	103.978.500	2	275.016.500	100%	91%	4	838.050.266	100%	55%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	3	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	4	842.383.600	2	235.325.607	3	321.165.764	1	32.897.700	1	26.800.000	0	57.277.500	1	178.188.987	3	295.164.187	100%	92%	5	530.489.794	125%	63%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase perangkat daerah yang capaian realisasi fisik keuangannya >79% dari target	%	100	816.207.983	100	310.651.308	100	105.000.000	25	13.800.000	25	9.250.000	25	13.750.000	25	68.193.500	100	104.993.500	100%	100%	100	415.644.808	100%	13%	
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	2	388.926.438	1	159.648.407	1	25.000.000	0	-	0	0	0		1	25.000.000	1	25.000.000	100%	100%	2	184.648.407	100%	47%	Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	24	427.281.545	12	151.002.901	12	80.000.000	3	13.800.000	3	9.250.000	3	13.750.000	3	43.193.500	12	79.993.500	100%	100%	24	230.996.401	100%	54%	Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase realisasi paket pengadaan barang/jasa >79% dari target	%	100	1.849.109.309	0	756.979.167	100	358.368.000	25	68.542.585	25	24.140.000	25	37.780.000	25	221.402.934	100	351.865.519	100%	98%	100	1.108.844.686	100%	19%	
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	24	752.279.129	12	384.179.836	12	265.000.000	3	45.047.585	3	9.600.000	3	16.000.000	3	188.180.000	12	258.827.585	100%	98%	24	643.007.421	100%	85%	Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	24	1.096.830.180	12	372.799.331	12	93.368.000	3	23.495.000	3	14.540.000	3	21.780.000	3	33.222.934	12	93.037.934	100%	100%	24	465.837.265	100%	42%	Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase kegiatan yang telah dilaksanakan	%	100	1.113.500.000		661.819.975	100	442.430.780	25	37.026.500	25	50.193.500	25	25.640.500	25	161.468.115	100	274.328.615	100%	62%	100	936.148.590	100%	25%	
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	4	1.113.500.000	0	661.819.975	3	442.430.780	1	37.026.500	1	50.193.500	1	25.640.500	0,5	161.468.115	3	274.328.615	100%	62%	3	936.148.590	75%	84%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	2				SEKRETARIAT DPRD																									
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	Skor	80	62.896.085.602	82	39.379.748.117	86	10.557.257.602	0	2.359.636.950	0	1.446.197.600	0	3.132.176.320	82	2.638.371.469	82	9.576.382.339	95%	91%	82	48.956.130.456	103%	78%	
4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Tercapainya Fungsi Pembentukan Perda DPRD	%	100	23.388.670.051	100	20.052.115.268	100	3.819.600.000	25	1.446.150.250	25	89.979.000	25	1.577.323.480	25	340.828.000	100	3.454.280.730	100%	90%	100	23.506.395.998	100%	15%	
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	42	17.016.503.391	15	10.979.493.543	11	2.675.100.000	3	722.708.000	1	63.379.000	5	1.447.588.480	2	263.133.000	11	2.496.808.480	100%	93%	26	13.476.302.023	62%	79%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Kajian Perundang-undangan yang dilaksanakan	Dokumen	21	6.372.166.660	17	9.072.621.725	4	1.144.500.000	1	723.442.250	1	26.600.000	1	129.735.000	1	77.695.000	4	957.472.250	100%	84%	21	10.030.093.975	100%	157%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Tercapainya Fungsi Penganggaran DPRD	%	100	5.073.995.000	100	3.097.466.694	100	1.255.434.000	25	35.534.800	25	223.357.800	25	526.073.800	25	392.148.154	100	1.177.114.554	100%	94%	100	4.274.581.248	100%	23%	
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	18	5.073.995.000	15	3.097.466.694	5	1.255.434.000	0	35.534.800	1	223.357.800	3	526.073.800	1	392.148.154	5	1.177.114.554	100%	94%	20	4.274.581.248	111%	84%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Program-Program Pemerintah Daerah	%	100	4.254.995.025	100	1.431.500.250	100	791.429.919	50	230.490.000	50	290.792.800		97.570.560	0	69.001.955	100	687.855.315	100%	87%	100	2.119.355.565	100%	16%	
4	2	2	2.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	8	1.311.754.450	7	605.964.810	1	271.986.900	0	4.700.000	1	197.399.600	0	97.570.560	0	9.550.000	1	309.220.160	100%	114%	8	915.184.970	100%	70%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	6	2.943.240.575	5	825.535.440	1	519.443.019	1	225.790.000	0	93.393.200	0	0	0	59.451.955	1	378.635.155	100%	73%	6	1.204.170.595	100%	41%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan SDM Anggota DPRD	%	100	25.743.717.166	100	12.083.733.575	100	3.895.688.836	25	311.015.400	0,3	829.724.000	25	931.208.480	25	1.441.478.860	75	3.513.426.740	75%	90%	100	15.597.160.315	100%	14%	
4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	12	14.688.902.751	6	5.701.714.168	6	2.488.950.000	1	76.384.000	0	142.360.000	1	295.689.580	1	1.295.979.360	3	1.810.412.940	50%	73%	9	7.512.127.108	75%	51%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	12	4.178.076.300	7	2.298.415.415	2	1.406.738.836	0	47.535.400	2	556.144.000	0	635.518.900	0	145.499.500	2	1.384.697.800	100%	98%	9	3.683.113.215	75%	88%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04	8	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	120	1.394.171.223	0	-	120	1.394.171.223	30	187.096.000	30	131.220.000	30	514.425.030	30	488.861.000	120	1.321.602.030	100%	95%	120	1.321.602.030	100%	95%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Jumlah Pokir yang Masuk RKPD	%	100	4.434.708.360	100	2.714.932.330	100	795.104.847	50	336.446.500		12.344.000	0	-	0	394.914.500	95	743.705.000	95%	94%	100	3.458.637.330	100%	17%	
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	360	4.434.708.360	147	2.714.932.330	58	795.104.847	28	336.446.500	0	12.344.000	0	0	29	394.914.500	57	743.705.000	98%	94%	204	3.458.637.330	57%	78%	Sekretariat DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024) PAK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) PAK		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																										
5	1				PERENCANAAN																										
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	%	100	4.720.016.655	100	4.088.620.939	100	2.026.300.083	0	636.099.080	0	340.821.150	0	489.863.366	100	514.036.425	100	1.980.820.021	100%	98%	100	6.069.440.960	100%	129%	
5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kota	Dokumen	12	3.793.016.655	6	3.606.440.014	3	1.696.601.343	0	564.252.930	0	316.063.650	1	444.918.966	2	350.297.625	3	1.675.533.171	100%	99%	9	5.281.973.185	75%	44%	
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	7	590.575.800	5	396.236.692	2	149.095.000	2	144.556.000	0	4.525.000	0	0	0	-	2	149.081.000	100%	100%	7	545.317.692	100%	92%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat	Berita Acara	5	647.695.500	5	405.714.192	1	152.702.835	1	152.369.350	0	0	0	0	0	0	1	152.369.350	100%	100%	6	558.083.542	120%	86%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	6	1.388.690.325	6	1.005.530.392	2	377.743.786	1	189.064.700	1	151.111.260	0	0	0	23.479.500	2	363.655.460	100%	96%	8	1.369.185.852	133%	99%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	4	1.166.055.030	4	1.798.958.738	4	1.017.059.722	0	78.262.880	1	160.427.390	1	444.918.966	2	326.818.125	4	1.010.427.361	100%	99%	8	2.809.386.099	200%	241%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen berita acara hasil verifikasi pengendalian rencana kerja perangkat daerah	Dokumen	8	927.000.000	4	482.180.925	2	329.698.740	0	71.846.150	0	24.757.500	1	44.944.400	1	163.738.800	2	305.286.850	100%	93%	6	787.467.775	75%	33%	
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen	8	297.000.000	6	246.774.600	2	109.800.240	0	17.287.500	1	17.257.500	0	34.820.000	1	36.512.500	2	105.877.500	100%	96%	8	352.652.100	100%	119%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	Dokumen	16	630.000.000	12	235.406.325	4	219.898.500	1	54.558.650	1	7.500.000	0	10.124.400	1	127.226.300	3	199.409.350	75%	91%	15	434.815.675	94%	69%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	%	100	7.129.450.000	84	3.888.911.522	100	1.810.266.216	0	181.689.650	0	489.274.400	0	409.005.080	100	684.779.302	100	1.764.748.432	100%	97%	184	5.653.659.954	184%	79%	
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	Dokumen	2	1.884.000.000	0	1.325.983.199	1	1.030.913.400	0	59.046.100	0	136.994.400	0	173.284.010	1	627.299.102	1	996.623.612	100%	97%	1	2.322.606.811	50%	53%	
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	345.000.000	1	325.096.014	1	100.970.000	0	11.234.500	0	9.478.700	0	23.192.500	1	55.910.000	1	99.815.700	100%	99%	2	424.911.714	100%	123%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	2	60.000.000	1	284.016.700	1	206.150.000	0	7.753.000	1	97.673.700	0	0	0	90.327.400	1	195.754.100	100%	95%	2	479.770.800	100%	800%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	1.459.744.500	1	572.071.185	1	717.374.900	0	38.111.600	0	29.842.000	0	148.014.510	1	478.721.502	1	694.689.612	100%	97%	2	1.266.760.797	100%	87%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	OPD	26	19.255.500	26	144.799.300	26	6.418.500	6	1.947.000	0	0	4	2.077.000	13	2.340.200	23	6.364.200	88%	99%	49	151.163.500	188%	785%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	Dokumen	5	2.681.400.000	3	1.079.590.585	1	308.115.816	0	81.979.350	0	15.670.000	0	191.923.150	1	16.723.300	1	306.295.800	100%	99%	4	1.385.886.385	80%	11%	
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	461.400.000	3	440.308.930	1	201.750.000	0	11.972.100	0	9.770.000	0	179.374.950	0	0	0	201.117.050	0%	100%	3	641.425.980	75%	139%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	perangkat daerah	5	2.220.000.000	3	639.281.655	1	106.365.816	0	70.007.250	0	5.900.000	0	12.548.200	1	16.723.300	1	105.178.750	100%	99%	4	744.460.405	80%	34%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	Dokumen	3	2.564.050.000	1	1.483.337.738	1	471.237.000	0	40.664.200	0	336.610.000	0	43.797.920	1	40.756.900	1	461.829.020	100%	98%	2	1.945.166.758	67%	18%	
5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	546.000.000	3	593.198.198	4	350.720.000	0	13.073.100	2	301.308.000	1	14.000.000	1	14.000.000	4	342.381.100	100%	98%	7	935.579.298	175%	171%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang InfrastruktuR	Laporan	1	1.474.000.000	0	469.045.690	1	82.854.000	0	1.510.000	0	24.015.800	0	29.797.920	1	26.756.900	1	82.080.620	100%	99%	1	551.126.310	100%	37%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	295.650.000	3	361.754.900	1	24.034.000	0	20.235.500	0	3.771.000	1	0	0	0	1	24.006.500	100%	100%	4	385.761.400	100%	130%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Dokumen	12	248.400.000	4	59.338.950	6	13.629.000	2	5.845.600	3	7.515.200	1	0	0	0	6	13.360.800	100%	98%	10	72.699.750	83%	29%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	2				KEUANGAN																									
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	%	100	88.647.719.784	100	25.402.585.544	100	5.251.761.233	25	330.591.216	25	195.596.110	25	1.075.508.958	25	905.560.782	100	2.507.257.066	100%	48%	100	27.909.842.610	100%	31%	
5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	%	100	5.547.219.060	100	2.605.622.719	100	1.126.814.000	25	57.763.504	25	33.016.110	25	568.666.400	25	394.277.469	100	1.053.723.483	100%	94%	100	3.659.346.202	100%	19%	
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	8	1.676.760.110	6	223.269.629	2	83.421.000	0	-	0	0	2	62.783.800	0	14.250.000	2	77.033.800	100%	92%	8	300.303.429	100%	18%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	8	314.892.110	6	162.501.400	2	56.819.000	0	-	0	0	2	33.583.300	0	0	2	33.583.300	100%	59%	8	196.084.700	100%	62%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	70	147.393.060	96	63.947.055	28	16.876.000	28	16.561.844	0	0	0	0	0	0	28	16.561.844	100%	98%	124	80.508.899	177%	55%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	70	143.604.080	96	71.623.829	28	23.640.000	0	-	0	0	0	0	28	23.639.165	28	23.639.165	100%	100%	124	95.262.994	177%	66%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	8	1.041.872.920	5	533.812.014	2	113.677.400	0	-	0	18.016.110	0	0	0	90.158.900	0	108.175.010	0%	95%	5	641.987.024	63%	62%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	8	823.731.210	6	370.978.176	2	195.680.600	0	-	0	0	2	40.939.800	0	151.769.600	2	192.709.400	100%	98%	8	563.687.576	100%	68%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	6	1.398.965.570	7	1.179.490.616	4	636.700.000	0	41.201.660	4	15.000.000	0	431.359.500	0	114.459.804	4	602.020.964	100%	95%	11	1.781.511.580	183%	127%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Dengan Peraturan Perundangan	%	100	1.095.243.000	100	278.079.999	100	55.050.000	25	10.145.000	25	7.190.000	25	14.275.000	25	18.350.000	100	49.960.000	100%	91%	100	328.039.999	100%	5%	
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	220	575.243.000	137	188.500.892	47	49.950.000	0	7.680.000	8	7.190.000	12	12.490.000	26	17.500.000	46	44.860.000	98%	90%	183	233.360.892	83%	41%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	12	520.000.000	14	89.579.107	3	5.100.000	0	2.465.000	3	0	2	1.785.000	3	850.000	3	5.100.000	100%	100%	17	94.679.107	142%	18%	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
5.2.2.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Permintaan Laporan Keuangan yang terfasilitasi	%	100	5.335.766.000	100	3.386.977.905	100	1.162.759.000	25	238.670.000	25	148.390.000	25	461.505.500	20	281.119.000	95	1.129.684.500	95%	97%	100	4.516.662.405	100%	21%	
5.2.2.2.03.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	8	1.160.000.000	8	521.841.388	2	140.000.000	0	12.800.000	0	4.550.000	2	118.405.000	0	1.150.000	2	136.905.000	100%	98%	10	658.746.388	125%	57%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.2.2.2.03.8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	8	170.000.000	12	138.397.074	2	66.000.000	0	9.870.000	2	9.270.000	2	18.125.000	2	20.155.000	2	57.420.000	100%	87%	14	195.817.074	175%	115%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.2.2.2.03.9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	14	500.000.000	11	213.297.723	4	90.000.000	0	49.500.000	0	0	1	15.300.000	3	24.952.000	4	89.752.000	100%	100%	15	303.049.723	107%	61%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.2.2.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggunjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Orang	2200	3.505.766.000	1184	2.513.441.720	600	866.759.000	150	166.500.000	110	134.570.000	70	309.675.500	310	234.862.000	640	845.607.500	107%	98%	1824	3.359.049.220	83%	96%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.2.2.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tersusunnya Laporan BTT	%	100	76.669.491.724	100	19.131.904.921	100	2.907.138.233	25	24.012.712	25	7.000.000	25	31.062.058	20	211.814.313	95	273.889.083	95%	9%	195	19.405.794.004	195%	0%	
5.2.2.2.04.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	36	76.669.491.724	21	19.131.904.921	12	2.907.138.233	3	24.012.712	3	7.000.000	3	31.062.058	2	211.814.313	11	273.889.083	92%	9%	32	19.405.794.004	89%	25%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.2.3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Aset yang Berkondisi Baik	%	100	10.047.997.420	100	5.118.679.522	100	2.065.948.000	14	1.462.888.072	18	10.972.000	30	112.924.048	18	232.341.800	80	1.819.125.920	80%	88%	100	6.937.805.442	100%	69%	
5.2.3.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	66	10.047.997.420	22	5.118.679.522	100	2.065.948.000	3	1.462.888.072	4	10.972.000	5	112.924.048	4	232.341.800	16	1.819.125.920	16%	88%	38	6.937.805.442	58%	18%	
5.2.3.2.01.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	14	630.960.000	9	206.975.469	2	360.067.000	1	-	0	0	0	101.634.048	0	142.061.800	1	243.695.848	50%	68%	10	450.671.317	71%	71%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.2.3.2.01.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	8	9.217.037.420	6	4.816.641.163	2	1.666.281.000	2	1.456.708.072	0	4.852.000	0	0	0	78.030.000	2	1.539.590.072	100%	92%	8	6.356.231.235	100%	69%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.2.3.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	72	200.000.000	54	95.062.890	18	39.600.000	3	6.180.000	3	6.120.000	5	11.290.000	4	12.250.000	15	35.840.000	83%	91%	69	130.902.890	96%	65%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.2.4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	%	10	5.983.031.640	10	2.803.283.530	10	1.130.485.600	5	5.298.000	0	508.980.050	0	260.430.550	5	743.960.375	10	1.518.668.975	100%	134%	10	4.321.952.505	100%	72%	
5.2.4.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	%	100	5.983.031.640	100	2.803.283.530	100	1.130.485.600	5	5.298.000	25	508.980.050	25	260.430.550	45	743.960.375	100	1.518.668.975	100%	134%	100	4.321.952.505	100%	25%	
5.2.4.2.01.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan, pengelolaan Pajak Daerah	dokumen	8	317.122.300	5	267.122.300	2	25.000.000	0	-	0	0	0	7.374.400	2	53.911.500	2	61.285.900	100%	245%	7	328.408.200	88%	104%	Badan Pendapatan Daerah
5.2.4.2.01.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Laporan	7	2.452.161.000	3	636.239.950	4	418.342.600	0	-	2	394.749.200	1	21.412.500	1	54.078.000	4	470.239.700	100%	112%	7	1.106.479.650	100%	45%	Badan Pendapatan Daerah
5.2.4.2.01.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah	Laporan	4	69.750.000	3	127.170.800	1	199.860.000	1	5.298.000	0	0	0	5.931.500	0	221.698.350	1	232.927.850	100%	117%	4	360.098.650	100%	516%	Badan Pendapatan Daerah
5.2.4.2.01.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Laporan	4	1.300.000.000	3	421.968.500	1	200.000.000	0	-	0	0	0	98.062.950	1	100.178.500	1	198.241.450	100%	99%	4	620.209.950	100%	48%	Badan Pendapatan Daerah
5.2.4.2.01.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Obyek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	12909	629.601.700	5901	414.434.700	4651	107.583.500	0	-	4651	99.460.850	0	1.947.000	0	967.600	4651	102.375.450	100%	95%	10552	516.810.150	82%	82%	Badan Pendapatan Daerah
5.2.4.2.01.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	dokumen	58000	207.300.000	0	72.632.600	58615	40.000.000	0	-	0	0	0	0	57489	38.686.225	57489	38.686.225	98%	97%	57489	111.318.825	99%	54%	Badan Pendapatan Daerah
5.2.4.2.01.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi Pajak Daerah	Layanan	26769	233.463.540	17843	208.488.540	18923	12.487.500	0	-	13892	12.450.000	0	0	0	-	13892	12.450.000	73%	100%	31735	220.938.540	119%	95%	Badan Pendapatan Daerah
5.2.4.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	dokumen	4	298.977.000	0	242.920.450	4	86.000.000	0	-	0	0	4	113.010.800	0	219.721.200	4	332.732.000	100%	387%	4	575.652.450	100%	193%	Badan Pendapatan Daerah
5.2.4.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	dokumen	3	423.634.100	0	361.210.100	3	31.212.000	0	-	0	-	3	9.714.300	0	50.019.000	3	59.733.300	100%	191%	100	420.943.400	3333%	99%	Badan Pendapatan Daerah
5.2.4.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	dokumen	4	51.022.000	3	51.095.590	1	10.000.000	0	-	0	2.320.000	1	2.977.100	0	4.700.000	1	9.997.100	100%	100%	4	61.092.690	100%	120%	Badan Pendapatan Daerah
5.5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																									
5.5.2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	%	100	1.890.055.122	100	2.362.579.974	100	1.681.866.000	0	109.067.960	0	491.757.800	0	792.397.713	100	211.084.576	100	1.604.308.049	100%	95%	100	3.966.888.023	100%	210%	
5.5.2.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian/Kajian	Dokumen	5	1.210.809.201	1	1.949.961.013	2	1.421.122.000	0	44.175.300	0	479.292.300	0	676.824.190	2	159.838.076	2	1.360.129.866	100%	96%	3	3.310.090.879	60%	112%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1						2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
5	5	2	2.01	2		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	6	653.766.060	5	1.576.674.415	1	1.256.883.000	0	34.148.800	0	462.495.300	1	639.599.690	0	93.450.800	1	1.229.694.590	100%	98%	6	2.806.369.005	100%	429%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.01	12		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	4	557.043.141	4	373.286.598	1	164.239.000	0	10.026.500	0	16.797.000	0	37.224.500	1	66.387.276	1	130.435.276	100%	79%	5	503.721.874	125%	90%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.04			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Inovasi Daerah	Dokumen	3	679.245.921	1	412.618.961	1	260.744.000	0	64.892.660	0	12.465.500	0	115.573.523	1	51.246.500	1	244.178.183	100%	94%	2	656.797.144	67%	36%	
5	5	2	2.04	1		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	10	679.245.921	10	412.618.961	1	260.744.000	0	64.892.660	0	12.465.500	0	115.573.523	1	51.246.500	1	244.178.183	100%	94%	11	656.797.144	110%	97%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	3					KEPEGAWAIAN																									
5	3	2				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	89	7.263.051.469	88	4.692.382.699	87,7	2.518.038.376	0	97.761.800	0	266.796.500	0	158.600.694	88	1.661.759.673	88	2.184.918.667	100%	87%	176	6.877.301.366	198%	95%	
5	3	2	2.01			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	%	100	3.795.920.632	100	2.139.380.512	100	1.056.657.200	8,33	54.514.800	10	72.182.500	25	94.724.694	57	695.630.750	100,3	917.052.744	100%	87%	100	3.056.433.256	100%	24%	
5	3	2	2.01	4		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan	6	3.482.620.632	5	1.248.038.000	2	862.297.200	1	32.380.800	1	36.947.500	1	21.229.500	0	650.526.750	3	741.084.550	150%	86%	8	1.989.122.550	133%	57%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	6		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	797	153.300.000	575	192.102.600	160	89.360.000	60	1.400.000	30	30.995.000	51	31.895.980	25	19.030.000	166	83.320.980	104%	93%	741	275.423.580	93%	180%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	11		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	12000	160.000.000	6437	699.239.912	1000	105.000.000	638	20.734.000	1000	4.240.000	1000	41.599.214	0	26.074.000	2638	92.647.214	264%	88%	9075	791.887.126	76%	495%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.02			Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi	%	100	1.512.759.907	100	1.054.854.407	100	322.759.176	31,1	30.236.000	7,83	19.200.000	10	35.394.000	52	105.541.000	101	190.371.000	101%	59%	100	1.245.225.407	100%	13%	
5	3	2	2.02	1		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	1613	1.190.399.907	1434	853.047.407	702	230.116.200	190	28.986.000	159	2.000.000	30	12.288.000	342	55.641.000	721	98.915.000	103%	43%	2155	951.962.407	134%	80%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.02	2		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	2164	322.360.000	1833	201.807.000	455	92.642.976	11	1.250.000	209	17.200.000	21	23.106.000	165	49.900.000	406	91.456.000	89%	99%	2239	293.263.000	103%	91%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.03			Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Realisasi Pengembangan Kompetensi	%	100	1.438.077.400	100	1.242.654.950	100	850.840.000	4,19	-	0	-	0	-	100	762.839.423	104,2	762.839.423	104%	90%	100	2.005.494.373	100%	53%	
5	3	2	2.03	2		Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	410	1.438.077.400	333	1.242.654.950	110	850.840.000	9	-	0	0	241	-	0	762.839.423	250	762.839.423	227%	90%	583	2.005.494.373	142%	139%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis	%	100	516.293.530	100	255.492.830	100	287.782.000	4,5	13.011.000	60,95	175.414.000	10	28.482.000	15,55	97.748.500	91	314.655.500	91%	109%	100	570.148.330	100%	61%	
5	3	2	2.04	2		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	4	97.782.000	2	41.565.000	1	20.000.000	0	2.899.000	1	3.730.000	0	0	0	5.315.000	1	11.944.000	100%	60%	3	53.509.000	75%	55%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	4		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	2799	128.760.000	3746	25.435.500	1429	22.410.000	891	-	121	0	151	16.305.000	254	2.750.000	1417	19.055.000	99%	85%	5163	44.490.500	184%	35%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	7		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	349	289.751.530	289	188.492.330	320	245.372.000	137	10.112.000	49	171.684.000	126	12.177.000	0	89.683.500	312	283.656.500	98%	116%	601	472.148.830	172%	163%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																									
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	%	20	14.307.129.964	14	8.261.939.064	13	1.729.384.178	12,4	221.710.500	10	177.213.900	0	899.925.795	0	403.124.268	12,37	1.701.974.463	95%	98%	26	9.963.913.527	132%	70%	
5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis	%	85	5.886.274.020	85	3.463.566.597	85	941.446.378	22,7	214.119.500	8,07	75.947.800	15	348.685.793	40	287.440.100	85,81	926.193.193	101%	98%	171	4.389.759.790	201%	16%	
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	777	5.886.274.020	1020	3.463.566.597	277	941.446.378	386	214.119.500	74	75.947.800	158	348.685.793	129	287.440.100	158	926.193.193	57%	98%	1178	4.389.759.790	152%	75%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti syarat kompetensi jabatannya	%	80	8.420.855.944	80	4.798.372.467	80	787.937.800	1,13	7.591.000	20	101.266.100	25	551.240.002	25	115.684.168	71,13	775.781.270	89%	98%	80	5.574.153.737	100%	9%	
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, JabatanFungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	824	8.420.855.944	701	4.798.372.467	77	787.937.800	10	7.591.000	15	101.266.100	33	551.240.002	25	115.684.168	83	775.781.270	108%	98%	784	5.574.153.737	95%	66%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024) PAK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) PAK		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II		III		IV										
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																									
6	1				INSPEKTORAT DAERAH																									
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang maturitas SPInya level 3	%	45	3.046.318.530	37	1.566.408.227	45	721.400.000	0	226.503.870	0	23.276.000	0	294.321.000	45	94.169.000	45	638.269.870	100%	88%	46	2.204.678.097	102%	72%	
6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan kegiatan	Dokumen	88	2.381.777.600	29	1.196.061.221	29	612.400.000	4	225.447.870	5	15.034.500	11	227.767.500	9	85.410.500	29	553.660.370	100%	90%	58	1.749.721.591	66%	23%	
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	12	210.534.800	8	104.936.605	3	57.400.000	0	0	0	0	1	35.412.500	2	17.553.000	3	52.965.500	100%	92%	11	157.902.105	92%	75%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	74	1.203.958.270	60	655.497.653	15	390.000.000	4	194.718.000	4	13.514.500	5	123.230.000	2	32.616.000	15	364.078.500	100%	93%	75	1.019.576.153	101%	85%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	16	91.751.640	9	58.420.200	4	25.000.000	0	6.845.000	1	1.290.000	1		2	10.642.500	4	18.777.500	100%	75%	13	77.197.700	81%	84%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	12	795.300.980	9	328.828.563	3	120.000.000	0	23.884.870	0	230.000	2	60.550.000	1	13.359.500	3	98.024.370	100%	82%	12	426.852.933	100%	54%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	16	80.231.910	10	48.378.200	4	20.000.000	0	0	0	0	2	8.575.000	0	11.239.500	2	19.814.500	50%	99%	12	68.192.700	75%	85%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	664.540.930	0	370.347.006	100	109.000.000	0	1.056.000	0	8.241.500	0	66.553.500	100	8.758.500	100	84.609.500	100%	78%	100	454.956.506	100%	13%	
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	4	21.033.600	2	5.337.000	2	74.000.000	1	1.056.000	0	1.520.000	1	51.315.000	0	2.593.500	2	56.484.500	100%	76%	4	61.821.500	100%	294%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	4	643.507.330	5	365.010.006	1	35.000.000	0	0	0	6.721.500	1	15.238.500	0	6.165.000	1	28.125.000	100%	80%	6	393.135.006	150%	61%	Inspektorat Daerah
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang terpenuhi	%	100	4.486.395.480	100	2.762.866.965	100	908.756.000	88	81.380.000	13	182.572.100	0	209.126.500	0	423.095.425	100	896.174.025	100%	99%	100	3.659.040.990	100%	82%	
6	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang disusun	Dokumen	10	24.227.300	6	16.258.400	2	7.000.000	1	1.000.000	1	-	0	1.150.000	0	4.760.500	2	6.910.500	100%	99%	8	23.168.900	80%	29%	
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	4	24.227.300	2	16.258.400	2	7.000.000	1	1.000.000	1	0	0	1.150.000	0	4.760.500	2	6.910.500	100%	99%	4	23.168.900	100%	96%	Inspektorat Daerah
6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi	Dokumen	24	4.462.168.180	12	2.746.608.565	6	901.756.000	6	80.380.000	0	182.572.100	0	207.976.500	0	418.334.925	6	889.263.525	100%	99%	18	3.635.872.090	75%	20%	
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	10	1.304.190.980	5	892.143.365	4	250.000.000	5	3.830.000	0	26.361.500	0	43.031.500	0	169.535.800	5	242.758.800	125%	97%	10	1.134.902.165	100%	87%	Inspektorat Daerah
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	9	3.157.977.200	4	1.854.465.200	2	651.756.000	1	76.550.000	0	156.210.600	0	164.945.000	1	248.799.125	2	646.504.725	100%	99%	6	2.500.969.925	67%	79%	Inspektorat Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024) PAK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) PAK		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV									
1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
7				UNSUR KEWILAYAHAN																									
7	1			KECAMATAN TAMAN																									
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88	26.430.508.946	88	18.441.009.217	88,4	5.221.308.502	0	1.223.128.557	0	699.689.840	90	1.707.075.406	0	1.572.809.396	90	5.202.703.199	101%	100%	92	23.643.712.416	105%	89%	
7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	26.226.742.236	100	18.336.141.832	100	5.202.542.502	25	1.219.632.557	25	696.039.840	25	1.703.939.006	25	1.546.088.896	100	5.165.700.299	100%	99%	100	23.501.842.131	100%	20%	
7	1	2	2.02	3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Mojorejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	3.045.398.257	12	2.142.338.908	12	541.859.200	3	119.603.405	3	80.082.441	3	162.953.459	3	173.088.201	12	535.727.506	100%	99%	24	2.678.066.414	100%	88%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.02	3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pandean)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	3.037.887.882	12	2.004.486.067	12	678.198.200	3	112.539.325	3	82.223.234	3	173.139.923	3	297.542.254	12	665.444.736	100%	98%	24	2.669.930.803	100%	88%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.02	3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Banjarejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	2.817.121.283	12	1.861.643.682	12	612.715.970	3	202.959.254	3	72.624.460	3	156.983.596	3	249.504.029	12	682.071.339	100%	111%	24	2.543.715.021	100%	90%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.02	3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kuncen)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	1.775.702.108	12	1.401.099.717	12	331.714.804	3	75.086.203	3	49.983.851	3	103.758.601	3	96.180.420	12	325.009.075	100%	98%	24	1.726.108.792	100%	97%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.02	3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Manisrejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	3.637.248.214	12	2.617.139.507	12	677.425.600	3	179.083.460	3	122.781.354	3	244.157.158	3	122.715.221	12	668.737.193	100%	99%	24	3.285.876.700	100%	90%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.02	3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kejuron)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	2.930.464.825	15	2.044.970.687	12	582.100.088	3	126.072.577	3	80.483.642	3	180.424.132	3	152.502.064	12	539.482.415	100%	93%	27	2.584.453.102	113%	88%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.02	3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Josenan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	2.793.187.567	15	1.992.011.194	12	674.869.440	3	145.499.860	3	69.375.598	3	346.836.378	3	106.765.189	12	668.477.025	100%	99%	27	2.660.488.219	113%	95%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.02	3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Demangan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	3.010.891.200	12	2.215.432.832	12	569.918.000	3	137.068.295	3	61.372.650	3	159.840.571	3	207.958.065	12	566.239.581	100%	99%	24	2.781.672.413	100%	92%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.02	3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Taman)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	3.178.840.900	12	2.057.019.238	12	533.741.200	3	121.720.178	3	77.112.610	3	175.845.188	3	139.833.453	12	514.511.429	100%	96%	24	2.571.530.667	100%	81%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	203.766.710	100	104.867.385	100	18.766.000	25	3.496.000	25	3.650.000	25	3.136.400	25	26.720.500	100	37.002.900	100%	197%	200	141.870.285	200%	18%	
7	1	2	2.03	1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	8	203.766.710	4	104.867.385	4	18.766.000	1	3.496.000	1	3.650.000	1	3.136.400	1	26.720.500	4	37.002.900	100%	197%	8	141.870.285	100%	70%	Kecamatan Taman
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	13.588.640.096	0	17.967.500.409	100	13.172.418.723	0	5.553.820.145	0	5.585.287.691	0	2.143.765.500	100	62.977.500	100	13.345.850.836	100%	101%	100	31.313.351.245	100%	230%	
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	13.336.545.396	100	17.824.685.009	100	13.046.371.373	100	5.553.820.145	0	5.511.559.341	0	2.143.765.500	0	62.977.500	100	13.272.122.486	100%	102%	200	31.096.807.495	200%	100%	
7	1	3	2.02	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	7	1.231.203.848	7	780.573.661	7	101.574.950	7	70.528.125	0	0	0	0	0	29.069.000	7	99.597.125	100%	98%	14	880.170.786	200%	71%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mojorejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	6	1.230.000.000	6	1.202.483.399	2	501.411.408	1	331.686.945	1	164.242.058	0	2.642.600	0	-	2	498.571.603	100%	99%	8	1.701.055.002	133%	138%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pandean)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	6	879.709.890	5	1.314.348.786	2	385.833.250	1	313.892.000	1	66.984.224	0	3.768.200	0	0	2	384.644.424	100%	100%	7	1.698.993.210	117%	193%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Banjarejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	6	847.354.000	5	1.561.027.761	2	1.368.279.860	1	1.362.800.000	1	310.212.500	0	0	0	5.310.000	2	1.678.322.500	100%	123%	7	3.239.350.261	117%	382%	Kecamatan Taman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kuncen)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	6	1.020.125.000	5	1.097.305.377	2	193.905.600	1	187.145.150	1	6.049.406	0	0	0	350.000	2	193.544.556	100%	100%	7	1.290.849.933	117%	127%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Manisrejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	6	956.750.000	4	2.255.988.438	2	2.164.033.104	1	977.459.104	1	1.166.019.038	0	0	0	-	2	2.143.478.142	100%	99%	6	4.399.466.580	100%	460%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kejuron)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	6	893.112.808	6	1.391.151.620	2	1.099.069.250	1	1.095.978.050	1	484.923	0	0	0	350.000	2	1.096.812.973	100%	100%	8	2.487.964.593	133%	279%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Josenan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	8	688.085.970	4	1.797.365.502	2	331.455.500	1	322.423.500	1	5.071.900	0	3.960.000	0	-	2	331.455.400	100%	100%	6	2.128.820.902	75%	309%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Demangan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	10	755.528.000	4	2.351.490.542	2	1.376.751.671	1	512.064.271	1	817.297.692	0	-	0	-	2	1.329.361.963	100%	97%	6	3.680.852.505	60%	487%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Taman)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	8	1.308.780.000	1	1.730.443.624	2	372.502.822	2	363.843.000	0	6.590.000	0	0	0	1.960.000	2	372.393.000	100%	100%	3	2.102.836.624	38%	161%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Josenan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	2	478.850.000	2	231.416.540	2	398.521.400	0	1.400.000	2	235.721.100	0	158.700.000	0	2.700.000	2	398.521.100	100%	100%	4	629.937.640	200%	132%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mojorejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	3	476.687.535	1	366.234.519	2	784.321.600	0	-	2	429.692.000	0	351.000.000	0	3.610.000	2	784.302.000	100%	100%	3	1.150.536.519	100%	241%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pandean)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	2	390.264.650	1	359.192.850	2	564.000.000	0	-	2	309.800.000	0	250.909.400	0	428.000	2	561.137.400	100%	99%	3	920.330.250	150%	236%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Banjarejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	3	228.750.000	2	128.339.100	2	441.500.000	0	-	1	332.800.000	1	94.985.000	0	9.700.000	2	437.485.000	100%	99%	4	565.824.100	133%	247%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kuncen)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	3	118.606.875	3	59.295.700	2	136.230.000	0	13.200.000	2	62.608.000	0	56.707.000	0	3.600.500	2	136.115.500	100%	100%	5	195.411.200	167%	165%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Manisrejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	4	488.875.750	4	434.082.600	2	725.100.000	0	-	2	423.555.400	0	301.500.000	0	0	2	725.055.400	100%	100%	6	1.159.138.000	150%	237%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kejuron)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	2	407.511.070	1	280.038.850	2	616.700.000	0	-	2	329.200.000	0	287.296.700	0	0	2	616.496.700	100%	100%	3	896.535.550	150%	220%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Josenan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	2	478.850.000	2	231.416.540	2	398.521.400	0	1.400.000	2	235.721.100	0	158.700.000	0	2.700.000	2	398.521.100	100%	100%	4	629.937.640	200%	132%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Demangan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	4	228.750.000	4	138.262.300	2	449.760.000	0	-	2	267.910.000	0	181.500.000	0	0	2	449.410.000	100%	100%	6	587.672.300	150%	257%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Taman)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	3	228.750.000	3	114.227.300	2	636.899.558	0	-	2	341.600.000	0	292.096.600	0	3.200.000	2	636.896.600	100%	100%	5	751.123.900	167%	328%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	2	252.094.700	0	142.815.400	2	126.047.350	0	-	1	73.728.350	0	-	0	-	1	73.728.350	50%	58%	1	216.543.750	50%	29%	
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	4	252.094.700	27	142.815.400	3	126.047.350	0	-	1	73.728.350	0	0	0		1	73.728.350	33%	58%	28	216.543.750	700%	86%	Kecamatan Taman
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	100	2.280.307.923	100	1.627.326.790	100	495.722.585	0	158.785.300	0	60.072.800	0	65.547.800	100	198.807.400	100	483.213.300	100%	97%	100	2.110.540.090	100%	93%	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100	1.147.934.268	100	770.021.450	100	122.835.285	25	15.787.000	25	16.708.900	25	39.076.800	25	47.249.500	100	118.822.200	100%	97%	200	888.843.650	200%	10%	
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	28	1.147.934.268	31	770.021.450	4	122.835.285	1	15.787.000	1	16.708.900	2	39.076.800	0	47.249.500	4	118.822.200	100%	97%	35	888.843.650	125%	77%	Kecamatan Taman
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100	1.132.373.655	100	857.305.340	100	372.887.300	25	142.998.300	25	43.363.900	25	26.471.000	25	151.557.900	100	364.391.100	100%	98%	100	1.221.696.440	100%	32%	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	32	1.132.373.655	44	857.305.340	7	372.887.300	3	142.998.300	3	43.363.900	1	26.471.000	0	151.557.900	7	364.391.100	100%	98%	51	1.221.696.440	159%	108%	Kecamatan Taman
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan OPD lain	%	100	481.170.346	100	260.602.395	100	119.067.313	25	36.344.000	25	8.640.000	25	27.160.800	25	39.144.700	100	111.289.500	100%	93%	100	371.891.895	100%	77%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase himbauan Kepala daerah yang ditindaklanjuti	%	100	481.170.346	100	260.602.395	100	119.067.313	25	36.344.000	25	8.640.000	25	27.160.800	25	39.144.700	100	111.289.500	100%	93%	100	371.891.895	100%	23%	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	240	280.870.105	47	107.376.906	120	36.447.613	60	18.015.800	0	0	60	15.515.800	0	0	120	33.531.600	100%	92%	167	140.908.506	70%	50%	Kecamatan Taman
7	1	5	2.01	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	8	142.192.750	2	102.299.463	4	61.652.000	1	14.213.000	1	7.285.000	1	11.645.000	1	23.704.000	4	56.847.000	100%	92%	6	159.146.463	75%	112%	Kecamatan Taman
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	10	58.107.491	6	50.926.026	3	20.967.700	1	4.115.200	0	1.355.000	0	0	2	15.440.700	3	20.910.900	100%	100%	9	71.836.926	90%	124%	Kecamatan Taman
7	1				KECAMATAN KARTOHARJO																									
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	89	24.769.304.356	88	16.976.651.885	88,7	4.797.185.902	0	992.807.757	0	693.627.343	0	1.642.578.320	88	1.404.123.371	88	4.733.136.791	99%	99%	89	21.709.788.676	101%	88%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	24.557.931.006	100	16.880.673.217	100	4.734.309.402	25	965.110.257	25	675.043.343	25	1.625.983.320	25	1.404.123.371	100	4.670.260.291	100%	99%	4	21.550.933.508	4%	19%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Oro - Oro Ombo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	2.830.176.550	12	1.988.363.070	12	582.495.400	3	123.120.210	3	83.133.960	3	200.067.409	3	196.334.003	12	602.655.582	100%	103%	24	2.591.018.652	100%	92%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sukosari)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	2.496.137.690	12	1.666.793.043	12	474.155.259	3	91.877.721	3	70.043.714	3	146.127.147	3	169.309.514	12	477.358.096	100%	101%	24	2.144.151.139	100%	86%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Klegen)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	3.149.632.421	12	2.184.662.473	12	586.354.443	3	103.094.962	3	99.103.917	3	212.487.404	3	198.045.897	12	612.732.180	100%	104%	24	2.797.394.653	100%	89%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Rejomulyo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	2.815.245.991	12	1.864.095.074	12	551.945.500	3	115.039.786	3	90.841.930	3	176.209.777	3	188.163.367	12	570.254.860	100%	103%	24	2.434.349.934	100%	86%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pilangbango)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	24	2.604.190.966	12	1.779.135.153	12	510.397.300	3	93.707.202	3	61.714.385	3	170.827.056	3	0	12	326.248.643	100%	64%	24	2.105.383.796	100%	81%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Tawangrejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	24	2.460.405.000	12	1.730.045.404	12	460.914.000	3	124.265.702	3	59.523.650	3	148.530.490	3	139.606.408	12	471.926.250	100%	102%	24	2.201.971.654	100%	89%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kanigoro)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	24	2.890.693.570	12	2.060.523.950	12	578.384.600	3	119.981.101	3	80.904.294	3	195.985.930	3	195.221.481	12	592.092.806	100%	102%	24	2.652.616.756	100%	92%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kartoharjo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	24	2.729.342.780	12	1.863.947.569	12	507.239.000	3	99.817.113	3	66.843.472	3	184.890.329	3	169.683.015	12	521.233.929	100%	103%	24	2.385.181.498	100%	87%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelun)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	24	2.582.106.038	12	1.743.107.481	12	482.423.900	3	94.206.460	3	62.934.021	3	190.857.778	3	147.759.686	12	495.757.945	100%	103%	24	2.238.865.426	100%	87%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	211.373.350	100	95.978.668	100	62.876.500	25	27.697.500	25	18.584.000	25	16.595.000	25	-	100	62.876.500	100%	100%	200	158.855.168	200%	30%	
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	9	211.373.350	4	95.978.668	2	62.876.500	0	27.697.500	1	18.584.000	0	16.595.000	0	0	1	62.876.500	50%	100%	5	158.855.168	56%	75%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	15.143.519.923	100	15.059.132.871	100	10.770.551.670	10	2.490.327.856	20	6.463.762.315	50	1.518.893.622	0	45.958.000	80	10.518.941.793	80%	98%	100	25.578.074.664	100%	169%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	%	100	14.990.901.523	100	14.930.186.171	100	10.726.640.270	0	2.482.311.756	100	6.455.837.315	0	1.506.930.622	0	30.600.000	100	10.475.679.693	100%	98%	100	25.405.865.864	100%	70%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga	7	1.077.868.734	7	720.648.763	7	72.831.600	7	68.442.000	0	2.519.000	0	0	0	0	7	70.961.000	100%	97%	14	791.609.763	200%	73%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Oro - Oro Ombo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	1.371.704.780	3	1.723.475.131	2	396.590.630	1	164.443.800	1	229.295.800	0	-	0		2	393.739.600	100%	99%	5	2.117.214.731	125%	154%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sukosari)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	1.288.993.271	3	1.447.715.901	2	614.386.230	0	126.165.482	2	456.598.403	0	-	0		2	582.763.885	100%	95%	5	2.030.479.786	125%	158%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Klegen)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	1.359.741.400	3	1.584.385.611	2	930.619.430	1	417.098.700	1	512.820.730	0		0	-	2	929.919.430	100%	100%	5	2.514.305.041	125%	185%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Rejomulyo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	1.320.192.250	4	1.569.642.497	2	925.421.230	1	227.627.100	1	691.916.816	0		0		2	919.543.916	100%	99%	6	2.489.186.413	150%	189%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pilangbango)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	1.077.172.443	3	1.208.687.935	2	602.415.630	1	198.374.914	1	400.620.300	0	2.900.000	0	-	2	601.895.214	100%	100%	5	1.810.583.149	125%	168%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tawangrejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	1.053.044.800	3	1.106.085.061	2	884.675.030	1	214.911.030	1	669.064.000	0	250.000	0	-	2	884.225.030	100%	100%	5	1.990.310.091	125%	189%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kanigoro)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	1.655.636.375	4	1.713.110.915	2	1.022.998.230	1	208.600.600	1	756.630.326	0		0		2	965.230.926	100%	94%	6	2.678.341.841	150%	162%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kartoharjo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	1.050.838.280	4	1.507.171.100	2	715.221.630	1	271.207.300	1	434.228.140	0		0		2	705.435.440	100%	99%	6	2.212.606.540	150%	211%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelun)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	1.554.877.355	3	1.423.786.407	2	647.894.630	1	115.040.830	1	531.611.800	0		0		2	646.652.630	100%	100%	5	2.070.439.037	125%	133%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Oro - Oro Ombo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	226.414.150	5	94.300.250	5	524.704.000	1	63.600.000	2	215.000.000	2	243.940.622	0	1.610.000	5	524.150.622	100%	100%	10	618.450.872	200%	273%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sukosari)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	206.622.000	5	81.974.500	5	250.104.000	2	30.000.000	2	180.000.000	1	40.004.000	0	0	5	250.004.000	100%	100%	10	331.978.500	200%	161%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Klegen)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	229.146.600	5	95.280.950	5	591.204.000	1	70.800.000	3	360.000.000	1	138.244.000	0	22.160.000	5	591.204.000	100%	100%	10	686.484.950	200%	300%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Rejomulyo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	341.367.500	5	155.816.000	5	480.404.000	1	60.000.000	2	192.000.000	2	225.244.000	0	3.010.000	5	480.254.000	100%	100%	10	636.070.000	200%	186%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pilangbango)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	221.430.180	4	86.709.000	5	293.704.000	1	33.600.000	1	84.900.000	2	172.394.000	0	0	4	290.894.000	80%	99%	8	377.603.000	160%	171%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tawangrejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	243.253.895	4	101.538.300	5	317.604.000	1	37.200.000	2	125.894.000	2	153.260.000	0	0	5	316.354.000	100%	100%	9	417.892.300	180%	172%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kanigoro)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	256.700.500	4	124.238.350	5	638.404.000	1	78.000.000	2	220.000.000	2	338.344.000	0	1.910.000	5	638.254.000	100%	100%	9	762.492.350	180%	297%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kartoharjo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	224.416.160	4	93.141.450	5	478.004.000	1	57.600.000	2	226.994.000	2	191.500.000	1	1.910.000	6	478.004.000	120%	100%	10	571.145.450	200%	255%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelun)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	231.480.850	4	92.478.050	5	339.454.000	1	39.600.000	2	165.744.000	2	850.000	0	0	5	206.194.000	100%	61%	9	298.672.050	180%	129%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Lembaga/ Forum	1	152.618.400	0	128.946.700	1	43.911.400	0	8.016.100	0	7.925.000	0	11.963.000	1	15.358.000	1	43.262.100	100%	99%	1	172.208.800	100%	28%	
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	24	152.618.400	12	128.946.700	12	43.911.400	1	8.016.100	1	7.925.000	5	11.963.000	5	15.358.000	12	43.262.100	100%	99%	24	172.208.800	100%	113%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	1.822.423.455	100	1.594.416.290	100	418.809.300	25	158.045.000	25	17.738.500	25	75.603.000	25	153.402.000	100	404.788.500	100%	97%	100	1.999.204.790	100%	110%	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	%	100	986.862.980	100	897.886.646	100	94.670.100	25	17.622.500	25	17.738.500	15	22.176.000	40	35.324.000	105	92.861.000	105%	98%	100	990.747.646	100%	9%	
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	32	986.862.980	23	897.886.646	16	94.670.100	2	17.622.500	4	17.738.500	2	22.176.000	8	35.324.000	16	92.861.000	100%	98%	39	990.747.646	122%	100%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	%	100	835.560.475	100	696.529.644	100	324.139.200	40	140.422.500	0	-	0	53.427.000	60	118.078.000	100	311.927.500	100%	96%	100	1.008.457.144	100%	37%	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatananjuti	Laporan	17	835.560.475	12	696.529.644	11	324.139.200	4	140.422.500	0	0	2	53.427.000	5	118.078.000	11	311.927.500	100%	96%	23	1.008.457.144	135%	121%	Kecamatan Kartoharjo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	%	100	729.543.230	100	361.782.897	100	158.305.600	0	20.325.000	40	39.946.500	30	39.434.100	30	53.961.900	100	153.667.500	100%	97%	100	515.450.397	100%	71%	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	%	100	729.543.230	100	361.782.897	100	158.305.600	0	20.325.000	30	39.946.500	30	39.434.100	40	53.961.900	100	153.667.500	100%	97%	100	515.450.397	100%	21%	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	450	256.799.410	720	137.235.176	125	66.120.000	0	-	50	20.741.500	0	24.122.100	50	20.420.000	100	65.283.600	80%	99%	820	202.518.776	182%	79%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	5	2.01	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	8	292.730.460	4	166.462.899	4	79.157.600	1	16.805.000	0	19.205.000	1	11.792.000	2	27.582.000	4	75.384.000	100%	95%	8	241.846.899	100%	83%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	8	180.013.360	8	58.084.822	3	13.028.000	0	3.520.000	0	0	1	3.520.000	2	5.959.900	3	12.999.900	100%	100%	11	71.084.722	138%	39%	Kecamatan Kartoharjo
7	1				KECAMATAN MANGUHARJO																									
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Skor	93	25.013.117.061	92	18.472.830.863	90	5.428.381.346	0	1.153.205.943	90	826.316.064	0	2.074.362.449	0	1.690.019.713	90	5.743.904.169	100%	106%	90	24.216.735.032	97%	97%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	24.754.808.971	100	18.391.128.644	100	5.373.370.546	25	1.129.389.443	25	805.303.264	25	2.074.362.449	25	1.679.888.313	100	5.688.943.469	100%	106%	100	24.080.072.113	100%	23%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Manguharjo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	2.875.032.246	24	2.340.182.813	12	595.487.800	3	129.462.358	2	82.995.951	2	189.482.199	5	207.266.782	12	609.207.290	100%	102%	36	2.949.390.103	150%	103%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sogaten)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	2.586.502.235	24	1.886.879.465	12	564.516.600	3	106.348.140	3	96.317.830	2	195.130.034	5	181.960.222	13	579.756.226	108%	103%	37	2.466.635.691	154%	95%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Patihan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	2.416.966.423	24	1.729.958.593	12	530.914.552	3	112.284.910	3	69.758.627	2	184.474.448	5	170.720.620	13	537.238.605	108%	101%	37	2.267.197.198	154%	94%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Ngegong)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	2.299.617.535	24	1.734.658.084	12	515.390.994	3	103.175.101	3	80.198.065	2	189.058.359	5	148.503.187	13	520.934.712	108%	101%	37	2.255.592.796	154%	98%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Winongo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	2.905.116.377	24	1.874.909.294	12	584.307.000	3	94.784.446	2	106.487.301	2	241.674.856	5	156.128.414	12	599.075.017	100%	103%	36	2.473.984.311	150%	85%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Madiun Lor)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	2.790.671.914	24	2.050.051.037	12	593.210.300	3	107.424.219	2	108.796.513	2	228.523.788	5	162.598.290	12	607.342.810	100%	102%	36	2.657.393.847	150%	95%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pangongangan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	2.387.695.609	13	1.771.914.394	12	534.565.000	3	129.059.982	2	61.714.385	2	171.835.234	5	159.608.355	12	522.217.956	100%	98%	25	2.294.132.350	104%	96%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Nambangan Lor)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	3.451.235.283	24	2.747.391.932	12	808.325.400	3	201.067.743	2	106.914.257	2	233.880.808	5	297.755.553	12	839.618.361	100%	104%	36	3.587.010.293	150%	104%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Nambangan Kidul)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	3.041.971.349	24	2.255.183.032	12	646.652.900	3	145.782.544	2	92.120.335	2	440.302.723	5	195.346.890	12	873.552.492	100%	135%	36	3.128.735.524	150%	103%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti	%	100	258.308.090	100	81.702.219	100	55.010.800	25	23.816.500	25	21.012.800	0	-	0	10.131.400	50	54.960.700	50%	100%	50	136.662.919	50%	21%	
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	2	258.308.090	2	81.702.219	1	55.010.800	0	23.816.500	1	21.012.800	0	0	0	10.131.400	1	54.960.700	100%	100%	3	136.662.919	150%	53%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	%	100	13.387.081.695	100	16.175.706.923	100	11.380.513.367	25	5.617.643.596	50	3.351.520.398	0	2.031.733.100	25	255.991.040	100	11.256.888.134	100%	99%	100	27.432.595.057	100%	205%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	13.263.806.895	100	16.116.316.823	100	11.318.875.967	25	5.583.799.946	50	3.342.177.898	0	2.023.615.600	25	246.323.540	100	11.195.916.984	100%	99%	100	27.312.233.807	100%	84%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga	7	1.168.806.895	7	728.475.210	7	65.715.050	7	58.917.807	7	854.300	0		0	1.241.400	7	61.013.507	100%	93%	14	789.488.717	200%	68%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Manguharjo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	1.052.000.000	4	1.604.727.650	2	1.662.377.032	1	1.506.679.500	0	141.787.500	0		1	5.910.000	2	1.654.377.000	100%	100%	6	3.259.104.650	150%	310%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sogaten)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	925.900.000	5	1.524.758.693	2	555.100.000	0,5	538.825.501	0,5	7.440.700	0		1	1.210.000	2	547.476.201	100%	99%	7	2.072.234.894	175%	224%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Patihan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	972.500.000	3	1.102.095.400	2	257.703.000	0,5	241.771.500	0,5	10.221.000	0	4.500.000	1	1.210.000	2	257.702.500	100%	100%	5	1.359.797.900	125%	140%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Ngegong)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	773.000.000	5	1.698.184.686	2	1.318.139.000	0,5	644.246.100	0,5	668.086.000	0	4.382.100	1	1.410.000	2	1.318.124.200	100%	100%	7	3.016.308.886	175%	390%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Winongo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	947.088.320	4	1.084.322.122	2	1.233.131.542	0,5	1.190.290.000	0,5	12.721.500	0		1	74.210.000	2	1.277.221.500	100%	104%	6	2.361.543.622	150%	249%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Madiun Lor)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	992.600.000	3	1.536.215.146	2	475.002.538	0,5	467.645.538	0,5	4.447.000	0		1	120.666.000	2	592.758.538	100%	125%	5	2.128.973.684	125%	214%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pangongangan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	740.385.000	4	1.357.805.502	2	513.439.046	0,5	113.961.500	0,5	400.620.300	0	6.021.500	1	4.810.000	2	525.413.300	100%	102%	6	1.883.218.802	150%	254%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Nambangan Lor)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	1.210.000.000	5	2.705.727.489	2	705.350.000	0,5	356.348.000	0,5	307.571.998	0	4.190.000	1	35.656.140	2	703.766.138	100%	100%	7	3.409.493.627	175%	282%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Nambangan Kidul)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	635.000.000	4	928.327.812	2	680.917.390	0,5	465.114.500	0,5	212.222.800	0		1	-	2	677.337.300	100%	99%	6	1.605.665.112	150%	253%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Manguharjo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	5	348.000.000	5	201.561.800	5	415.500.000	0	-	0	54.000.000	4	181.500.000	0	0	4	235.500.000	80%	57%	9	437.061.800	180%	126%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sogaten)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	5	474.100.000	5	249.949.952	5	343.400.000	0	-	2	196.876.800	2	146.500.000	0	0	4	343.376.800	80%	100%	9	593.326.752	180%	125%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Patihan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	5	427.500.000	3	206.281.065	5	270.892.369	0	-	2	144.800.000	2	126.043.400	0	0	4	270.843.400	80%	100%	7	477.124.465	140%	112%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Ngegong)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	5	475.000.000	4	252.662.236	5	209.947.600	0	-	2	112.600.000	2	97.347.600	0	0	4	209.947.600	80%	100%	8	462.609.836	160%	97%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Winongo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	5	452.911.680	6	150.870.350	5	435.098.000	0	-	2	243.800.000	2	191.297.000	0	0	4	435.097.000	80%	100%	10	585.967.350	200%	129%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Madiun Lor)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	5	424.400.000	4	210.896.890	5	494.162.300	0	-	2	267.200.000	2	226.960.200	0	0	4	494.160.200	80%	100%	8	705.057.090	160%	166%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pangongangan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	5	429.615.000	5	205.983.300	5	307.584.100	0	-	2	84.900.000	2	131.500.000	0	0	4	216.400.000	80%	70%	9	422.383.300	180%	98%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Nambangan Lor)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	5	340.000.000	5	138.973.550	5	828.528.000	0	-	2	472.028.000	2	356.500.000	0	0	4	828.528.000	80%	100%	9	967.501.550	180%	285%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Nambangan Kidul)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	5	475.000.000	5	228.497.970	5	546.889.000	0	-	2	0	2	546.873.800	0	0	4	546.873.800	80%	100%	9	775.371.770	180%	163%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga kemsyarakatan Tingkat Kecamatan	Forum	2	123.274.800	0	59.390.100	2	61.637.400	0,5	33.843.650	0,5	9.342.500	0,5	8.117.500	0,5	9.667.500	2	60.971.150	100%	99%	2	120.361.250	100%	49%	
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	2	123.274.800	2	59.390.100	1	61.637.400	0	33.843.650	0	9.342.500	0	8.117.500	1	9.667.500	1	60.971.150	100%	99%	3	120.361.250	150%	98%	Kecamatan Manguharjo
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	3.036.549.115	100	1.848.654.130	100	513.293.700	25	172.628.400	25	63.302.600	25	53.967.000	25	201.699.100	100	491.597.100	100%	96%	100	2.340.251.230	100%	77%	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	%	100	2.158.825.525	100	680.085.158	100	106.534.600	25	10.732.000	25	31.739.000	0	36.522.000	50	22.433.000	100	101.426.000	100%	95%	100	781.511.158	100%	5%	
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2	2.158.825.525	2	680.085.158	1	106.534.600	0	10.732.000	1	31.739.000	0	36.522.000	0	22.433.000	1	101.426.000	100%	95%	3	781.511.158	150%	36%	Kecamatan Manguharjo
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	%	100	877.723.590	100	1.168.568.972	100	406.759.100	25	161.896.400	25	31.563.600	25	17.445.000	25	179.266.100	100	390.171.100	100%	96%	100	1.558.740.072	100%	44%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	2	877.723.590	2	1.168.568.972	1	406.759.100	1	161.896.400	0	31.563.600	0	17.445.000	0	179.266.100	1	390.171.100	100%	96%	3	1.558.740.072	150%	178%	Kecamatan Manguharjo
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	%	100	983.837.267	100	527.381.057	100	120.018.000	25	47.468.000	25	18.473.400	25	3.245.000	25	48.298.600	100	117.485.000	100%	98%	100	644.866.057	100%	66%	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	%	100	755.449.767	100	370.996.057	100	74.834.000	25	23.734.000	25	17.473.400	25	3.245.000	25	29.098.600	100	73.551.000	100%	98%	100	444.547.057	100%	10%	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	700	464.774.767	700	170.197.207	350	16.480.000	0	-	350	16.473.400	0		0	0	350	16.473.400	100%	100%	1050	186.670.607	150%	40%	Kecamatan Manguharjo
7	1	5	2.01	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	Laporan	2	228.387.500	2	156.385.000	1	45.184.000	0,3	23.734.000	0,3	1.000.000	0		0,5	19.200.000	1	43.934.000	100%	97%	3	200.319.000	150%	88%	Kecamatan Manguharjo
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pmerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	8	62.287.500	12	44.413.850	2	13.170.000	0	-	0	0	0	3.245.000	2	9.898.600	2	13.143.600	100%	100%	14	57.557.450	175%	92%	Kecamatan Manguharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024) PAK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) PAK		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II		III		IV										
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																											
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																											
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan pembinaan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	100	1.985.549.441	100	996.431.364	100	956.064.750	0	43.659.750	0	130.794.100	50	531.000.800	50	314.908.945	100	1.020.363.595	100%	107%	100	2.016.794.959	100%	102%	
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah jenis kegiatan	jenis	12	1.985.549.441	0	996.431.364	7	956.064.750	0	43.659.750	1	130.794.100	3	531.000.800	3	314.908.945	7	1.020.363.595	100%	107%	7	2.016.794.959	58%	51%	
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	600	1.261.549.441	325	996.431.364	125	328.190.000	0	2.214.750	45	100.000.000	0	0	80	314.908.945	125	417.123.695	100%	127%	450	1.413.555.059	75%	112%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2	2.01	7	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	2	724.000.000			2	627.874.750	0	41.445.000	0	30.794.100	2	531.000.800	0	231.706.000	2	834.945.900	100%	133%	2	834.945.900	100%	115%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik pemenang Pemilu	%	100	32.422.433.023	100	13.813.372.740	100	18.375.563.500	0	13.484.934.492	0	650.208.800	100	3.293.162.588	0	595.694.683	100	18.024.000.563	100%	98%	100	31.837.373.303	100%	98%	
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat	%	100	32.422.433.023	80	13.813.372.740	80	18.375.563.500	0	13.484.934.492	0	650.208.800	0	3.293.162.588	80	595.694.683	80	18.024.000.563	100%	98%	100	31.837.373.303	100%	56%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitaskelembagaan Pemerintah, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Orang	66	3.679.304.210	33	2.679.627.735	33	955.563.500	0	-	12	633.708.800	0	0	20	316.185.800	32	949.894.600	97%	99%	65	3.629.522.335	98%	99%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Pendidikan Politik, Etikan Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Orang	525	360.698.200	250	161.314.392	125	10.000.000	0	-	0	0	125	9.924.288	0	0	125	9.924.288	100%	99%	375	171.238.680	71%	47%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	laporan	2	28.382.430.613	1	10.972.430.613	1	17.410.000.000	1	13.484.934.492	0	16.500.000	0	3.283.238.300	0	279.508.883	1	17.064.181.675	100%	98%	2	28.036.612.288	100%	99%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Status Kelembagaan Orkemas	%	68	866.644.000	71	648.778.540	68	2.809.600.000	0	-	0	9.970.600	0	1.443.370.600	65	1.354.800.000	65	2.808.141.200	96%	100%	67	3.456.919.740	99%	399%	
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Tingkat Keaktifan Organisasi Kemasyarakatan	%	75	866.644.000	75	648.778.540	75	2.809.600.000	0	-	0	9.970.600	0	1.443.370.600	75	1.354.800.000	75	2.808.141.200	100%	100%	150	3.456.919.740	200%	324%	
8	1	4	2.01	4	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Orang	359	866.644.000	200	648.778.540	75	2.809.600.000	0	-	0	9.970.600	0	1.443.370.600	75	1.354.800.000	75	2.808.141.200	100%	100%	275	3.456.919.740	77%	399%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	%	100	2.124.812.738	100	1.767.383.796	100	2.568.798.595	0	59.868.000	0	1.911.552.500	0	329.658.000	100	557.330.510	100	2.858.409.010	100%	111%	100	4.625.792.806	100%	218%	
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah koordinasi	kali	12	2.124.812.738	0	1.767.383.796	4	2.568.798.595	0	59.868.000	2	1.911.552.500	2	329.658.000	0	557.330.510	4	2.858.409.010	100%	111%	4	4.625.792.806	33%	135%	
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah	Orang	470	254.136.628	290	163.547.828	100	45.294.400	0	-	0	6.149.500	80	35.829.500	20	0	100	41.979.000	100%	93%	390	205.526.828	83%	81%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	1600	1.870.676.110	1086	1.603.835.968	400	2.523.504.195	30	59.868.000	230	1.905.403.000	35	293.828.500	155	557.330.510	450	2.816.430.010	113%	112%	1536	4.420.265.978	96%	236%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik yang terfasilitasi	%	100	6.938.068.500	100	4.795.458.675	100	6.137.052.790	0	176.718.925	0	5.201.700.000	0	97.125.000	100	768.926.565	100	6.244.470.490	100%	102%	100	11.039.929.165	100%	159%	
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik	konflik	0	6.938.068.500	0	4.795.458.675	0	6.137.052.790	0	176.718.925	0	5.201.700.000	0	97.125.000	0	768.926.565	0	6.244.470.490	100%	102%	0	11.039.929.165	100%	90%	
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Orang	2013	6.047.481.100	1813	4.354.871.275	100	5.687.052.790	10	77.200.880	100	5.115.190.000	0	51.945.000	0	619.696.750	110	5.864.032.630	110%	103%	1923	10.218.903.905	96%	169%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota	Dokumen	24	890.587.400	12	440.587.400	12	450.000.000	2	99.518.045	2	86.510.000	4	45.180.000	4	149.229.815	12	380.437.860	100%	85%	24	821.025.260	100%	92%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024) PAK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) PAK		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV										
1						2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	Skor	A	2.605.164.068.047	BB	1.604.814.884.044	A	709.361.534.159	0	128.558.254.114	0	121.056.621.954	A	197.488.988.315	0	206.495.125.421	100	653.598.989.804	100%	92%	A	2.258.413.873.848	100%	87%	
1	1		1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	38.630.368.826	100	18.852.451.251	100	9.341.826.834	0	341.404.514	15	324.118.950	30	3.402.260.787	45	4.158.229.595	90	8.226.013.846	90%	88%	100	27.078.465.097	100%	21%	
1	2		1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	16	148.725.200	8	159.746.400	8	74.362.600	3	48.900.000	0	7.547.000	2	4.572.150	3	11.769.450	8	72.788.600	100%	98%	16	232.535.000	100%	156%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	3		1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	16	178.066.240	1	92.277.187	8	310.589.784	1	44.160.340	1	3.703.400	3	42.207.078	3	205.887.442	8	295.958.260	100%	95%	9	388.235.447	56%	218%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	6		1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	255.350.302	4	123.884.800	4	127.979.400	1	65.287.640	1	13.543.000	1	20.862.600	1	21.208.600	4	120.901.840	100%	94%	8	244.786.640	100%	96%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	7		1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	142.560.000	6	128.917.400	6	71.280.000	1	4.764.000	2	27.234.600	2	16.441.000	1	22.752.400,00	6	71.192.000	100%	100%	12	200.109.400	100%	140%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	15		1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		280.400.000	6	91.447.660	6	53.920.000	2	10.100.510	2	9.381.000	1	19.194.550	1	14.508.510	6	53.184.570	100%	99%	12	144.632.230	-	52%	Dinas Perhubungan
2	18		1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	91.292.600	5	30.468.050	6	7.461.900	1	6.329.600	3	550.000	0	0	2	550.000	6	7.429.600	100%	100%	11	37.897.650	110%	42%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	2		1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24	619.533.822	18	179.997.897	6	118.509.254	2	6.684.200	1	9.793.700	2	19.469.900	1	32.690.210	6	68.638.010	100%	58%	24	248.635.907	100%	40%	Sekretariat DPRD
5	1		1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	28	200.937.600	21	95.336.842	7	142.489.200	1	7.570.540	1	8.128.400	2	111.890.700	3	13.591.281	7	141.180.921	100%	99%	28	236.517.763	100%	118%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
7	1		1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24	18.999.168	15	1.171.000	12	720.000	0	-	0	0	8	518.500	4	201.300	12	719.800	100%	100%	27	1.890.800	113%	10%	Kecamatan Taman
7	1		1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	52	109.931.658	29	26.366.981	12	4.000.000	1	-	3		2	2.913.000	3	1.084.800	9	3.997.800	75%	100%	38	30.364.781	73%	28%	Kecamatan Kartoharjo
7	1		1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	40	47.765.852	20	24.152.700	20	21.882.926	2	7.215.000	0	0	10	6.288.500	8	8.358.500	20	21.862.000	100%	100%	40	46.014.700	100%	96%	Kecamatan Manguharjo
1	1		1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	29.705.441.571	18	14.283.341.372	6	7.203.000.000	0	-	2	1.248.500	1	2.828.892.250	3	3.404.602.800	6	6.234.743.550	100%	87%	24	20.518.084.922	100%	69%	Dinas Pendidikan
1	2		1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	44	1.169.066.658	25	521.515.467	3	184.565.600	2	27.890.000	0	23.137.000	1	48.149.000	0	85.389.600	3	184.565.600	100%	100%	28	706.081.067	64%	60%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	4	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	40	185.000.000	58	79.004.189	20	22.673.400	2	4.600.000	6	2.200.000	8	4.599.800	4	9.505.500	20	20.905.300	100%	92%	78	99.909.489	195%	54%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	43	535.519.000	36	348.468.960	12	186.567.000	4	18.310.000	4	95.000.000	2	13.112.500	2	50.775.200	12	177.197.700	100%	95%	48	525.666.660	112%	98%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	36	80.000.000	31	11.175.065	6	1.381.000	2	480.000	1	0	2	240.000	1	352.000	6	1.072.000	100%	78%	37	12.247.065	103%	15%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	62	810.374.169	46	232.191.334	4	22.082.310	1	3.987.478	1	0	1	6.598.079	1	9.333.555	4	19.919.112	100%	90%	50	252.110.446	81%	31%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	9	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	48	410.000.000	40	246.316.650	8	121.747.000	3	27.342.500	2	10.445.000	3	44.798.400	1	37.914.000	9	120.499.900	113%	99%	49	366.816.550	102%	89%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	378.556.000	18	267.001.875	6	100.000.000	0	9.302.000	6	70.158.000	0	0	0	20.530.100	6	99.990.100	100%	100%	24	366.991.975	100%	97%	Dinas Lingkungan Hidup
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	40	164.208.720	12	75.247.015	12	1.995.480	3	0	2	69.300	4	260.800	3	21.315.000	12	21.645.100	100%	1085%	24	96.892.115	60%	59%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	50	460.000.000	39	250.587.101	10	69.763.400	3	28.566.000	3	23.350.000	3	160.000	1	14.772.500	10	66.848.500	100%	96%	49	317.435.601	98%	69%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	22	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	170.000.000	16	87.904.450	6	30.000.000	1	3.600.000	1	6.806.100	1	14.670.160	1	4.882.550	4	29.958.810	67%	100%	20	117.863.260	83%	69%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	23	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Laporan	44	197.700.000	33	123.095.600	12	30.000.000	5	-	0	0	0	0	6	27.280.000	11	27.280.000	92%	91%	44	150.375.600	100%	76%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	30	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	6	129.036.500	0	-	6	129.036.500	1	250.000	0	0	2	125.263.500	1	413.500	4	125.927.000	67%	98%	4	125.927.000	67%	98%	Dinas Perdagangan
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	37.417.000	20	16.168.710	6	8.000.000	2	3.735.000	0	0	0	1.300.000	2	2.907.000	4	7.942.000	67%	99%	24	24.110.710	100%	64%	Bagian Pemerintahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	85.000.000	12	29.843.050	6	15.000.000	2	1.224.000	3	4.218.750	0	2.647.000	1	6.511.000	6	14.600.750	100%	97%	18	44.443.800	75%	52%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	155.692.800	5	36.181.424	6	500.000	1	-	1	0	2		1	500.000	5	500.000	83%	100%	10	36.681.424	83%	24%	Bagian Hukum
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	151.761.000	12	49.120.500	12	5.000.000	3	1.133.000	3	198.000	3	591.000	4	3.036.099	13	4.958.099	108%	99%	25	54.078.599	104%	36%	Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	86.000.000	2	35.508.037	6	18.000.000	2	900.000	1	722.000	2	5.273.500	1	6.909.498	6	13.804.998	100%	77%	8	49.313.035	133%	57%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	300.016.000	21	98.124.758	6	5.000.000	2	802.500	2	918.000	2	1.441.000	2	1.026.500	8	4.188.000	133%	84%	29	102.312.758	242%	34%	Bagian Umum
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	36	33.151.800	26	31.596.600	12	11.050.600	2	-	5	2.141.700	1	3.569.500	4	5.321.800	12	11.033.000	100%	100%	38	42.629.600	106%	129%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	32	48.064.000	23	17.512.100	8	2.000.000	3	-	1	0	1	0	1	911.800	6	911.800	75%	46%	29	18.423.900	91%	38%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	80	43.242.000	21	9.283.200	8	2.000.000	2	-	2	0	2	1.347.820	2	595.500	8	1.943.320	100%	97%	29	11.226.520	36%	26%	Badan Pendapatan Daerah
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20	89.821.556	15	83.028.156	6	9.400.000	3	-	2	705.000	1	4.317.000	0	3.809.000	6	8.831.000	100%	94%	21	91.859.156	105%	102%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	52	169.357.030	31	109.137.285	10	3.000.000	6	1.000.000	1	-	3	0	0	1.954.900	10	2.954.900	100%	98%	41	112.092.185	79%	66%	Inspektorat Daerah
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	147.400.000	1	61.898.860	1	45.600.000	0	-	0	-	1	45.200.000	0	0	1	45.200.000	100%	99%	2	107.098.860	100%	73%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	32.925.500	5	13.483.900	5	16.462.750	0	-	0	-	0	-	5	15.900.000	5	15.900.000	100%	97%	10	29.383.900	100%	89%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	192.332.280	2	59.951.800	2	9.340.130	0	4.374.206	0	0	0	0	2	4.894.000	2	9.268.206	100%	99%	4	69.220.006	100%	36%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	12	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	8	539.166.000	8	607.485.870	12	135.281.000	3	0	3	0	4	0	2	75.447.700	12	75.447.700	100%	56%	20	682.933.570	250%	127%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	30.556.800	6	114.511.006	2	20.185.600	0	2.896.000	0	2.920.500	1	5.471.500	1	8.836.000	2	20.124.000	100%	100%	8	134.635.006	100%	441%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	%	100	1.722.795.395.740	100	1.110.984.405.608	100	453.187.787.699	25	76.288.900.664	25	75.210.013.538	25	124.417.181.818	25	134.214.865.433	100	410.130.961.453	100%	90%	100	1.521.115.367.061	100%	24%	
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	3098	748.097.286.306	1549	463.524.609.981	1549	163.991.443.000	1549	29.855.524.388	1549	28.497.970.337	1549	52.223.121.094	1549	47.974.515.791	1549	158.551.131.610	100%	97%	3098	622.075.741.591	100%	83%	Dinas Pendidikan
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	437	124.790.708.471	423	112.041.763.904	486	53.903.223.077	423	9.295.904.669	486	8.997.080.882	485	16.929.596.509	483	16.422.408.231	483	51.644.990.291	99%	96%	906	163.686.754.195	207%	131%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD)	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ bulan	395	98.090.815.219	385	44.047.141.910	387	32.716.129.752	423	6.036.291.268	387	6.458.511.220	387	4.927.913.197	387	4.869.945.782	387	22.292.661.467	100%	68%	772	66.339.803.377	195%	68%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ bulan	100	27.388.701.620	51	18.346.140.454	50	7.270.225.630	50	1.226.798.139	50	1.202.228.388	50	1.967.858.566	0	1.979.827.985	50	6.376.713.078	100%	88%	101	24.722.853.532	101%	90%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	35	23.177.194.000	34	13.463.223.641	36	5.175.232.695	36	902.936.479	36	913.522.194	36	1.531.235.112	36	1.601.031.464	36	4.948.725.249	100%	96%	70	18.411.948.890	200%	79%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	108	19.986.693.000	54	18.144.412.910	54	7.091.974.275	45	1.134.253.897	46	1.187.006.321	46	2.024.677.884	45	2.130.819.857	46	6.476.757.959	85%	91%	100	24.621.170.869	93%	123%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	24	5.192.675.000	13	4.101.549.612	12	1.710.324.806	12	317.736.096	12	328.910.689	12	518.690.009	10	533.744.035	12	1.699.080.829	100%	99%	25	5.800.630.441	104%	112%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	70	16.757.723.761	35	14.084.886.343	35	5.670.118.024	32	971.301.777	32	1.050.337.606	27	1.568.765.924	27	1.591.556.989	32	5.181.962.296	91%	91%	67	19.266.848.639	96%	115%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	72	17.319.271.280	36	12.975.230.126	36	5.067.780.088	36	865.705.913	36	912.765.262	36	1.402.023.092	36	1.453.242.667	36	4.633.736.934	100%	91%	72	17.608.967.060	100%	102%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	9	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ bulan	54	15.937.330.000	26	11.553.753.963	27	4.759.106.937	26	770.374.717	0	816.132.221	0	1.334.988.571	27	1.458.986.132	27	4.380.481.641	100%	92%	53	15.934.235.604	98%	100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	150	36.487.447.671	89	28.027.460.141	75	9.232.643.666	75	1.569.726.828	66	1.507.451.596	0	2.638.176.844	0	2.557.228.831	66	8.272.584.099	88%	90%	155	36.300.044.240	103%	99%	Dinas Lingkungan Hidup
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	56	6.175.160.000	29	10.728.657.902	28	4.467.399.839	29	788.476.174	28	847.274.709	29	1.344.152.365	0	1.471.005.130	28	4.450.908.378	100%	100%	57	15.179.566.280	102%	246%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	108	27.905.995.367	54	17.577.191.644	125	6.365.607.025	125	1.142.491.093	125	1.138.499.838	125	1.980.114.565	125	1.970.927.040	125	6.232.032.536	100%	98%	179	23.809.224.180	166%	85%	Dinas Perhubungan
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	64	15.743.141.000	33	13.374.605.270	32	5.329.306.963	32	865.591.714	32	943.791.393	32	1.540.137.550	32	1.620.177.183	32	4.969.697.840	100%	93%	65	18.344.303.110	102%	117%	Dinas Komunikasi dan Informatika

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	72	16.604.773.600	26	9.851.619.138	26	3.928.291.114	37	704.133.373	0	770.488.690	0	1.186.227.897	0	1.236.809.012	37	3.897.658.972	142%	99%	63	13.749.278.110	88%	83%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	22	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	25	14.478.302.783	50	10.869.760.793	25	4.570.472.907	25	776.490.054	25	797.994.191	25	1.269.366.432	25	1.357.339.127	25	4.201.189.804	100%	92%	25	15.070.950.597	100%	104%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	100	13.203.685.623	227	9.903.369.644	24	3.934.318.155	25	660.342.149	25	736.344.878	25	1.166.231.832	25	1.215.210.659	25	3.778.129.518	104%	96%	252	13.681.499.162	252%	104%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	30	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	75	32.451.577.308	75	23.257.142.565	68	8.652.173.876	68	1.598.188.267	68	1.547.369.784	68	2.559.882.993	68	2.506.140.487	68	8.211.581.531	100%	95%	143	31.468.724.096	191%	97%	Dinas Perdagangan
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	24	2.252.067.127	11	1.961.269.379	12	898.410.000	12	70.560.621	12	168.229.978	12	181.108.800	12	288.586.863	12	708.486.262	100%	79%	23	2.669.755.641	96%	119%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	18	1.805.092.000	9	1.862.309.815	9	835.922.668	9	96.358.740	9	162.933.582	9	212.803.748	0	330.418.737	9	802.514.807	100%	96%	18	2.664.824.622	100%	148%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/ bulan	20	4.789.320.000	10	2.622.159.542	10	904.221.390	10	86.475.553	10	166.027.963	10	222.868.226	0	349.131.668	10	824.503.410	100%	91%	20	3.446.662.952	100%	72%	Bagian Hukum
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	30	4.644.434.500	8	3.953.174.284	17	1.518.611.430	15	128.087.945	15	333.456.121	15	417.491.906	15	560.775.401	15	1.439.811.373	88%	95%	23	5.392.985.657	77%	116%	Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	26	2.352.924.150	13	2.306.438.321	13	1.081.294.810	13	81.215.873	13	196.443.360	13	232.216.263	0	340.241.704	13	850.117.200	100%	79%	26	3.156.555.521	100%	134%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	250	43.224.418.767	163	28.119.402.690	125	12.472.827.103	125	2.137.383.147	125	1.818.630.570	125	3.331.558.434	125	2.963.772.018	125	10.251.344.169	100%	82%	288	38.370.746.859	115%	89%	Bagian Umum
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	38	10.212.589.623	37	7.968.541.317	18	3.146.893.865	18	520.825.762	17	527.776.133	16	877.159.617	16	939.273.890	19	2.865.035.402	106%	91%	56	10.833.576.719	147%	106%	Sekretariat DPRD
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	62	16.652.850.000	31	13.819.474.552	27	5.395.846.450	27	782.379.086	27	878.812.397	29	1.385.397.187	0	1.510.767.412	29	4.557.356.082	107%	84%	60	18.376.830.634	97%	110%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	12000	144.305.437.092	5875	56.207.259.161	2875	32.595.007.807	2875	3.356.278.874	2875	2.069.705.207	2875	2.509.300.657	2875	12.129.835.809	2875	20.065.120.547	100%	62%	8750	76.272.379.708	73%	53%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	31	39.157.530.000	62	22.170.273.994	33	8.758.579.826	28	813.022.367	28	885.379.093	25	1.561.033.027	25	4.671.780.804	25	7.931.215.291	76%	91%	31	30.101.489.285	100%	77%	Badan Pendapatan Daerah
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	43	21.454.626.896	43	14.799.899.555	41	5.875.667.000	45	1.052.063.067	45	1.042.468.900	45	1.711.682.595	0	1.803.672.524	45	5.609.887.086	110%	95%	43	20.409.786.641	100%	95%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	45	32.064.281.990	45	20.832.543.155	45	7.516.857.781	43	1.281.539.157	43	1.414.568.515	43	2.273.704.445	43	2.481.398.469	43	7.451.210.586	96%	99%	88	28.283.753.741	196%	88%	Inspektorat Daerah
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	23	15.062.299.047	23	9.465.106.119	21	3.982.644.926	21	645.618.730	21	710.503.220	21	1.141.942.719	0	1.195.548.130	21	3.693.612.799	100%	93%	44	13.158.718.918	191%	87%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	76	44.634.629.742	76	28.664.416.906	75	11.609.750.471	75	1.995.776.114	75	2.127.169.753	75	3.493.385.342	0	3.610.377.820	75	11.226.709.029	100%	97%	151	39.891.125.935	199%	89%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	70	39.659.832.822	70	29.404.026.378	70	10.979.927.331	70	1.886.946.662	0	2.030.088.889	0	3.272.869.961	0	3.477.685.935	70	10.667.591.447	100%	97%	140	40.071.617.825	200%	101%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	70	39.728.234.320	70	30.345.012.663	70	11.484.380.659	70	1.844.723.171	70	1.972.349.205	70	3.397.903.792	0	3.477.689.226	70	10.692.665.394	100%	93%	70	41.037.678.057	100%	103%	Kecamatan Manguharjo
2	12	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	24	157.360.000	12	78.680.000	12	77.790.000	3	0	2	19.170.000	4	18.870.000	4	39.750.000	13	77.790.000	108%	100%	25	156.470.000	104%	99%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	4	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Dokumen	52	244.000.000	39	155.168.300	13	68.000.000	2	6.808.500	3	14.436.000	3	18.398.250	4	28.171.500	12	67.814.250	92%	100%	51	222.982.550	98%	91%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	6	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	39	198.905.655	26	222.311.800	13	103.410.353	3	14.792.600	5	10.559.453	3	35.518.000	4	41.619.700	15	102.489.753	115%	99%	41	324.801.553	105%	163%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Dokumen	39	389.775.000	33	142.568.736	12	42.040.000	0	5.178.000	5	7.142.000	2	7.202.613	5	22.209.721	12	41.732.334	100%	99%	45	184.301.070	115%	47%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	52	8.000.000	35	5.999.700	13	2.000.000	2	599.700	3	0	0	639.800	3	758.700	8	1.998.200	62%	100%	43	7.997.900	83%	100%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	52	8.305.000	26	5.849.300	26	1.932.000	0	-	4	483.000	4	966.000	18	483.000	26	1.932.000	100%	100%	52	7.781.300	100%	94%	Kecamatan Manguharjo
1	4	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	%	100	33.697.157.360	100	17.567.838.995	100	4.408.634.832	25	303.975.480	25	467.708.200	25	3.028.466.230	25	465.235.537	100	4.265.385.447	100%	97%	100	21.833.224.442	100%	13%	
1	4	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	480.160.000	1	358.573.600	1	122.429.000	0	-	1	120.075.000	1	0	0	0	1	120.075.000	100%	98%	2	478.648.600	100%	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	2.241.788.000	1	1.499.944.900	1	675.200.000	0	-	0	0	1	657.027.500	0	12.949.000	1	669.976.500	100%	99%	2	2.169.921.400	100%	97%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2	11	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	6	649.284.290	3	499.254.500	3	144.009.240	1	74.445.250	2	45.800.600	0	18.219.700	0	3.930.000	3	142.395.550	100%	99%	6	641.650.050	100%	99%	Dinas Lingkungan Hidup
2	15	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	744.750.000	1	543.097.710	125	100.000.000	1	94.482.000	0	670.000	0	0	0	0	1	95.152.000	1%	95%	2	638.249.710	100%	86%	Dinas Perhubungan
3	30	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	2	551.214.450	1	231.015.660	1	125.824.200	0	-	0	0	1	123.339.800	0	1.560.000	1	124.899.800	100%	99%	2	355.915.460	100%	65%	Dinas Perdagangan
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	6	26.658.933.090	0	12.212.738.883	4	2.327.960.000	1	53.850.000	0	179.536.500	2	1.947.956.500	0	132.591.637	3	2.313.934.637	75%	99%	3	14.526.673.520	50%	54%	Bagian Umum
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	119.999.880	1	124.396.500	1	45.898.500	0	-	0	0	1	29.050.000	0	0	1	29.050.000	100%	63%	2	153.446.500	100%	128%	Sekretariat DPRD
2	9	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	6	85.571.720	3	13.841.900	3	74.985.800	0	6.240.000	0	4.000.000	1	28.307.000	2	35.944.500	3	74.491.500	100%	99%	6	88.333.400	100%	103%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1	6	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	118	233.940.000	65	100.828.000	58	244.928.000	0	0	0	-	70	126.208.650	70	55.862.000	70	182.070.650	121%	74%	135	282.898.650	114%	121%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	11	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	500	331.000.000	230	189.284.400	250	55.000.000	0	3.350.000	250	16.015.000	0	15.194.600	0	20.363.000	250	54.922.600	100%	100%	480	244.207.000	96%	74%	Dinas Lingkungan Hidup
5	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	62	530.804.871	0	614.197.550	31	105.098.312	27	8.416.000	31	47.313.000	31	1.795.720	0	42.640.100	31	100.164.820	100%	95%	31	714.362.370	50%	135%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
1	4	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	"Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan"	orang	35	40.000.000	36	29.055.706	36	10.000.000	0	1.288.250	36	800.000	36	4.896.600	0	2.440.200	36	9.425.050	100%	94%	72	38.480.756	206%	96%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	6	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	120	337.215.622	80	81.914.950	58	47.889.000	0	13.331.000	0	8.437.000	70	12.655.500	70	12.816.500	70	47.240.000	121%	99%	150	129.154.950	125%	38%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	38	8.025.592	18	377.000.400	18	125.000.000	6	25.000.000	1	16.000.000	4	21.000.000	7	59.000.000	18	121.000.000	100%	97%	36	498.000.400	95%	6205%	Sekretariat DPRD
5	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang/keg	134	549.120.000	67	190.510.111	67	91.329.380	0	2.196.480	67	2.156.100	67	17.811.560	0	48.498.000	67	70.662.140	100%	77%	134	261.172.251	100%	48%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	400	62.775.690	300	311.716.675	100	47.633.400	25	10.484.000	25	10.700.000	25	13.309.800	25	12.102.600	100	46.596.400	100%	98%	400	358.313.075	100%	571%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	70	42.676.155	150	159.956.000	70	25.000.000	10	2.902.500	25	9.715.000	25	5.240.700	10	7.058.000	70	24.916.200	100%	100%	220	184.872.200	314%	433%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	29.898.000	100	30.511.550	100	40.450.000	25	7.990.000	25	6.490.000	25	6.452.600	25	17.480.000	100	38.412.600	100%	95%	100	68.924.150	100%	231%	Kecamatan Manguharjo
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	80.247.876.371	100	57.071.437.537	100	23.391.330.179	25	2.959.277.162	25	2.910.021.056	25	7.416.687.372	25	7.350.734.287	100	20.636.719.877	100%	88%	100	77.708.157.414	100%	26%	
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	725.000.000	1	749.971.180	1	92.736.900	0	9.578.190	0	10.099.391	0	26.900.485	0	44.300.700	0	90.878.766	0%	98%	1	840.849.946	50%	116%	Bagian Umum
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	74	25.476.529.892	37	9.955.280.607	37	2.841.415.000	9	502.831.712	3	384.174.887	2	870.640.061	6	902.884.677	20	2.660.531.337	54%	94%	57	12.615.811.944	77%	50%	Dinas Pendidikan
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	8.439.181.992	1	6.143.824.352	1	1.280.080.285	0	108.291.012	0	111.121.544	0	315.537.938	1	634.312.936	1	1.169.263.430	100%	91%	2	7.313.087.782	100%	87%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	18	2.982.673.000	9	1.694.800.138	9	584.953.026	1	110.763.766	2	66.265.639	2	224.345.617	4	153.774.670	9	555.149.692	100%	95%	18	2.249.949.830	100%	75%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	9	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	30	1.452.000.000	19	764.739.502	19	767.156.500	4	109.067.200	5	103.742.800	5	295.479.350	5	252.968.300,00	19	761.257.650	100%	99%	38	1.525.997.152	127%	105%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	24	2.671.994.205	12	2.300.769.757	12	794.222.119	3	144.969.588	2	223.199.080	3	115.057.579	4	274.159.610	12	757.385.857	100%	95%	24	3.058.155.614	100%	114%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	1.741.872.760	8	1.495.146.053	1	544.064.000	3	97.190.300	1	83.974.400	2	202.639.651	1	156.492.600	2	540.296.951	200%	99%	10	2.035.443.004	111%	117%	Inspektorat Daerah
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	2	2.660.906.502	1	1.614.720.423	1	525.659.436	0	83.005.500	0	77.875.706	0	209.876.530	1	151.806.591	1	522.564.327	100%	99%	2	2.137.284.750	100%	80%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	12	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	24	53.000.000	12	36.206.950	12	50.876.850	3	24.740.000	2	1.817.500	3	11.604.000	5	3.564.000	13	41.725.500	108%	82%	25	77.932.450	104%	147%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	24	26.985.000	12	25.087.800	12	28.513.236	3	2.975.000	2	5.630.000	3	16.926.063	5	10.612.656	13	36.143.719	108%	127%	25	61.231.519	104%	227%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	9	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	111.906.000	14	23.339.900	12	55.953.000	3	13.184.500	2	7.944.000	3	7.821.300	3	27.000.400	11	55.950.200	92%	100%	25	79.290.100	104%	71%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	296	1.119.555.300	151	1.072.000.966	148	300.000.000	37	34.543.328	18	42.506.002	28	117.282.608	68	104.359.661	151	298.691.599	102%	100%	302	1.370.692.565	102%	122%	Dinas Pendidikan
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	290	1.967.107.824	203	1.891.134.027	145	550.000.000	30	16.170.700	63	48.094.447	93	337.543.759	5	137.287.480	191	539.096.386	132%	98%	394	2.430.230.413	136%	124%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	240	1.002.444.000	205	826.176.197	60	433.550.000	20	66.355.490	10	46.410.406	10	154.101.189	30	139.439.617	70	406.306.702	117%	94%	275	1.232.482.899	115%	123%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Laporan	40	735.520.000	23	679.826.370	20	233.880.000	2	26.832.094	8	22.781.186	8	106.717.325	2	77.251.324	20	233.581.929	100%	100%	43	913.408.299	108%	124%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	1.025.000.000	20	648.609.679	50	312.576.400	17	19.550.380	40	54.411.730	43	101.819.595	34	116.083.224	43	291.864.929	86%	93%	63	940.474.608	158%	92%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	260.000.000	24	344.968.087	12	200.000.000	3	23.784.805	3	15.584.280	3	102.941.339	2	52.136.503	11	194.446.927	92%	97%	35	539.415.014	73%	207%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	284	927.901.000	145	738.921.437	60	311.237.000	13	29.494.734	11	37.830.000	24	64.394.450	37	128.596.260	85	260.315.444	142%	84%	230	999.236.881	81%	108%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	927.190.000	70	793.863.528	75	339.308.271	5	22.919.921	7	26.020.391	35	210.217.135	28	80.006.285	75	339.163.732	100%	100%	145	1.133.027.260	97%	122%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	742.996.000	14	725.086.413	12	296.068.000	3	21.810.304	2	15.241.000	3	99.135.500	3	158.072.110	11	294.258.914	92%	99%	25	1.019.345.327	104%	137%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	766.483.000	21	897.489.900	12	300.000.000	0	15.150.100	4	33.093.100	2	135.414.750	5	115.894.600	11	299.552.550	92%	100%	32	1.197.042.450	133%	156%	Dinas Lingkungan Hidup
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	80	220.000.000	37	511.713.829	12	274.980.000	3	74.101.564	2	8.429.000	3	30.165.500	4	158.901.250	12	271.597.314	100%	99%	49	783.311.143	61%	356%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	120	984.666.000	60	721.176.914	60	300.202.000	10	23.844.094	20	52.775.500	10	180.415.146	20	42.768.080	60	299.802.820	100%	100%	120	1.020.979.734	100%	104%	Dinas Perhubungan
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	816.447.000	28	723.181.127	25	400.000.000	6	76.536.912	13	41.549.414	13	202.687.358	4	29.139.519	36	349.913.203	144%	87%	64	1.073.094.330	128%	131%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	98	850.000.000	50	651.555.344	50	204.234.000	15	28.970.000	15	76.152.834	15	53.268.762	3	45.646.914	48	204.038.510	96%	100%	98	855.593.854	100%	101%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	22	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	1.198.800.000	12	748.198.303	12	199.905.000	1	36.002.958	2	56.394.700	10	102.324.347	0	0	13	194.722.005	108%	97%	25	942.920.308	208%	79%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	321.000.000	129	344.839.991	30	72.121.000	8	9.753.094	10	8.120.000	7	35.984.340	5	14.709.970	30	68.567.404	100%	95%	159	413.407.395	159%	129%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	30	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	60	764.118.400	0	726.238.621	12	249.696.266	3	35.419.013	3	29.274.250	3	136.612.068	2	47.756.660	11	249.061.991	92%	100%	11	975.300.612	18%	128%	Dinas Perdagangan
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	696.971.896	18	446.971.896	24	250.000.000	2	19.919.000	4	19.916.420	8	111.271.707	4	97.681.592	18	248.788.719	75%	100%	36	695.760.615	75%	100%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	831.680.280	12	441.412.451	12	167.326.280	3	25.212.924	3	16.134.370	3	64.115.618	3	61.863.368	12	167.326.280	100%	100%	24	608.738.731	100%	73%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	520.000.000	42	456.903.274	36	231.923.941	9	21.748.486	12	20.453.000	18	108.651.726	0	22.290.000	39	173.143.212	108%	75%	81	630.046.486	338%	121%	Bagian Hukum
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	406.221.950	12	508.242.851	12	225.000.000	3	23.143.982	3	21.428.500	3	103.542.060	3	69.281.656	12	217.396.198	100%	97%	24	725.639.049	100%	179%	Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	774.000.000	0	559.676.100	25	250.000.000	6	27.036.500	6	11.910.200	7	89.316.508	6	106.723.497	25	234.986.705	100%	94%	100	794.662.805	400%	103%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	648	6.822.725.800	311	6.785.948.068	324	3.472.171.669	81	298.468.318	101	313.715.917	154	826.801.258	0	1.554.951.734	336	2.993.937.227	104%	86%	647	9.779.885.295	100%	143%	Bagian Umum
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	88	2.955.288.862	44	3.392.493.473	26	3.340.372.000	9	396.559.704	10	351.737.619	5	554.642.525	2	450.825.198	26	1.753.765.046	100%	53%	70	5.146.258.519	80%	174%	Sekretariat DPRD
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	1.367.802.000	1	1.476.336.615	1	455.934.000	0	55.094.177	0	64.739.293	0	169.482.706	1	163.855.963	1	453.172.139	100%	99%	2	1.929.508.754	100%	141%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	210	120.000.000	175	1.137.996.275	70	600.000.000	10	52.235.085	24	211.981.621	46	165.199.238	21	130.219.910	101	559.635.854	144%	93%	276	1.697.632.129	131%	1415%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	45	542.674.498	30	342.674.498	30	100.000.000	5	21.432.788	2	9.727.500	9	41.724.780	11	26.975.555	27	99.860.623	90%	100%	57	442.535.121	127%	82%	Badan Pendapatan Daerah
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	386	1.187.913.119	333	999.770.673	80	365.000.000	12	46.521.939	18	47.272.967	33	147.990.552	21	122.439.669	84	364.225.127	105%	100%	417	1.363.995.800	108%	115%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	130	913.024.490	55	1.060.755.581	65	700.000.000	14	145.763.409	18	74.815.751	21	197.821.055	29	280.886.403	82	699.286.618	126%	100%	137	1.760.042.199	105%	193%	Inspektorat Daerah
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	laporan	160	689.000.000	73	386.411.831	80	250.000.000	20	23.517.880	20	26.846.000	20	100.268.960	20	95.518.020	80	246.150.860	100%	98%	153	632.562.691	96%	92%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	20	318.666.601	9	201.762.481	10	98.000.000	2	9.064.919	2	10.186.500	4	28.463.245	2	50.215.550	10	97.930.214	100%	100%	19	299.692.695	95%	94%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	558.661.000	12	623.399.823	12	216.008.000	1	18.523.168	1	8.560.068	6	160.600.189	3	28.324.575	11	216.008.000	92%	100%	23	839.407.823	96%	150%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	571.968.000	24	401.814.252	12	126.206.000	1	7.198.624	2	10.082.143	3	78.941.500	6	28.755.000	12	124.977.267	100%	99%	36	526.791.519	150%	92%	Kecamatan Manguharjo
1	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	60.270.400.385	0	34.471.612.226	100	12.748.100.018	0	1.840.306.358	0	1.392.580.340	0	1.971.792.463	100	6.409.638.552	100	11.614.317.713	100%	91%	100	46.085.929.939	100%	19%	
2	7	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	13.209.000	0	-	1	13.209.000	0	-	0	11.700.000	0		1	-	1	11.700.000	100%	89%	1	11.700.000	100%	89%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	11	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	8	178.750.000	0	-	8	117.230.000	0	0	0	-	0	93.372.440	8	21.412.000	8	114.784.440	100%	98%	8	114.784.440	100%	64%	Dinas Lingkungan Hidup
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	3	96.406.000			3	96.406.000	0	0	0	-	3	96.406.000	0	-	3	96.406.000	100%	100%	3	96.406.000	100%	100%	Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	10.364.550.000	1	20.551.850.000	1	136.150.000	1	34.315.000	0	0	0	-	0	1.861.225.000	1	1.895.540.000	100%	1392%	2	22.447.390.000	100%	217%	Bagian Umum
1	3	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	309.915.930	0	-	2	830.307.838	1	255.820.000	0	0	1	484.000.000	0	4.210.000	2	744.030.000	100%	90%	2	744.030.000	100%	240%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	buah	20	482.139.785	3	205.813.381	0	-	0	-	0	-	0	0	0		0	-	-	-	3	205.813.381	15%	43%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6	1.608.068.000	5	185.992.000	1	1.090.212.000	0	-	0	0	0	0	1	1.134.410.000	1	1.134.410.000	100%	104%	6	1.320.402.000	100%	82%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
2	9	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	275.785.500	0	-	1	275.785.500	0	-	1	-	0	270.191.000	0	3.337.500	1	273.528.500	100%	99%	1	273.528.500	100%	99%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	15	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	15	1.101.500.000	0	-	1	26.000.000	1	25.034.000	0	0	0	0	0		1	25.034.000	100%	96%	1	25.034.000	7%	2%	Dinas Perhubungan
3	30	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40.661.550			1	40.661.550	1	35.750.000	0	-	0	-	0	-	1	35.750.000	100%	88%	1	35.750.000	100%	88%	Dinas Perdagangan
5	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	4	500.000	0	-	4	500.000	0	-	0	-	0	-	4	83.700.000	4	83.700.000	100%	16740%	4	83.700.000	100%	16740%	Badan Pendapatan Daerah
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	18	656.632.000	0	13.070.000	9	373.720.000	0	-	0	0	4	64.114.000	0	0	4	64.114.000	44%	17%	4	77.184.000	22%	12%	Kecamatan Manguharjo
2	7	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	914.561.620	1	1.008.562.793	1	197.220.000	0	185.306.100	0	0	0	3.950.000	1	7.384.840	1	196.640.940	100%	100%	2	1.205.203.733	100%	132%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	22	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	200.000.000	4	17.300.000	1	20.000.000	0	-	0	0	0	18.426.000	1	960.000	1	19.386.000	100%	97%	5	36.686.000	250%	18%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3	30	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	730.000.000	9	58.913.200	3	25.325.000	3	17.800.000	0	0	0		0	5.372.400	3	23.172.400	100%	92%	12	82.085.600	120%	11%	Dinas Perdagangan
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	6	709.665.790	3	793.098.490	16	790.600.000	3	470.400.000	0	1.410.000	1	9.875.000	0	276.945.420	4	758.630.420	25%	96%	7	1.551.728.910	117%	219%	Bagian Umum
6	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	355.000.000		-	3	204.000.000	0	31.378.450	3	171.642.000	0	0	0	0	3	203.020.450	100%	100%	3	203.020.450	100%	57%	Inspektorat Daerah
2	9	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	117.060.000	0	-	1	117.060.000	0	-	0	4.944.840	1	111.435.060	0	-	1	116.379.900	100%	99%	1	116.379.900	100%	99%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1	5	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	595.000.000	1	453.572.057	1	205.600.000	0	-	0	-	0	0	1	203.684.082	1	203.684.082	100%	99%	2	657.256.139	100%	110%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	935.650.000	2	350.233.136	1	100.000.000	0	-	0	0	0	10.774.600	1	87.998.100	1	98.772.700	100%	99%	3	449.005.836	300%	48%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	122.999.800	0	-	1	122.999.800	0	6.918.000	0	0	1	105.298.343	0	0	1	112.216.343	100%	91%	1	112.216.343	100%	91%	Kecamatan Manguharjo
1	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	50	1.000.000.000	2	94.517.000	48	71.714.500	0	-	0	-	0	-	48	54.295.000	48	54.295.000	100%	76%	50	148.812.000	100%	15%	Dinas Pendidikan
1	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	126.417.000	0	-	15	126.417.000	12	42.000.000	0	32.950.000	3	37.250.000	0	-	12	112.200.000	80%	89%	12	112.200.000	80%	89%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	4	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	13	358.834.050	74	537.039.000	33	216.738.171	17	117.887.200	9	77.875.000	0	0	5	18.726.000	31	214.488.200	94%	99%	105	751.527.200	808%	209%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	1.273.727.000	1	656.264.229	1	268.044.000	0	-	0	0	1	96.400.000	0	139.757.100	1	236.157.100	100%	88%	2	892.421.329	100%	70%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	210.000.000	1	64.155.000	3	75.945.000	3	16.300.000	0	0	0	0	0	48.900.000	3	65.200.000	100%	86%	4	129.355.000	200%	62%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	6	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	80	807.507.055	40	1.037.525.822	110	18.380.000	0	0	0	0	0	0	2	18.314.000	2	18.314.000	2%	100%	42	1.055.839.822	53%	131%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
2	9	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	18	753.067.000	10	281.131.250	8	340.236.000	0	-	0	0	2	38.099.000	6	295.451.750	8	333.550.750	100%	98%	18	614.682.000	100%	82%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	11	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2	68.320.000	0	-	2	139.746.920	0	21.247.550	2	11.733.000	0	-	0	104.010.000	2	136.990.550	100%	98%	2	136.990.550	100%	201%	Dinas Lingkungan Hidup
2	12	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	14	1.337.360.600	4	253.360.600	31	781.289.200	6	200.390.000	21	416.625.000	10	91.785.000	3	62.038.500	40	770.838.500	129%	99%	44	1.024.199.100	314%	77%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	15	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	20	1.171.722.000	10	857.051.600	10	165.516.030	10	145.917.800	0	0	0	0	0	15.572.090	10	161.489.890	100%	98%	20	1.018.541.490	100%	87%	Dinas Perhubungan
2	16	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	21.150.000			4	21.150.000	0	0	0	-	3	20.300.000	0		3	20.300.000	75%	96%	3	20.300.000	75%	96%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	18	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	495.600.000	12	276.153.300	1	20.000.000	1	19.305.000	0	0	0	0	0	0	1	19.305.000	100%	97%	13	295.458.300	130%	60%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	55.376.925	1	26.267.344	1	100.000.000	0	-	1	100.000.000	0	0	0	0	1	100.000.000	100%	100%	2	126.267.344	100%	228%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	11	546.549.710	5	524.805.700	8	176.057.091	0	0	0	0	0	0	8	175.900.000	8	175.900.000	100%	100%	13	700.705.700	118%	128%	Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	3.223.775.000	0	160.603.800	10	123.726.250	2	20.850.000	2	10.821.000	3	37.020.000	3	44.705.000	10	113.396.000	100%	92%	100	273.999.800	1000%	8%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	20	1.519.815.225	10	1.595.215.537	5	2.466.656.208	0	-	0	0	0	0	2	110.000.000	2	110.000.000	40%	4%	12	1.705.215.537	60%	112%	Sekretariat DPRD
5	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2	22.628.071.820	1	390.680.530	15	281.289.180	0	-	0	0	7	109.630.000	8	170.555.000	15	280.185.000	100%	100%	16	670.865.530	800%	3%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	10	497.311.790	5	570.666.690	1	1.037.760.000	0	-	1	191.382.000	0	0	0	842.738.000	1	1.034.120.000	100%	100%	6	1.604.786.690	60%	323%	Bagian Umum
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangungan lainnya yang disediakan	Unit	7	1.696.299.670	3	1.387.581.310	4	195.996.680	0	-	1	101.300.000	1	1.700.000	2	89.400.000	4	192.400.000	100%	98%	7	1.579.981.310	100%	93%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	40	860.992.255	26	548.191.807	29	289.774.820	0	-	1	1.912.500	11	94.375.000	0	1.735.000	12	98.022.500	41%	34%	38	646.214.307	95%	75%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	20	597.397.500	1	25.246.700	18	191.669.920	0	-	2	158.845.000	0	1.350.000	15	27.900.000	17	188.095.000	94%	98%	18	213.341.700	90%	36%	Kecamatan Manguharjo
1	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	228.889.000	0	-	12	228.889.000	7	20.825.000	2	44.000.000	3	27.581.000	0	133.612.500	12	226.018.500	100%	99%	12	226.018.500	100%	99%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	3	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	196.617.360	0	-	5	196.617.360	0	-	1	55.440.000	3	126.260.020	1	13.813.000	5	195.513.020	100%	99%	5	195.513.020	100%	99%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	276.664.500	29	1.032.330.000	7	266.000.000	1	143.925.000	0	0	1	22.200.000	11	97.460.000	11	263.585.000	157%	99%	40	1.295.915.000	400%	468%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	13	500.000	0	-	13	500.000	0	-	0	-	0	0	12	130.471.270	12	130.471.270	92%	26094%	12	130.471.270	92%	26094%	Badan Pendapatan Daerah
5	3	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	510.379.950	2	514.419.950	12	165.000.000	6	28.937.258	0	0	0	0	6	123.645.000	12	152.582.258	100%	92%	14	667.002.208	140%	131%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	%	100	220.731.832.353	100	138.995.498.701	100	59.769.298.214	25	11.526.946.173	25	8.973.513.691	25	18.784.272.173	17	16.496.671.079	91,7	55.781.403.116	92%	93%	100	194.776.901.817	100%	88%	
1	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	40	14.477.651.751	30	8.890.560.495	10	4.563.459.395	2	544.426.220	3	684.929.619	2	1.252.446.586	3	1.415.970.191	10	3.897.772.616	100%	85%	40	12.788.333.111	100%	88%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	8.236.116.075	20	5.269.184.966	12	2.179.289.095	2	408.480.011	3	297.509.425	4	784.207.298	4	646.421.127	13	2.136.617.861	108%	98%	33	7.405.802.827	138%	90%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12.673.728.000	10	8.100.319.509	6	2.947.854.590	2	582.646.450	1	399.317.150	1	994.875.380	2	721.353.936	6	2.698.192.916	100%	92%	16	10.798.512.425	133%	85%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	2.146.092.000	12	1.177.742.954	12	413.773.000	3	143.821.035	3	41.126.600	3	89.437.651	2	126.216.989	11	400.602.275	92%	97%	23	1.578.345.229	96%	74%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	6	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	48	4.804.287.650	24	2.457.283.112	12	591.528.200	3	126.601.652	3	76.535.909	3	179.947.215	3	167.536.714	12	550.621.490	100%	93%	36	3.007.904.602	75%	63%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	11	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	8	5.750.771.055	4	3.223.766.579	4	705.000.000	1	155.380.350	1	106.250.600	1	229.345.100	0	212.430.400	4	703.406.450	100%	100%	8	3.927.173.029	100%	68%	Dinas Lingkungan Hidup
2	15	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	9.753.973.456	2	6.642.224.160	23	1.885.000.000	6	465.238.811	2	308.532.875	8	649.233.555	4	447.791.780	20	1.870.797.021	87%	99%	22	8.513.021.181	550%	87%	Dinas Perhubungan
2	16	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	6.806.630.000	2	4.380.260.360	1	1.181.641.200	0	217.699.881	1	234.825.294	1	358.351.325	0	353.769.810	1	1.164.646.310	100%	99%	3	5.544.906.670	150%	81%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	18	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	76	1.997.000.000	38	726.670.083	20	773.882.596	5	133.859.005	5	117.503.726	5	259.675.418	4	204.133.236	19	715.171.385	95%	92%	57	1.441.841.468	75%	72%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	23	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	100	2.587.346.380	100	877.459.840	12	570.340.165	3	126.625.900	3	79.548.800	2	185.696.300	4	129.925.000	12	521.796.000	100%	91%	112	1.399.255.840	112%	54%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	30	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	4	3.941.096.882	3	2.366.747.445	12	726.468.958	3	155.737.700	3	112.192.550	3	222.822.350	2	218.357.880	11	709.110.480	92%	98%	14	3.075.857.925	350%	78%	Dinas Perdagangan
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	1.010.831.851	12	594.605.261	12	250.000.000	3	37.541.700	3	43.408.800	3	93.823.800	3	68.787.042	12	243.561.342	100%	97%	24	838.166.603	100%	83%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	904.194.216	12	456.851.794	12	154.527.108	3	28.411.100	3	30.769.000	3	23.936.950	3	69.819.897	12	152.936.947	100%	99%	24	609.788.741	100%	67%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	1.236.102.800	14	852.806.786	250	369.523.500	3	68.718.879	38	47.853.925	52	110.828.775	109	125.528.645	202	352.930.224	81%	96%	216	1.205.737.010	900%	98%	Bagian Hukum
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	1.387.948.626	12	798.095.387	12	240.000.000	3	47.272.331	3	35.865.183	3	66.511.822	3	89.258.841	12	238.908.177	100%	100%	24	1.037.003.564	100%	75%	Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	1.549.110.000	11	537.368.716	12	484.719.636	3	41.344.300	3	33.315.000	3	84.441.005	3	136.368.800	12	295.469.105	100%	61%	23	832.837.821	96%	54%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	28	21.159.285.535	18	13.069.840.395	12	5.541.121.924	2	802.696.008	4	780.282.595	2	1.465.691.753	0	2.064.118.070	8	5.112.788.426	67%	92%	26	18.182.628.821	93%	86%	Bagian Umum
4	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	48	10.383.255.700	24	7.304.498.543	24	2.526.715.082	6	431.990.014	6	374.929.951	6	895.508.669	6	648.648.199	24	2.351.076.833	100%	93%	48	9.655.575.376	100%	93%	Sekretariat DPRD
5	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2.105.698.135	1	1.973.620.759	1	840.178.546	0	214.449.656	0	120.136.780	1	259.937.634	0	202.454.756	1	796.978.826	100%	95%	2	2.770.599.585	100%	132%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	3	66.434.804.845	10	46.304.254.128	12	21.828.558.000	4	4.887.773.251	3	3.204.515.755	3	6.719.249.466	2	5.329.773.515	12	20.141.311.987	100%	92%	22	66.445.566.115	733%	100%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	56	3.381.997.771	30	1.840.256.273	12	455.000.100	3	92.847.687	2	66.656.320	3	149.070.715	4	114.521.194	12	423.095.916	100%	93%	42	2.263.352.189	75%	67%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	1.533.518.782	25	874.186.023	12	766.759.391	3	159.656.935	3	115.046.599	3	274.053.921	5	186.651.428	14	735.408.883	117%	96%	39	1.609.594.906	163%	105%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	5.054.410.418	12	3.354.691.170	12	1.036.254.614	4	203.100.401	4	152.094.439	2	396.274.032	2	261.498.731	12	1.012.967.603	100%	98%	24	4.367.658.773	100%	86%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	5.869.326.405	24	2.769.897.868	12	1.011.320.082	2	182.348.866	2	146.691.546	2	408.449.908	6	242.422.158	12	979.912.478	100%	97%	36	3.749.810.346	150%	64%	Kecamatan Manguharjo
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (RSUD)	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	28	5.182.835.350	14	3.057.350.000	14	442.400.000	4	108.800.000	4	81.600.000	3	108.800.000	3	81.600.000	14	380.800.000	100%	86%	28	3.438.150.000	100%	66%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	1.698.020.000	12	714.270.000	12	499.220.000	3	91.710.000	3	69.145.000	3	164.175.000	3	136.910.000	12	461.940.000	100%	93%	24	1.176.210.000	100%	69%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	24	16.225.696.000	12	8.807.851.600	12	5.616.323.000	2	864.800.800	2	1.028.458.200	4	1.943.362.470	4	1.613.923.100	12	5.450.544.570	100%	97%	24	14.258.396.170	100%	88%	Dinas Lingkungan Hidup
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	24	1.129.013.000	12	1.039.216.905	12	643.490.240	3	96.496.400	2	102.770.450	3	210.752.345	4	247.205.090	12	657.224.285	100%	102%	24	1.696.441.190	100%	150%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	%	100	1.311.089.670	100	533.617.590	100	524.949.792	15	106.470.830	4	81.701.600	30	203.365.730	51	233.274.550	100	624.812.710	100%	119%	200	1.158.430.300	200%	88%	Badan Pendapatan Daerah
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%	100	68.195.621.021	100	44.524.278.049	100	20.267.352.808	25	2.654.602.486	25	2.844.627.214	25	4.986.419.613	25	8.070.371.234	100	18.556.020.547	100%	92%	100	63.080.298.596	100%	27%	
1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	432	627.828.400	217	350.391.855	237	150.000.000	59	24.741.112	23	12.456.188	37	33.681.987	97	65.140.862	216	136.020.149	91%	91%	433	486.412.004	100%	77%	Dinas Pendidikan
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	160	1.249.562.189	80	673.492.946	80	389.312.000	1	4.997.200	50	46.594.350	30	75.070.486	0	142.571.500	81	269.233.536	101%	69%	161	942.726.482	101%	75%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1						2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	3	1	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	236	1.816.808.200	198	956.163.732	59	512.624.000	13	41.152.119	18	43.105.448	20	120.554.474	8	298.123.338	59	502.935.379	100%	98%	257	1.459.099.111	109%	80%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4	1	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	130	6.531.321.432	64	3.913.562.718	65	1.690.986.550	15	312.774.583	20	242.137.518	15	519.465.906	15	538.448.783	65	1.612.826.790	100%	95%	129	5.526.389.508	99%	85%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	40	2.000.000.000	20	1.203.413.826	20	895.418.387	10	54.165.491	2	76.420.260	5	158.219.720	5	194.775.039	22	483.580.510	110%	54%	42	1.686.994.336	105%	84%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	6	1	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	50	727.214.320	43	444.432.716	6	200.187.000	0	16.867.620	6	20.545.410	0	44.184.700	0	68.248.150	6	149.845.880	100%	75%	49	594.278.596	98%	82%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	7	1	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	38	196.318.000	19	171.356.362	19	89.388.400	5	9.270.175	7	12.135.000	2	39.717.958	5	26.119.767	19	87.242.900	100%	98%	38	258.599.262	100%	132%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	9	1	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	69	325.500.000	32	193.762.674	35	147.411.100	6	21.691.067	4	17.717.577	5	36.700.260	15	65.423.310	30	141.532.214	86%	96%	62	335.294.888	90%	103%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	11	1	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	32	4.875.379.700	22	3.426.914.050	16	1.340.259.420	4	302.863.400	2	204.213.150	2	373.867.900	6	452.865.750	14	1.333.810.200	88%	100%	36	4.760.724.250	113%	98%	Dinas Lingkungan Hidup
2	12	1	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	50	108.107.950	18	66.439.000	18	39.086.000	5	8.806.500	1	4.043.300	7	11.832.500	5	12.051.500	18	36.733.800	100%	94%	36	103.172.800	72%	95%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	15	1	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	118	2.608.000.000	57	1.946.676.659	59	695.550.000	59	164.430.165	0	87.761.968	0	250.087.678	0	192.953.330	59	695.233.141	100%	100%	116	2.641.909.800	98%	101%	Dinas Perhubungan
2	16	1	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	62	640.500.000	31	511.207.637	30	237.650.000	5	61.748.113	4	17.700.700	6	78.412.109	21	74.754.106	36	232.615.028	120%	98%	67	743.822.665	108%	116%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	18	1	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	46	195.000.000	20	124.603.892	20	70.490.500	2	7.204.800	2	6.512.842	1	10.705.000	5	12.958.000	10	37.380.642	50%	53%	30	161.984.534	65%	83%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	22	1	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	60	232.050.000	30	175.012.482	30	53.077.000	5	10.432.800	5	8.602.356	5	25.778.800	12	8.250.500	27	53.064.456	90%	100%	57	228.076.938	95%	98%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
2	23	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	100	234.452.000	100	135.200.750	22	77.644.000	4	15.624.000	4	9.373.350	2	18.079.100	12	22.449.250	22	65.525.700	100%	84%	122	200.726.450	122%	86%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	30	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	88	1.133.596.930	36	671.493.974	44	227.780.606	5	26.435.051	10	32.639.910	19	73.255.945	5	70.783.670	39	203.114.576	89%	89%	75	874.608.550	85%	77%	Dinas Perdagangan
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	82.005.265	4	61.913.595	4	20.000.000	1	3.500.000	1	2.473.500	1	7.026.500	1	6.576.000	4	19.576.000	100%	98%	8	81.489.595	100%	99%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	94.020.000	6	76.914.708	6	31.963.000	3	2.287.680	0	6.049.198	1	9.467.497	2	14.055.201	6	31.859.576	100%	100%	12	108.774.284	100%	116%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	82.190.400	5	65.168.542	7	44.640.800	1	5.812.000	2	6.481.435	2	6.850.000	2	18.987.905	7	38.131.340	100%	85%	12	103.299.882	150%	126%	Bagian Hukum
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya	Unit	14	65.658.958	7	59.431.789	7	27.000.000	2	3.903.000	2	2.645.000	2	8.556.300	1	10.213.453	7	25.317.753	100%	94%	14	84.749.542	100%	129%	Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	9	88.000.000	0	57.895.821	9	30.842.468	0	0	3	3.972.400	2	2.929.500	3	17.135.682	8	24.037.582	89%	78%	8	81.933.403	89%	93%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	188	5.051.254.595	93	3.205.784.023	110	1.000.000.000	20	192.335.000	0	147.778.025	30	245.630.030	30	325.223.100	80	910.966.155	73%	91%	173	4.116.750.178	92%	81%	Bagian Umum
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	52	1.221.363.581	26	776.981.009	26	397.126.790	8	38.925.225	2	37.139.950	12	142.798.587	4	79.038.600	26	297.902.362	100%	75%	52	1.074.883.371	100%	88%	Sekretariat DPRD
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	66	150.000.000	0	140.622.576	33	118.769.200	5	15.773.728	4	12.852.700	12	37.534.095	8	49.425.114	29	115.585.637	88%	97%	29	256.208.213	44%	171%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	108	301.120.000	73	227.473.140	37	110.000.000	12	29.944.000	9	12.547.800	2	33.184.494	10	32.837.800	33	108.514.094	89%	99%	106	335.987.234	98%	112%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	105	197.574.000	68	107.330.626	30	50.000.000	6	8.803.000	5	9.266.600	8	17.342.000	7	17.111.500	26	52.523.100	87%	105%	94	159.853.726	90%	81%	Badan Pendapatan Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1						2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
5	3	1	2	09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	87	30.000.000	66	47.924.183	18	30.000.000	1	4.254.180	3	1.422.465	7	5.137.656	7	15.860.015	18	26.674.316	100%	89%	84	74.598.499	97%	249%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	1	1	2	09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	40	189.530.276	28	113.170.276	28	38.180.000	12	17.217.155	1	2.789.884	15	11.060.422	0	6.773.460	28	37.840.921	100%	99%	56	151.011.197	140%	80%	Inspektorat Daerah
8	1	1	2	09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	126.892.000	1	115.542.868	14	40.566.560	0	3.960.000	2	5.959.000	4	8.600.000	6	16.307.000	12	34.826.000	86%	86%	13	150.368.868	650%	119%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2	09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	32	211.388.150	16	136.464.611	16	88.901.550	1	14.504.235	1	4.224.950	8	18.692.015	6	49.475.535	16	86.896.735	100%	98%	32	223.361.346	100%	106%	Kecamatan Taman
7	1	1	2	09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	30	101.004.000	14	87.596.000	15	60.000.000	5	12.841.500	1	7.060.000	3	21.510.245	6	18.528.660	15	59.940.405	100%	100%	29	147.536.405	97%	146%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2	09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	32	248.118.400	15	144.520.487	16	98.832.400	5	19.350.695	5	7.433.050	3	38.258.240	3	30.978.000	16	96.019.985	100%	97%	31	240.540.472	97%	97%	Kecamatan Manguharjo
1	5	1	2	09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	742.500.000	6	477.424.109	8	249.868.000	2	36.340.500	2	39.739.810	2	68.198.230	2	93.511.270	8	237.789.810	100%	95%	14	715.213.919	88%	96%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	12	1	2	09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	6	22.941.480	3	15.445.100	3	41.753.160	1	6.489.500	4	800.000	0	9.139.500	0	17.364.100	4	33.793.100	133%	81%	7	49.238.200	117%	215%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	1	1	2	09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	2	70.380.000	1	49.260.600	1	18.990.000	0	2.700.000	0	2.400.000	0	6.821.960	1	6.923.310	1	18.845.270	100%	99%	2	68.105.870	100%	97%	Kecamatan Kartoharjo
2	9	1	2	09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	72.045.000	21	14.253.760	15	36.022.500	4	1.680.890	3	5.738.633	4	12.681.850	4	15.786.800	15	35.888.173	100%	100%	36	50.141.933	120%	70%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	11	1	2	09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	30	385.675.000	35	398.887.600	15	131.470.944	5	23.481.850	1	14.166.800	2	25.259.250	6	61.003.700	14	123.911.600	93%	94%	49	522.799.200	163%	136%	Dinas Lingkungan Hidup
2	12	1	2	09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	10	36.805.600	5	14.900.000	1	5.115.200	1	0	1	595.000		280.890	0	1.550.000	1	2.425.890	100%	47%	6	17.325.890	60%	47%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	2	1	2	09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	358	1.082.650.826	179	700.343.081	176	248.274.900	44	12.889.100	44	4.160.000	44	56.385.347	44	89.607.614	176	163.042.061	100%	66%	355	863.385.142	99%	80%	Sekretariat DPRD
1	1	1	2	09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1.475.834.000	1	704.566.423	1	270.000.000	0	24.613.200	0	17.250.500	0	73.462.464	1	54.500.643	1	169.826.807	100%	63%	2	874.393.230	100%	59%	Dinas Pendidikan
1	2	1	2	09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	63.639.127	1	109.093.250	1	75.745.600	1	10.000.000	0	1.500.000	0	2.350.500	0	58.057.881	1	71.908.381	100%	95%	2	181.001.631	100%	284%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1						2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	3		1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	711.660.000	0	-	1	711.660.000	0	8.838.091	0	7.357.903	0	129.842.569	1	544.076.392	1	690.114.955	100%	97%	1	690.114.955	100%	97%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4		1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	unit	2	203.000.000	1	168.522.000	1	100.000.000	0	17.262.000	1	19.678.000	1	62.899.500	0	0	1	99.839.500	100%	100%	2	268.361.500	100%	132%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5		1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	730.000.000	1	395.946.414	1	230.662.410	0	-	0	0	0	19.933.380	1	209.594.621	1	229.528.001	100%	100%	2	625.474.415	100%	86%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5		1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	152.850.000	0	-	1	152.850.000	0	-	0	0	1	148.657.000	0	2.850.000	1	151.507.000	100%	99%	1	151.507.000	100%	99%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	6		1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	4	714.181.300	2	528.276.528	2	181.014.120	1	35.301.306	1	20.556.645	0	63.286.885	0	58.055.299	2	177.200.135	100%	98%	4	705.476.663	100%	99%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	7		1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	172.008.000	1	286.933.173	3	75.124.482	1	22.745.550	0	21.045.100	1	10.648.700	1	20.603.750	3	75.043.100	100%	100%	4	361.976.273	80%	210%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	9		1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit/tahun	3	1.565.150.000	1	438.420.459	3	490.329.600	1	14.489.825	1	22.655.000	0	7.848.657	1	443.936.219	3	488.929.701	100%	100%	4	927.350.160	133%	59%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	11		1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	6	463.418.900	3	524.787.415	3	663.330.000	1	99.663.000	2	0	0	52.066.750	0	492.170.152	3	643.899.902	100%	97%	6	1.168.687.317	100%	252%	Dinas Lingkungan Hidup
2	12		1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	454.296.480	1	417.384.450	1	353.947.530	1	41.336.300	1	170.940.000		3.895.000	0	137.063.980	1	353.235.280	100%	100%	2	770.619.730	100%	170%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	15		1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	2.184.350.000	2	1.578.507.118	2	320.880.000	0	40.321.150	2	239.560.974	0	16.993.434	0	20.790.000	2	317.665.558	100%	99%	4	1.896.172.676	80%	87%	Dinas Perhubungan
2	16		1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	615.000.000	3	346.493.261	3	610.000.000	3	224.150.845	3	199.800.000	3	157.355.500	3	27.177.604	3	608.483.949	100%	100%	6	954.977.210	100%	155%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	18		1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	443.018.000	1	486.008.980	1	29.280.000	0	3.945.000	1	23.117.500	0	0	0	1.010.000	1	28.072.500	100%	96%	2	514.081.480	100%	116%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	22		1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	gedung	1	689.675.000	2	346.740.853	1	50.000.000	0	-	0	48.360.000	1	0	0	1.100.000	1	49.460.000	100%	99%	3	396.200.853	300%	57%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	23		1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	100	344.757.000	100	204.487.800	4	51.000.000	2	8.768.300	2	0	0	19.018.100	0	16.872.000	4	44.658.400	100%	88%	104	249.146.200	104%	72%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	30		1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	1.468.014.750	3	1.026.433.852	3	27.045.688	2	7.656.000	0	0	0	6.960.100	0	12.369.700	2	26.985.800	67%	100%	5	1.053.419.652	83%	72%	Dinas Perdagangan
4	1		1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	45.000.000	1	29.876.950	1	15.000.000	0	-	0	0	0		1	14.985.000	1	14.985.000	100%	100%	2	44.861.950	100%	100%	Bagian Pemerintahan
4	1		1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	8.200.000	1	5.602.000	1	2.500.000	0		0	0	0	0	1	2.495.000	1	2.495.000	100%	100%	2	8.097.000	100%	99%	Bagian Organisasi
4	1		1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	28.047.600	0	22.656.800	1	4.500.000	1	2.421.500	0	0	0	0	0	2.000.000	1	4.421.500	100%	98%	1	27.078.300	50%	97%	Bagian Hukum
4	1		1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1.606.250.000	1	1.459.816.358	1	349.979.000	0	0	0	0	0	0	1	349.978.294	1	349.978.294	100%	100%	2	1.809.794.652	100%	113%	Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	2.140.282.750	1	1.491.463.353	1	899.423.600	0	48.320.000	1	347.184.619	0	168.757.609	0	330.422.300	1	894.684.528	100%	99%	2	2.386.147.881	100%	111%	Bagian Umum
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	1.742.254.488	6	1.266.723.759	6	473.637.900	6	24.286.360	6	6.945.518	6	68.051.169	6	200.647.315	6	299.930.362	100%	63%	12	1.566.654.121	100%	90%	Sekretariat DPRD
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	179.745.000	1	118.417.500	1	350.000.000	0	0	0	14.500.000	1	183.780.340	0	134.800.000	1	333.080.340	100%	95%	2	451.497.840	100%	251%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	598.500.000	1	454.905.740	1	151.244.160	0	-	0	0	0	50.000.000	1	98.049.571	1	148.049.571	100%	98%	2	602.955.311	100%	101%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	270.000.000	2	291.691.000	1	75.000.000	0	1.800.000	1	12.953.700	0	32.698.380	0	24.836.013	1	72.288.093	100%	96%	3	363.979.093	100%	135%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	240.000.000	2	186.380.753	1	50.000.000	1	558.750	0	119.000	1	35.000	0	123.792.315	1	124.505.065	100%	249%	3	310.885.818	100%	130%	Badan Pendapatan Daerah
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9	700.000.000	7	1.520.288.217	2	220.000.000	1	44.946.500	1	35.658.970	1	14.277.700	0	115.574.166	2	210.457.336	100%	96%	9	1.730.745.553	100%	247%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	1.194.552.432	2	744.552.432	1	225.000.000	0	11.122.200	1	211.299.258	0	1.210.000	0	0	1	223.631.458	100%	99%	3	968.183.890	75%	81%	Inspektorat Daerah
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	42.500.000	1	41.280.572	1	77.586.206	0	485.000	0	1.000.000	0	2.420.000	1	72.932.000	1	76.837.000	100%	99%	2	118.117.572	100%	278%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	4	507.500.000	4	680.830.600	2	150.000.000	0	10.000.000	0	550.000	1	34.668.372	1	104.541.070	2	149.759.442	100%	100%	6	830.590.042	150%	164%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	359.127.000	1	294.068.478	1	135.535.000	0	-	0	0	0	13.500.000	1	117.410.200	1	130.910.200	100%	97%	2	424.978.678	100%	118%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	382.656.879	12	272.852.685	6	439.171.600	1	35.547.750	1	5.407.500	2	250.799.537	2	83.708.000	6	375.462.787	100%	85%	18	648.315.472	150%	169%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	120	150.058.000	60	106.318.400	60	35.000.000	15	5.000.000	10	2.750.000	20	16.345.000	15	10.814.890	60	34.909.890	100%	100%	120	141.228.290	100%	94%	Kecamatan Kartoharjo
5	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	24	104.000.000	16	106.303.000	8	40.000.000	11	5.918.000	12	4.161.300	18	12.241.500	0	6.353.500	12	28.674.300	150%	72%	28	134.977.300	117%	130%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	412	679.912.900	205	449.806.799	220	161.000.000	55	22.420.000	55	22.240.000	55	48.270.000	48	50.135.000	213	143.065.000	97%	89%	418	592.871.799	101%	87%	Dinas Pendidikan
1	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	560	653.958.774	273	562.439.575	280	215.873.400	23	16.338.625	42	6.515.800	27	40.715.188	188	101.516.830	280	165.086.443	100%	76%	553	727.526.018	99%	111%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	4	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	unit	400	1.883.371.300	103	937.580.062	106	388.495.200	12	56.448.400	12	52.493.150	50	127.613.050	31	117.345.250	105	353.899.850	99%	91%	208	1.291.479.912	52%	69%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	136	249.440.000	65	205.139.180	68	119.863.500	11	5.475.000	0	0	0	11.440.000	27	79.166.000	38	96.081.000	56%	80%	103	301.220.180	76%	121%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	81.500.000	3	71.569.500	5	16.530.000	3	1.741.500	2	2.961.500	0	2.916.500	0	8.838.000	5	16.457.500	100%	100%	8	88.027.000	80%	108%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	6	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	220	379.300.000	110	229.323.600	110	90.918.000	10	14.904.000	10	5.125.600	40	16.563.500	45	50.125.875	105	86.718.975	95%	95%	215	316.042.575	98%	83%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	7	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	94	121.625.000	36	93.759.970	47	51.075.000	0	8.250.000	11	2.025.000	3	13.622.000	33	26.943.000	47	50.840.000	100%	100%	83	144.599.970	88%	119%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	9	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	200	254.500.000	73	129.651.090	75	48.761.000	8	4.681.500	25	1.750.000	25	17.300.000	20	24.640.000	78	48.371.500	104%	99%	151	178.022.590	76%	70%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	12	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	180	354.026.804	174	456.018.368	75	138.182.400	10	29.516.900	25	17.851.200	20	55.039.900	20	35.676.800	75	138.084.800	100%	100%	249	594.103.168	138%	168%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	15	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	600.000.000	10	135.890.900	10	136.000.000	20	37.543.400	0	11.365.290	0	61.200.294	0	25.545.850	10	135.654.834	100%	100%	20	271.545.734	100%	45%	Dinas Perhubungan
2	16	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	100	1.224.360.000	72	683.495.025	50	149.150.000	20	47.402.300	6	5.029.500	13	57.416.604	8	37.973.700	47	147.822.104	94%	99%	119	831.317.129	119%	68%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	22	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	gedung	1	233.630.650	2	108.975.700	1	40.000.000	0	11.030.000	0	7.577.000	1	14.218.000	0	6.155.000	1	38.980.000	100%	97%	3	147.955.700	300%	63%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	23	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	100	247.650.000	100	140.058.000	78	49.272.000	22	9.945.000	20	6.450.000	0	12.444.400	34	14.139.400	76	42.978.800	97%	87%	176	183.036.800	176%	74%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	30	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	122	544.712.800	3	295.806.995	122	60.234.200	15	7.225.000	15	7.425.000	35	17.063.500	30	27.559.700	95	59.273.200	78%	98%	98	355.080.195	80%	65%	Dinas Perdagangan
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	34	45.924.000	17	26.514.000	17	10.000.000	4	2.343.000	4	395.000	4	3.830.000	5	3.315.000	17	9.883.000	100%	99%	34	36.397.000	100%	79%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	42	66.005.000	21	37.686.600	21	12.410.000	1	300.000	3	2.242.000	0	0	8	9.476.880	12	12.018.880	57%	97%	33	49.705.480	79%	75%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	80	75.786.240	29	55.865.150	22	36.250.000	4	2.879.000	4	2.944.000	6	9.316.800	8	8.380.000	22	23.519.800	100%	65%	51	79.384.950	64%	105%	Bagian Hukum
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	80	54.250.000	40	50.159.000	40	20.000.000	10	1.503.600	10	1.141.500	10	6.700.900	10	10.754.000	40	20.100.000	100%	101%	80	70.259.000	100%	130%	Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	258	1.044.101.500			129	238.854.800	32	12.107.300	0	13.824.560	38	42.548.550	48	146.458.100	118	214.938.510	91%	90%	120	765.062.720	47%	73%	Bagian Umum
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	36.800.000	0	17.506.000	10	18.803.600	0	500.000	3	1.000.000	3	3.401.000	4	6.250.000	10	11.151.000	100%	59%	10	28.657.000	100%	78%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
5	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	225.964.695	1	179.489.280	1	75.321.565	0	10.394.900	1	14.518.100	0	22.650.000	0	27.535.000	1	75.098.000	100%	100%	2	254.587.280	100%	113%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1						2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
5	2	1	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	32	411.000.000	24	262.139.745	10	108.000.000	0	9.930.000	2	17.148.000	5	32.691.350	4	30.212.600	11	89.981.950	110%	83%	35	352.121.695	109%	86%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	%	100	404.100.000	100	120.440.447	100	50.000.000	25	9.985.000	25	3.702.000	25	9.348.000	25	18.305.000	100	41.340.000	100%	83%	100	161.780.447	100%	40%	Badan Pendapatan Daerah
6	1	1	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	120.393.000	19	80.393.000	25	20.000.000	5	5.878.000	4	2.000.000	7	9.487.400	9	2.400.000	25	19.765.400	100%	99%	44	100.158.400	220%	83%	Inspektorat Daerah
8	1	1	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	14	135.000.000	13	147.578.426	14	40.000.000	4	8.000.000	2	7.800.000	3	9.907.000	5	14.292.000	14	39.999.000	100%	100%	27	187.577.426	193%	139%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	12	147.825.000	5	100.788.500	6	36.223.500	1	9.890.000	1	198.000	1	2.626.000	3	23.491.700	6	36.205.700	100%	100%	11	136.994.200	92%	93%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	120	181.200.000	120	176.797.787	60	60.821.247	10	9.280.000	10	12.325.000	20	26.300.000	20	12.887.000	60	60.792.000	100%	100%	180	237.589.787	150%	131%	Kecamatan Manguharjo
2	18	1	2.09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	835.000.000	6	53.401.000	5	53.684.065	1	8.996.000	2	2.573.000	1	24.827.400	0	17.095.000	4	53.491.400	80%	100%	10	106.892.400	77%	13%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	2	1	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	%	100	270.865.042.848	100	108.136.329.256	100	92.860.801.868	0	25.110.486.350	70	23.148.829.247	80	22.900.810.289	80	22.936.295.004	80	94.096.420.890	80%	101%	100	202.232.750.146	100%	75%	
1	2	1	2.10	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD)	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit Kerja	2	270.865.042.848	1	108.136.329.256	1	92.860.801.868	1	25.110.486.350	1	23.148.829.247	1	22.900.810.289	1	22.936.295.004	1	94.096.420.890	100%	101%	2	202.232.750.146	100%	75%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	1	1	2.11			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	3.853.575.520	100	2.736.239.024	100	824.160.732	25	188.194.172	25	85.872.236	25	222.900.000	0	150.000.000	75	646.966.408	75%	79%	100	3.383.205.432	100%	17%	
4	1	1	2.11	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ bulan	4	1.453.575.520	2	550.124.210	2	194.160.732	2	55.759.172	2	14.627.236	0	0	0	0	2	70.386.408	100%	36%	4	620.510.618	100%	43%	Bagian Umum
4	1	1	2.11	4		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ bulan	4	2.400.000.000	2	2.186.114.814	2	630.000.000	2	132.435.000	2	71.245.000	2	222.900.000	2	150.000.000	2	576.580.000	100%	92%	4	2.762.694.814	100%	115%	Bagian Umum
4	1	1	2.12			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Rumah Tangga Pimpinan dan Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	%	100	7.515.902.100	100	8.984.478.415	100	1.796.442.800	25	417.890.984	50	292.857.588	0	332.419.847	0	537.697.614	75	1.580.866.033	75%	88%	100	10.565.344.448	100%	21%	
4	1	1	2.12	1		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	paket	40	3.954.060.600	2	1.589.220.000	1	1.234.042.800	0	277.643.712	0	163.594.414	0	281.121.897	1	411.212.173	1	1.133.572.196	100%	92%	3	2.722.792.196	8%	69%	Bagian Umum
4	1	1	2.12	2		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	paket	30	2.263.269.700	30	4.750.304.492	1	237.400.000	0	119.796.788	1	87.935.754	0	0	0	9.358.500	1	217.091.042	100%	91%	31	4.967.395.534	103%	219%	Bagian Umum
4	1	1	2.12	3		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	paket	30	1.298.571.800	20	2.644.953.923	1	325.000.000	0	20.450.484	0	41.327.420	0	51.297.950	1	117.126.941	1	230.202.795	100%	71%	21	2.875.156.718	70%	221%	Bagian Umum
4	1	1	2.13			Penataan Organisasi	Tingkat Kematangan Organisasi	skor	28,5	7.669.219.830	0	4.206.854.127	28,5	1.340.151.331	0	304.779.802	0	87.810.579	46,1	451.754.140		411.741.824	46,1	1.256.086.345	162%	94%	46	5.462.940.472	162%	16%	
4	1	1	2.13	1		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	4	1.798.096.000	2	1.023.220.991	2	339.871.000	0	66.727.440	0	4.200.000	2	153.848.000	0	113.873.500	2	338.648.940	100%	100%	4	1.361.869.931	100%	76%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.13	2		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	4	2.264.346.000	2	1.948.503.633	2	662.366.630	0	158.300.562	0	83.610.579	2	257.677.340	0	158.033.624	2	657.622.105	100%	99%	4	2.606.125.738	100%	115%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.13	3		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	4	3.606.777.830	2	1.235.129.503	2	337.913.701	0	79.751.800	1	-	1	40.228.800	0	139.834.700	2	259.815.300	100%	77%	4	1.494.944.803	100%	41%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.14			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan	%	100	7.429.603.260	100	441.429.214	100	2.085.874.100	0	31.045.000	50	96.563.000	50	1.371.986.650	0	245.425.050	100	1.745.019.700	100%	84%	100	2.186.448.914	100%	23%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	2000	7.429.603.260	14	441.429.214	500	2.085.874.100	125	31.045.000	125	96.563.000	125	1.371.986.650	0	245.425.050	375	1.745.019.700	75%	84%	389	2.186.448.914	19%	29%	Bagian Umum
4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Terhadap Hak Keuangan DPRD	%	100	64.995.240.461	100	43.890.649.320	100	16.277.591.077	25	3.616.573.625	25	2.700.556.030	25	5.221.390.955	100	3.884.171.812	175	15.422.692.422	175%	95%	100	59.313.341.742	100%	24%	
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/ bulan	60	63.437.659.953	60	43.119.749.120	30	15.896.772.217	30	3.616.573.625	30	2.675.289.830	30	5.122.602.855	30	3.729.848.480	30	15.144.314.790	100%	95%	90	58.264.063.910	150%	92%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	4	1.139.530.508	2	635.753.800	2	275.818.860	0	-	0	0	1	92.000.000	1	110.250.000	2	202.250.000	100%	73%	4	838.003.800	100%	74%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	60	418.050.000	18	135.146.400	30	105.000.000	0	-	11	25.266.200	19	6.788.100	0	44.073.332	30	76.127.632	100%	73%	48	211.274.032	80%	51%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	%	100	18.266.831.972	100	13.951.382.321	100	11.062.181.667	25	2.973.871.344	25	2.521.550.285	25	2.980.645.978	25	1.164.048.400	100	9.640.116.007	100%	87%	100	23.591.498.328	100%	53%	
4	2	1	2.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	28	151.988.049	22	62.751.000	8	37.895.345	2	480.000	2	1.848.000	2	2.005.500	2	27.721.300	8	32.054.800	100%	85%	30	94.805.800	107%	62%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	24	18.114.843.923	12	13.888.631.321	18	11.024.286.322	7	2.973.391.344	6	2.519.702.285	3	2.978.640.478	2	1.136.327.100	18	9.608.061.207	100%	87%	30	23.496.692.528	125%	130%	Sekretariat DPRD

Tabel 2. 88 Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Madiun Triwulan IV Tahun 2024

No	Nama Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja RKPD Kab/Kota	Predikat Capaian	Rata - Rata Realisasi Anggaran Per Urusan	Predikat Capaian Realisasi	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Ket
1	Kota Madiun	99%	Sangat Tinggi	94%	Sangat Tinggi	Terdapak Kendala teknis dilapangan seperti dalam penerapan DAK dimana masyarakat tidak berkenan untuk dilakukan pembangunan di daerahnya sehingga harus dicarikan lokasi lain yang sesuai	1. Walikota yang dipimpin seorang Pj menjadikan tidak ada kepentingan Politik Seperti Janji Kampanye yang harus dilakukan menjadi kebijakan, sehingga pendanaan bisa dimaksimalkan untuk pelayanan kepada Masyarakat. 2. Pelaksanaan Perubahan Anggaran berjalan dengan lancar 3. Hubungan Harmonis antara eksekutif, Legeslatif dan Masyarakat dalam pembangunan Kota Madiun	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.7 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.7.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, mengungkapkan sejumlah permasalahan yang menghambat pencapaian atas target-target yang telah direncanakan. Identifikasi permasalahan ini didasarkan pada prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2024. Rincian mengenai Prioritas pembangunan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 86 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2024

Sesuai dengan empat prioritas pembangunan pada gambar 2.26 diatas, identifikasi permasalahan pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 89 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Permasalahan
1	2	3	4
1.	Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis Smart City	• Kebijakan pemerintah pusat dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam Road Map RB 2020-2024 yang memberikan konsep yang jelas terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Madiun	• Masih terdapat penetapan target atas Kegiatan Utama belum didasarkan pada target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpan RB nomor 182 Tahun 2024) • Belum adanya perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan/atau penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan system kerja dan penyederhanaan birokrasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
		• Penyusunan rencana aksi yang lebih terarah dan berorientasi pada prioritas penyelesaian permasalahan utama • Komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan daerah yang memiliki visi yang jelas dan kemampuan untuk mendorong perubahan sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi • Kesamaan persepsi dan tujuan mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah yang didukung budaya kerja berorientasi hasil • Konsistensi dan keberlanjutan, karena reformasi birokrasi merupakan proses panjang dan berkelanjutan • Pemanfaatan aplikasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik • Ketersediaan dana/anggaran yang cukup, untuk melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi, dan peningkatan kesejahteraan pegawai • Dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai • Dukungan masyarakat, berupa partisipasi masyarakat dan sistem kontrol dari berbagai unsur Masyarakat serta memberikan masukan yang membangun terhadap kebijakan dan pelaksanaan reformasi	• Pengelolaan komunikasi kebijakan kepada seluruh stakeholder sasaran pada seluruh proses kebijakan yang belum optimal • Belum terdapat kebijakan atau kaidah baku terkait aspek data statistik yang berlaku untuk seluruh produsen data di Kota Madiun • Belum optimalnya kerja sama antara lima elemen masyarakat, yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media dalam pengendalian inflasi • Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran SPBE berbasis Arsitektur SPBE dengan menerapkan mekanisme Evaluasi/Clearance Belanja SPBE di perangkat daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
		• Adanya regulasi yang jelas dan konsisten yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dapat mempercepat proses perubahan • Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
2.	Peningkatan kemandirian ekonomi yang inklusif untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat	• Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di daerah mendapat nilai poin ((tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Kota Kediri). • pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan di daerah mendapatkan nilai poin 6,79 (tertinggi ketiga setelah Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Mojokerto). • Perluasan akses dan kesempatan di daerah (tertinggi kedua setelah Kota Blitar)	• Kurangnya lapangan kerja produktif dan menguntungkan • Kurang optimalnya penyediaan jejaring pengaman sosial. • Kurang optimalnya kualitas pelayanan publik. • Kurang optimalnya penetapan kebijakan publik yang memadai.
3.	Percepatan kualitas hidup masyarakat melalui inklusivitas sosial	• Meningkatnya perbaikan derajat kesehatan penduduk di Kota Madiun. • Sekolah gratis di Kota Madiun • Adanya program Bantuan Beasiswa Pendidikan • Tersedianya sarana dan prasarana yang pendidikan • Belanja pemerintah di bidang pendidikan • Adanya bantuan laptop, seragam, ongkos jahit serta akses internet gratis • Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan	• Masih adanya anak tidak sekolah yang disebabkan bukan karena faktor pembiayaan melainkan disebabkan faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat. • Kurang optimalnya sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan gedung bangunan sekolah, pemberian bantuan seragam bagi siswa SD dan SMP, dan laptop gratis siswa SD dan SMP serta sarana dan prasarana belajar mengajar. • Belum optimalnya kualitas pendidikan kejar paket. • Belum optimalnya penanganan stunting, tuberkulosis dan demam berdarah. • Belum optimalnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
		• Akses sekolah yang mudah dan terjangkau • Pemantauan status kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif dan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sudah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan. • Adanya skrining faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) pada kelompok usia produktif dan lansia. Hal tersebut dikarenakan adanya fenomena transisi epidemiologi dimana penyakit tidak menular trennya meningkat daripada penyakit menular sehingga dengan diadakannya skrining faktor resiko PTM akan berdampak ditemukan sedini mungkin penderita PTM. • Peningkatan penemuan kasus pada penyakit menular untuk pengendalian penularan dan penurunan mortalitas akibat penyakit tidak menular.	• Belum optimalnya kemandirian perempuan dalam perekonomian. • Kurangnya pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender. • Belum optimalnya penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). • Kurangnya pemahaman masyarakat serta dunia usaha tentang kesetaraan gender, tindak kekerasan terhadap perempuan. • Kurangnya perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan serta kurangnya peningkatan efektivitas pelayanan bagi perempuan korban kekerasan. • Kurang optimalnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. • Belum meratanya pembangunan antarwilayah yang strategis dan berkualitas. • Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi secara merata di seluruh sektor. • Kurangnya dukungan di kegiatan sektor pada karya. • Kurang optimalnya kebijakan serta komitmen investasi. • Kurangnya pemberian bantuan sosial. • Kurangnya pemerataan pembangunan infrastruktur sarana prasarana umum dan kesehatan sehingga seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses fasilitas umum dan kesehatan yang merata. • Kurangnya bantuan akses perbankan kepada para UMKM sehingga dapat meningkatkan skala usaha.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
		• Kota Madiun sudah mendeklarasikan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sehingga sanitasi lingkungan sudah lebih baik. • Perdagangan online yang makin marak mendesak posisi perempuan terbiasa bekerja di wilayah UMKM sehingga dapat meningkatkan kontribusi perempuan dalam pendapatan keluarga. • Kesadaran aparatur dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri. • Tingginya ketimpangan pendapatan antar penduduk berpengeluaran atas, menengah dan bawah.	
4.	Penguatan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	• Perencanaan awal kawasan yang baik sehingga daya hidup Kota Madiun masih dapat dipertahankan dan diharapkan berkelanjutan	• Kemacetan • Polusi lingkungan • Tata kota yang tidak beraturan, maupun masalah sosial dan ekonomi

Sumber: Bappeda Kota Madiun, (2024)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Capaian prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja nya baik dari sisi target terhadap realisasinya tahun 2024 maupun perbandingan dengan realisasi tahun ssebelumnya. Capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 90 Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Kota Madiun Tahun 2024

No.	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	2024		
			Target	Realisasi	%
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	83,71	84,51	100,96
2.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau	Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)	91,93	93,933	101,52
3.	Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,40	6,87**	107,34
4.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	87,95 (A-)	91,02 (A-)	103,49
5.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat demi Kelancaran Pelaksanaan Pembangunan	Indeks Ketentraman	82,88	84,23	101,63

Sumber Data: PD dan BPS
**) angka sementara*

Sebagaimana yang termuat pada Tabel 2.82 diatas, realisasi capaian terget indikator kinerja prioritas pembangunan pada Pemerintah Kota Madiun memiliki nilai diatas 100%. Capaian tersebut menunjukkan Pemerintah Kota Madiun dari tahun ke tahun berkinerja baik. Sehingga diharapkan pada tahun 2025 nanti realiasi capaian target indikator kinerja dapat terealisasi sesuai target.

Data capaian 4 (empat) tahun terakhir Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Kota Madiun :

Tabel 2. 91 Capaian 5 Tahun Terakhir Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Kota Madiun Tahun 2024

No.	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	IPM	80,91	81,25	82,01	82,71	84,51
2.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau	Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)	86,67	89,40	90,33	91,33	93,933
3.	Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,69	6,87	-	-	6,87**
4.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	65,55	66,26	69,26	87,95	91,95
5.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat demi Kelancaran Pelaksanaan Pembangunan	Indeks Ketentraman	76,87	78,74	81,25	82,88	84,23

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2024, Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Madiun adalah 91,95 kategori "A-" dengan capaian kinerja sebesar 103,49%. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun mendapatkan "**A-**" berdasarkan rincian hasil evaluasi pada komponen Penilaian sebagai berikut:

Tabel 2. 92 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024

No.	Penilaian	Bobot	Nilai
A.	RB General	100	80,60
B.	RB Tematik	20	11,35
C.	Indeks RB	120	91,95
			A-

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2025

Tabel 2. 93 Rincian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Madiun Tahun 2024

No		Komponen Penilaian	Bobot	2024
1		2	3	4
A.		RB General		
		I. Strategi Pelaksanaan RB General	10	8,07
	1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,42
	2	Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	5,65
		II. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	40	29,33
	1	Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi	3	2,4
	2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	2,63
	3	Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,5	0,75
	4	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	3,24
	5	Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,5	1,5
	6	Digitalisasi Arsip	2,5	2,45
	7	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang diselesaikan	2,5	2,5
	8	Kualitas Kebijakan	2,5	1,72
	9	Reformasi Hukum	2,5	2,44
	10	Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,5	1,09
	11	Tata Kelola Pengadaan	2,5	1,95
	12	Sistem Merit	4	2,88
	13	Pelayanan Publik	2	1,87
	14	Kepatuhan Standart Pelayanan Publik	2	1,91
		III. Capaian Sasaran Strategis	50	43,2
	1	Sistem Pemerintahan Berbasisi Elektronik (SPBE)	9	8,23
	2	Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	4	3,97
	3	Capaian Indikator Kinerja Utama Non Makro	6	4,57
	4	Opini BPK	5	5
	5	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	3,64
	6	Indeks Berakhlak	4	2,98
	7	Survei Penilaian Integritas	10	7,71
	8	Survei Kepuasan Masyarakat	8	7,1
Total Komponen RB General			100	80,60
B.		RB Tematik		
		I. Strategi Pelaksanaan RB Tematik	5	3,08
	1	Rencana Aksi Pengentasan Kemiskinan	1	0,63
	2	Rencana Aksi Realisasi Investasi	1	0,58

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3	4
	3	Rencana Aksi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	1	0,54
	4	Rencana Aksi Penggunaan Produk Dalam Negeri	1	0,79
	5	Rencana Aksi Pengendalian Inflasi	1	0,54
	II. Capaian Indikator Dampak RB Tematik		15	8,27
	1	Capaian Dampak Pengentasan Kemiskinan	3	2
	2	Capaian Dampak Realisasi Investasi	3	1,92
	3	Capaian Dampak Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	3	1,5
	4	Capaian Dampak Penggunaan Produk Dalam Negeri	3	2,85
	5	Capaian Dampak Pengendalian Inflasi	3	0
Total Komponen RB Tematik			20	11,35
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)			120	91,95

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2025

Sebagaimana terlihat pada komponen hasil di atas, didalamnya terdapat penilaian SAKIP yang merupakan indikator sasaran pemerintah Kota Madiun untuk meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana penilaian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Tahun 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 3 September 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dengan rincian komponen yang dinilai sebagai berikut:

Tabel 2. 88 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	26.00
2.	Pengukuran Kinerja	30	24.37
3.	Pelaporan Kinerja	15	12.45
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18.21
	Nilai Hasil Evaluasi	100	81.03
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2024

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun menunjukkan bahwa nilai sebesar 81,03 dengan predikat “A”. hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “sangat baik”, yaitu Instansi pemerintah dan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintah berorientasi hasil.

2.7.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah di Kota Madiun tidak terlepas dari kondisi nasional, provinsi dan lingkungan eksternal lainnya. Hasil identifikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 89 Permasalahan Pembangunan Daerah

No.	Isu Penting dan Masalah Mendesak		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal Lainnya
1	Tekanan terhadap Kurs & pasar modal	Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas & Nilai Tambah Sumber Daya Lokal	Perang dagang/tarif
2	Tekanan Suku bunga	Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan	Proteksionisme
3	Perlambatan Ekspor	Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Khususnya Peningkatan Lapangan Kerja, Penanganan Stunting, dan Penanggulangan Kemiskinan	Geopolitik
4	Perlambatan Pertumbuhan	Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Volatilitas harga komoditas
5	Transisi Demografi	pemanfaatan potensi energi baru terbarukan	Perlambatan pertumbuhan
6	Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas Lingkungan hidup dan kapasitas Bencana	
7	Digitalisasi Ekonomi	Optimalisasi penangan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	
8	Optimalisasi SDA dan SDM		

Pembangunan daerah diarahkan pada upaya transformasi sosial-ekonomi hingga birokrasi pemerintahan. Dalam pelaksanaan pembangunan, kapasitas pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan menjadi sesuatu yang krusial. Namun, dengan kondisi perekonomian nasional yang ekspansif, dapat menjadi penyokong pelaksanaan program-program pemerintah daerah.

Permasalahan pembangunan daerah berkutat pada permasalahan seputar kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi pada sektor-sektor potensial, hingga permasalahan ketahanan pangan. Pada tahun 2024 dan seterusnya, perkiraan kondisi perekonomian yang membaik dapat menjadi peluang. Diharapkan proyeksi pendapatan transfer maupun Pendapatan Asli Daerah dapat melampaui tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan pula akan berdampak pada maksimalnya belanja program dan kegiatan pemerintah daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 90 Permasalahan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN a. Kegiatan update laptop HP (pengadaan tahun 2020) ke chrome flex tidak dilaksanakan dikarenakan laptop laptop HP (pengadaan tahun 2020) belum bersertifikat google dan saat ini masih proses pengusulan sertifikat di Amerika b. kegiatan perencanaan rehab (DAK Fisik) tahun 2025 yang tidak terlaksana karena adanya perubahan kebijakan penggunaan DAK Fisik Tahun 2025 c. Tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran kurang rekreatif d. Keterbatasan waktu untuk mengerjakan administrasi keuangan dan membagi waktu antara tugas bendahara dan tugas sebagai tenaga pendidik (guru) di sekolah.	DINAS PENDIDIKAN a. Pengalihan anggaran untuk mendukung pembelajaran digital (pengadaan papan interaktive) b. Berkoordinasi dengan pusat dan mengembalikan anggaran ke kas daerah c. Memberikan pendampingan komunitas belajar bagi pendidik, memberi motivasi pemanfaatan pembelajaran, dan memberi evaluasi penilaian terhadap kemampuan pendidik d. Meminta bantuan tenaga upahan / tenaga kependidikan untuk membantu administrasi keuangan.
2.	Kesehatan	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA a. Sehubungan terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/140/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5675/2021 Tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021-2025 pada 2 Februari 2024, terdapat perubahan jumlah sasaran cukup signifikan (sasaran terlalu tinggi) dibanding sasaran Tahun 2023. b. Perubahan kebijakanterkait SPM Kesehatan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan yang mulai berlaku di 3 April 2024. Adanya perubahan definisi operasional pelayanan kesehatan usia produktif, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 tahun 2024 dengan perhitungan capaian berasal dari data komposit yang berasal dari lintas program sehingga dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang maksimal dengan lintas program terkait. Belum ada metode perhitungan capaian yang seragam dari pengelola program di level Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, pelaporan SPM pada aplikasi e-SPM Bangda belum memfasilitasi perhitungan komposit sesuai Permenkes terbaru.	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA a. Melakukan perhitungan sasaran sesuai jumlah penduduk pada Kepmenkes, melakukan monitoring dan evaluasi progres capaian setiap triwulan, menetapkan SK Walikota tentang sasaran SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 untuk data yang tidak diambil dari Kepmenkes, serta memaksimalkan pencatatan dan pelaporan capaian dari klinik dan Rumah Sakit agar mencapai target yang ditetapkan. b. Merevisi data terinput pada aplikasi e-SPM Bangda sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan terbaru, sehingga mulai pengisian SPM TW II terdapat perubahan angka untuk sasaran maupun mutu layanan mengikuti hasil konsultasi dengan Kemendagri melalui zoom. Melakukan konsultasi dengan pengelola program di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan melalui hasil pembahasan pengampu bidang kesehatan di Bangda, diputuskan untuk kegiatan deteksi dini tetap dilakukan sebagaimana Peraturan SPM terbaru, akan tetapi untuk perhitungan capaian masih menggunakan konsep SPM lama.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tupoksi menjalankan kegiatan untuk mengurangi potensi banjir/ genangan wilayah kota. Wilayah Kota Madiun dilintasi oleh sungai-sungai yang mana menjadi kewenangannya merupakan kewenangan Dinas Pengairan Propinsi Jawa Timur dan BBWS Bengawan Solo. Pemeliharaan dan pembangunan saluran yang seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Pengairan Propinsi Jawa Timur dan BBWS Bengawan Solo dikarenakan keterbatasan anggaran dan luasan wilayah maka pemeliharaan dan pembangunan saluran dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Madiun dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun. Untuk pemeliharaan dan pembangunan saluran ordo 2 perencanaan dan pelaksanaan teknis harus mendapatkan rekomendasi teknis ke BBWS Bengawan Solo. Sementara untuk pemeliharaan dan pembangunan saluran ordo 3 dan 4, perencanaan dan pelaksanaan teknis dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota. b. Bidang Cipta Karya untuk Sie Penataan Bangunan Gedung apabila tolok ukur kinerja berdasarkan jumlah Bangunan Gedung milik Pemerintah Kota Madiun, maka permasalahan yang dialami adalah sebagai berikut: ○ Bidang Cipta Karya belum memiliki data total jumlah bangunan gedung milik Pemerintah Kota Madiun. ○ Bidang Cipta Karya tidak hanya mengerjakan pembangunan/rehab bangunan milik Pemerintah Kota Madiun saja, akan tetapi juga melaksanakan pembangunan/rehab bangunan milik instansi vertikal yang nantinya akan diserahterimakan melalui mekanisme hibah. Apakah ketika ini dilakukan, maka tidak dianggap sebagai suatu capaian kinerja, mengingat aset yang dibangun/direhab bukan aset milik Pemerintah Kota Madiun.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG a. Pemeliharaan dan pembangunan saluran ordo 2 dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari BBWS Bengawan Solo dan Dirjen SDA Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Koordinasi dengan pihak terkait harus dilakukan secara bertahap. b. Target jumlah bangunan gedung tahun ini bersumber dari data realisasi tahun yang kemarin. Pada tahun 2024 dianggarkan untuk dilaksanakan kegiatan pendataan bangunan gedung pemerintah; serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tetap melaksanakan pembangunan/rehab bangunan walaupun bukan aset Kota Madiun. c. Pada setiap tahun telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jasa konstruksi agar pembangunan dapat dihasilkan dengan yang baik; serta DPUPR secara bertahap melaksanakan pelatihan tenaga terampil konstruksi pjt bersertifikat SKK jenjang 6. d. Dasar penentuan lokasi pembangunan saluran mengakomodir dari usulan masyarakat dan pokir dewan; Awalnya penyediaan kebutuhan air minum diampu oleh PDAM dan limbah domestik oleh Dinas Perkim untuk Dinas Pekerjaaan Umum Dan Penataan Ruang hanya melaksanakaan monitoring kegiatan dan menyusun rencana kebijakan saja; Pada Tahap pemenuhan dan permintaan pelaporan SPM ada beberapa data yang mengakomodir data dari Tim Kota Dinas Perkim; Pada tahun anggaran 2024 DPUPR melaksanakan kegiatan pengumpulan data terkait pelayanan dasar sehingga mampu mencukupi data secara mandiri. e. Untuk tahun 2024, proses Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PMP UMK) akan dilaksanakan dengan pihak ketiga, yaitu dengan menggunakan jasa konsultan. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk proses bisnis persetujuan substansi dalam rangka penetapan RDTR Kota Madiun; Melakukan koordinasi dengan stakholder terkait penyelenggaraan ruang melalui Forum Penataan Ruang (FPR).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
		Pembangunan/rehab bangunan milik Pemerintah Kota Madiun bukan hanya dilakukan oleh Dinas PUPR saja, akan tetapi juga kewenangan masing-masing OPD yang memiliki aset bangunan gedung. Sehingga untuk bangunan gedung yang bukan merupakan kewenangan Dinas PUPR akan kesulitan melakukan pemantauan/pendataan peningkatan kondisi bangunan gedungnya mengingat tenaga teknis yang terbatas. c. Bidang Cipta Karya untuk Sie Pengembangan Jasa Konstruksi ○ Perkembangan Jasa Konstruksi yang ada di Kota Madiun mengalami kondisi yang dinamis sehingga perlu adanya pembinaan dan pengawasan agar keberadaannya tetap memberikan sumbangsih terhadap pembangunan yang ada di Kota Madiun. Pembinaan dan Pengawasan yang telah dilakukan setiap tahun oleh Pemerintah Kota Madiun dalam hal ini melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun sudah maksimal namun perlu ditingkatkan lagi terutama dalam hal penyampaian regulasi terbaru terkait perkembangan Jasa Konstruksi pada skala nasional. ○ Adanya perubahan regulasi bentuk perpanjangan Ijin BUJK terkait PJT/ penanggung jawab teknis pada BUJK, awalnya bisa untuk BUJK type sederhana bisa menggunakan PJT jenjang 5 menjadi PJT jenjang 6, sedangkan BUJK level sederhana masih minim mempunyai PJT bersertifikat SKK jenjang 6 d. Bidang Cipta Karya untuk Sie Penataan Bangunan dan Lingkungan apabila tolok ukur kinerja berdasarkan jumlah Saluran Lingkungan di wilayah Kota Madiun, maka permasalahan yang dialami adalah sebagai berikut: ○ Belum adanya database saluran lingkungan di wilayah Kota Madiun sehingga parameter pelaksanaan kegiatan belum ada.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
		○ Pelaksanaan manajemen pengolahan limbah domestic yang masih tumpang tindih dengan OPD lain sehingga penentuan sasaran menjadi kendala. ○ Penyediaan kebutuhan air minum sudah mencakup seluruh wilayah Kota Madiun dan kegiatan fisik sudah diserahkan pada PDAM sehingga tidak banyak kegiatan. ○ Untuk penyusunan pelaporan SPM masih simpang siur dalam penggunaan data karena pelaksana SPM adalah dari PDAM dan Dinas Perkim sedangkan Dinkes juga mengeluarkan data terkait dat rumah sehat. e. Bidang Tata Kota untuk Sie Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang: Belum adanya tim pengendalian untuk Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PMP UMK) yang telah terbit, sedangkan pernyataan mandiri yang telah terbit sudah mencapai lebih dari 1000 pernyataan mandiri. f. Bidang Tata Kota untuk Sie Perencanaan Tata Ruang: ○ Proses bisnis penetapan Rencana Rinci Tata Ruang Kota Madiun yang dinamis dan rinci. ○ Banyaknya permohonan perijinan terkait pemanfaatan ruang yang memerlukan koordinasi dengan stakholder terkait	
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA a. Sekretariat ● Kurangnya sumber daya manusia yang memadai ● Koordinasi dan sinergi yang belum optimal ● Tantangan Pemanfaatan teknologi ● Kurangnya SOP yang terpadu b. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ● Adanya Konflik Sosial di masyarakat ● Adanya ketidaktertiban aktivitas masyarakat di ruang publik	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA a. Sekretariat ● Usulan Pegawai melalui E Formasi ● Meningkatkan komunikasi dan koordinasi ● Mengikuti bimtek dan pelatihan ● Menyusun SOP b. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ● Mitigasi Konflik Sosial di masyarakat ● Deteksi dini dan pengawasan ketidak tertiban aktivitas masyarakat di ruang publik ● Mengusulkan usulan sarana dan prasarana keamanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
		● Adanya keterbatasan sarana dan prasarana keamanan ● Kurangnya partisipasi masyarakat ● Adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas personil Satpol PP dan Damkar c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah ● Kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Perundang undangan daerah yang masih kurang ● Koordinasi antar perangkat daerah dan instansi lain yang belum optimal ● Kapasitas aparatur yang terbatas ● Kurangnya sosialisasi peraturan perundang undangan daerah. d. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ● Kurangnya tenaga/ personil yang terlatih ● Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat ● Belum optimalnya upaya pencegahan melalui inspeksi, edukasi/sosialisasi dan pengawasan terhadap bangunan untuk proteksi kebakaran. ● Kurangnya sarana dan prasarana BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH a. Belum optimalnya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana b. Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial c. Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana d. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait, Swasta dan Masyarakat saat tanggap darurat bencana e. Masih terdapatnya potensi bencana di Kota Madiun f. Kurangnya tenaga teknis penghitungan dan kaji cepat pasca bencana bangunan dan infrastruktur akibat bencana alam.	● Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan meningkatkan Siskamling ● Usulan Pegawai melalui E Formasi dan bimtek/ diklat/ pelatihan untuk meningkatkan kualitas personil Satpol PP dan Damkar c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah ● Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan agar masyarakat patuh terhadap Peraturan Perundang undangan daerah ● Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dan instansi lain ● Usulan Pegawai melalui E Formasi ● Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang undangan daerah d. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ● Usulan Pegawai melalui E Formasi dan Pengembangan Kapasitas SDM Damkar melalui Bimtek/ Diklat/ Pelatihan ● Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat ● Melaksanakan upaya pencegahan melalui inspeksi, edukasi/sosialisasi dan pengawasan terhadap bangunan untuk proteksi kebakaran ● Mengusulkan usulan sarana dan prasarana BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH a. Pelatihan Penanggulangan Bencana yang bersertifikat b. Pengadaan Sarana dan Prasana Evakuasi Korban Bencana serta Alat Peringatan Dini Bencana (EWS) c. Sosialisasi dan Pelatihan Penanggulangan Bencana kepada Masyarakat dan Anak Sekolah serta Mahasiswa d. Rapat Koordinasi dan dibentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) serta Intensifikasi tugas Instansi terhadap bencana dan Swasta / Relawan Bencana e. Koordinasi dengan BMKG, Instansi Pemerintah / Swasta dan Masyarakat / Relawan f. Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Pelatihan yang berbasis kompetensi untuk menghitung cepat kebutuhan bangunan dan infrastruktur yang rusak / terdampak bencana alam.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
6.	Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK a. Masih ada Keluarga Penerima Manfaat usia produktif b. Masih ada Keluarga Penerima Manfaat yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan c. Kurangnya sinergitas dengan pihak terkait dalam peningkatan dan pemberdayaan sosial kepada PMKS secara intens dan berkelanjutan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK a. Meningkatkan sumber daya manusia yang melakukan monitoring dan evaluasi data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tingkat daerah b. Meningkatkan sumber daya manusia yang melakukan monitoring dan evaluasi data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tingkat daerah c. Meningkatkan sinergitas dengan pihak terkait dalam peningkatan dan pemberdayaan sosial kepada PMKS
7.	Ketenagakerjaan	DINAS TENAGA KERJA a. Masalah utama bidang ketenagakerjaan adalah pengangguran: ○ Pola pikir pencari kerja yang masih memandang sebelah mata suatu pekerjaan/jabatan tertentu ○ Ketidakselarasan antara kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh Dunia Usaha Dunia Industri dan Kerja (DUDIKA) ○ Kompetensi atau keahlian pencari kerja yang masih kurang ○ Keterbatasan informasi pasar kerja dan minimnya ketersediaan lapangan kerja di Kota Madiun b. Perusahaan di Wilayah Kota Madiun kurang taat dalam melaporkan informasi lowongan pekerjaan / kebutuhan tenaga kerja maupun informasi ketenagakerjaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	DINAS TENAGA KERJA a. Solusi masalah pengangguran: ○ Sosialisasi Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja fresh graduate ○ Fasilitasi Penguatan kerja sama antara Bursa Kerja Khusus (BKK) Sekolah/LPKS/Perguruan Tinggi dengan DUDIKA ○ Pelatihan berbasis kompetensi ○ Pengembangan Aplikasi Informasi Pasar Kerja online (Si Caker) yang dapat diakses oleh perusahaan secara nasional dan penyelenggaraan Job Fair b. Sosialisasi secara masif dan monitoring secara langsung ke masing-masing perusahaan.
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Masih ada korban kekerasan terhadap perempuan atau anak yang tidak melaporkan kasusnya	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan atau anak
9.	Pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN a. Kurangnya eduksai masyarakat mengenai pentingnya kemandirian pangan. b. Kurangnya edukasi masyarakat terkati B2SA dan gerakan stop boros pangan. c. Terdapat beberapa produk Pangan Segar Asat Tumbuhan (PSAT) yang mengandung residu pestisida	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN a. Perlunya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan edukasi terkait kemandirian pangan. Selain itu, memanfaatkan pertanian lokal dan praktik pertanian berkelanjutan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan Strategi Edukasi Masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
			b. Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjelaskan pentingnya pola makan beragam dan bergizi seimbang serta dampak dari pemborosan pangan terhadap lingkungan dan masyarakat. c. Meningkatkan frekuensi pengujian residu pestisida di pasar dan tempat distribusi.
10.	Pertanahan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN -	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN -
11.	Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP -	DINAS LINGKUNGAN HIDUP -
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL a. Sebagian besar data wajib KTP Elektronik yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik tidak berdomisili sesuai dengan alamat Kartu Keluarganya b. Kurangnya sosialisasi bahwa perekaman KTP Elektronik bisa dilakukan di seluruh layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil c. Kurangnya kerjasama Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) d. Masih ada data penduduk yang sudah memiliki akte kelahiran tetapi belum masuk hitungan memiliki akte kelahiran dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL a. Melaksanakan sosialisasi dengan jangkauan yang lebih luas baik sosialisasi langsung, atau melalui media sosial/ elektronik b. Memasukkan sosialisasi sebagai rencana kinerja individu c. Meningkatkan kerjasama pemanfaatan Kartu Identitas Anak d. Melaporkan kondisi tersebut kepada pengelola data pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
13.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA -	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA -
14.	Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN Sektor pelayanan parkir tepi jalan umum yang seharusnya dikelolah oleh penyedia akan tetapi telah dilakukan 3 kali lelang pengelolah selalu gagal.	DINAS PERHUBUNGAN Sektor pelayanan parkir tepi jalan umum yang seharusnya dikelolah oleh penyedia akan tetapi telah dilakukan 3 kali lelang pengelolah selalu gagal.
15.	Komunikasi dan Informatika	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang Terbatas	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA a. Mengusulkan anggaran khusus untuk peningkatan infrastruktur melalui APBD; b. Bekerja sama dengan penyedia layanan internet dalam memperluas jangkauan jaringan; c. Menyusun peta kebutuhan TIK untuk prioritas pengadaan perangkat.
16.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA MIKRO a. Para pelaku usaha kurang mempunyai pengetahuan yang cukup untuk menjalankan bisnis mereka sehingga mereka belum bekerja secara optimal untuk bisa naik kelas.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA MIKRO a. Pelatihan pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi untuk para pelaku usaha. b. Fasilitasi pendampingan penerbitan legalitas usaha

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
		b. Pelaku usaha mikro belum memiliki legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) c. Pelaku usaha mikro belum terampil dalam melakukan pemasaran online/offline produk d. Kurangnya wawasan serta keahlian pengurus, pengawas dan anggota koperasi dalam pengembangan usaha dan perkoperasian e. Regenerasi kepengurusan koperasi kurang berjalan dengan baik terutama terhadap minat generasi muda untuk menjadi bagian dari kepengurusan koperasi f. Tata kelola koperasi yang baik dan sesuai peraturan yang berlaku masih perlu ditingkatkan	c. Fasilitasi pendampingan / pelatihan pemasaran online/offline produk UMKM d. Mengembangkan pengetahuan dan motivasi kepada pengurus, pengawas dan anggota koperasi melalui berbagai macam pelatihan baik tentang perkoperasian maupun pengembangan usaha yang berbasis teknologi, praktikal dan berkelanjutan e. Rebranding koperasi melalui campaign atau tagline dalam membentuk citra koperasi yang lebih modern untuk menarik masyarakat luas terutama generasi muda agar berminat menjadi bagian dari koperasi sehingga diharapkan tercipta berbagai inovasi dalam pengembangan usaha koperasi melalui kepengurusan generasi muda f. Sosialisasi peraturan perkoperasian yang berlaku dan pengawasan secara berkala
17.	Penanaman modal	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU a. Perubahan dan kebijakan dan regulasi yang berubah cepat b. Mengadakan pendampingan, penyuluhan dan penguatan koordinasi dengan OPD Teknis c. Mall Pelayanan Publik masih dalam proses Pembangunan d. Penguatan koordinasi dengan OPD Teknis terkait, agar memudahkan Masyarakat dalam melakukan proses perizinan e. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Terintegrasi dengan OPD Teknis dikarenakan belum semua OPD Teknis mengirimkan SOP nya ke DPMPTSP untuk disandingkan/ diolah dalam pembuatan SOP terintegrasi. f. Pembinaan/Pendampingan yang lebih intensif terhadap para pelaku usaha/perusahaan tentang Sistem OSS RBA dan LKPM.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU a. Perubahan dan kebijakan dan regulasi yang berubah cepat b. Mengadakan pendampingan, penyuluhan dan penguatan koordinasi dengan OPD Teknis c. Mall Pelayanan Publik masih dalam proses Pembangunan d. Penguatan koordinasi dengan OPD Teknis terkait, agar memudahkan Masyarakat dalam melakukan proses perizinan e. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Terintegrasi dengan OPD Teknis dikarenakan belum semua OPD Teknis mengirimkan SOP nya ke DPMPTSP untuk disandingkan/ diolah dalam pembuatan SOP terintegrasi. f. Melaksanakan Pembinaan/ pendampingan terutama pelaku usaha yang belum pernah/baru melaporkan LKPM; Melaksanakan bimbingan teknis/klinik investasi.
18.	Kepemudaan dan Olah Raga	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA a. Belum maksimalnya pemeliharaan gedung olahraga dan wisma haji yang dikelola	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA a. Membuat prioritas pemeliharaan gedung olahraga dan wisma haji; Melaksanakan pemeliharaan gedung olahraga dan wisma haji sesuai anggaran yang ada
19.	Statistik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kurangnya Pemahaman dan Kapasitas PPID	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA a. Pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin bagi petugas PPID dan PPID Pembantu;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
			b. Peningkatan infrastruktur teknologi informasi, termasuk pengembangan dan pemeliharaan website PPID; c. Monitoring dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
20.	Persandian	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Keamanan Data yang Rentan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA a. Mengimplementasikan standar keamanan data seperti ISO 27001; b. Meningkatkan kapasitas firewall, sistem deteksi intrusi, dan enkripsi data; c. Memberikan pelatihan keamanan siber untuk ASN dan staf teknis.
21.	Kebudayaan	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Menjadikan cagar budaya sebagai salah satu aspek peningkatan perekonomian.	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Memberikan sosialisasi kepada pemilik cagar budaya perorangan ataupun yang dimiliki daerah untuk memaksimalkan pemanfaatannya dalam peningkatan perekonomian.
22.	Perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Ruang layanan perpustakaan pada Perpustakaan Umum Daerah belum cukup menampug kapasitas jumlah pengunjung perpustakaan.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Direncanakan pada tahun 2026 akan dilaksanakan perluasan gedung layanan perpustakaan melalui dana DAK yang saat ini dalam proses pengajuan Perpustakaan Nasional.
23.	Kearsipan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Depo Arsip di Lembaga Kearsipan belum sesuai standart kearsipan dan pada Organisasi Perangkat Daerah sebagian besar belum memiliki Record Center/tempat penyimpanan Arsip In Aktif.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN a. Pada Tahun 2025 sudah diupayakan untuk menempati Gedung Kesenian sebagai Depo Arsip dan direncanakan rehab setelah perubahan anggaran tahun 2025 sesuai standar kearsipan. b. Melaksanakan sosialisasi dan lomba kearsipan sebagai upaya memotivasi Organisasi Perangkat Daerah untuk memaksimalkan ruangan yang ada sebagai record cente
24.	Kelautan dan Perikanan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN a. Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan mengalami beberapa kerusakan sehingga produksi benih ikan kurang maksimal b. Masih terbatasnya SDM pelaku usaha perikanan tangkap yang mendapatkan penyuluhan/pelatihan c. Masih kurangnya edukasi untuk pengolah dan pemasar produk hasil perikanan d. Kurangnya pemeliharaan pasar ikan sebagai salah satu tempat promosi produk perikanan.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN a. Melakukan Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan, termasuk perbaikan kolam, sistem aerasi, dan fasilitas pendukung lainnya. b. Mengadakan Penyuluhan secara berkala dan berkelanjutan, untuk memastikan bahwa pelaku usaha perikanan selalu mendapatkan Informasi dan Edukasi yang diperlukan. c. Mengadakan program pelatihan yang terstruktur untuk pengolah dan pemasar produk perikanan, mencakup teknik pengolahan yang baik, manajemen kualitas, dan pemasaran produk. d. Mengalokasikan anggaran untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan pasar ikan serta Melibatkan komunitas lokal dan pelaku usaha dalam pengelolaan pasar ikan, sehingga mereka memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap pemeliharaan pasar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
25.	Pariwisata	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA a. Sumber daya buatan yang dibutuhkan oleh wisatawan karena tidak adanya sumber daya alam untuk peningkatan pariwisata b. Mengoptimalkan pelaporan kunjungan wisatawan dari pelaku wisata di Kota Madiun	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA a. Memaksimalkan Sumber daya buatan yang ada dengan meningkatkan promosi pariwisata melalui beberapa pelaksanaan event pada hari hari besar tertentu b. Melaksanakan monev ke pelaku usaha pariwisata secara periodik
26.	Pertanian	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Bidang Pertanian a. Banyaknya lahan tidur dikota madiun yang masih bisa dimanfaatkan. b. Terjadinya perubahan iklim yang tidak menentu sehingga menimbulkan kerugian bagi petani. c. Masih terbatasnya akses irigasi di beberapa wilayah. d. Kurangnya kapasitas SDM petani dalam meningkatkan produksi Bidang Peternakan a. Masih adanya produk asal hewan yang belum ASUH	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Bidang Pertanian a. Melakukan pengadaan benih dan bibit tanaman untuk dapat mendukung pemanfaatan lahan. b. Memberikan pelatihan tentang teknik pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, seperti penggunaan varietas tanaman yang tahan terhadap cuaca ekstrem. c. Melakukan Perbaikan, Pemeliharaan dan Pembangunan pada Jaringan Irigasi Usaha Tani (JIUT) yang sudah ada dan beberapa titik lokasi yang memerlukan pembangunan baru. d. Mengadakan program pelatihan yang terstruktur untuk petani mengenai teknik pertanian modern, manajemen usaha tani, dan praktik pertanian berkelanjutan. Bidang Peternakan a. Memperkuat pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan penjualan produk asal hewan melalui inspeksi rutin di tempat pemotongan hewan, pabrik pengolahan, dan pasar
27.	Perdagangan	DINAS PERDAGANGAN a. Sarana prasarana pasar rakyat masih perlu ditingkatkan b. Belum stabilnya harga bahan kebutuhan pokok dan penting	DINAS PERDAGANGAN a. Pemenuhan sarana prasarana pasar rakyat sesuai standard secara bertahap disesuaikan dengan anggaran yang tersedia b. Penambahan anggaran dan pelaksanaan kegiatan untuk Warung Tekan Inflasi (Wartek) yang diharapkan bisa mengendalikan harga kebutuhan bahan pokok
28.	Perindustrian	DINAS TENAGA KERJA a. Pelaku Industri kurang taat dalam memenuhi persyaratan wajib SIINas untuk pengajuan NIB-RBA b. Pelaku industri belum memenuhi legalitas usaha c. Kemasan produk IKM yang belum memenuhi standar dan desain kurang menarik d. Produk IKM belum terpetakan potensial pangsa pasarnya e. Pelaku Industri kurang terampil dalam menciptakan inovasi produk yang berdaya saing	DINAS TENAGA KERJA a. Sosialisasi secara masif dan pendampingan SIINas dalam pengisian data dan pelaporan semester b. Fasilitasi legalitas usaha dan klinik konsultasi c. Fasilitasi pembuatan desain dan cetak kemasan d. Fasilitasi Kurasi Produk e. Pelatihan diversifikasi produk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
30.	Unsur Staf	BAGIAN HUKUM a. Kurangnya sumber informasi dalam penyusunan dokumen penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) BAGIAN PEMERINTAHAN a. Data Batas Wilayah Kelurahan dan Kecamatan belum dimutakhirkan, karena belum ada pendetailan BAGIAN ORGANISASI a. Adanya regulasi baru yang mengatur nomenklatur jabatan pelaksana b. Adanya kebijakan baru berupa Perwal 76 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas yang mengakibatkan penyesuaian tata naskah dinas pada Perangkat Daerah dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun c. Masih adanya beberapa UPP yang belum konsisten mencatat data penerima layanan sehingga menyebabkan kurang tepatnya perhitunganjumlah responden survei d. Kemungkinan adanya rotasi pegawai yang menangani pelayanan publik pada masing-masing UPP e. Masih kurangnya pemahaman ASN tentang implemntasi Core Values ASN BerAKHLAK dan turunan nilainya sehingga penerapannya belum maksimal f. Keterlambatan pengisian data kinerja oleh perangkat daerah karena data kinerja belum rilis BAGIAN PENGADAAN BARANG/ JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Jumlah personil Fungsional PBJ yang belum memenuhi kriteria kebutuhan LKPP dan MCP KPK. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT a. Belum adanya Standarisasi kewenangan Fasilitasi kegiatan terkait Organisasi/Lembaga Keagamaan atau Lembaga Kemasyarakatan, sehingga banyak Penggunaan Anggaran tidak linear dari Dokumen Perencanaan sebelumnya BAGIAN UMUM a. Jangka waktu penyelesaian surat masuk adalah 1 (satu) hari, tetapi karena agenda pimpinan, penyelesaian surat masuk bisa lebih dari 1 (satu) hari	BAGIAN HUKUM a. Kurangnya sumber informasi dalam penyusunan dokumen penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) BAGIAN PEMERINTAHAN a. Melakukan proses pendetailan BAGIAN ORGANISASI a. Dilaksanakan desk penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana dan anjab abk pada masing-masing perangkat daerah b. Dilakukannya sosialisasi dan layanan konsultasi tata naskah dinas secara terus menerus c. Dilakukannya sosialisasi survei kepuasan masyarakat secara berkala d. Koordinasi dan memberikan layanan konsultasi pelayanan publik ke seluruh UPP e. Melakukan pendampingan dengan Kemenpan RB Menyelenggarakan forum komunikasi BerAKHLAK Meningkatkan sosialisasi implementasi Core Values ASN BerAKHLAK f. Monev data kinerja secara berkala Pendampingan penyusunan LKjIP Update informasi data kinerja dan pelaporan kinerja BAGIAN PENGADAAN BARANG/ JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Mengoptimalkan pegawai untuk ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan UKPBJ dan berkoordinasi dengan BKPSDM untuk pemenuhan kebutuhan pegawai BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT a. Menyusun Jenis Pelayanan baru pada Standar Pelayanan pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat. b. Melakukan sosialisasi Standar Pelayanan tersebut kepada Masyarakat baik secara langsung maupun melalui website atau media sosial BAGIAN UMUM a. Memberi tanda untuk surat masuk yang segera untuk mendapatkan disposisi b. OPD/instansi/masyrakat bisa melacak surat melalui nomor whatsapp c. Menggunakan aplikasi SIKD atau e-Surat dalam pelaksanaan tugas surat menyurat (bersifat sementara), jika SRIKANDI sudah stabil kembali ke aplikasi SRIKANDI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
		b. OPD/instansi/masyarakat memasukkan surat hari ini utuk keperluan besok hari c. Aplikasi SRIKANDI sering mengalami kendala server dari pusat	
31.	Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD	PELAYANAN LEGISLATIF/ SEKRETARIAT DPRD a. Terlambatnya dokumen atau data dari eksekutif untuk diproses sebelum dibahas di DPRD, misalnya pembahasan APBD b. Perubahan peraturan yang sangat dinamis seringkali menyulitkan pelaksana di lapangan c. Pencapaian target penyelesaian raperda terkendala waktu yang tidak dapat diprediksi d. Terlambatnya penyusunan Renja DPRD, karena seharusnya disusun lebih dahulu dibanding Renja Sekretariat DPRD e. Fungsi pengendalian dan pengamanan barang sulit dilakukan karena jumlah barang inventaris kantor yang beragam, banyak, serta area kantor yang luas	PELAYANAN LEGISLATIF/SEKRETARIAT DPRD a. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan semua pihak terkait b. Menyesuaikan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku; Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Pengampu aturan terkait. c. Melaksanakan koordinasi dgn Biro Hukum Prov Jatim agar hasil fasilitasi dapat segera diverifikasi, dibahas dan ditetapkan menjadi Perda. d. Mendorong penyusunan Renja DPRD Tahun n+1 pada bulan Januari tahun n, sehingga bisa menjadi acuan dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tagun n+1. e. Melaksanakan inventarisasi barang dan rekonsiliasi aset secara berkala.
32.	Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	INSPEKTORAT Bahwa titik berat pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat tidak hanya melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh OPD serta memperbaiki kesalahan kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang. Namun juga sebagai quality anssurance yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara effisien, effektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi.	INSPEKTORAT Bahwa titik berat pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat tidak hanya melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh OPD serta memperbaiki kesalahan kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang. Namun juga sebagai quality anssurance yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara effisien, effektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi.
33.	Perencanaan	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH a. Dalam proses persiapan evaluasi b. Proses manajerian penanganan perencanaan tematik (smart city, SPBE) belum optimal, karena volume pekerjaan yang semakin bertambah di Lingkungan Perangkat Daerah, sedangkan pegawai semakin berkurang	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH a. Menyiapkan data kinerja, BAPPPEDA bertugas dalam penyusunan pohon kinerja kota dan pohon kinerja Perangkat Daerah yang sinkron dengan Perjanjian Kinerja/SKP serta Draft Matriks Renstra b. Usulan penambahan kebutuhan pegawa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
34.	Keuangan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH a. Penyerapan anggaran kurang optimal. b. Penerapan E-BMD pada tahun 2024 terkait saldo awal mutasi selama tahun 2024 dan menjadi saldo akhir harus selesai pada akhir Bulan Desember agar LKPD tahun 2024 terselesaikan tepat waktu. BADAN PENDAPATAN DAERAH a. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang perpajakan b. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat selaku wajib pajak c. Belum optimalnya penggalian potensi terhadap pajak daerah	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH a. Koordinasi dengan OPD agar penguatan pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMD dapat berjalan optimal. b. Penerbitan SP2D sebelum akhir tahun anggaran 2024 dapat terselesaikan. Data yang dihasilkan dari aplikasi EBMD dipergunakan untuk menyusun kertas kerja aset tetap tahun 2024 yang di sajikan dalam neraca LKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH a. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang perpajakan b. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat selaku wajib pajak c. Belum optimalnya penggalian potensi terhadap pajak daerah
35.	Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA a. Data Kinerja masih belum tersusun dengan baik b. Penerapan SPBE belum secara Optimal c. Pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi (SIMPEG) belum optimal d. Kuantitas, Distribusi dan Penempatan ASN berdasarkan Peta Jabatan belum sesuai e. Politik balas budi, kedekatan f. Masih tingginya angka pelanggaran disiplin ASN g. Masih kurangnya penegakan disiplin ASN h. Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan semua jenjang jabatan i. Obyektifitas penilaian kinerja masih rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA a. Pengembangan aplikasi M-SKP b. Pelaksanaan SPBE sesuai perwal c. Aplikasi SIMPEG untuk mengampu semua layanan kepegawaian d. Pelaksanaan Penerimaan ASN e. Perlu komitmen pimpinan f. Perlu adanya pembinaan bagi ASN g. Adanya sanksi/tindakan secara tegas bilamana seorang Pegawai Negeri Sipil terbukti melakukan pelanggaran disiplin h. Penerapan sistem sesuai peta jabatan i. Melakukan pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi
36.	Pendidikan dan Pelatihan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA a. Masih banyak jenis diklat pengembangan kompetensi akibat munculnya jabatan Fungsional baru yang belum dilaksanakan b. Usulan diklat/ peningkatan kompetensi ASN banyak yang belum bisa diakomodir karena anggaran terbatas c. Partisipasi ASN untuk mengikuti diklat peningkatan kompetensi masih kurang	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA a. Dilaksanakan diklat fungsional secara bertahap b. Penambahan anggaran untuk kegiatan diklat c. Diadakan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi ASN ikut diklat kompetensi
37.	Penelitian dan Pengembangan	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH a. Keterbatasan petugas pelayanan yang sesuai kompetensi b. Penjaringan inovasi masih belum optimal	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH a. Optimalisasi kinerja ASN yang dimiliki dan usul tambahan petugas pelayanan b. Pengembangan aplikasi untuk mendukung pengelolaan inovasi dari ASN maupun masyarakat dalam penjaringan inovasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
37.	Kesatuan Bangsa & Politik	Badan Kesatuan Bangsa & Politik a. Tidak terlaksananya Kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental dikarenakan Adanya perubahan peraturan dari pusat yang mengatur tentang pelaksanaan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Daerah sehingga kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan. b. Menyesuaikan rencana kerja dan penganggaran agar linear dengan ketentuan dan peraturan dari pemerintah pusat, memperkuat koordinasi dengan tingkat provinsi dalam pelaksanaan kegiatan.	Badan Kesatuan Bangsa & Politik a. Tidak terlaksananya Kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental dikarenakan Adanya perubahan peraturan dari pusat yang mengatur tentang pelaksanaan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Daerah sehingga kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan. b. Menyesuaikan rencana kerja dan penganggaran agar linear dengan ketentuan dan peraturan dari pemerintah pusat, memperkuat koordinasi dengan tingkat provinsi dalam pelaksanaan kegiatan.
38.	Kecamatan	PENYELENGGARAAN KECAMATAN 1. Kecamatan Kartoharjo (NIHIL) 2. Kecamatan Manguharjo a. Kualitas dan kuantitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kurang optimal b. Menurunnya semangat kepedulian nilai-nilai kegotongroyongan sebagai akibat berkembangnya semangat materialistis dan individualistis di tingkat kelurahan c. Kurangnya koordinasi dalam penyusunan jadwal kegiatan dengan instansi terkait yang berpengaruh terhadap serapan anggaran d. Adanya aturan baru terkait kebutuhan belanja barang yang berpengaruh terhadap serapan anggaran 3. Kecamatan Taman a. Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik belum sepenuhnya respresentatif b. Belum optimalnya sumber daya manusia aparatur di Kecamatan dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya c. Belum tersedianya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan baik di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan	PENYELENGGARAAN KECAMATAN 1. Kecamatan Kartoharjo (NIHIL) 2. Kecamatan Manguharjo a. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang layanan serta mengadakan kegiatan pelatihan / bimtek pelayanan publik b. Meningkatkan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral bersama Tiga Pilar dengan mengundang Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Pencak silat, Masyarakat Kurang beruntung dan lain-lain c. Penetapan jadwal ulang pada saat perubahan anggaran d. Pengadaan barang disesuaikan spek yang telah diatur oleh pemerintah 3. Kecamatan Taman a. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik b. Meningkatkan kualitas dan pemahaman SDM dalam menjalankan tugas dan fungsinya c. Meningkatkan kualitas penyimpanan dan pengolahan data d. Meningkatkan kualitas SDM e. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tata kelola di wilayah Kecamatan Taman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
		d. Masih terdapatnya aparatur di Kelurahan yang belum siap dalam menghadapi era teknologi dan digitalisasi baik dalam menjalankan tugas dan fungsi maupun dalam pelayanan administrasi untuk masyarakat, dimana pada saat ini banyak menggunakan aplikasi e. Belum adanya pemetaan potensi wilayah kelurahan dan konektifitas antar kelurahan terkait pengembangan kawasan wisata	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

World Economic Outlook per April 2025 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global menurun dari 3,3% pada tahun 2024 menjadi 2,8% pada tahun 2025, dengan tingkat yang diperkirakan tetap stabil pada 3,0% di tahun 2026. Tren ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi global mulai stabil, meskipun dengan laju pertumbuhan yang lebih rendah daripada yang diharapkan. Namun, pada tahun 2025 proyeksi pertumbuhan ekonomi lebih rendah karena pemerintah di seluruh dunia sedang menyesuaikan prioritas kebijakan meningkatnya ketidakpastian global. Selain itu tarif bea masuk yang sangat tinggi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Inflasi global diperkirakan akan menurun, namun dengan laju yang lebih lambat. Risiko yang mengarah ke penurunan mendominasi proyeksi ekonomi, di tengah ketegangan perdagangan yang meningkat dan penyesuaian pasar keuangan. Perubahan kebijakan yang cepat atau menurunnya sentimen dapat memperburuk kondisi keuangan global. Jika perang dagang semakin diperburuk dan ketidakpastian kebijakan perdagangan meningkat, prospek pertumbuhan jangka pendek dan jangka panjang bisa semakin terhambat. Mengurangi kerjasama internasional bisa mengancam upaya untuk menciptakan ekonomi global yang lebih kuat.

Untuk mengantisipasi risiko ini, negara-negara perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang stabil dan dapat diprediksi serta mendorong kerjasama internasional, sambil mengatasi kesenjangan kebijakan dan ketidakseimbangan struktural di dalam negeri. Hal ini akan membantu menjaga stabilitas ekonomi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk mendorong pertumbuhan dan mengurangi tekanan fiskal, kebijakan yang meningkatkan partisipasi tenaga kerja di kalangan lansia dan perempuan dapat diterapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

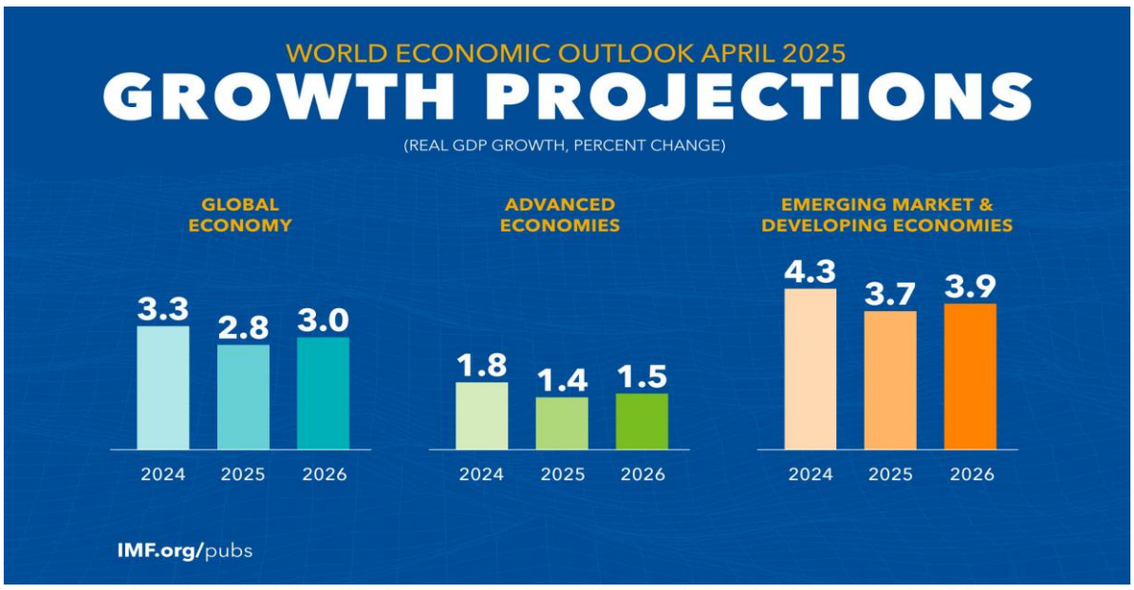

Gambar 3. 1 Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2024-2026
Sumber: IMF, 2025

Berdasarkan Gambar 3.1, pertumbuhan ekonomi negara maju diproyeksikan meningkat dari 1,8% di tahun 2024 menjadi 1,4% di tahun 2025. Namun di tahun 2026, pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju turun menjadi 1,5%. Sedangkan untuk negara berkembang dan pasar negara berkembang, pertumbuhan diproyeksikan stagnan secara moderat, dari 4,3% pada tahun 2024 dan turun menjadi 3,7% pada tahun 2025 yang kemudian meningkat pada tahun 2026 sebesar 3,9%.

Tabel 3. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2026

	IMF	WB	OECD
World Output	3,0	2,7	3,3
Advanced Economies	1,5	1,8	-
United States	1,7	2,0	2,1
Euro Area	1,2	1,2	1,5
Japan	0,6	0,9	0,6
Emerging Market and Developing Economies	3,9	4,0	-
China	4,0	4,0	4,4
Indonesia	4,7	5,1	5,1
Russia	0,9	1,1	0,9
Brazil	2,0	2,3	1,9
Saudi Arabia	3,7	5,4	3,8
South Africa	1,3	1,9	1,7

Sumber: WEO IMF Jan 2025, GEP WB Jan 2025, OECD *Economic Outlook* April 2025

Sebagaimana yang termuat pada Tabel 3.1 diatas, Ekonomi Indonesia masih diperkirakan dapat tumbuh tinggi di tahun 2026. Proyeksi ekonomi tahun 2026 cenderung naik untuk negara negara maju, demikian pula negara berkembang. Di tengah melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global, terdapat beberapa tren utama yang memberikan peluang bagi pasar negara berkembang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tren tersebut utamanya bersumber dari rekonfigurasi rantai pasok global, digitalisasi dan perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang pesat, serta dekarbonisasi ekonomi. Dalam jangka menengah, tren tersebut berpotensi mendongkrak produktivitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat di negara-negara berkembang. Di sisi lain, isu ageing population di negara maju juga dapat memberikan peluang bagi negara berkembang yang pada umumnya memiliki penduduk usia produktif yang besar. Namun demikian, optimalisasi peluang tersebut sangat tergantung pada kecepatan dan konsistensi implementasi reformasi struktural pada masing-masing negara

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 didukung oleh permintaan domestik yang kuat, investasi yang meningkat seiring dengan membaiknya kepercayaan bisnis, rendahnya inflasi, dan turunnya suku bunga. Lebih lanjut, proyeksi asumsi makro ekonomi untuk tahun 2025 hingga 2026 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 2 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Indonesia 2025-2026

Indikator	2025	2026
Pertumbuhan Ekonomi (*%, yoy*)	5,5 - 6,0	5,5 - 6,0
Inflasi *(%, yoy)*	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5
Tingkat Bunga SBN 10 Y (%)	6,3 - 7,5	6,3 – 7,3
Nilai Tukar (Rp/ US$)	14.900 - 15.300	14.900 – 15.400
Harga Minyak/ ICP (USD/barel)	70 - 90	70 – 90
Lifting Minyak Mentah (ribu barel/hari)	606 - 684	593 – 621
Lifting Gas (BOE/hari)	1061 - 1151	1.087 – 1.151

Sumber: Kemenkeu, 2025

Berdasarkan Tabel 3.2, proyeksi indikator makroekonomi untuk tahun 2025 dan 2026 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Inflasi diperkirakan tetap stabil dengan sedikit peningkatan dalam rentang 1,5–3,5% selama periode tersebut. Selain itu, nilai tukar rupiah diproyeksikan menguat, bergerak dalam kisaran Rp14.900 hingga Rp15.400 per USD pada tahun 2026. Sementara itu, harga minyak diprediksi tetap stabil pada level 70–90 USD per barel sepanjang tahun 2025 hingga 2026.

Proyeksi tahun 2025 dan 2026 mengindikasikan adanya perbaikan pada indikator makroekonomi secara keseluruhan. Perkembangan ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dalam mengoptimalkan kinerja perekonomian Indonesia agar berjalan lebih efektif. Untuk mendukung pemulihan tersebut, diperlukan kerja sama multilateral yang kuat dalam mengatasi dampak pandemi, termasuk memberikan bantuan bagi negara yang menghadapi kendala finansial serta menyalurkan dukungan ke negara dengan sistem kesehatan yang rentan. Selain itu, mitigasi ekonomi Indonesia juga dilakukan melalui berbagai stimulus, baik dari sisi fiskal maupun moneter. Oleh karena itu, kebijakan pada tahun 2026 fokus untuk mengatasi tantangan-tantangan perekonomian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 3. 2 Arah Kebijakan Ekonomi Indonesia 2026
Sumber: Bappenas RI, 2025

Mengacu pada Gambar 3.2, pada tingkat nasional, Rencana Kerja Pemerintah menitikberatkan pada inovasi dan hilirisasi berkelanjutan. Langkah ini diambil sebagai strategi awal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, dengan target mencapai 7,28 persen dalam periode 2025–2029. Melalui kebijakan transformatif tersebut, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 ditargetkan meningkat hingga 7,60 persen.

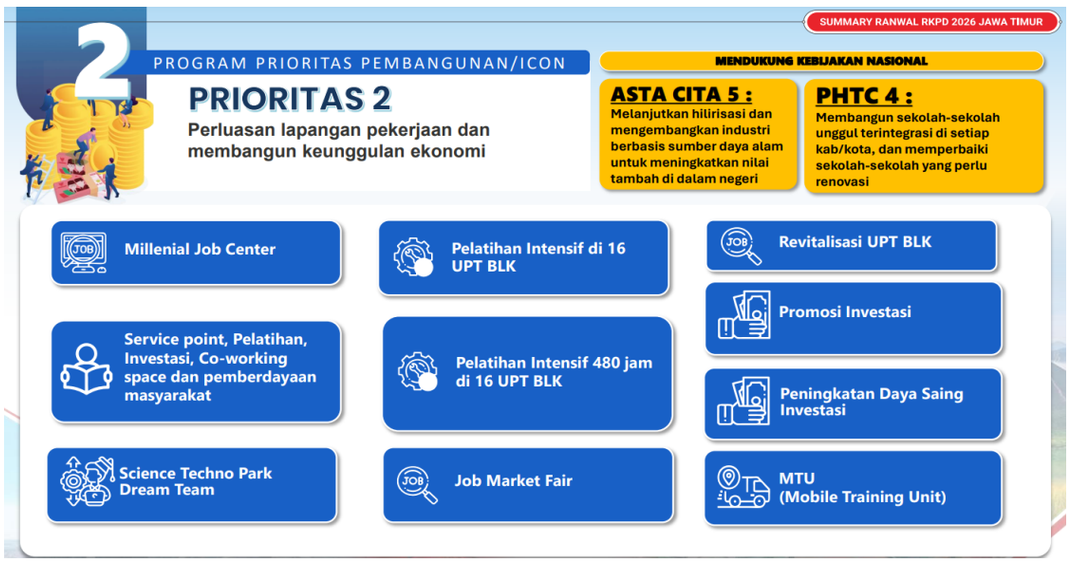

Gambar 3. 3 Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur 2026 (Prioritas 2)
Sumber: Bappeda Jawa Timur, 2025

Dalam rangka menjalankan Prioritas 2 pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, yaitu perluasan lapangan pekerjaan dan pembangunan keunggulan ekonomi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan sejumlah program unggulan yang secara strategis diarahkan untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan serta memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Program-program tersebut juga mendukung kebijakan nasional, khususnya Asta Cita 5, yang menekankan pentingnya hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dalam negeri, serta PHTC 4 yang menargetkan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan secara merata. Salah satu program unggulan yang dikembangkan adalah Millennial Job Center, sebagai wadah fasilitasi generasi muda dalam memperoleh pelatihan dan akses kerja yang relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, penguatan kapasitas tenaga kerja dilakukan melalui pelatihan intensif di 16 UPT BLK serta pelatihan khusus selama 480 jam yang tersebar di berbagai daerah.

Pemerintah juga membangun ekosistem ekonomi yang inovatif melalui pengembangan Service Point, penyediaan co-working space, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam bidang riset dan teknologi, program Science Techno Park Dream Team diharapkan mampu melahirkan inovator baru yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Untuk meningkatkan keterhubungan antara tenaga kerja dan dunia usaha, dilaksanakan kegiatan Job Market Fair, didukung dengan revitalisasi UPT BLK guna memastikan sarana pelatihan kerja selalu optimal. Upaya peningkatan investasi juga terus digenjot melalui promosi investasi, peningkatan daya saing investasi, dan penerapan MTU (Mobile Training Unit) yang menjangkau wilayah-wilayah terpencil.

Gambar 3. 4 Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur 2026 (Prioritas 6)
Sumber: Bappeda Jawa Timur, 2025

Dalam rangka mewujudkan pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan berbasis kerakyatan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui RKPD Tahun 2026 menetapkan Prioritas 6 sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Prioritas ini juga mendukung kebijakan nasional, khususnya Asta Cita 2 yang menekankan pentingnya sistem pertahanan pangan nasional, serta PHTC 3 yang mengarah pada pencetakan dan peningkatan produktivitas lahan pertanian sebagai lumbung pangan di berbagai level.

Salah satu program kunci adalah pengembangan pusat agropolitan, yang bertujuan menciptakan kawasan pertanian terpadu berbasis potensi lokal, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah secara berkelanjutan. Di sisi lain, penguatan sumber daya manusia (SDM) pertanian menjadi fokus untuk meningkatkan kapasitas petani agar mampu mengadopsi teknologi modern dan praktik pertanian cerdas. Guna mendukung ketahanan pangan daerah, berbagai inisiatif dilakukan melalui program ketahanan pangan yang dirancang untuk menjaga stabilitas pasokan dan distribusi bahan pokok. Program petik, olah, kemas, jual juga digalakkan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan memperluas akses pasar bagi petani. Dalam aspek keberlanjutan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong pengelolaan hutan lestari sebagai bagian dari konservasi lingkungan dan penyediaan sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Perlindungan terhadap petani juga diberikan melalui program asuransi petani, sebagai bentuk mitigasi risiko usaha tani terhadap perubahan iklim maupun bencana alam.

Gambar 3. 5 Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur 2026 (Prioritas 7)
Sumber: Bappeda Jawa Timur, 2025

Dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 menetapkan Prioritas 7, yaitu penguatan ekonomi berbasis UMKM, koperasi, dan BUM Desa, serta pemberdayaan pemerintahan desa. Prioritas ini selaras dengan Asta Cita 3 yang menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur ekonomi lokal dan peningkatan kualitas lapangan kerja melalui wirausaha dan industri kreatif. Kebijakan ini juga mendukung PHTC 5 dan PHTC 1 yang fokus pada pengentasan kemiskinan absolut dan peningkatan gizi masyarakat desa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Program ini dijalankan melalui serangkaian inisiatif strategis, antara lain peningkatan daya saing produk lokal untuk menciptakan nilai tambah dan membuka akses pasar yang lebih luas, serta program *One Pesantren One Product* (OPOP) yang memberdayakan lembaga pendidikan berbasis pesantren sebagai motor ekonomi berbasis komunitas. Selain itu, pemuda wirausaha menjadi sasaran utama dalam pembentukan generasi muda produktif dan inovatif melalui pelatihan kewirausahaan dan fasilitasi akses modal. Untuk memperkuat identitas produk lokal, dilakukan pula communal branding, serta promosi perdagangan yang terintegrasi guna memperluas jangkauan pasar domestik dan internasional. Pengembangan koperasi dan penguatan akses permodalan bagi pelaku KUKM juga menjadi bagian penting dari ekosistem pemberdayaan ekonomi rakyat. Di tingkat desa, pembangunan difokuskan melalui program pemberdayaan BUM Desa, Desa Berdaya, dan Desa Devisa sebagai upaya menciptakan kemandirian ekonomi desa dan memperkuat kapasitas tata kelola desa berbasis potensi lokal. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menciptakan transformasi ekonomi desa yang inklusif, resilien, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Lebih lanjut, arah kebijakan ekonomi Kota Madiun berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2025-2029 ditunjukkan dalam Misi 2 yaitu Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi inklusif berbasis kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Berikut merupakan kerangka logis Misi 2 RPJMD Kota Madiun Tahun 2025-2029.

Gambar 3. 6 Kerangka Logis Misi 2 dalam RPJMD Kota Madiun 2025-2029
Sumber: RPJMD Kota Madiun Tahun 2025-2029

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.6 diatas, arah kebijakan ekonomi Kota Madiun dapat dilihat dari misi kedua dalam RPJMD Kota Madiun 2025-2029 yaitu Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi inklusif berbasis kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Tujuan dari misi tersebut adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi inklusif, produktivitas sektor unggulan, stabilitas perekonomian daerah, dan perluasan lapangan kerja. sasaran pembangunan ekonomi tahun 2026 diarahkan pada:

1. Meningkatnya Daya Saing Daerah Khususnya Sektor Unggulan. Penguatan daya saing daerah difokuskan pada optimalisasi potensi sektor unggulan yang dimiliki, seperti pertanian, pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi digital. Pengembangan dilakukan melalui peningkatan kualitas produk, inovasi teknologi, serta perluasan akses pasar. Dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan kemitraan strategis juga menjadi bagian penting dalam mendorong sektor unggulan agar mampu bersaing di pasar regional, nasional, dan internasional.
2. Meningkatnya Stabilitas Perekonomian.
   Kondisi perekonomian yang stabil diperlukan untuk menciptakan iklim pembangunan yang berkelanjutan. Upaya dilakukan melalui pengendalian inflasi, peningkatan kinerja fiskal, serta penguatan sektor-sektor produktif daerah. Diversifikasi ekonomi menjadi strategi utama agar daerah tidak terlalu bergantung pada satu sektor tertentu, sehingga mampu menghadapi gejolak ekonomi global maupun domestik dengan lebih tangguh.
3. Meningkatnya Daya Saing Investasi.
   Daya tarik investasi diperkuat melalui perbaikan iklim usaha, kemudahan layanan perizinan, dan kepastian hukum bagi investor. Penyediaan infrastruktur penunjang kawasan industri, promosi potensi investasi daerah, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kepercayaan investor. Pendekatan ini bertujuan untuk menarik investasi produktif yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
4. Menurunnya Ketimpangan Pendapatan.
   Pemerataan hasil pembangunan diupayakan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta penguatan jaminan sosial. Pengurangan kesenjangan dilakukan dengan memberikan peluang ekonomi yang lebih besar kepada kelompok rentan dan wilayah tertinggal. Pendekatan inklusif ini diharapkan mampu mendorong terciptanya keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja.

   Produktivitas tenaga kerja ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar. Peningkatan kompetensi SDM, penguatan sistem pelatihan kerja berbasis industri, serta penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan produktif menjadi faktor kunci. Selain itu, dukungan terhadap kewirausahaan dan inovasi turut mendorong tenaga kerja agar lebih adaptif, kreatif, dan berdaya saing tinggi di era ekonomi digital.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019-2024

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan. Indikator ini mencerminkan peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah perekonomian dalam periode tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin cepat pula peningkatan output wilayah, yang pada akhirnya mendukung prospek perkembangan wilayah yang lebih baik. Di Kota Madiun, pengukuran pertumbuhan ekonomi dilakukan berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) tanpa sektor migas.

Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun dari tahun 2019 hingga 2024 mengalami tren yang fluktuatif**.** Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun sebesar 5,69% dan mengalami kontraksi yang tajam akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sehingga pertumbuhannya -5,34%. Setelah tahun 2020, pertumbuhan ekonomi menunjukan tren yang positif dari tahun 2021-2024.

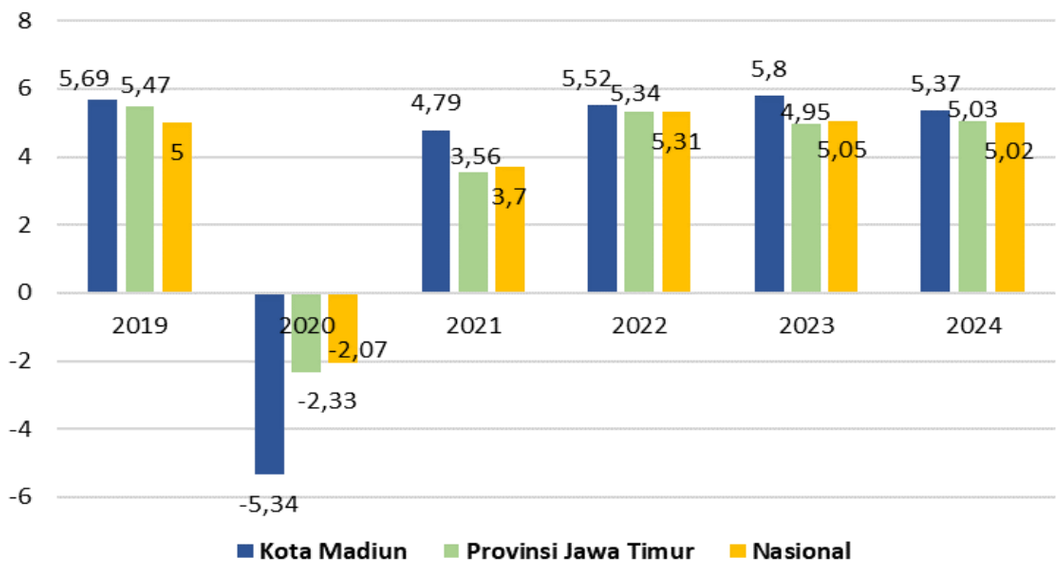

Gambar 3. 7 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sebagaimana yang termuat pada gambar di atas, sebelum terjadinya Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada tahun 2019 sebesar 5,69% jauh di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional yang hanya sebesar 5,47% dan 5%. Sebagai dampak pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami kontraksi yang dalam yaitu sebesar -5,34% dibandingkan Jawa Timur dan Nasional dengan nilai pertumbuhan masing-masing sebesar -2,33% dan -2,07%. Penurunan yang sangat drastis ini mengindikasikan bahwa kondisi fundamental makro ekonomi Kota Madiun masih rentan terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal. Pada tahun 2021 hingga tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami peningkatan yang sangat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,79% pada tahun 2021 menjadi 5,37% pada tahun 2024.

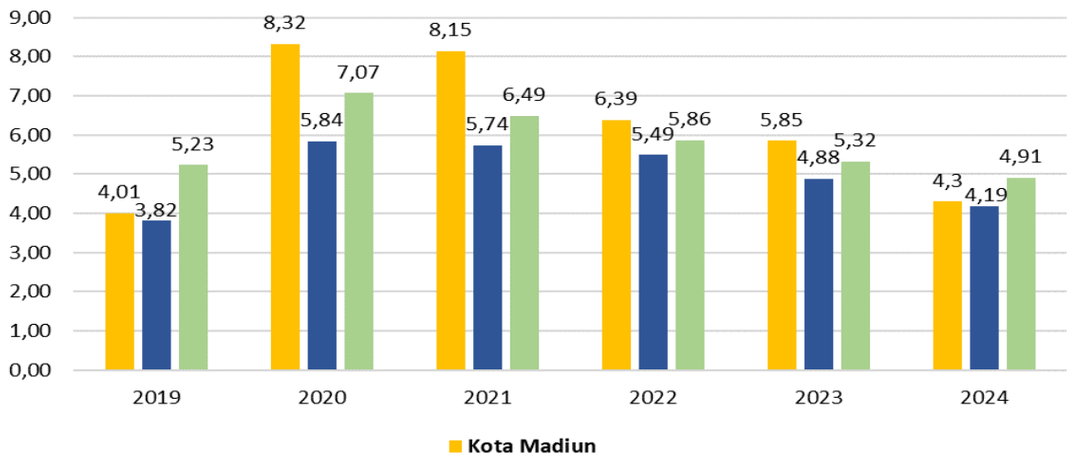

Gambar 3. 8 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kota Madiun, 2025

Pada tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Madiun sebesar 4,01% dan meningkat signifikan pada tahun 2020 menjadi 8,32%. Sedangkan pada tahun 2021 TPT mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni menjadi 8,15%. Meskipun terjadi penurunan, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata TPT di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun nasional, yang menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kota Madiun masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Pada tahun 2022, tren penurunan TPT berlanjut dengan penurunan sebesar 1,76 poin, dari 8,15% pada tahun 2021 menjadi 6,39% pada tahun 2022.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lebih lanjut, pada tahun 2023 hingga 2024, nilai TPT terus menunjukkan tren penurunan yang lebih signifikan. Pada tahun 2024, TPT tercatat sebesar 4,3%. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam sektor ketenagakerjaan, yang dapat dikaitkan dengan berbagai upaya pemulihan ekonomi pascapandemi, peningkatan investasi, serta kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja.

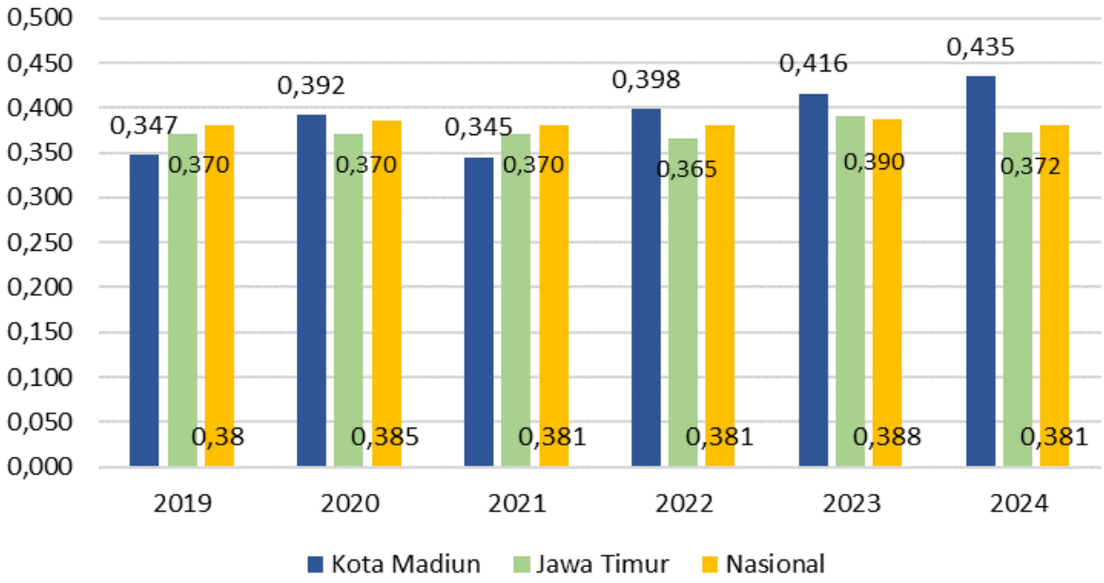

Gambar 3. 9 Gini Rasio Kota Madiun, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kota Madiun

Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari aspek pemerataan pembangunan, salah satunya yang tercermin melalui Gini Ratio. Pada tahun 2019, Gini Ratio Kota Madiun tercatat lebih rendah dibandingkan Jawa Timur (0,370) dan nasional (0,38). Namun, pandemi Covid-19 yang terjadi menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan di Kota Madiun, dengan Gini Ratio naik menjadi 0,392 pada tahun 2020. Meskipun demikian, pada tahun 2021 ketimpangan pendapatan mengalami sedikit penurunan menjadi 0,345, yang menunjukkan kondisi pemerataan pendapatan di Kota Madiun lebih baik dibandingkan tingkat provinsi dan nasional. Namun pada tahun 2022 hingga 2024, tren ketimpangan kembali meningkat dengan Gini Ratio mencapai 0,435 di tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Timur dan nasional. Peningkatan ketimpangan ini disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pertumbuhan upah antar kelompok pendapatan, yang memperlebar kesenjangan ekonomi di Kota Madiun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Madiun Tahun 2025 hingga Tahun 2027

Pada tahun 2020 dan 2021, tantangan utama perekonomian Kota Madiun adalah penanganan pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun selanjutnya, tantangan terbesar adalah pemulihan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebagai dampak dari pandemi tersebut serta proyeksi resesi global tahun 2023. Hasil proyeksi dengan berbagai skenario yang digunakan, prospek perekonomian Kota Madiun menunjukkan kondisi ekonomi yang mengalami perbaikan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.

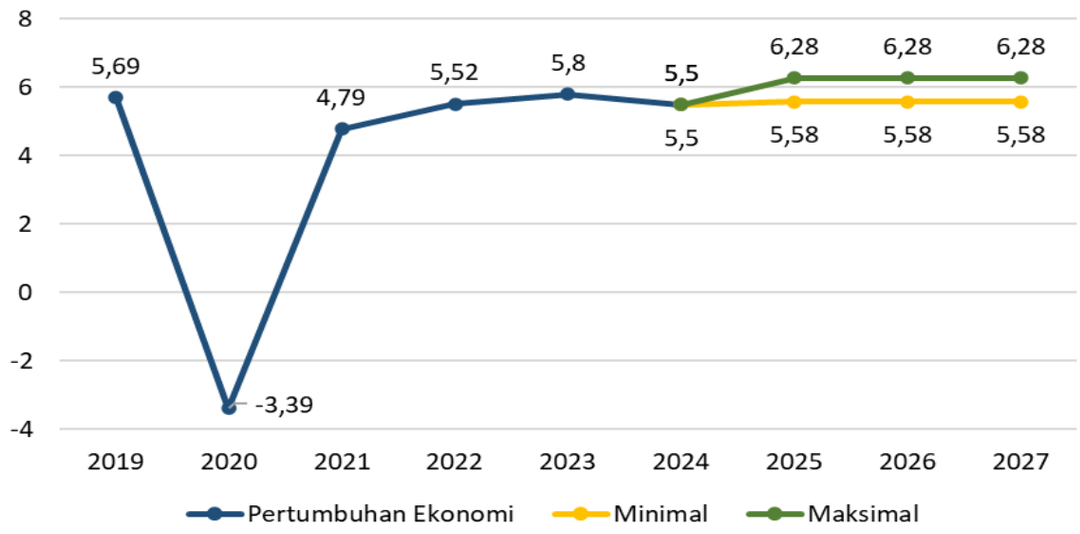

Gambar 3. 10 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2025-2027

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.10 diatas, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun cenderung mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi sedikit mengalami pertumbuhan sebesar 5,69%. Sedangkan pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebagai akibat adanya pandemi Covid-19 sehingga -3,39%. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,79% dan semakin meningkat hingga 5,80% tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,5%. Sedangkan pada tahun 2025 hingga 2027, dengan asumsi stabilitas ekonomi nasional dan regional terjaga, maka pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat hingga 5,58-6,28%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

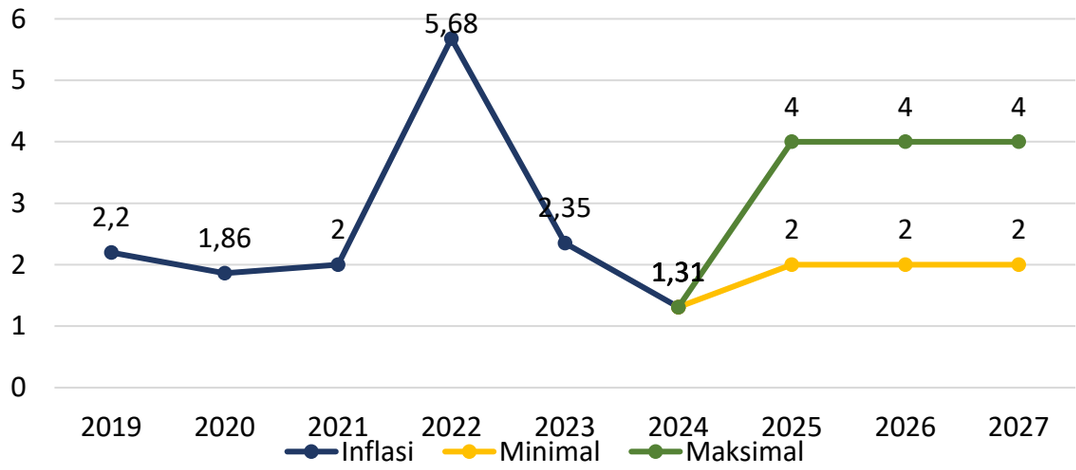

Gambar 3. 11 Proyeksi Inflasi Kota Madiun Tahun 2025-2027

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.11 diatas, Inflasi Kota Madiun cenderung mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019, inflasi sebesar 2,2% dan mengalami penurunan hingga 1,86% pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Tahun 2022 inflasi meningkat tajam hingga 5,68%. Capaian ini secara berangsur-angsur menurun pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 2,35% dan 1,31%. Sementara itu, pada tahun 2025 hingga 2027, nilai inflasi diproyeksikan tumbuhan 3±1.

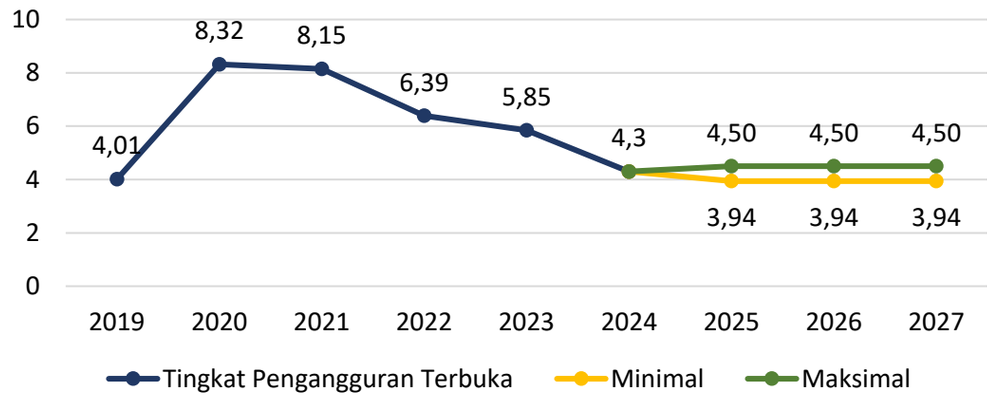

Gambar 3. 12 Proyeksi TPT Kota Madiun Tahun 2025-2027

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.12 diatas, seiring dengan penurunan pertumbuhan ekonomi tahun tahun 2020, TPT mengalami peningkatan. Angka TPT Kota Madiun per tahun 2019 mencapai angka 4,01% yang kemudian meningkat dua kali lipat pada tahun 2020 hingga mencapai 8,32% sebagai imbas dari pandemi. Sejalan dengan pemulihan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2021, TPT masih tinggi meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi 8,15%. Seiring dengan hal tersebut, per tahun 2024, TPT kota Madiun mengalami penurunan hingga mencapai 4,30%. Dengan tren pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, TPT diproyeksikan akan mengalami penurunan dari capaian tahun 2024 sebesar 4,50%-3,94% pada tahun 2025 hingga 2027.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

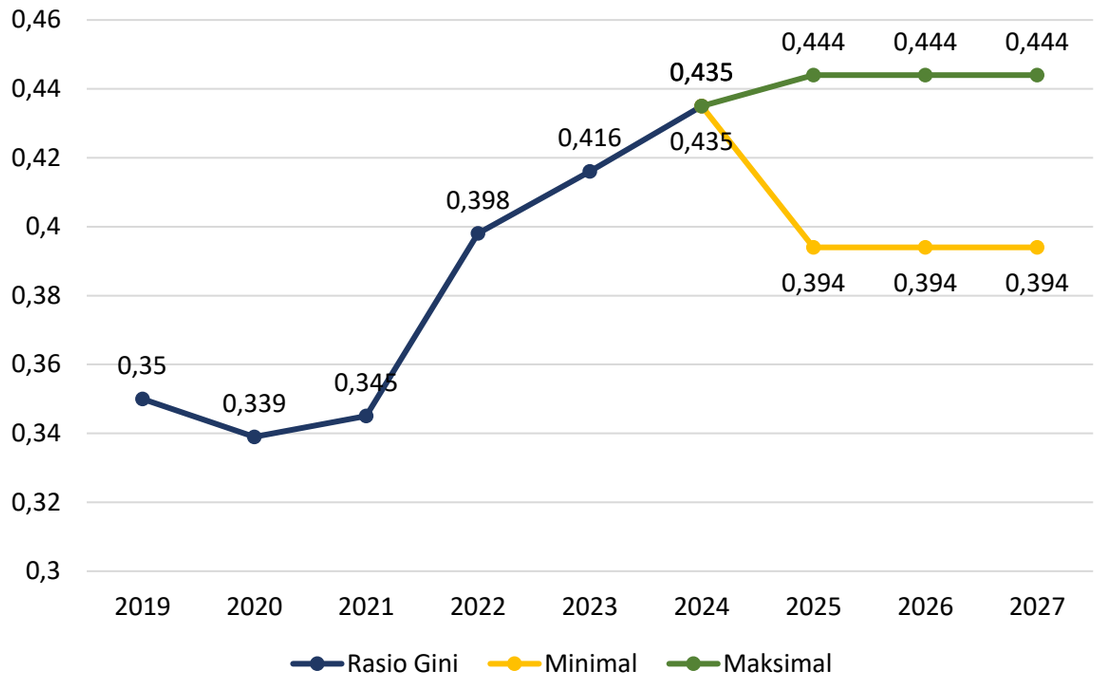

Gambar 3. 13 Proyeksi Ketimpangan Pendapatan Kota Madiun Tahun 2025-2027

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.13 di atas, Pelemahan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya TPT sebagai dampak Covid-19, ketimpangan pendapatan tahun 2020 juga mengalami peningkatan hingga 0,392. Kemudian di tahun 2021, ketimpangan pendapatan mengalami penurunan hingga 0,345 namun kembali naik menjadi 0,398 pada tahun 2022. Pada tahun 2024, ketimpangan pendapatan mencapai 0,435. Sedangkan pada tahun 2025, Indeks Gini diproyeksikan menjadi 0,426. Sedangkan tahun 2026 dan 2027 diperkirakan mencapai 0,444 dan 0,394.

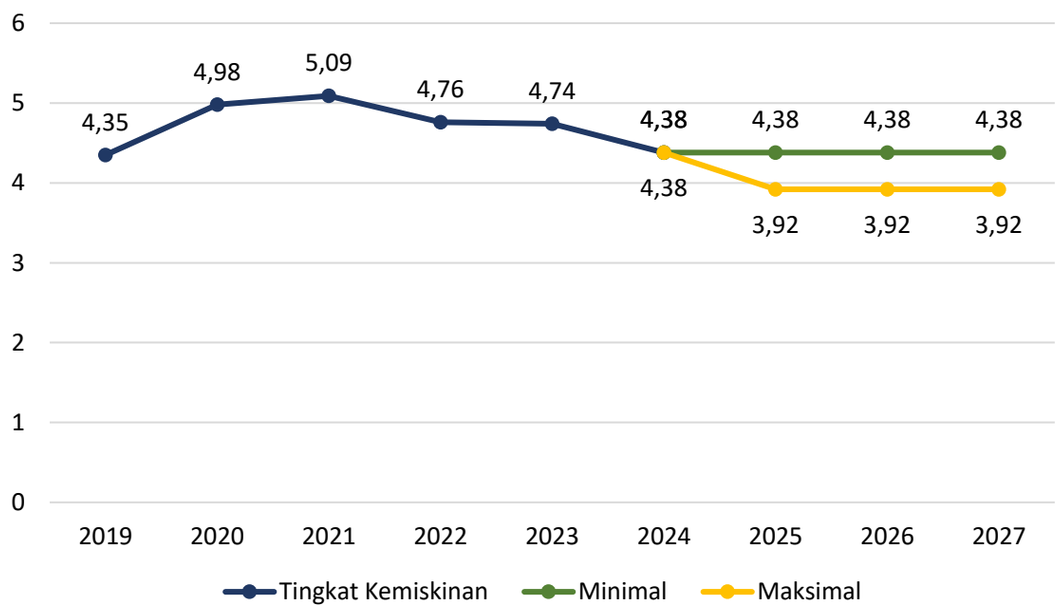

Gambar 3. 14 Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2025-2027

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.14 diatas, Tingkat kemiskinan di Kota Madiun sejak tahun 2019-2026 terus mengalami penurunan. Pada periode tersebut, tingkat kemiskinan mengalami penurunan yang relatif cepat. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan mengalami peningkatan sebagai dampak pandemic Covid-19 yaitu sebesar 4,98%. Pada tahun 2021, dengan masih terjadinya eskalasi pandemic, tingkat kemiskinan sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,09%. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, pada tahun 2023, kemiskinan mengalami penurunan hingga 4,74%. Sedangkan pada tahun 2022 angka kemiskinan turun menjadi 4,38%. Dengan asumsi, perekonomian kota Madiun terus mengalami peningkatan yang didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali maka tingkat kemiskinan pada tahun 2025 akan mencapai 4,30-4,38% serta pada tahun 2026 mencapai 4,07-4,3%. Sedangkan pada tahun 2027, tingkat kemiskinan diperkirakan mencapai 4,38%-3,92%.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2026

Arah kebijakan ekonomi Kota Madiun tahun 2026 mengikuti kebijakan umum dari RPJMD Kota Madiun Tahun 2025-2029. Kebijakan ekonomi tahun 2026 diarahkan pada kualitas infrastruktur, pemberdayaan UMKM, hingga peningkatan kualitas investasi. Adapun masing-masing arah kebijakan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. mengembangkan daya saing sektor akomodasi, makanan, dan minuman melalui penguatan kapasitas usaha, kualitas layanan, dan promosi berbasis potensi lokal;
2. mengembangkan ekosistem UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, dan digital;
3. meningkatkan produktivitas usaha kecil dan menengah non-pertanian;
4. meningkatkan ekosistem digital dan teknologi informasi yang inklusif dan berkelanjutan;
5. meningkatkan nilai tambah sektor unggulan;
6. meningkatkan kompetensi tenaga kerja di sektor ekonomi daerah;
7. meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja dalam sektor berkeahlian menengah tinggi;
8. meningkatkan Efisiensi Penggunaan Modal dan Produktivitas Ekonomi;
9. meningkatkan Iklim Investasi;
10. meningkatkan Kapasitas Pendukung Daya Saing Daerah;
11. meningkatkan peluang kerja baik di dalam daerah maupun luar daerah;
12. menyediakan pelatihan - pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja;
13. mengembangkan Kemandirian ekonomi rumah tangga; dan
14. meningkatkan kemampuan masyarakat sektor menengah dan bawah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Madiun mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja, dan mobilisasi pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kota Madiun dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan berisi proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan yang dimaksud terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan transfer bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Selanjutnya pendapatan yang sah terdiri dari Hibah, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemda Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya.

Proyeksi keuangan daerah didasarkan pada data masa lalu, baik pertumbuhan, nilai nominal, kebutuhan masyarakat, potensi penerimaan dan beberapa kondisi yang mempengaruhi. Proyeksi pendapatan daerah didasarkan pada potensi pendapatan daerah, baik PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya, proyeksi belanja daerah memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah serta kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi dari hasil musrenbang, yang dilakukan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan Kota. Proyeksi keuangan daerah Kota Madiun Tahun 2025 memperhatikan beberapa asumsi sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Asumsi Makro RKPD Kota Madiun 2026

No	Indikator Makro	Satuan	Target RKP 2026	Target RKPD Provinsi Jawa Timur 2026	Target RKPD Kota Madiun 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,8-6,3	4,80–5,40	5,58-6,28
2	Inflasi	%		1,5-3,5	3±1
3	Tingkat kemiskinan	%	6,5-7,5	8,81-9,10	4,38-3,92
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,44-4,96	3,84-4,48	4,50-3,94
5	Indek Pembangunan Manusia	-		75,80-76,40	84,60-85,96
6	Indeks Gini	-	0,377-0,380	0,370-0,380	0,444-0,394

Sumber: RKP, RKPD Provinsi dan RKPD Kota Madiun Tahun 2026, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sebagaimana yang termuat pada tabel 3.3 diatas, asumsi didasarkan pada rentang skenario pesimis ke optimis seperti yang sudah dijelaskan dalam sub bab 3.1.2. Selain asumsi makro diatas, beberapa asumsi lainnya adalah tingkat inflasi kisaran 1,6%-3,8%; Pendapatan Transfer diproyeksikan naik sebesar 2,41%; dan target anggaran tahun 2025 diproyeksikan memiliki SiLPA Rp 0.

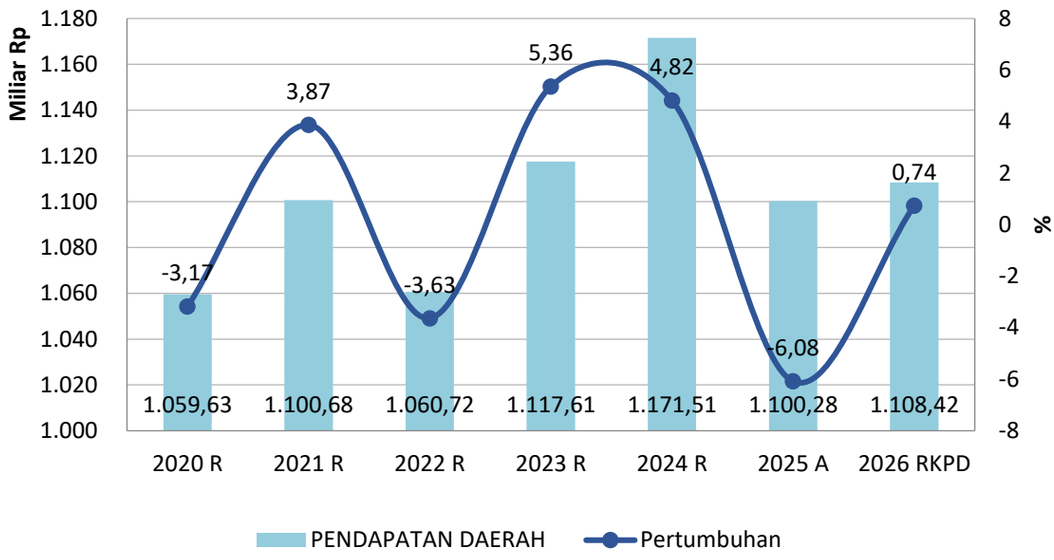

Gambar 3. 15 Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2021-2026
Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2025

Sebagaimana yang termuat pada gambar 3.15 diatas, pertumbuhan pendapatan daerah Kota Madiun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 menunjukan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2021, pertumbuhan pendapatan daerah berada pada kisaran 3,87 persen. Pertumbuhan itu turun pada tahun 2022 hingga -3,63 persen. Pertumbuhan tersebut berlanjut hingga tahun 2023 sebesar 4,99 persen dan tahun 2024 mencapai 4,82 persen. Pada anggaran tahun 2025, pendapatan daerah turun menjadi -6,08 persen. Terakhir, pada tahun 2026 pertumbuhan pendapatan daerah Kota Madiun mencapai 0,74 persen.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

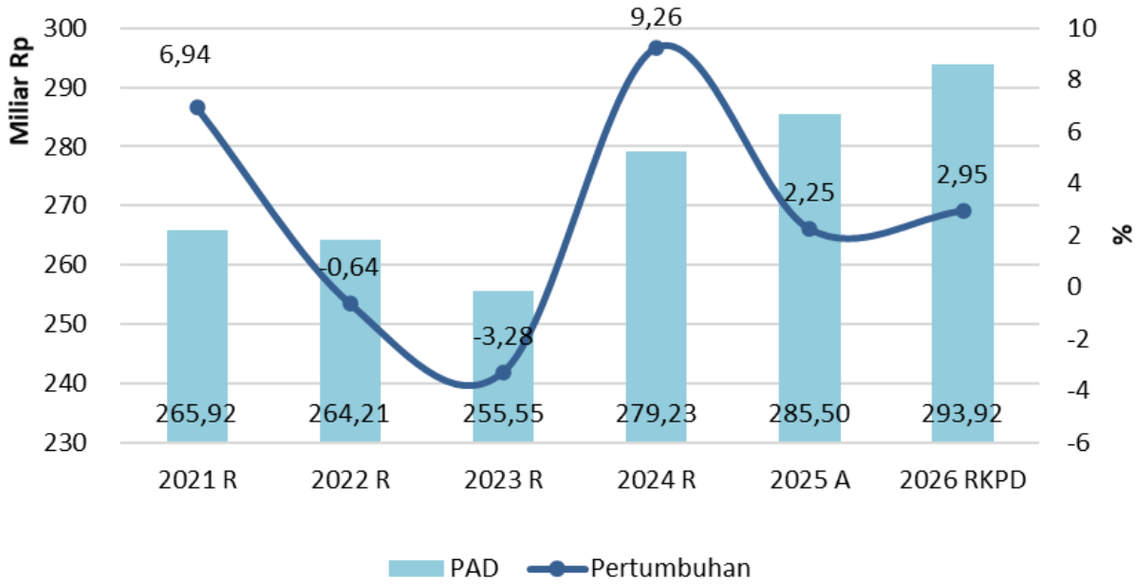

Gambar 3. 16 Perkembangan PAD Kota Madiun Tahun 2021-2026
Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2025

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif dengan nominal tertinggi ke dua setelah tahun 2024. Pada tahun 2021, pertumbuhan PAD di Kota Madiun berada pada angka 6,94 persen. Kondisi itu menurun hingga tahun 2022, yaitu sebesar -0,64 persen di tahun 2022 dan -3,28 persen pada tahun 2023. Lebih lanjut, pada tahun 2024 PAD Kota Madiun menunjukkan pertumbuhan yang signifikan hingga 9,26 persen. Namun, pertumbuhan ini berangsur-angsur turun pada anggaran tahun 2025 sebesar 2,25 persen dan proyeksi tahun 2026 sebesar 2,95 persen, naik atau turunnya PAD di Kota madiun dikarenakan beberapa factor, salah satu factor penghambat kenaikan PAD diantaranya adalah kepatuhan wajib pajak yang rendah dan potensi pajak yang belun optimal dan salah satu factor pendorongnya adalah optimalisasi kekayaan daerah termasuk penyertaan modal pada BUMD dan investasi serta pembangunan wilayah yang mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan PAD. Selanjutnya, perkembangan pendapatan transfer dapat dilihat dalam gambar berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

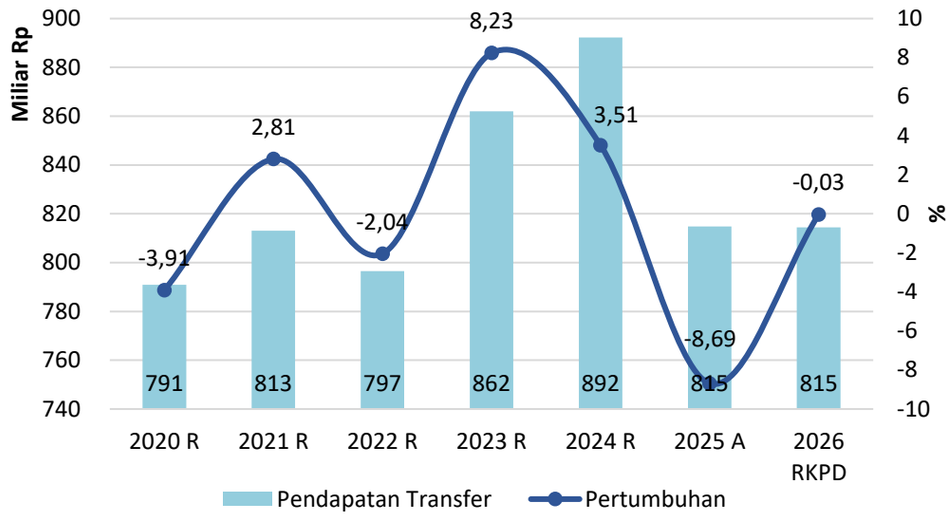

Gambar 3. 17 Perkembangan Pendapatan Transfer Kota Madiun Tahun 2021-2026
Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2025

Secara nominal, realisasi dan pertumbuhan pendapatan transfer dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 menunjukan nilai yang fluktuatif. Pada tahun 2021 berada pada angka 2,81 persen lalu turun hingga -1,58 persen pada tahun 2022. Lebih lanjut, pertumbuhan pendapatan transfer meningkat secara signifikan pada tahun 2023 sebesar 7,71 persen. Pertumbuhan ini menjadi pertumbuhan paling tinggi dari tahun 2021 hingga 2026. Namun, angka ini secara konstan turun hingga tahun 2025, yaitu sebesar 3,51 persen pada tahun 2024 dan -8,69 persen pada tahun anggaran 2025. Terakhir, pada tahun 2026 pendapatan transfer diproyeksikan mencapai -0,03 persen. Selanjutnya, perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut:

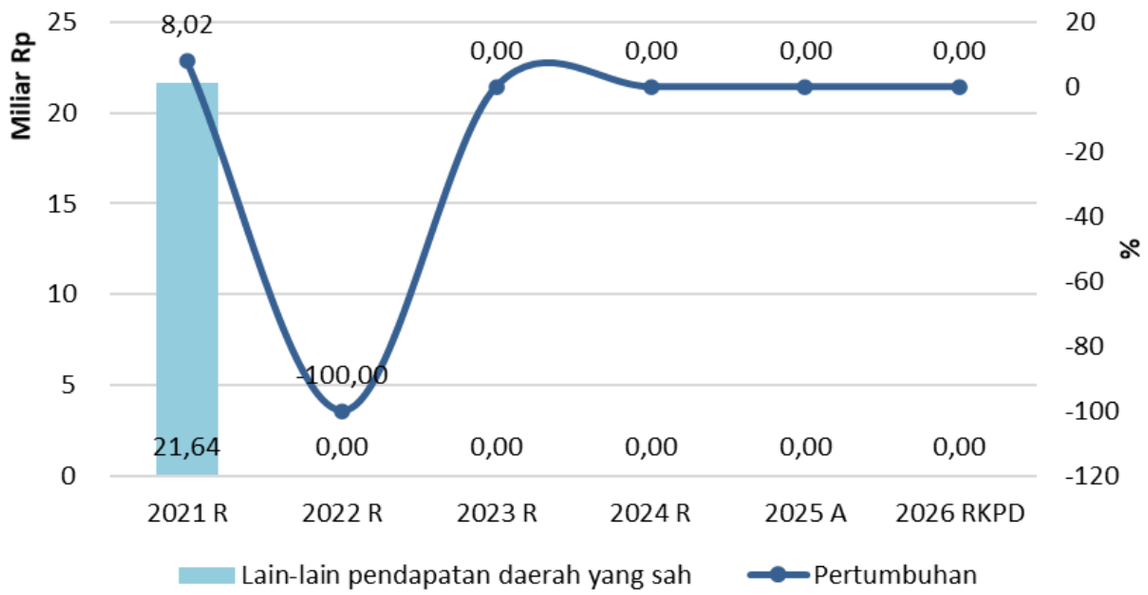

Gambar 3. 18 Perkembangan Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Madiun Tahun 2021-2026
Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pertumbuhan komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Madiun pada tahun 2021 berada pada angka Rp21,64 milyar dengan pertumbuhan sebesar 8,02 persen. Sedangkan pada realisasi 2022 hingga 2024, APBD 2025 serta RKPD 2026, nilai pendapatan ini diproyeksikan nol atau tidak terdapat pendapatan daerah dari komponen ini khususnya dari sub komponen hibah. Berdasarkan proyeksi masing-masing komponen pendapatan daerah, maka perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dapat dilihat dalam gambar berikut:

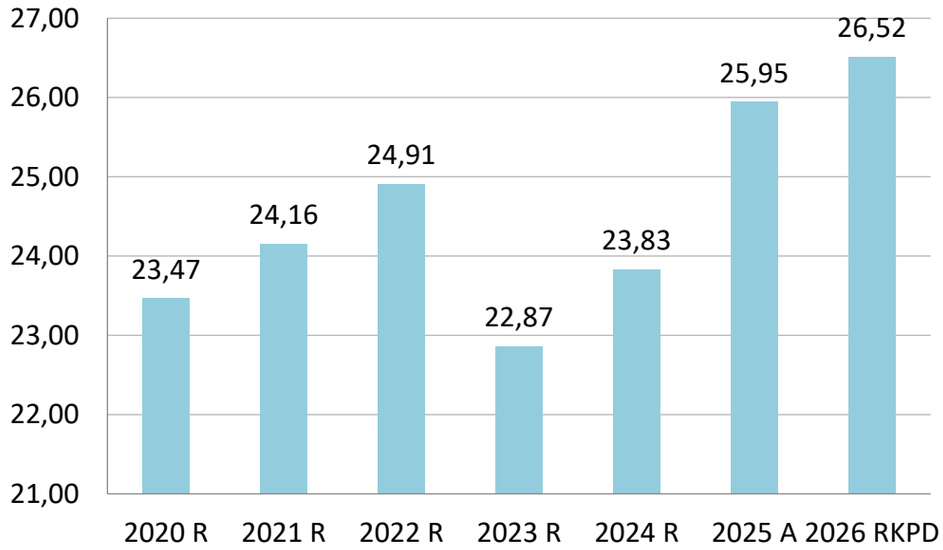

Gambar 3. 19 Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (dalam%) Kota Madiun Tahun 2021-2026
Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2025

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.19 diatas, Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Madiun sampai dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 24,91 dibandingkan tahun 2021 (24,16). Namun pada realisasi tahun 2023, derajat desentralisasi fiskal menurun hingga 22,87. Kondisi ini berubah dan terjadi peningkatan pada tahun 2024 sebesar 23,84 serta 25,95 pada tahun 2025. Pada 2026, derajat desentralisasi fiskal diproyeksikan meningkat menjadi 26,52.

Realisasi Pendapatan Kota Madiun Tahun dari 2021 sampai dengan 2024, APBD 2025 dan proyeksi tahun 2026, dapat dilihat pada tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 3. 4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Madiun Tahun 2021 s.d Tahun 2026

	Uraian	REALISASI				PROYEKSI/TARGET	
		2021 R	2022 R	2023 R	2024 R	2025 A	2026 RKPD
5.1	PENDAPATAN DAERAH	1.100.682.829.130,86	1.060.716.312.084,55	1.117.612.130.232,42	1.171.513.055.718,60	1.100.275.072.209,00	1.108.421.594.028,60
5.1.1.	Pendapatan Asli Daerah	265.920.295.216,86	264.212.229.517,55	255.554.493.407,62	279.229.358.932,97	285.500.261.209,00	293.915.701.028,60
5.1.1.1.	Pajak daerah	87.874.777.059,32	106.165.312.122,76	113.514.116.369,67	121.651.792.796,00	138.994.500.000,00	142.546.702.125,00
5.1.1.2.	Retribusi daerah	17.463.721.195,00	21.385.348.837,00	22.551.072.553,00	138.902.841.650,97	130.529.977.940,00	134.619.894.565,00
5.1.1.3.	Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	16.199.882.796,95	15.595.752.355,97	14.983.008.032,73	13.456.071.814,53	14.433.092.969	15.447.565.426,60
5.1.1.4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	144.381.914.165,59	121.065.816.201,82	104.506.296.452,22	5.218.652.671,47	1.542.690.300	1.301.538.912,00
5.1.2.	Pendapatan Transfer	813.126.832.914	796.504.082.567	862.057.636.825	892.283.696.786	814.774.811.000	814.505.893.000
5.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	709.162.104.477	697.480.693.487	666.070.630.013	774.640.399.686	747.915.741.000	747.915.741.000
5.1.2.1.1	Dana bagi hasil pajak	33.962.127.578	29.804.646.600	24.092.136.000	24.113.939.741	34.095.384.000	34.095.384.000
5.1.2.1.2	Dana bagi hasil bukan pajak	63.851.956.219	82.308.678.000	36.475.210.342	27.094.012.200	30.008.850.000	30.008.850.000
5.1.2.1.3	Dana Bagi hasil cukai	19.833.010.286	21.802.781.361	35.959.029.435	47.621.459.000	32.236.305.000	32.236.305.000
5.1.2.1.4	Dana Alokasi Umum	465.495.171.000	463.486.748.121	487.141.770.396	509.310.785.281	530.628.223.000	530.628.223.000
5.1.2.1.5	Dana Alokasi khusus	72.994.976.394	71.207.048.405	82.402.483.840	117.131.678.464	91.636.058.000	91.636.058.000
5.1.2.1.6	Dana Insentif Daerah	53.024.863.000	28.870.791.000			29.310.921.000	29.310.921.000
5.1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0
5.1.2.2.2	Dana Penyesuaian	0	0	0	49.368.525.000	0	0
5.1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	103.964.728.437	99.023.389.080	195.987.006.812	117.643.297.100	66.859.070.000	66.590.152.000
5.1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil	103.062.649.437	98.284.006.080	121.272.084.812	116.973.247.100	66.189.020.000	65.920.102.000
5.1.2.3.2	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	902.079.000	739.383.000	74.714.922.000	670.050.000	670.050.000	670.050.000
5.1.3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	21.635.701.000	0	0	0	0	0
5.1.3.1.	Hibah	21.635.701.000	0	0	0	0	0
	Dana darurat	0	0	0	0	0	0
	Pendapatan Lainnya	0	0	0	0	0	0

Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

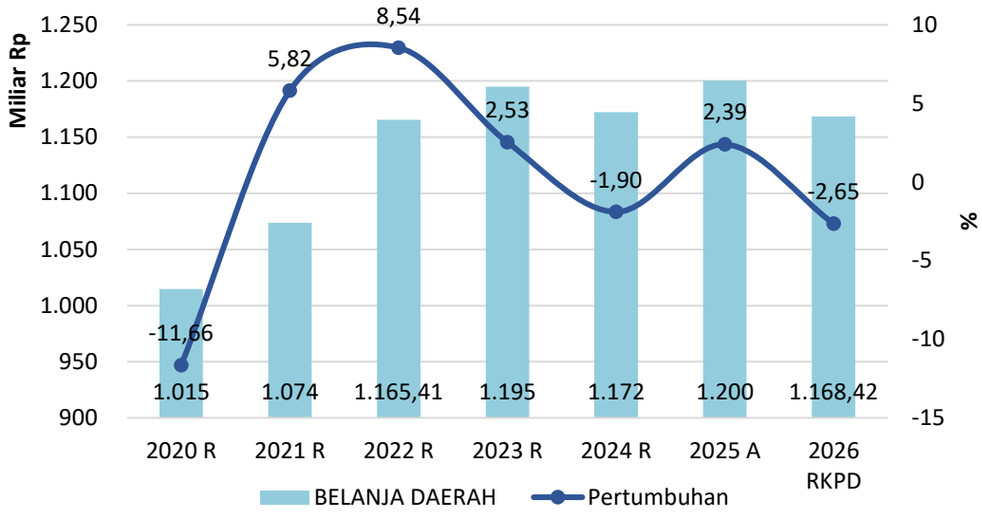

Gambar 3. 20 Perkembangan Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2021-2026
Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2025

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.20 diatas, pertumbuhan belanja daerah sejak tahun 2021 menunjukan tren fluktuatif. Pada tahun 2021, pertumbuhan belanja daerah masih pada kisaran 5,82 persen dan meningkat menjadi 8,54 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023, pertumbuhannya turun menjadi 2,53 persen dan turun kembali menjadi -1,90 persen pada realisasi tahun 2024. Pada anggaran tahun 2025, belanja negara meningkat menjadi 2,39 persen. Belanja daerah diperkirakan turun kembali pada proyeksi tahun 2026 sebesar -2,65 persen. Dengan demikian, beberapa pos belanja, baik belanja operasi, modal, dan belanja tidak terduga akan mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

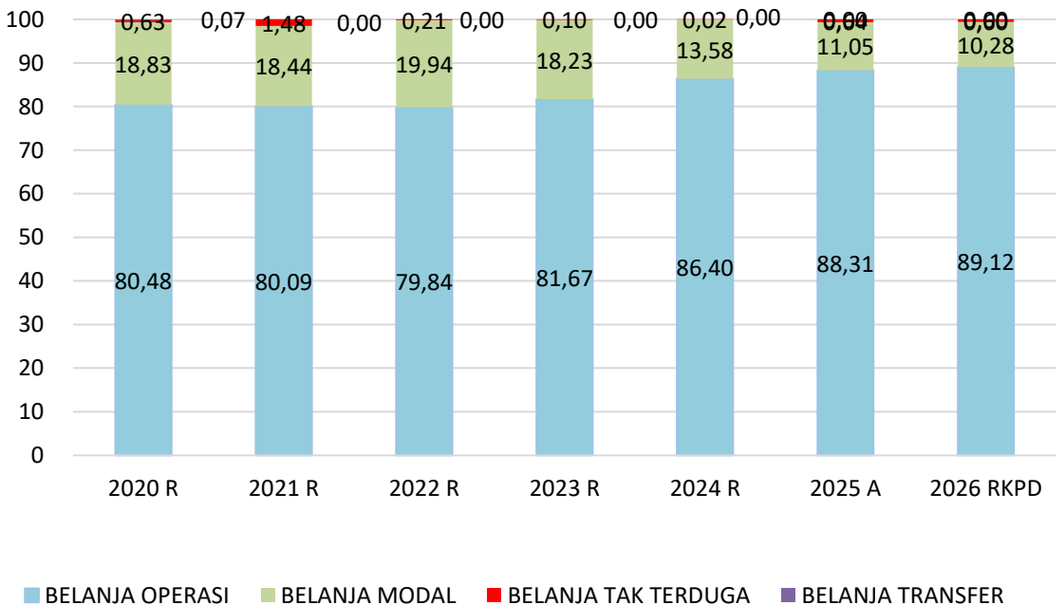

Gambar 3. 21 Perkembangan Komposisi Belanja Daerah (dalam%) Kota Madiun Tahun 2021-2026
Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.21 diatas, dari tahun 2021-2026, sebagian besar masih dialokasikan pada belanja operasi. Pada Tahun 2026, persentase belanja operasi diproyeksikan sebesar 89,12 persen. Perkembangan persentase belanja operasi Kota Madiun tahun 2020-2025 dapat dilihat dalam gambar berikut:

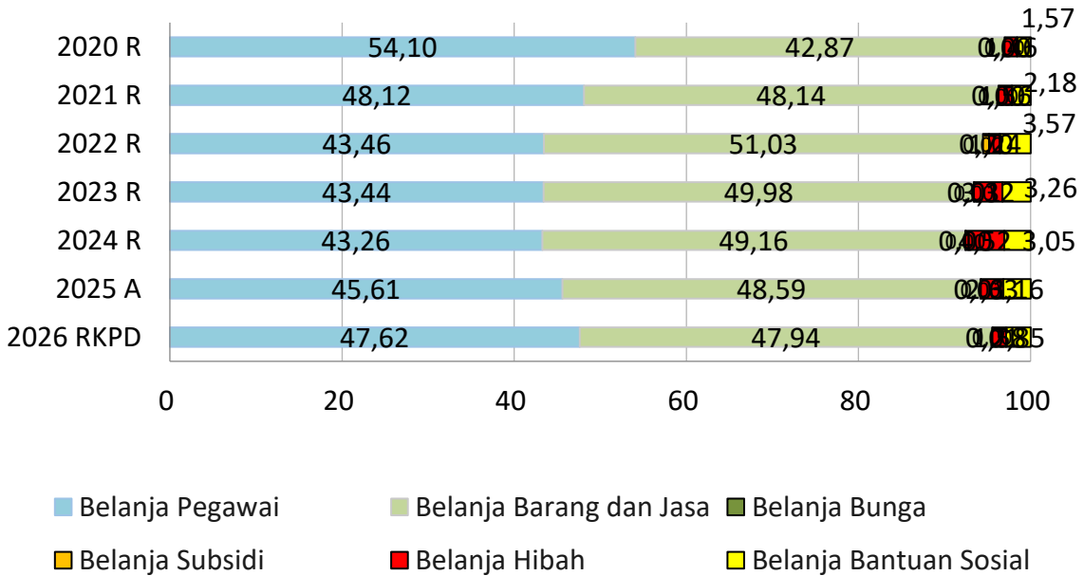

Gambar 3. 22 Perkembangan Komposisi Komponen Belanja Operasi Kota Madiun Tahun 2021-2026 (dalam%)
Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi,2025

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.22 diatas, Komposisi Belanja operasi dari tahun ke tahun memiliki komposisi yang relatif sama. Meskipun secara nominal nilainya berubah dari tahun ke tahun, komposisi terbesar masih terdapat pada belanja pegawai. Persentase belanja pegawai pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar 47,62 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan anggaran tahun 2025 yaitu sebesar 45,61.

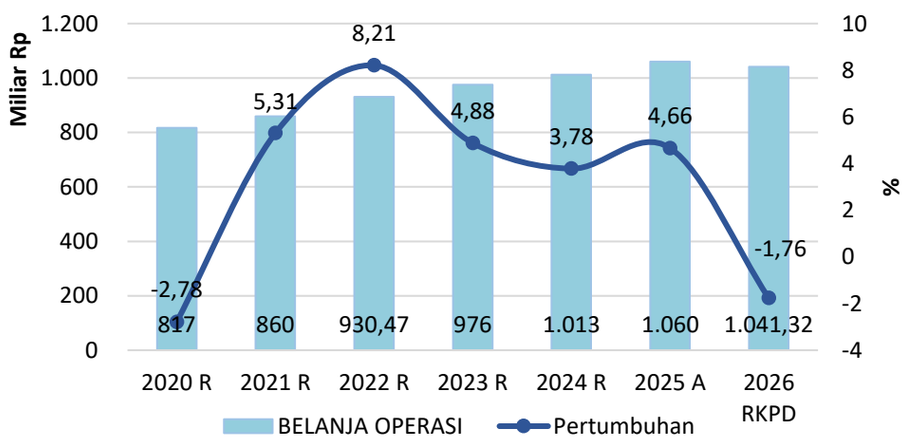

Gambar 3. 23 Perkembangan Belanja Operasi Kota Madiun Tahun 2021-2026
Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.23 diatas, Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir belanja operasi menunjukkan tren fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada realisasi tahun 2022 yaitu sebesar 8,21 persen dengan nominal Rp 934,28 Milyar. Pada realisasi tahun 2023 belanja operasi mencapai Rp 975,87 miliar atau turun menjadi 4,45 persen. Pertumbuhan belanja operasi kembali menurun menjadi 3,77 persen. Pada anggaran tahun 2024, pertumbuhannya turun menjadi 3,78 persen. Sedangkan anggaran 2025 meningkat menjadi 4,66 persen dan turun signifikan menjadi -1,76 persen pada tahun 2026.

Selanjutnya adalah gambar perkembangan pertumbuhan Belanja Modal tahun 2021 hingga 2026:

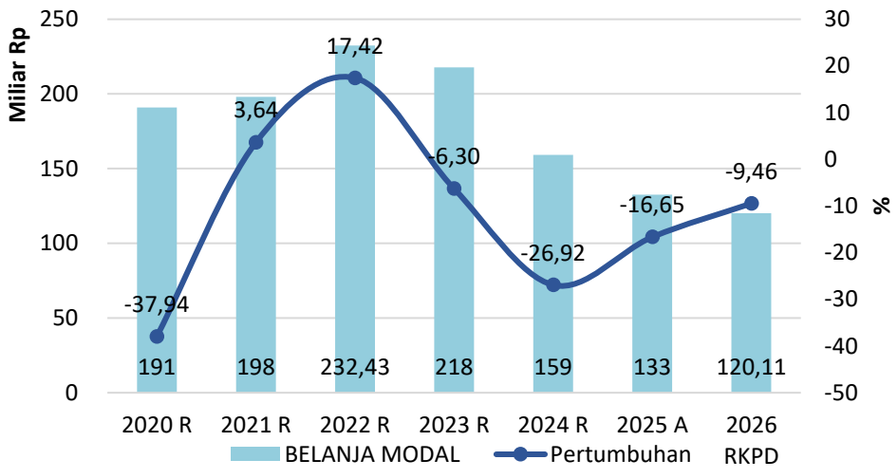

Gambar 3. 24 Perkembangan Belanja Modal Kota Madiun Tahun 2021-2026
Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2025

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.24 diatas, dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir belanja modal mengalami tren fluktuatif. Komposisi Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Bangunan Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan terakhir Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Pada tahun 2021, pertumbuhan belanja modal berada di angka 3,64 persen. Angka ini meningkat menjadi 17,42 persen di tahun 2022 dan menjadi pertumbuhan belanja modal tertinggi. Hingga realisasi tahun 2024, belanja modal cenderung menunjukkan penurunan, yaitu turun menjadi -6,3 persen pada tahun 2023 dan -26,92 persen pada tahun 2024. Pada tahun anggaran 2025, belanja modal meningkat menjadi -16,65 persen dan diproyeksikan pertumbuhannya menjadi -9,46 persen di tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Selanjutnya untuk perkembangan Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada gambar berikut:

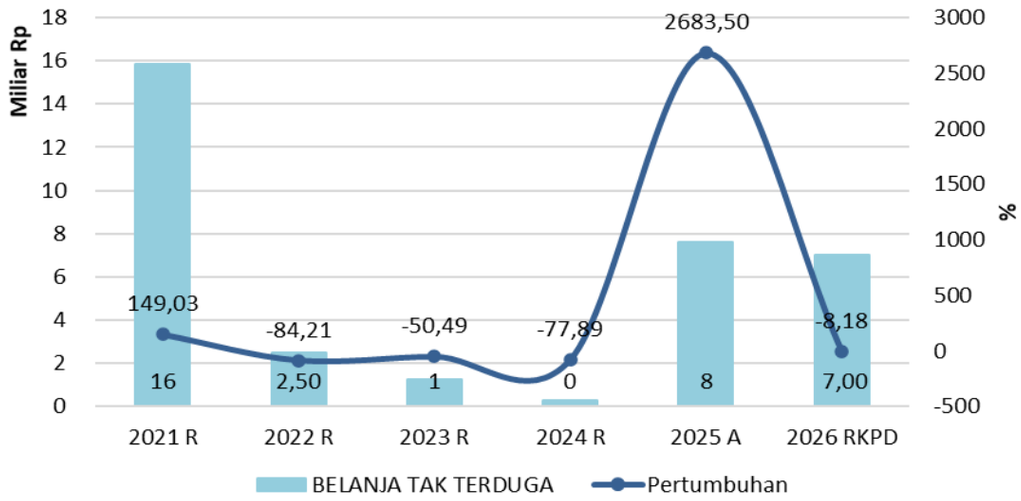

Gambar 3. 25 Perkembangan Belanja Tidak Terduga Kota Madiun Tahun 2021-2026
Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2025

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.25 diatas, peningkatan yang signifikan belanja tak terduga terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 15,84 persen atau sekitar 149,03 miliar. Pertumbuhan belanja tidak terduga cenderung minus di tiga tahun berikutnya, yaitu -84,21 persen di tahun 2022, -50,49 di tahun 2023, dan -77,89 di tahun 2024. Pada tahun 2025, belanja tak terduga dianggarkan hingga 2.683,5 persen. Sedangkan pada proyeksi tahun 2026, belanja tak terduga diperkirakan tumbuh hingga -8,18 persen. Selanjutnya perkembangan Belanja Transfer dapat dilihat pada gambar berikut:

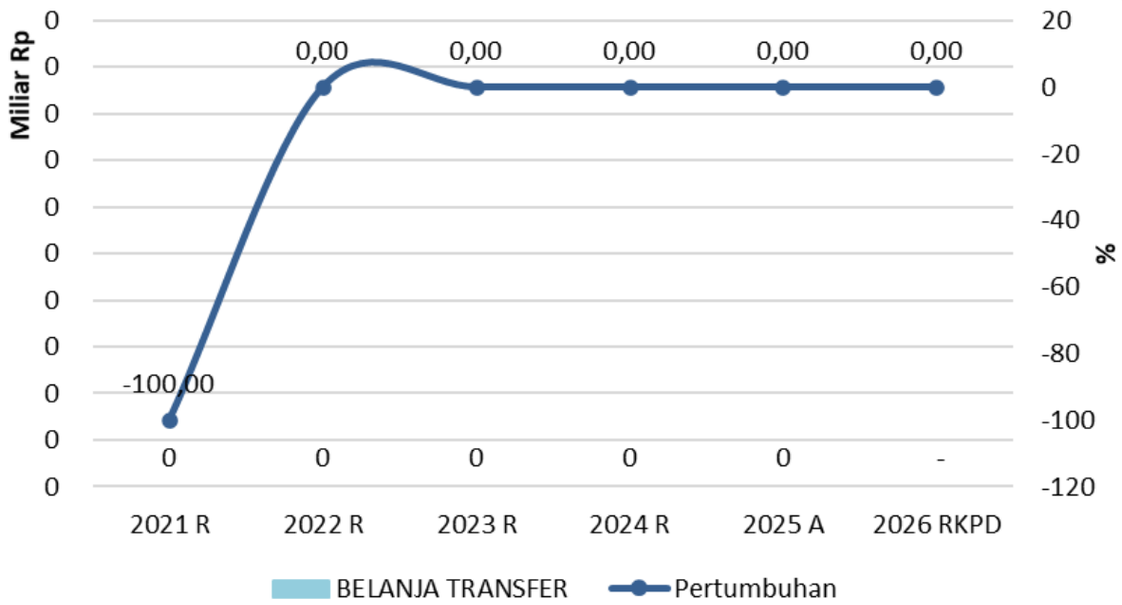

Gambar 3. 26 Perkembangan Belanja Transfer Kota Madiun Tahun 2021-2026
Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.26 diatas, Belanja transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan keuangan. Perkembangan Belanja Transfer tahun 2021-2025 belanja transfer tidak dianggarkan. Demikian pula pada tahun 2026, diperkirakan belanja transfer juga tidak dianggarkan. Selanjutnya, perkembangan nilai dan pertumbuhan belanja daerah Kota Madiun tahun 2021-2024, anggaran 2025 dan proyeksi 2026 adalah sebagaimana termuat pada tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 3. 5 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2021 s.d Tahun 2026

	Uraian	REALISASI				PROYEKSI/TARGET	
		2021 R	2022 R	2023 R	2024 R	2025 A	2026 RKPD
5.2	BELANJA DAERAH	1.073.679.343.614	1.165.410.106.455,26	1.194.903.395.527	1.172.206.504.141	1.200.275.072.209	1.168.421.594.028,60
5.2.1	BELANJA OPERASI	859.879.322.396	930.473.573.791,29	975.874.375.043	1.012.766.107.584	1.059.993.938.950	1.041.315.574.888,57
5.2.1.1.	Belanja Pegawai	413.765.191.395	404.406.660.608,25	423.896.152.844	438.170.995.928	483.497.707.698	495.906.694.869,14
5.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	413.958.099.348	474.775.658.285,04	487.718.322.693	497.881.778.674	515.011.875.072	499.171.351.280,43
5.2.1.3.	Belanja Subsidi	0	6.480.445.500,00	99.146.000	49.955.750	100.000.000	100.000.000,00
5.2.1.4.	Belanja Hibah	13.431.646.653	11.562.623.718,00	32.355.896.005	45.781.591.232	27.860.583.953	16.450.149.269,00
5.2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	18.724.385.000	33.248.185.680,00	31.804.857.500	30.881.786.000	33.523.772.227	29.687.379.470,00
5.2.2	BELANJA MODAL	197.958.260.924	232.434.449.701,97	217.790.302.663	159.166.507.475	132.657.442.487	120.106.019.140,03
5.2.2.1	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0	0	
5.2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.304.347.775	53.011.211.346,00	71.585.868.051	24.597.646.021	38.141.644.934	31.106.048.898,20
5.2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.170.777.017	72.843.838.757,97	80.940.539.684	41.774.680.517	40.745.439.302	31.889.337.606,83
5.2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	103.172.346.821	103.137.296.907,00	62.832.477.443	90.028.130.537	51.771.093.151	55.543.886.435,00
5.2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.310.789.311	3.442.102.691,00	2.431.417.485	2.015.705.050	1.222.835.100	1.116.746.200,00
5.2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0		750.345.350	776.430.000	450.000.000,00
5.2.3	BELANJA TAK TERDUGA	15.841.760.294	2.502.082.962,00	1.238.717.822	273.889.083	7.623.690.772	7.000.000.000,00
5.2.3.1	Belanja Tidak Terduga	15.841.760.294	2.502.082.962,00	1.238.717.822	273.889.083	7.623.690.772	7.000.000.000,00
5.2.3	BELANJA TRANSFER	0	0	0	0	0	0
5.2.3.2	Belanja Transfer Ke Daerah Lain	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA	1.073.679.343.614	1.165.410.106.455,26	1.194.903.395.527	1.172.206.504.141	1.200.275.072.209	1.168.421.594.028,60
	SURPLUS / (DEFISIT)	27.003.485.517	-104.693.794.370,71	-77.291.265.295	-693.448.423	-100.000.000.000	-60.000.000.000,00

Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

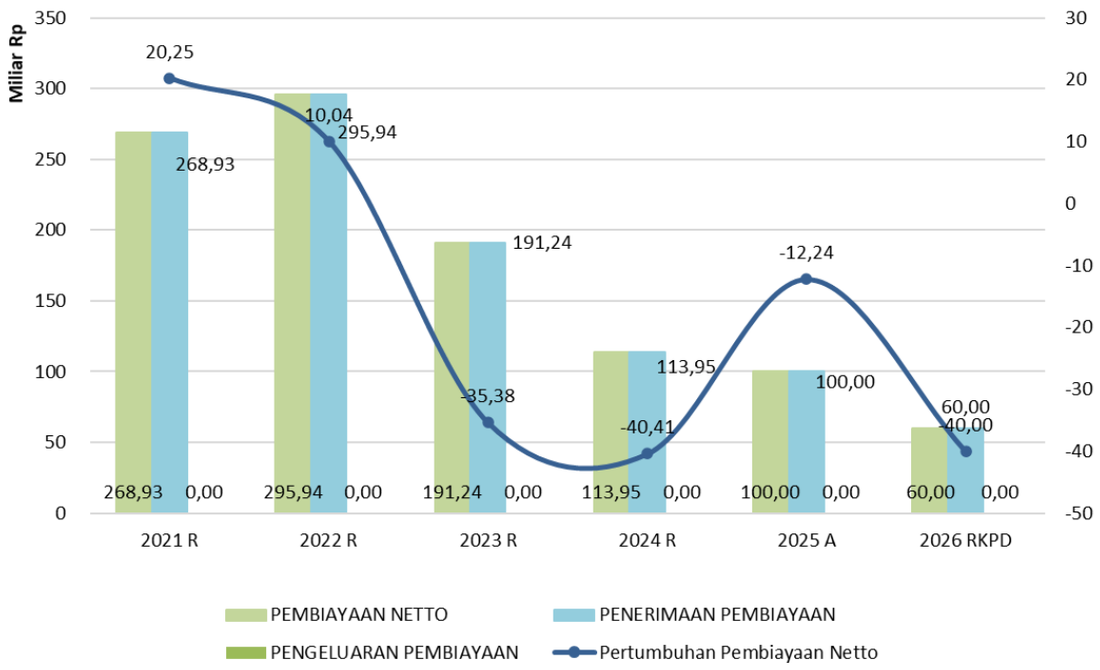

Gambar 3. 27 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Neto Tahun Berjalan Kota Madiun Tahun 20210-2026 (Milyar Rupiah)
Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2025

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.27 diatas, pada tahun 2021 hingga 2024, pertumbuhan pembiayaan netto turun drastis hingga -40,41 persen pada tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2025 dianggarkan hingga -12,24 persen dan turun menjadi -40 persen pada tahun 2026. Selanjutnya, rincian perkembangan nilai penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta pembiayaan netto Kota Madiun tahun 2021 sampai dengan proyeksi tahun 2026 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 3. 6 Pembiayaan Daerah Tahun 2021 s.d Tahun 2026

	Uraian	JUMLAH					
		2021 R	2022 R	2023 R	2024 R	2025 A	2026 RKPD
5.3	PEMBIAYAAN						
5.3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	268.933.182.301	295.937.467.818	191.244.870.447	113.953.605.152	100.000.000.000	60.000.000.000
5.3.1.1	Penggunaan SiLPA	268.933.182.301	295.937.467.818	191.243.672.447	113.953.605.152	100.000.000.000	60.000.000.000
	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
5.3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	1.198.000	0	0	0
5.3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0
	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
5.3.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0
5.3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0	0
	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	268.933.182.301	295.937.467.818	191.244.870.447	113.953.605.152	100.000.000.000	60.000.000.000
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	295.936.667.818	191.249.797.447	113.953.605.152	113.260.156.730	0	0

Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah berisi arah kebijakan dalam pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk meminimalkan risiko fiskal, sehingga diharapkan dapat tercipta kesinambungan anggaran. Selain itu, melalui arah kebijakan keuangan daerah dapat mendukung tujuan pembangunan sesuai visi Kota Madiun. arah dan kebijakan juga diarahkan pada mitigasi risiko oleh daerah. Berikut upaya mitigasi risiko oleh daerah:

1. Perencanaan Matang Berbasis Kebutuhan: Pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan masyarakat dan memiliki dampak ekonomi jangka panjang/memiliki hasil yang signifikan
2. Penguatan Tata Kelola dan Transparansi
   - Melibatkan stakeholders dalam proses perencanaan dan pengawasan proyek;
   - Regulatory compliance;
   - Menjaga *cashflow* APBD;
   - Strategi Komunikasi yang efektif.
3. Memanfaatkan Fasilitas yang Tersedia: Mengakses fasilitas/dukungan/kemudahan yang disediakan Pemerintah

Secara rinci, arah dan kebijakan keuangan Kota Madiun Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kota Madiun Tahun 2026, terdapat beberapa arah kebijakan utama, antara lain sebagai berikut:

1. Penentuan target pendapatan daerah menyesuaikan dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan regulasi lainnya yang sesuai;
2. Stabilisasi kondisi perekonomian daerah dalam menghadapi kondisi ketidakpastian global dan kondisi politik nasional dan daerah;
3. Peningkatan target pendapatan daerah dilakukan secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Peningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan sosial daerah;
5. Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah;
6. Peningkatan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
7. Optimalisasi penerimaan pendapatan transfer baik yang bersumber dari pemerintah maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi;
8. Peningkatan sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah;
9. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah;
10. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dan retribusi serta kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah; dan
11. Peningkatan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

Selanjutnya, arah kebijakan masing-masing komponen pendapatan daerah (PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah) adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
    a. Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga. Hal ini dilakukan melalui:
        - Integrasi Teknologi/Digitalisasi Sistem Perpajakan Daerah
        - Sinergi Penerapan Opsen Pajak Daerah (PKB, BBNKB & Pajak MBLB)
        - Kerjasama Optimalisasi Pemungutan Pajak
        - Penguatan PBB-P2, Melalui Integrasi Data Pertanahan Dan Perpajakan
        - Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah
    b. Melakukan intensifikasi perpajakan dengan beberapa upaya sebagai berikut:
        1. Meningkatkan dan memperluas penggunaan teknologi informasi di dalam layanan pajak hotel dan restoran, atau dengan kata lain penggunaan sistem *online* di dalam pembayaran pajak hotel dan restoran;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Meningkatkan kapasitas aparatur PD penghasil dengan berbagai program pelatihan/diklat formal, sekaligus peningkatan sarana dan prasarana layanan. Selain itu perlu ditingkatkan sistem *rewards and punishment* untuk meningkatkan kinerja PD penghasil; dan
3. Melaksanakan update database perpajakan secara berkala, khususnya NJOP di seluruh wilayah Kota Madiun.

c. Optimalisasi BUMD, dalam hal ini pemerintah Kota Madiun akan merestrukturisasi kembali BUMD yang *social oriented* dan *profit oriented*. Untuk BUMD yang memiliki *profit oriented* diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD; dan
d. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Pendapatan transfer

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program maupun kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK Afirmasi. Selain itu, Pemerintah Kota Madiun akan aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat di dalam koordinasi pos-pos DAK yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan DAU pemerintah telah menyampaikan bahwa kebijakan DAU tidak bersifat pasti atau dinamis, sehingga alokasi belanja dari DAU agar betul-betul pada program yang sangat prioritas.

3. Lain–lain pendapatan yang sah

Peningkatan koordinasi dan upaya perolehan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur melalui hibah, bagi hasil pajak dari provinsi maupun bantuan keuangan. Melalui kebijakan tersebut, maka upaya yang dilakukan dalam mencapai target pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Upaya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan dengan:
   a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
      Kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui percepatan mekanisme/prosedur, waktu, dan kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat;
   b. Meningkatkan kualitas SDM (aparat daerah), khususnya yang berkaitan dengan pemungutan PAD;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

c. Mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak swasta; dan

d. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah.

2. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan transfer dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat, berkaitan dengan alokasi dana DAK dan DBH;

3. Upaya untuk meningkatkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan melalui:

a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat mengenai kepastian dana hibah; dana darurat; dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi, yang diperoleh Kota Madiun; dan

b. Meningkatkan kerjasama antar OPD Pemerintah Kota Madiun dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara intensif.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah daerah telah menjelaskan beberapa hal penting terkait belanja daerah yaitu sebagai berikut

1. Pengalokasian belanja pegawai agar diperhatikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30% dari total belanja APBD. Dalam hal persentase belanja pegawai melebihi 30%, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan;
2. Pengalokasian Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa serta Belanja Bantuan Sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah;
4. Dalam rangka Peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan;

Sejalan dengan Undang-Undang HKPD di atas, pemerintah pusat mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 beberapa arahan tersebut adalah:

Gambar 3. 28 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/ focus group discussion.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sejalan dengan ketentuan tersebut, penyusunan kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, alokasi belanja daerah harus memiliki target yang jelas, baik orientasi *output* maupun *outcome*nya. Arah kebijakan belanja daerah Kota Madiun Tahun 2026 disusun untuk mendukung tujuan pembangunan daerah. Pengelolaan belanja daerah Kota Madiun Tahun 2026 didasarkan pada tujuh kebijakan utama, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dan disertai sistem pelaporan yang akuntabel;
2. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (m*oney follow program* prioritas);
3. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja (*performance based*), sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian Indikator kinerja utama Kota Madiun pada tahun 2026;
4. Optimalisasi anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas;
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah; dan
6. Belanja daerah difokuskan dapat memenuhi *mandatory spending* atau belanja-belanja yang sudah di-*earmark*, seperti pendidikan 20% dan kesehatan 10%. Selain itu, belanja daerah diarahkan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Selanjutnya, arah kebijakan belanja daerah diuraikan pada masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Belanja Operasi
    a. Alokasi Belanja Pegawai diproyeksikan sebesar 45,22% dari Belanja operasi, dengan mempertimbangkan penerimaan tenaga P3K dan pemberian TPP bagi ASN sesuai dengan kemampuan daerah;
    b. belanja Barang dan Jasa yang mengarah pada program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada kepentingan pelayanan publik;
    c. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

d. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal

a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Namun dalam RKPD 2026, kebutuhan belanja ini tidak dianggarkan;

b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

e. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan

f. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

g. Penguatan belanja modal agar belanja produktif mengalami peningkatan, sehingga dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dialokasikan untuk mengatasi kejadian luar biasa yang bersifat *force major*, termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, ada dua, yaitu :

1. Belanja Bantuan Keuangan adalah diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan,dan/atau tujuan tertentu lainnya;
2. Belanja Hibah adalah Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Lebih lanjut, pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selisih dari keduanya disebut sebagai pembiayaan netto, yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Madiun Tahun 2026 terdiri atas empat kebijakan utama. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang bersumber dari kelebihan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
2. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Pada tahun 2024, tidak dialokasikan untuk penyertaan modal; dan
4. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

3.2.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah

Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah yang diambil yaitu dengan Peningkatan pembiayaan kreatif, melalui kerjasama dengan pihak swasta melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Selain itu juga dapat dilakukan melalui atau Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPBU). KPDBU adalah Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum berdasarkan perjanjian kedua belah pihak dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko. KPDBU dilaksanakan berdasarkan pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha, Transfer risiko yang signifikan kepada pihak swasta merupakan salah satu sumber *value for money* (VfM), Pembagian risiko berwujud pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian KPBU.

Pentingnya pembiayaan non-APBD disebabkan karena terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan pemerintah daerah. Di sisi lain, kebutuhan belanja daerah dalam penyediaan sarana publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat beragam. Sehingga, hanya kebutuhan prioritas yang dibiayai oleh pemerintah. Melalui kerjasama dengan pihak swasta, diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan yang tidak bisa ter-*cover* oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, diharapkan ada sinergitas antara peranan swasta dan pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Rincian realisasi dan rencana pembiayaan melalui *(CSR)* tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 adalah pada tabel berikut**:**

Tabel 3. 7 Realisasi Anggaran Pembiayaan Pembangunan melalui CSR Kota Madiun 2020-2024

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)				
			2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hotel Merdeka	Penerangan Jl. Lodayan	1.200.000				
		Bantuan kepada penyandang Disabilitas	100.000				
		Santunan keluarga pinggir sungai Bantaran	2.500.000				
		Takjil buka Puasa di Masjid Agung Baitul Hakim	1.500.000				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8
		Bantuan untuk Kampung Tangguh	500.000				
		Partisipasi kegiatan warga gang Lodayan (Kel. Pangongangan)	1.000.000				
2	PT. Nitama Madiun	Pocari Sweat untuk tenaga medis	3.600.000				
		Masker berlogo Nitama	3.800.000				
		Tanaman buah					
		Pohon Jambu Citra 5 buah	1.125.000				
		Pohon Jambu Camplong 5 buah	1.125.000				
		Pohon Jeruk 5 buah	2.250.000				
		Pohon Leci 2 buah	750.000				
		Pohon Sawo Mentega 3 buah	1.350.000				
		Metan plus ongkos tanaman 20 buah	1.500.000				
		Planter Bag PT. Nitama dan Madiun Kota Pendekar 20 buah	1.800.000				
		Pembersihan sungai sekitar Planter bag	480.000				
		Takjil Ramadhan 1.000 pcs					
		Donasi Persatuan Tuna Netra Indonesia	6.000.000				
		Beras CSR untuk warga sekitar	2.064.000				
		Proses pelapisan hot dip galvanize gratting makam	700.000				
		Proses pelapisan hot dip galvanize gratting makam	700.000				
		Hut Satpam	750.000				
		Mural dan pengecatan gapura dengan logo Perusahaan dan tulisan (logo) RW.06	6.000.000				
3	PT. INKA (INDUSTRI KERETA API)	Bantuan Bedak Kaca	750.000				
		Bantuan Program kemitraan 5 mitra	250.000.000				
		Rehab Ruang Kelas	2.000.000				
		Bantuan Pembangunan Perpustakaan	1.000.000				
		Paket Hand sanitizer 60.000 ml	7.300.000				
		Vitamin	1.000.000				
		Suplemen dan Vitamin	8.255.400				
		Bantuan Masker dan Faceshield 500 bh	5.250.000				
		Masker 1000 bh	6.500.000				
		Sosialisasi Bahaya Narkoba	51.900.700				
		Penyuluhan Pencegahan Covid	53.589.400				
		Bantuan Sarpras Posko Covid	9.170.000				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8
		Bantuan Bilik Desinfektan	2.200.000				
		Bantuan Bilik Desinfektan	10.000.000				
		Tempat Cuci Tangan , Masker dan Hand sanitizer	2.887.500				
		Rapid tenaga medis	46.500.000				
		Pule dan bungur	184.750.000				
		Pohon Tabebuya	3.000.000				
		Pot, Media dan Bunga	2.500.000				
		Bibit Tanaman Bunga dan Buah	2.000.000				
		Tempat sampah 3 unit	2.397.000				
		Sarpras Poskamling Kel. Patihan	2.246.000				
		Pembelian Pot Bunga	1.000.000				
		Pembelian Pot Bunga	1.200.000				
		Pemeliharaan mural	20.090.000				
		Bantuan Kebersihan makam	3.000.000				
		Bantuan Paket sembako 200 paket	37.300.000				
		Bantuan Sembako	1.000.000				
		Baksos Sembako	5.000.000				
		Bantuan Sembako 50 paket	10.500.000				
		Bantuan untuk disabilitas 50 paket	8.749.587				
		Bantuan Baju Koko dan Mukena	35.407.990				
		Kegiatan Baksos	1.000.000				
		Santunan Yayasan Panti Asuhan	272.000.000				
		Renovasi Masjid	5.000.000				
		Bantuan Terpal Tenda	5.000.000				
		Bantuan Cover tenda	4.200.000				
		Renovasi masjid	2.000.000				
		Pembangunan Masjid	5.000.000				
		Pembelian Tanah Wakaf	2.000.000				
		Pembuatan Tempat Parkir PHBI	4.000.000				
		RTLH Bp. Firman	86.125.000				
		Ruang Pelayanan Masyarakat	68.186.060				
		Pembelian material pipa besi dan cat	2.000.000				
		Pembelian material Kelas lapangan	29.785.000				
		Bantuan Laptop	35.200.000				
		Bantuan Kodim	24.744.000				
		Pembuatan 200 Kaos	10.130.000				
		Bantuan AC Standing 5 PK 2 unit	28.730.000				
		Pengadaan portal	3.950.000				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8
		Bantuan Sarpras Posko Kampung Tangguh	2.775.200				
		Bantuan Kampung Tangguh di Kel. Sukosari, Manguharjo dan Nambangan Kidul	11.009.000				
		Bantuan Kampung Tangguh di Kel. Banjarejo, Mojorejo dan Nambangan Lor	13.250.000				
		Masker		7.500.000			
		Ranjang Pasien		121.850.000		50.400.000	111.600.000
		Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan				3.830.400	
		Bantuan Beasiswa Mahasiswa				6.000.000	
		Program Peningkatan Pengelolaan lapak UMKM Kelurahan : a. Bazar Takjil b. Evaluasi Pengelolaan lapak c. Pemberian Bantuan/Reward Alat-alat Produksi d. Pendampingan Lapak					150.000.000
		RLTH Bapak Hadi Supriyanto Jalan Merpati, Gang Platuk Bawang No. 9, Kelurahan Nambangan Lor, Kota Madiun					50.500.000
		Mesin fogging					37.254.670
		Bantuan Sarpras Lingkungan : Tempat sampah botol plastik (per kelurahan @1.725.000) 1. Pangongangan 2. Taman 3. Sukosari 4. Ngegong 5. Nambangan lor 6. Patihan 7. Oro-oro ombo 8. Madiun lor 9. Pandean 10. Kuncen 11. Kelun 12. Kanigoro					20.700.000
4	PT. KAI DAOP 7	Alat Peraga Edukasi	25.000.000				
			5.000.000				
		Pule dan Bungur	92.500.000				
5	Hotel Amaris	Sumbangan Anak Yatim	3.000.000				
		Pembelian Hewan Qurban yang diserahkan pada Masjid Nurul Abror Jalan Kalimantan (1 ekor kambing)	2.800.000				
		CSR kepada masyarakat Jalan Kalimantan	2.000.000				
6	ALFAMART	biaya pangkas pule barito	15.000.000				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8
		tanaman hias sumber wangi (bugenvil varigata, kamboja besar, kelapa gading)	27.875.000				
		sulaman pohon sogo	2.400.000				
		Lampu Plenton	29.750.000				
		Lampu Penjor	150.000.000				
7	PT. BRI	Pohon berbunga					
		Masker Non Medis 1250 pcs	12.500.000				
		Paket sembako 100 paket	15.000.000				
		Masker Kain (5000 buah)		5.000.000			
		Biskuit (30 dos)		1.440.000			
8	PT. TELKOM	Bantuan Pinjaman Bergulir	820.000.000				
		Booth untuk UMKM	100.000.000				
		300 buah Hazmat untuk Satgas Covid	14.250.000				
		300 psng Sepatu Boots	22.500.000				
		300 bh faceshield	5.850.000				
		320 box Masker medis	48.800.000				
		80 box sarung tangan karet	8.200.000				
		2000 bh masker non medis	13.300.000				
		Bantuan Sembako untuk warga Kota Madiun	15.000.000				
9	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM, Tbk	Sembako (Beras 4kg, Gula 2 kg, Minyak 1lt, kecap 1, sambel pecel 500gr)	66.896.000				
		Sembako (Beras 4kg, Gula 2 kg, Minyak 1lt, kecap 1, sambel pecel 500gr)	134.329.000				
		Paket Sembako (1500 paket)		210.000.000			
		Peket Sembako (1500 paket)		270.000.000			
		Both Container (2 buah)		545.800.000			
		Entrance gate Pahlawan Street Center (PSC)			541.178.000		
		Lanjutan Entrance gate Pahlawan Street Center (PSC) dan patung pendekar			564.541.000		
		Bantuan Sarpras Lingkungan Kendaraan dan Branding				533.000.000	
10	PT. REFINDO INTISELARAS INDONESIA	Lapak Joglo Paleraman		2.100.000			
		Lapak Kembulsari		18.500.000			
		Lapak Sido Dadi		24.500.000			
		Lapak Lintang Tawang		16.000.000			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8
		Bantuan Meja, Kursi dan Lemari Kaca			3.600.000		
11	BPR TUNAS ARTHA	Inklusi Keuangan	1.500.000				
		Sedekah Jumat	4.800.000				
		Sumbangan Kematian	1.000.000				
		Sumbangan Bencana Alam	1.500.000				
		Takjil Ramadhan	1.000.000				
		Parsel Lebaran	1.000.000				
		Sumbangan HUT RI	500.000				
		HUT BPR Tunas Artha	1.000.000				
		Sumbangan lain-lain	1.000.000				
12	PT. INDRACO SUN CITY	Sewa Bazar UMKM dari Dinkop	2.000.000				
		Penerimaan Peserta Didik magang	15.000.000				
		Penanaman Pohon	20.000.000				
		Bukber anak yatim Piat	12.000.000				
		Parsel Lebaran	5.000.000				
		Sumbangan HUT RI	2.000.000				
		Hewan Qurban	20.000.000				
		Takjil Ramadhan	5.000.000				
13	Hotel Aston	Donor Darah Umum	500.000				
		Takjil Ramadhan	1.500.000				
		Berbagi Sahur	1.500.000				
		Bakti Sosial	300.000				
		Natal Bersama Panti Asuhan	2.000.000				
		Hewan Qurban	3.500.000				
14	PD. BPR	Penyaluran tenda pedagang kaki lima	60.000.000				
		Penanaman dan Penghijauan lingkungan serta PD BPR Bank Daerah Kota Madiun	50.000.000				
		Program Bisafari Dhuafa	5.000.000				
15	PT. PNM	Penanaman Pohon	10.000.000				
16	BANK WOORI BERSAUDARA	Penanaman Pohon	5.000.000				
17	PT. BCA	Penghijauan lingkungan kantor	3.000.000				
		Buka bersama anak yatim	3.000.000				
		Takjil Ramadhan	2.000.000				
		Bingkisan lebaran	7.000.000				
		Sumbangan HUT RI	1.000.000				
		Container (2 buah)			26.061.636		
18	BRI KANCAB MAGETAN	Pule	42.000.000				
		Tiang lampu penjor klasik Badungan	50.000.000				
19	PG. REDJOAGUNG	Bantuan untuk pendidikan	1.400.000				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8
		Penanganan Covid	231.716.237				
		Penanaman Pohon Flamboyan	45.500.000				
		bantuan Sarana Ibadah	3.950.000				
		Khitan massal	25.000.000				
		Bantuan Sosial	25.334.587				
		Bantuan sarana umum	2.550.000				
		Program Kemitraan	1.055.000.000				
		Gula Pasir (2.500 kg)		30.000.000			
		Gula Pasir (2,5 ton)			32.500.000		
20	PT. PERTAMINA	Pule dan Bungur	150.040.000				
		Pelatihan		28.394.000			
		Alat dan Bahan Pelatihan		33.000.000			
		Sarpras Lingkungan		17.000.000			
21	BANK BUKOPIN	Buka bersama anak yatim	20.000.000				
22	CV. SOHANTO ADI PERKASA, PT. SARI MELATI KECANA, PT. INUL VIZTA MADIUN	Gate Videotrone	330.000.000				
		Videotron			278.000.000		
23	PT. REZKY ANUGRAH SEJAHTERA	Mobil Golf Yamaha 4 Seat	170.000.000				
24	PDAM Tirta Taman Sari	TRAFFIC LIGHT Tempo doeloe dan Lampu Hijr Ismail	85.000.000				
		Balon Gate (2 unit)		20.000.000			
		BPJS Ketenagakerjaan 1.144 orang			230.630.400		
		Bantuan Bersa dan Air Minum			31.412.000		
		Kaos 92 buah			6.127.200		
		Kaos 147 buah			9.790.200		
		Kaos 177 buah			11.788.200		
		Kaos 407 buah			27.106.200		
		Kaos 177 buah			11.788.200		
		Air minum kemasan 1.646 karton			44.442.000		
		Bantuan Sarpras Lingkungan				29.175.000	
		Anjungan air siap minum					
		Bantuan Sarpras Lingkungan				7.086.996	
		Wastafel					
25	PT. TASPEN	Bantuan kemitraan	280.000.000				
		Bantuan Sarpras Lingkungan : Pohon Kamboja Berkarakter					30.000.000
26	INDOSAT	Lampu Penjor	162.793.000				
27	PT. INTI BANGUN SEJAHTERA	Lampu heritange di madiun	15.000.000				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8
28	PT. PLN (persero) UP3 MADIUN	RUMAH PINTAR	202.555.000				
		Pohon pule 2 buah, treatment dan pemeliharaan pohon, dan branding PLN peduli			75.000.000		
29	PT. PENERBIT ERLANGGA CABANG MADIUN	Pompa Elektrik 4 unit	3.000.000				
		Chlorin 7 jerigen @ 20 liter	4.200.000				
		Chlorin 2 jerigen @ 10 liter	700.000				
		Karbol/wipol 2 jerigen @10 liter	700.000				
		Harpic/pembersih lantai 1 jerigen @ 10 liter	700.000				
		Harpic/pembersih lantai 2 jerigen @ 5 liter	700.000				
30	PT. BRI (Persero) CABANG MADIUN	Masker kain 1300 buah	6.500.000				
		Alat Pelindung Diri 75 buah	6.375.000				
		Sarung tangan 10 box/500 psng	1.150.000				
		Hand Sanitizer 20 liter	3.600.000				
		Wastafel aluminium 4 buah	2.800.000				
		Thermogun 4 buah	6.000.000				
31	PT. CIPTA GAGAS LESTARI	Handsanitazer Merk Novo 80 ml (20 dos)		2.880.000			
		Masker Protector (20 dos)		7.680.000			
		Minuman Serbuk Merk Segar (20 dos)		2.592.000			
		Susu Milku (1500 botol)		3.562.500			
		Kopi Siap Saji (1000 cup)		2.000.000			
32	PT. BANK TABUNGAN NEGARA (BTN)	Healthy Kit Non Medis (2.000 buah)		56.000.000			
		Susu (360 buah)		780.000			
		Gula Pasir 3 ton			45.000.000		
33	PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI)	Masker Kain (1000 buah)		6.000.000			
		Paket Sembako (130 buah)		16.250.000			
		Susu (1145 buah)		2.750.000			
		Minyak goreng 1.056 liter			25.000.000		
34	PERUM BULOG	Bantuan Sembako		54.000.000			
35	PT. KIMIA FARMA DIAGNOSTIKA	Gerobak/ Booth Kontainer (6 unit)		87.000.000			
36	PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk	Susu Milku (5.000 botol)		12.250.000			
		Masker (2000 buah)		14.000.000			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8
37	PT. INTI DAYA GUNA ANEKAWARNA (INDANA)	Cat Outdoor (100 galon)		20.700.000			
38	LARISSA AETHETIC CENTER MADIUN	Tempat Cuci Tangan Injak (6 unit)		9.900.000			
		Masker Medis (40 box)		2.640.000			
39	PT. CALVARY ABADI	Paket Sembako (2000 paket)		202.000.000			
		Masker Medis (100.000 lembar)		40.000.000			
		Beras 10 ton dan Minyak Goreng 5.185 liter			159.997.500		
40	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PG. PAGOTAN)	Gula Pasir (10 Sack)		5.250.000			
41	PT. BAKTI NETRA UTAMA	Mesin Potong Rumput (11 unit)		18.700.000			
		Peralatan Gergaji Mesin (6 unit)		21.300.000			
42	POLITEKNI PERKERETAAPIAN INDONESIA	Paket Sembako (300 paket)		60.000.000			
43	PT. ASTRA INTERNATIONAL, Tbk	Booth Container (10 unit)		75.000.000			
44	PT. ULER RAYA INDONESIA	Paket Sembako (100 paket)		10.000.000			
45	PT. MIDI UTAMA INDONESIA, Tbk	Bantuan Sarpras Lingkungan		120.000.000			
46	PT. PESTA PORA ABADI	Masker Medis (20 box)		5.000.000			
47	PT. PEGADAIAN PERSERO	Vitamin (100 pack)		5.000.000			
48	PT. ACE HARDWARE INDONESIA LAWU PLAZA MADIUN	Earloop Face Mask (1440 pack)		47.376.000			
49	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	Soud System Mushola dan Soud Outdoor Sumber Umis, AC 2 unit, CCTV 4 titik dan Vocher belanja Rp100.000 (60 vocher)			200.100.000		
50	PT. REJEKI TAMBAH BAROKAH	Paket sembako (beras, minyak goreng, gula, susu) sejumlah 195 paket			11.640.000		
51	PT. ADHI KARTIKA JAYA	Beras 10 ton dan minyak goreng 2.962 liter			149.987.000		
52	PT. MADIUN RITELINDO (PLAZA MADIUN)	Sewa Area Café Pelayanan Publik dan Shervice Charge			26.748.660		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8
53	TOKO MODERN LARAIA	Paket sembako (beras, minyak goreng, gula, mie instan, roti roma) sejumlah 200 paket			32.000.000		
54	PT. MERAK JAYA PRACETAK	Minyak goreng 2.000 liter			26.000.000		
55	YAYASAN PELATIHAN FITRI AL-BAASITU	Beras 1.000 kg dan minyak goreng 1.000 liter			23.600.000		
56	PT. LINKNET	Bantuan Sarpras Lingkungan				100.000.000	
		Mobil Jaguar					
57	PT. APLIKANUSA LINTASARTA	Bantuan Sarpras Lingkungan : Pelengkap Mobil Jaguar				30.000.000	
		Kontainer				70.000.000	
58	CV. MAJU BERSAMA	Bantuan Sarpras Lingkungan : Replika Menara Eifel				1.032.885.258	
59	PT. EKA MAS REPUBLIK	Bantuan Sarpras Lingkungan : Kontainer				55.144.200	
60	PT. SUCCESS JAYA GROUP	Bantuan Sarpras Lingkungan : Replika Tugu Monas				554.948.000	
61	CV CITRA ANEKA PANGAN	Bantuan Sarpras Lingkungan : Kontainer					66.000.000
62	PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA	Bantuan Sarpras Lingkungan : Revitalisasi Lapangan Volley Gulun					70.200.000
		Bantuan Sarpras Lingkungan : a. Basketball Court (Sarana dan Prasarana) b. Basketball Court (Jasa Pembenahan) c. Bench Pemain Stadion d. Tempat Sampah Gantung e. Plang Himbauan Outdoor f. Totem Pylon Sign g. Papan Skor (Perbaikan) h. Meja Lipat i. Tent Production - Double Deck					91.400.000
JUMLAH			6.251.135.661	2.261.694.500	2.594.038.196	2.472.469.854	627.654.670

Sumber:Bapppeda Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Keselarasan arah dan prioritas pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan aspek penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di tingkat daerah secara logis bergantung pada harmoni tujuan pembangunan di berbagai tingkatan pemerintahan, khususnya antara pemerintah provinsi dan pusat. Prioritas pembangunan daerah di Kota Madiun telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat. Hubungan ini tercermin dalam visi yang diuraikan dalam rencana pembangunan jangka menengah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Keterkaitan visi tersebut disajikan dalam gambar berikut.

Gambar 4. 1 Keterkaitan Visi antar Level Pemerintahan

Visi yang diusung oleh Kepala Daerah Kota Madiun untuk periode 2025–2045 memiliki keterkaitan yang kuat dengan visi Gubernur Jawa Timur serta Presiden. Perumusan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kota Madiun didasarkan pada visi dan misi yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan (RP). Dengan demikian, visi Kota Madiun untuk tahun 2025-2045 adalah: “Madiun Maju Mendunia Kota yang Berinovasi, Berbudaya, dan Berkelanjutan. Terdapat 3 (tiga) pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kota Madiun 2025-2045.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kota Madiun mengusung beberapa nilai utama dalam pembangunannya untuk menciptakan lingkungan yang inovatif, berbudaya, dan berkelanjutan. Nilai pertama adalah “Inovasi”, yang mana Kota Madiun mampu mengembangkan ide kreatif dan solutif dalam pemecahan permasalahan pembangunan kota dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan kolaborasi multipihak untuk menciptakan Kota Efisien, Berkelanjutan, dan Layanan Optimal. Nilai kedua adalah “Inovasi”, diharapkan Kota Madiun aktif mengembangkan ide-ide kreatif dan solutif dalam memecahkan permasalahan pembangunan kota meliputi transportasi, lingkungan, pendidikan, dan layanan publik. Selanjutnya, Nilai ketiga adalah “Berbudaya”, yang berarti Kota Madiun yang memberikan ruang ekspresi seni dan toleransi budaya dengan mengembangkan kekayaan seni, warisan budaya, dan keragaman sosial. Nilai ketiga adalah “Berkelanjutan”, yang berarti Kota Madiun mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, lingkungan yang sehat, dan kualitas hidup masyarakat yang sejahtera.

Dalam periode jangka menengah, yaitu pada RPJMD 2025-2029, Pemerintah Kota Madiun mengusung visi “Terwujudnya Pemerintahan Maju Bersih Berwibawa Bersama Masyarakat Membangun Kota Mendunia”. Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Madiun 2025-2029, terdapat delapan (8) misi yang menjadi fokus pembangunan Kota Madiun. Rumusan misi ini menggambarkan visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Rumusan misi ini disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan langkah yang perlu ditempuh dalam mencapai visi. Berikut merupakan Misi dalam RPJMD Kota Madiun 2025-2029:

Gambar 4. 2 Misi dalam RPJMD Kota Madiun 2025-2029

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Untuk mencapai misi yang telah ditetapkan, diperlukan perumusan tujuan dan sasaran pembangunan. Hubungan antara misi, tujuan, dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dapat diidentifikasi dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1 Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Dalam RPJMD 2025-2029

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	
1	2	3	
T1	Meningkatnya Kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing global	IT.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		IT.2	IPG (Indeks Pembangunan Gender)
S1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat berstandar global	IS1.1	Rata-rata Lama Sekolah
		IS1.2	Harapan Lama Sekolah
S2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat berstandar international	IS2.1	Usia Harapan Hidup
S3	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	IS3.1	Indeks Ketimpangan Gender
S4	Menurunnya Kemiskinan	IS4.1	Angka Kemiskinan
S5	Peningkatan Daya Beli Mayarakat	IS5.1	Pengeluaran Per Kapita
T2	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif, produktivitas sektor unggulan, Stabilitas Perekonomian daerah, dan perluasan Lapangan Kerja	IT.3	Pertumbuhan Ekonomi
S6	Meningkatnya Daya Saing daerah khususnya Sektor Unggulan	IS6.1	Rasio PDRB Sektor Akomodasi Makan dan Minum (ADHK)
		IS6.2	PDRB Sketor Perdagangan (ADHK)
		IS6.3	Rasio PDRB Sektor Jasa (ADHK)
		IS6.4	PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)
		IS6.5	Indek Daya Saing Daerah
S7	Meningkatnya stabilitas perekonomian	IS7.1	Tingkat Inflasi
S8	Peningkatan Kualitas Investasi	IS8.1	ICOR
S9	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	IS9.1	Indeks Gini
S10	Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja	IS10.1	Produktifitas Tenaga Kerja
		IS10.2	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)
S11	Terwujudnya kondusivitas dan stabilitas daerah	IS11.1	Indeks Rasa Aman
		IS11.2	Indeks Ketenteraman
S12	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Bermasyarakat	IS12.1	Indeks Kerukunan
S13	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	IS13.1	Indeks Infrastruktur
S14	Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	IS14.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
S15	Meningkatnya ketahanan dan mitigasi bencana	IS15.1	Indeks Resiko Bencana
T3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, inovatif, bebas korupsi, dan pelayanan publik profesional berbasis Smart dan World Class Government	IT.4	Indeks Reformasi Birokrasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	
S16	Peningkatan Akuntabilitas KInerja dan Keuangan	IS16.1	Opini BPK
		IS16.2	Nilai SAKIP
S17	Meningkatnya Kerjasama Internasional	IS17.1	Jumlah Sister city
S18	Pemerintahan Bersih Korupsi	IS18.1	Nilai Survei Penilaian Integritas
		IS18.2	Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP)
		IS18.3	Jumlah Unit Kerja yang memiliki predikat WBK
S19	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Daerah	IS19.1	Indeks Kualitas Kebijakan
		IS19.2	Indeks Reformasi Hukum
S20	Meningkatnya pelayanan publik yang prima dan profesional berbasis digital	IS20.1	Indeks Kepuasan Masyarakat
		IS20.2	Indeks SPBE
S21	Peningkatan Inovasi Daerah	IS21.1	Indeks Inovasi Daerah

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Dalam rangka memastikan kelancaran pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah, khususnya di Kota Madiun, prioritas dan sasaran pembangunan menjadi pedoman utama yang harus diikuti. Penetapan prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2026 didasarkan pada sejumlah faktor, antara lain evaluasi capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang tengah dihadapi, masukan masyarakat yang diperoleh melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan, serta pokok-pokok pikiran yang diajukan oleh DPRD. Selain itu, kebijakan pembangunan tahunan yang tercantum dalam RPJMD juga menjadi acuan dalam merumuskan prioritas tersebut. Proses penetapan prioritas pembangunan memperhatikan relevansi isu strategis yang dihadapi Kota Madiun pada tahun yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan aspek urgensi, efisiensi, efektivitas, serta dampak signifikan yang dapat ditimbulkan terhadap peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Penyusunan prioritas pembangunan Kota Madiun mempertimbangkan kebijakan nasional serta kebijakan Provinsi Jawa Timur, dengan tujuan untuk memastikan adanya keselarasan antara kebijakan di berbagai tingkat pemerintahan. Fokus utama dalam prioritas pembangunan adalah penanganan masalah-masalah mendesak yang berdampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah Kota Madiun untuk tahun 2026 mengacu pada sejumlah dokumen perencanaan, antara lain Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, serta kebijakan pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2025-2029. Pendekatan ini dirancang untuk mencapai sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4.2.1 Prioritas dan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2026

Prioritas pembangunan nasional ditetapkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, yang juga menjadi tahun awal untuk mempersiapkan pencapaian target sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Fokus utama prioritas pembangunan nasional adalah penyelesaian dan penyempurnaan semua program serta pembangunan yang telah direncanakan dalam lima periode RPJMN-RPJPD.

Pada RPJMN Tahun 2025-2029, Visi yang diambil oleh pemerintah adalah "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi yang kuat, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Terdapat 8 Misi RPJMN 2025-2029 (ASTA CITA). Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029. Misi Presiden tersebut adalah:

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia(HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8. Memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam 8 misi di atas juga terdapat 17 program prioritas dalam RPJMN 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

Gambar 4. 3 Program Prioritas RPJMN 2025-2029

Disamping 17 program prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 juga terdapat 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). 8 Program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten;
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); dan
8. Mendirikan Badan penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam hal ini, RPJMN 2025-2029 menekankan pada Pertumbuhan Berkelanjutan, Penurunan Kemiskinan dan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah dan dipantau secara berkala.

Gambar 4. 4 Sasaran Utama Pembangunan Nasional

Lebih lanjut, Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Tahun 2025-2029 dapat dijelaskan dalam kerangka pikir pembangunan wilayah dalam mendukung pencapaian visi-misi, program prioritas dan PHTC. Dalam hal ini Kota Madiun termasuk dalam wilayah Jawa dimana Tema pembangunan wilayah Jawa adalah “Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan”. Kerangka pikir tersebut disajikan pada gambar berikut:

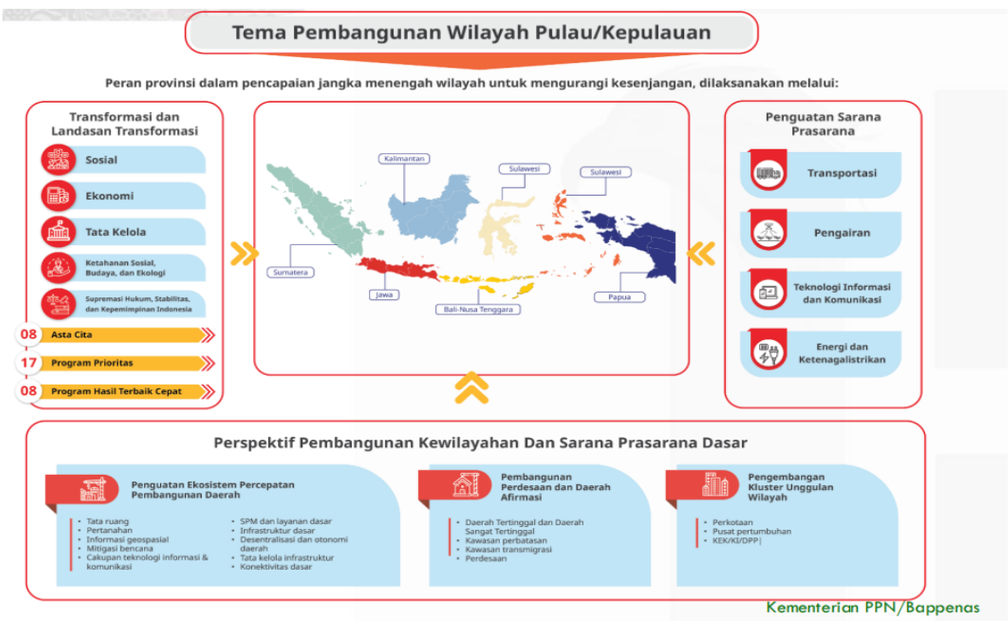

Gambar 4. 5 Kerangka Pikir Pembangunan Wilayah dalam Mendukung Pencapaian Visi-Misi, Program Prioritas dan PHTC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sejalan dengan kondisi perkembangan ekonomi global dan nasional, Rencana kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 berdasarkan Rancangan Awal RKP Tahun 2026 akan difokuskan pada "**Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**". Dalam hal ini, tema, prioritas dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 6 Tema, Prioritas Nasional, dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026
Sumber: Bappenas, 2025

4.2.2 Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026

Isu Strategis Ranwal RPJMD Jawa Timur menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, terdapat beberapa isu strategis yang memerlukan perhatian serius dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan. Isu strategis Jawa Timur memperhatikan, meliputi:

Gambar 4. 7 Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029
Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Isu strategis yang diidentifikasi dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029 menjadi dasar penting dalam merumuskan visi pembangunan yang akan membawa Jawa Timur maju, adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan. Visi ini mencerminkan komitmen untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut melalui kolaborasi dan upaya terukur dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Gambar 4. 8 Visi Pembangunan Daerah Jawa Timur 2025-2029
Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029

Visi Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 yang dirancang untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan demi masyarakat Jawa Timur lebih Sejahtera yaitu: “BERSAMA JAWA TIMUR MAJU YANG ADIL, MAKMUR, UNGGUL, DAN BERKELANJUTAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045” Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (value) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam Misi Pembangunan.

Adapun pokok-pokok visi Pembangunan sebagai berikut: Bersama, mengandung pengertian Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajak seluruh elemen masyarakat bekerja sama dalam satu tekad yang kuat. Jawa Timur Maju, merupakan komitmen sekaligus semangat (spirit) yang menegaskan bahwa pada tahapan 2025–2029, melanjutkan perjuangan untuk menjadikan Jawa Timur sebagai center of gravity yang strategis dan berkembang pesat. Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan, bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, kemakmuran ekonomi, keunggulan inovasi, dan Pembangunan yang berkelanjutan. Menuju, mengandung pengertian upaya untuk mencapai tujuan-tujuan dengan rencana dan strategi yang terukur Indonesia Emas, mengandung pengertian bahwa Visi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 diselaraskan dan mendukung Visi Nasional dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di tahun 2045.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 4. 9 Misi Pembangunan RPJMD Jawa Timur 2025-2029
Sumber: RPJMD Jawa Timur 2025-2029

Selanjutnya Visi ini dicapai melalui Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025- 2029 yang dituangkan kedalam 9 (Sembilan) Misi yang disebut Nawa Bhakti Satya, yaitu:

1. Jatim Sejahtera

   Mempercepat pengentasan kemiskinan di desa dan kota melalui pendekatan lintas sektoral-spasial terpadu dengan memperkuat peran kaum perempuan dalam program pemberdayaan serta memprioritaskan warga miskin di kelompok rentan di antaranya difabel dan lansia melalui program bantuan dan perlindungan sosial berbasis data terpadu.
2. Jatim Kerja

   Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (start-up) pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi serta pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguasaan keterampilan abad 21 (21st century skills) yang berdaya saing.
3. Jatim Akses

   Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur lintas sektor serta transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan.
4. Jatim Cerdas

   Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (education for all) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Jatim Sehat

   Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan Universal Health Coverage (UHC).

6. Jatim Berkah Amanah

   Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna, dan anti korupsi serta memperkuat kesalehan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan, budi pekerti luhur, dan berjiwa Pancasila.

7. Jatim Agro

   Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dengan tata niaga yang berkeadilan, akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan nasional.

8. Jatim Harmoni

   Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai-nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, pengarusutamaan gender, serta memajukan seni budaya dan prestasi olahraga.

9. Jatim Lestari

   Menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan daya dukung alam dan lingkungan, serta mendorong pengembangan ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan lintas sektoral.

Gambar 4. 10 Keselarasan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dan Jawa Timur
Sumber: RPJMN 2025-2029, RPJMD Jawa Timur 2025-2029

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lebih lanjut, tema pembangunan wilayah Jawa tahun 2025-2029 adalah "Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi dan Berkelanjutan". Sedangkan tema pembangunan untuk Jawa Timur tahun 2025-2029 adalah "Mata-Rantai Penting Ketahanan Industri Nasional dan Pusat Pengembangan Agrikultur, Agroindustri, dan Ekonomi Biru Nasional". Isu strategis dan tema pembangunan tersebut telah memperhatikan kondisi aktual dimana masih terdapat ketimpangan wilayah Selatan dan Utara, Jumlah penduduk miskin paling tinggi, perlunya peningkatan IPM (Nilai IPM Jatim terendah ke 2), adanya ketimpangan wilayah madura dan kepulauan. Dari kondisi tersebut dapat ditentukan kriteria program/proyek strategis Provinsi yaitu bersifat kawasan, Multiplier effect regional/nasional, lintas kabupaten/kota, berpengaruh besar dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan.

Terdapat beberapa program prioritas provinsi yang dilakukan dengan sharing pendanaan. Program prioritas tersebut adalah BOSDA MADIN (Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrasah Diniyah), PANSELA (Penyelesaian Jalur Lintas Selatan), DESA SEHAT (Honor Perawat Pondok Kesehatan Desa), BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan bagi SMA/SMK, PK-PLK Negeri dan Swasta. Program-program tersebut dituangkan pada RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota.

Gambar 4. 11 Komitmen Sharing Pendanaan Rancangan Program Prioritas Provinsi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Untuk mendukung agenda dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan pendekatan klasterisasi wilayah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan wilayah dengan memaksimalkan potensi lokal, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah di daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk memperkuat hubungan antara daerah penghasil utama dengan pusat-pusat pengolahan dan pemasaran.

Percepatan pembangunan kawasan di Jawa Timur diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019, yang mengatur mengenai percepatan pembangunan ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

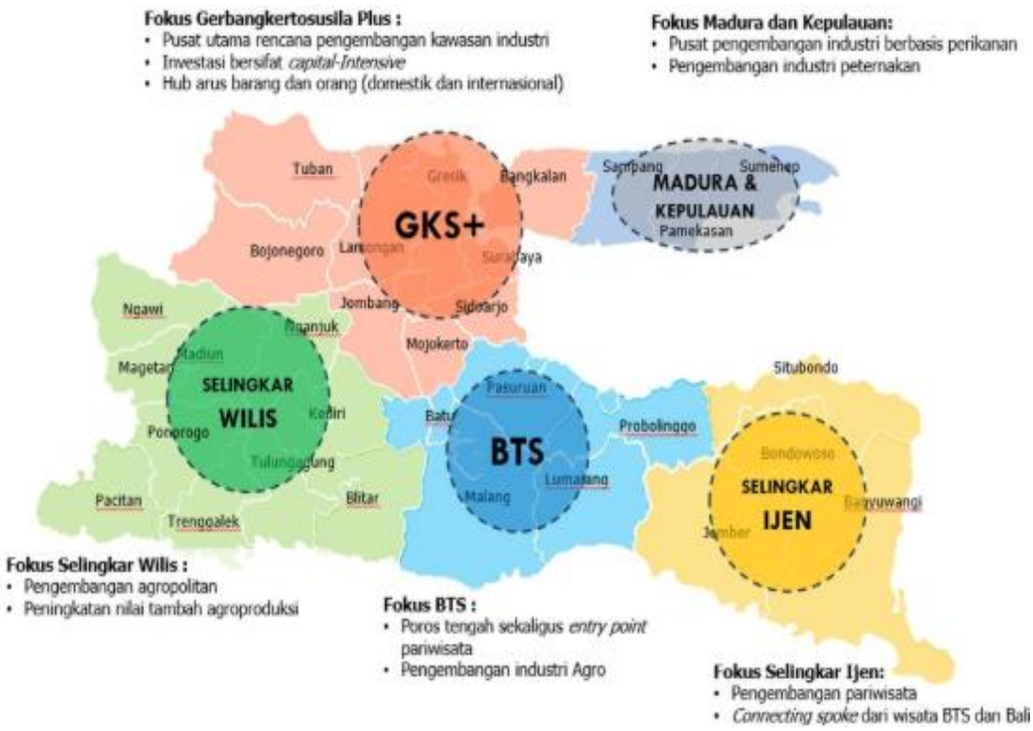

Gambar 4. 12 Pembagian Kawasan percepatan Pembangunan di Jawa Timur

Selain mengatur tentang percepatan pembangunan ekonomi kawasan Gerbang Kertasusila dan sekitarnya, kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta kawasan selingkar Wilis dan Lintas Selatan, pembangunan kawasan ditujukan di daerah hinterland utama Gerbang Kertasusila+. Kawasan prioritas kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Pacitan dengan fokus utama agroproduksi dan agroindustri, serta sektor pariwisata.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan mempunyai tema peningkatan nilai tambah agroindustri dan pengembangan agropolitan. Tema yang digunakan untuk pembangunan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan tersebut melihat dari kondisi ekonomi saat ini yang memberikan kontribusi ekonomi yang paling tinggi di Provinsi Jawa Timur. Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan difokuskan pada peningkatan produksi dan produktivitas pertanian hortikultura, perkebunan dan nilai tambah Agroindustri, dan pengembangan Kawasan Agropolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di perdesaan.

Nilai tambah Agroindustri pada komoditas perkebunan dan hortikultura, serta biofarmaka. Pengembangan pariwisata berbasis agro dan sumberdaya alam lainnya (geopark dan Iainnya) diharapkan dapat mengungkit perkembangan sektor ekonomi lainnya. Didukung dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan aksesibilitas infrastruktur pendukung lainnya dengan tetap menjamin kelestarian lingkungan.

Pembagian Wilayah Pembangunan pada Provinsi Jawa Timur, dibagi menjadi 8 (delapan) klister yaitu: Wilis Utara, Wilis Selatan, Malang Raya, Probomajang, Ijen, Madura, Metropolitan dan Labanegoro.

Gambar 4. 13 Pembagian Klaster Wilayah Pembangunan Jawa Timur

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 4.9 diatas, di Jawa Timur, penetapan klaster di Jawa Timur dirumuskan atas dasar RKP tahun 2025-2026 dan juga arah pembangunan kewilayahan Jawa Timur yaitu sebagai Pusat Agrobisnis terkemuka.

Klaster kewilayahan difokuskan pada pemerataan pembangunan melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan dengan peningkatan dan penyediaan infrastruktur pendukung. Klaster kewilayahan yang ditetapkan menjadi dasar sasaran kebijakan pengembangan kewilayahan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya di seluruh wilayah Jawa Timur. Salah satu pengembangan klaster adalah klaster 2 (2) yaitu Wilis Utara. Klaster Wilis Utara terdiri dari Kabupaten Ngawi, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor pertanian dan kehutanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Arahan pengembangan pada Klaster Selingkar Wilis dan Lintas Selatan adalah:

a. Aspek Sosial

Klaster Wilis Utara terbentuk dari latar belakang yang sama sebagai turunan dari budaya Matraman. Seperti halnya budaya Matraman dari Keraton Solo dan Surakarta, dalam kehidupan sosial masyarakatnya masih ada sistem pelapisan sosial atau stratifikasi sosial. Mayoritas wilayah Matraman masih menganut garis keturunan Patrilineal, dimana laki-laki mendapatkan keistimewaan lebih banyak dari wanita dalam hak tahta maupun harta.

Berbeda dengan wilayah Klaster Wilis Selatan, di wilayah Wilis Utara tidak ada daerah pesisir pantai seperti Wilis Selatan, melainkan daerah dataran rendah dan pegunungan. Hal tersebut yang membentuk mata pencaharian masyarakatnya yang agraris atau sebagai petani. Selain itu yang membedakan Wilis Utara dengan Wilis Selatan adalah masyarakat di daerah Wilis Utara lebih bersifat pluralistik atau majemuk.

Hal itu disebabkan karena di beberapa wilayah Wilis Utara sudah menjadi daerah industri, sehingga terjadi interaksi sosial antara pendatang yang bekerja disektor industri dengan masyarakat lokal. Masyarakat di wilayah Wilis Utara merupakan masyarakat transisi, yaitu masyarakat yang awal mulanya masyarakat desa kemudian bertransisi menuju masyarakat perkotaan. Masyarakat transisi ini sangat mudah untuk menerima hal-hal baru tanpa ada seleksi, sehingga akan merubah kebudayaan yang lebih dulu ada termasuk adat istiadat dan mata pencaharian. Adanya perubahan yang terjadi di wilayah ini sangatlah cepat, munculnya istilah Orang Kaya Baru akibat industrialisasi karena berkurangnya interaksi sosial antar masyarakat. Dengan adanya hal tersebut maka di wilayah Wilis Utara memerlukan pendampingan terhadap sumber daya manusia ataupun pengelolaan potensi sumber daya alamnya.

Pendampingan tersebut haruslah berkelanjutan karena menghindari perubahan sosial budaya yang sangat cepat. Di daerah klaster Wilis utara ini, masih terdapat kondisi wilayah tertinggal dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan pergerakan perekonomian khususnya di daerah-daerah pegungungan, terpencil dan terdalam, oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan seperti peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas Kesehatan, peningkatan akses layanan pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil, dan perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b. Aspek Ekonomi

Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan dan pembangunan enkubator ekonomi (anjungan cerdas, perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional, dan peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendanaan untuk meningkatkan akses terhadap produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan; dan

c. Aspek Infrastruktur

Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik; Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, dan peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal serta penyediaan aksesibilitas antara Bandara dengan Jalan Tol.

Sedangkan pada RPJMD Jawa Timur tahun 2025-2029, arah kebijakan kewilayahan didasarkan pada faktor sosial dan ekonomi di masing-masing kabupaten/kota, termasuk aspek pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk miskin, dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini merupakan upaya integrasi pembangunan antar sektor untuk menciptakan daya saing daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama kebijakan kewilayahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dalam peningkatan cakupan layanan dasar (kesehatan dan pendidikan), pengembangan sektor unggulan (pengurangan kemiskinan), dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

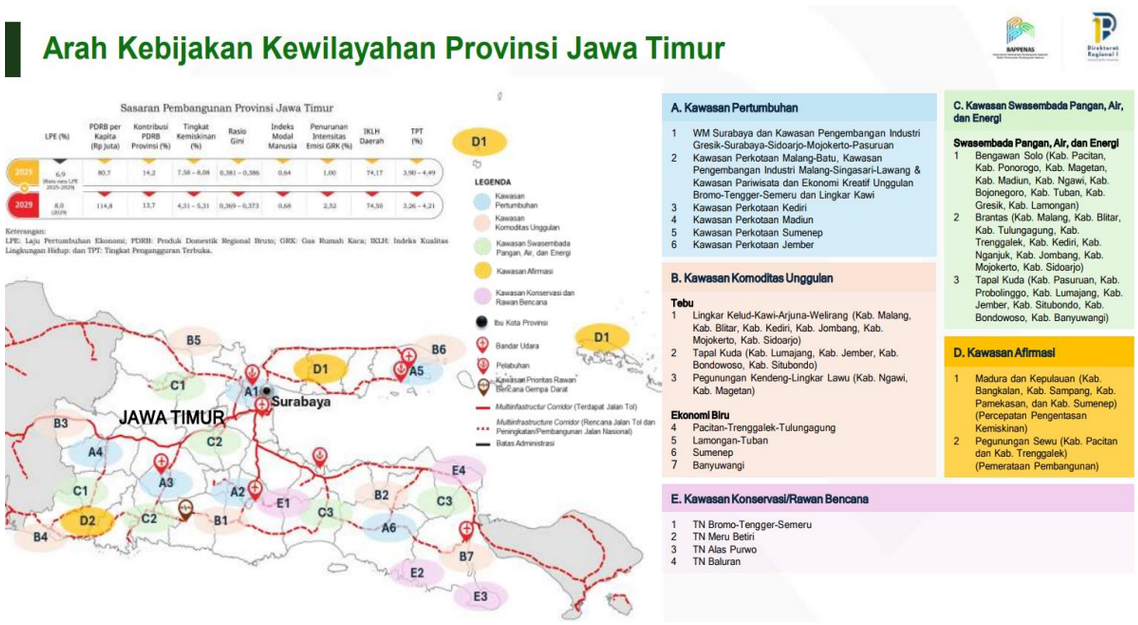

Gambar 4. 14 Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi Jawa Timur
Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Peta kawasan fungsional Provinsi Jawa Timur ini menggambarkan berbagai kawasan berdasarkan prioritas pembangunan untuk RPJMD 2025-2029. Terdapat lima kategori utama, yaitu kawasan pertumbuhan, kawasan komoditas unggulan, kawasan swasembada pangan, air, dan energi, kawasan afirmasi, serta kawasan konservasi/rawan bencana. Kawasan pertumbuhan meliputi pusat-pusat ekonomi seperti Surabaya dan kawasan sekitarnya, serta kawasan industri dan pariwisata di Malang-Batu dan Bromo-Tengger-Semeru. Kawasan komoditas unggulan berfokus pada pertanian tebu dan ekonomi biru, dengan potensi kelautan di daerah seperti Pacitan dan Banyuwangi. Kawasan swasembada pangan, air, dan energi melibatkan daerah dengan fokus ketahanan pangan seperti Bangkalan dan Sampang. Kawasan afirmasi mencakup wilayah seperti Madura yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan memajukan daerah terpencil. Sementara itu, kawasan konservasi/rawan bencana mencakup area seperti Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru, yang membutuhkan perhatian khusus terkait perlindungan alam dan potensi bencana. Peta ini juga menunjukkan jaringan infrastruktur vital, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan, yang mendukung konektivitas antarwilayah.

Berdasarkan kondisi sosial ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur, didapatkan prioritas lokasi penanganan kewilayahan berdasarkan pada Lampiran IV Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang membahas terkait Arah Pembangunan Kewilayahan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029.

Kawasan Perkotaan Madiun menjadi salah satu lokasi prioritas yang mencakup wilayah Kota Madiun, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan. Adapun prioritas tersebut mencakup:

1. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Madiun, antara lain melalui - Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu.
    a. Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau.
    b. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan.
    c. Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Inisiasi pembangunan Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Madiun (PHTC).
3. Inisiasi pengembangan TPST Regional Madiun.
4. Pengembangan SPAM Regional Madiun.
5. Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Madiun.
6. Pengembangan kota agropolitan Madiun.
7. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. Soedono Madiun (PHTC).
8. Preservasi jalan ruas Madiun-Magetan dan Madiun-Ponorogo-Pacitan.
9. Pengembangan Kawasan Industri Ngawi, sebagai hinterland dari Kawasan Perkotaan Madiun.
10. Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas.
11. Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya.
12. Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan biodefense pada RSAU dr. Efram Harsana (Kab. Magetan)

Lebih Lanjut, Berdasarkan RKPD Provinsi Jawa Timur, terdapat 9 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

Gambar 4. 15 Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026
Sumber: RKPD Jawa Timur Tahun 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Disamping itu, tujuan dan sasaran yang menjadi acuan Pembangunan daerah tahun 2026, adalah sebagai berikut:

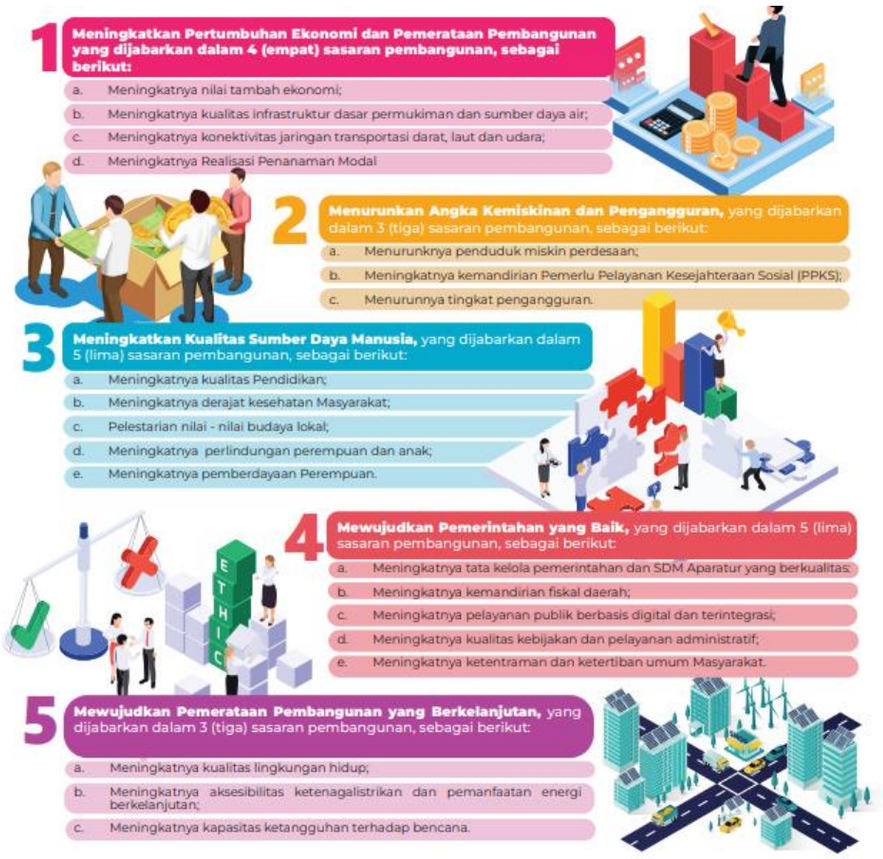

Gambar 4. 16 Tujuan dan Sasaran Provinsi Jawa Timur Tahun 2026
Sumber: Ranwal RKPD Jawa Timur Tahun 2026

4.2.3 Prioritas dan Tema Pembangunan Kota Madiun Tahun 2026

Penyusunan prioritas pembangunan Kota Madiun Tahun 2026 didasarkan pada upaya sinkronisasi dengan prioritas pembangunan di tingkat nasional dan provinsi. Selain itu, prioritas tersebut mengacu pada strategi, arah kebijakan, serta program prioritas yang diuraikan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Proses perumusan ini juga mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu strategis yang muncul, serta masukan dari pokok-pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Analisis lebih rinci terkait strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan dalam RPJMD 2025-2026 disajikan dalam tabel berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 4. 2 Prioritas, Sasaran, dan Program Prioritas Pembangunan dalam RKPD Tahun 2026

Prioritas	SASARAN	Program Nomenklatur	Program Unggulan	Keterangan
1	2	3	4	5
Prioritas 1 : Pengembangan ekonomi inklusif yang didukung oleh infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui transformasi ekonomi.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat berstandar global	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Menambah jumlah armada bus sekolah untuk SD dan SMP	Dinas Perhubungan
		Program Penataan Bangunan Gedung	Memberikan bantuan Makan Siang bagi siswa SD dan SMP Negeri di Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya Daya Saing ekonomi sektor strategis	Program Pemasaran Pariwisata	Peningkatan pembangunan ekonomi inklusif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan produktivitas daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing nasional serta internasional	Dinas Perdagangan
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatkan dan mengoptimalkan bantuan modal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Madiun melalui pembentukan unit usaha di setiap kelurahan salah satunya dengan Mendukung Program Pemerintah Pusat Pembentukan Koperasi Merah Putih guna memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat Kota Madiun maupun luar Kota Madiun	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian		
		Program Pengembangan UMKM	Peningkatan produktivitas daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing nasional serta internasional	
			Peningkatan pembangunan ekonomi inklusif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Peningkatan produktivitas daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing nasional serta internasional	
	Peningkatan Kualitas Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peningkatan produktivitas daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing nasional serta internasional	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal		
		Program Pelayanan Penanaman Modal		
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan ketahanan pangan melalui bantuan subsidi pupuk bagi petani yang berhak menerima	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian		
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		
	Menurunnya Pengangguran	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Mewujudkan *Peceland* sebagai prasarana dan sarana pertanian maju, mandiri, dan modern bekerja sama dengan investor dalam negeri maupun luar negeri	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Mewujudkan pola ruang kawasan tepi sungai sebagai bagian wisata Kota Madiun	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		
		Program Penyelenggaraan Jalan	Mendukung Pelaksanaan Program Pembangunan Ring Road Timur	
		Program Kawasan Permukiman	Mengurangi kawasan kumuh perkotaan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Dinas Perhubungan
	Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota Madiun yang nyaman, tentram, dan berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
		Program Pengembangan Perumahan	Mengurangi kawasan kumuh perkotaan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan atas pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	OPD Pengampu Prioritas 1
			Tersedianya informasi publik di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akurat, terbuka, benar, dan tidak menyesatkan	
Prioritas 2 : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing global	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat berstandar global	Program Pengelolaan Pendidikan	Memberikan bantuan Laptop bagi siswa SD dan SMP Negeri di Kota madiun	Dinas Pendidikan
			Memberikan bantuan Seragam Sekolah bagi siswa SD dan SMP Negeri di Kota madiun	
			Meningkatkan Pembelajaran dengan Penggunaan Papan Tulis Digital untuk SD dan SMP Negeri	
			Peningkatan Sarana dan Prasaran berupa laboratorium terpadu di tiap kecamatan	
			Meningkatkan program *outdoor learning centre* bagi siswa SD dan SMP Negeri	
			Penyediaan ruang baca yang memadai di sekolah dan ruang publik untuk meningkatkan kompetensi unggul	
		Program Pembinaan Perpustakaan		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno		Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustaakan dan Arsip Daerah
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Mendukung Program Pemerintah Pusat yaitu Sekolah Rakyat	Dinas pendidikan
			Meningkatkan Bantuan Beasiswa S1, S2, S3 bagi ASN (Khusus Guru) dan Non ASN	
		Program Pengembangan Kurikulum	Bantuan Beasiswa S1, S2, dan S3 dalam/ Luar Negeri bagi lulusan Sekolah Lanjutan Atas	
			Meningkatkan kemampuan siswa SD SMP bekerja sama dengan lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri	
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat berstandar international	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Peningkatan pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Mendukung program pemerintah pusat di bidang kesehatan/pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun	
			Mendukung Pemberian Bantuan makanan bergizi bagi masyarakat	
	Meningkatnya Daya Saing ekonomi sektor strategis	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan pembangunan ekonomi inklusif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	Menurunnya Pengangguran	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan atas pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) (pindahan dari misi 6)	OPD Pengampu Prioritas 2
			Tersedianya informasi publik di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akurat, terbuka, benar, dan tidak menyesatkan	
		Program Kepegawaian Daerah	Meningkatkan pengembangan karir Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam menunjang kualitas Aparatur Sipil Negara di Kota Madiun	
	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Bermasyarakat	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penguatan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan budaya masyarakat maju	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		
Prioritas 3 : Peningkatan harmonisasi sosial dalam mewujudkan ketahanan sosial dan budaya yang berkualitas.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat berstandar international	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Peningkatan pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pengendalian Penduduk		
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Mewujudkan ketahanan keluarga	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5
		Program Rehabilitasi Sosial	Mendukung Pemberian Bantuan makanan bergizi bagi masyarakat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Mewujudkan ketahanan keluarga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		
		Program Perlindungan Perempuan		
		Program Perlindungan Khusus Anak		
	Menurunnya Kemiskinan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatkan asuransi bagi tenaga kerja sektor informal bagi Masyarakat Kota Madiun	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Peningkatan Daya Beli Mayarakat	Program Pemberdayaan Sosial	Mendukung Pemberian Bantuan makanan bergizi bagi masyarakat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Mewujudkan ketahanan keluarga	
	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Peningkatan pembangunan ekonomi inklusif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan	Dinas Perdagangan
	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan ketahanan pangan melalui bantuan subsidi pupuk bagi petani yang berhak menerima	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Penanganan Kerawanan Pangan		
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Mendukung Pelaksanaan Program Pembangunan Ring Road Timur	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
	Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	Program Pengeolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota Madiun yang nyaman, tentram, dan berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)		
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		
		Program Pengelolaan Persampahan		
		Program Penatagunaan Tanah		
	Meningkatnya ketahanan dan mitigasi bencana	Program Penanggulangan Bencana	Memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat pada saat prabencana, saat bencana, dan pasca bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		Satuan Polisi Pamong Praja
	Terwujudnya kondusivitas dan stabilitas daerah	Program Penanganan Bencana	Meningkatkan harmoni sosial sehingga tercipta solidaritas dan persatuan yang kuat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Memberdayakan masyarakat dalam keamanan lingkungan melalui SISKAMLING terpadu	Satuan Polisi Pamong Praja
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan atas pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	OPD Pengampu Prioritas 3
			Tersedianya informasi publik di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akurat, terbuka, benar, dan tidak menyesatkan	
	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Bermasyarakat	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Menyapa masyarakat dengan seni budaya masyarakat Kota Madiun	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengembangan Kebudayaan	Mewujudkan hubungan antar budaya baik di dalam negeri maupun luar negeri sebagai upaya mempromosikan Kota Madiun sebagai Kota Pendekar	
			Mewujudkan wisata budaya pencak silat guna mendukung wisata Madiun Mendunia	
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pelestarian cagar budaya Kota Madiun untuk peningkatan daya tarik wisata dalam negeri dan luar negeri	
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaaan	Meningkatkan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		
			Memberikan penguatan kepada keluarga melalui pendidikan anti narkoba dan sejenisnya (NAPZA) untuk meningkatkan daya tangkal dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap di Kota Madiun	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		
Prioritas 4 : Peningkatan transformasi tata kelola melalui kelembagaan kolaboratif, digitalisasi, dan partisipasi masyarakat.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat berstandar global	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatkan Program satu RT satu free wifi	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat berstandar international	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5
	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Mewujudkan ketahanan keluarga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi secara berkelanjutan	Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah
			Meningkatkan peran serta masyarakat melalui *Open Government Partnership (OGP*)	
	Meningkatnya Daya Saing ekonomi sektor strategis	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Peningkatan produktivitas daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing nasional serta internasional	Dinas Perdagangan
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen		
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Peningkatan produktivitas daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing nasional serta internasional	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatkan fasilitas pengembangan usaha yang berpotensi bernilai ekspor melalui pelatihan dan pengembangan teknik pengemasan produk sehingga dapat diekspor hingga ke luar negeri	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatkan pemasaran produk industri unggulan melalui kerja sama dengan minimarket sebagai penopang pendapatan masyarakat Kota Madiun	
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Peningkatan dan mengembangkan pemasaran kemasan air mineral produk Perusahaan Daerah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah	Sekretariat Daerah
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan bantuan dana corporate social responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Peningkatan Kualitas Investasi	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Peningkatan produktivitas daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing nasional serta internasional	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Peningkatan ketahanan pangan melalui bantuan subsidi pupuk bagi petani yang berhak menerima	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan		
		Program Perizinan Usaha Pertanian		
	Menurunnya Kemiskinan	Program Hubungan Industrial	Meningkatkan asuransi bagi tenaga kerja sektor informal bagi Masyarakat Kota Madiun	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Menurunnya Pengangguran	Program Penempatan Tenaga Kerja	Peningkatan lapangan kerja baik sektor formal maupun non formal dengan melibatkan BUMN/BUMD/sektor swasta untuk menyediakan lapangan kerja	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatkan bantuan perbaikan prasarana dan sarana lingkungan masyarakat kepada setiap Rukun Tetangga melalui ketua Rukun Tetangga (RT)	Kecamatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5
	Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota Madiun yang nyaman, tentram, dan berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup
	Terwujudnya kondusivitas dan stabilitas daerah	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Memberdayakan masyarakat dalam keamanan lingkungan melalui SISKAMLING terpadu	Kecamatan
			Membangun kepercayaan yang tinggi di antara individu dan kelompok sehingga tercipta lingkungan yang aman, stabil, dan transparan	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bantuan Insentif Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Madiun	Badan Pendapatan Daerah
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi secara berkelanjutan	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penguatan atas pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		OPD Pengampu Prioritas 4
			Tersedianya informasi publik di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akurat, terbuka, benar, dan tidak menyesatkan	
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Tersedianya layanan informasi publik yang berkualitas bagi setiap warga masyarakat Kota Madiun sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
		Program Pengelolaan Arsip		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Perlindungan dan Penyelamatan arsip		
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan Kerjasama Internasional	Sekretariat Daerah
			Program Walikota Bersama Rakyat (WBR) di Kelurahan guna menampung aspirasi masyarakat.	
	Pemerintahan Bersih Korupsi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Meningkatkan zona integritas wilayah bebas korupsi (ZI-WBK)	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatkan kerja sama Pemerintah Kota Madiun dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberikan pendidikan anti korupsi pada Aparatur Sipil Negara Kota Madiun	
			Meningkatkan keikutsertaan seluruh elemen masyarakat dalam pengawasan jalannya roda pemerintahan sehingga terbangunnya budaya yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Daerah	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya pelayanan publik yang prima dan profesional berbasis digital	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatkan pelayanan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil		
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		
	Peningkatan Inovasi Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing serta Produktivitas daerah dan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan melalui inovasi Kompetisi Inovasi Kota Madiun (KIAT) Peningkatan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Program Riset Dan Inovasi Daerah		
	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Bermasyarakat	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman masyarakat	Kecamatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tahap selanjutnya dalam proses perumusan prioritas pembangunan mengacu pada hasil Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRD, sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.3.

POKIR tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat yang diserap melalui mekanisme reses pada masa sidang serta kunjungan kerja. Hasil dari kegiatan tersebut kemudian dirangkum dalam POKIR DPRD, yang mencakup berbagai aspek pendukung prioritas pembangunan. Selanjutnya, informasi tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi SIPD, sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Usulan Pokok Pikiran DPRD yang Masuk dalam Aplikasi SIPD

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI
1	2	3	4
1	Bantuan Alat Kesenian	Mohon bantuan seperangkat Alat Hadroh lengkap untuk Musholla Zamzami, yang nantinya alat tersebut dapat digunakan untuk kegiatan warga sekitar	Musholla Zamzami, Jalan Jambu Kembar, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Kota Madiun
		keaneka ragaman seni musik harus di jaga dan dikembangkan	Jl. Sendang, Kota Madiun
		Pengadaan Reog Blandotan Macan Putih	RW 12 Kelurahan Pandean , Kota Madiun
		Dari Kelompok Pengajian Grup Hadroh Musholla Baitul Rohmah Pasar Besi pimpinan bapak Mohfadhol jalan imam Bonjol minta seperangkat alat Hadrah beserta seragam pengajian untuk 30 orang.	Grup Hadroh Mushola Baitul Rohman Pasar Besi Jalan Imam Bonjol, Kota Madiun
2	Normalisasi Sungai atau Saluran	Plengsengan saluran banyak yang ambrol/rusak	Jalan Adaspulosari Kelurahan Ngeggong, Kota Madiun
		Pembangunan plengsengan tanggul yang sering longsor di depan pemukiman	Perum Bumi winongo Indah II Kelurahan Manguharjo, Kota Madiun
		Sering terjadi banjir karena saluran rusak	Jalan Argomanis dan darmomanis Perumnas manisrejo utara, Kota Madiun
		Salauran atau sungai yang dangkal dan menyempit	Jalan Bima dan Jalan Gatotkaca Kel Kartoharjo, Kota Madiun
		Talut Sungai ambrol	Jalan Tawangbhakti Belang terminal madiun Kel.Tawangrejo, Kota Madiun
		Perbaikan saluran karena banyak yang sudah rusak sehingga air meluber ke jalan dan perkampungan warga	Jl. Parang Kusumo, Kota Madiun
		Karena kondisi saluran sudah rusak sehingga bila hujan air meluap	Jl. Towiryan RW 02, Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
		Belum ada tersedianya saluran air di Jl. Aneka Sari Gg. Masjid sebelah timur sehingga kalau hujan sering banjir. Dengan panjang 500 M	Jl. Aneka Sari, Kota Madiun
		Saluran yang sempit dan dangkal serta sudah banyak yang ambrol sehingga kalau hujan air meluap serta air di lapangan tidak bisa masuk kesaluran	Lapangan Rejomulyo, Kota Madiun
		Pengerukan sungai Gempol yang terjadi pendangkalan	Jl. Cenderawasih, Kota Madiun
		Pembuatan plengsengan sungai	Rt 1 Rw 1, Kanigoro, Kartoharjo, Volume 50 meter. Rt 6 Rw 2, Kanigoro, Kartoharjo, Volume 50 meter. Rt 16 Rw IV, Kanigoro, Kartoharjo, Barat makam kojo, Volume 50 meter Rt 21, Kanigoro, Kartoharjo, Jalan Masjid dekat perumahan Kanigoro, Volue 30 meter. Rt, Kota Madiun
		Rehab dan normalisasi saluran di gang apotek setiabudi timur. Pengajuan Normalisasi sungai dan saluran untuk mengembalikan fungsi saluran pada kapasitas maksimalnya dengan melakuan pengedukan/pengerukan sedimen, perbaikan plengsengan.	Gang apotek setiabudi timur, Kota Madiun
		Pengajuan Normalisasi sungai dan saluran untuk mengembalikan fungsi saluran pada kapasitas maksimalnya dengan melakuan pengedukan/pengerukan sedimen, perbaikan plengsengan. Penutupan saluran di barat makam sobrah moyo menuju kali gempol	Jalan sikatan, nambangan lor, Manguharjo, Kota Madiun Jalan sikatan, nambangan lor, Manguharjo, Kota Madiun, Kota Madiun
		Setiap hujan saluran air meluap mengakibatkan banjir sampai masuk rumah.	Jalan Candi Sari, Patihan, Manguharjo, Kota Madiun, Kota Madiun
3	Paving Jalan Lingkungan Kelurahan di Kec. Kartoharjo	Paving sudah mengelupas atau rusak ingin pengajuan perbaikan paving 3D	Jl. Thamrin Gg. I Kel. Klegen RT. 15-16 (Pengusul Bpk. Joko Cakil No. Hp 085233930866), Kota Madiun
		Paving sudah pada rusak dengan ini melakukan pengajuan Pavingisasi	Jl. Jaya Gg. I Kelurahan Klegen (Pengusul Bpk. Giri Wilayah No. Hp 081335175757), Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
		Daerah Jalan Trengguli Gg. 4; Jalan Diponegoro Gg. 1; Jalan Diponegoro Gg. 2; Jalan Kamboja Gg. Masjid di wilayah Kelurahan Oro-oro Ombo, perlu dipaving untuk memudahkan mobilitas masyarakat sekitar dan membuat kondisi lingkungan tampak semakin rapi	Jalan Trengguli Gg. 4; Jalan Diponegoro Gg. 1; Jalan Diponegoro Gg. 2; Jalan Kamboja Gg. Masjid, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kota Madiun, Kota Madiun
		Jalan tidak merata, diperlukan paving 3 dimensi	Gang Nusantara 2, Kanigoro, Kartoharjo, Kota Madiun, Kota Madiun
4	Paving Jalan Lingkungan Kelurahan di Kec. Manguharjo	Perbaikan Pavingisasi baru karena yang lama sudah rusak	RT. 14 RW. 5 Jl. Sultan Agung Gg. Puspita Kelurahan winongo. (Pengusul bpk Suyono No. Hp 081232822823), Kota Madiun
		Jalan Paving kampung yang rusak	Jalan Temugiring kelurahan Ngeggong, Kota Madiun
		Paving rusak banyak yang pecah dan tidak rata sehingga membahayakan pengguna jalan .	Jl. Merak Kota Madiun, Kota Madiun
		Belum adanya paving jalan ke Perumahan	Perumahan Sogaten RT/RW 20/07 Kel. Sogaten, Kota Madiun
		Pavingisasi 3 dimensi	JL Kaswari Gg. I dan Gg. II, Kota Madiun
		Kondisi paving di Jalan Gambir Sawit Selatan Gg. III sudah banyak yang rusak sehingga perlu adanya perbaikan	Jalan Gambir Sawit Selatan Gg. III, Sogaten, Kota Madiun, Kota Madiun
5	Paving Jalan Lingkungan Kelurahan di Kec. Taman	Paving di Jalan Salak Barat VII perlu diperbaiki karena kondisi sudah rusak	Jalan Salak Barat VII, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Kota Madiun
		Kondisi jalan atau paving di wilayah Perum Griya Banjar Asri Banjarejo sudah banyak yang rusak, sehingga perlu dilakukan perbaikan jalan atau pavingisasi kembali	Perum Griya Banjar Asri, Jalan Banjarwaru Gg. IV, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Kota Madiun
		Pavingisasi musholla Nurul Islam	Jl. Kampar, Kota Madiun
		pavingisasi gang lapangan	Jl. Ciliwung Gg. Lapangan, Kota Madiun
		paving sudah rusak	JL. Barito RT 5 tembus PMM JL. Cokroaminoto, Kota Madiun
		pavingisasi jalan tanah	Jl. Jatisiwur RT 19 RW 8 Demangan, Kota Madiun
		pavingisasi dan resapan air	Jl. Swolobumi Gg Saptaloka, Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
		Jalan rusak diperlukan pavingisasi	Perumahan WKI 1 RT 58 RW. 18, Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Kota Madiun
6	Pemasangan/ Perbaikan Speed Bump	Banyak kendaraan dengan kecepatan tinggi melalui pemukiman masyarakat	Jalan di perum taman asri, Kota Madiun
7	Pembangunan atau Perbaikan Bangunan Pelengkap Jalan (Trotoar)	Trotoar yang rusak dan berlubang	jalan hayam wuruk utamanya sebelah selatan, Kota Madiun
		Kondisi tutup saluran tidak merata, banyak yang lubang/tanpa tutup sehingga membahayakan pejalan kaki dan bisa terjerumus ke got/saluran	Jl. Sumber Karya, Kota Madiun
		Perbaikan selokan dan trotoar	Jl. Biliton (depan Hiswana) timur jalan, Kota Madiun
		permohonan pembuatan trotoar	Jl. Kapten Tendean, Kota Madiun
8	Pembangunan atau Rehabilitasi Gedung Daerah	Pembangunan teras Gedung Bulu Tangkis RW 05	JL. Tawangsari RT/RW 15/05, Kota Madiun
9	Pembangunan Jalan	Pengaspalan Jalan yang masih tanah	Jalan tanggul sebelah barat Jembatan Manguharjo , Kota Madiun
		Banyak aspal jalan yang mengelupas dan berlubang sehingga sangat membahayakan pengguna jalan dan bisa menimbulkan kecelakaan.	Jl. Glatik Nambangan Kidul, Kota Madiun
		Kondisi jalan aspal saat ini sudah banyak yang mengelupas dan berlubang sehingga membahayakan pengguna jalan.	Jl. Nila Nambangan Kidul , Kota Madiun
		Pembuatan jalan tembus (sudah di musrenbangkel)	Belakang asrama haji, jl. Kencur gang buntu tembus sebelah timur Puskesmas Ngegong, Kota Madiun
		Pengaspalan di jalan Tunggul josenan. Beberapa bahkan belum diaspal masih jalan tanah	Jalan Tunggul Josenan, Kota Madiun
		Jalan rusak, untuk segera di tindak lanjuti pengaspalan jalan	Jalan Ki Ageng Selo, Kanigoro, Kartoharjo, Kota Madiun, Kota Madiun
		Jalan rusak, untuk segara ditindak lanjuti	Selatan Lapangan Kampir Rt 8, Kanigoro, Kartoharjo, Kota Madiun, Kota Madiun
		Jalan hancur. Untuk segera ditindak lanjuti	Jalan Wirabumi , Jalan Sultan Agung, Jalan Menak, Manguharjo, Kota Madiun, Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
10	Pembangunan Saluran air/ Gorong - gorong	Belum adanya saluran air yang mengakibatkan banjir	Jalan Majapahit kelurahan Winongo, Kota Madiun
		Sering terjadi banjir	Jalan Hayam wuruk GG I Kel. Manguharjo, Kota Madiun
		Rusak sudah usul 3 tahun yang lalu, banyak tanggul yang jebol sehingga ketika hujan air meluap	Jl. Podang Barat, Kota Madiun
		Perbaikan saluran air yang rusak	Jalan Taman Raya dan Sugiyo Pranoto, Kota Madiun
		Mengatasi lompatan atau luberan air saluran ke jalan dan rumah warga	Jl. Sari Mulyo, Kota Madiun
		Saluran air di tengah , kurang dalam dan lebar sehingga kalau hujan air melompat . Melanjutkan pembangunan yang sebelah Masjid	Jl. Mulya Sari, Kota Madiun
		Penutupan saluran air keliling lapangan dan pembuatan jogging track lapangan rejomulyo dan pagar aksesoris sebelah timur	Jl. Pelita Tama, Kelurahan Rejomulyo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun
		Pembuatan saluran tengah	Jl. Prajuritan Gg. SD RT 14, Kota Madiun
		Pembuatan saluran/ gorong-gorong	Jl. Nitinegoro RT. 6 dan RT. 9, Kota Madiun
		Pembuatan selokan	Sepanjang jalan Mandiri RT. 14, Kota Madiun
		Di jalan salak tengah 6 dan 7 belum ada saluran air sehingga air menggenang menyebabkan banjir	Jalan salak tengah 6 dan 7, Kota Madiun
		Perlunya pembangunan saluran air baru berbentuk u-dith karena air tidak bisa jalan sehingga menyebabkan banjir. Perlu segera ditangani mengingat seringnya banjir di daerah ini. Kanan kiri belum ada saluran.	Jalan Pilang Widya PilangnBango - Piring, Kota Madiun
11	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Usaha Tani	Jalan Lahan Pertanian/sawah yang masih tanah	Jalan Sawah utara Pengadilan Agama Kelurahan Ngeggong, Kota Madiun
		Pembangunan untuk kelompok Tani Margo Rejo	Timur kelurahan Tawangrejo, Kota Madiun
12	Pembangunan/ Perbaikan Pagar Makam	Pembangunan Pagar Makam (belum ada pagar tembok pembatas keliling)	Jl. Nitinegoro RT. 5 RW. 2 Kelurahan Demangan (Pengusul Bpk. Jumadi No. Hp 08135609293), Kota Madiun
13	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau Taman	Penambahan tempat duduk dan ornamen payung di lapak	Lapak Serayu Barat (dulu sumur bur) Jl. Trunojoyo Kota Madiun, Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
		Pemotongan dahan pohon di jl salak RT 39 depan rumahe Tiar/ depane Narto pisang.. Pemotongan dahan pohon ada 5 pohon dah besar² resiko d musim hujan angin kl roboh	Jalan salak RT 39 depan Narto pisang, Kota Madiun
		Perlu ditambahkan tempat wisata buatan di RTH Nambangan Kidul untuk menjadi daya tarik pengunjung	RTH Merak Indah Nambangan Kidul, antara Jalan Elang II dan Jalan Parkit, Nambangan Kidul, Kota Madiun, Kota Madiun
14	Penambahan Rambu - Rambu Jalan	Pemasangan Traffict light dikarenakan kendaraan semakin ramai	Pertigaan JJalan Setiabudi dan Slamet Riyadi, Kota Madiun
		Tikungan di Jalan Kemuning seringkali membahayakan pengendara yang lewat hingga menyebabkan kecelakaaan. Mohon adanya penambahan cermin cembung pada lokasi tersebut	Jalan Kemuning, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Kota Madiun
15	Penataan Kampung Tematik	Penebangan Pohon, karena pohon sudah sangat lebat dan membahayakan pengendara.	Jalan Slamet Riyadi no 11 Kelurahan Klegen, Kartoharjo Kota Madiun (Sebrang TK Al Hadid), Kota Madiun
16	Pengadaan Sarana Prasarana Kelurahan Wilayah Kec. Manguharjo	Pengadaan tempat pemandian jenazah disetiap kelurahan pada kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.	Setiap makam di seluruh Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Kota Madiun
17	Pengadaan Sarana Prasarana Kelurahan Wilayah Kec. Taman	Masjid belum ada speaker, jika adzan serta kegiatan ibadah tidak ada pengeras suara. Mohon untuk segera di tindak lanjuti	Masjid Jalan Cokrobasonto, Josenan, Taman, Kota Madiun, Kota Madiun
18	Pengadaan Sarpras Olahraga	Pembangunan Lapangan Olahraga	Jalan Tirta Raya, Nambangan Lor, Manguharjo, Kota Madiun, Kota Madiun
19	Pengajuan Renovasi Gapura	Pembanguan Gapuro Batas wilayah antara Kota madiun dan kab.madiun	Batas wilayah kota madiun dan kab.Madiun jalan Hayam wuruk kel.Manguharjo, Kota Madiun
20	Penyediaan Peralatan Persampahan	Di lingkungan Jalan Merak Barat perlu ditambahkan pengadaan bak sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan	Jalan Merak Barat, Nambangan Kidul, Kota Madiun, Kota Madiun
21	Penyediaan/ Perbaikan Lampu Jalan	Kondisi penerangan di Jalan Citarum masih minim sehingga perlu dilakukan pemasangan lampu jalan	Jalan Citarum, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Kota Madiun
		Sepanjang jalan di tepian tanggul Nambangan Kidul kalau malam gelap, sehingga berpotensi besar terjadinya tindak kejahatan di sepanjang jalan	(sepanjang tanggul) Nambangan Kidul, Kota Madiun
		Kurangnya Penerangan jalan	Jalan Tawang Bhakti Kelurahan Tawangrejo, Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
		Kalau malam gelap karena tidak ada sumber penerangan di sepanjang jalan tepi sungai	Jl. Towiryan, Bumi Mas II, Kota Madiun
		Kurangnya penerangan di jalan Towangsan Gg 1 RT 65 sehingga kalau malam gelap dan rawan tindak kejahatan pencurian	Jl. Towangsan, Kota Madiun
		Lampu PJU jalan sudah rusak mohon dillakukan perbaikan lampu PJU pada 7 titik sejauh jarak 300 meter persegi	Jl. Jaya Kelurahan Klegen (Pengusul Bpk. Aris Prasetiyanto 081216099266), Kota Madiun
		Jalan Gang Gelap sering untuk lewat dengan ini melakukan Pengajuan Pembangunan Lampu Penerangan jalan Gang 2 titik baru per 35 meter persegi jaraknya beserta lampunya	Jl. Jaya Gg. I Kelurahan Klegen (Pengusul Bpk. Giri Wilayah No. Hp 081335175757), Kota Madiun
		Pengajuan Pembangunan Lampu Jalan Titik Baru dengan jarak 60 meter persegi (Karena jalan masuk gang tembus gelap dengan ini mengajukan 3 titik baru tiang listrik dan lampunya.	Jl. koperasi no. 31 RT. 12 RW. 4 kel. banjarejo (Pengusul Bpk. Dwi Sugianto No. Hp 081224961903), Kota Madiun
		Pengajuan Pembangunan Lampu Jalan dengan jarak 202 meter persegi (Jalan gang Gang I dan II gelap belum tersedia lampu penerangan dengan ini mengajukan titik baru 12 tiang listrik beserta lampunya)	RT. 004 RW 002 Kelurahan Taman (Sebelah utara SDN Taman 1/BO) (Pengusul Bpk. Doni Setiawan No. Hp 082217327052), Kota Madiun
		Jalan Gang I dan II gelap belum tersedia lampu penerangan dengan ini mengajukan pembangunan titik baru lampu penerangan jalan 16 titik baru dengan jarak 200 meter persegi.	Jalan Wuni 51b dan 47b Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Kejuron (Pengusul Bpk. Didik Puji No. Hp. 087811359256), Kota Madiun
		Mohon adanya pemasangan Lampu PJU di 4 titik yang ada di wilayah Kelurahan Oro-oro Ombo yaitu Jalan Trengguli Gg. 4; Jalan Diponegoro Gg. 1; Jalan Diponegoro Gg. 2; Jalan Kamboja Gg. Masjid. Hal ini dikarenakan penerangan di 4 lokasi tersebut masih kurang sehingga membahayakan pengendara yang lewat maupun warga sekitar	Jalan Trengguli Gg. 4; Jalan Diponegoro Gg. 1, Jalan Diponegoro Gg. 2; Jalan Kamboja Gg. Masjid, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kota Madiun, Kota Madiun
		pengadaan penerangan jalan umum	Jl. Towangsan Gg. I, Kota Madiun
		lingkungan gelap perlu penambahan penerangan jalan umum	Jl. Pesanggrahan VII Taman, Kota Madiun
		Belum adanya lampu penerangan jalan di daerah tersebut	JL. Margobawero Gg. 1 & 3 RT 11, Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
		Jalan tidak ada penerangan sama sekali	Jalan Anuraga Bakti, Rw 27, Kanigoro, Kartoharjo, Kota Madiun, Kota Madiun
		Penambahan lampu PJU Perumahan Larasati jalan salak VII	Perumahan Puri Larasati jalan salak barat VII, Kota Madiun
		Jalan tidak ada penerangan lampu, untuk segera ditindak lanjuti	Jalan Cokrobasonto, Perum Puri Amarta, Taman, Kota Madiun , Kota Madiun
22	Perbaikan Jalan	Jalan rusak dan berlubang	Jalan adaspulosari barat ring road kel. Ngeggong, Kota Madiun
		Kondisi aspal di Jalan Koperasi sudah banyak yang berlubang sehingga perlu dilakukan pengaspalan kembali	Jalan Koperasi, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Kota Madiun
		Kondisi aspal di Jalan Banjarwaru Gg. IV sudah banyak yang rusak dan berlubang. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaspalan jalan pada area tersebut	Jalan Banjarwaru Gg. IV, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Kota Madiun
		Jalan aspal rusak banyak yang berlubang	Perum taman Asri Kel.Banjarejo, Kota Madiun
		Keadaan jalan yang rusak dan berlubang	Jalan Sembada Mulya Kelurahan Rejomulyo, Kota Madiun
		Jalan Kendalisodo Gg. Pambutulan I - IV Tolong diperhatikan karena sudah rusak dan berlubang	Jalan Kendalisodo Gg. Pambutulan I - IV Kelurahan Demangan Kota Madiun. (Pengusul Bpk. Jumadi No. Hp 081335609293), Kota Madiun
		Banyak jalan yang sudah retak	Jl. Borobudur Kelurahan Madiun Lor, Kota Madiun
		Kondisi jalan di sepanjang pinggiran sungai daerah Pilangbango sudah rusak dan perlu adanya perbaikan	Sepanjang jalan pinggiran Sungai Pilangbango, Kelurahan Pilangango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Kota Madiun
		Jalan rusak dan berlubang	Jl. Indragiri sambung Jl. Siak, Kota Madiun
		Jalan banyak yang rusak	JL. Sri Kencono, Kota Madiun
		Jalan banyak yang sudah rusak	JL. Sri Wibowo, Kota Madiun
		Banyak jalan yang sudah rusak	JL. Sri Sedono, Kota Madiun
		Perbaikan jalan menuju ke sawah di Timur Kelun belum selesai	Timur desa Kelun, Kota Madiun
		Pengaspalan ulang	Jl. Banda, Kota Madiun
		pengaspalan jalan	jl. paus, Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
		Peningkatan jalan/ (aspal) inspeksi / jalan tangkis ..aset proyek Jalan sekitar Bengawan solo ..mengalami kerusakan parah setelah d gunakan truk proyek pembuatan jembatan patihan padas..lokasi jln pendekar patihan	Jalan Pendekar Patihan, Kota Madiun
		Jalan rusak, bolong bolong, berlubang, sudah 7 tahun diusulkan tidak ada perbaikan termasuk via musrenbang Taman dan Mojorejo. Sudah rusak parah bahkan menimbulkan korban jiwa karena beberaoa ruas rusak parah	Jalan Pesanggrahan 8 terus ke Pesanggrahan 4 taman kota madiun, Kota Madiun
		Aspal waktunya diperbaiki lagi beberapa ruas sudah mengelupas	Jalan salak barat V RW 12 Taman Kota Madiun, Kota Madiun
		Perlunya perbaikan aspal yang rusak	Jalan salak barat 3 RW 12 kelurahan taman Kota madiun, Kota Madiun
		Perbaikan Aspal jalan yang sudah rusak dan perlu diperbaiki segera	Jalan Salak 2 RW 12 taman kota madiun, Kota Madiun
		Aspal jalan salak 2 sebelah selatan sudah rusak dan perlu perbaikan segera	Jalan salak 2 sebelah selatan , Kota Madiun
		Pengaspalan jalan Jl marga bakti RT 36 Mojorejo (ngrowo) (Pak Tris RT) Lokasi timur masjid ngrowo 50m masuk jalan ke utara	Jl marga bakti RT 36 Mojorejo (ngrowo) (Pak Tris RT) Lokasi timur masjid ngrowo 50m masuk jalan ke utara, Kota Madiun
		Jalan janursari aspal rusak berat utamanya gang 1,4,5	Jalan janursari 4,5, Kota Madiun
		Aspal rusak, waktunya diaspal kembali. Beberapa timbul genangan karena saluran air tidak lancar.	Jalan pilang madya, Kota Madiun
		Kondisi Jalan Puspowarno (arah ke sawah) mulai banyak yang berlubang dan terjal. Oleh karena itu mohon dapatnya untuk dilakukan pengecoran atau pengaspalan kembali pada jalan tersebut.	Jalan Puspowarno, RT 08/ RW 03, Sogaten, Kota Madiun, Kota Madiun
23	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kondisi rumah Ibu Supinah di Jalan Kampar Gg. Buntu No. 22c sudah lama rusak dan belum ada perbaikan hingga saat ini. Kerusakan terjadi di bagian genteng atau atap rumah serta lantai rumah yang sudah rusak sehingga perlu adanya perbaikan	Rumah Ibu Supinah, Jalan Kampar Gg. Buntu No. 22c, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Kota Madiun
		Kondisi rumah milik Bapak Meitonang sudah rusak dan atapnya bocor. Adapun ukuran rumah panjang 6 meter dan	Rumah Bapak Meitonang, Jalan Siak No. 6B, RT 29/ RW 10, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
		lebar 3 meter, dengan luas 18 meter persegi	Kota Madiun, Kota Madiun
24	Perbaikan Saluran Air/ Gorong - Gorong	Saluran drainase di Jalan Nangka sudah rusak dan perlu diperbaiki karena tidak mampu menampung air dengan baik sehingga apabila musim hujan sering terjadi banjir di daerah sekitarnya	Jalan Nangka (sisi kanan dan kiri), Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Kota Madiun
		Kondisi selokan atau saluran air di Jalan Sarean sisi timur sudah rusak dan perlu diperbaiki karena wilayah tersebut sering terjadi banjir atau genangan air apabila turun hujan	Jalan Sarean sebelah timur (mulai depan mushola ke selatan), Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Kota Madiun
		Perbaikan Saluran Air (Sering terjadi banjir karena debit air melebihi kapasitas saluran)	RT. 16 RW. 5 Jl. Sultan Agung Kelurahan Winongo (Pengusul Bpk. Basuki Kushartono No. Hp 081234142354), Kota Madiun
		Perbaikan Saluran Air (Sering terjadi banjir karena debit melebihi kapasitasnya)	RT. 15 RW. 5 Jl. Sultan Agung Kelurahan Winongo (Pengusul Bpk. Yuli Harsongko No. Hp. 081259429904)), Kota Madiun
		Perbaikan Saluran air (Saluran air tidak bisa menampung air yang debitnya berlebihan akibatnya terjadinya banjir)	RT. 14 RW. 5 Jl. Sultan Agung Kelurahan Winongo (Pengusu Bpk. Suyono No. Hp. 081232822823), Kota Madiun
		Kondisi saluran di wilayah Perum Griya Banjar Asri, Banjarejo sudah rusak sehingga tidak dapat menampung air dengan baik apalagi saat musim penghujan sering menyebabkan air menggenang atau banjir	Perum Griya Banjar Asri, Jalan Banjarwaru Gg. IV, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Kota Madiun
		Kondisi saluran di sepanjang Jalan Terate sudah rusak sehingga menyebabkan terjadinya genangan air atau banjir di sekitar wilayah tersebut	Jalan Terate, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Kota Madiun
		Banyak selokan yang ambrol yang mengakibatkan banjir	Jalan Nusa Penida, Kota Madiun
		Sering terjadi Laka pengendara motor atau sepeda jatuh ke selokan atau saluran air dengan ini mengusulkan pengajuan dan pengaadaan Penutup saluran air atau selokan.	Jl. Nusatenggara dan Jl. Nusa Penida Kelurahan Klegen RT. 18 (Pengusul Bpk. Hendra Budi Utomo No.Hp 0857454188866), Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
		Pembuatan tutup Saluran air (Karena sering terjadi kecelakaan jatuh ke saluran)	Jalan Minak Kuncar Gg. Belak Belok RT. 13 RW. 4 Kelurahan Winongo (Pengusul Bpk. Adjar Siswotoro No.Hp 082139805791), Kota Madiun
		Pengajuan Pengadaan Perbaikan Sungai dan Saluran air (Sering terjadi Kebanjiran Jalan Sukarno Hatta Gg. Galuh RT. 13 RW. 5 Kelurahan Demangan)	Jalan Sukarno Hatta Gg. Galuh RT. 13 RW. 5 Kelurahan Demangan (Pengusul Bpk. Tri Bowanto No Hp. 087811350256), Kota Madiun
		selokan yang ada sudah tidak layak	Jl. Purnamasari (barat), selokan utara jalan, Kota Madiun
		saluran yang ada sudah tidak layak, lokasi sering banjir	Jl. Madyasari Rt. 15 (sebelah barat, selokan utara jalan), Kota Madiun
		Perbaikan selokan	Jl. Sasana Sari (barat lapangan Rejomulyo), selokan barat jalan, Kota Madiun
		perbaikan saluran air	Jl. Kusumasari (selokan timur jalan ke utara), Kota Madiun
		Banyak berlubang besar & air menggenang 3 hari tidak surut supaya diperbaiki di Jalan Opak	Jl. Opak, Kota Madiun
		Area Jalan Mayjen Sungkono belakang Pasar Pancasila gorong-gorong area belakang Pasar Pancasila bila hujan sering banjir karena selokan yang ada disana terlalu kecil dan kurang dalam/kurang lebar, volume air yang besar dari hujan membuat rumah warga kemasukan air	Belakang Pasar Pancasila Jl. Mayjen Sungkono depan Maxy Gold RT/RW 03/01, Kota Madiun
		Perlu adanya penutupan saluran air di Jalan Anggrek untuk kenyamanan warga sekitar	Pertigaan Jalan Anggrek ke Jalan Kemuning, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kota Madiun, Kota Madiun
		Meneruskan gorong-gorong yang sudah dilakukan di wilayah kelurahan Pandean, untuk diteruskan ke wilayah timur Jl. Citarum Kelurahan Taman	Jl. Citarum (timur), Kota Madiun
		Kondisi saluran mengalami kerusakan	Jl. Barito RT 5 tembus PMM JL. Cokroaminoto, Kota Madiun
		Saluran tidak dapat menampung air dengan baik, apalagi dengan adanya hujan sehingga sering mengalami banjir	Selatan perempatan Jl. Ciliwung sampai Jl. Soekarno Hatta, Kota Madiun
		Pengajuan perbaikan saluran air / gorong - gorong dimana dirasa sudah rusak, masih	Jalan Candisari gang 3 RT 22, Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
		kondisi tanah yang akan diganti menjadi U dit, penutupan saluran.	
		Saluran yang ada memerlukan perbaikan karena ambles. Sudah diajukan mulai 2021. Berkoordinasi dengan lurah juga namun Masalah sampai sekarang belum tertangani	*Jalan Tapas Sari GG. 2 RT. 002/ RW. 001, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun*, Kota Madiun
		Perlunya segera dilakukan perbaikan saluran karena saluran yg ada sekarang tidak menampung dan untuk menambah lebar jalan. Dan juga dengan pertimbangan pembuatan selokan baru mengingat belum pernah dibuatkan selokan baru dan selokan lama kecil tidak mampu utk menampung air hujan	Jalan tanjung manis gang xi manisrejo, Kota Madiun
		Pengajuan perbaikan saluran air / gorong - gorong dimana dirasa sudah rusak, masih kondisi tanah yang akan diganti menjadi U dit, penutupan saluran.	Jalan sembada Mulya ke selatan, Kota Madiun
		Perbaikan saluran dengan u dith sudah waktunya diperbaiki beberapa area ambrol dan bth perbaikan. Belum pernah diperbaiki sejak swadaya oleh warga. Perlu diperbaiki segera	Jalan Manggala Mulya kanan dan kiri, Kota Madiun
		Perlu adanya penutupan cor irigasi atau saluran di Jalan Mayjend Sungkono Gg. Pancasila untuk melindungi saluran air dari sampah yang dapat mengakibatkan banjir	Jalan Mayjend Sungkono Gg. Pancasila, RT 63 / RW 15, Nambangan Lor, Kota Madiun, Kota Madiun
		Perbaikan saluran air/gorong-gorong	Jalan Graha Manis 3 perumnas 2 manisrejo RT. 45, RW. 10 Kecamatan Taman, Kota Madiun, Kota Madiun
		Perbaikan saluran air/gorong-gorong	Jalan Nitinegoro Gang Mushola RT. 05 RW.02 Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Kota Madiun
		Perbaikan saluran air/gorong-gorong	Jalan Swolobumi Gang Kunti Rt.08 Rw. 03 Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Kota Madiun
		Pengajuan perbaikan saluran air/gorong-gorong dimana dirasa sudah rusak, masih kondisi tanah yang akan diganti menjadi U dit, penutupan saluran.	Perumahan WKI 1 rt. 58 RW. 18 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun.(Lorong Blok D-E Lorong Blok F-G, Lorong Blok H-1), Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
25	Usulan Penambahan Titik Wifi Gratis	Penambahan CCTV di wilayah Perumahan Kanigoro, Kartoharjo, Kota Madiun	Perumahan Asabri, Kanigoro, Kartoharjo, Kota Madiun, Kota Madiun

Sebagaimana yang termuat pada Tabel 4.3 diatas, penentuan prioritas pembangunan selanjutnya didasarkan pada hasil penelaahan permasalahan pembangunan dan perumusan isu strategis. Isu strategis yang menjadi agenda dan prioritas pembangunan Kota Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan melalui pemberdayaan sektor-sektor unggulan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berdaya saing global melalui pengembangan keterampilan, inovasi, dan penguasaan teknologi terkini.
3. Peningkatan kualitas modal sosial melalui penguatan jaringan sosial yang inklusif, serta harmonisasi masyarakat
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berdaya saing global melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis teknologi.
5. Peningkatan infrastruktur berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan ketahanan energi.

Secara detail berikut dijabarkan lebih lanjut isu strategis serta masalah Kota Madiun Tahun 2026, yaitu:

Tabel 4. 4 Isu Strategis dan Masalah Pembangunan Kota Madiun Tahun 2026

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS RKPD 2026
1	2
Belum terpenuhinya target SPM pelayanan bidang pendidikan. SPM terkait proporsi guru dengan kualifikasi minimal S1/DIV	Isu Strategis 1: Peningkatan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan melalui pemberdayaan sektor-sektor unggulan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Angka Melek Huruf di usia produktif belum 100 %	
Kualitas literasi siswa perlu ditingkatkan	
Minat Baca Masyarakat masih belum optimal	
Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melambat	
Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang berpendidikan tinggi masih belum optimal	
Masih ada Balita Kurang Gizi dan stunting	
Masih terdapat kasus KLB DBD	
Angka kematian bayi 4,5/1000 kelahiran hidup	
pekerja yang mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan perlu dioptimalkan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2
Masih perlunya peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di berbagai bidang	
4,38% penduduk masih di bawah garis kemiskinan	
Capaian Pola Pangan Harapan (PPH) belum optimal	
Tingkat konsumsi makan ikan masih belum optimal	
Rasio pendapatan petani dengan produksi	
kesejahteraan masyarakat masih harus ditingkatkan	
Kesejahteraan Petani dan Peternak perlu ditingkatkan	
Kontribusi sektor perdagangan, jasa dan industri pengolahan terhadap PDRB yang cenderung stagnan	Isu Strategis 2: Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing global melalui pengembangan keterampilan, inovasi, dan penguasaan teknologi terkini. Isu Strategis 5: Peningkatan infrastruktur berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekologi.
Daya saing daerah belum optimal	
Belum ada pasar yang sesuai standar	
Kualitas Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Industri Kecil belum optimal	
Laju Inflasi Kota Madiun rawan mengalami fluktuasi	
Ketimpangan pendapatan semakin melebar	
Peningkatan kualitas pariwisata daerah sesuai dengan rencana pengembangan dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Madiun	
Nilai dan iklim investasi masih perlu ditingkatkan	
Kesejahteraan Petani dan Peternak perlu ditingkatkan.	
Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tinggi	
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kota Madiun perlu ditingkatkan	
Belum adanya pelayanan angkutan umum massal berbasis Buy The Service (BTS)	
Kualitas kinerja infrastruktur perkotaan belum optimal	
Masih perlunya peningkatan kualitas rumah layak huni	
Rumah tangga yang terlayani sanitasi layak masih belum optimal	
Kualitas infrastruktur perkotaan seperti jalan, jembatan, dan jaringan air perlu ditingkatkan	
Masih kurangnya ketersediaan dan kualitas RTH	
Kualitas Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) belum optimal	
Penanganan Sampah yang berasal dari Rumah Tangga masih rendah.	
Masih kurangnya ketersediaan dan kualitas RTH	
Volume sampah yang ada di TPA hampir mendekati kapasitas maksimal	
Adanya potensi bencana di Kota Madiun yang memiliki kategori resiko sedang, Kota Madiun masih berpotensi bencana	
Masih terdapatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak.	Isu Strategis 3: Peningkatan kualitas modal sosial melalui penguatan jaringan sosial yang inklusif, serta harmonisasi masyarakat
Masih terdapat kejadian kriminal di Kota Madiun	
Penegakan Perda dan Perwal di masyarakat perlu ditingkatkan	
Masih memiliki potensi terjadinya konflik sosial	
Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dioptimalkan	Isu Strategis 4: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berdaya
Capaian SAKIP Kota Masih Perlu ditingkatkan	
Nilai SPBE Kota Madiun masih sebesar 4,57	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di perangkat daerah perlu ditingkatkan	saing global melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis teknologi.
Capaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih belum optimal	
capaian indeks kualitas kebijakan belum optimal	
belum ada kerjasama antar kota antar negara	
Indeks Profesionalitas ASN sebesar 84,95 belum optimal	
Wilayah Bebas Korupsi masih terbatas	
Indeks Inovasi Daerah masih perlu ditingkatkan, Capaian Tahun 2022 sebesar 53,96 dan meningkat pada Tahun 2024 sebesar 67,08	

Sumber: Bapppeda Kota Madiun, 2024

Sebagaimana yang termuat pada Tabel 4.4 diatas, sesuai dengan berbagai telaahan RPD, Pokir DPRD, permasalahan pembangunan dan isu strategis, diperlukan suatu langkah strategis melalui berbagai arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Madiun Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 5 Isu Strategis, Strategi, Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2026

ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2026
1	2	3	4
Isu Strategis 1: Peningkatan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan melalui pemberdayaan sektor-sektor unggulan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.	Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif terutama pada sektor unggulan daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif melalui pengembangan perdagangan, industri, pariwisata, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif	• Pengembangan ekonomi inklusif yang didukung oleh infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui transformasi ekonomi.
Isu Strategis 2: Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing global melalui pengembangan keterampilan, inovasi, dan penguasaan teknologi terkini. Isu strategis 3: Peningkatan kualitas modal sosial melalui	Meningkatnya pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan kapasitas sumber daya dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial serta mewujudkan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial, keamanan, ketertiban dan pelestarian budaya	• Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing global • Peningkatan harmonisasi sosial dalam mewujudkan ketahanan sosial dan budaya yang berkualitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4
penguatan jaringan sosial yang inklusif, serta harmonisasi masyarakat			
Isu Strategis 4: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berdaya saing global melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis teknologi.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan profesional melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu	Peningkatan Profesionalisme ASN, penyediaan data dan informasi yang valid dan mutakhir, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	• Peningkatan transformasi tata kelola melalui kelembagaan kolaboratif, digitalisasi, dan partisipasi masyarakat.
Isi Strategis 5: Peningkatan infrastruktur berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekologi.	Optimalisasi pengelolaan transportasi, Infrastruktur perkotaan dan Pengendalian lingkungan hidup	Pembangunan/ pemeliharaan Infrastruktur perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup, manajemen dan rekayasa transportasi	• Pengembangan ekonomi inklusif yang didukung oleh infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui transformasi ekonomi.

Sumber: Bapppeda Kota Madiun, 2025

Kebijakan Pembiayaan pendukung Standar Pelayanan Minimal pada Tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 4. 6 Rencana Pembiayaan Anggaran Pendukung Standart Pelayanan Minimal (SPM) Kota Madiun Tahun 2026

NO	KATEGORI	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN ANGGARAN 2025		OPD PELAKSANA
							LOKASI/TARGET	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PENDIDIKAN									
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	satuan pendidikan pada SDN 01 kartoharjo	51.150.000	Dinas Pendidikan
		Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional					satuan pendidikan pada SDN 02 kartoharjo	10.500.000	
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional					satuan pendidikan pada SDN 01 klegen	82.200.000	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional					satuan pendidikan pada SDN 02 klegen	19.800.000	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional					satuan pendidikan pada SDN 03 klegen	50.850.000	
		Iklim keamanan SD					satuan pendidikan pada SDN 04 klegen	12.600.000	
		Iklim keamanan SMP					satuan pendidikan pada SDN oro-oro ombo	33.350.000	
		Iklim kebinekaan SD					satuan pendidikan pada SDN 01 rejomulyo	18.450.000	
		Iklim kebinekaan SMP					satuan pendidikan pada SDN 01 kanigoro	10.800.000	
		Iklim inklusivitas SD					satuan pendidikan pada SDN 02 kanigoro	25.650.000	
		Iklim inklusivitas SMP					satuan pendidikan pada SDN 03 kanigoro	25.050.000	
							satuan pendidikan pada SDN sukosari	26.750.000	
							satuan pendidikan pada SDN pilangbango	43.350.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							satuan pendidikan pada SDN 01 tawangrejo	25.950.000	
							satuan pendidikan pada SDN 02 tawangrejo	15.000.000	
							satuan pendidikan pada SDN kelun	57.450.000	
							satuan pendidikan pada SDN 01 manguharjo	64.750.000	
							satuan pendidikan pada SDN 01 nambangan lor	43.500.000	
							satuan pendidikan pada SDN 02 nambangan lor	19.950.000	
							satuan pendidikan pada SDN 01 madiun lor	13.950.000	
							satuan pendidikan pada SDN 02 madiun lor	14.850.000	
							satuan pendidikan pada SDN 03 madiun lor	109.500.000	
							satuan pendidikan pada SDN 04 madiun lor	49.050.000	
							satuan pendidikan pada SDN 05 madiun lor	76.350.000	
							satuan pendidikan pada SDN 01 nambangan kidul	23.700.000	
							satuan pendidikan pada SDN 02 nambangan kidul	21.150.000	
							satuan pendidikan pada SDN 03 nambangan kidul	46.800.000	
							satuan pendidikan pada SDN 01 Winongo	48.150.000	
							satuan pendidikan pada SDN 02 Winongo	29.600.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							satuan pendidikan pada SDN ngegong	28.500.000	
							satuan pendidikan pada SDN patihan	39.000.000	
							satuan pendidikan pada SDN 01 pangongangan	44.700.000	
							satuan pendidikan pada SDN sogaten	27.000.000	
							satuan pendidikan pada SDN 01 taman	105.750.000	
							satuan pendidikan pada SDN 02 taman	30.500.000	
							satuan pendidikan pada SDN 03 taman	12.450.000	
							satuan pendidikan pada SDN 01 pandean	50.850.000	
							satuan pendidikan pada SDN 02 pandean	78.750.000	
							satuan pendidikan pada SDN banjarejo	99.100.000	
							satuan pendidikan pada SDN 01 mojorejo	16.500.000	
							satuan pendidikan pada SDN 02 mojorejo	77.850.000	
							satuan pendidikan pada SDN 01 manisrejo	51.450.000	
							satuan pendidikan pada SDN 02 manisrejo	49.050.000	
							satuan pendidikan pada SDN 03 manisrejo	24.300.000	
							satuan pendidikan pada SDN 04 manisrejo	26.950.000	
							satuan pendidikan pada SDN 01 demangan	16.500.000	
							satuan pendidikan pada SDN 02 demangan	23.400.000	
							satuan pendidikan pada SDN 01 josenan	26.400.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							satuan pendidikan pada SDN 02 josenan	26.100.000	
							satuan pendidikan pada SDN 03 josenan	59.450.000	
							satuan pendidikan pada SDN kejuron	15.000.000	
							satuan pendidikan pada SDN kuncen	15.000.000	
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	68 SatuanPendidikan	392.178.720	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	satuan pendidikan pada SMPN 1	161.800.000	
							satuan pendidikan pada SMPN 2	160.200.000	
							satuan pendidikan pada SMPN 3	116.000.000	
							satuan pendidikan pada SMPN 4	150.200.000	
							satuan pendidikan pada SMPN 5	116.800.000	
							satuan pendidikan pada SMPN 6	127.400.000	
							satuan pendidikan pada SMPN 7	180.600.000	
							satuan pendidikan pada SMPN 8	105.000.000	
							satuan pendidikan pada SMPN 9	96.800.000	
							satuan pendidikan pada SMPN 10	105.000.000	
							satuan pendidikan pada SMPN 11	213.400.000	
							satuan pendidikan pada SMPN 12	131.600.000	
							satuan pendidikan pada SMPN 13	149.400.000	
							satuan pendidikan pada SMPN 14	89.400.000	
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	24 Satuan Pendidikan	107.238.970	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	6 Satuan Pendidikan	816.729.370	
3	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	960 Orang	3.538.800.000	
		Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	153 Satuan Pendidikan	282.890.000	
KESEHATAN									
1		Pelayanan kesehatan ibu hamil	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2852 Orang	516.274.100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2		Pelayanan kesehatan ibu hamil			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2836 Orang	56.538.000	
3		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2836 Orang	351.742.000	
4		Pelayanan kesehatan balita			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10568 Orang	419.984.220	
5		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31683 Orang	30.681.000	
6		Pelayanan kesehatan pada usia produktif			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	129392 Orang	137.591.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33407 Orang	61.395.000	
8		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18910 Orang	26.939.000	
9		Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6906 Orang	11.062.000	
10		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	383 Orang	121.184.304	
11		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulusis			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5649 Orang	63.679.000	
12		Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6436 Orang	26.890.000	
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1		Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR	677.088.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	5 Unit	329.315.500	
					Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	1 Unit	804.878.500	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1		Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	66.360.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah kabupaten/kota							
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1		Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	50 Orang	883.305.100	Satuan Polisi Pamong Praja
					Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	200 laporan	196.634.234	
2		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	4 Dokumen	539.835.570	
					Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	189.950.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		Pelayanan informasi rawan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	450 Orang	117.189.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4		Pelayanan pencehan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Bencana Kabupaten/ Kota	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	2 Unit	8.351.000	
					Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	11 Kawasan	62.219.100	
5		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	42 Orang	42.876.000	
					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	42 Orang	13.110.000	
		SOSIAL							
1		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	186 Orang	650.430.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti		Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	72 Orang	146.036.500	
3		Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	23.347.970	
4		Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	16.410.000	
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	310 Orang	1.784.070.030	
					Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	77 Orang	511.510.500	
5		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	23.488.600	
					Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	12.709.400	
					Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	7.400.000	

Sumber: Bapppeda Kota Madiun, 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Empat prioritas pembangunan Kota Madiun untuk tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.5 di atas, dapat dilihat pada gambar berikut.

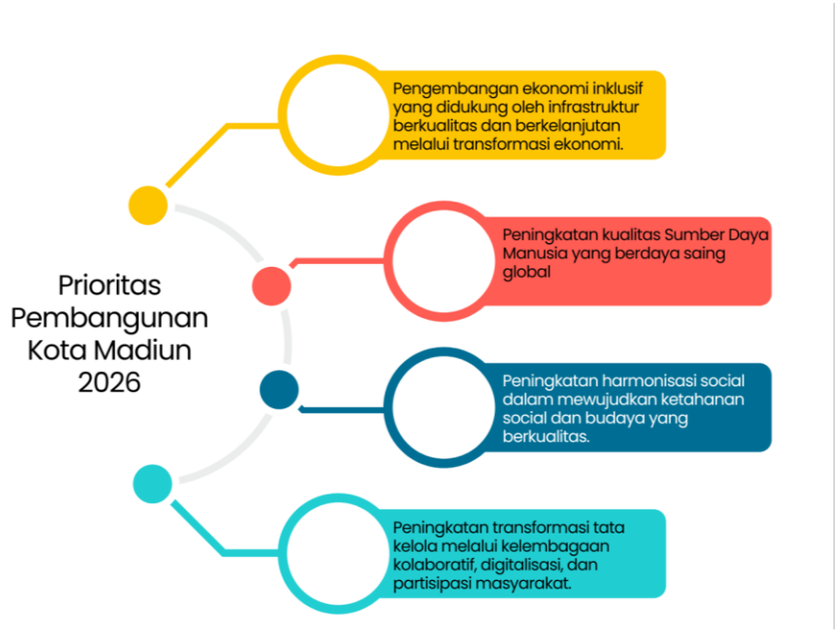

Gambar 4. 17 Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2026

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 4.17 diatas, empat prioritas pembangunan Kota Madiun tahun 2026 sebagai berikut:

1. Pengembangan ekonomi inklusif yang didukung oleh infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui transformasi ekonomi.

   Pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan di Kota Madiun sangat penting untuk mendorong transformasi ekonomi yang inklusif. Dengan memanfaatkan potensi sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif, Kota Madiun dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas dan berkelanjutan. Inovasi dalam sektor-sektor tersebut akan menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing daerah, serta memberikan nilai tambah pada produk lokal. Selain itu, sektor unggulan yang berkembang dengan baik juga dapat menarik investasi, yang pada gilirannya dapat memperkuat struktur ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

   Selain itu, fokus pada produktivitas menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan meningkatkan efisiensi produksi dan penerapan teknologi yang lebih modern, sektor-sektor unggulan di Kota Madiun dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Masyarakat akan merasakan manfaatnya melalui peningkatan akses terhadap pekerjaan yang layak, pelatihan keterampilan, dan peluang kewirausahaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pengembangan ekonomi berbasis inovasi dan produktivitas ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang tidak hanya meningkatkan pertumbuhan, tetapi juga memastikan pemerataan manfaat ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Madiun. Pemerintah kota Madiun berupaya meningkatkan transformasi ekonomi inklusif melalui:

a. Meningkatkan bantuan modal, pelatihan, pemasaran, dan pengemasan produk bagi UMKM serta mengoptimalkan unit usaha di setiap kelurahan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
b. Membuka peluang kerja di sektor formal dan informal dengan melibatkan BUMN, BUMD, sektor swasta, dan investor.
c. Memberikan bantuan perbaikan sarana lingkungan melalui RT serta mewujudkan kawasan tepi sungai sebagai destinasi wisata.
d. Memberikan subsidi pupuk bagi petani kurang mampu dan mewujudkan prasarana pertanian modern melalui kerja sama dengan investor.
e. Meningkatkan asuransi tenaga kerja informal, pelayanan kesehatan, dana CSR untuk masyarakat, dan pemasaran produk daerah guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah

2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing global

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Madiun sangat penting untuk memastikan kemajuan dan keberlanjutan pembangunan daerah. SDM yang berkualitas akan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan daya saing Kota Madiun baik di tingkat regional maupun nasional. Untuk itu, transformasi sosial yang mencakup pendidikan, keterampilan, dan kesadaran sosial menjadi kunci utama dalam membentuk masyarakat yang produktif, kreatif, dan inovatif. Dengan memperkuat pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta meningkatkan kesadaran sosial, Kota Madiun dapat menciptakan SDM yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan global.

a. Memberikan bantuan makan siang, laptop, dan seragam sekolah bagi siswa SD dan SMP Negeri Kota Madiun.
b. Meningkatkan pembelajaran dengan papan tulis digital dan program outdoor learning centre untuk siswa SD dan SMP Negeri, bekerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

c. Menyediakan beasiswa pendidikan tinggi (S1, S2, S3) untuk lulusan SMA dan ASN/non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, baik dalam negeri maupun luar negeri.
d. Meningkatkan akses pembelajaran online melalui program satu RT satu free wifi.
e. Menambah jumlah armada bus sekolah untuk siswa SD dan SMP.
f. Menyediakan ruang baca yang memadai di sekolah dan ruang publik untuk mendukung kompetensi unggul di tingkat nasional dan internasional.

3. Peningkatan harmonisasi social dalam mewujudkan ketahanan sosial dan budaya yang berkualitas.

Peningkatan harmonisasi sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan Kota Madiun yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan sosial dan budaya yang berkualitas. Hal ini mencakup upaya untuk menciptakan suasana saling menghargai, toleransi, dan kerukunan di antara masyarakat yang multikultural, serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan sosial. Dalam mewujudkan ketahanan sosial, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan keadilan, serta memberikan ruang bagi ekspresi budaya yang beragam. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan Kota Madiun dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada stabilitas sosial dan pengembangan budaya yang berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai dengan:

a. Meningkatkan kualitas lingkungan yang nyaman dan harmoni sosial melalui solidaritas, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman masyarakat.
b. Membangun kepercayaan antar individu dan kelompok untuk menciptakan lingkungan yang aman, stabil, transparan, serta memberdayakan masyarakat melalui SISKAMLING terpadu.
c. Mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan efektif untuk menjaga stabilitas keamanan.
d. Memberikan dukungan sosial dan penguatan keluarga melalui pendidikan anti narkoba (NAPZA) untuk mencegah penyalahgunaan.

4. Peningkatan transformasi tata kelola melalui kelembagaan kolaboratif, digitalisasi, dan partisipasi masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Peningkatan transformasi tata kelola melalui kelembagaan kolaboratif, digitalisasi, dan partisipasi masyarakat di Kota Madiun sangat penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Kelembagaan kolaboratif memungkinkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, untuk bekerja sama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang lebih holistik dan inklusif. Dengan adanya kerjasama ini, potensi yang dimiliki oleh setiap pihak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan memberikan kemudahan dalam pengelolaan data, layanan publik, dan transparansi anggaran, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan memungkinkan kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Dengan pendekatan ini, tata kelola pemerintahan di Kota Madiun akan semakin responsif, inovatif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Pemerintah Kota Madiun berupaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintah melalui langkah-langkah berikut:

a. Menyelenggarakan Program aspirasi masyarakat dan menyediakan layanan informasi publik yang berkualitas sesuai peraturan.
b. Meningkatkan transparansi dan akurasi informasi publik yang disediakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
c. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.
d. Meningkatkan pelatihan, pengembangan, dan pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Madiun untuk mendukung pelayanan berkualitas.
e. Memperkuat pengawasan pemerintah dengan melibatkan masyarakat, serta mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja dan kerja sama dengan KPK untuk pendidikan anti-korupsi bagi ASN.
f. Membangun kepercayaan yang tinggi antar individu dan kelompok untuk menciptakan lingkungan yang aman, stabil, transparan, serta memberdayakan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui SISKAMLING terpadu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

g. Mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif, guna menciptakan stabilitas keamanan di Kota Madiun.

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Madiun dapat dilihat dalam tabel berikut.

Gambar 4. 18 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Madiun Tahun 2026
Sumber:Bappenas RI, Bapperov Jatim dan Bapppeda Kota Madiun, 2025

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 4.18 diatas, berdasarkan prioritas pembangunan, permasalahan dan isu strategis daerah, serta sinkronisasi dengan prioritas Provinsi dan Nasional, maka Tema RKPD Kota Madiun Tahun 2026 adalah "Penguatan Fondasi Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Tata Kelola yang Inklusif dan Berkelanjutan Bersama Masyarakat Membangun Kota Mendunia". Adapun arti tema yang ditetapkan dalam RKPD Kota Madiun Tahun 2026 ini diharapkan dapat mencapai tujuan utama pembangunan yaitu masyarakat yang sejahtera. Selanjutnya, Perkembangan tema pembangunan dalam RKPD Kota Madiun tahun 2023-2026 dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 4. 19 Perkembangan Tema Pembangunan dalam RKPD Kota Madiun Tahun 2023-2026
Sumber: Bapppeda Kota Madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4.2.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2026

Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2026 disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026. Prioritas dan sasaran pembangunan merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan Tahun 2026 yang berkorelasi dengan pencapaian pembangunan secara umum. Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2026 digambarkan dalam Gambar 4.20.

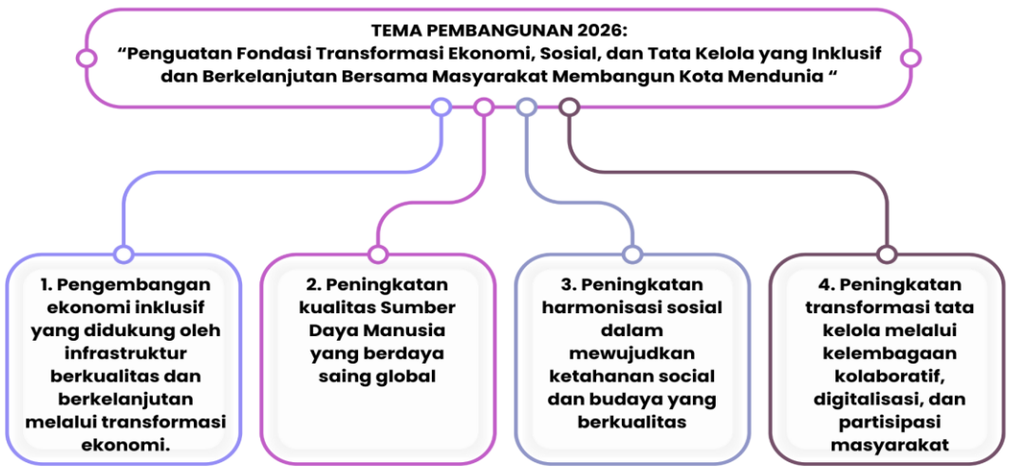

Gambar 4. 20 Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2026
Sumber: Bapppeda Kota Madiun, 2025

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 4.20 diatas, disajikan rincian Prioritas yang menjadi Sasaran Pembangunan Tahun 2026, sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2026

NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE	TARGET CAPAIAN	
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
MISI 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global						
T1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor	84,51	84,51 – 84,78	84,60 – 85,96
S1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat berstandar global	Literasi Numerasi SD dan SMP	Nilai	87,78	88,15	88,58
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,11	12,15	12,36
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,54	14,57	14,60
S2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat berstandar international	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,67	75,74	76,00
S3	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skor	95,26	95,50	95,82

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7
S4	Menurunnya pengangguran	Produktifitas Tenaga Kerja	Rupiah (juta)	112,88	114,73	116,61
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,30	4,50 – 3,94	4,50 – 3,94
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,60	70,70	70,90
S5	Peningkatan Daya Beli Mayarakat	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah	17.518	17.720	18.130
MISI 2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi inklusif berbasis kewilayahan yang merata dan berkeadilan						
T2	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	Skor	4,26	4,26	4,30
		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,73	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28
		Indeks Gini	Skor	0,435	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394
S6	Meningkatnya Daya Saing ekonomi sektor strategis	Rasio PDRB Sektor Akomodasi Makan dan Minum (ADHK)	%	5,4	5,40 – 6,00	5,40 – 6,00
		Rasio PDRB Sektor Perdagangan (ADHK)	%	23,59	23,59	23,61
		Rasio PDRB Sektor Jasa (ADHK)	%	21,16	21,20	21,30
		Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	%	14,46	14,46	14,51
S7	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi	Tingkat Inflasi	%	1,31	3±1	3±1
S8	Peningkatan Kualitas Investasi	*Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*	Skor	3,75	3,74 – 3,14	3,74 – 3,14
S9	Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	4,38	4,38 – 3,92	4,38 – 3,92
MISI 3: Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan						
T2	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	Skor	4,26	4,26	4,30
		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,73	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28
		Indeks Gini	Skor	0,435	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394
S10	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur	Skor	98,62	98,70	98,80
S11	Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	62,21	66,23	66,31
S12	Meningkatnya ketahanan dan mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana (H&V 2021)	Skor	76,88	75,60	73,75
MISI 4: Meningkatkan harmoni sosial, keamanan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat						
T2	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	Skor	4,26	4,26	4,30
		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,73	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28
		Indeks Gini	Skor	0,435	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394
S13		Indeks Rasa Aman	Skor	84,16	84,52	84,93

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7
	Terwujudnya kondusivitas dan stabilitas daerah	Indeks Ketenteraman	Skor	84,23	84,72	85,34
MISI 5: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis keterbukaan informasi publik						
T3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	91,95	91,95	92,50
S14	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Opini BPK terhadap LKPD	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP
		Nilai SAKIP Kota Madiun	Nilai	81,03	81,03	81,34
MISI 6: Meningkatkan integritas pemerintahan melalui perilaku antri korupsi dan pelayanan publik yang bersih dan profesional						
T3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	91,95	91,95	92,50
S15	Pemerintahan Bersih Korupsi	Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai	77,07	80,15	80,42
		Nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP)	Nilai	96	96,05	96,44
		Persentase Unit Kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	%	20	20	40
S16	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Skor	68,67	68,67	70,39
		Indeks Reformasi Hukum	Skor	91,02	91,02	91,15
S17	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik yang prima dan profesional berbasis digital	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Madiun	Skor	88,74	88,74	89,25
		Indeks Masyarakat Digital	skor	49,86	49,86	49,92
		Indeks Profesionalitas ASN	skor	84,95	84,95	84,95
MISI 7: Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui inovasi dalam pembangunan berkelanjutan						
T3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	91,95	91,95	92,50
S18	Peningkatan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Skor	67,09	67,09	68,43
MISI 8: Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya masyarakat yang berkualitas						
T2	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	Skor	4,26	4,26	4,30
		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,73	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28
		Indeks Gini	Skor	0,435	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394
S19	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Bermasyarakat	Indeks Kerukunan	Skor	78,04	78,20	84,80

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Selain itu untuk mendukung pencapaian target serta penguatan birokrasi di kota madiun telah dilaksanakan sejumlah inovasi serta inovasi baru yang akan dilaksanakan guna menunjang pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tabel 4.8.

Tabel 4. 8 Inovasi Daerah dalam rangka Mempercepat Pencapaian Target Kinerja

No	Judul Inovasi	Pelaksana
1	2	3
1	*Be Smart* Madiun (Beasiswa Mahasiswa Rakyat Kota Madiun)	Dinas Pendidikan
2	ICS (INTEGRATED CLUSTER SCHOOL) Lejitkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah Satu Kawasan Kota Madiun	Dinas Pendidikan
3	Jumpa Lagi (Jum'at Pagi Berlafadz Religi)	Dinas Pendidikan
4	Tugu Pendikar Sakti (Satu Guru Sebagai Pendidik Berkarakter Dengan Satu Karya Prestasi)	Dinas Pendidikan
5	Jelita Perisai	Dinas Pendidikan (SMPN 1)
6	Aplikasi Android "KOINSTAR "(Konseling Peserta didik Kota Pendekar) Sarana Anti Bullying/Perundungan Peserta didik Kota Madiun Sebagai Pendukung Perwujudan Kota Madiun Layak Anak	Dinas Pendidikan (SMPN 1)
7	ROTANSA SPENSA (Ragam Olahan Taman Sekolah SMPN 1)	Dinas Pendidikan (SMPN 1)
8	PELAJU KAMARDIKAN (Potensi Kekayaan Lokal Sekolah Mewujudkan Karya Kreatifitas Peserta Didik Peduli dan Berbudaya Lingkungan)	Dinas Pendidikan (SMPN 1)
9	BETA MENJAMU dengan MEDICO SORITA (BElajar matemaTikA MENjadi MUdah dengan Media MEDICO SORITA)	Dinas Pendidikan (SMPN 1)
10	KELINGKING MAHARAJA (Konseling dalam Melakukan Pendampingan Permasalahan Pubertas Remaja)	Dinas Pendidikan (SMPN 1)
11	JAWARA PENDEKAR NUSANTARA (Jelajah Wawasan Berkarakter sebagai Peningkatan Indeks Kualitas Belajar melalui Numerasi dan Literasi dengan Lingkungan dan Teknologi Ramah Anak)	Dinas Pendidikan (SMPN 1)
12	JUK DIK KESI (Jumat Sehat Pendidikan Kesehatan Reproduksi)	Dinas Pendidikan (SMPN 2)
13	SACC (Spenda *Art Culture Carnival*)	Dinas Pendidikan (SMPN 2)
14	SANIK - Sayur Organik	Dinas Pendidikan (SMPN 2)
15	Gema Elika	Dinas Pendidikan (SMPN 3)
16	PRESTASI SPEN'GA (E Presensi Sakti Siswa Siswi SMP Negeri 3 Madiun)	Dinas Pendidikan (SMPN 3)
17	PRAKATA MENTARI SI-G (Pra KBM Bakat Minat untuk Meningkatkan Karakter, Literasi dan Numerasi melalui Situs-G)	Dinas Pendidikan (SMPN 3)
18	LASKAR BK SPEN'GA (Layanan Aplikasi Kedisiplinan Siswa Kepada orang Tua BK SMP Negeri 3 Madiun)	Dinas Pendidikan (SMPN 3)
19	TASBIH STEPA (Tahsin Al-Qur'an, Tadarrus, Beserta Hafalan SMP Negeri 4 Madiun	Dinas Pendidikan (SMPN 4)
20	Bank Besti	Dinas Pendidikan (SMPN 4)
21	KITA STEPA (Kelas Bersih Karakter Diraih STEPA)	Dinas Pendidikan (SMPN 4)
22	GEN KEHATI STEPA (Green Entrepreneur Keanekaragaman Hayati SMP Negeri 4 Madiun)	Dinas Pendidikan (SMPN 4)
23	LITERNOL GUA 21 TUGU PENDIKAR SAKTI (Literasi Teknologi Guru Abad 21 untuk mewujudkan Satu Guru Pendidik Berkarakter Satu Karya Prestasi)	Dinas Pendidikan (SMPN 5)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3
24	JUBAH KI BAHAG (Jum'at Berkah Kita Bahagia)	Dinas Pendidikan (SMPN 5)
25	Liter *Kids*	Dinas Pendidikan (SMPN 5)
26	ITAKU NARITAMU (Ini Ceritaku Mana Ceritamu)	Dinas Pendidikan (SMPN 5)
27	OBING P-*THREE* (Omong Bahasa Inggris Profil Pelajar Pancasila)	Dinas Pendidikan (SMPN 5)
28	DIARI ALI, AMAN MANTAB (Diari Anak Sholih/Sholihah, Anak Beriman Baca Firman dalam Alkitab)	Dinas Pendidikan (SMPN 6)
29	AKSI BANG SIDI (Ayo Kita Berliterasi Kembangkan Potensi Diri)	Dinas Pendidikan (SMPN 6)
30	PENYU KELI (Pemanfaatan Youtube untuk Kegiatan Literasi)	Dinas Pendidikan (SMPN 6)
31	SEHAT untuk KAK EZI (Sedekah Seikhlas Hati untuk Kegiatan Aksi Bergizi)	
32	SMART SEPATU (sistem manajemen absensi real-time terintegrasi SMPN 7)	Dinas Pendidikan (SMPN 7)
33	PUISI SERPIAN SI OLA (Pusat Informasi dan Sumber Inspirasi dengan Televisi Sekolah)	Dinas Pendidikan (SMPN 8)
34	Jomba Putra Dewa	Dinas Pendidikan (SMPN 8)
35	Tawa Sehat	Dinas Pendidikan (SMPN 8)
36	GESIT (Guru Siap Teknologi)	Dinas Pendidikan (SMPN 8)
37	PECEL ABAH (Pentas Creatifity dan Literasi Anak Indonesia Hebat)	Dinas Pendidikan (SMPN 8)
38	Nasi Sehat Spenby (Senam IPSI dan Senam Usaha Kesehatan Sekolah Spenby)	Dinas Pendidikan (SMPN 9)
39	"SIKAP SeBeNingMaS" Sistem Informasi Komunikasi dan Administrasi Pembelajaran Sekolah Berbasis *Learning Management system*	Dinas Pendidikan (SMP Negeri 10)
40	IDOLA@madiunpintar.id "Information Documentation on Learning Administration With madiunpintar.id"	Dinas Pendidikan (SMP Negeri 10)
41	SIKAP Pend'kar SeBeNingMaS (Sistem Informasi, Komunikasi, Administrasi Pembelajaran dan Pendidikan Karakter Sekolah Berbasis *Learning Management System*)	Dinas Pendidikan (SMPN 10)
42	Rumah Ibu, Layanan Perundungan Dan Inklusi Berbasis Smile	Dinas Pendidikan (SMPN 11)
43	BU EKO WIRA (BUDAYA EKONOMI WIRAUSAHA)	Dinas Pendidikan (SMPN 11)
44	SAMBAL TERASI (berSAMa BELajar liTeRASI)	Dinas Pendidikan (SMPN 12)
45	Sama Satopi Gemar Pilar (Satu Mata Pelajaran Satu Topik Pelatihan Mandiri Genjot Platform Merdeka Mengajar Perbaiki Pembelajaran)	Dinas Pendidikan (SMPN 13)
46	KELOK SEMI TIARA FILLA PANCASILA (Kearifan Lokal Sedekah Bumi Tingkatkan Karakter Profil Pelajar Pancasila)	Dinas Pendidikan (SMPN 13)
47	BATU WUSWA BERDAYA (Batik Tulis Wujudkan Siswa Berbudi dan Berbudaya)	Dinas Pendidikan (SMPN 13)
48	ASFORMEN Q-MOKER (Asesemen Formatif Menyenangkan dengan Quizizz Mode Kertas)	Dinas Pendidikan (SMPN 13)
49	Matematika di Setiap Sudut Kota Madiun	Dinas Pendidikan (SMPN 13)
50	PBL PERI PENSIL (Problem Based Learning Pada Materi Perbandingan Senilai)	Dinas Pendidikan (SMPN 13)
51	MALIKAH DIGOLENS PETRA PRO SAKERA 21 (Pemanfaatan Lingkungan Sekolah Dipadu Google Lens dalam Peningkatan Keterampilan Proses Sains dan Keterampilan Abad 21)	Dinas Pendidikan (SMPN 13)
52	PORTAL GELORA P5 (Portofolio Digital Gelar Olah Karya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila)	Dinas Pendidikan (SMPN 14)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3
53	ROMBO PENDIGITAL BERDIKASI BISA	Dinas Pendidikan (SDN Oro-oro Ombo)
54	“Rombo Business Expo” Kewirausahaan “Wonderful Of Young Executive”	Dinas Pendidikan (SDN Oro-oro Ombo)
55	PENDEKAR TAMPAN (Peningkatan Mandiri Peduli Lingkungan Karo Ketahanan Pangan)	Dinas Pendidikan (SDN Oro-oro Ombo)
56	The Miracle Of Guntur Sakti	Dinas Pendidikan (SDN 01 Kartoharjo)
57	KULI SANGAR (Kubangun Literasi Dengan Pembiasaan Mendengar)	Dinas Pendidikan (SDN 02 Kartoharjo)
58	Pecel Poling (Pembelajaran Cemerlang Akuaponik Recycling)	Dinas Pendidikan (SDN 02 Kartoharjo)
59	PEMBATIK UPCYCLE ART (Pemanfaatan Limbah Plastik menjadi Upcycle Art)	Dinas Pendidikan (SDN 01 Tawangrejo)
60	TULANG SI DISKO	Dinas Pendidikan (SDN 01 Tawangrejo)
61	KASAN BAWA TALES (Kamis Santun Bahasa Jawa Tetap Lestari)	Dinas Pendidikan (SDN 02 Tawangrejo)
62	BUDI TAWA (Buletin Digital SDN Tawangrejo Dua)	Dinas Pendidikan (SDN 02 Tawangrejo)
63	RATUSAN BUSI TUA "Gerakan Satu Siswa Satu Tanaman Tumbuhkan Literasi dan Tanggung Jawab"	Dinas Pendidikan (SDN 01 Kanigoro)
64	AKU MANIS KANWA (Aksi Untuk Memanfaatkan Limbah Sampah)	Dinas Pendidikan (SDN 02 Kanigoro)
65	GERGAJI SAKHARAN (Gerakan Mengaji sampai Khatam Al-Quran)	Dinas Pendidikan (SDN 03 Kanigoro)
66	GETARAN KANIGAMA (Gerakan Khatam Al-Qur’an Kanigoro 3 Madiun)	Dinas Pendidikan (SDN 03 Kanigoro)
67	MISTERI SELADA (Kamis Literasi Mari Bersenandung Lagu Daerah)	Dinas Pendidikan (SDN 01 Klegen)
68	Satus Cikrak Di Genwa (Satu Anak Satu Tutor Sebaya Ciptakan Kader Digital Sejak Dini di Genwa)	Dinas Pendidikan (SDN 02 Klegen)
69	”SI BULAN BERAKSI” (Literasi di Hari Rabu dengan Lagu dolanan, membentuk karakter berani aktif dan berkreasi)	Dinas Pendidikan (SDN 04 Klegen)
70	DOSEPARU (Dongeng Selasa Pagi Rutin) dan BAWA ILMU (Membaca Wajib Lima Belas Menit Bermutu)	Dinas Pendidikan (SDN Kelun)
71	"SUKMA BERKIBAR" Sukosari Madiun Berliterasi Berkreasi Melalui Kabar-Kabar	Dinas Pendidikan (SDN Sukosari)
72	BU TELAS SI LENI (Budaya Penguatan Literasi dan Numerasi Digital Berbasis Blended Learning)	Dinas Pendidikan (SDN Rejomulyo)
73	E – Butik (Edukasi Membuat Batik)	Dinas Pendidikan (SDN Rejomulyo)
74	NASI PECEL BANMA	Dinas Pendidikan (SDN Banjarejo)
75	The Miracle Of Guntur Sakti	Dinas Pendidikan (SDN 01 Kartoharjo)
76	“Si Ciprut” (Sinom Enak Dicicip Dan Disruput) Tingkatkan Kemandirian Dan Kreativitas Siswa Kelas V SDN 01 Kartoharjo	Dinas Pendidikan (SDN 01 Kartoharjo)
77	GUNTUR MENYALA (Menyiapkan Generasi yang Berakhlak Mulia)	Dinas Pendidikan (SDN 01 Kartoharjo)
78	KULI SANGAR (Kubangun Literasi Dengan Pembiasaan Mendengar)	Dinas Pendidikan (SDN 02 Kartoharjo)
79	SINDO GURU BAJA ING BANG TOHA (Sinau Dongeng Geguritan Nguri-uri Bahasa Jawa Ing Pilangbango Kartoharjo)	Dinas Pendidikan (SDN Pilangbango)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3
80	DALANG SARIBU (Daur Ulang Sampah di Hari Rabu)	Dinas Pendidikan (SDN Pilangbango)
81	BERJUMPA DENGAN JAINAL (Bersih Jum'at Pagi dengan Menu Jajanan Tradisional)	Dinas Pendidikan (SDN Pilangbango)
82	BUHARDI (Buku Harian Digital)	Dinas Pendidikan (SDN Pilangbango)
83	GEMA SEHATI PILBATAMA (Gerakan Makan Sehat Bergizi SDN Pilangbango Kota Madiun)	Dinas Pendidikan (SDN Pilangbango)
84	WELAS ASIH MARANG SAPADA (Website Kelas Antarkan Siswa Raih Mimpi, Asa, Prestasi Gemilang Sebagai Kepercayaan Diri dan Harapan Siswa)	Dinas Pendidikan (SDN Pilangbango)
85	MANGSI Dan TRASI (peMANfaatan Google SIte Dalam pembelajaraN MEtode Tantangan, Refleksi dAn Kondisi)	Dinas Pendidikan (SDN 01 Kanigoro)
86	AKU MANIS KANWA (Aksi Untuk Memanfaatkan Limbah Sampah)	Dinas Pendidikan (SDN 02 Kanigoro)
87	MISTERI SELADA (Kamis Literasi Mari Bersenandung Lagu Daerah)	Dinas Pendidikan (SDN 01 Klegen)
88	BuLas Meli Seri (Budaya Lima Belas Menit Literasi Setiap hari)	Dinas Pendidikan (SDN 03 Klegen)
89	”SI BULAN BERAKSI” (Literasi di Hari Rabu dengan Lagu dolanan, membentuk karakter berani aktif dan berkreasi)	Dinas Pendidikan (SDN 04 Klegen)
90	"SUKMA BERKIBAR" Sukosari Madiun Berliterasi Berkreasi Melalui Kabar-Kabar	Dinas Pendidikan (SDN Sukosari)
91	E – Butik (Edukasi Membuat Batik)	Dinas Pendidikan (SDN Rejomulyo)
92	Pemanfaatan Limbah Air Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Melalui Filtrasi Air Sederhana (FILA HANA) Terhadap Kehidupan Ikan Di Kolam SDN Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun	Dinas Pendidikan (SDN Ngegong)
93	BERSATU PEDULI (Bersama Tingkatkan Mutu melalui Program Edukasi berLiterasi)	Dinas Pendidikan (SDN 01 Manguharjo)
94	JEMARI SARI GABAH (Jejak Manguharjo Berliterasi Satu Hari Tiga Bahasa)	Dinas Pendidikan (SDN 01 Manguharjo)
95	KARIA MENGUDARA (Kamis Ceria Menyanyi Lagu Daerah)	Dinas Pendidikan (SDN 01 Manguharjo)
96	AMPLAS SEPATU	Dinas Pendidikan (SDN Patihan)
97	“BERBURU SOSIS AYAM DI PAGI HARI” (Berburu Soal Siswa Pengayaan Di Pagi Hari)	Dinas Pendidikan (SDN Patihan)
98	Ayo Mama Sion (Ayo berMain perMainan tradiSional)	Dinas Pendidikan (SDN Patihan)
99	PAK MUKIDI (Pemanfaatan Kelas menjadi Museum untuk Meningkatkan Literasi dan Numerasi)	Dinas Pendidikan (SDN Patihan)
100	Mantra Bang Dol (Permainan Tradisional dan Tembang Dolanan)	Dinas Pendidikan (SDN 01 Madiun Lor)
101	GERGAJI HITAM BENTENG (GERakan MengAJI HIngga KhaTAM)	Dinas Pendidikan (SDN 01 Madiun Lor)
102	WARUNG KOPI SI QRCOD (Wahana Ruang Komunikasi Pribadi Berbasis Quick Respon Code)	Dinas Pendidikan (SDN 02 Madiun Lor)
103	RUDI KARTINI (Ruang Diskusi SD Kartini)	Dinas Pendidikan (SDN 02 Madiun Lor)
104	BERTAHAN DI PERTIWI (Berburu Pengetahuan Di Perpustakaan Sriwijaya)	Dinas Pendidikan (SDN 03 Madiun Lor)
105	JUMARIYAH (JUmat MAkan BeRgizI SaYur dan BuAH)	Dinas Pendidikan (SDN 03 Madiun Lor)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3
106	SADYA WARA JAYA (SINAU DONGENG BUDAYA JAWA WARISAN AGUNG SRIWIJAYA)	Dinas Pendidikan (SDN 03 Madiun Lor)
107	MIS RITA GALANG (Kamis Bercerita Jenggala Erlangga)	Dinas Pendidikan (SDN 04 Madiun Lor)
108	GELIBUKOM GALANG	Dinas Pendidikan (SDN 04 Madiun Lor)
109	“TIKAR SI LANAS” Tingkatkan Karakter Siswa Melalui Lagu Nasional	Dinas Pendidikan (SDN 05 Madiun Lor)
110	AKU ENDRAKILA (Aksi Kreatif Untuk Endrakila)	Dinas Pendidikan (SDN 05 Madiun Lor)
111	PUSTAKA Agus Salim	Dinas Pendidikan (SDN 01 Nambangan Lor)
112	KAK TESIMA CAKAP (Kamis Melek IT Siswa Mandiri dan Cakap)	Dinas Pendidikan (SDN 02 Nambangan Lor)
113	SIMAS BERKEMBANG (KreaSI MAding kelaS BERjalan KEMbangkan SDN 01 NamBANGan Kidul)	Dinas Pendidikan (SDN 01 Nambangan Kidul)
114	JUMALI BERIMAN (Jumat Peduli Lingkungan Bersih,Indah dan Nyaman)	Dinas Pendidikan (SDN 02 Nambangan Kidul)
115	Dulang Lipstik untuk Kotak Alis(Daur Ulang Limbah Plastik untuk Kotak Alat Tulis)	Dinas Pendidikan (SDN 02 Nambangan Kidul)
116	ODOL BU KARSI (Outdoor Learning Budayakan Karakter Siswa)	Dinas Pendidikan (SDN 02 Nambangan Kidul)
117	KULINER (Kuis Literasi dan Numerasi)	Dinas Pendidikan (SDN 02 Nambangan Kidul)
118	GERANAT MAK BYUR (Gerakan Anak Sehat Makan Buah dan Sayur)	Dinas Pendidikan (SDN 02 Nambangan Kidul)
119	PECEL KOTA PENDIKAR (Penulisan Cerita Fabel untuk Mengokoh Tangguhkan Pendidikan Karakter)	Dinas Pendidikan (SDN 03 Nambangan Kidul)
120	KARBOAH YUK (KARBOhidrat buAH saYUr lauK)	Dinas Pendidikan (SDN 03 Nambangan Kidul)
121	CABERSA (membaCA BERsama setiap selaSA)	Dinas Pendidikan (SDN 03 Nambangan Kidul)
122	DOMIS (DOngeng setiap kaMIS)	Dinas Pendidikan (SDN 03 Nambangan Kidul)
123	NEKAT (Numerasi Ekselen KArakter kuaT)	Dinas Pendidikan (SDN 03 Nambangan Kidul)
124	PECEL MAS BAWA (PEmbiasaan paCELathon Melestarikan BAhasa JaWA)	Dinas Pendidikan (SDN Pangongangan)
125	Heli Patas Terasa Sogama (Hebat Literasi Empat Aspek Keterampilan Berbahasa Bersama Google Workspace)	Dinas Pendidikan (SDN Sogaten)
126	WINSA BERBUDI (Winongo Satu Berbudaya Indonesia)	Dinas Pendidikan (SDN 01 Winongo)
127	LAPIS INKLUWINDU (Pola Terapi Siswa Inklusi Winongo Dua)	Dinas Pendidikan (SDN 02 Winongo)
128	BATIQ WINDU (Baca Tulis Al Qur’an Winongo Dua)	Dinas Pendidikan (SDN 02 Winongo)
129	Tongjib Windu jadi Serabi	Dinas Pendidikan (SDN 02 Winongo)
130	SIFA HAJU MAKAN KUNIR (Siap Mengawali Pembelajaran PAI dengan Hafalan Juz 30 menggunakan Buku Monitoring)	Dinas Pendidikan (SDN 01 Mojorejo)
131	PAK GIBRAN (Pagi Kamis Gerakan Bersama Hafalan al-Qur’an)	Dinas Pendidikan (SDN 01 Mojorejo)
132	KOPI KRENYUS (KONTEN PINTAR KREATIF, PENYULUT SEMANGAT)	Dinas Pendidikan (SDN 02 Mojorejo)
133	SI BABE (Sistem Barcode Absensi)	Dinas Pendidikan (SDN 02 Mojorejo)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3
134	LEMARI KETAM (Literasi Materi Pagi Hari Kelas Satu - Enam)	Dinas Pendidikan (SDN Kejuron)
135	BERSINAR (Baca Efektif Rangsang Sistem Imajinasi Nalar Aktif Rasional)	Dinas Pendidikan (SDN 01 Taman)
136	BUDI ASIK (Buku Digital Untuk Anak Inklusi)	Dinas Pendidikan (SDN 02 Taman)
137	MARAHYA (Masker Rambut Dari Lidah Buaya)	Dinas Pendidikan (SDN 02 Taman)
138	DEWATA BALI AIR (Destinasi Wisata Literasi melalui Gubah Lirik Lagu Viral)	Dinas Pendidikan (SDN 03 Taman)
139	CINTA DIK DEASI (Cek Informasi Tabiat Anak Didik-Deary Siswa)	Dinas Pendidikan (SDN 01 Manisrejo)
140	Pemanfaatan Media Getah Mangga Untuk Meningkatkan Jiwa Kewirausahaan Dan Hasil Belajar Membatik Pada Siswa Kelas Vi Sd Negeri 2 Manisrejo	Dinas Pendidikan (SDN 02 Manisrejo)
141	JULI SARPEN MANWA MAGATA (Jumat Religi sebagai Sarana Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa)	Dinas Pendidikan (SDN 03 Manisrejo)
142	PENDIKAR RILEKS (Pendidikan Karakter Religius Literasi Ekstrakurikuler dan Kesehatan) Dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila	Dinas Pendidikan (SDN 04 Manisrejo)
143	MICANGIBER (Minum Kacang Hijau Bersama)	Dinas Pendidikan (SDN Banjarejo)
144	NASI PECEL BANMA (Numerasi Literasi Pendidikan Cemerlang SD Negeri Banjarejo Kota Madiun)	Dinas Pendidikan (SDN Banjarejo)
145	GELIS DEN BUDI (Gemar Literasi Dengan Buku Digital Interaktif)	Dinas Pendidikan (SDN 01 Pandean)
146	PAPAH DIK SISKA (Pengolahan Sampah di Lingkungan Sekolah menjadi Seni Kaligrafi)	Dinas Pendidikan (SDN 01 Pandean)
147	SIDIK PASOPAN (Sistem Digital Kreatif Perpustakaan SDN 02 Pandean)	Dinas Pendidikan (SDN 02 Pandean)
148	Ubur-Ubur Ikan Lele, Aku Suka Makan Sayur dan Buah Lee	Dinas Pendidikan (SDN 02 Pandean)
149	GATOT KACA PERGIWA (Gerakan Optimalisasi Kamis Membaca di Perpustakaan Gita Wacana)	Dinas Pendidikan (SDN 01 Demangan)
150	KACA BENING (Komunitas Anak Membaca Bersama dengan Nyaring)	Dinas Pendidikan (SDN 01 Demangan)
151	SI BELA PINTAR (WEBSITE PEMBELAJARAN PENUNJANG MINAT BELAJAR)	Dinas Pendidikan (SDN 02 Demangan)
152	“NING GELIS DI SEKA TAWA” Meningkatkan Gerakan Literasi Setiap Kamis Bercerita Bahasa Jawa	Dinas Pendidikan (SDN 01 Josenan)
153	GEMPITA SARAKA di JOSDA (Gerakan Meningkatkan Kemampuan Literasi, Numerasi dan Karakter Peserta Didik melalui Kegiatan Pembiasaan Pagi di SDN 02 Josenan)	Dinas Pendidikan (SDN 02 Josenan)
154	INGKUNG SAMBEL PECEL (Lingkungan Sekolah Sebagai Sumber Belajar Pendekar Sat – Set)	Dinas Pendidikan (SDN 03 Josenan)
155	SARI PATAS (Satu Hari Empat Gelas)	Dinas Pendidikan (SDN Kuncen)
156	Pecel SIP DOK (Pelayanan Cepat dengan elektronik Surat Izin Praktek Dokter)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
157	SIST - Bro (Sistem Informasi Kesehatan Terpadu Berbasis Online)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
158	Kawan Diska Dinas Kesehatan, PP dan KB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3
159	Kuitansi Cerdas Green SIPeDe (Sistem Informasi Perangkat Daerah)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
160	Hosting Gratis Telexc	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
161	RAPEL TULIP (Bendahara Pengeluaran Tutup Buku Lebih Cepat)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
162	PPTK LASER (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Lapor Serapan Anggaran)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
163	PENANDU PENDEKAR OPD (Pemeriksaan Kesehatan Posbindu Penyakit Tidak Menular Organisasi Perangkat Daerah)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
164	SERBU RANJANI (Sehat Serta Bugar dengan Pengukuan Jasmani)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
165	PRIKSA (Peer grup Dialisis)	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
166	PENDEKAR OBAT	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
167	Wisata KB	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
168	PENDEKAR HATI (Pelayanan Deteksi Dini Kehamilan Resiko Tinggi)	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
169	PENDEKAR BELi CETING (Pendampingan Konsumsi Bersama Peduli Cegah Stunting)	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
170	SIKOT (Sistem Informasi Kamar Operasi Terintegrasi)	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
171	PENDEKAR MUDA (Pelayanan VCT One Call Center Mudah dan Terpercaya)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Sukosari)
172	LIONTIN MAS KAWIN (Lembar Informasi Untuk Calon Pengantin Agar Masa Depan Wilujeng)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Sukosari)
173	SEGAR SARI SI DARA CANTIK (Sarana Edukasi Agar Masyarakat Sadar Kesehatan Reproduksi Antisipasi Kanker Payudara Dan Kanker Serviks)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Sukosari)
174	LAKON BATRA (LAWAN KORONA DENGAN OBAT-OBATAN TRADISIONAL)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Sukosari)
175	Pakis Dewa (Paguyuban Kesehatan Peduli Orang Dengan Gangguan Jiwa)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Sukosari)
176	“Sukro” (Sukosari Woro-Woro) Puskesmas Sukosari	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Sukosari)
177	PENTOL MAS SUKO (Pendaftaran Online Puskesmas Sukosari)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Sukosari)
178	MAS ARI LALI NGUDUT (Puskesmas Sukosari Keliling Berhenti Merokok)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Sukosari)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3
179	GARAM BU MUKIDI (Program Ibu Membaca KIA adalah inovasi dalam bidang Kesehatan Ibu dan Anak)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Sukosari)
180	SI BUTAR ASIX (Edukasi Buku Pintar ASI Eksklusif)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Sukosari)
181	Lasiati Respati (Layanan Lansia Agar Sehat Panjang Usia Dengan Respon Cepat Antar Jemput Sepenuh Hati)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Sukosari)
182	PANEN APEL MERAH (PELAYANAN ASUHAN KEFARMASIAN AGAR AYAH PEDULI IBU HAMIL MINUM TABLET TAMBAH DARAH)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Sukosari)
183	GETHUK BERASTAGI (Gerakan Test Mantoux Berantas Stunting, TBC dan Kurang Gizi)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Sukosari)
184	MAS SUKO: SMART (Manajemen Akuntabel dan Sistematis Puskesmas Sukosari: Sistem Manajemen & Rekapitulasi Terpadu)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Sukosari)
185	PENAK MAS (Pengawasan Keuangan Puskesmas Sukosari dengan Aplikasi e-BLUD)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Sukosari)
186	GAS REK (tangGap cepAt SaRan, kEluhan dan Kepuasan Masyarakat)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Sukosari)
187	LARIS MANIS (Laporkan Risiko ke Tim Manajemen Risiko)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Sukosari)
188	PINTU MAS SUKO (Pelayanan Online Anti Korupsi Puskesmas Sukosari)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Sukosari)
189	WANITA MULIA (WADAH KOMUNIKASI KESEHATAN MULAI HAMIL, BAYI DAN ANAK)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Demangan)
190	PITA SIKUMBANG DUREN (Pijat Baduta Stimulasi untuk Tumbuh Kembang dan Tidur Nyenyak)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Demangan)
191	"PAPEDA ODGJ (PAguyuban PEduli paDA Orang Dengan Gangguan Jiwa)"	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Demangan)
192	ELENG KB LIN (EDUKASI, KONSELING & MONITORING KB PASCA PERSALINAN)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Demangan)
193	RAKA KENA JALA SI MAS DEMANG (Gerakan Kenali Gejala Tuberkolosis Puskesmas Demangan)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Demangan)
194	SANTUN LANSIA	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Demangan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3
195	SEPEDA SIBADU (SEGERA PERIKSA DAHAK BATUK DUA MINGGU)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Demangan)
196	TAWA SEHAT (Tambah Wawasan Kesehatan)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Tawangrejo)
197	MEDALI PERUNGGU (Mendukung Lansia Sehat Dengan Memangkas Waktu Tunggu)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Tawangrejo)
198	Layanan Poli Petang Dan Gawat Darurat /Lintang Ndaru	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Tawangrejo)
199	Pelayanan Persalinan Siaga Lengkap Puskesmas Tawangrejo /Pesan Singkat Mastarjo	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Tawangrejo)
200	Temukan Obati Sampai Sembuh Tb Sharing Bersama Petugas Pemantau / Toss Tb Shamanta	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Tawangrejo)
201	Gerakan Sadar Imunisasi / Gesit	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Tawangrejo)
202	Klinik Sanitasi Puskesmas Tawangrejo	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Tawangrejo)
203	Cegah Stunting Bersama Puskesmas Tawangrejo/ Ceting Beras Mastarjo	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Tawangrejo)
204	PESAN SINGKAT MAS TARJO (Pelayanan perSAlinaN Siaga leNGKAp puskesMAS TAwangReJO)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Tawangrejo)
205	GERCEP (Gerakan Cek Skrining dan Pemeriksaan Terpadu Penyakit Tidak Menular)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Tawangrejo)
206	IKAN MAS TARJO (Survei Kepuasan Masyarakat Puskesmas Tawangrejo)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Tawangrejo)
207	CETING BERAS MAS TARJO (CEGAH STUNTING BERSAMA PUSKESMAS TAWANGREJO) UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Tawangrejo)
208	POJOK TB PUSPA (Pojok Tubercolosis Puskesmas Patihan/Ngegong)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Ngegong)
209	BERAS KETAN (Berantas Penyakit Tidak Menular Bersama Kelompok Tani)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Ngegong)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3
210	SANGKUR JAWARA (Sehatkan Pasien Jiwa dengan Koordinasi Kader melalui WA dan Kunjungan Pasien Jiwa bersama Warga)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Ngegong)
211	PESONA (Peningkatan Pengetahuan Status Gizi Calon Pengantin Wanita)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Ngegong)
212	SIBER BUNTING (Deteksi Dini Tubercolosis Ibu Hamil KEK untuk Cegah Stanting)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Ngegong)
213	PEKERJA PANEN (Peduli Kesehatan Remaja melalui Pelayanan Online)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Ngegong)
214	SANTAP SAYUR (inovaSi PemeriksAaN penyakit tidak menUlaR)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Ngegong)
215	PENCAK TB (PENingkatan CAKupan suspec TuBerculosis anak)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Ngegong)
216	SANTAP SAYUR (inovaSi pelayanAN TerpAdu PemerikSAan penYakit tidak menUlaR)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Ngegong)
217	SENIMAN ASLI MAS BARJO (Senam Nifas bantu Mandiri Pasca Persalinan Puskesmas Banjarejo)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Banjarejo)
218	PINTU HATI (Papan Pengingat Imunisasi untuk Sehatkan Putra Putri)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Banjarejo)
219	BATIK BERAKSI (Bekas/Mantan Penderita Kusta Bermanfaat Aktif Singkirkan Penyakit Kusta)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Banjarejo)
220	KARAMEL GULA (Kenali Cara Memelihara Kesehatan Gigi dan Mulut Anak Balita)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Banjarejo)
221	CETHING MANIS (Cegah dan Atasi Stunting dengan pemeriksaan Tuberkulosis)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Banjarejo)
222	Nasi Bu Baik (pelayaNAn farmaSI Bilik khUsus BAtuk pIleK)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Manguharjo)
223	“SINAR DIGUGU MENITAH API “ (televiSI piNtAR DI ruanG tUngGU MENIngkatkan pengeTAHuAn PasIen)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Manguharjo)
224	PINOKIA (Pojok INformasi Obat Khusus lansIA)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD Puskesmas Manguharjo)
225	Partner Mataram (Pahlawan Street Center Madiun Kota Ramah dan Aman)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
226	Sistem Drainase dan Penataan Perkotaan (Ducting)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3
227	Ecodrain Mesi (Eco-Drainase Multifungsi)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
228	SIMANIS (SIstem penyiraMAN otomatIS) di Median Jalan menggunakan IoT (Internet of Things).	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun
229	Mak Berang (LoMba Makam Bersih dan Terang)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun
230	Petis Medan (Penyiraman Tanaman Otomatis Median Jalan)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
231	Bantuan Sosial Santunan Kematian	Dinas Sosial, Pemberdaayan Perlindungan Perempuan dan Anak
232	Kota Madiun Menuju Pembangunan Sejahtera Warganya - Pondok Lansia	Dinas Sosial, Pemberdaayan Perlindungan Perempuan dan Anak
233	POS BISA (Posyandu Disabilitas Sejahtera)	Dinas Sosial, Pemberdaayan Perlindungan Perempuan dan Anak
234	BUS PATAS (Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas)	Dinas Sosial, Pemberdaayan Perlindungan Perempuan dan Anak
235	PENYETAN LARIS (Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis)	Dinas Perhubungan
236	AMAN AE - Aplikasi Mandiri untuk Pendaftaran dan Pengujian Kendaraan	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN
237	SI DULKEN - Sistem Digital Layak Uji Kendaraan	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN
238	Profit M-Tech (Program Wifi Gratis untuk Madiun Genggam Teknologi)	Dinas Komunikasi dan Informatika
239	Awak Sigap (Anda WA, Kami Siap Segera Tanggap)	Dinas Komunikasi dan Informatika
240	Manekin Kota Madiun (Manajemen Kinerja Kota Madiun)	Dinas Komunikasi dan Informatika
241	*Madiuntoday* Ngegas Ekonomi	Dinas Komunikasi dan Informatika
242	JEBOL KIPER (Jemput Bola Komunikasi Informasi Publik serta Evaluasi LAPOR)	Dinas Komunikasi dan Informatika
243	Kelas Sahabat	Dinas Komunikasi dan Informatika
244	MBANGUN SWARGA (Madiun Membangun, Sejahtera Bersama Warga)	Dinas Komunikasi dan Informatika
245	DINAMIKA RASA WARGA – Kota Madiun Dinamis dan Terbuka, Radio Suara Madiun Menyapa Warga	Dinas Komunikasi dan Informatika
246	Si Anak Mass Juna (Sistem Analisa Media Massa Maju Mendunia)	Dinas Komunikasi dan Informatika
247	Pro UMKM Kota Madiun (https://proumkm.madiunkota.go.id)	Dinas Komunikasi dan Informatika
248	*Market Place* Kota Madiun (e-Pasar Kota Madiun)	Dinas Komunikasi dan Informatika
249	SUPER TEKTONIK (Solusi Cepat, Efektif, dan Berintegritas dengan Tanda Tangan Elektronik)	Dinas Komunikasi dan Informatika
250	Sistem Informasi Operasi Pasar Kota Madiun (SIOPA OMA)	Dinas Komunikasi dan Informatika

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3
251	Transformasi JEBOL KIPER: Integrasi PPID Goes to School untuk Meningkatkan Komunikasi, Informasi Publik, dan Evaluasi LAPOR!	Dinas Komunikasi dan Informatika
252	Si Manpro Gesit (Aplikasi Manjemen Progres Kiat menuju Kinerja Melesat)	Dinas Komunikasi dan Informatika
253	E-Proteksi (Edukasi Perlindungan Data Pribadi Untuk Keamanan Informasi)	Dinas Komunikasi dan Informatika
254	ESTTETIKA (Implementasi Aplikasi dengan TTE untuk Efektivitas dan Keamanan Data)	Dinas Komunikasi dan Informatika
255	DigiSlip (Digitalisasi Slip Gaji, TPP, Bukti Potong PPh 21)	Dinas Komunikasi dan Informatika
256	MAS ATTA (Manajemen Monitoring dan Evaluasi Satu Data)	Dinas Komunikasi dan Informatika
257	PPID Roadshow	Dinas Komunikasi dan Informatika
258	MANG EDU (MAnjemen PeNGetahuan EDUkasi)	Dinas Komunikasi dan Informatika
259	Sistem Informasi Magang Digital (e-magang)	Dinas Komunikasi dan Informatika
260	E-KINERJA (ELEKTRONIK KINERJA)	Dinas Komunikasi dan Informatika
261	SiCaker "Sistem Cari Kerja"	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro
262	BRO SAM (Belanja dan pROmosi produk uSAha Mikro)	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
263	IKM JUARA (Integrasi Konsultasi Mandiri untuk Jaminan Usaha, Akselerasi, dan Produktivitas Industri Anda!)	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
264	TAKSIAH (Antar Akta Kematian Seraya Memuliakan Jenazah)	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
265	GADJAH MADA (Petugas Adminduk Berkunjung Ke Rumah, Masyarakat Kota Madiun Bahagia)	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
266	PECEL ADMINDUK BU TUMI (Pelayanan cepat keliling administrasi kependudukan buka sabtu minggu)	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
267	Layanan 3 in 1 (Pelayanan pengurusan dokumen akte Kelahiran, KK dan KIA)	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
268	*WATER MELON* (*WA Center* Melayani Slalu *ON*)	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
269	ANTI PREI (Layanan Adminduk Anti Prei)	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
270	Super Biometrik (Pelayanan Identitas Kependudukan Digital dimana ada satuan tugas biometrik dan IKD	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
271	LOS DOL (Layanan kOnSultasi aDminduk OnLine)	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
272	ANANDA TERCINTA (Ada Nama Ayah bunDa di Akta Kelahiran Anak Kota Madiun	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
273	ADA LAYANAN CINTA (Ada Petugas Bahasa Isyarat di Dukcapil Kota Madiun)	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3
274	MAPAK BESAN (Mengurus Akta Perkawinan dan Perceraian Langsung Dapat KK dan KTP perubahan Status Perkawinan)	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
275	CINTAILAH ANANDA (Layanan Laporan Kelahiran anak melalui WA dengan diserati foto-foto dokumen pesyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran)	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
276	SILANDEP (Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan dengan Pengadilan Agama)	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
277	Layanan Digiform (Aplikasi Layanan Sistem Informasi Pendaftaran Kependudukan secara Online)	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
278	BROKOHAN (Bayi lahiR Oleh niK, dOkumen kependudukan dan jaminan keseHAtaN) DIGITAL	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
279	LAYANAN 3577 (3 Layanan Adminduk dalam 5 menit 7 detik on dalam 7 hari) Mengurangi Calo Meningkatkan Kualitas Dokumen	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
280	DRAKOR (Dukcapil Ngantor di Kelurahan)	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
281	LAKOMPEN (Layanan Kompensasi)	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
282	SI MANIS GOKEL (Siap Melayani instal IKD go Kelurahan dan RW)	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
283	LADANG AMAL (Layanan Adminduk Gratis, Amanah, Mudah dan Anti Libur)	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
284	Aplikasi SILAPLING (Sistem Informasi Pelaporan Lingkungan)	Dinas Lingkungan Hidup
285	PECEL PAK KASTAN (Pelayanan Cepat Dan Langsung, Peternakan, Kesehatan Hewan Dan Pertanian)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
286	SELAPANAN (SEKOLAH LAPANG PERTANIAN)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
287	JEMPOL TERANG (Jemput Bola Pelayanan Tera dan Tera Ulang)	Dinas Perdagangan - UPTD Metrologi Legal Kota Madiun
288	WARTEK Inflasi Kota Madiun (Warung Tekan Inflasi)	Dinas Perdagangan
289	SIMATA JELI (Sistem Informasi bagi Masyarakat koTa melalui Jendela Literasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
290	D'ARTIS" (Digitalisasi Arsip Statis)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
291	EMPOK REMEN (Kelompok Remaja Menulis)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
292	DEWI PUSPA (DEstinasi WIsata perPUStakaan Pemerintah kotA)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
293	LAURA JOSS (Lapak Umk keluRAhan Jemput OSS)	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
294	PESAWAT (PEnyimpanan SAtu WAdah daTa DPMPTSP)	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
295	HELPDESK GASPPOL	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
296	SAPA LKPM (SiAp Pandu PermAsalahan LKPM)	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
297	MASS (Madiun Kota Single Submission)	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
298	HALPER/ HALo PERizinan (OSS RBA)	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3
299	PETI KEMAS (Peta Potensi dan Peluang Investasi di Kota Madiun)	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
300	SIAP KAKA (Sistem Pendampingan Pelayanan Perizinan Keliling Kelurahan Kota Madiun)	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
301	PAK YAZIN KE PASAR (Pendampingan Keliling Pelayanan Perizinan Ke Pasar-Pasar)	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
302	SI PENDEKAR TTE (Sistem Penandatanganan dengan Kesiapan Aplikasi Redi TTE)	Badan Keuangan dan Aset Daerah
303	Belanja Pengadaan Barang dengan Kartu Kredit (BANKER- KKPD)	Badan Keuangan dan Aset Daerah
304	SIJAKO (Sistem Informasi Jadwal Kegiatan Online)	Badan Keuangan dan Aset Daerah
305	KLINIK AKUNTANSI & ASET (Aplikasi Tanya jawab seputar akuntansi dan Aset Secara Online)	Badan Keuangan dan Aset Daerah
306	JEMPUT PENSIUN (Layanan Jemput Bola Penangan Pengurusan Surat Pemberhentian Pembayaran Karena Pensiun)	Badan Keuangan dan Aset Daerah
307	BERKAH KITA (BERsama Kita Ajukan Hasil Karya Intelektual tertaTA)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
308	KOPI MADIUN (KOmPetisi Inovasi MADIun majU menduNia) - transformasi dari KIAT (Kompetisi InovAsi Teknologi) Kota Madiun	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
309	E-KAK SIARAN (Elektronik Kerangka Acuan Kerja SetIap Asn adalah peRencANa)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
310	ABANG INTEL (Aplikasi Penelitian dan Pengembangan, Inovasi Terkendali)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
311	PENTAS KOLAM (PENaTaan kawASan KOta LAMa)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
312	REKAN CERIA 10 JUTA (geRAKan lingkungAN CERIA 10 JUTA per RT)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
313	PAK-E GANTA (PAvingisasi KElurahan GANg koTA)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
314	RENDA KASIH (RENcana aksi Daerah entASkan kemIskinan)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
315	LAKU AWARD (LApaK UMKM AWARD)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
316	CSE KOTA (Csr Sengkuyung pEmbangunan KOTA)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
317	OK BOS (Optimalkan Kabar Berita On the Spot)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
318	ISOMA (Inovasi ASN Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
319	KLANIS (Klini LAyanan koNsultasi rIset dan inovaSi)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
320	PERSADA - Persiapan Sukses Setelah Purna Tugas	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3
321	Cita Cerdas PNS	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
322	ASN PINTAR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
323	SIP-PBBKU (Sistem Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Madiun)	Badan Pendapatan Daerah
324	SmartMap (Peta Cerdas untuk Data Pajak yang Lengkap dan Akurat)	Badan Pendapatan Daerah
325	RESCAST (*REScue Care And STandby*)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
326	Peta Jalan Menuju Kematangan SPIP Terintegrasi Level Terkelola Dan Terukur	Inspektorat
327	EVAKIP (Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Inspektorat
328	LIK PAKAR (Layanan Informasi, Edukasi, Pencegahan dan Penanganan Kebakaran)	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
329	PIKAT HATI (Pelayanan Perlindungan Masyarakat Humanis dan Simpatik)	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
330	SI PEKATIK AE (Sistem Sistem Penanganan Pelanggaran Perda/Perkada Tingkat Kota Madiun)	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
331	Risa CETAR (e-Risalah Rapat Paripurna Tercatat Rapi)	Sekretariat DPRD
332	DIKIR (Digitalisasi Pokok-Pokok Pikiran) DPRD Kota Madiun	Sekretariat DPRD
333	KOLAK BAPER (KOmpetisi administrasi ketataLAKsanaan BAgi PERangkat daerah)	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
334	kompetiSI iNOVAsi pelAYanan pUblik (SI NOVA AYU)	Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah
335	KIPRAH SI AKIP (Kinerja dan Pelaporan Daerah Terintegrasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
336	SI-CAKEP (Sistem Informasi Pencatatan Kegiatan Pimpinan)	Bagian Umum pada Sekretariat Daerah
337	Sistem Aplikasi Pengadaan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah
338	BAHUKU UNTUKMU (BAntuan HUKUm UNTUK masyarakat Miskin kota MadiUn)	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
339	SI IPIN GAWE PANGANAN (aSIstensi PINtar GAWE PerAturan perundANG-undangAN)	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
340	PASAL TTE (PembuAtan SALinan Produk Hukum Daerah dengan Tanda Tangan Elektronik	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
341	Pembinaan BUMD	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah
342	SI CAKRA (Sistem Informasi Perencanaan Kegiatan Kecamatan Manguharjo)	Kecamatan Manguharjo
343	Aplikasi Digitalisasi “Cak Wayan” (Lacak, Jadwal, dan Layanan)	Kecamatan Manguharjo
344	TEMAN LITA (sisTEM pelayanAN konseLIng kesehaTAn)	Kelurahan Sogaten (Kecamatan Manguharjo)
345	SI KOKOM (Sistem Informasi Komunikasi dan Koordinasi Mudah)	Kelurahan Sogaten (Kecamatan Manguharjo)
346	SKA-LINE (Surat Keterangan Via Online)	Kelurahan Patihan (Kecamatan Manguharjo)
347	AKSI PA'DOEL (Pendampingan Intensif Pasar Jadoel)	Kelurahan Ngegong (Kecamatan Manguharjo)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3
348	Eco Green Office Kelurahan Ngegong	Kelurahan Ngegong (Kecamatan Manguharjo)
349	" SIMPENAN OM WIN " (Sistem Pelayanan Online Masyarakat Winongo)	Kelurahan Winongo (Kecamatan Manguharjo)
350	DJ KESET (DEPOT JAMU KELURAHAN SEHAT)	Kelurahan Winongo (Kecamatan Manguharjo)
351	GELAS ANTIK MERAH (Gerakan Kelurahan Basmi Sarang Jentik Demam Berdarah)	Kelurahan Madiun Lor (Kecamatan Manguharjo)
352	SI LAGA CETTAR (Sistem Layanan Warga Cepat Tanggap Ramah)	Kelurahan Madiun Lor (Kecamatan Manguharjo)
353	LAPAK PANDAN (Layanan Pendampingan FKM Pango Dalam Penguatan Dan Pemberdayaan UMKM)	Kelurahan Pangongangan (Kecamatan Manguharjo)
354	SAMBANG DULUR	Kelurahan Pangongangan (Kecamatan Manguharjo)
355	Pangongangan PINTAR (Pelayanan INtegrasi anTAR buku Perpustakaan)	Kelurahan Pangongangan (Kecamatan Manguharjo)
356	GERDUKULARA (GERakan terpaDU Kebersihan Untuk LAnsia sebatang kaRA)	Kelurahan Pangongangan (Kecamatan Manguharjo)
357	FORKA PANGO (inFORmasi KegiAtan keluranhan PANGOngangan)	Kelurahan Pangongangan (Kecamatan Manguharjo)
358	"SIPP MAS" (Sistem Informasi Publik Pelayanan MASyarakat)	Kelurahan Nambangan Lor (Kecamatan Manguharjo)
359	"SI PODANG" Sarana Informasi, Pelayanan Online Dan pengAduaN	Kelurahan Nambangan Kidul (Kecamatan Manguharjo)
360	"BAYU AJI" (Angin yang Berharga)	Kelurahan Manguharjo (Kecamatan Manguharjo)
361	Podcast Warta Kamper (Warga Tanggap, Kompak, Perduli dan Responsif)	Kelurahan Kanigoro (Kecamatan Kartoharjo)
362	Dukamu Tanggungjawabku	Kelurahan Kanigoro (Kecamatan Kartoharjo)
363	Laci Digital	Kelurahan Kanigoro (Kecamatan Kartoharjo)
364	SI TARA (Sistem Informasi BeriTA lewat suaRA)	Kelurahan Kanigoro (Kecamatan Kartoharjo)
365	Tali Kotang (Tanggap Lingkungan Kanigoro Tangguh)	Kelurahan Kanigoro (Kecamatan Kartoharjo)
366	Edi Menthil (Edukasi Melibatkan Masyarakat & Tiga Pilar)	Kelurahan Kanigoro (Kecamatan Kartoharjo)
367	Perpustakaan Digital Kelurahan Kanigoro	Kelurahan Kanigoro (Kecamatan Kartoharjo)
368	Pelayanan Whatsapp Online	Kelurahan Kanigoro (Kecamatan Kartoharjo)
369	SI-PATEN (Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu)	Kelurahan Kartoharjo (Kecamatan Kartoharjo)
370	Pelayanan Online Via Wa	Kelurahan Tawangrejo (Kecamatan Kartoharjo)
371	PECELAN OMBO (Pelayanan Cepat Secara Online di Kelurahan Oro- Oro Ombo)	Kelurahan Oro-Oro Ombo (Kecamatan Kartoharjo)
372	SINERMAS (Sinergi Bersama Masyarakat)	Kelurahan Sukosari (Kecamatan Kartoharjo)
373	SUKOSARI PESAT (Sukosari Pendampingan Pengelolaan Sampah Terpadu)	Kelurahan Sukosari (Kecamatan Kartoharjo)
374	SI PELIK OMA (Evaluasi Pelayanan Publik Oleh Masyarakat)	Kelurahan Pilangbango (Kecamatan Kartoharjo)
375	SIMBOK (Sistem Pelayanan Berbasis Online)	Kelurahan Kelun (Kecamatan Kartoharjo)
376	Layar Pintar (Pelayanan Masyarakat Cepat Siap Antar)	Kelurahan Kelun (Kecamatan Kartoharjo)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3
377	Sosialisasi Prosedur Layanan Surat Waris (SOLARIS)	Kelurahan Klegen (Kecamatan Kartoharjo)
378	SIWALI (SIdang WAris onLIne)	Kelurahan Rejomulyo (Kecamatan Kartoharjo)
379	"VISIT TAMAN"	Kecamatan Taman
380	WED BU MAN (WISATA EDUKASI TERHUBUNG KECAMATAN TAMAN)	Kecamatan Taman
381	“PECEL TUMPANG” (PElayanan CEpat, Langsung, hemat wakTU dan gaMPANG)	Kelurahan Taman (Kecamatan Taman)
382	“TALI JIWO (TAman peduLI JIwa Warga Odgj)”	Kelurahan Taman (Kecamatan Taman)
383	APLIKASI PELAYANAN MOJOREJO (APel Mojo) "Pak T On Terus"	Kelurahan Mojorejo (Kecamatan Taman)
384	Digitalisasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (DIMAS KESOS) Untuk Pemenuhan Data Pmks	Kelurahan Pandean (Kecamatan Taman)
385	Aplikasi Perpustakaan Digital "PELITA PIJAR" (Pelayanan Literasi Perpustakaan Digital Banjarejo)	Kelurahan Banjarejo (Kecamatan Taman)
386	Pecel Madiun (Pelayanan Cerdas Literasi Masyarakat Digital Membangun)	Kelurahan Banjarejo (Kecamatan Taman)
387	SI JOS (Sistem Informasi Josenan Online Service)	Kelurahan Josenan (Kecamatan Taman)
388	TANDU MAS KEJURON (Tanggap Aduan Masyarakat Kejuron)	Kelurahan Kejuron (Kecamatan Taman)
389	LAYANG SI DEMANG (Layanan Ngantar Surat di Demangan)	Kelurahan Demangan (Kecamatan Taman)
390	PECEL SUPER AWIS (Pelayanan Cepat Legalitas Surat Pernyataan Ahli Waris)	Kelurahan Kuncen (Kecamatan Taman)
391	TAPE KUNCEN (Tata Arsip Pelayanan Elektronik Kelurahan Kuncen)	Kelurahan Kuncen (Kecamatan Taman)
392	Si APEL Manis (Sarana Insani) Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Online Manisrejo	Kelurahan Manisrejo (Kecamatan Taman)
393	Sarana Insani Mobil Ambulance Layanan Gratis (SI MANIS) untuk Masyarakat Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun	Kelurahan Manisrejo (Kecamatan Taman)
394	(TABPRESI) Tabungan Masyarakat Berprestasi	PD. BPR. Bank Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program Prioritas Daerah

Program dan kegiatan prioritas daerah dirumuskan berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dalam RKPD serta target kinerja yang telah direncanakan dalam RPJMD. Rencana kerja dan pendanaan daerah menyajikan informasi tersebut secara rinci dan terstruktur, mencakup nama program atau kegiatan, indikator kinerja yang ingin dicapai, tahun pelaksanaan, lokasi kegiatan, target capaian, kebutuhan dana atau pagu indikatif, serta klasifikasi program dan kegiatan. Dengan demikian, dokumen ini menjadi panduan bagi pelaksanaan pembangunan yang terarah dan efektif di tingkat daerah.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kota Madiun disusun secara rinci dan terperinci dalam suatu dokumen perencanaan. Penyusunan rencana ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Peraturan tersebut juga mencakup prosedur evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta tata cara perubahan terhadap dokumen perencanaan tersebut dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah yang tercantum dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2025-2029, program prioritas dalam RKPD Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Prioritas belanja daerah Kota Madiun ditentukan dengan merujuk pada prioritas pembangunan daerah yang telah diselaraskan dengan perencanaan daerah. Aspek-aspek yang menjadi dasar penyusunan prioritas tersebut antara lain:

1) RPJMD Kota Madiun Tahun 2025-2029;
2) Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;
3) Isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah;
4) Evaluasi capaian kinerja RKPD Kota Madiun Tahun 2024; dan
5) Tema Pembangunan Kota Madiun Tahun 2026.

Komposisi belanja untuk prioritas pembangunan daerah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 5. 1 Belanja Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

NO	PRIORITAS	PAGU 2026
1	Pengembangan ekonomi inklusif yang didukung oleh infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui transformasi ekonomi.	215.470.728.914,56
2	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing global	550.102.842.556,26
3	Peningkatan harmonisasi sosial dalam mewujudkan ketahanan sosial dan budaya yang berkualitas.	97.178.422.917,56
4	Peningkatan transformasi tata kelola melalui kelembagaan kolaboratif, digitalisasi, dan partisipasi masyarakat.	305.669.599.640,22
Pagu Prioritas Pembangunan		1.168.421.594.028,60

Sumber: Bapppeda Kota Madiun, 2025

Berdasarkan Tabel 5.1 diatas, total belanja prioritas Kota Madiun pada tahun 2026 adalah sebesar Rp1.168.421.594.028,60 Belanja tersebut dialokasikan untuk mendukung empat prioritas pembangunan Kota Madiun Tahun 2026, anggaran dengan jumlah terbesar diduduki 0leh Prioritas ke-2 (dua) untuk menunjang Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing global dengan alokasi anggaran Rp550.102.842.556,26 anggaran terbesar kedua diduduki oleh prioritas ke-4 (empat) untuk menunjang Peningkatan transformasi tata kelola melalui kelembagaan kolaboratif, digitalisasi, dan partisipasi masyarakat dengan anggaran sebesar Rp305.669.599.640,22 Selanjutnya anggaran terbesar ketiga diduduki prioritas ke-1 (satu) untuk menunjang Pengembangan ekonomi inklusif yang didukung oleh infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui transformasi ekonomi dengan anggaran sebesar Rp215.470.728.914,56 dan yang terakhir anggaran keempat yang diprioritaskan adalah prioritas ke-3 (tiga) untuk menunjang Peningkatan harmonisasi sosial dalam mewujudkan ketahanan sosial dan budaya yang berkualitas dengan anggaran sebesar Rp97.178.422.917,56

Urutan prioritas yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan tidak selalu sejalan dengan urutan penentuan anggaran, karena hal ini sangat dipengaruhi oleh fokus pembangunan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Madiun. Fokus tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran digunakan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan yang dianggap paling mendesak. Dalam situasi di mana terjadi pengurangan kapasitas anggaran, misalnya karena keterbatasan dana atau perubahan kondisi ekonomi, urutan prioritas yang telah ditetapkan akan menjadi acuan untuk menentukan program atau kegiatan mana yang harus ditunda atau dikurangi pelaksanaannya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dengan kata lain, prioritas pembangunan yang lebih mendesak dan strategis akan tetap dilanjutkan, sementara program yang tidak terlalu mendesak dapat ditunda sampai anggaran memungkinkan untuk dilaksanakan. Hal ini memastikan bahwa anggaran yang terbatas dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan pembangunan yang paling penting dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

Berikut merupakan gambar mengenai proporsi anggaran berdasarkan prioritas pembangunan:

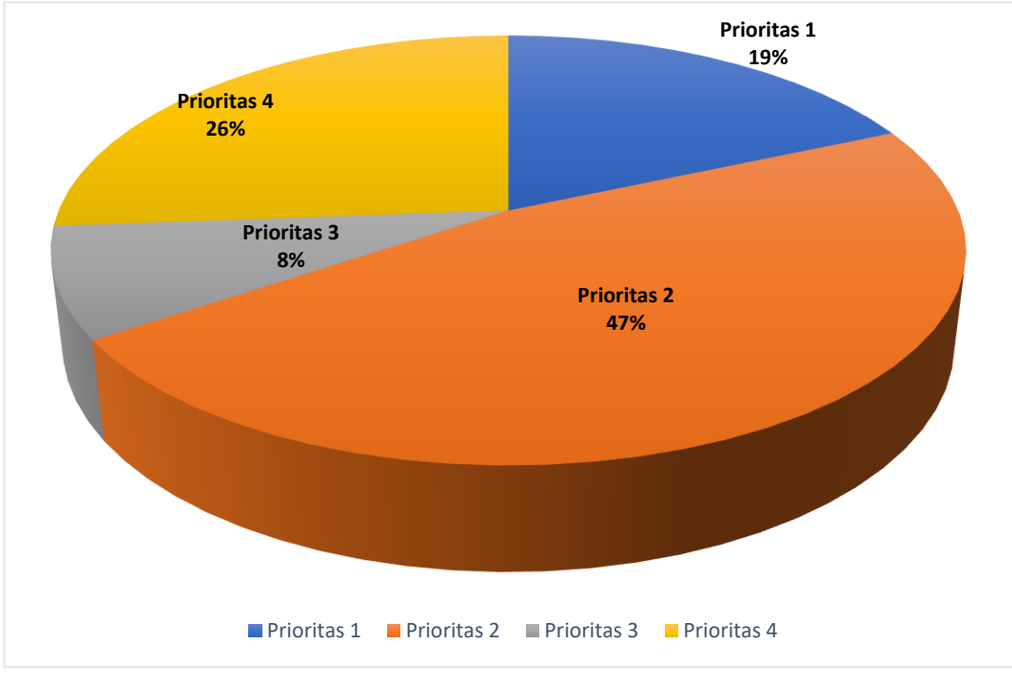

Gambar 5. 1 Belanja Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Distribusi alokasi anggaran belanja prioritas pembangunan daerah tahun 2026, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 5.1 dan divisualisasikan pada Gambar 5.1, menunjukkan proporsi yang mencerminkan arah kebijakan pembangunan daerah. Dari hasil visualisasi tersebut, terlihat bahwa prioritas pembangunan dengan alokasi tertinggi adalah Prioritas 2, yang menyerap 47% dari total anggaran belanja prioritas. Selanjutnya, Prioritas 4 menempati posisi kedua dengan alokasi sebesar 26%, kemudian terbesar ketiga adalah Prioritas 1 yang memperoleh 19%. Sementara itu, Prioritas 3 menjadi yang paling kecil alokasinya, yaitu hanya sebesar 8%. Perbedaan proporsi ini mengindikasikan skala kepentingan yang diberikan pemerintah daerah terhadap masing-masing prioritas, dengan fokus utama diletakkan pada sektor-sektor yang tercakup dalam Prioritas 2 dan 4.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5.2 Rencana Pendanaan Daerah

Rencana pendanaan pembangunan daerah tahun 2026 dapat dianalisis berdasarkan urusan pemerintahan dan berdasarkan perangkat daerah. Dari sisi urusan pemerintahan, terdapat tiga urusan utama yang menerima alokasi pendanaan terbesar, yaitu: urusan kesehatan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana; urusan pendidikan, yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan; serta urusan pekerjaan umum, yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sementara itu, informasi mengenai distribusi pagu indikatif belanja menurut perangkat daerah pada tahun 2026 disajikan secara lebih rinci dalam Tabel 5.2, sedangkan uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan setiap perangkat daerah dapat dilihat dalam Tabel 5.3. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap alokasi pendanaan yang diarahkan guna mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah secara efektif dan terukur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 5. 2 Pagu Indikatif Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah tahun 2026

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	RANCANGAN RENJA OPD 2026	RANCANGAN AKHIR RENJA OPD 2026
1	Dinas Pendidikan	4	12	163	230.002.440.000	233.774.750.000,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	22	101	278.694.539.000	278.694.401.072,36
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	19	39	106.813.130.705	104.340.658.809,49
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6	15	22	37.567.018.000	37.567.018.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3	12	22	21.248.680.000	21.248.680.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	10	21	4.532.849.000	4.532.849.000,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	29	73	28.807.477.000	27.912.200.069,63
8	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	9	17	31	15.281.284.000	15.584.720.907,00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13	24	36	15.164.302.000	15.584.720.907,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	9	17	31	25.403.034.000	27.003.030.783,07
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	9	14	8.424.587.000	8.424.587.000,00
12	Dinas Perhubungan	2	14	19	17.520.390.221	24.055.654.000,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	11	28	29.530.373.878	26.006.434.000,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	11	17	6.966.009.000	6.966.009.000,00
15	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	9	19	26	16.724.841.000,00	16.724.818.737,90
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	13	21	7.092.271.000	7.092.167.999,00
17	Dinas Perdagangan	6	14	21	16.948.000.000	16.948.000.000,00
18	Sekretariat Daerah	11	46	76	49.937.638.000	49.745.718.813,82
19	Sekretariat DPRD	2	14	24	45.424.083.000	45.424.083.000,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	4	14	33	11.497.000.000	11.672.582.887,67
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	11	25	53.373.266.000	56.076.215.542,14
22	Badan Pendapatan Daerah	2	8	25	13.801.205.520	13.801.205.520,00
23	Badan Kepegawaian dan Sumber daya Manusia	3	12	19	11.535.555.000	11.535.555.000,00
24	Inspektorat	3	10	20	11.632.068.000	11.632.068.000,00
25	Kecamatan Kartoharjo	5	14	48	25.234.617.000	25.234.616.638,91
26	Kecamatan Manguharjo	6	14	46	26.419.812.381	26.419.812.000,00
27	Kecamatan Taman	5	14	45	26.430.937.000	26.430.936.800,88
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	11	21	17.988.366.000	17.988.099.539,73
	TOTAL	163	436	1.067	1.159.995.773.705	1.168.421.594.028,60

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 5. 3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2026

Prioritas 1 Pengembangan ekonomi inklusif yang didukung oleh infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui transformasi ekonomi

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			104.340.658.809,49							116.059.123.644,50	
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	17.389.600.952,49						-	15.508.411.150,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	100%	379.589.960,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Dinas PUPR	-	286.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	54.042.250,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Dinas PUPR		154.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	325.547.710,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Dinas PUPR		132.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan keuangan	100%	4.962.754.767,15			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas PUPR	-	5.111.259.109,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	4.962.754.767,15	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas PUPR		5.111.259.109,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan Umum	100%	583.503.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas PUPR	-	514.213.700,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	583.503.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas PUPR		514.213.700,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan kebutuhan barang milik urusan pemerintah daerah	100%	522.472.555,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas PUPR	-	1.718.174.404,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	387.192.550,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas PUPR		400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	135.280.005,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas PUPR		1.318.174.404,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	9.093.423.606,84			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas PUPR	-	5.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	9.093.423.606,84	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas PUPR		5.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 persen	1.847.857.063,50			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas PUPR	-	2.378.763.937,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	54 Unit	1.084.814.450,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas PUPR		1.110.113.037,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	477.070.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas PUPR		1.015.650.900,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	285.972.613,50	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas PUPR		253.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	16.74 %	7.511.689.900,00						-	8.160.449.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan bebas banjir/genangan	83,03%	7.511.689.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun Madiun	-	8.160.449.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.02.2.01.0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	1 Unit	438.108.900,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun Madiun		481.921.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	236.566.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun Madiun		974.886.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang	1.55 KM	6.837.015.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun Madiun		6.703.642.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/kota	100%	677.088.000,00						-	710.214.230,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga terlayani kebutuhan air minum	100%	677.088.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun Madiun	-	710.214.230,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR	677.088.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun Madiun		710.214.230,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	100%	1.134.194.000,00						-	1.837.138.050,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan limbah domestik	100%	1.134.194.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun Madiun	-	1.837.138.050,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	5 Unit	329.315.500,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun Madiun		360.608.050,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	1 Unit	804.878.500,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun Madiun		1.476.530.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	82,01%	18.132.540.000,00						-	20.978.971.200,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	81,67%	18.132.540.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat	-	20.978.971.200,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	2000 M	7.680.236.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		8.396.157.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan	7.830.080.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		8.567.913.200,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	12 Dokumen	950.787.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		1.044.901.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Sistem Drainase Perkotaan	1.671.437.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		2.970.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
6	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung dalam Kondisi Baik	100%	21.803.252.600,00						-	26.125.000.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100%	21.803.252.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat	-	26.125.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	8 Bangunan Gedung	607.834.800,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		550.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	20.945.422.800,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		25.300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	10 Dokumen	249.995.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		275.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
7	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	100%	3.085.893.500,00						-	1.100.000.000,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan yang terbangun/terehabilitasi	100%	3.085.893.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun Madiun	-	1.100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	1 Kawasan	3.085.893.500,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun Madiun		1.100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
8	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantaban Jalan	95,90%	32.126.038.400,00						-	38.591.940.014,50	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantab	95,90%	32.126.038.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat	-	38.591.940.014,50	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	5 Dokumen	222.289.400,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		244.198.240,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	433.485 KM	408.806.100,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		449.691.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0050	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	1 KM	3.610.884.800,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		3.764.492.929,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	20 KM	4.049.607.300,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		5.203.157.845,50	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	1 KM	2.228.709.500,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		2.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	8 KM	15.670.719.200,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		20.660.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	15 Jembatan	238.456.500,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		243.100.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	1 KM	710.558.400,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		802.300.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	12 Meter	4.986.007.200,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		5.025.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
9	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi ahli	100%	919.769.400,00						-	1.397.000.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga jasa konstruksi yang kompeten	100%	218.274.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat	-	286.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	60 Orang	218.274.800,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		286.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan Sistem informasi Jasa Konstruksi	100%	52.601.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat	-	121.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen	52.601.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		121.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase badan usaha konstruksi yang diawasi	100%	648.893.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat	-	990.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	100 Paket Pekerjaan	648.893.600,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		990.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
10	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah	100%	1.560.592.057,00						-	1.650.000.000,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	100%	649.999.760,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat	-	715.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	649.999.760,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		715.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase surat teguran yang ditindak lanjuti	100%	519.999.702,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun Madiun	-	550.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	20 Dokumen	519.999.702,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun Madiun		550.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepastian hukum pemanfaatan ruang	100%	390.592.595,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat	-	385.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	120 Dokumen	390.592.595,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		385.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,15 nilai	16.882.592.341,00						-	16.922.741.775,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan,pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	88.050.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Perencanaan	-	90.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	28.050.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Perencanaan		29.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	60.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Perencanaan		61.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	3.678.308.604,15			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Administrasi Keuangan	-	3.747.039.869,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	3.678.308.604,15	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Administrasi Keuangan		3.747.039.869,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100%	115.350.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Administrasi Keuangan	-	116.350.000,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	115.350.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Administrasi Keuangan		116.350.000,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100%	283.880.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Administrasi Umum	-	283.880.000,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	283.880.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Administrasi Umum		283.880.000,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100%	195.134.275,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pengadaan Barang Milik Daerah	-	170.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	22 Unit	195.134.275,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pengadaan Barang Milik Daerah		170.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%	9.987.263.461,85			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Penyediaan Jasa	-	9.904.240.356,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.987.263.461,85	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Penyediaan Jasa		9.904.240.356,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100%	2.534.606.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	pemeliharaan barang milik daerah	-	2.611.231.550,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	65 Unit	1.924.441.500,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	pemeliharaan barang milik daerah		1.990.986.550,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	pemeliharaan barang milik daerah		110.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	106 Unit	510.164.500,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan,	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern,	pemeliharaan barang milik daerah		510.245.000,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			yang Dipelihara/Direhabilitasi			Semua Kel/Desa		mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi				Kawasan Permukiman
2	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Pengembangan Perumahan	100%	811.466.000,00						-	1.277.841.000,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang dihasilkan	1 dokumen	66.360.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pendataan rumah rawan bencana	-	67.360.000,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	66.360.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pendataan rumah rawan bencana		67.360.000,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	3 unit	745.106.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana & Relokasi	-	1.210.481.000,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	3 Unit Rumah	745.106.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana & Relokasi		1.210.481.000,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
3	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	9,75%	6.443.250.000,00						-	6.861.650.000,00	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	9,75%	405.224.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	-	301.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	405.224.600,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh		301.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	9,75%	6.038.025.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	-	6.560.650.000,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi				
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	160 Unit Rumah	2.224.076.500,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh		2.368.850.000,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	16,41 Ha	2.687.706.800,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh		1.412.350.000,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	57 Unit	1.126.242.100,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh		2.779.450.000,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
4	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	12.643.855.225,00						-	12.650.580.225,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase penyelenggaraan PSU perumahan yang memadai	100%	12.643.855.225,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	PSU Perumahan	-	12.650.580.225,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	28.275.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	PSU Perumahan		35.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	3 Lokasi	12.615.580.225,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	PSU Perumahan		12.615.580.225,00	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
1	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	81 nilai	16.475.676.817,47						-	13.022.000.000,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	5.970.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Kota Madiun	-	12.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	5.970.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Kota Madiun		12.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	5.600.900.431,51			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Kota Madiun	-	5.850.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	5.600.900.431,51	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Kota Madiun		5.850.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100%	124.280.160,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Kota Madiun	-	250.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	100.619.110,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Kota Madiun		150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	53 Orang	23.661.050,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Kota Madiun		100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	299.911.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Kota Madiun	-	350.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	299.911.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Kota Madiun		350.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tercukupinya pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	54.658.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Kota Madiun	-	350.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	25.010.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Kota Madiun		250.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	29.648.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Kota Madiun		100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	8.721.442.805,56			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Kota Madiun	-	4.500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.721.442.805,56	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Kota Madiun		4.500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%	1.668.514.420,40			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Kota Madiun	-	1.710.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	1.459.587.740,40	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Kota Madiun		1.500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	109.924.680,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Kota Madiun		110.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	99.002.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Kota Madiun		100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Rekomendasi Kajian Lingkungan yang Ditindaklanjuti	100%	182.200.600,00						-	318.000.000,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi RPPLH yang tersedia	1 dokumen	161.696.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Kota Madiun	-	168.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	161.696.600,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Kota Madiun		168.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi kajian LH yang tersedia	1 dokumen	20.504.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Kota Madiun	-	150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	1 Dokumen	20.504.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Kota Madiun		150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
3	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Udara	82.73 Indeks	1.063.554.947,60						-	990.000.000,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya	79 kegiatan	600.000.086,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Kota Madiun	-	600.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	250.000.086,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Kota Madiun		250.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Kota Madiun		100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.01.0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	22 Laporan	250.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Kota Madiun		250.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah usaha / kegiatan yang sudah melakukan pengolahan limbah cair	18 kegaitan/ usaha	210.999.491,60			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Kota Madiun	-	215.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 Laporan	210.999.491,60	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Kota Madiun		215.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan terhadap pelaku usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar	12 pelaku usaha	252.555.370,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	pembinaan pelaku usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar	-	175.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 Dokumen	252.555.370,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	pembinaan pelaku usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar		175.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
1	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,80 Nilai	12.049.782.148,00						-	12.345.000.000,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	19.110.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas Perhubungan Kota Madiun	-	20.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	19.110.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas Perhubungan Kota Madiun		20.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	5.738.340.994,37			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas Perhubungan Kota Madiun	-	5.800.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	5.738.340.994,37	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas Perhubungan Kota Madiun		5.800.000.000,00	Dinas Perhubungan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100%	124.515.150,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas Perhubungan Kota Madiun	-	125.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	124.515.150,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas Perhubungan Kota Madiun		125.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi Umum	100%	250.743.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas Perhubungan Kota Madiun	-	250.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	250.743.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas Perhubungan Kota Madiun		250.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan peralatan kantor	100%	107.745.110,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas Perhubungan Kota Madiun	-	150.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	107.745.110,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas Perhubungan Kota Madiun		150.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor	100%	4.866.018.753,63			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas Perhubungan Kota Madiun	-	4.900.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	4.866.018.753,63	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas Perhubungan Kota Madiun		4.900.000.000,00	Dinas Perhubungan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang layak digunakan	100%	943.309.140,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas Perhubungan Kota Madiun	-	1.100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	57 Unit	754.751.700,00	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas Perhubungan Kota Madiun		760.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	49.570.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas Perhubungan Kota Madiun		200.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	138.987.440,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas Perhubungan Kota Madiun		140.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana, prasarana, dan perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	100%	12.005.871.852,00						-	15.885.000.000,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang berfungsi baik	100%	9.364.852.520,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun Madiun	-	13.200.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	200 Unit	8.175.551.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), P BJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun Madiun		12.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	1.189.301.520,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun Madiun		1.200.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal berfungsi baik	100%	49.998.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern,	Masyarakat Kota Madiun Madiun	-	50.000.000,00	Dinas Perhubungan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi				
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit	49.998.000,00	Kota Madiun, Taman, Manisrejo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun Madiun		50.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase fasilitas terselanggaranya pelayanan parkir yang baik	100%	814.642.422,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun Madiun	-	850.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	814.642.422,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun Madiun		850.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan lulus uji	100%	313.430.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun Madiun	-	315.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4000 Dokumen	90.210.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun Madiun		91.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	223.220.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun Madiun		224.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100%	137.826.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun Madiun	-	140.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa	6 Laporan	137.826.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern,	Masyarakat Kota Madiun Madiun		140.000.000,00	Dinas Perhubungan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi					mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi				
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase terlaksananya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	100%	425.694.610,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun Madiun	-	430.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	425.694.610,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun Madiun		430.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan angkutan umum	100%	899.428.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun Madiun	-	900.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	37 Unit	899.428.300,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun Madiun		900.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
1	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Pelatihan	46%	175.183.000,00						-	300.183.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan dukungan fasilitas pelatihan	77 koperasi	175.183.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Koperasi	-	300.183.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	150 Orang	175.183.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Koperasi		300.183.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas	2,50%	279.985.420,00						-	285.985.420,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	5 koperasi	279.985.420,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Koperasi	-	285.985.420,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	60 Unit Usaha	279.985.420,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Koperasi		285.985.420,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan wirausaha	10%	303.436.907,00						-	303.436.907,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaa	6%	303.436.907,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Usaha Mikro	-	303.436.907,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	60 Orang	303.436.907,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Usaha Mikro		303.436.907,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
4	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro terfasilitasi beromset naik	7,33%	228.448.259,00						-	228.448.259,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang terfasilitasi	11 Orang	228.448.259,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Usaha Mikro	-	228.448.259,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha	228.448.259,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Usaha Mikro		228.448.259,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2,18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
1	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,10 nilai	5.990.971.433,00						-	11.634.892.237,25	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 Persen	15.257.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas	Pegawai DPMPTSP	-	32.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi				
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	15.257.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai DPMPTSP		32.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 Persen	2.586.272.969,20			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai DPMPTSP	-	4.321.523.961,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	2.586.272.969,20	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai DPMPTSP		4.321.523.961,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 Persen	258.886.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai DPMPTSP	-	274.233.794,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	258.886.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai DPMPTSP		274.233.794,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	391.061.125,20			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai DPMPTSP	-	150.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	391.061.125,20	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai DPMPTSP		150.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.578.788.841,60			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang	Pegawai DPMPTSP	-	773.111.161,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi				Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan	2.578.788.841,60	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai DPMPTSP		773.111.161,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 Persen	160.705.497,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai DPMPTSP	-	6.084.023.321,25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	72.083.600,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai DPMPTSP		107.558.246,25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35.110.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai DPMPTSP		32.281.200,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	53.511.897,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai DPMPTSP		5.944.183.875,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi total terhadap target investasi	90 Persen	51.482.275,00						-	51.000.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal	1 Dokumen	51.482.275,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Investor di Kota Madiun Madiun	-	51.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	51.482.275,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Investor di Kota Madiun Madiun		51.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	44 Persen	161.918.292,00						-	316.391.800,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi	jumlah investor baru	60 investor	161.918.292,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern,	Investor di Kota Madiun	-	316.391.800,00	Dinas Penanaman Modal Dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi				Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	161.918.292,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Investor di Kota Madiun		316.391.800,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	98 Persen	396.664.700,00						-	619.700.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemohon Izin	6000 izin	396.664.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat pemohon izin	-	619.700.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6000 Pelaku Usaha	173.482.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat pemohon izin		233.215.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	20 Pelaku Usaha	112.507.700,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat pemohon izin		166.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	325 Kegiatan Usaha	110.675.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat pemohon izin		220.485.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100 Persen	214.146.000,00						-	470.000.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina	400 Pelaku Usaha	214.146.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Investor di Kota Madiun	-	470.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi	10 Kegiatan Usaha	33.010.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan,	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern,	Investor di Kota Madiun		29.491.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			Semua Kel/Desa		mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi				Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400 Pelaku Usaha	145.926.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Investor di Kota Madiun		398.107.500,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	25 Kegiatan Usaha	35.210.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Investor di Kota Madiun		42.401.500,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
1	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	290.5 Ton	408.068.639,00						-	255.880.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang terbentuk	30 Kelompok	230.034.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat	-	0	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	7 Kelompok	230.034.800,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		0	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) (RTP)	260 RTP	178.033.839,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat	-	255.880.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	43.876.225,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		43.880.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	101.849.614,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		155.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan	130 Unit	32.308.000,00	Kota Madiun, Semua	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan	Masyarakat		57.000.000,00	Dinas Ketahanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			Kecamatan, Semua Kel/Desa		kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Nelayan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi				Pangan Dan Pertanian
3	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	20.47 Kg/Kapita/Tahun	221.566.671,00						-	252.256.950,00	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengolah dan pemasar ikan yang dibina	50 Orang	18.304.125,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat	-	43.393.750,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 Unit Usaha	18.304.125,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		43.393.750,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan skala rumah tangga	30 Ton	203.262.546,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat	-	208.863.200,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	14 Pelaku Usaha	203.262.546,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		208.863.200,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
1	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	11,86%	297.996.000,00						-	298.000.000,00	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi	3 Lokasi	297.996.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun Madiun	-	298.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 Lokasi	100.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun		100.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	197.996.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun		198.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	25%	464.999.890,00				JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi		-	465.000.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pemasaran pariwisata	4 Event	464.999.890,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun	-	465.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan	464.999.890,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun		465.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
1	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Stabilitas Produktivitas Pertanian Stabilitas Produksi Komoditas Peternakan	6.95 Ton/Ha 1615 Ekor/Tahun	2.895.078.888,00						-	2.485.900.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian Terhadap Kebutuhan Petani	80%	2.770.078.888,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat	-	2.360.900.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	149.987.820,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		150.900.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	2.620.091.068,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		2.210.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik	75%	125.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat	-	125.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan	12 Laporan	125.000.000,00	Kota Madiun, Semua	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan	Masyarakat		125.000.000,00	Dinas Ketahanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil			Kecamatan, Semua Kel/Desa		lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Nelayan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi				Pangan Dan Pertanian
2	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana yang berfungsi dengan baik	50%	2.106.064.000,00						-	2.198.500.000,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pengembangan prasarana pertanian	100%	516.000,00			-	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat	-	0	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	516.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		0	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang Terbangun/Rehabilitasi/Dipelihara	25%	2.105.548.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat	-	2.198.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	516.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	516.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	516.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	2.104.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		2.197.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
6	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase jumlah SDM pertanian terlatih	20%	685.087.000,00						-	685.087.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Pertanian Terlatih	200 Orang	685.087.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan	Masyarakat	-	685.087.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi				
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	88 Unit	685.087.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat		685.087.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	3.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
1	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,37 Nilai	14.240.062.920,00						-	10.709.817.190,00	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	28.182.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas Perdagangan	-	11.140.500,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	28.182.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas Perdagangan		11.140.500,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %`	5.887.829.144,39			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas Perdagangan	-	6.156.749.025,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	5.887.829.144,39	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas Perdagangan		6.156.749.025,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100%	74.088.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas Perdagangan	-	68.488.350,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	74.088.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas Perdagangan		68.488.350,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	243.108.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang	Pegawai Dinas Perdagangan	-	255.326.290,00	Dinas Perdagangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi				
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	243.108.900,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas Perdagangan		255.326.290,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100%	108.721.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas Perdagangan	-	354.036.900,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	41.060.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas Perdagangan		300.707.400,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	67.661.100,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas Perdagangan		53.329.500,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%	7.528.397.923,61			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas Perdagangan	-	3.476.488.365,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.528.397.923,61	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas Perdagangan		3.476.488.365,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%	369.735.852,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas Perdagangan	-	387.587.760,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45 Unit	283.998.252,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas	Pegawai Dinas Perdagangan		298.210.500,00	Dinas Perdagangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi				
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	25.494.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas Perdagangan		26.131.350,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	122 Unit	60.243.600,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Pegawai Dinas Perdagangan		63.245.910,00	Dinas Perdagangan
	3.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
3	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	100%	1.858.554.780,00						-	5.893.951.363,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dikelola sarana distribusinya	17 Pasar	1.394.268.980,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun	-	1.432.485.088,00	Dinas Perdagangan
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	425.690.600,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun		446.976.075,00	Dinas Perdagangan
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17 Unit	968.578.380,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun		985.509.013,00	Dinas Perdagangan
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100%	464.285.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun	-	4.461.466.275,00	Dinas Perdagangan
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	119.544.800,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun		336.236.250,00	Dinas Perdagangan
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	344.741.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang	Masyarakat Kota Madiun		4.125.230.025,00	Dinas Perdagangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi				
6	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	100%	261.985.100,00						-	275.100.000,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah terlaksananya promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	4 Kali	261.985.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun	-	275.100.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	4 UMKM	261.985.100,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembang an Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun		275.100.000,00	Dinas Perdagangan
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
1	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan	20%	1.330.120.000,00						-	1.340.120.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pertumbuhan Industri Pengolahan yang terdaftar	1500 IKM	1.330.120.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	IKM	-	1.340.120.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	223.840.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	IKM		223.840.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen	85.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	IKM		85.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	996.280.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	IKM		996.280.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	IKM		35.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Total Pagu Prioritas 1				**215.470.728.914,56**								

Prioritas 2 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing global

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	85,27 Nilai	185.688.985.798,20						-	180.342.162.744,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan dan kepegawaian	100%	7.114.930.770,05			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Dokumen	-	7.382.980.983,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	7.114.930.770,05	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Dokumen		7.382.980.983,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	162.474.376.681,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan	-	161.927.066.681,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1438 Orang/bulan	162.474.376.681,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan		161.927.066.681,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	249.644.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Kantor Dinas Pendidikan	-	300.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	249.644.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Kantor Dinas Pendidikan		300.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah	100%	51.260.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Kantor Dinas Pendidikan	-	404.137.120,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	51.260.600,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Kantor Dinas Pendidikan		404.137.120,00	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa Urusan Pemerintah Daerah	100%	15.279.523.679,15			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Kantor Dinas Pendidikan	-	9.645.881.960,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15.279.523.679,15	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Kantor Dinas Pendidikan		9.645.881.960,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%	519.250.068,00	-	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Kantor Dinas Pendidikan	-	682.096.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	66 Unit	187.309.874,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Kantor Dinas Pendidikan		208.674.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	276 Unit	155.884.748,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Kantor Dinas Pendidikan		203.347.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	176.055.446,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Kantor Dinas Pendidikan		270.075.000,00	Dinas Pendidikan
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	21.653.513.918,80						-	25.863.235.404,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	6.789.962.201,80			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	6.871.952.960,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	421 Peserta Didik	524.730.280,80	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		662.788.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan	68 Satuan Pendidikan	392.178.720,00	Kota Madiun, Semua	DAU yang Ditentukan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang	Satuan Pendidikan		457.986.000,00	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Kelembagaan dan manajemen sekolah			Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penggunaannya Bidang Pendidikan	pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global				
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	15 Satuan Pendidikan	2.807.070.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, DAK Non Fisik-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		2.805.660.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	3.065.983.201,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		2.945.518.960,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah Menengah Pertama yang dikelola dengan baik	100%	5.787.512.347,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	9.511.403.444,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	256.264.937,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		2.281.672.450,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5850 Paket	4.002.080.400,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		5.696.025.994,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	218 Peserta Didik	382.338.040,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		448.479.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	24 Satuan Pendidikan	107.238.970,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		170.466.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	9 Satuan Pendidikan	1.039.590.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		914.760.000,00	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Satuan PAUD yang dikelola dengan baik	100%	7.565.870.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	7.718.930.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	983 Orang	3.538.800.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		3.456.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	155 Satuan Pendidikan	282.890.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		518.750.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	90 Satuan Pendidikan	3.744.180.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Paud Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		3.744.180.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan yang dikelola dengan baik	100%	1.510.169.370,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	1.760.949.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	6 Satuan Pendidikan	816.729.370,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		1.067.509.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	6 Satuan Pendidikan	693.440.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		693.440.000,00	Dinas Pendidikan
3	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	100%	1.076.895.283,00						-	1.580.756.130,00	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	100%	885.225.383,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	998.799.530,00	Dinas Pendidikan
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	172.989.700,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan,	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan	Satuan Pendidikan		223.000.000,00	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Semua Kel/Desa	Bidang Pendidikan	olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global				
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	180 Orang	149.407.379,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		162.968.680,00	Dinas Pendidikan
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	562.828.304,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		612.830.850,00	Dinas Pendidikan
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase satuan Paud dan pendidikan non formal yang melaksanakan penyusunan silabus muatan lokal	100%	191.669.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	581.956.600,00	Dinas Pendidikan
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	191.669.900,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		581.956.600,00	Dinas Pendidikan
4	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang bersertifikasi	74%	685.919.000,00						-	1.486.812.000,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang melaksanakan pelatihan	100%	685.919.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Tenaga Pendidik dan Kependidikan	-	1.486.812.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	256.460.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Tenaga Pendidik dan Kependidikan		741.312.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	429.459.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Tenaga Pendidik dan Kependidikan		745.500.000,00	Dinas Pendidikan
		SDN 01 KARTOHARJO			372.900.000,00							451.350.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	372.900.000,00						-	451.350.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	372.900.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang	Satuan Pendidikan	-	451.350.000,00	SDN 01 KARTOHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global				
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	321.750.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		321.750.000,00	SDN 01 KARTOHARJO
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	51.150.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		129.600.000,00	SDN 01 KARTOHARJO
		SDN 02 KARTOHARJO			70.890.000,00							211.590.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	70.890.000,00						-	211.590.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	70.890.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	211.590.000,00	SDN 02 KARTOHARJO
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	60.390.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		60.390.000,00	SDN 02 KARTOHARJO
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	10.500.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		151.200.000,00	SDN 02 KARTOHARJO
		SDN 01 KLEGEN			407.910.000,00							474.510.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	-	407.910.000,00						-	474.510.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	407.910.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	474.510.000,00	SDN 01 KLEGEN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	325.710.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan,	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan	Satuan Pendidikan		325.710.000,00	SDN 01 KLEGEN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Semua Kel/Desa		penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global				
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	82.200.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		148.800.000,00	SDN 01 KLEGEN
		SDN 02 KLEGEN			138.600.000,00							212.400.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	138.600.000,00						-	212.400.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	138.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	212.400.000,00	SDN 02 KLEGEN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	118.800.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		118.800.000,00	SDN 02 KLEGEN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	19.800.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		93.600.000,00	SDN 02 KLEGEN
		SDN 03 KLEGEN			360.720.000,00							463.470.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	360.720.000,00						-	463.470.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	360.720.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	463.470.000,00	SDN 03 KLEGEN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	309.870.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		309.870.000,00	SDN 03 KLEGEN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	50.850.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		153.600.000,00	SDN 03 KLEGEN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		SDN 04 KLEGEN			87.840.000,00							168.840.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	87.840.000,00						-	168.840.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	87.840.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	168.840.000,00	SDN 04 KLEGEN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	75.240.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		75.240.000,00	SDN 04 KLEGEN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	12.600.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		93.600.000,00	SDN 04 KLEGEN
		SDN ORO ORO OMBO			241.250.000,00							306.300.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	241.250.000,00						-	306.300.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	241.250.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	306.300.000,00	SDN ORO ORO OMBO
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	207.900.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		207.900.000,00	SDN ORO ORO OMBO
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	33.350.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		98.400.000,00	SDN ORO ORO OMBO
		SDN 01 REJOMULYO			129.330.000,00							262.080.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	129.330.000,00						-	262.080.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	129.330.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas	Satuan Pendidikan	-	262.080.000,00	SDN 01 REJOMULYO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global				
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	110.880.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		110.880.000,00	SDN 01 REJOMULYO
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	18.450.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		151.200.000,00	SDN 01 REJOMULYO
		SDN 01 KANIGORO			73.170.000,00							136.770.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	73.170.000,00						-	136.770.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	73.170.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	136.770.000,00	SDN 01 KANIGORO
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	62.370.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		62.370.000,00	SDN 01 KANIGORO
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	10.800.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		74.400.000,00	SDN 01 KANIGORO
		SDN 02 KANIGORO			187.020.000,00							235.770.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	187.020.000,00						-	235.770.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	187.020.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	235.770.000,00	SDN 02 KANIGORO
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	161.370.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		161.370.000,00	SDN 02 KANIGORO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	25.650.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		74.400.000,00	SDN 02 KANIGORO
		SDN 03 KANIGORO			181.470.000,00							250.020.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	181.470.000,00						-	250.020.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	181.470.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	250.020.000,00	SDN 03 KANIGORO
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	156.420.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		156.420.000,00	SDN 03 KANIGORO
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	25.050.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		93.600.000,00	SDN 03 KANIGORO
		SDN SUKOSARI			62.390.000,00							147.940.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	62.390.000,00						-	147.940.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	62.390.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	147.940.000,00	SDN SUKOSARI
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	35.640.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		35.640.000,00	SDN SUKOSARI
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	26.750.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		112.300.000,00	SDN SUKOSARI
		SDN PILANGBANGO			311.640.000,00							402.690.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	311.640.000,00						-	402.690.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	311.640.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	402.690.000,00	SDN PILANGBANGO
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	268.290.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		268.290.000,00	SDN PILANGBANGO
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	43.350.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		134.400.000,00	SDN PILANGBANGO
		SDN 01 TAWANGREJO			188.310.000,00							241.560.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	188.310.000,00						-	241.560.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	188.310.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	241.560.000,00	SDN 01 TAWANGREJO
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	162.360.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		162.360.000,00	SDN 01 TAWANGREJO
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	25.950.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		79.200.000,00	SDN 01 TAWANGREJO
		SDN 02 TAWANGREJO			106.080.000,00							146.280.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	106.080.000,00						-	146.280.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	106.080.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	146.280.000,00	SDN 02 TAWANGREJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	91.080.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		91.080.000,00	SDN 02 TAWANGREJO
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		55.200.000,00	SDN 02 TAWANGREJO
		SDN KELUN			230.700.000,00							271.650.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	230.700.000,00						-	271.650.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	230.700.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	271.650.000,00	SDN KELUN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	173.250.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		173.250.000,00	SDN KELUN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	57.450.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		98.400.000,00	SDN KELUN
		SDN 01 MANGUHARJO			311.260.000,00							356.910.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	311.260.000,00						-	356.910.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	311.260.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	356.910.000,00	SDN 01 MANGUHARJO
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	246.510.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		246.510.000,00	SDN 01 MANGUHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	64.750.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		110.400.000,00	SDN 01 MANGUHARJO
		SDN 01 NAMBANGAN LOR			310.800.000,00							420.900.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	310.800.000,00						-	420.900.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	310.800.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	420.900.000,00	SDN 01 NAMBANGAN LOR
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	267.300.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		267.300.000,00	SDN 01 NAMBANGAN LOR
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	43.500.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		153.600.000,00	SDN 01 NAMBANGAN LOR
		SDN 02 NAMBANGAN LOR			144.690.000,00							223.140.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	144.690.000,00						-	223.140.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	144.690.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	223.140.000,00	SDN 02 NAMBANGAN LOR
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	124.740.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		124.740.000,00	SDN 02 NAMBANGAN LOR
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	19.950.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		98.400.000,00	SDN 02 NAMBANGAN LOR
		SDN 01 MADIUN LOR			97.110.000,00							200.760.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	97.110.000,00						-	200.760.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	97.110.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	200.760.000,00	SDN 01 MADIUN LOR
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	83.160.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		83.160.000,00	SDN 01 MADIUN LOR
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	13.950.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		117.600.000,00	SDN 01 MADIUN LOR
		SDN 02 MADIUN LOR			103.950.000,00							163.500.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	103.950.000,00						-	163.500.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	103.950.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	163.500.000,00	SDN 02 MADIUN LOR
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	89.100.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		89.100.000,00	SDN 02 MADIUN LOR
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	14.850.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		74.400.000,00	SDN 02 MADIUN LOR
		SDN 03 MADIUN LOR			609.450.000,00							742.350.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	609.450.000,00						-	742.350.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	609.450.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	742.350.000,00	SDN 03 MADIUN LOR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	499.950.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		499.950.000,00	SDN 03 MADIUN LOR
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	109.500.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		242.400.000,00	SDN 03 MADIUN LOR
		SDN 04 MADIUN LOR			356.940.000,00							399.090.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	356.940.000,00						-	399.090.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	356.940.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	399.090.000,00	SDN 04 MADIUN LOR
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	307.890.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		307.890.000,00	SDN 04 MADIUN LOR
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	49.050.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		91.200.000,00	SDN 04 MADIUN LOR
		SDN 05 MADIUN LOR			555.510.000,00							668.760.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	555.510.000,00						-	668.760.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	555.510.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	668.760.000,00	SDN 05 MADIUN LOR
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	479.160.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		479.160.000,00	SDN 05 MADIUN LOR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	76.350.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		189.600.000,00	SDN 05 MADIUN LOR
		SDN 01 NAMBANGAN KIDUL			163.290.000,00							239.190.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	163.290.000,00						-	239.190.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	163.290.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	239.190.000,00	SDN 01 NAMBANGAN KIDUL
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	139.590.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		139.590.000,00	SDN 01 NAMBANGAN KIDUL
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	23.700.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		99.600.000,00	SDN 01 NAMBANGAN KIDUL
		SDN 02 NAMBANGAN KIDUL			151.830.000,00							205.080.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	151.830.000,00						-	205.080.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	151.830.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	205.080.000,00	SDN 02 NAMBANGAN KIDUL
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	130.680.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		130.680.000,00	SDN 02 NAMBANGAN KIDUL
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	21.150.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		74.400.000,00	SDN 02 NAMBANGAN KIDUL
		SDN 03 NAMBANGAN KIDUL			335.880.000,00							437.880.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	335.880.000,00						-	437.880.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	335.880.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	437.880.000,00	SDN 03 NAMBANGAN KIDUL
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	289.080.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		289.080.000,00	SDN 03 NAMBANGAN KIDUL
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	46.800.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		148.800.000,00	SDN 03 NAMBANGAN KIDUL
		SDN 01 WINONGO			350.100.000,00							431.550.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	350.100.000,00						-	431.550.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	350.100.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	431.550.000,00	SDN 01 WINONGO
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	301.950.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		301.950.000,00	SDN 01 WINONGO
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	48.150.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		129.600.000,00	SDN 01 WINONGO
		SDN 02 WINONGO			81.080.000,00							149.880.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	81.080.000,00						-	149.880.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	81.080.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	149.880.000,00	SDN 02 WINONGO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	51.480.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		51.480.000,00	SDN 02 WINONGO
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	29.600.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		98.400.000,00	SDN 02 WINONGO
		SDN NGEGONG			204.720.000,00							269.820.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	204.720.000,00						-	269.820.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	204.720.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	269.820.000,00	SDN NGEGONG
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	176.220.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		176.220.000,00	SDN NGEGONG
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	28.500.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		93.600.000,00	SDN NGEGONG
		SDN PATIHAN			281.550.000,00							372.150.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	281.550.000,00						-	372.150.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	281.550.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	372.150.000,00	SDN PATIHAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	242.550.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		242.550.000,00	SDN PATIHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	39.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		129.600.000,00	SDN PATIHAN
		SDN 01 PANGONGANGAN			326.850.000,00							475.350.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	326.850.000,00						-	475.350.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	326.850.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	475.350.000,00	SDN 01 PANGONGANGAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	282.150.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		282.150.000,00	SDN 01 PANGONGANGAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	44.700.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		193.200.000,00	SDN 01 PANGONGANGAN
		SDN SOGATEN			191.340.000,00							238.740.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	191.340.000,00						-	238.740.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	191.340.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	238.740.000,00	SDN SOGATEN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	164.340.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		164.340.000,00	SDN SOGATEN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	27.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		74.400.000,00	SDN SOGATEN
		SDN 01 TAMAN			580.950.000,00							751.200.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	580.950.000,00						-	751.200.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	580.950.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	751.200.000,00	SDN 01 TAMAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	475.200.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		475.200.000,00	SDN 01 TAMAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	105.750.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		276.000.000,00	SDN 01 TAMAN
		SDN 02 TAMAN			90.890.000,00							153.990.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	90.890.000,00						-	153.990.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	90.890.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	153.990.000,00	SDN 02 TAMAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	60.390.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		60.390.000,00	SDN 02 TAMAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	30.500.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		93.600.000,00	SDN 02 TAMAN
		SDN 03 TAMAN			83.730.000,00							145.680.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	83.730.000,00						-	145.680.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	83.730.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	145.680.000,00	SDN 03 TAMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	71.280.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		71.280.000,00	SDN 03 TAMAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	12.450.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		74.400.000,00	SDN 03 TAMAN
		SDN 01 PANDEAN			370.620.000,00							454.170.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	370.620.000,00						-	454.170.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	370.620.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	454.170.000,00	SDN 01 PANDEAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	319.770.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		319.770.000,00	SDN 01 PANDEAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	50.850.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		134.400.000,00	SDN 01 PANDEAN
		SDN 02 PANDEAN			383.670.000,00							453.720.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	383.670.000,00						-	453.720.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	383.670.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	453.720.000,00	SDN 02 PANDEAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	304.920.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		304.920.000,00	SDN 02 PANDEAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	78.750.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		148.800.000,00	SDN 02 PANDEAN
		SDN BANJAREJO			526.780.000,00							630.480.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	526.780.000,00						-	630.480.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	526.780.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	630.480.000,00	SDN BANJAREJO
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	427.680.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		427.680.000,00	SDN BANJAREJO
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	99.100.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		202.800.000,00	SDN BANJAREJO
		SDN 01 MOJOREJO			116.490.000,00							231.990.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	116.490.000,00						-	231.990.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	116.490.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	231.990.000,00	SDN 01 MOJOREJO
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	99.990.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		99.990.000,00	SDN 01 MOJOREJO
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	16.500.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		132.000.000,00	SDN 01 MOJOREJO
		SDN 02 MOJOREJO			568.890.000,00							675.840.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	568.890.000,00						-	675.840.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	568.890.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	675.840.000,00	SDN 02 MOJOREJO
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	491.040.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		491.040.000,00	SDN 02 MOJOREJO
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	77.850.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		184.800.000,00	SDN 02 MOJOREJO
		SDN 01 MANISREJO			376.170.000,00							435.120.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	376.170.000,00						-	435.120.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	376.170.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	435.120.000,00	SDN 01 MANISREJO
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	324.720.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		324.720.000,00	SDN 01 MANISREJO
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	51.450.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		110.400.000,00	SDN 01 MANISREJO
		SDN 02 MANISREJO			354.960.000,00							490.710.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	354.960.000,00						-	490.710.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	354.960.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	490.710.000,00	SDN 02 MANISREJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	305.910.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		305.910.000,00	SDN 02 MANISREJO
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	49.050.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		184.800.000,00	SDN 02 MANISREJO
		SDN 03 MANISREJO			174.780.000,00							244.080.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	174.780.000,00						-	244.080.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	174.780.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	244.080.000,00	SDN 03 MANISREJO
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	150.480.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		150.480.000,00	SDN 03 MANISREJO
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	24.300.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		93.600.000,00	SDN 03 MANISREJO
		SDN 04 MANISREJO			194.260.000,00							278.910.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	194.260.000,00						-	278.910.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	194.260.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	278.910.000,00	SDN 04 MANISREJO
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	167.310.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		167.310.000,00	SDN 04 MANISREJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	26.950.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		111.600.000,00	SDN 04 MANISREJO
		SDN 01 DEMANGAN			116.490.000,00							193.590.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	116.490.000,00						-	193.590.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	116.490.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	193.590.000,00	SDN 01 DEMANGAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	99.990.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		99.990.000,00	SDN 01 DEMANGAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	16.500.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		93.600.000,00	SDN 01 DEMANGAN
		SDN 02 DEMANGAN			167.940.000,00							218.940.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	167.940.000,00						-	218.940.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	167.940.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	218.940.000,00	SDN 02 DEMANGAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	144.540.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		144.540.000,00	SDN 02 DEMANGAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	23.400.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		74.400.000,00	SDN 02 DEMANGAN
		SDN 01 JOSENAN			191.730.000,00							263.730.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	191.730.000,00						-	263.730.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	191.730.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	263.730.000,00	SDN 01 JOSENAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	165.330.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		165.330.000,00	SDN 01 JOSENAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	26.400.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		98.400.000,00	SDN 01 JOSENAN
		SDN 02 JOSENAN			189.450.000,00							218.550.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	189.450.000,00						-	218.550.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	189.450.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	218.550.000,00	SDN 02 JOSENAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	163.350.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		163.350.000,00	SDN 02 JOSENAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	26.100.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		55.200.000,00	SDN 02 JOSENAN
		SDN 03 JOSENAN			113.900.000,00							148.050.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	113.900.000,00						-	148.050.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	113.900.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	148.050.000,00	SDN 03 JOSENAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	54.450.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		54.450.000,00	SDN 03 JOSENAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	59.450.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		93.600.000,00	SDN 03 JOSENAN
		SDN KEJURON			66.480.000,00							139.080.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	66.480.000,00						-	139.080.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	66.480.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	139.080.000,00	SDN KEJURON
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	51.480.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		51.480.000,00	SDN KEJURON
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		87.600.000,00	SDN KEJURON
		SDN KUNCEN			91.230.000,00							174.630.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	91.230.000,00						-	174.630.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang dikelola dengan baik	100%	91.230.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	174.630.000,00	SDN KUNCEN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	76.230.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		76.230.000,00	SDN KUNCEN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		98.400.000,00	SDN KUNCEN
		SMPN 1			1.076.560.000,00							1.221.960.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	1.076.560.000,00						-	1.221.960.000,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah Menengah Pertama yang dikelola dengan baik	100%	1.076.560.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	1.221.960.000,00	SMPN 1
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	914.760.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		914.760.000,00	SMPN 1
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	747 anak	161.800.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		307.200.000,00	SMPN 1
		SMPN 2			1.066.490.000,00							1.285.490.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	1.066.490.000,00						-	1.285.490.000,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah Menengah Pertama yang dikelola dengan baik	100%	1.066.490.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	1.285.490.000,00	SMPN 2
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	906.290.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		906.290.000,00	SMPN 2
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	746 anak	160.200.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		379.200.000,00	SMPN 2
		SMPN 3			775.450.000,00							834.650.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	775.450.000,00						-	834.650.000,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah Menengah Pertama yang dikelola dengan baik	100%	775.450.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	834.650.000,00	SMPN 3
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	659.450.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		659.450.000,00	SMPN 3
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	557 anak	116.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		175.200.000,00	SMPN 3
		SMPN 4			1.176.280.000,00							1.276.880.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	1.176.280.000,00						-	1.276.880.000,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah Menengah Pertama yang dikelola dengan baik	100%	1.176.280.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	1.276.880.000,00	SMPN 4
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.026.080.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		1.026.080.000,00	SMPN 4
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	840 anak	150.200.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		250.800.000,00	SMPN 4
		SMPN 5			654.040.000,00							759.240.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	654.040.000,00						-	759.240.000,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah Menengah Pertama yang dikelola dengan baik	100%	654.040.000,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	-	-	759.240.000,00	SMPN 5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	537.240.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	-		537.240.000,00	SMPN 5
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	444 anak	116.800.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	-		222.000.000,00	SMPN 5
		SMPN 6			873.970.000,00							1.004.570.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	873.970.000,00						-	1.004.570.000,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah Menengah Pertama yang dikelola dengan baik	100%	873.970.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	1.004.570.000,00	SMPN 6
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	746.570.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		746.570.000,00	SMPN 6
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	617 anak	127.400.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		258.000.000,00	SMPN 6
		SMPN 7			1.028.810.000,00							1.251.410.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	1.028.810.000,00						-	1.251.410.000,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah Menengah Pertama yang dikelola dengan baik	100%	1.028.810.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	1.251.410.000,00	SMPN 7
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	848.210.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		848.210.000,00	SMPN 7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	667 anak	180.600.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		403.200.000,00	SMPN 7
		SMPN 8			718.470.000,00							767.070.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	718.470.000,00						-	767.070.000,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah Menengah Pertama yang dikelola dengan baik	100%	718.470.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	767.070.000,00	SMPN 8
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	613.470.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		613.470.000,00	SMPN 8
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	509 anak	105.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		153.600.000,00	SMPN 8
		SMPN 9			664.290.000,00							761.890.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	664.290.000,00						-	761.890.000,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah Menengah Pertama yang dikelola dengan baik	100%	664.290.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	761.890.000,00	SMPN 9
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	567.490.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		567.490.000,00	SMPN 9
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	429 anak	96.800.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		194.400.000,00	SMPN 9
		SMPN 10			714.840.000,00							877.440.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	714.840.000,00						-	877.440.000,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah Menengah Pertama yang dikelola dengan baik	100%	714.840.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	877.440.000,00	SMPN 10
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	609.840.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		609.840.000,00	SMPN 10
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	507 anak	105.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		267.600.000,00	SMPN 10
		SMPN 11			964.810.000,00							1.057.410.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	964.810.000,00						-	1.057.410.000,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah Menengah Pertama yang dikelola dengan baik	100%	964.810.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	1.057.410.000,00	SMPN 11
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	751.410.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		751.410.000,00	SMPN 11
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	621 anak	213.400.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		306.000.000,00	SMPN 11
		SMPN 12			893.900.000,00							984.300.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	893.900.000,00						-	984.300.000,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah Menengah Pertama yang dikelola dengan baik	100%	893.900.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	984.300.000,00	SMPN 12

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	762.300.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		762.300.000,00	SMPN 12
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	629 anak	131.600.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		222.000.000,00	SMPN 12
		SMPN 13			1.012.130.000,00							1.126.730.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	1.012.130.000,00						-	1.126.730.000,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah Menengah Pertama yang dikelola dengan baik	100%	1.012.130.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	1.126.730.000,00	SMPN 13
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	862.730.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		862.730.000,00	SMPN 13
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	724 anak	149.400.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		264.000.000,00	SMPN 13
		SMPN 14			459.660.000,00							478.260.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	459.660.000,00						-	478.260.000,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah Menengah Pertama yang dikelola dengan baik	100%	459.660.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	478.260.000,00	SMPN 14
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	370.260.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		370.260.000,00	SMPN 14

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	274 anak	89.400.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		108.000.000,00	SMPN 14
		TK PEMBINA			103.756.000,00							205.040.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	103.756.000,00						-	205.040.000,00	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Satuan PAUD yang dikelola dengan baik	100%	103.756.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan	-	205.040.000,00	TK PEMBINA
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	71.940.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Paud Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		71.940.000,00	TK PEMBINA
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	31.816.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Satuan Pendidikan		133.100.000,00	TK PEMBINA
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88.60	89.925.583.389,36						-	94.642.215.864,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	100%	302.807.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Dinas Kesehatan PP dan KB	-	317.950.763,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	105.850.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Dinas Kesehatan PP dan KB		114.082.763,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	146.548.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Dinas Kesehatan PP dan KB		153.426.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	50.409.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Dinas Kesehatan PP dan KB		50.442.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	66.860.086.517,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Pegawai Dinas Kesehatan PP dan KB, pegawai puskesmas	-	70.203.090.843,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	496 Orang/bulan	66.860.086.517,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Pegawai Dinas Kesehatan PP dan KB, pegawai puskesmas		70.203.090.843,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.279.567.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Pegawai Dinas Kesehatan PP dan KB, pegawai puskesmas	-	1.343.546.679,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	766.267.300,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Pegawai Dinas Kesehatan PP dan KB, pegawai puskesmas		804.581.679,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	513.300.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Pegawai Dinas Kesehatan PP dan KB, pegawai puskesmas		538.965.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	320.427.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Dinas Kesehatan PP dan KB	-	338.442.654,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	114.727.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Dinas Kesehatan PP dan KB		121.257.504,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	205.700.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Dinas Kesehatan PP dan KB		217.185.150,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	100%	20.625.493.048,36			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Pegawai Dinas Kesehatan PP dan KB	-	21.873.029.650,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.625.493.048,36	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Pegawai Dinas Kesehatan PP dan KB		21.873.029.650,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	537.202.524,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Pegawai Dinas Kesehatan PP dan KB	-	566.155.275,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	89 Unit	302.536.600,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Pegawai Dinas Kesehatan PP dan KB		319.433.809,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	121.879.724,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Pegawai Dinas Kesehatan PP dan KB		128.264.850,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	273 Unit	112.786.200,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Pegawai Dinas Kesehatan PP dan KB		118.456.616,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	91.4 % 83,33%	37.478.030.037,00						-	38.199.372.235,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rumah sakit yang disediakan sesuai standar Persentase puskesmas memiliki SPA sesuai standar	88% 31 Layanan	11.991.693.102,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Dinas Kesehatan PP dan KB, Puskesmas	-	11.492.998.529,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	86 Unit	1.733.145.700,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Dinas Kesehatan PP dan KB, Puskesmas		1.246.426.388,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan	390 Unit	142.198.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya	Dinas Kesehatan PP dan KB, Puskesmas		149.310.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Regional/Regional Maintainance Center					(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Manusia yang Berdaya Saing Global				
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	415 Unit	267.150.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Dinas Kesehatan PP dan KB, Puskesmas		280.589.434,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	10 Paket	9.849.199.402,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), DAK Non Fisik-BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Dinas Kesehatan PP dan KB, Puskesmas		9.816.672.707,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Keberhasilan pengobatan TB (%) Angka Kematian Balita Angka Kematian Ibu Cakupan imunisasi bayi lengkap Cakupan skrining kesehatan jiwa ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART Persentase Diabetes dalam Pengendalian Persentase Hipertensi dalam Pengendalian Persentase lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/wabah Persentase Rumah Sehat Prevalensi obesitas >18 tahun	90% 19% 90.1% 100% 100% 20% 95% 15% 0/100000 Kelahiran Hidup 4.8/1000 Kelahiran Hidup 10% 65%	25.486.336.935,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat	-	26.706.373.706,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2852 Orang	516.274.100,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		542.626.245,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2836 Orang	56.538.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		59.391.465,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2836 Orang	351.742.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		369.348.420,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10568 Orang	419.984.220,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		441.016.315,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31683 Orang	30.681.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		32.232.900,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	129392 Orang	137.591.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		144.532.684,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33407 Orang	61.395.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		64.464.750,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18910 Orang	26.939.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		28.353.675,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6906 Orang	11.062.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		11.646.600,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	383 Orang	121.184.304,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		127.990.800,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5649 Orang	63.679.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		11.356.275,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6436 Orang	26.890.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		28.237.125,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	232.923.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		244.572.510,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	189.493.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		198.968.700,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	78.205.500,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		82.416.810,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	178.876.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		187.819.800,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	310.890.400,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		326.443.635,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	240 Orang	14.613.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		15.343.650,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	691.881.100,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		726.546.083,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	36 Dokumen	20.201.553.598,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		21.211.631.278,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	18 Paket	83.546.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		87.723.300,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	9 Dokumen	267.596.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		281.026.305,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7 Dokumen	860.575.163,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		903.604.026,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	6 Unit	10.999.550,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		11.550.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	387.157.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		405.718.950,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1162 Orang	10.814.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		11.356.275,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	500 Orang	13.388.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		14.070.525,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	15 Orang	15.659.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		16.460.325,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	114.207.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		119.924.280,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
3	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	92,16%	475.785.000,00						-	499.634.100,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki SIP	93%	475.785.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Tenaga Kesehatan	-	499.634.100,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55 Orang	475.785.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan,	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2)	Tenaga Kesehatan		499.634.100,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			Semua Kel/Desa		penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global				Keluarga Berencana
4	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	92,5%	421.572.000,00						-	442.899.450,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	92%	75.935.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	79.773.750,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	75.935.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		79.773.750,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sertifikat Produksi Pangan PIRT, dan sertifikat Depot Air Minum (DAM)	92%	345.637.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	363.125.700,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3 Dokumen	345.637.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		363.125.700,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
5	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan	20 %	3.117.130.360,00						-	3.272.994.420,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	100%	205.663.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat	-	215.953.763,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	205.663.200,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		215.953.763,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	100%	2.911.467.160,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah	Masyarakat	-	3.057.040.657,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kota					olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global				Keluarga Berencana
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	2.911.467.160,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat		3.057.040.657,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN			125.640.458.000,00							0	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88.1 -	106.865.322.983,00						-	0	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	10.510.319.219,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Pegawai RSUD	-	0	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	411 Orang/bulan	10.510.319.219,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Pegawai RSUD		0	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	100%	152.520.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Pengelola BMD dan Penanggung jawaban Pengelola Keuangan di RSUD Kota Madiun	-	0	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	152.520.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Pengelola BMD dan Penanggung jawaban Pengelola Keuangan di RSUD Kota Madiun		0	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100%	96.202.483.764,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Pasien/ Pelanggan RSUD Kota Madiun	-	0	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	96.202.483.764,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Pasien/ Pelanggan RSUD Kota Madiun		0	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) kesehatan mencapai target	83,33%	18.775.135.017,00						-	0	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas memiliki SPA sesuai standar Jumlah layanan rumah sakit yang disediakan sesuai standar	880% 31 Layanan	18.775.135.017,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Pasien/ Pelanggan RSUD Kota Madiun	-	0	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	68.568.116,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Pasien/ Pelanggan RSUD Kota Madiun		0	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	22 Unit	10.792.098.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Pasien/ Pelanggan RSUD Kota Madiun		0	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1.198.474.901,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Pasien/ Pelanggan RSUD Kota Madiun		0	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	41 Paket	6.715.994.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Pasien/ Pelanggan RSUD Kota Madiun		0	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
		PUSKESMAS MANGUHARJO			2.874.974.000,00							3.018.722.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	83,33%	2.874.974.000,00						-	3.018.722.700,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan imunisasi bayi lengkap Angka Kematian Balita Persentase Hipertensi dalam Pengendalian Cakupan skrining kesehatan jiwa Persentase lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase Rumah Sehat Persentase pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/wabah Angka Kematian Ibu ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART Angka Keberhasilan pengobatan TB (%)	95% 4.8/1000 Kelahiran Hidup 20% 10% 100% 90.1 % 100% 0/100000 Kelahiran Hidup 65% 90%	2.874.974.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Manguharjo	-	3.018.722.700,00	Puskesmas Manguharjo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Prevalensi obesitas >18 tahun Persentase Diabetes dalam Pengendalian	19% 15%									
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	405.900.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Manguharjo		426.195.000,00	Puskesmas Manguharjo
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	569.074.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Manguharjo		597.527.700,00	Puskesmas Manguharjo
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	1.900.000.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Manguharjo		1.995.000.000,00	Puskesmas Manguharjo
		PUSKESMAS NGEGONG			2.611.655.000,00							2.742.237.750,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	83,33%	2.611.655.000,00						-	2.742.237.750,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sehat Persentase pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/wabah Angka Keberhasilan pengobatan TB (%) Angka Kematian Ibu Cakupan imunisasi bayi lengkap Cakupan skrining kesehatan jiwa ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART Persentase Diabetes dalamPengendalian Angka Kematian Balita Prevalensi obesitas >18 tahun Persentase lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase Hipertensi dalam Pengendalian	90.1 % 100% 90% 0/100000 Kelahiran Hidup 95% 10% 65% 15% 4.8/1000 Kelahiran Hidup 19% 100% 20%	2.611.655.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Ngegong	-	2.742.237.750,00	Puskesmas Ngegong

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	364.976.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Ngegong		383.224.800,00	Puskesmas Ngegong
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	567.954.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Ngegong		596.351.700,00	Puskesmas Ngegong
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	1.678.725.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Ngegong		1.762.661.250,00	Puskesmas Ngegong
		PUSKESMAS SUKOSARI			2.915.662.000,00							3.061.445.100,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	83,33%	2.915.662.000,00						-	3.061.445.100,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kematian Ibu Persentase pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/wabah Persentase lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Prevalensi obesitas >18 tahun Persentase Rumah Sehat Persentase Hipertensi dalam Pengendalian Persentase Diabetes dalamPengendalian ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART Cakupan skrining kesehatan jiwa Cakupan imunisasi bayi lengkap Angka Kematian Balita Angka Keberhasilan pengobatan TB (%)	0/100000 % 100% 100% 19% 90.1 % 20% 15% 65% 10% 95% 4.8/1000 % 90%	2.915.662.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sukosari	-	3.061.445.100,00	Puskesmas Sukosari
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	497.260.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sukosari		522.123.000,00	Puskesmas Sukosari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	568.402.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sukosari		596.822.100,00	Puskesmas Sukosari
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	1.850.000.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sukosari		1.942.500.000,00	Puskesmas Sukosari
		PUSKESMAS TAWANGREJO			2.698.926.586,00							2.833.872.915,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	83,33%	2.698.926.586,00						-	2.833.872.915,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan imunisasi bayi lengkap Persentase lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase Diabetes dalam Pengendalian Angka Kematian Ibu Persentase pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/wabah ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART Persentase Hipertensi dalam Pengendalian Persentase Rumah Sehat Angka Kematian Balita Prevalensi obesitas >18 tahun Cakupan skrining kesehatan jiwa Angka Keberhasilan pengobatan TB (%)	95% 100% 15% 0/100000 Kelahiran Hidup 100% 65% 20% 90.1 % 4.8/1000 Kelahiran Hidup 19% 10% 90%	2.698.926.586,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tawangrejo	-	2.833.872.915,00	Puskesmas Tawangrejo
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	335.004.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tawangrejo		351.754.200,00	Puskesmas Tawangrejo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Manusia yang Berdaya Saing Global				
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	549.383.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tawangrejo		576.852.150,00	Puskesmas Tawangrejo
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	1.814.539.586,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tawangrejo		1.905.266.565,00	Puskesmas Tawangrejo
		PUSKESMAS BANJAREJO			3.383.939.000,00							3.553.135.950,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	83,33%	3.383.939.000,00						-	3.553.135.950,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kematian Balita Persentase pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/wabah Persentase Rumah Sehat Prevalensi obesitas >18 tahun Angka Kematian Ibu Persentase Diabetes dalam Pengendalian Persentase lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART Cakupan skrining kesehatan jiwa Cakupan imunisasi bayi lengkap Persentase Hipertensi dalam Pengendalian Angka Keberhasilan pengobatan TB (%)	4.8/1000 Kelahiran Hidup 100% 90.1 % 19% 0/100000 Kelahiran Hidup 15% 100% 65% 10% 95% 20% 90%	3.383.939.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banjarejo	-	3.553.135.950,00	Puskesmas Banjarejo
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	706.200.000,00	Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banjarejo		741.510.000,00	Puskesmas Banjarejo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	613.739.000,00	Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banjarejo		644.425.950,00	Puskesmas Banjarejo
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	2.064.000.000,00	Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banjarejo		2.167.200.000,00	Puskesmas Banjarejo
		PUSKESMAS DEMANGAN			3.153.210.000,00							3.310.870.500,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	83,33%	3.153.210.000,00						-	3.310.870.500,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Hipertensi dalam Pengendalian Prevalensi obesitas >18 tahun ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART Angka Keberhasilan pengobatan TB (%) Cakupan skrining kesehatan jiwa Persentase pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/wabah Cakupan imunisasi bayi lengkap Angka Kematian Ibu Persentase lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Angka Kematian Balita Persentase Rumah Sehat Persentase Diabetes dalam Pengendalian	20% 19% 65% 90% 10% 100% 95% 0/100000 Kelahiran Hidup 100% 4.8/1000 Kelahiran Hidup 90.1 % 15%	3.153.210.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Demangan	-	3.310.870.500,00	Puskesmas Demangan
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	646.954.000,00	Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Demangan		679.301.700,00	Puskesmas Demangan
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	606.256.000,00	Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Demangan		636.568.800,00	Puskesmas Demangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	1.900.000.000,00	Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Demangan		1.995.000.000,00	Puskesmas Demangan
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
1	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	83,35 skor	7.793.769.274,00						-	8.316.949.784,15	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	60.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	karyawan dan karyawati	-	60.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	60.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	karyawan dan karyawati		60.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	prosentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	3.376.672.769,32			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	karyawan dan karyawati	-	3.545.506.407,45	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3.376.672.769,32	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	karyawan dan karyawati		3.545.506.407,45	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	313.592.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	karyawan dan karyawati	-	315.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	313.592.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	karyawan dan karyawati		315.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Tercukupinya Barang Milik Daerah	100%	47.990.870,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	karyawan dan karyawati	-	336.200.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	15 Unit	1.242.900,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	karyawan dan karyawati		235.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	44.873.970,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	karyawan dan karyawati		100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.874.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	karyawan dan karyawati		1.200.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinah Daerah	100%	3.692.215.934,68			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	karyawan dan karyawati	-	3.776.826.730,70	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.692.215.934,68	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	karyawan dan karyawati		3.776.826.730,70	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%	303.297.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	karyawan dan karyawati	-	283.416.646,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	152.987.900,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	karyawan dan karyawati		133.416.646,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	44.050.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	karyawan dan karyawati		50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	106.259.800,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	karyawan dan karyawati		100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peserta pelatihan berbasis kompetensi yang bekerja	30%	2.032.140.000,00						-	2.042.940.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang mengikuti Uji Kompetensi	45 Orang	2.007.460.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Pencari Kerja	-	2.007.460.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	200 Orang	2.007.460.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Pencari Kerja		2.007.460.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase LPKS yang berijin	50%	10.480.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Lembaga pelatihan kerja	-	15.480.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	26 Lembaga	10.480.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Lembaga pelatihan kerja		15.480.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Prosentase Perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi produktivitas	50%	14.200.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	perusahaan	-	20.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	30 Perusahaan	14.200.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	perusahaan		20.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2,19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
1	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,8 Nilai	8.135.223.684,90						-	8.280.635.820,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	13.753.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Pegawai Dinas Budparpora	-	13.756.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	6 Laporan	13.753.800,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif,	Pegawai Dinas Budparpora		13.756.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat				
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	3.823.193.377,17			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Dinas Budparpora	-	3.682.503.820,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.823.193.377,17	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Dinas Budparpora		3.682.503.820,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	48.652.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Dinas Budparpora	-	94.496.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	48.652.500,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Dinas Budparpora		94.496.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	200.135.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Dinas Budparpora	-	200.135.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.135.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Dinas Budparpora		200.135.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100%	73.081.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif,	Dinas Budparpora	-	57.195.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat				
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	73.081.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Dinas Budparpora		57.195.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%	3.744.464.670,93			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Dinas Budparpora	-	4.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.744.464.670,93	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Dinas Budparpora		4.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%	231.943.336,80			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Dinas Budparpora	-	232.550.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	79.881.600,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Dinas Budparpora		80.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	102.161.736,80	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Dinas Budparpora		102.550.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.900.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif,	Dinas Budparpora		50.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat				
2	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio wirausaha pemuda	8,95%	119.990.500,00						-	120.000.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Event Kepemudaan yang diselenggarakan	5 Event	119.990.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat Kota Madiun	-	120.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 Kegiatan	119.990.500,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat Kota Madiun		120.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
3	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet yang masuk pelatnas	3 orang	5.045.954.563,00						-	5.357.503.863,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	3 sarpras	1.811.388.863,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat Kota Madiun	-	1.811.388.863,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	3 Unit	1.811.388.863,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat Kota Madiun		1.811.388.863,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga	6 Event	1.921.789.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat Kota Madiun	-	2.181.115.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	1.840.693.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat Kota Madiun		2.081.115.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	100 Orang	81.096.800,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat Kota Madiun		100.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Prosentase pengembangan organisasi keolahragaan	100%	1.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat Kota Madiun	-	1.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Kota Madiun, Semua	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang	Masyarakat Kota Madiun		1.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota			Kecamatan, Semua Kel/Desa		pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global				Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Cabang olahraga yang mendapat pembinaan	8 Cabor	312.775.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat Kota Madiun	-	365.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	312.775.900,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat Kota Madiun		365.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
1	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82 nilai	5.848.405.484,00						-	5.651.000.341,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	11.988.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Organisasi Perangkat Daerah	-	22.200.000,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	11.988.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Organisasi Perangkat Daerah		22.200.000,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100%	2.321.712.642,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Organisasi Perangkat Daerah	-	2.553.881.429,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2.321.712.642,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Organisasi Perangkat Daerah		2.553.881.429,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100%	89.744.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Organisasi Perangkat Daerah	-	105.000.000,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	89.744.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan	Organisasi Perangkat Daerah		105.000.000,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global				
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintah daerah	100%	111.025.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Organisasi Perangkat Daerah	-	212.160.000,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	60.876.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Organisasi Perangkat Daerah		62.160.000,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	50.149.800,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Organisasi Perangkat Daerah		150.000.000,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.780.788.411,83			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Organisasi Perangkat Daerah	-	2.210.889.620,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.780.788.411,83	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Organisasi Perangkat Daerah		2.210.889.620,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang Layak digunakan	100%	533.146.630,17			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Organisasi Perangkat Daerah	-	546.869.292,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	142.065.350,14	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Organisasi Perangkat Daerah		107.000.000,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	300.191.816,03	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Organisasi Perangkat Daerah		350.000.000,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	72 Unit	90.889.464,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Organisasi Perangkat Daerah		89.869.292,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	35,86%	764.590.938,00						-	1.272.717.543,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	4,90%	185.750.590,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat Kota Madiun	-	504.085.230,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	750 Eksemplar	72.924.480,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat Kota Madiun		180.042.110,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	76 Perpustakaan	112.826.110,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat Kota Madiun		324.043.120,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasyarakatan Gemar Membaca	20 kali	578.840.348,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat Kota Madiun	-	768.632.313,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	33 Perpustakaan	72.916.800,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat Kota Madiun		98.860.792,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	216 Lokus	505.923.548,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat Kota Madiun		669.771.521,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	100%	44.947.740,00						-	44.999.780,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah yang dilestarikan	210 Eksemplar	44.947.740,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat Kota Madiun	-	44.999.780,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	2 Orang	44.947.740,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat Kota Madiun		44.999.780,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	3,26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
3	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi	423 orang	310.590.000,00						-	550.000.000,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			kreatif yang aktif dan tervalidasi										
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelatihan/peningkatan SDM pariwisata	2 Pelatihan	310.590.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat Kota Madiun	-	550.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	310.590.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	Masyarakat Kota Madiun		550.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	5,03	KEPEGAWAIAN											
1	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.44 Nilai	7.264.682.230,00						-	7.303.050.020,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi	100%	9.353.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	ASN Kota Madiun	-	9.400.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	9.353.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	ASN Kota Madiun		9.400.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	4.067.498.150,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	ASN Kota Madiun	-	4.024.709.623,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	4.067.498.150,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	ASN Kota Madiun		4.024.709.623,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	339.796.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	ASN Kota Madiun	-	400.000.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	339.796.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	ASN Kota Madiun		400.000.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD	100%	49.825.190,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	ASN Kota Madiun	-	50.000.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	49.825.190,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	ASN Kota Madiun		50.000.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	z	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang	100%	2.559.539.617,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	-	-	2.635.160.397,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.559.539.617,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	-		2.635.160.397,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	238.670.273,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	ASN Kota Madiun	-	183.780.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	38.293.300,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	ASN Kota Madiun		35.000.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	49.985.442,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	ASN Kota Madiun		0	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150.391.531,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	ASN Kota Madiun		148.780.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Prosentase Pegawai dengan SKP bernilai baik	100%	1.846.908.400,00						-	1.847.304.600,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Realisasi Pengadaan, Pembehentian dan Informasi	100%	1.093.477.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan	ASN Kota Madiun	-	1.093.590.200,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global				
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	2 Laporan	934.229.400,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	ASN Kota Madiun		934.230.200,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	160 Dokumen	89.332.500,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	ASN Kota Madiun		89.360.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	69.916.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	ASN Kota Madiun		70.000.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi	100%	345.564.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	ASN Kota Madiun	-	345.746.200,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	376 Dokumen	275.078.800,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	ASN Kota Madiun		275.116.200,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	380 Dokumen	70.486.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	ASN Kota Madiun		70.630.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi	100%	100.003.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	ASN Kota Madiun	-	100.000.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	110 Dokumen	100.003.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	ASN Kota Madiun		100.000.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Realisasi Evalusai Kinerja	100%	307.862.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	ASN Kota Madiun	-	307.968.200,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	19.954.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	ASN Kota Madiun		20.000.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	200 Orang	42.793.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	ASN Kota Madiun		42.846.200,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	60 Orang	245.115.700,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	ASN Kota Madiun		245.122.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			2.423.964.370,00							2.383.980.380,00	
1	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Prosentase realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan	100%	2.423.964.370,00						-	2.383.980.380,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Realisasi Pengembangan Kompetensi Teknis	100%	1.533.980.370,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	ASN Kota Madiun	-	1.533.980.380,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	232 Orang	1.533.980.370,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	ASN Kota Madiun		1.533.980.380,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Realiasai Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100%	889.984.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	ASN Kota Madiun	-	850.000.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	186 Laporan	889.984.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global	ASN Kota Madiun		850.000.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Total Pagu Prioritas 2				**550.102.842.556,26**								

Prioritas 3 Peningkatan harmonisasi sosial dalam mewujudkan ketahanan sosial dan budaya yang berkualitas

NO	KODE			CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,50 Skor	15.862.772.556,00						-	14.236.125.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	2.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat	-	2.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	2.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		2.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100%	6.810.550.238,49			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	SatpolPP	-	7.122.901.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	6.810.550.238,49	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	SatpolPP		7.122.901.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100%	584.169.869,60			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	SatpolPP	-	585.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	584.169.869,60	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	SatpolPP		585.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100%	299.949.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat	-	300.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	299.949.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		300.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	100%	153.014.555,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	SatpolPP	-	1.053.182.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	250.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	SatpolPP		59.585.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	250.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	SatpolPP		806.290.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	152.514.555,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	SatpolPP		187.307.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6.943.592.052,91			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	SatpolPP	-	4.687.723.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.943.592.052,91	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	SatpolPP		4.687.723.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.069.496.840,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	SatpolPP	-	1.069.734.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit	681.147.890,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	SatpolPP		681.334.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	278.399.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	SatpolPP		278.400.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	109.949.950,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	SatpolPP		110.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	98%	4.606.147.874,00						-	5.615.456.260,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200 Kasus 98%	3.324.125.474,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat	-	4.359.695.260,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	122.110.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		122.110.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	1.759.376.140,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		2.690.550.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	50 Orang	883.305.100,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		916.475.260,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	200 laporan	196.634.234,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		220.860.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	200 Laporan	362.700.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		409.700.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	98%	1.132.424.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat	-	1.105.761.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	206.623.400,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		574.261.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	4 Laporan	925.801.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		531.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Prosentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang berkualitas	80%	149.598.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	SatpolPP	-	150.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	3 Laporan	149.598.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	SatpolPP		150.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	779.759.570,00						-	2.024.373.000,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	729.785.570,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat	-	1.974.373.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	4 Dokumen	539.835.570,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		1.617.195.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	189.950.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		357.178.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Prosentase Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran	100%	49.974.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat	-	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	4 Dokumen	49.974.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,10 Nilai	3.812.353.140,00						-	4.764.500.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	870.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun	-	1.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	870.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun		1.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	1.085.495.514,82			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun	-	1.350.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	1.085.495.514,82	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun		1.350.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100%	89.297.648,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun	-	115.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	89.297.648,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun		115.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	199.902.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun	-	240.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	199.902.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun		240.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100%	36.475.660,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun	-	45.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	36.475.660,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun		45.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%	2.107.963.549,18			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun	-	2.650.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.107.963.549,18	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun		2.650.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100%	292.348.768,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun	-	363.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	32.480.400,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun		40.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	141.631.500,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun		175.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	13.159.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun		17.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.997.468,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun		125.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.080.400,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun		6.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100%	720.495.860,00						-	1.035.000.000,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	117.189.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat Kota	-	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	450 Orang	117.189.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat Kota		150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhada bencana	100%	251.951.860,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat Kota	-	390.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	2 Unit	8.351.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat Kota		50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	300 Orang	53.460.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat Kota		70.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30 Keluarga	25.035.760,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat Kota		40.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	11 Kawasan	81.910.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat Kota		110.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	50 Orang	20.976.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat Kota		40.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	11 Kawasan	62.219.100,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat Kota		80.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	177.906.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat Kota	-	230.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	42 Orang	42.876.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat Kota		55.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					
	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	70 Orang	121.920.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat Kota		150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	42 Orang	13.110.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat Kota		25.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase tersusunnya sistem dasar penanggulangan bencana	100%	173.449.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	OPD Lintas Sektor dan Masyarakat Kota Madiun	-	265.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	60 Orang	65.619.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	OPD Lintas Sektor dan Masyarakat Kota Madiun		80.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	6 Lembaga	25.288.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	OPD Lintas Sektor dan Masyarakat Kota Madiun		35.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 Laporan	82.542.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	OPD Lintas Sektor dan Masyarakat Kota Madiun		150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
1	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Nilai	8.583.024.856,63						-	10.256.336.186,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	72.880.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA	-	80.168.440,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas				Perlindungan Anak
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	72.880.400,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA		80.168.440,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persenatase pemenuhan dokumen administrasi keuangan daerah	100%	4.065.753.820,07			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA	-	4.878.904.585,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	4.065.753.820,07	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA		4.878.904.585,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	192.780.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA	-	212.058.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	192.780.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA		212.058.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya kebutuhan sarana prasarana aparatur pemerintah	100%	3.757.780.276,56			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA	-	4.503.180.332,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.757.780.276,56	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA		4.503.180.332,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100%	493.830.360,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA	-	582.024.829,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	203.372.560,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA		245.889.517,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	195.775.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA		239.768.287,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	71 Unit	94.682.800,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA		96.367.025,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang Berperan Aktif dalam Pemberdayaan Sosial	68%	2.466.455.470,00						-	2.727.027.204,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dibina	68%	2.466.455.470,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	PSKS	-	2.727.027.204,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Keluarga	60.260.450,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	PSKS		66.286.555,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	13 lembaga	2.266.935.610,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	PSKS		2.493.629.209,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	209 Orang	139.259.410,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	PSKS		167.111.440,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	100%	3.643.905.800,00						-	4.083.775.426,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100%	3.131.805.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	-	3.520.556.004,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	186 Orang	650.430.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis		840.757.051,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	72 Orang	146.036.500,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis		175.243.992,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan	6 Orang	23.347.970,00	Kota Madiun, Semua	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan	Penyandang Disabilitas		25.889.934,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			Kecamatan, Semua Kel/Desa		ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis			Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	16.410.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis		14.776.184,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	310 Orang	1.784.070.030,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis		1.967.280.971,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	77 Orang	511.510.500,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis		496.607.872,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100%	512.100.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti	-	563.219.422,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	196.423.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti		214.453.907,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	67 Orang	15.519.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti		19.415.963,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	18.689.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti		20.711.746,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	20.033.800,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti		22.037.197,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	260 Orang	147.347.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial	PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti		160.831.642,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas				
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	95 Orang	107.525.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti		117.353.967,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	6.564.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti		8.415.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial	100%	11.170.095.000,00						-	12.238.774.209,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin yang valid	100%	11.170.095.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat Kota Madiun	-	12.238.774.209,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	8400 Orang	1.028.919.300,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat Kota Madiun		1.080.365.265,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	22.271.400,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat Kota Madiun		24.500.817,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3600 Orang	10.118.904.300,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat Kota Madiun		11.133.908.127,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	100%	60.590.000,00						-	66.934.708,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban bencana yang mendapat pelayanan	100%	43.598.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Korban Bencana Alam dan Sosial	-	48.230.975,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	23.488.600,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Korban Bencana Alam dan Sosial		25.865.251,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan	300 Orang	12.709.400,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Korban Bencana Alam dan Sosial		14.033.294,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota										
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	7.400.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Korban Bencana Alam dan Sosial		8.332.430,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana	100%	16.992.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Kampung	-	18.703.733,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	16.992.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Kampung		18.703.733,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	100%	106.435.900,00						-	120.139.944,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	100%	106.435.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Taman Makam Pahlawan	-	120.139.944,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	966 Makam	106.435.900,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Taman Makam Pahlawan		120.139.944,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
12	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran APBD yang di ARG	100%	801.556.880,00						-	1.023.288.180,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program yang di ARG	100%	76.651.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Lembaga Pemerintahan	-	95.955.404,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	2 Laporan	52.271.300,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Lembaga Pemerintahan		65.445.226,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.01.0014	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	34 Orang	24.379.800,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Lembaga Pemerintahan		30.510.178,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan	100%	7.506.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial	Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	-	9.385.746,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi						dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas				
	2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	27 orang	7.506.700,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi		9.385.746,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	100%	717.399.080,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Lembaga Pemberdayaan Perempuan	-	917.947.030,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	1 Lembaga	717.399.080,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Lembaga Pemberdayaan Perempuan		917.947.030,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	100%	447.330.356,00						-	401.584.633,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	100%	129.522.945,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Perempuan Korban Kekerasan	-	55.174.556,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	64 Lembaga	129.522.945,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Perempuan Korban Kekerasan		55.174.556,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyedia layanan yang melaksanakan rujukan lanjutan	100%	317.807.411,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Perempuan Korban Kekerasan	-	346.410.077,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	12 orang	317.807.411,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Perempuan Korban Kekerasan		346.410.077,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	50%	168.257.480,00						-	185.078.728,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	100%	168.257.480,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Keluarga di Kota Madiun	-	185.078.728,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.04.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	94.796.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Keluarga di Kota Madiun		104.275.600,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.08.04.2.01.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	1 Dokumen	73.461.480,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Keluarga di Kota Madiun		80.803.128,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Lembaga yang Aktif Dalam Pemenuhan Hak Anak	100%	264.260.320,00						-	309.033.635,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka pemenuhan hak anak	100%	76.880.120,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	-	42.682.500,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.06.2.01.0004	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	76.880.120,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha		42.682.500,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100%	187.380.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	-	266.351.135,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.06.2.02.0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	50 Orang	187.380.200,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		266.351.135,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak	0,04%	175.040.767,00						-	153.405.379,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sekolah yang terlibat dalam perlindungan Anak	100%	99.732.935,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Anak Korban Kekerasan	-	102.658.394,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	1 Kegiatan	99.732.935,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Anak Korban Kekerasan		102.658.394,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus	100%	62.516.962,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	23.056.578,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	10 Orang	62.516.962,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		23.056.578,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang terlibat dalam perlindungan Khusus Anak	100%	12.790.870,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	27.690.407,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1 Dokumen	12.790.870,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		27.690.407,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
1	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83.77 Nilai	8.509.687.152,00						-	7.462.628.175,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	54.645.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat	-	54.650.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	54.645.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		54.650.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi keuangan	100%	3.188.701.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat	-	3.425.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	3.188.701.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		3.425.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100%	81.616.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat	-	85.133.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	35.786.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		38.055.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	45.830.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		47.078.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100%	287.282.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat	-	287.296.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	287.282.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		287.296.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100%	146.026.170,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat	-	79.989.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	146.026.170,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		79.989.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa Urusan Pemerintah Daerah	100%	4.042.616.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat	-	3.137.524.375,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.042.616.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		3.137.524.375,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100%	708.800.982,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat	-	393.035.800,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36 Unit	176.645.300,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		141.570.800,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	452.044.882,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		187.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	80.110.800,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		63.965.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi	2000 kkal/kapita	165.492.505,00						-	171.535.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Prosentase ketersediaan pangan utama	100%	107.538.560,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat	-	107.535.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	77.689.360,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		77.685.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	6 Laporan	29.849.200,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		29.850.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Protein / AKP	63 gram/kapita	57.953.945,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat	-	64.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	17.526.600,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		18.550.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	40.427.345,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		45.450.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan dan Rawan Pangan	11%	25.788.500,00						-	26.650.000,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan	1 Dokumen	25.788.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,	Masyarakat	-	26.650.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat				
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	25.788.500,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat		26.650.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jenis Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PMHS) Presentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	13 Jenis	271.853.000,00						-	272.603.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Hewan	80%	184.353.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat	-	185.103.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4 Laporan	184.353.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		185.103.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Unit usaha yang memiliki NKV	80%	87.500.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat	-	87.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	87.500.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		87.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase lahan aman bencana pertanian	30%	161.210.000,00						-	162.250.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan aman bencana pertanian	800 Ha / Tahun	161.210.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat	-	162.250.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	50 Ha	161.210.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		162.250.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2,1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Prosentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100%	145.854.610,00						-	145.855.000,00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	145.854.610,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	fasilitasi penyelesaian masalah ganti rugi	-	145.855.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	109.654.800,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	fasilitasi penyelesaian masalah ganti rugi		109.655.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	2.10.05.2.01.0007	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	36.199.810,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	fasilitasi penyelesaian masalah ganti rugi		36.200.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Prosentae Penatagunaan Tanah	100%	639.999.824,00						-	740.000.000,00	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah	100%	639.999.824,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Penatagunaan tanah	-	740.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Laporan	639.999.824,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 2026 - (1) Pengembangan Ekonomi Inklusif yang didukung oleh Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui Transformasi Ekonomi	Penatagunaan tanah		740.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
4	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Peresentase tutupan lahan	3,61%	24.999.300,00						-	27.000.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah RTH yang di pantau	5 Lokasi	24.999.300,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Kota Madiun	-	27.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	24.999.300,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Kota Madiun		27.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
5	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	78%	40.000.434,80						-	45.000.000,00	
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha integrasi ecara Elektronik	5 dokumen	40.000.434,80			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Kota Madiun	-	45.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.05.2.02.0007	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 yang dilakukan	40 Usaha	40.000.434,80	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Kota Madiun		45.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
6	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	88,20%	298.001.052,40						-	325.000.000,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18%	298.001.052,40			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Kota Madiun	-	325.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	4 Dokumen	168.000.543,40	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Kota Madiun		175.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	10 Badan Usaha	130.000.509,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Kota Madiun		150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
7	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100%	632.631.970,00						-	750.000.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan	jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan	15 kegiatan	632.631.970,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang	Kota Madiun	-	750.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota					lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas				
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	632.631.970,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Kota Madiun		750.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
9	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	63,5 Indeks	7.995.967.800,00						-	11.678.000.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola	43,790 ton	7.909.302.800,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Kota Madiun	-	11.583.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	44 Kelompok	1.627.236.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Kota Madiun		5.719.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	573.551 ton	476.095.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Kota Madiun		200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	32180 Ton	2.863.184.300,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Kota Madiun		2.667.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0028	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan	3 Unit	2.780.247.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Kota Madiun		2.667.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0030	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	11455 Ton	162.540.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Kota Madiun		330.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	jumlah Pihak Swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi	50 kelompok	86.665.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Kota Madiun	-	95.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.11.11.2.03.0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	3 Unit	86.665.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Kota Madiun		95.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
1	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19)	6,85	517.001.000,00						-	542.858.400,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sekolah yang telah membentuk RPP SSK	7 Sekolah	46.043.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat	-	48.351.450,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.01.0031	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	13 Dokumen	46.043.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		48.351.450,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data keluarga yang diupdating	100%	470.958.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat	-	494.506.950,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	27 Laporan	381.438.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		400.510.950,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	27 Dokumen	89.520.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		93.996.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta Aktif KB MKJP	48,2%	1.669.956.600,00						-	1.753.543.313,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase pelaksanaan kegiatan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	100%	510.956.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat	-	536.508.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	12 Laporan	81.480.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial	Masyarakat		85.554.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas				
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan	60.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		63.000.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		105.000.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	27 Organisasi	269.476.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		282.954.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase kader yang melakukan updating data	100%	36.283.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat	-	38.109.750,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	150 Orang	36.283.600,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		38.109.750,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes yang mendapatkan distribusi alkon	100%	774.476.400,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat	-	813.238.913,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	46 Laporan	18.400.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		19.320.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	497 Orang	728.110.400,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		764.554.613,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan	5 Laporan	27.966.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan,	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3)	Masyarakat		29.364.300,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			Semua Kel/Desa		serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas				Keluarga Berencana
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Poktan dan Pokja Kampung KB yang menerima pembinaan Kesertaan ber KB	100%	348.240.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat	-	365.686.650,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	27 Kampung	348.240.600,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		365.686.650,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang menerapkan 8 fungsi keluarga	64%	1.810.518.100,00						-	1.901.193.840,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase angka kepesertaan sasaran tribina	32%	820.518.100,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat	-	861.693.840,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	2 Laporan / Dokumen	28.800.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		30.240.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan	586.971.800,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		616.417.935,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit	132.008.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		138.615.225,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	140 Orang	72.738.300,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		76.420.680,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga	Persentase TPK Kelurahan dalam Mendampingi Keluarga Beresiko Stunting	72%	990.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial	Masyarakat	-	1.039.500.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						masyarakat yang adil dan makmur.	dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas				
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 laporan	450.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		472.500.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 laporan	540.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat		567.000.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
1	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase peningkatan partisipasi kelompok masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	3 %	2.079.984.200,00						-	2.080.000.000,00	
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku seni budaya yang melakukan pagelaran	175 Orang	2.079.984.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat Kota Madiun	-	2.080.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	8 Objek	1.622.570.600,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat Kota Madiun		1.622.572.400,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	25 Sertifikat	457.413.600,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat Kota Madiun		457.427.600,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional Yang Dilestarikan dan Dikembangkan	100%	170.108.000,00						-	170.108.000,00	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah seni budaya yang dibina	2 Jenis	170.108.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat Kota Madiun	-	170.108.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	40 Orang	170.108.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat Kota Madiun		170.108.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	100%	99.971.900,00					Masyarakat Kota Madiun	-	100.000.000,00	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan dalam bidang perekonomian	2 Obyek	99.971.900,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat Kota Madiun	-	100.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 Objek	99.971.900,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat Kota Madiun		100.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	3,3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
4	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	40%	262.815.600,00						-	394.895.078,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan ketersedian barang pokok dan penting	3 Kali	241.050.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat Kota Madiun	-	372.136.328,00	Dinas Perdagangan
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	29.925.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat Kota Madiun		157.317.300,00	Dinas Perdagangan
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	211.125.600,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Masyarakat Kota Madiun		214.819.028,00	Dinas Perdagangan
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi	100%	21.765.000,00			-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-	-	22.758.750,00	Dinas Perdagangan
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	21.765.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-		22.758.750,00	Dinas Perdagangan
	8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
1	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	82,20 nilai	5.667.816.562,23						-	5.648.439.751,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	56.350.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial	-	-	55.910.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas				
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2.220.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-		2.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	51.910.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-		51.910.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.220.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-		2.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 persen	2.642.639.317,71			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-	-	2.586.463.422,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2.642.639.317,71	Kota Madiun, Taman, Taman	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-		2.586.463.422,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen	305.963.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-	-	327.121.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	305.963.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-		327.121.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah	100 persen	319.145.920,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-	-	324.493.218,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit	195.836.660,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	123.309.260,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-		324.493.218,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	2.217.181.454,52			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-	-	2.208.598.826,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.217.181.454,52	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-		2.208.598.826,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 persen	126.536.870,00			-	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-	-	145.853.285,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	41.980.400,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-		59.891.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	34.362.270,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-		35.479.485,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	50.194.200,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-		50.482.800,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	2.006.239.912,00						-	1.918.417.565,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah jenis kegiatan	6 jenis	2.006.239.912,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-	-	1.918.417.565,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	850.407.120,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-		869.173.595,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	2 Dokumen	1.155.832.792,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-		1.049.243.970,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN	Persentase pendidikan politik pada kader Partai Politik	100 persen	1.149.323.385,50						-	1.149.398.000,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK											
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat	80 persen	1.149.323.385,50			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-	-	1.149.398.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	27 Orang	1.039.298.426,50	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-		1.039.398.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	59.999.263,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-		60.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	50.025.696,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-		50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	75 persen	378.085.428,00						-	348.400.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase status kelembagaan organisasi kemasyarkatan	70 persen	378.085.428,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-	-	348.400.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	100 Orang	378.085.428,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-		348.400.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas dan Ormas Asing di Daerah					mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					
5	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100 persen	6.771.969.912,00						-	6.771.969.912,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah koordinasi	4 kali	6.771.969.912,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-	-	6.771.969.912,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	45.294.400,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-		45.294.400,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400 Orang	6.726.675.512,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-		6.726.675.512,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100 persen	2.014.664.340,00						-	2.153.690.772,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik	0 konflik	2.014.664.340,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-	-	2.153.690.772,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	100 Orang	1.699.356.980,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-		1.716.715.074,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah										
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	315.307.360,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	-		436.975.698,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Total Pagu Prioritas 3				**97.178.422.917,56**								

Prioritas 4 Peningkatan transformasi tata kelola melalui kelembagaan kolaboratif, digitalisasi, dan partisipasi masyarakat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
3	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	15%	197.249.099,00						-	213.249.099,00	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja	200 Orang	197.249.099,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Pencari Kerja	-	213.249.099,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	8.595.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Pencari Kerja		18.595.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	150 Orang	49.485.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Pencari Kerja		49.485.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	40 Orang	139.169.099,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Pencari Kerja		145.169.099,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
4	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah pekerja perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	20000 pekerja	3.188.828.948,00						-	3.155.141.843,28	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mendapatkan bimbingan PP dan PKB	45 Perusahaan	147.074.398,04			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	perusahaan	-	88.792.200,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	15 Perusahaan	18.792.200,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	perusahaan		38.792.200,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	128.282.198,04	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	perusahaan		50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase permasalahan HI yang terselesaikan	75%	3.041.754.549,96			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	perusahaan	-	3.066.349.643,28	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	12 Perkara	48.560.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	perusahaan		58.560.000,47	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	15000 Orang	2.993.194.549,96	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU), DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	perusahaan		3.007.789.642,81	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
4	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Terpenuhinya Data Terpilah Gender dan Anak	1 Dokumen	25.247.240,00						-	27.893.654,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengumpulan data gender dan anak	100%	25.247.240,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Gender dan Anak	-	27.893.654,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	25.247.240,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2026 - (3) Peningkatan Harmonisasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Berbudaya yang Berkualitas	Gender dan Anak		27.893.654,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
4	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Aman yang Teruji	90%	81.888.120,00						-	85.325.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	8 Lokasi	81.888.120,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat	-	85.325.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	81.888.120,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat		85.325.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
8	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Penyelesaian Pengaduan, Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100%	289.997.860,80						-	320.000.000,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	jumlah pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang diselesaikan	5 kasus	289.997.860,80			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Kota Madiun	-	320.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5 Perkara	159.998.089,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Kota Madiun		170.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	3 Pengaduan	129.999.771,80	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Kota Madiun		150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2,12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
1	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,15 Nilai	7.964.001.602,00						-	8.708.522.600,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	104.429.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD, Masyarakat Kota Madiun, Pemerintah Kota Madiun, Stakeholder Pengguna Data Kependudukan	-	124.485.700,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	104.429.850,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD, Masyarakat Kota Madiun, Pemerintah Kota Madiun, Stakeholder Pengguna Data Kependudukan		124.485.700,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	2.926.110.654,04			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD, Pemerintah Kota Madiun, Masyarakat Kota Madiun	-	3.245.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	2.926.110.654,04	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD, Pemerintah Kota Madiun, Masyarakat Kota Madiun		3.245.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	307.824.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD, Pemerintah Kota Madiun, Masyarakat Kota Madiun	-	326.652.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	307.824.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD, Pemerintah Kota Madiun, Masyarakat Kota Madiun		326.652.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	520.147.506,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD, Pemerintah Kota Madiun, Masyarakat Kota Madiun	-	580.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	43 Unit	520.147.506,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD, Pemerintah Kota Madiun, Masyarakat Kota Madiun		580.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	3.412.904.644,96			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD, Pemerintah Kota Madiun, Masyarakat Kota Madiun	-	3.600.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.412.904.644,96	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD, Pemerintah Kota Madiun, Masyarakat Kota Madiun		3.600.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100%	692.584.947,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD, Pemerintah Kota Madiun, Masyarakat Kota Madiun	-	832.384.900,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	88.887.794,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD, Pemerintah Kota Madiun, Masyarakat Kota Madiun		115.384.900,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	378.085.133,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD, Pemerintah Kota Madiun, Masyarakat Kota Madiun		467.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 Unit	225.612.020,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD, Pemerintah Kota Madiun, Masyarakat Kota Madiun		250.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	96,45% 30%	174.718.320,00						-	245.000.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan dokumen kependudukan	100%	90.639.270,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun, Pemerintah Kota Madiun, OPD	-	110.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	504 Orang	90.639.270,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun, Pemerintah Kota Madiun, OPD		110.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100%	84.079.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	-	135.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	39.616.730,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun		75.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.12.02.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	256 Orang	44.462.320,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun		60.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100%	137.901.498,00						-	146.000.000,00	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil	100%	137.901.498,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	-	146.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	12 Laporan	82.323.440,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun		88.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.02.0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	99 Orang	55.578.058,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun		58.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase informasi administrasi kependudukan yang dimanfaatkan	100%	109.965.580,00						-	128.000.000,00	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan	100%	99.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	stakeholder pengguna informasi administrasi kependudukan	-	110.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12 Laporan	74.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	stakeholder pengguna informasi administrasi kependudukan		78.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	2 Dokumen	25.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	stakeholder pengguna informasi administrasi kependudukan		32.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan personel pengelola informasi administrasi kependudukan	100%	10.965.580,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	stakeholder pengguna informasi administrasi kependudukan	-	18.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.04.0002	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	12 Dokumen	10.965.580,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	stakeholder pengguna informasi administrasi kependudukan		18.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
5	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	100%	38.000.000,00						-	40.000.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase penyusunan profil kependudukan	100%	38.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	stakeholder pengguna informasi administrasi kependudukan	-	40.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	38.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	stakeholder pengguna informasi administrasi kependudukan		40.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2,16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
1	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 Nilai	8.252.817.094,00						-	0	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	2.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	0	Dinas Komunikasi Dan Informatika

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika		0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	3.498.179.552,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.498.179.552,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika		0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	200.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	200.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika		0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100%	2.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.500.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika		0	Dinas Komunikasi Dan Informatika

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	100%	4.157.235.542,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.157.235.542,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika		0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%	392.902.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	252.216.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika		0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	25.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika		0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 unit	115.686.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Dinas Komunikasi dan Informatika		0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	86%	3.153.270.906,00						-	0	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	100%	3.153.270.906,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah	-	0	Dinas Komunikasi Dan Informatika

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	1.218.625.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	4 Komunitas	28.917.572,40	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	200 Permohonan	150.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Persentase	11.037.600,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	10.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media	581.375.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	120 Konten	1.103.315.733,60	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		0	Dinas Komunikasi Dan Informatika

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	30 Orang	50.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
3	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	14.285.346.000,00						-	0	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD pengguna domain.id	100%	200.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah	-	0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	100%	14.085.346.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah	-	0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Perangkat Daerah	882.400.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2 Aplikasi	238.726.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		0	Dinas Komunikasi Dan Informatika

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	123.850.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	2 Laporan	60.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	34 Perangkat Daerah	12.490.830.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	289.540.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2,18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
6	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	100%	150.826.300,00						-	197.500.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	36 jenis izin	150.826.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat pemohon izin	-	197.500.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	16 Dokumen	150.826.300,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat pemohon izin		197.500.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2,2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
1	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Statistik Sektoral yang berkualitas dan dapat diakses lintas sektor	100%	125.000.000,00						-	0	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah mengintegrasikan data dengan Portal Satu Data Daerah	34 Perangkat Daerah	125.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah	-	0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100%	50.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100%	55.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100%	20.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2,21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
1	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Presentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian	100%	190.000.000,00						-	0	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	100%	190.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah	-	0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Laporan	40.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	34 Perangkat Daerah	150.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		0	Dinas Komunikasi Dan Informatika

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											
1	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjwaban nasional	91 skor	340.280.730,00						-	508.817.950,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Dinamis yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip	100%	209.265.851,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Organisasi Perangkat Daerah	-	291.344.170,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	60000 Berkas	209.265.851,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Organisasi Perangkat Daerah		291.344.170,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis yang Telah Dibuatkan Sarana Temu Balik Arsip	100%	100.947.197,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Organisasi Perangkat Daerah	-	187.472.280,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1500 Arsip	100.947.197,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Organisasi Perangkat Daerah		187.472.280,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN Melalui JIKN	3%	30.067.682,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Organisasi Perangkat Daerah	-	30.001.500,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	30 Pengguna	30.067.682,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Organisasi Perangkat Daerah		30.001.500,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintah, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	8,8 skor	93.943.107,00						-	126.506.055,00	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip dengan NSPK	100%	93.943.107,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Organisasi Perangkat Daerah	-	126.506.055,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	700 Berkas	47.377.686,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Organisasi Perangkat Daerah		63.605.136,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1000 Arsip	46.565.421,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Organisasi Perangkat Daerah		62.900.919,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
2	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah total produksi perikanan tangkap	96.5 Ton	34.526.432,00						-	59.008.800,00	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan/usaha perikanan tangkap yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	435 Orang	34.526.432,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat	-	59.008.800,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	100 Pelaku Usaha	34.526.432,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat		59.008.800,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
5	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang memiliki izin usaha pertanian	15%	18.410.000,00						-	18.200.000,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha Pertanian yang diterbitkan oleh otoritas kompeten	2 Jenis	18.410.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat	-	18.200.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	2 Dokumen	18.410.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat		18.200.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	3,3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
2	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Presentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	100%	70.939.140,00						-	145.377.000,00	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase pembinaan dan pemantauan legalitas pelaku usaha	100%	70.939.140,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	-	145.377.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.02.2.01.0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	12 laporan	70.939.140,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun		145.377.000,00	Dinas Perdagangan
5	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100%	253.642.460,00					Masyarakat Kota Madiun	-	375.959.370,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah terlaksananya pelayanan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasannya	12 Bulan	253.642.460,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	-	375.959.370,00	Dinas Perdagangan
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	7000 Unit	217.890.860,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun		338.419.245,00	Dinas Perdagangan
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	150 Orang	35.751.600,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun		37.540.125,00	Dinas Perdagangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
2	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	100%	45.000.000,00						-	50.000.000,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan Izin Usaha Industri (IUI) kewenangan kota yang dikeluarkan	1 izin usaha industri	45.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	IKM	-	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	¬Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	45.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	IKM		50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap akurat dan terkini	55%	10.560.000,00						-	20.560.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Industri yang menyediakan data informasi melalui SIINas	400 IKM	10.560.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	IKM	-	20.560.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	10.560.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	IKM		20.560.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		BAGIAN PEMERINTAHAN			2.963.087.000,00							0	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH											
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 Nilai	885.500.000,00						-	0	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	1.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat	-	0	Bagian Pemerintahan
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	1.500.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat		0	Bagian Pemerintahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	185.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat	-	0	Bagian Pemerintahan
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	185.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat		0	Bagian Pemerintahan
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	200.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat	-	0	Bagian Pemerintahan
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	30.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat		0	Bagian Pemerintahan
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	170.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat		0	Bagian Pemerintahan
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	316.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat	-	0	Bagian Pemerintahan
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	316.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat		0	Bagian Pemerintahan
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	183.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat	-	0	Bagian Pemerintahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	33.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat		0	Bagian Pemerintahan
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	140.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat		0	Bagian Pemerintahan
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	10.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat		0	Bagian Pemerintahan
2	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	2.077.587.000,00						-	0	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	100 %	1.727.587.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat	-	0	Bagian Pemerintahan
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	1.127.587.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat		0	Bagian Pemerintahan
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat		0	Bagian Pemerintahan
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	7 Dokumen	550.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat		0	Bagian Pemerintahan
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Fasilitasi Kerjasama daerah	100%	350.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat	-	0	Bagian Pemerintahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	350.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat		0	Bagian Pemerintahan
		BAGIAN ORGANISASI			2.308.250.682,00							2.424.031.050,00	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH											
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	85,5 skor	2.308.250.682,00						-	2.424.031.050,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	3.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah	-	3.150.000,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	3.000.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		3.150.000,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	189.999.982,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah	-	199.500.000,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	189.999.982,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		199.500.000,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	121.238.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah	-	127.299.900,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	121.238.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		127.299.900,00	Bagian Organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	347.014.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah	-	364.369.635,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	347.014.700,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		364.369.635,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	50.917.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah	-	53.791.920,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	33.230.400,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		34.891.920,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.977.400,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		5.250.000,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	12.710.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		13.650.000,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Tingkat kematangan organisasi	46.3 nilai	1.596.080.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	-	-	1.675.919.595,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	389.850.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	-		409.342.500,00	Bagian Organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	799.763.900,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	-		839.752.095,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	406.466.300,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	-		426.825.000,00	Bagian Organisasi
		BAGIAN HUKUM			2.744.366.212,00							2.816.500.000,00	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH											
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,25 Nilai	1.482.713.317,00						-	991.500.000,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	1.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah	-	1.500.000,00	Bagian Hukum
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	1.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		1.500.000,00	Bagian Hukum
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100%	403.126.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah	-	350.000.000,00	Bagian Hukum
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	403.126.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		350.000.000,00	Bagian Hukum
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100%	162.122.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah	-	106.000.000,00	Bagian Hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	151.879.220,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		85.000.000,00	Bagian Hukum
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	10.243.080,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		21.000.000,00	Bagian Hukum
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%	857.346.417,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah	-	450.000.000,00	Bagian Hukum
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	250 Laporan	857.346.417,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		450.000.000,00	Bagian Hukum
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100%	59.118.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah	-	84.000.000,00	Bagian Hukum
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	33.680.400,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		40.000.000,00	Bagian Hukum
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.500.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		4.000.000,00	Bagian Hukum
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit	21.938.200,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		40.000.000,00	Bagian Hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	1.261.652.895,00						-	1.825.000.000,00	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang disusun	100%	1.261.652.895,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah, Masyarakat	-	1.825.000.000,00	Bagian Hukum
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	12 Dokumen	366.706.520,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah, Masyarakat		750.000.000,00	Bagian Hukum
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	25 Kasus	528.314.750,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah, Masyarakat		575.000.000,00	Bagian Hukum
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	400 Dokumen	366.631.625,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah, Masyarakat		500.000.000,00	Bagian Hukum
		BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			2.115.568.000,00							2.179.500.000,00	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH											
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	1.659.468.000,00						-	1.689.500.000,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	1.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah	-	1.500.000,00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	1.500.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		1.500.000,00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100%	300.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah	-	300.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.000.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		300.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100%	382.968.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah	-	400.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	382.968.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		400.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%	880.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah	-	890.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	880.000.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		890.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100%	95.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah	-	98.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	40.000.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		40.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		30.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	25.000.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		28.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan
2	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	456.100.000,00						-	490.000.000,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Realisasi Fisik Keuangannya >79% dari Target	100 Persen	116.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah	-	130.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	26.100.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		30.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	90.000.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		100.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa >79% dari Target	100 Persen	340.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah	-	360.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	190.000.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		200.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	150.000.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		160.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			3.995.415.000,00							4.167.735.628,00	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH											

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,8 Nilai	1.058.924.232,00						-	865.695.359,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	1.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah	-	1.650.000,00	Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	1.500.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		1.650.000,00	Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	211.716.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah	-	176.000.000,00	Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	211.716.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		176.000.000,00	Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100%	65.109.270,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah	-	0	Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	65.109.270,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		0	Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%	535.793.232,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah	-	399.790.359,00	Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	535.793.232,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		399.790.359,00	Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100%	244.805.730,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah	-	288.255.000,00	Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	33.680.400,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		28.655.000,00	Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	170.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		242.000.000,00	Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit	41.125.330,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		17.600.000,00	Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat
2	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase penyedia data bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	2.042.000.000,00						-	2.272.208.719,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase pelaksanaan kebijakan rakyat	80%	2.042.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah	-	2.272.208.719,00	Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	15 Dokumen	2.042.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah		2.272.208.719,00	Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat
3	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase penyedia data bidang perekonomian dan pembangunan	100%	894.490.768,00						-	1.029.831.550,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan	84 Skor	594.490.768,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	589.831.550,00	Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	282.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah dan Masyarakat		310.200.000,00	Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	3 Dokumen	312.490.768,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah dan Masyarakat		279.631.550,00	Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase kegiatan yang telah dilaksanakan	100%	300.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	440.000.000,00	Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	300.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah dan Masyarakat		440.000.000,00	Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat
		BAGIAN UMUM			35.619.031.919,82							35.619.032.000,00	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH											
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,45 skor	35.619.031.919,82						-	35.619.032.000,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	1.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Dearah	-	1.500.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	1.500.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Dearah		1.500.000,00	Bagian Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen adminstrasi keuangan	100%	13.717.059.125,71			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Dearah	-	12.750.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/bulan	13.717.059.125,71	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Dearah		12.750.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100%	2.000.595.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Dearah	-	2.000.595.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2.000.595.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Dearah		2.000.595.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	2.041.650.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Dearah	-	2.100.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Dearah		100.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	324 Laporan	1.941.650.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Dearah		2.000.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan pengadaan barang miik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1.529.702.003,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Dearah	-	1.701.900.000,00	Bagian Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1.341.900.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Dearah		1.001.900.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	187.802.003,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Dearah		300.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintah daerah	100%	10.758.140.091,11			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Dearah	-	11.565.037.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.758.140.091,11	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Dearah		11.565.037.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	1.450.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Bagian Umum Setda	-	1.550.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	110 Unit	1.000.000.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Bagian Umum Setda		1.000.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Bagian Umum Setda		300.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	130 Unit	250.000.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Bagian Umum Setda		250.000.000,00	Bagian Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%	1.000.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Dearah	-	1.000.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	220.000.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Dearah		220.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	780.000.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Dearah		780.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	persentase rumah tangga pimpinan dan sekretariat daerah dalam kondisi baik	100%	1.745.385.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Dearah	-	1.575.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	950.000.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Dearah		850.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	495.385.700,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Dearah		425.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	300.000.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Dearah		300.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	persentase fasilitasi keprotokolan pimpinan	100%	1.375.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Dearah	-	1.375.000.000,00	Bagian Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	2 Laporan	1.375.000.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Dearah		1.375.000.000,00	Bagian Umum
		SEKRETARIAT DPRD			45.424.083.000,00							45.396.472.412,00	
	4,02	SEKRETARIAT DPRD											
1	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82,50 Skor	31.948.100.576,00						-	31.534.778.756,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	2.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat	-	2.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat		2.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100%	2.001.844.128,63			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat	-	1.901.433.247,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2.001.844.128,63	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat		1.901.433.247,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian sesuai Ketentuan yang Terpenuhi	100%	196.991.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat	-	198.140.500,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	47.991.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat		48.340.500,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang	149.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat		149.800.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100%	1.251.778.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat	-	1.251.393.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	1.251.778.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat		1.251.393.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100%	285.468.690,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat	-	285.677.648,00	Sekretariat DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	285.468.690,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat		285.677.648,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	4.498.460.766,67			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat	-	4.184.364.353,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	4.498.460.766,67	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat		4.184.364.353,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang dapat digunakan	100%	1.047.563.332,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat	-	1.047.817.100,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	304.917.032,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat		305.170.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	238.722.100,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat		238.722.900,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	503.924.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat		503.924.200,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan terhadap Hak Keuangan DPRD	100%	15.860.143.620,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat	-	15.860.029.620,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/Bulan	15.551.893.620,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat		15.551.893.620,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	203.250.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat		203.136.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	105.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat		105.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	100%	6.803.851.038,70			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat	-	6.803.923.288,00	Sekretariat DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	8 Laporan	41.260.038,70	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat		41.260.288,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20 Laporan	6.762.591.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat		6.762.663.000,00	Sekretariat DPRD
2	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Ketetapan Penetapan APBD Tahun N Persentase Penetapan Raperda Tahun N	Tepat 100%	13.475.982.424,00						-	13.861.693.656,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Tercapainya Fungsi Pembentukan Perda DPRD	100%	4.447.395.480,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat	-	4.573.900.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9 Dokumen	2.579.429.300,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat		2.697.500.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 Dokumen	1.867.966.180,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat		1.876.400.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Tercapainya Fungsi Penganggaran DPRD	100%	1.758.730.770,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat	-	1.825.135.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 Dokumen	1.758.730.770,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat		1.825.135.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Program-Program Pemerintah Daerah	100%	1.176.557.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat	-	1.242.957.560,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	524.284.490,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat		590.684.660,00	Sekretariat DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	652.272.610,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat		652.272.900,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan SDM Anggota DPRD	100%	5.222.692.014,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat	-	5.349.093.871,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	2.298.490.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat		2.462.508.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen	1.638.123.464,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat		1.533.490.225,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	15 Dokumen	1.286.078.550,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat		1.353.095.646,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Jumlah Pokir yang masuk RKPD	100%	870.607.060,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat	-	870.607.225,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	870.607.060,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat		870.607.225,00	Sekretariat DPRD
	5,01	PERENCANAAN											
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 Nilai	7.420.149.187,67						-	9.666.846.450,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja dan anggaran yang sesuai dengan ketentuan	14 Dokumen	33.795.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Bappeda Kota Madiun	-	38.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	21.960.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Bappeda Kota Madiun		23.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	7.965.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Bappeda Kota Madiun		10.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.870.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Bappeda Kota Madiun		5.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang sesuai dengan ketentuan	100%	3.408.371.675,86			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Bappeda Kota Madiun	-	5.395.846.450,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	3.408.371.675,86	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Bappeda Kota Madiun		5.395.846.450,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi pegawai yang terpenuhi	100%	64.040.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Bappeda Kota Madiun	-	63.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	64.040.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Bappeda Kota Madiun		63.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi sesuai ketentuan	100%	424.898.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Bappeda Kota Madiun	-	475.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	424.898.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Bappeda Kota Madiun		475.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang terpenuhi	100%	318.654.372,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Bappeda Kota Madiun	-	410.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	286.193.372,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Bappeda Kota Madiun		0	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	19.857.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Bappeda Kota Madiun		200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	12.604.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Bappeda Kota Madiun		210.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa umum kantor	100%	2.947.477.339,81			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Bappeda Kota Madiun	-	3.000.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.947.477.339,81	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Bappeda Kota Madiun		3.000.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik/siap digunakan	100%	222.912.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Bappeda Kota Madiun	-	285.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	111.882.800,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Bappeda Kota Madiun		120.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	36.420.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Bappeda Kota Madiun		80.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	74.610.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Bappeda Kota Madiun		85.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
2	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarsan RPJMD dengan RKPD	100%	1.498.692.000,00						-	1.170.000.000,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran Pemerintah Daerah Kota Madiun	4 Dokumen	954.681.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	-	930.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	110.947.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun		235.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	114.997.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun		210.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	324.151.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun		210.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	404.586.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun		275.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pembangunan Pemda Kota Madiun	4 Dokumen	544.011.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	-	240.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	184.492.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun		120.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	359.519.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun		120.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
3	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	100%	1.525.058.900,00						-	1.700.000.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	100%	565.136.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	-	680.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	160.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun		210.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	120.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun		130.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	278.764.600,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun		210.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	6.371.600,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun		130.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	100%	357.901.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	-	340.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	237.922.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun		210.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	119.979.900,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun		130.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilyahan	100%	602.020.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	-	680.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	162.080.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun		210.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	119.948.800,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun		130.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	200.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun		210.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	119.992.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun		130.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5,02	KEUANGAN											

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,70 skor	44.709.639.222,14						-	44.020.695.000,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	1.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	BKAD KOTA MADIUN	-	1.400.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	1.400.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	BKAD KOTA MADIUN		1.400.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100%	29.263.306.200,14			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	BKAD KOTA MADIUN	-	28.560.350.191,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	29.263.306.200,14	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	BKAD KOTA MADIUN		28.560.350.191,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100%	600.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	BKAD KOTA MADIUN	-	600.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	600.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	BKAD KOTA MADIUN		600.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan BMD Urusan Pemerintah Daerah	100%	268.716.680,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	BKAD KOTA MADIUN	-	214.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	10 Unit	268.716.680,00	Kota Madiun, Semua	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata	BKAD KOTA MADIUN		214.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Kecamatan, Semua Kel/Desa		memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat				
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	100%	14.258.216.342,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	BKAD KOTA MADIUN	-	14.326.944.809,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.258.216.342,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	BKAD KOTA MADIUN		14.326.944.809,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang Layak Digunakan	100%	318.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	BKAD KOTA MADIUN	-	318.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	110.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	BKAD KOTA MADIUN		110.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	BKAD KOTA MADIUN		100.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	108.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	BKAD KOTA MADIUN		108.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase laporan keuangan tepat waktu	100%	9.259.083.320,00						-	7.075.125.000,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu	100%	1.069.232.140,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD KOTA MADIUN	-	1.069.250.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	83.420.660,00	Kota Madiun, Semua	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata	OPD KOTA MADIUN		83.421.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Kecamatan, Semua Kel/Desa		memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat				
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	56.818.800,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD KOTA MADIUN		56.819.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	16.863.300,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD KOTA MADIUN		16.876.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	23.636.500,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD KOTA MADIUN		23.640.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	113.676.600,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD KOTA MADIUN		113.677.400,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	195.680.280,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD KOTA MADIUN		195.680.600,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	579.136.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD KOTA MADIUN		579.136.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Dengan Peraturan Perundangan	100%	67.330.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD KOTA MADIUN	-	60.265.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	47 Dokumen	28.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan,	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan	OPD KOTA MADIUN		25.750.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Semua Kel/Desa		pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat				
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	360 Orang	39.330.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD KOTA MADIUN		34.515.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Permintan Laporan Keuangan yang Terfasilitasi	100%	1.122.521.180,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD KOTA MADIUN	-	945.610.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 Laporan	140.000.420,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD KOTA MADIUN		140.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	4 Dokumen	90.000.760,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD KOTA MADIUN		90.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	600 Orang	892.520.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD KOTA MADIUN		715.610.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%	7.000.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD KOTA MADIUN	-	5.000.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	7.000.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD KOTA MADIUN		5.000.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	3,20%	2.107.493.000,00						-	1.971.288.000,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD	22 Dokumen	2.107.493.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan	OPD KOTA MADIUN	-	1.971.288.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat				
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	20 Laporan	173.618.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD KOTA MADIUN		123.142.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	1.888.935.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD KOTA MADIUN		1.803.206.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	630 Orang	44.940.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	OPD KOTA MADIUN		44.940.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02	KEUANGAN											
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	81,40%	11.677.543.652,12						-	0	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	1.999.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Lingkungan BAPENDA	-	0	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	1.999.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Lingkungan BAPENDA		0	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100%	9.417.329.471,12			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Lingkungan BAPENDA	-	0	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	9.417.329.471,12	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan	Lingkungan BAPENDA		0	Badan Pendapatan Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Semua Kel/Desa		pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat				
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	100%	179.924.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Lingkungan BAPENDA	-	0	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	60.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Lingkungan BAPENDA		0	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	119.924.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Lingkungan BAPENDA		0	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100%	122.337.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Lingkungan BAPENDA	-	0	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	122.337.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Lingkungan BAPENDA		0	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan BMD Urusan Pemerintah Daerah	100%	913.926.930,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Lingkungan BAPENDA	-	0	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit	782.819.040,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Lingkungan BAPENDA		0	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	131.107.890,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui	Lingkungan BAPENDA		0	Badan Pendapatan Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat				
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	100%	843.477.082,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Lingkungan BAPENDA	-	0	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	843.477.082,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Lingkungan BAPENDA		0	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik daerah yang Layak Digunakan	100%	198.549.769,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Lingkungan BAPENDA	-	0	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit	98.906.035,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Lingkungan BAPENDA		0	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.993.734,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Lingkungan BAPENDA		0	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.650.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Lingkungan BAPENDA		0	Badan Pendapatan Daerah
2	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Pajak Daerah	100%	2.123.661.867,88						-	0	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	2.123.661.867,88			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Lingkungan BAPENDA	-	0	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	43.300.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui	Lingkungan BAPENDA		0	Badan Pendapatan Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat				
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3540 Laporan	463.981.946,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Lingkungan BAPENDA			0 Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	49.935.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Lingkungan BAPENDA			0 Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	99.673.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Lingkungan BAPENDA			0 Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2 Obyek Pajak	299.999.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Lingkungan BAPENDA			0 Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	49.997.160,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Lingkungan BAPENDA			0 Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3185 Layanan	139.999.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Lingkungan BAPENDA			0 Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	205.395.997,88	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Lingkungan BAPENDA			0 Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	349.999.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui	Lingkungan BAPENDA			0 Badan Pendapatan Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat				
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	381.419.400,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Lingkungan BAPENDA		0	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	39.962.364,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Lingkungan BAPENDA		0	Badan Pendapatan Daerah
	5,05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.228.682.800,00							1.505.000.000,00	
1	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan	100%	1.140.282.800,00						-	1.355.000.000,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase kajian/penelitian yang dilaksanakan sesuai rencana	100%	1.011.107.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Pemerintah Kota Madiun	-	1.175.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	10 Laporan	900.884.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Pemerintah Kota Madiun		950.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2 Laporan	110.223.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Pemerintah Kota Madiun		225.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	2 Dokumen	129.175.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Pemerintah Kota Madiun	-	180.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	4 Dokumen	129.175.800,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui	Pemerintah Kota Madiun		180.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat				
2	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Produk Inovasi yang di Manfaatkan	100%	88.400.000,00						-	150.000.000,00	
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	Persentase Inovasi yang dimanfaatkan	100%	88.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Pemerintah Kota Madiun	-	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.05.03.2.02.0011	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	1 Laporan	49.900.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Pemerintah Kota Madiun		75.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
	5.05.03.2.02.0023	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	1 laporan	38.500.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Pemerintah Kota Madiun		75.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah
		INSPEKTORAT DAERAH			11.632.068.000,00							12.201.500.000,00	
	6,01	INSPEKTORAT DAERAH											
1	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,5 Nilai	10.183.559.860,00						-	10.242.500.000,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	2.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Inspektorat Kota Madiun	-	2.500.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2.000.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Inspektorat Kota Madiun		2.500.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	4.607.207.263,51			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	ASN Inspektorat Kota Madiun	-	5.000.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	4.607.207.263,51	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	ASN Inspektorat Kota Madiun		5.000.000.000,00	Inspektorat Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi pegawai yang terpenuhi	100%	201.150.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	ASN Inspektorat Kota Madiun	-	200.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	201.150.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	ASN Inspektorat Kota Madiun		200.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	100%	663.134.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Inspektorat Kota Madiun	-	700.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	663.134.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Inspektorat Kota Madiun		700.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	180.152.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Inspektorat Kota Madiun	-	175.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	180.152.900,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Inspektorat Kota Madiun		175.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4.219.994.896,49			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Inspektorat Kota Madiun	-	4.000.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	4.219.994.896,49	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Inspektorat Kota Madiun		4.000.000.000,00	Inspektorat Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang dapat digunakan	100%	309.920.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Inspektorat Kota Madiun	-	165.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31 Unit	70.710.800,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Inspektorat Kota Madiun		75.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.680.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Inspektorat Kota Madiun		55.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	38.530.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Inspektorat Kota Madiun		35.000.000,00	Inspektorat Daerah
2	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	94,50%	577.930.040,00						-	971.500.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah dokumen hasil pengawasan intern Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	31 Dokumen 3 Laporan	502.237.040,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Semua OPD Kota Madiun	-	914.500.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Laporan	93.132.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Semua OPD Kota Madiun		87.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan	42.824.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Semua OPD Kota Madiun		450.000.000,00	Inspektorat Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4 Laporan	86.640.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Semua OPD Kota Madiun		40.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	55.280.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Semua OPD Kota Madiun		67.500.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	202.200.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Semua OPD Kota Madiun		250.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	22.161.040,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Semua OPD Kota Madiun		20.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase penyelesaian dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	100%	75.693.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Inspektorat Kota Madiun	-	57.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	47.768.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Inspektorat Kota Madiun		22.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan	27.925.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Inspektorat Kota Madiun		35.000.000,00	Inspektorat Daerah
3	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3 level	870.578.100,00						-	987.500.000,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta asistensi yang Terpenuhi	100%	69.705.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Inspektorat Kota Madiun	-	92.500.000,00	Inspektorat Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	33.345.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Inspektorat Kota Madiun		55.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	36.360.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Inspektorat Kota Madiun		37.500.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi	3 Dokumen	800.873.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Semua OPD Kota Madiun	-	895.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	34 perangkat daerah	332.360.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Semua OPD Kota Madiun		345.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan	468.513.100,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Semua OPD Kota Madiun		550.000.000,00	Inspektorat Daerah
	7,01	KECAMATAN											
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Manguharjo	83,40 Nilai	17.023.421.944,00						-	17.617.433.842,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	2.810.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	-	3.000.000,00	Kecamatan Manguharjo
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	2.810.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo		3.000.000,00	Kecamatan Manguharjo
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	7.239.089.161,62			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	-	9.814.374.154,00	Kecamatan Manguharjo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat				
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	7.239.089.161,62	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo		9.814.374.154,00	Kecamatan Manguharjo
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang Tercapai	100%	68.862.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	-	68.890.000,00	Kecamatan Manguharjo
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang	68.862.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo		68.890.000,00	Kecamatan Manguharjo
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	116.460.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	-	114.966.000,00	Kecamatan Manguharjo
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	116.460.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo		114.966.000,00	Kecamatan Manguharjo
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100%	1.055.806.660,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	-	835.000.000,00	Kecamatan Manguharjo
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	194.146.660,00	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo		35.000.000,00	Kecamatan Manguharjo
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	170.663.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo		500.000.000,00	Kecamatan Manguharjo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat				
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 Unit	690.997.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo		300.000.000,00	Kecamatan Manguharjo
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya kebutuhan jasa urusan pemerintah daerah	100%	8.275.583.822,38			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	-	6.277.127.288,00	Kecamatan Manguharjo
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.275.583.822,38	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo		6.277.127.288,00	Kecamatan Manguharjo
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persetase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100%	264.810.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	-	504.076.400,00	Kecamatan Manguharjo
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	94.952.600,00	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo		88.680.000,00	Kecamatan Manguharjo
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	116.980.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo		358.241.500,00	Kecamatan Manguharjo
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	52.877.700,00	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo		57.154.900,00	Kecamatan Manguharjo
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Manguharjo	92,71 skor	39.938.000,00						-	65.000.000,00	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti	100%	39.938.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,	Masyarakat di Wilayah	-	65.000.000,00	Kecamatan Manguharjo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Kecamatan Manguharjo			
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	39.938.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		65.000.000,00	Kecamatan Manguharjo
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100%	131.956.500,00						-	163.110.000,00	Kecamatan Manguharjo
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	61.390.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	-	57.410.000,00	Kecamatan Manguharjo
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	61.390.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		57.410.000,00	Kecamatan Manguharjo
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga kemsyarakatan Tingkat Kecamatan	2 Forum	70.566.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	-	105.700.000,00	Kecamatan Manguharjo
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	70.566.500,00	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		105.700.000,00	Kecamatan Manguharjo
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	348.191.000,00						-	443.296.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	100%	348.191.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	-	443.296.000,00	Kecamatan Manguharjo
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	1 Laporan	102.190.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		122.770.000,00	Kecamatan Manguharjo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat				
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	246.001.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		320.526.000,00	Kecamatan Manguharjo
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan perangkat daerah lain	100%	112.201.000,00						-	144.938.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	100%	112.201.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	-	144.938.000,00	Kecamatan Manguharjo
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	54.830.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		74.858.000,00	Kecamatan Manguharjo
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	45.041.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		55.080.000,00	Kecamatan Manguharjo
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen	12.330.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		15.000.000,00	Kecamatan Manguharjo
		KELURAHAN MANGUHARJO			962.857.000,00							1.102.494.500,00	
	7,01	KECAMATAN											
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Manguharjo	92,71 skor	443.223.000,00						-	497.784.500,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	443.223.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,	Masyarakat di Wilayah	-	497.784.500,00	Kelurahan Manguharjo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Kecamatan Manguharjo			
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	443.223.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		497.784.500,00	Kelurahan Manguharjo
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100%	519.634.000,00						-	604.710.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	519.634.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	-	604.710.000,00	Kelurahan Manguharjo
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	65.000.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		150.000.000,00	Kelurahan Manguharjo
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	454.634.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		454.710.000,00	Kelurahan Manguharjo
		KELURAHAN SOGATEN			861.568.550,00							1.000.344.790,00	
	7,01	KECAMATAN											
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Manguharjo	92,71 skor	419.074.760,00						-	472.834.790,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	419.074.760,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	-	472.834.790,00	Kelurahan Sogaten
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	419.074.760,00	Kota Madiun, Manguharjo, Sogaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		472.834.790,00	Kelurahan Sogaten

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100%	442.493.790,00						-	527.510.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	442.493.790,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	-	527.510.000,00	Kelurahan Sogaten
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	64.983.810,00	Kota Madiun, Manguharjo, Sogaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		150.000.000,00	Kelurahan Sogaten
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	377.509.980,00	Kota Madiun, Manguharjo, Sogaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		377.510.000,00	Kelurahan Sogaten
		KELURAHAN PATIHAN			764.098.100,00							898.698.400,00	
	7,01	KECAMATAN											
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Manguharjo	92,71 skor	403.748.100,00						-	453.188.400,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	403.748.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	-	453.188.400,00	Kelurahan Patihan
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	403.748.100,00	Kota Madiun, Manguharjo, Patihan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo		453.188.400,00	Kelurahan Patihan
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100%	360.350.000,00						-	445.510.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	360.350.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	-	445.510.000,00	Kelurahan Patihan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	65.000.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Patihan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		150.000.000,00	Kelurahan Patihan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	295.350.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Patihan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		295.510.000,00	Kelurahan Patihan
		KELURAHAN NGEGONG			694.450.080,00							831.776.500,00	
	7,01	KECAMATAN											
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Manguharjo	92,71 skor	391.295.900,00						-	443.616.500,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	391.295.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	-	443.616.500,00	Kelurahan Ngegong
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	391.295.900,00	Kota Madiun, Manguharjo, Ngegong	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		443.616.500,00	Kelurahan Ngegong
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100%	303.154.180,00						-	388.160.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	303.154.180,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	-	388.160.000,00	Kelurahan Ngegong
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	65.000.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Ngegong	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		150.000.000,00	Kelurahan Ngegong
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	238.154.180,00	Kota Madiun, Manguharjo, Ngegong	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		238.160.000,00	Kelurahan Ngegong

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		KELURAHAN WINONGO			966.214.560,00							1.099.215.000,00	
	7,01	KECAMATAN											
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Manguharjo	92,71 skor	431.704.560,00						-	479.705.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	431.704.560,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	-	479.705.000,00	Kelurahan Winongo
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	431.704.560,00	Kota Madiun, Manguharjo, Winongo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		479.705.000,00	Kelurahan Winongo
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100%	534.510.000,00						-	619.510.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	534.510.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	-	619.510.000,00	Kelurahan Winongo
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	65.000.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Winongo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		150.000.000,00	Kelurahan Winongo
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	469.510.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Winongo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		469.510.000,00	Kelurahan Winongo
		KELURAHAN MADIUN LOR			1.043.024.580,00							1.184.952.800,00	
	7,01	KECAMATAN											
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Manguharjo	92,71 skor	465.414.580,00						-	522.342.800,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	465.414.580,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	-	522.342.800,00	Kelurahan Madiun Lor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	465.414.580,00	Kota Madiun, Manguharjo, Madiun Lor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		522.342.800,00	Kelurahan Madiun Lor
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100%	577.610.000,00						-	662.610.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	577.610.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	-	662.610.000,00	Kelurahan Madiun Lor
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	65.000.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Madiun Lor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		150.000.000,00	Kelurahan Madiun Lor
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	512.610.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Madiun Lor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		512.610.000,00	Kelurahan Madiun Lor
		KELURAHAN PANGONGANGAN			823.343.070,00							953.703.070,00	
	7,01	KECAMATAN											
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Manguharjo	92,71 skor	414.433.070,00						-	459.793.070,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	414.433.070,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	-	459.793.070,00	Kelurahan Pangongangan
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	414.433.070,00	Kota Madiun, Manguharjo, Pangonganga n	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		459.793.070,00	Kelurahan Pangongangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100%	408.910.000,00						-	493.910.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	408.910.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	-	493.910.000,00	Kelurahan Pangonganga n
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	65.000.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Pangonganga n	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		150.000.000,00	Kelurahan Pangonganga n
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	343.910.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Pangonganga n	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		343.910.000,00	Kelurahan Pangonganga n
		KELURAHAN NAMBANGAN LOR			1.517.265.400,00							1.649.425.400,00	
	7,01	KECAMATAN											
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Manguharjo	92,71 skor	570.955.400,00						-	627.415.400,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	570.955.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	-	627.415.400,00	Kelurahan Nambangan Lor
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	570.955.400,00	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Lor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		627.415.400,00	Kelurahan Nambangan Lor
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100%	946.310.000,00						-	1.022.010.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	946.310.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	-	1.022.010.000,00	Kelurahan Nambangan Lor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	74.300.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Lor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		150.000.000,00	Kelurahan Nambangan Lor
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	872.010.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Lor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		872.010.000,00	Kelurahan Nambangan Lor
		KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL			1.131.282.216,00							1.263.142.759,00	
	7,01	KECAMATAN											
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Manguharjo	92,71 skor	466.172.406,00						-	522.332.759,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	466.172.406,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	-	522.332.759,00	Kelurahan Nambangan Kidul
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	466.172.406,00	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Kidul	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		522.332.759,00	Kelurahan Nambangan Kidul
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100%	665.109.810,00						-	740.810.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	665.109.810,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	-	740.810.000,00	Kelurahan Nambangan Kidul
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	74.299.810,00	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Kidul	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		150.000.000,00	Kelurahan Nambangan Kidul

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	590.810.000,00	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Kidul	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		590.810.000,00	Kelurahan Nambangan Kidul
		KECAMATAN KARTOHARJO			16.608.688.917,91							17.653.827.260,00	
	7,01	KECAMATAN											
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	82,85 skor	15.761.817.227,91						-	16.637.519.440,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	2.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan karyawati Kecamatan Kartoharjo	-	2.000.000,00	Kecamatan Kartoharjo
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	2.000.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan karyawati Kecamatan Kartoharjo		2.000.000,00	Kecamatan Kartoharjo
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	6.829.068.043,86			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan karyawati Kecamatan Kartoharjo	-	7.424.659.270,00	Kecamatan Kartoharjo
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	6.829.068.043,86	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan karyawati Kecamatan Kartoharjo		7.424.659.270,00	Kecamatan Kartoharjo
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100%	30.008.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Karyawan karyawati Kecamatan Kartoharjo	-	33.000.000,00	Kecamatan Kartoharjo
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	30.008.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Karyawan karyawati Kecamatan Kartoharjo		33.000.000,00	Kecamatan Kartoharjo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	92,64 indeks	212.102.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan karyawati Kecamatan Kartoharjo	-	237.600.000,00	Kecamatan Kartoharjo
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	212.102.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan karyawati Kecamatan Kartoharjo		237.600.000,00	Kecamatan Kartoharjo
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase barang milik daerah yang layak digunakan	100%	297.036.380,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Karyawan karyawati Kecamatan Kartoharjo	-	628.500.000,00	Kecamatan Kartoharjo
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	58.374.760,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Karyawan karyawati Kecamatan Kartoharjo		175.000.000,00	Kecamatan Kartoharjo
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	85.043.760,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Karyawan karyawati Kecamatan Kartoharjo		85.000.000,00	Kecamatan Kartoharjo
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	148.483.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Karyawan karyawati Kecamatan Kartoharjo		165.000.000,00	Kecamatan Kartoharjo
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	5.134.860,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Karyawan karyawati Kecamatan Kartoharjo		203.500.000,00	Kecamatan Kartoharjo
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%	8.101.972.930,05			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Karyawan karyawati Kecamatan Kartoharjo	-	8.080.370.570,00	Kecamatan Kartoharjo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.101.972.930,05	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Karyawan karyawati Kecamatan Kartoharjo		8.080.370.570,00	Kecamatan Kartoharjo
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%	289.629.874,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Karyawan karyawati Kecamatan Kartoharjo	-	231.389.600,00	Kecamatan Kartoharjo
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	94.152.600,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Karyawan karyawati Kecamatan Kartoharjo		61.859.600,00	Kecamatan Kartoharjo
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	48.677.274,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Karyawan karyawati Kecamatan Kartoharjo		10.000.000,00	Kecamatan Kartoharjo
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	122.300.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Karyawan karyawati Kecamatan Kartoharjo		134.530.000,00	Kecamatan Kartoharjo
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	24.500.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Karyawan karyawati Kecamatan Kartoharjo		25.000.000,00	Kecamatan Kartoharjo
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	92,64 indeks	68.752.000,00						-	63.563.500,00	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	100%	68.752.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	-	63.563.500,00	Kecamatan Kartoharjo
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	68.752.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo		63.563.500,00	Kecamatan Kartoharjo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	149.162.170,00						-	260.064.860,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	68.748.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	-	91.984.860,00	Kecamatan Kartoharjo
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	68.748.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo		91.984.860,00	Kecamatan Kartoharjo
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	1 lembaga/forum	80.414.170,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	-	168.080.000,00	Kecamatan Kartoharjo
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	80.414.170,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo		168.080.000,00	Kecamatan Kartoharjo
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	470.400.420,00						-	518.158.960,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100%	470.400.420,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	-	518.158.960,00	Kecamatan Kartoharjo
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	88.342.620,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo		97.185.000,00	Kecamatan Kartoharjo
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	25 Laporan	382.057.800,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo		420.973.960,00	Kecamatan Kartoharjo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan perangkat daerah lain	100%	158.557.100,00						-	174.520.500,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase himbauan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	100%	158.557.100,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	-	174.520.500,00	Kecamatan Kartoharjo
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	425 Orang	66.899.500,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo		73.590.000,00	Kecamatan Kartoharjo
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	78.406.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo		86.350.000,00	Kecamatan Kartoharjo
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	13.251.600,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo		14.580.500,00	Kecamatan Kartoharjo
		KELURAHAN ORO-ORO OMBO			1.095.481.100,00							1.275.267.070,00	
	7,01	KECAMATAN											
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	92,64 indeks	374.892.100,00						-	481.643.470,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	374.892.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Oro - oro Ombo	-	481.643.470,00	Kelurahan Oro-Oro Ombo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	374.892.100,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Oro-oro Ombo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Oro - oro Ombo		481.643.470,00	Kelurahan Oro-Oro Ombo
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	720.589.000,00						-	793.623.600,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	720.589.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Oro - oro Ombo	-	793.623.600,00	Kelurahan Oro-Oro Ombo
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit	184.556.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Oro - oro Ombo		202.461.600,00	Kelurahan Oro-Oro Ombo
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	536.033.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Oro-oro Ombo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Oro - oro Ombo		591.162.000,00	Kelurahan Oro-Oro Ombo
		KELURAHAN SUKOSARI			674.568.535,00							796.923.399,00	
	7,01	KECAMATAN											
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	92,64 indeks	274.881.400,00						-	368.696.744,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	274.881.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Sukosari	-	368.696.744,00	Kelurahan Sukosari
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	274.881.400,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Sukosari	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Sukosari		368.696.744,00	Kelurahan Sukosari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	399.687.135,00						-	428.226.655,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	399.687.135,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Sukosari	-	428.226.655,00	Kelurahan Sukosari
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	166.819.935,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Sukosari	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Sukosari		166.360.655,00	Kelurahan Sukosari
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	232.867.200,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Sukosari	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Sukosari		261.866.000,00	Kelurahan Sukosari
		KELURAHAN KLEGEN			1.262.918.480,00							1.224.903.753,00	
	7,01	KECAMATAN											
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	92,64 indeks	394.051.480,00						-	507.795.753,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	394.051.480,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Klegen	-	507.795.753,00	Kelurahan Klegen
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	394.051.480,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Klegen	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Klegen		507.795.753,00	Kelurahan Klegen
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	868.867.000,00						-	717.108.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	868.867.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Klegen	-	717.108.000,00	Kelurahan Klegen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	296.105.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Klegen	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Klegen		245.663.000,00	Kelurahan Klegen
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	572.762.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Klegen	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Klegen		471.445.000,00	Kelurahan Klegen
		KELURAHAN REJOMULYO			1.094.961.700,00							1.301.376.073,00	
	7,01	KECAMATAN											
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	92,64 indeks	342.165.700,00						-	465.397.473,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	342.165.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Rejomulyo	-	465.397.473,00	Kelurahan Rejomulyo
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	342.165.700,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Rejomulyo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Rejomulyo		465.397.473,00	Kelurahan Rejomulyo
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	752.796.000,00						-	835.978.600,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	752.796.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Rejomulyo	-	835.978.600,00	Kelurahan Rejomulyo
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	288.536.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Rejomulyo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Rejomulyo		317.389.600,00	Kelurahan Rejomulyo
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	464.260.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Rejomulyo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Rejomulyo		518.589.000,00	Kelurahan Rejomulyo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		KELURAHAN PILANGBANGO			741.845.000,00							874.417.344,00	
	7,01	KECAMATAN											
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	92,64 indeks	285.396.000,00						-	368.696.744,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	285.396.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Pilangbango	-	368.696.744,00	Kelurahan Pilangbango
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	285.396.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Pilangbango	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Pilangbango		368.696.744,00	Kelurahan Pilangbango
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	456.449.000,00						-	505.720.600,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	456.449.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Pilangbango	-	505.720.600,00	Kelurahan Pilangbango
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	173.438.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Pilangbango	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Pilangbango		190.785.100,00	Kelurahan Pilangbango
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	283.011.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Pilangbango	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Pilangbango		314.935.500,00	Kelurahan Pilangbango
		KELURAHAN TAWANGREJO			744.799.600,00							868.471.560,00	
	7,01	KECAMATAN											
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	92,64 indeks	265.054.600,00						-	337.599.460,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	265.054.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Tawangrejo	-	337.599.460,00	Kelurahan Tawangrejo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	265.054.600,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Tawangrejo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Tawangrejo		337.599.460,00	Kelurahan Tawangrejo
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	479.745.000,00						-	530.872.100,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	479.745.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Tawangrejo	-	530.872.100,00	Kelurahan Tawangrejo
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	171.011.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Tawangrejo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Tawangrejo		188.112.100,00	Kelurahan Tawangrejo
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	308.734.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Tawangrejo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Tawangrejo		342.760.000,00	Kelurahan Tawangrejo
		KELURAHAN KANIGORO			1.221.346.550,00							1.433.772.920,00	
	7,01	KECAMATAN											
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	92,64 indeks	385.519.150,00						-	513.212.920,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	385.519.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Kanigoro	-	513.212.920,00	Kelurahan Kanigoro
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	385.519.150,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kanigoro	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Kanigoro		513.212.920,00	Kelurahan Kanigoro
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	835.827.400,00						-	920.560.000,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	835.827.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Kanigoro	-	920.560.000,00	Kelurahan Kanigoro
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	206.350.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kanigoro	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Kanigoro		226.985.000,00	Kelurahan Kanigoro
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	629.477.400,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kanigoro	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Kanigoro		693.575.000,00	Kelurahan Kanigoro
		KELURAHAN KARTOHARJO			989.687.370,00							1.177.985.180,00	
	7,01	KECAMATAN											
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	92,64 indeks	327.500.370,00						-	444.480.960,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	327.500.370,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Kartoharjo	-	444.480.960,00	Kelurahan Kartoharjo
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	327.500.370,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Kartoharjo		444.480.960,00	Kelurahan Kartoharjo
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	662.187.000,00						-	733.504.220,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	662.187.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Kartoharjo	-	733.504.220,00	Kelurahan Kartoharjo
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	201.132.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Kartoharjo		221.245.220,00	Kelurahan Kartoharjo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	461.055.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Kartoharjo		512.259.000,00	Kelurahan Kartoharjo
		KELURAHAN KELUN			800.319.386,00							928.994.550,00	
	7,01	KECAMATAN											
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	92,64 indeks	303.242.386,00						-	375.804.550,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	303.242.386,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Kelun	-	375.804.550,00	Kelurahan Kelun
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	303.242.386,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kelun	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Kelun		375.804.550,00	Kelurahan Kelun
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	497.077.000,00						-	553.190.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	497.077.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Kelun	-	553.190.000,00	Kelurahan Kelun
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	172.924.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kelun	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Kelun		190.216.400,00	Kelurahan Kelun
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	324.153.000,00	Kota Madiun, Kartoharjo, Kelun	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Kelun		362.973.600,00	Kelurahan Kelun
		KECAMATAN TAMAN			16.538.978.166,88							18.191.597.495,00	
	7,01	KECAMATAN											

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,84 Nilai	15.842.178.166,88						-	17.342.398.595,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokomen Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi perangkat daerah	100%	2.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman	-	2.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.000.000,00	Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		2.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	7.313.148.238,54			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Pegawai Kecamatan Taman	-	7.803.767.891,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	7.313.148.238,54	Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Pegawai Kecamatan Taman		7.803.767.891,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administasi kepegawaian	100%	140.110.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Pegawai Kecamatan Taman	-	241.021.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	140.110.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Pegawai Kecamatan Taman		241.021.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	200.334.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman	-	398.083.400,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	200.334.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		398.083.400,00	Kecamatan Taman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah yang layak	100%	404.773.120,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman	-	539.500.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 Unit	223.599.040,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		270.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	64.324.240,00	Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		66.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	116.849.840,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		203.500.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%	7.470.477.998,34			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman	-	7.886.880.409,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.470.477.998,34	Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		7.886.880.409,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	311.334.810,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman	-	471.145.895,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	115.503.110,00	Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		130.145.895,00	Kecamatan Taman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	143.885.000,00	Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		275.000.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	51.946.700,00	Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		66.000.000,00	Kecamatan Taman
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	89,73 Indeks	16.930.000,00						-	20.642.600,00	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	100%	16.930.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman	-	20.642.600,00	Kecamatan Taman
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	16.930.000,00	Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		20.642.600,00	Kecamatan Taman
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	214.098.000,00						-	239.717.500,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	80.938.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman	-	89.089.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	80.938.000,00	Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		89.089.000,00	Kecamatan Taman
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	133.160.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Taman	-	150.628.500,00	Kecamatan Taman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	133.160.000,00	Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Taman		150.628.500,00	Kecamatan Taman
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	344.964.000,00						-	455.933.500,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100%	344.964.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman	-	455.933.500,00	Kecamatan Taman
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	107.490.000,00	Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		121.038.500,00	Kecamatan Taman
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	237.474.000,00	Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		334.895.000,00	Kecamatan Taman
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan perangkat daerah lain	100%	120.808.000,00						-	132.905.300,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase himbauan Kepala daerah yang ditindaklanjuti	100%	120.808.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman	-	132.905.300,00	Kecamatan Taman
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 0rang	38.060.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		41.866.000,00	Kecamatan Taman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	66.294.000,00	Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		72.921.200,00	Kecamatan Taman
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	16.454.000,00	Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		18.118.100,00	Kecamatan Taman
		KELURAHAN MOJOREJO			1.447.657.900,00							1.588.440.920,00	
	7,01	KECAMATAN											
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	89,73 Indeks	421.486.900,00						-	463.639.220,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100%	421.486.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman	-	463.639.220,00	Kelurahan Mojorejo
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	421.486.900,00	Kota Madiun, Taman, Mojorejo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		463.639.220,00	Kelurahan Mojorejo
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	1.026.171.000,00						-	1.124.801.700,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	1.026.171.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman	-	1.124.801.700,00	Kelurahan Mojorejo
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	253.540.000,00	Kota Madiun, Taman, Mojorejo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		275.000.000,00	Kelurahan Mojorejo
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	772.631.000,00	Kota Madiun, Taman, Mojorejo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		849.801.700,00	Kelurahan Mojorejo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		KELURAHAN PANDEAN			1.374.324.700,00							1.511.757.500,00	
	7,01	KECAMATAN											
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	89,73 Indeks	417.649.720,00						-	459.415.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100%	417.649.720,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman	-	459.415.000,00	Kelurahan Pandean
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	417.649.720,00	Kota Madiun, Taman, Pandean	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		459.415.000,00	Kelurahan Pandean
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	956.674.980,00						-	1.052.342.500,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	956.674.980,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman	-	1.052.342.500,00	Kelurahan Pandean
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	230.000.000,00	Kota Madiun, Taman, Pandean	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		253.000.000,00	Kelurahan Pandean
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	726.674.980,00	Kota Madiun, Taman, Pandean	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		799.342.500,00	Kelurahan Pandean
		KELURAHAN BANJAREJO			1.000.819.367,00							1.100.901.967,00	
	7,01	KECAMATAN											
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	89,73 Indeks	399.319.947,00						-	439.251.967,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100%	399.319.947,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman	-	439.251.967,00	Kelurahan Banjarejo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	399.319.947,00	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		439.251.967,00	Kelurahan Banjarejo
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	601.499.420,00						-	661.650.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	601.499.420,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman	-	661.650.000,00	Kelurahan Banjarejo
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	159.999.690,00	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		176.000.000,00	Kelurahan Banjarejo
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	441.499.730,00	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		485.650.000,00	Kelurahan Banjarejo
		KELURAHAN KUNCEN			434.607.140,00							478.068.414,00	
	7,01	KECAMATAN											
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	89,73 Indeks	195.691.860,00						-	215.261.243,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100%	195.691.860,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman	-	215.261.243,00	Kelurahan Kuncen
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	195.691.860,00	Kota Madiun, Taman, Kuncen	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		215.261.243,00	Kelurahan Kuncen
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	238.915.280,00						-	262.807.171,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	238.915.280,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman	-	262.807.171,00	Kelurahan Kuncen
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	99.999.820,00	Kota Madiun, Taman, Kuncen	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		110.000.000,00	Kelurahan Kuncen
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	138.915.460,00	Kota Madiun, Taman, Kuncen	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		152.807.171,00	Kelurahan Kuncen
		KELURAHAN MANISREJO			1.392.682.760,00							1.531.951.135,00	
	7,01	KECAMATAN											
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	89,73 Indeks	444.476.060,00						-	488.923.765,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100%	444.476.060,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman	-	488.923.765,00	Kelurahan Manisrejo
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	444.476.060,00	Kota Madiun, Taman, Manisrejo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		488.923.765,00	Kelurahan Manisrejo
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	948.206.700,00						-	1.043.027.370,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	948.206.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman	-	1.043.027.370,00	Kelurahan Manisrejo
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	220.000.000,00	Kota Madiun, Taman, Manisrejo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		242.000.000,00	Kelurahan Manisrejo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	728.206.700,00	Kota Madiun, Taman, Manisrejo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		801.027.370,00	Kelurahan Manisrejo
		KELURAHAN KEJURON			1.212.869.440,00							1.333.572.808,00	
	7,01	KECAMATAN											
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	89,73 Indeks	404.799.440,00						-	445.289.808,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100%	404.799.440,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman	-	445.289.808,00	Kelurahan Kejuron
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	404.799.440,00	Kota Madiun, Taman, Kejuron	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		445.289.808,00	Kelurahan Kejuron
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	808.070.000,00						-	888.283.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	808.070.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman	-	888.283.000,00	Kelurahan Kejuron
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	200.000.000,00	Kota Madiun, Taman, Kejuron	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		220.000.000,00	Kelurahan Kejuron
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	608.070.000,00	Kota Madiun, Taman, Kejuron	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		668.283.000,00	Kelurahan Kejuron
		KELURAHAN JOSENAN			867.105.891,00							953.817.524,00	
	7,01	KECAMATAN											
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	89,73 Indeks	317.174.791,00						-	348.892.984,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100%	317.174.791,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman	-	348.892.984,00	Kelurahan Josenan
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	317.174.791,00	Kota Madiun, Taman, Josenan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		348.892.984,00	Kelurahan Josenan
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	549.931.100,00						-	604.924.540,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	549.931.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman	-	604.924.540,00	Kelurahan Josenan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	150.000.000,00	Kota Madiun, Taman, Josenan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		165.000.000,00	Kelurahan Josenan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	399.931.100,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		439.924.540,00	Kelurahan Josenan
		KELURAHAN DEMANGAN			976.336.296,00							1.073.978.400,00	
	7,01	KECAMATAN											
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	89,73 Indeks	357.718.836,00						-	393.490.900,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100%	357.718.836,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman	-	393.490.900,00	Kelurahan Demangan
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	357.718.836,00	Kota Madiun, Taman, Demangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		393.490.900,00	Kelurahan Demangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	618.617.460,00						-	680.487.500,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	618.617.460,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman	-	680.487.500,00	Kelurahan Demangan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	169.999.660,00	Kota Madiun, Taman, Demangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		187.000.000,00	Kelurahan Demangan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	448.617.800,00	Kota Madiun, Taman, Demangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		493.487.500,00	Kelurahan Demangan
		KELURAHAN TAMAN			1.185.555.140,00							1.331.503.094,00	
	7,01	KECAMATAN											
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	89,73 Indeks	340.942.740,00						-	397.702.580,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100%	340.942.740,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman	-	397.702.580,00	Kelurahan Taman
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	340.942.740,00	Kota Madiun, Taman, Taman	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		397.702.580,00	Kelurahan Taman
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	844.612.400,00						-	933.800.514,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	844.612.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman	-	933.800.514,00	Kelurahan Taman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	204.682.500,00	Kota Madiun, Taman, Taman	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		231.000.000,00	Kelurahan Taman
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	639.929.900,00	Kota Madiun, Taman, Taman	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 2026 - (4) Peningkatan Transformasi Tata Kelola melalui Kelembagaan Kolaboratif, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dan Karyawan Karyawati Kecamatan Taman		702.800.514,00	Kelurahan Taman
	Total Pagu Prioritas 4				**305.669.599.640,22**								

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja digunakan untuk menggambarkan ukuran keberhasilan pembangunan daerah, di mana penetapan targetnya dapat mencerminkan aspek-aspek yang ingin dicapai dalam pembangunan tersebut. Aspek-aspek yang dimaksud meliputi kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Indikator kinerja ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK).

IKU (Indikator Kinerja Utama) digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja Pemerintah Kota Madiun, yang mencakup indikator kinerja tujuan dan sasaran. Pencapaian IKU daerah bergantung pada pencapaian IKU perangkat daerah, yang bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Perangkat daerah yang mendukung secara langsung pencapaian IKU daerah memiliki peran lebih dominan, karena tugas dan fungsinya lebih signifikan dalam mencapai indikator kinerja tujuan dan sasaran dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya. Baik IKU daerah maupun IKU perangkat daerah berfungsi sebagai indikator kinerja dampak (impact) untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam penyusunan RKPD 2026, penetapan IKU Kota Madiun mengacu pada IKU RPJMD tahun kedua, dengan mempertimbangkan capaian dari tahun sebelumnya, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. 1 Prioritas Pembangunan dan Target Indikator Kinerja Utama Kota Madiun Tahun 2026

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Realisasi	Target	
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
1.	Pengembangan ekonomi inklusif yang didukung oleh infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui transformasi ekonomi.	Indeks Daya Saing Daerah	4,26	4,26	4,30
		Rasio PDRB Sektor Akomodasi Makan dan Minum (ADHK)	5,4	5,40 – 6,00	5,40 – 6,00
		Rasio PDRB Sektor Perdagangan (ADHK)	23,59	23,59	23,61
		Rasio PDRB Sektor Jasa (ADHK)	21,16	21,20	21,30
		Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	14,46	14,46	14,51
		Tingkat Inflasi	1,31	3±1	3±1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6
		Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	3,75	3,74 – 3,14	3,74 – 3,14
		Indeks Infrastruktur	98,62	98,70	98,80
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,21	66,23	66,31
		Indeks Risiko Bencana (H&V 2021)	76,88	75,60	73,75
2.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing global	Indeks Pembangunan Manusia	84,51	84,51-84,78	84,60-85,96
		Literasi Numerasi SD dan SMP	87,78	88,15	88,58
		Rata-rata Lama Sekolah	12,11	12,15	12,36
		Harapan Lama Sekolah	14,54	14,57	14,60
		Usia Harapan Hidup	75,67	75,74	76,00
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,26	95,50	95,82
		Produktifitas Tenaga Kerja	112,88	114,73	116,61
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,30	4,50 – 3,94	4,50 – 3,94
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,60	70,70	70,90
		Pengeluaran Per Kapita	17.518	17.720	18.130
3	Peningkatan harmonisasi sosial dalam mewujudkan ketahanan sosial dan budaya yang berkualitas.	Pertumbuhan Ekonomi	5,73	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28
		Indeks Gini	0,435	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394
		Angka Kemiskinan	4,38	4,38 – 3,92	4,38 – 3,92
		Indeks Rasa Aman	84,16	84,52	84,93
		Indeks Ketenteraman	84,23	84,72	85,34
		Indeks Kerukunan	78,04	78,20	84,80
4.	Peningkatan transformasi tata kelola melalui kelembagaan kolaboratif, digitalisasi, dan partisipasi masyarakat.	Indeks Reformasi Birokrasi	91,95	91,95	92,50
		Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP
		Nilai SAKIP Kota Madiun	81,03	81,03	81,34
		Nilai Survei Penilaian Integritas	77,07	80,15	80,42
		Nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP)	96	96,05	96,44

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6
		Persentase Unit Kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	20	20	40
		Indeks Kualitas Kebijakan	68,67	68,67	70,39
		Indeks Reformasi Hukum	91,02	91,02	91,15
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Madiun	88,74	88,74	89,25
		Indeks Masyarakat Digital	49,86	49,86	49,92
		Indeks Profesionalitas ASN	84,95	84,95	84,95
		Indeks Inovasi Daerah	67,09	67,09	68,43

Sumber: Bappeda, 2025 dan BPS Kota Madiun, 2025

Berdasarkan Tabel 6.1, Pemerintah Kota Madiun telah menetapkan target indikator kinerja utama yang jelas untuk mendukung prioritas pembangunan tahun 2026. Dalam hal pengembangan ekonomi inklusif yang ditopang oleh infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan, target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,58% hingga 6,28% untuk tahun 2025 dan 2026. Ini mencerminkan komitmen untuk menjaga kestabilan dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi meskipun menghadapi dinamika ekonomi global. Transformasi ekonomi menjadi kunci dalam upaya ini, melalui optimalisasi potensi lokal serta penguatan konektivitas infrastruktur.

Sementara itu, untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing global, target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditingkatkan menjadi 84,60–85,01 pada tahun 2026 dari capaian 84,51 pada tahun 2024. Indeks Pembangunan Gender (IPG) juga menunjukkan konsistensi dalam peningkatan, dengan target stabil pada rentang 95,69–96,99.

Dalam aspek reformasi birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi diharapkan tetap terjaga dalam kisaran 87,95–91,70, menandakan pentingnya tata kelola yang adaptif, digital, dan kolaboratif. Upaya penguatan harmoni sosial juga berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang tangguh dan berbudaya melalui pembangunan sosial yang berkualitas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Keberhasilan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat diukur melalui indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mencakup urusan wajib maupun pilihan. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dilihat dari tiga aspek utama, yaitu kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat mencakup kinerja utama pemerintah daerah, seperti indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, indeks gini, dan lainnya. Aspek pelayanan umum terbagi menjadi empat fokus, yaitu urusan wajib layanan dasar, urusan wajib non-layanan dasar, urusan pilihan, dan penunjang urusan pemerintahan. Sedangkan aspek daya saing daerah mencakup kemampuan ekonomi daerah, iklim investasi, fasilitas wilayah/infrastruktur, serta sumber daya manusia.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pada RKPD 2026 memuat penetapan indikator kinerja daerah tahun 2026 dan penetapan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2026, penetapan indikator kinerja daerah tahun 2026 memuat :

1. indikator tujuan dan sasaran kota;
2. indikator tujuan, sasaran, dan program perangkat daerah; dan
3. indikator makro.

penetapan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2026 memuat indikator LPPD dan Indikator SPM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 6. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah RKPD Tahun 2026

NO		Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	BASELINE	Target Tahun		KET
				2024	2025	2026	
1		2	3	4	5	6	7
A		ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI					
	1	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	92,29	92,29	92,40	
	2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	5,34	5,00 - 3,74	5,00 - 3,74	
	3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/ Kapita	1.195,00*	1.231,00	1.262,00	
	4	Penduduk Berakses Air Minum	%	100	100	100	
	5	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	%	99	99,1	99,15	
	6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	62,21	66,23	66,31	Indikator Sasaran Kota
	7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	32,29*	35	38	
	8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	99,81	100	100	
	9	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	26,97*	33	37,1	
	10	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	99,069	99,300	99,340	
	11	Penurunan Emisi GRK Komulatif	Ton CO_2 eq	14.380,56	14.623,3	14.915,77	
	12	Indeks Risiko Bencana (H&V 2021)	Skor	76,88	75,60	73,75	
	13	Indeks Ketahanan Daerah	Skor	0,51	0,58	0,60	
	14	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	-0,40	0,57	0,59	
	15	Kepadatan Penduduk	Orang/ Km^2	5.585	5.667	5.699	
B		ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
	1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,73	5,58 – 6,28	5,58 – 6,28	Indikator Tujuan Kota
	2	Angka Kemiskinan	%	4,38	4,38 – 3,92	4,38 – 3,92	Indikator Sasaran Kota
	3	PDRB Per Kapita ADHK	Rp Juta	61,66	61,60 – 70,57	61,60 – 70,57	
	4	PDRB Per Kapita ADHB	Rp Juta	92,46	92,46 – 101, 17	92,46 – 101, 17	
	5	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah	17.518	17.720	18.130	Indikator Sasaran Kota
	6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,30	4,50 – 3,94	4,50 – 3,94	Indikator Sasaran Kota
	7	Indeks Gini	Skor	0,435	0,444 – 0,394	0,444 – 0,394	Indikator Sasaran Kota
	8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor	84,51	84,51 – 84,78	84,60 – 85,96	Indikator Tujuan Kota
	9	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,67	75,74	76,00	Indikator Sasaran Kota
	10	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	skor	0	0	0	
	11	Prevelensi Stunting	%	11,8	11	10	
	12	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis (enrollment TB)	%	97,6	95	95	
	13	Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis (treatment success rate)	%	96,32	91	91,1	
	14	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	101,02	100	100	
	15	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,11	12,15	12,36	Indikator Sasaran Kota
	16	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,54	14,57	14,60	Indikator Sasaran Kota
	17	Literasi Numerasi SD dan SMP	Nilai	87,78	88,15	88,58	Indikator Sasaran Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1		2	3	4	5	6	7
	18	Rata-rata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	91,01	91,45	91,85	
	19	Rata-rata Kemampuan Literasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	92,00	92,15	92,35	
	20	Rata-rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	79,20	79,75	80,35	
	21	Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	88,89	89,25	89,75	
	22	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	14,91	14,91	14,95	
	23	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	76,49*	77,48	77,90	
	24	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	46,60	65,00 – 72,25	65,00 – 72,25	
	25	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	8,15*	8,15	8,60	
	26	Indeks Kerukunan	Skor	78,04	78,20	84,80	Indikator Sasaran Kota
	27	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Skor	70,55	70,55	70,80	
	28	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Skor	0,093	0,078	0,073	
	29	Indeks Kualitas Lahan	Skor	24,18	37,67	37,67	
	30	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skor	95,26	95,50	95,82	Indikator Sasaran Kota
C		ASPEK DAYA SAING DAERAH					
	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor	84,51	84,51 – 84,78	84,60 – 85,96	Indikator Tujuan Kota
	2	Angka Ketergantungan	%	42,01	42,01	41,90	
	3	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	%	14,46	14,46	14,51	Indikator Sasaran Kota
	4	Rasio PDRB Sektor Akomodasi Makan dan Minum (ADHK)	%	5,4	5,40 – 6,00	5,40 – 6,00	Indikator Sasaran Kota
	5	Rasio Kewirausahaan	%	14,14	14,24	14,93	
	6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,60	70,70	70,90	Indikator Sasaran Kota
	7	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)*	orang	3.862*	4.268	4.621	
	8	Indeks Inovasi Daerah	Skor	67,09	67,09	68,43	Indikator Sasaran Kota
	9	Rasio PDRB Sektor Jasa (ADHK)	%	21,16	21,20	21,30	Indikstor Sasaran Kota
	10	Rasio PDRB Sektor Perdagangan (ADHK)	%	23,59	23,59	23,61	Indikstor Sasaran Kota
	11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	62,81	63,30	63,85	
	12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	20,26	21,05	21,47	
	13	Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	-0,410	-0,410	-0,400	
	14	Indeks Infrastruktur	Skor	98,62	98,70	98,80	Indikator Sasaran Kota
	15	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Skor	92,34	92,49	92,64	
	16	Rasio Rumah Layak Huni	%	99,9	99,56	99,60	
	17	Proporsi kontribusi PDRB kota terhadap provinsi	%	0,63	0,63	0,63	
	18	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,96*	0,94 - 0,96	0,94 - 0,96	
	19	Tingkat Inflasi	%	1,31	3±1	3±1	Indikator Sasaran Kota
	20	*Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*	Skor	3,75	3,74 – 3,14	3,74 – 3,14	Indikator Sasaran Kota
	21	Indeks Akses Keuangan Daerah	Skor	7,37	7,38	7,38	
	22	Indeks Daya Saing Daerah	Skor	4,26	4,26	4,30	Indikator Tujuan Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1		2	3	4	5	6	7
		ASPEK PELAYANAN UMUM					
	1	Indeks Reformasi Hukum	Skor	91,02	91,02	91,15	Indikator Sasaran Kota
	2	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	91,95	91,95	92,50	Indikator Tujuan Kota
	3	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	
	4	Indeks Rasa Aman	Skor	84,16	84,52	84,93	Indikator Sasaran Kota
	5	Indeks Ketenteraman	Skor	84,23	84,72	85,34	Indikator Sasaran Kota
		INDIKATOR KINERJA KUNCI					
A		Pelayanan Pendidikan					
	1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,11	12,15	12,36	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	2	Literasi Numerasi SD dan SMP	Nilai	87,78	88,15	88,58	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,54	14,57	14,60	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	4	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	4,85	4,86	4,86	Indikator Sasaran PD
	1	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar(SD/MI, SMP/MTs)	Orang	21451	28432	21451	spm
	2	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Orang	305	273	305	spm
	3	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Orang	4752	5395	4752	spm
	4	Rata-Rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	91,01	91,45	91,85	spm
	5	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	79,20	79,75	80,35	spm
	6	Iklim Keamanan SD	Nilai	75,59	78,51	78,51	spm
	7	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	76,93	76,67	76,67	spm
	8	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	58,25	61,36	61,36	spm
	9	Rata-Rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	Nilai	92,00	92,15	92,35	spm
	10	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	88,89	89,25	89,75	spm
	11	Iklim Keamanan SMP	Nilai	75,89	76,29	76,29	spm
	12	Iklim Kebhinekaan SMP	Nilai	77,14	75,9	75,90	spm
	13	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	61,96	67,17	67,17	spm
	14	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Yang Mendapatkan Minimal AKREDITAS B	Nilai		94,6	91,61	spm
	15	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/ D IV	Nilai	93,87	94,81	93,87	spm
B		Pelayanan Kesehatan					
	1	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,67	75,74	76,00	Indikator Sasaran Kota dan indikator tujuan PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1		2	3	4	5	6	7
	2	Prevelensi Stunting	%	11,8	11	10	Indiktor Sasaran
	3	Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	%	97,84	91,00	91,00	Indiktor Sasaran
	4	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap layanan kesehatan	Skor	87,05	87,3	87,55	Indiktor Sasaran
	5	Persentase fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	50	50,00	50,00	Indiktor Sasaran
	6	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Per 1000 penduduk	2,09	2,65	3,36	Indiktor Sasaran
	7	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	Indiktor Sasaran
	8	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	94	95,0	95,5	Indiktor Sasaran
	9	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	4,58	4,51	4,53	Indikator Sasaran
	1	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.847	1.907	1.945	Spm
	2	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.847	1.907	1.945	Spm
	3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.690	1.887	1.925	Spm
	4	Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	10.611	8.278	8.444	Spm
	5	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	31.650	31.683	31.395	Spm
	6	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	129.392	129.400	129.500	Spm
	7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	34.940	35.045	35.150	Spm
	8	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	12.730	18.910	9.752	Spm
	9	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	10.755	6.906	6.955	Spm
	10	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	orang	403	404	405	Spm
	11	Jumlah warga negara terduga tuberculusis yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	6.597	6.585	5.649	Spm
	12	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodefiviency virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	6.240	6.436	6.241	Spm
C		Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	1	Indeks Infrastruktur	Skor	98,62	98,70	98,80	Indikator Sasaran Kota
	2	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Skor	92,34	92,49	92,64	Indikator Tujuan PD
	3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Skor	4,2	4,2	4,25	Indikator Sasaran PD
	4	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan	%	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase aksesibilitas kota dalam kondisi mantap	%	96,01	95,80	95,90	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	%	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	%	81,03	81,67	82,01	Indikator Sasaran PD
	8	Persentase kawasan rawan banjir/ genangan	%	17,17	16,97	16,74	Indikator Sasaran PD
	9	Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani Air Minum	%	100	100	100	Indikator Sasaran PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1		2	3	4	5	6	7
	10	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	30	30	Indikator Sasaran PD
	1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	orang	201.733	202.701	203.637	SPM
	2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	orang	99,87	99,74	99,77	SPM
D		Pelayanan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
	1	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	99,5	99,56	99,60	Indikator Tujuan PD
	2	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	4,31	4,31	4,31	Indikator Sasaran PD
	3	Indeks Perumahan dan Permukiman	Skor	99,90	99,77	99,79	Indikator Sasaran PD
	4	Indeks Pengelolaan RTH, PJU dan Permakaman	Skor	98	98	98,32	Indikator Sasaran PD
	5	Rasio Rumah Layak Huni	%	99,9	99,56	99,60	Indikator Sasaran PD
	1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	orang	0	0	0	Spm
	2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	orang	0	0	0	spm
E		Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
a		Satuan Polisi Pamong Praja					
	1	Indeks Rasa Aman	Skor	84,16	84,52	84,93	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	2	Indeks Ketenteraman	Skor	84,23	84,72	85,34	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Sasaran PD
	3	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	92,12	92,12	92,21	Indikator Sasaran PD
	4	Indeks Pemadam Kebakaran	%	86,33	86,45	86,61	Indikator Sasaran PD
	5	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	skor	4,60	4,65	4,70	Indikator Sasaran PD
	1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	orang	2.189	2.200	2.200	Spm
	2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	orang	40	40	40	Spm
b		Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
	1	Indeks Risiko Bencana (H&V 2021)	Skor	76,88	75,60	73,75	Indikator Sasaran Kota dan Tujuan PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1		2	3	4	5	6	7
	2	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	4,77	4,80	4,85	Indikator Tujuan PD
	3	Indeks Ketahanan Daerah	Skor	0,51	0,58	0,60	Indikator Sasaran PD
	4	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Skor	92,31	92.32	92.35	Indikator sasaran PD
	1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Orang	400	450	450	Spm
	2	Jumlah Warga Negara yang memperolah Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Orang	261	410	460	Spm
	3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	12	826	826	Spm
F		Pelayanan Sosial					
	1	Angka Kemiskinan	%	4,38	4,38 – 3,92	4,38 – 3,92	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	2	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	4,92	4,93	4,94	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase PMKS yang mandiri	%	5	5	5	Indikator Sasaran PD
	1	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	198	110	115	Spm
	2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	470	15	16	Spm
	3	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	253	25	27	Spm
	4	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Orang	96	96	97	Spm
	5	Jumlah warga negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Orang	49	40	40	Spm
G		Pelayanan Ketenagakerjaan					
	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,60	70,70	70,90	Indikator Sasaran Kota
	2	Produktifitas Tenaga Kerja	Rupiah (juta)	112,88	114,73	116,61	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	skor	4,30	4,50 – 3,94	4,50 – 3,94	Indikator Sasaran Kota
	4	Persentase penyerapan Tenaga Kerja	%	91,90	80 - 92	80 - 92	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase tenaga kerja yang terlindungi	%	84,45	80 – 85	80 – 85	Indikator Sasaran PD
	6	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	4,75	4,75	4,76	Indikator Sasaran PD
H		Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skor	95,26	95,50	95,82	Indikator Sasaran Kota
	2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Skor	0,093	0,078	0,073	Indikator Tujuan PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1		2	3	4	5	6	7
	3	Persentase tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan	%	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	4	Persentase perempuan sebagai pengambil keputusan	%	25,01	25,02	25,03	Indikator Sasaran PD
	5	persentase keluarga yang berkualitas	%	86,67	85	85	Indikator Sasaran PD
I		Pelayanan Pangan					
	1	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	92,29	92,29	92,40	Indikator Tujuan PD
	2	Skor Pola Pangan Harapan	skor	95	95	95	Indikator Sasaran PD
	3	Indeks Pelayanan Publik	Skor	4,68	4,7	4,7	Indikator Sasaran PD
J		Pelayanan Pertanahan					
K		Pelayanan Lingkungan Hidup					
	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	62,21	66,23	66,31	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	2	Persentase Kualitas Air di Kota Madiun dalam kondisi Sedang	%	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase Kualitas Udara di Kota Madiun dalam kondisi Baik	%	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	4	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Skor	24,18	37,67	37,67	Indikator Sasaran PD
	5	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	4,43	4,43	4,45	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	%	99,06	99,2	99,3	Indikator Sasaran PD
L		Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Skor	92,83	92,83	93,50	Indikator Tujuan PD
	2	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	5,00 Pelayanan Prima	5,00	5,00	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase data kependudukan yang akurat	%	99,62	100	100	Indikator Sasaran PD
M		Pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
	1	Angka Kelahiran Total (Total *Fertility Rate (TFR)*)	Nilai	1,84	1,85	1,86	Indikator Tujuan PD
	2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ *modern contraceptive (mCPR)*	%	70,46	70,5	70,55	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	5,58	4,8	4,2	Indikator Sasaran PD
	4	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%	32	33	34	Indikator Sasaran PD
N		Pelayanan Perhubungan					
	1	Rasio Konektivitas	Nilai	1	1	1	Indikator Tujuan PD
	2	Konektivitas Transportasi Darat	Nilai	1	1	1	Indikator Sasaran PD
	3	Indeks Fatalitas	%	5,80	5,76	5,74	Indikator Sasaran PD
	4	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	4,78	4,79	4,8	Indikator Sasaran PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1		2	3	4	5	6	7
O		Pelayanan Komunikasi dan Informatika					
	1	Indeks Masyarakat Digital	skor	49,86	49,86	49,92	Indikator Sasaran Kota
	2	Indeks Pemerintahan Digital	Nilai	2,29	2,29	2,5	Indikator Tujuan PD
	3	Nilai Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Nilai	1,5	1,5	2	Indikator Sasaran PD
	4	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	97,42	96	96,5	Indikator Sasaran PD
	5	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	4,65	4,67	4,7	Indikator Sasaran PD
P		Pelayanan Koperasi Usaha Kecil Menengah					
	1	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	%	28,99	28,99-30,82	28,99-30,82	Indikator Tujuan PD
	2	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	5	5	5	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase usaha mikro yang beromset naik	%	2,17	2 - 3	2 - 3	Indikator Sasaran PD
Q		Pelayanan Penanaman Modal					
	1	*Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*	Skor	3,75	3,74 – 3,14	3,74 – 3,14	Indikator Sasaran Kota
	2	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Milyar	498 M	198-270	200-280	Indikator Tujuan PD
	3	Nilai Indeks Pelayanan Publik	Skor	4,92	4,51 – 4,93	4,51 – 4,93	Indikator Sasaran PD
	4	Persentase peningkatan jumlah investor	%	42,86	42	44	Indikator Sasaran PD
	5	Indeks kepuasan masyarakat Perangkat Daerah	Skor	92,66	90,00 – 93,00	90,00 – 93,00	Indikator Sasaran PD
R		Pelayanan Kepemudaan dan Olahraga					
	1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	55,50	55,50	55,60	Indikator Tujuan PD
	2	Indeks Partisipasi Olahraga	%	25,40	25,45	25,50	Indikator Tujuan PD
	3	Presentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	4	Jumlah Prestasi Olahraga	medali	127	127	127	Indikator Sasaran PD
	5	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	3,19	3,58	4,1	Indikator Sasaran PD
S		Pelayanan Statistik					
	1	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar kualitas yang dapat diakses oleh publik	%	73	74	75	Indikator Sasaran PD
T		Pelayanan Persandian					
	1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	625	625	626	Indikator Sasaran PD
U		Pelayanan Kebudayaan					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1		2	3	4	5	6	7
	1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Skor	0	0	59,38	Indikator Tujuan PD
	2	Jumlah Obyek Pelindungan,Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Seni, Budaya dan Sejarah Kota Madiun	Obyek	32	32	32	Indikator Sasaran PD
V		Pelayanan Perpustakaan					
	1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Skor	3,41	3,10	3,45	Indikator Tujuan PD
	2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Skor	18,67	18,50	18,70	Indikator Sasaran PD
	3	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	4,68	4,68	4,80	Indikator Sasaran PD
W		Pelayanan Kearsipan					
	1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkungan Pemerintah Daerah	Skor	92,44	92,44	92,46	Indikator Tujuan PD
	2	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	%	18	71,42	89,28	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase Unit Kearsipan pada SDN dan SMPN di Kota Madiun	%	0	0	7,40	Indikator Sasaran PD
X		Pelayanan Kelautan dan Perikanan					
	1	Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi	skor	1,35	1,36	1,36	Indikator Sasaran PD
Y		Pelayanan Pariwisata					
	1	Rasio PDRB Sektor Akomodasi Makan dan Minum (ADHK)	%	5,4	5,40 – 6,00	5,40 – 6,00	Indikator Sasaran Kota dan Tujuan PD
	2	Prosentase pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	%	13,83	13,83	13,83	Indikator Sasaran PD
	3	Prosentase peningkatan penyerapan Tenaga Kerja Pelaku Ekonomi Kreatif	%	2	2	2	Indikator Sasaran PD
Z		Pelayanan Pertanian dan Peternakan					
	1	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi	skor	1,26	1,26	1,26	Indikator Sasaran PD
	2	Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi	rasio	1,2	1,17	1,21	Indikator Sasaran PD
AA		Pelayanan Perdagangan					
	1	Rasio PDRB Sektor Perdagangan (ADHK)	%	23,59	23,59	23,61	Indikator Sasaran Kota
	2	Rasio PDRB Sektor Jasa (ADHK)	%	21,16	21,20	21,30	Indikator Sasaran Kota
	3	Persentase Nilai Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	%	26,37	26,37 – 27,00	26,37 – 27,00	Indikator Tujuan PD
	4	Persentase Pengelolaan Usaha Perdagangan	%	93,3	94	94,05	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase pasar rakyat yang berfungsi dengan baik	%	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase kesesuaian takaran/timbangan produk yang diperdagangkan	%	100	95	95,1	Indikator Sasaran PD
	7	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	4,5	4,5	4,53	Indikator Sasaran PD
BB		Pelayanan Perindustrian					
	1	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	%	14,46	14,46	14,51	Indikator Sasaran Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1		2	3	4	5	6	7
	2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	%	13,63	13,63	13,70	Indikator Tujuan PD
	3	Persentase IKM yang bertambah kapasitas produksinya	%	-	9	23,19	Indikator Sasaran PD
CC		Pelayanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
a		Sekretariat Daerah					
	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	91,95	91,95	92,50	Indikator Tujuan Kota
	2	Nilai SAKIP Kota Madiun	Nilai	81,03	81,03	81,34	Indikator Sasaran Kota
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota madiun	Skor	88,74	88,74	89,25	Indikator Sasaran Kota
	4	Indeks Kualitas Kebijakan	Skor	68,67	68,67	70,39	Indikator Sasaran Kota dan PD
	5	Indeks Reformasi Hukum	Skor	91,02	91,02	91,15	Indikator Sasaran Kota dan PD
	6	Tingkat Inflasi	%	1,31	3±1	3±1	Indikator Sasaran Kota
	7	Persentase ketercapaian realisasi rencana aksi reformasi birokrasi terhadap target	%	93	93	93,5	Indikator Tujuan PD
	8	Nilai Budaya Kerja	Nilai			80	Indikator Sasaran PD
	9	Indeks Pelayanan Publik	Skor	4,6	4,61	4,65	Indikator Sasaran PD
	10	Tingkat Kematangan Organisasi	%	46,12	46,2	48	Indikator Sasaran PD
	11	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Skor	78,01	70,01	70,01-78,01	Indikator Sasaran PD
	12	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP	Nilai	24.37	24,4	24,5	Indikator Sasaran PD
	13	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP	Nilai	12.45	12,45	12,5	Indikator Sasaran PD
	14	Persentase capaian kinerja indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	79,68	79,68	79,80	Indikator Sasaran PD
	15	Persentase Ketercapaian Kinerja Peta Jalan Inflasi	%	0	0	81	Indikator Sasaran PD
b		Sekretariat DPRD					
	1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Skor	90,93	86,00	86,00	Indikator Tujuan PD
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	90,93	86,00	86,00	Indikator Sasaran PD
	3	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	4,86	4,87	4,87	Indikator Sasaran PD
DD		Pelayanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
a		Perencanaan					
	1	Nilai Sakip Pada Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	26	26	26,2	Indikator Tujuan dan Sasaran PD
	2	Nilai Pelayanan Publik Perangkat Daerah	skor	3,6	3,63	3,65	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase Tingkat keselarasan dokumen perencanaan penganggaran dengan dokumen perencana	%	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	89	89	89,2	Indikator Sasaran PD
	5	NIlai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	83	83	83	Indikator Sasaran PD
b		Keuangan					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1		2	3	4	5	6	7
	1	Badan Keuangan dan Aset Daerah					
	a	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	b	Persentase LKPD yang memenuhi asersi audit	%	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	c	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	4,78	4,8	4,81	Indikator Sasaran PD
	2	Badan Pendapatan Daerah					
	a	Capaian Target Pajak Daerah	Rp.	109.603.926.000	138.994.500.000	142.546.702.125	Indikator Tujuan PD
	b	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli daerah dari sektor pajak	%	2	2	2	Indikator Sasaran PD
	c	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	%	4,5	4,5	4,51	Indikator Sasaran PD
c		Kepegawaian					
	1	Indeks Profesionalitas ASN	Skor	84,95	84,95	84,95	Indikator Sasaran Kota dan Tujuan PD
	2	Indeks Profesionalitas ASN Berdimensi Kompetensi	Skor	29	29	29,12	Indikator Tujuan PD
	3	Indeks Sistem Merit	Skor	285	285	300	Indikator Sasaran PD
	4	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Skor	87,22	86,00	87,30	Indikator Sasaran PD
	5	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	4,49	4,69	4,69	Indikator Sasaran PD
d		Pendidikan dan Pelatihan					
	1	Persentase Peningkatan Kualitas ASN	%	30	30	60	Indikator Sasaran PD
e		Penelitian dan Pengembangan					
	1	Indeks Inovasi Daerah	Skor	67,09	67,09	68,43	Indikator Tujuan Kota dan Indikator Sasaran Kota dan PD
EE		Pelayanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					
	1	Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai	77,07	80,15	80,42	Indikator Sasaran Kota
	2	Nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP)	Nilai	96	96,05	96,44	Indikator Sasaran Kota
	3	Persentase Unit Kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	%	20	20	40	Indikator Sasaran Kota
	4	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level/ skor	3 level/ 3,290 skor	3 level/ 3,290 skor	3 level/ 3,292 skor	Indikator Tujuan PD
	5	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	4,33	4,40	4,48	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase terpenuhinya kebijakan dan prosedur pengawasan sesuai proses bisnis	%	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase Temuan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Rekomendasi	%	94	94,55	94,75	Indikator Sasaran PD
	8	Indeks Budaya Risiko	level	2	2	2	Indikator Sasaran PD
FF		Pelayanan Unsur Kewilayahan					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1		2	3	4	5	6	7
	1	Kecamatan Taman					
	a	Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Taman	Nilai	4,83	4,84	4,85	Indikator Tujuan PD
	b	Persentase Jumlah kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Taman	%	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	2	Kecamatan Manguharjo					
	a	Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Manguharjo	Nilai	4,95	4,95	4,95	Indikator Tujuan PD
	b	Persentase Jumlah kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	%	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	3	Kecamatan Kartoharjo					
	a	Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Kartoharjo	Nilai	4,89	4,9	4,91	Indikator Tujuan PD
	b	Persentase Jumlah kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	%	100	100	100	Indikator Sasaran PD
GG		Pelayanan Unsur Pemerintahan Umum					
	1	Indeks Kerukunan	Skor	78,04	78,20	84,80	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	2	Persentase fasilitasi pencegahan konflik ekonomi	%	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase Pembinaan terhadap Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	4	Persentase Partai Politik pemenang Pemilu yang lolos verifikasi	%	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase orkemas baru yang berbadan hukum	%	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase pencegahan konflik keagamaan, kehidupan sosial dan budaya	%	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase penanganan konflik sosial	%	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	8	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor	3,43	3,65	3,85	Indikator Sasaran PD

Sumber: Bapppeda Kota Madiun, 2025, BPS Kota Madiun, 2025, dan Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kota madiun, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KONSISTENSI TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

NO		RANKIR RPJMD TAHUN 2025-2029 TAHUN PELAKSANAAN 2026				RKPD TAHUN 2026				KETERANGAN
		TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	T1	TUJUAN 1: Meningkatnya Kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing global	*Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*	Skor	84,60 – 85,96	TUJUAN 1: Meningkatnya Kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing global	*Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*	Skor	84,60 – 85,96	
	S1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat berstandar global	Literasi Numerasi SD dan SMP	Nilai	88,58	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat berstandar global	Literasi Numerasi SD dan SMP	Nilai	88,58	
			Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,36		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,36	
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,60		Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,60	
	S2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat berstandar international	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,00	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat berstandar international	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,00	
	S3	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skor	95,82	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skor	95,82	
	S4	Menurunnya pengangguran	Produktifitas Tenaga Kerja	Rupiah (juta)	116,61	Menurunnya pengangguran	Produktifitas Tenaga Kerja	Rupiah (juta)	116,61	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,50 – 3,94		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,50 – 3,94	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,90		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,90	
	S5	Peningkatan Daya Beli Mayarakat	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah	18.130	Peningkatan Daya Beli Mayarakat	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah	18.130	
2	T2	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	Skor	4,30	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	Skor	4,30	
			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,58 – 6,28		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,58 – 6,28	
			Indeks Gini	Skor	0,444 – 0,394		Indeks Gini	Skor	0,444 – 0,394	
	S6	Meningkatnya Daya Saing ekonomi sektor strategis	Rasio PDRB Sektor Akomodasi Makan dan Minum (ADHK)	%	5,40 – 6,00	Meningkatnya Daya Saing ekonomi sektor strategis	Rasio PDRB Sektor Akomodasi Makan dan Minum (ADHK)	%	5,40 – 6,00	
			Rasio PDRB Sektor Perdagangan (ADHK)	%	23,61		Rasio PDRB Sektor Perdagangan (ADHK)	%	23,61	
			Rasio PDRB Sektor Jasa (ADHK)	%	21,30		Rasio PDRB Sektor Jasa (ADHK)	%	21,30	
			Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	%	14,51		Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	%	14,51	
	S7	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi	Tingkat Inflasi	%	3±1	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi	Tingkat Inflasi	%	3±1	
	S8	Peningkatan Kualitas Investasi	*Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*	Skor	3,74 – 3,14	Peningkatan Kualitas Investasi	*Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*	Skor	3,74 – 3,14	
	S9	Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	4,38 – 3,92	Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	4,38 – 3,92	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	S10	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur	Skor	98,80	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur	Skor	98,80	
	S11	Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	66,31	Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	66,31	
	S12	Meningkatnya ketahanan dan mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana (H&V 2021)	Skor	73,75	Meningkatnya ketahanan dan mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana (H&V 2021)	Skor	73,75	
	S13	Terwujudnya kondusivitas dan stabilitas daerah	Indeks Rasa Aman	Skor	84,93	Terwujudnya kondusivitas dan stabilitas daerah	Indeks Rasa Aman	Skor	84,93	
			Indeks Ketenteraman	Skor	85,34		Indeks Ketenteraman	Skor	85,34	
	S19	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Bermasyarakat	Indeks Kerukunan	Skor	84,80	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Bermasyarakat	Indeks Kerukunan	Skor	84,80	
3	T3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	92,50	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	92,50	
	S14	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Opini BPK terhadap LKPD	WTP/WDP	WTP	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Opini BPK terhadap LKPD	WTP/WDP	WTP	
			Nilai SAKIP Kota Madiun	Nilai	81,34		Nilai SAKIP Kota Madiun	Nilai	81,34	
	S15	Pemerintahan Bersih Korupsi	Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai	80,42	Pemerintahan Bersih Korupsi	Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai	80,42	
			Nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP)	Nilai	96,44		Nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP)	Nilai	96,44	
			Persentase Unit Kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	%	40		Persentase Unit Kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	%	40	
	S16	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Skor	70,39	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Skor	70,39	
			Indeks Reformasi Hukum	Skor	91,15		Indeks Reformasi Hukum	Skor	91,15	
	S17	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik yang prima dan profesional berbasis digital	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Madiun	Skor	89,25	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik yang prima dan profesional berbasis digital	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Madiun	Skor	89,25	
			Indeks Masyarakat Digital	skor	49,92		Indeks Masyarakat Digital	skor	49,92	
			Indeks Profesionalitas ASN	skor	84,95		Indeks Profesionalitas ASN	skor	84,95	
	S18	Peningkatan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Skor	68,43	Peningkatan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Skor	68,43	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KESELARASAN KESEPAKATAN
RAKORTEKRENBANG TAHUN 2025 DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.	10	10	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	25	25	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	4	4	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	2	2	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	100	100	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	200	200	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	2	2	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	100	100	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	1	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	1	
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	34	34	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	32180	32180	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	3	3	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	13	13	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	209	209	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	60	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3.600	3.600	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	200	200	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	15	15	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	15.000	15.000	
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	100	100	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	200	200	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	12	12	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	2	2	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	1	1	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	34	34	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	1	1	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	27	27	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	60	60	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	2	2	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1	1	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	41	41	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	36	36	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	2	2	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Kegiatan	1	1	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	12	12	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	5	5	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen	8	8	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga	1	1	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	2	2	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	laporan	200	200	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	4	4	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	30	30	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR KESELARASAN

SASARAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA

NO	INDIKATOR KERANGKA EKONOMI MAKRO	TARGET RKPD PROVINSI	TARGET KABUPATEN/KOTA SESUAI RKPD PROVINSI TAHUN 2026	TARGET RKPD KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2026	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,80-5,40	5,58-6,28	5,58-6,28	
2	PDRB Per Kapita (Juta)	80,10-90,71		92,46 – 101, 17	
3	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	14,20		0,63	
4	Angka Kemiskinan (%)	8,81-9,10	4,30-4,03	4,38 – 3,92	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,84-4,48	4,60-3,94	4,50 – 3,94	
6	Rasio Gini	0,370-0,380	0,433-0,444	0,444 – 0,394	
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,80-76,40	85,96-86,32	84,60 – 85,96	
8	Penurunan Emisi GRK (%) Kumulatif	5,95	14.591,46	14.915,77	
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	74,08-74,25		66,31	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR KESELARASAN

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

NO	RKP 2026**			NO	RKPD 2026 KABUPATEN/KOTA*			KETERANGAN
		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET			INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
1	2		3	4			5	6
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)		74,68	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)		76,00	
2	Kesehatan Ibu dan Anak:							
	-	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	109	2	-	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	0	
	-	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	17,50	3	-	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	10,7	
3	-	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk	252					
	-	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment success rate) (%)						
	-	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)						
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)		98,70					
5	Hasil Pembelajaran:							
	a)	Rata-rata Nilai PISA						
	-	Membaca	396					
	-	Matematika	404					
	-	Sains	416					
	b)	Rata-rata nilai asesmen nasional						
	-	Literasi membaca	65,89					
	-	Numerasi	58,86					
	c)	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,45	4	c)	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	12,36	
	d)	Harapan Lama Sekolah	13,36	5	d)	Harapan Lama Sekolah	14,60	
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)		34,92	6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)		14,95	
7	Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)		68,50					
8	Tingkat kemiskinan (%)		6,5-7,5	7	Tingkat kemiskinan (%)		4,38 – 3,92	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	34,99	8 Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	65,00-72,25	
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	10,40			
11	Produktivitas Industri dan Pertanian				
	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	21,20	9 a) Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	14,46 – 16,00	
	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)				
12	Pengembangan Pariwisata				
	a) Rasio PDB Pariwisata (%)	4,60-4,70	10 a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	5,40 – 6,00	
	b) Devisa Pariwisata (miliar USD)	22,00 - 24,70			
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,40-8,00			
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN				
	a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	3,15			
	b) Rasio kewirausahaan (%)	3,18			
	c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,12			
	d) Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,26			
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik				
	a) Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,44 - 4,96	11 a) Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,50 – 3,94	
	b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	37,95			
16	Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)	56,40 - 59,31	12 Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)	63,85	
17	Tingkat penguasaan IPTEK				
	a) Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,31			
	b) Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	52			
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau				
	a) Indeks Ekonomi Hijau	71,01			
	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20,00			
19	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	41			
20	Biaya Logistik (% PDB)	13,30			
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,44	13 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	21,47	
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	22, 7			
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3	4			5	6
	a)	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,58					
	b)	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	68,66	14	b)	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	99,60	
	c)	Persentase Desa Mandiri (%)	23,91	15	c)	Persentase Desa Mandiri (%)	-	
24	Indeks Materi Hukum							
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		1,70	16	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		-	tidak dipakai dalam RKPD 2026 sehingga memakai indikator baru Indeks Pemerintahan Digital (terget 2,5)
26	Indeks Pelayanan Publik							
27	Anti Korupsi							
	-	Indeks Integritas Nasional	89,17					
	-	Indeks Persepsi Korupsi	40					
28	Indeks Pembangunan Hukum		0,70					
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)		68,00					
30	Indeks Demokrasi Indonesia		82,12 – 85,66					
31	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)							
32	Tingkat Inflasi (%)		2,50 ± 1,00					
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan							
	a)	Aset Perbankan/PDB (%)	64,51					
	b)	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,63					
	c)	Aset Asuransi/PDB (%)	9,30					
	d)	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	59,90					
	e)	Total Kredit/PDB (%)	38,46					
34	Inklusi Keuangan (%)		91,50					
35	Asia Power Index (Diplomatic Influence)		65,8	17	Realisasi Investasi		200-280 Milyar	
36	Asia Power Index (Military Capability)		17,0	18	ICOR		3,74 – 3,14	
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		58,99					
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama		77,14					
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		73,83					
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0,421	19	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0,073	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2		3	4			5	6
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati							
42	Kualitas Lingkungan Hidup		76,67					
	a)	Indeks Kualitas Udara (IKU)		20	a)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	66,31	
		Indeks Kualitas Air (IKA)						
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)						
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)						
	b)	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman		21	b)	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	38	
	c)	Timbulan Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)		22	-	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	37,1	
				23	-	Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	99,340	
43	Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian menuju kedaulatan pangan							
	a)	Ketahanan Energi						
	-	Indeks Ketahanan Energi	6,82					
	b)	Prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan (%)	6,55	24	b)	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	5,00 - 3,74	
	c)	Ketahanan Air	3,50					
	-	Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)	60,16					
	-	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	42,24	25	-	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	99,15	
44	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB		0,136	26	Indeks RIsiko bencana (IRB)		76,60 – 68,00	
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)							
	a)	Kumulatif	19,07					
	b)	Tahunan	27,35					

Keterangan :
**) Indikator Utama Pembangunan kabupaten/kota dapat disesuikan dengan kebijakan masing-masing provinsi.*
***) Sumber Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR KESELARASAN KEGIATAN PRIORITAS UTAMA

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Prioritas Nasional 1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Relasi Media	
			Pelayanan Informasi Publik	
			Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			Penyusunan Konten	
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
2	Prioritas Nasional 2	- Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)		
		- Pengembangan Pangan Hewani		
		- Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati		
		- Peningkatan penyediaan energi		
		- Perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi		
		- Konservasi sumber daya air		
		- Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
		-	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3		4	5
			Penyediaan dan Pengawasan Infrastruktur Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
				Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	
		-	Pengembangan terpadu pesisir utara jawa		
		-	Pengelolaan susut dan sisa pangan		
		-	Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik		
		-	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	
				Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	
				Normalisasi/Restorasi Sungai	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Pengelolaan Sampah	
		-	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
				Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	
		-	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah	
				Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	
				Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	
		-	Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut		
		-	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3		4	5
3	Prioritas Nasional 3	-	Pengembangan koperasi sektor produksi		
4	Prioritas Nasional 4	-	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	
		-	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas		
		-	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah		
		-	Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		-	Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
				Invensi dan Inovasi	
				Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	
				Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	
		-	Pencegahan dan penurunan stunting	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
				Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3		4	5
				Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
		-	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		-	Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis		
		-	Investasi pelayanan kesehatan primer		
		-	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses		
		-	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		-	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi		
		-	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga		
5	Prioritas Nasional 5	-	Pengembangan hilirisasi Kelapa		
		-	Hilirisasi Rumput Laut		
6	Prioritas Nasional 6	-	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3		4	5
				Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
7	Prioritas Nasional 7	-	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	
				Pembinaan Disiplin ASN	
		-	Transformasi digital layanan publik prioritas		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR KESELARASAN
INTERVENSI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
	Provinsi Jawa Timur	1. Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output:			
		- Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis;			
		- Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional;			
		- Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG);			
		- Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha;			
		- Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor.			
		2. Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama.			
		3. Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output:			
		- Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran;			
		- SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran;			
		- SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran;			
		- SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran;			
		- SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran;			
		- SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran			
		4. Direktif Presiden : Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output:		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
		- Peningkatan kapasitas usaha koperasi;		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		- Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi.		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
		Keterangan:			
		Dilaksanakan diseluruh Desa/Kelurahan di Indonesia.			
		5. Direktif Presiden : Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan output Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kabupaten Tuban.			
		6. Direktif Presiden : Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output:			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6
		- Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; - Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; - Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; - Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); - Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; - Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; - Kartu Prakerja; - Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; - Alat dan mesin pertanian pra panen; - Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya;			
		- Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan;		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
		- Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; - Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; - Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; - Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; - Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). - Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output:			
		- Bantuan PBI JKN;		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
		- Kartu Indonesia Pintar; - Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat;		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
		- Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; - Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; - Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; - Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik;			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6
		- Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; - Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; - Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya.			
	Wilayah Metropolitan Surabaya • Kota Surabaya • Kab. Gresik • Kab. Lamongan • Kab. Mojokerto • Kota Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Bangkalan	- Persiapan Pembangunan Jalan Tol Gresik–Lamongan–Tuban; - Pembangunan Jalur Ganda KA Segmen Sepanjang–Wonokromo; - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota di Kab. Sidoarjo dan Kab. Mojokerto; - Pembangunan SPAM Regional Surabaya dan peningkatan SPAM Mojolagres serta Perluasan jaringan distribusi di Gresik; - Perluasan SPAM di Kabupaten Sidoarjo - Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di WM Surabaya, termasuk pengendalian banjir Kali Buntung, Kali Lamong, dan Kali Mas; - Peningkatan ketangguhan terhadap banjir termasuk pengendalian banjir Bengawan Solo Hilir (Bojonegoro-Tuban); - Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya; - Pelaksanaan pendidikan kecakapan kerja untuk anak usia sekolah di Kab. Bangkalan; - Surabaya Regional Railway Line (Phase I); - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota (IPLT) di Kab. Gresik; - SDM Dikti yang ditingkatkan kualifikasi dan kompetensi (PHLN) di Kota Surabaya; - Pembangunan infrastruktur jaringan gas untuk industri dan rumah tangga; - Penyiapan penyelenggaraan sekolah unggul.		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
	Kawasan Pengembangan Industri Gresik Surabaya-Sidoarjo Mojokerto Pasuruan • Kota Surabaya • Kab. Gresik • Kab. Lamongan • Kab. Mojokerto • Kota Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Bangkalan • Kab. Pasuruan • Kota Pasuruan	- Pengembangan koridor industri Gresik Surabaya–Sidoarjo–Mojokerto–Pasuruan (sektor industri prioritas: hilirisasi nikel, hilirisasi timah, hilirisasi kelapa, hilirisasi rumput laut, hilirisasi sawit, industri tekstil dan produk tekstil, industri kimia, industri kosmetik dan farmasi, hilirisasi tembaga, industri logam dasar, besi, dan baja); - Pembangunan Pabrik Amonia Urea III Petrokimia Gresik (PKG); - Pembangunan Pabrik Soda Ash Petrokimia Gresik (PKG); - Masterclass for Game Developers di Kota Surabaya; - Women for Indonesian Game di Kota Surabaya; - Inkubasi startup gim di Kota Surabaya; - Fasilitasi Akses Pendanaan dan Pembiayaan Industri Gim di Kota Surabaya; - Fasilitasi dan Promosi Industri Gim Nasional di Kota Surabaya; - Pendampingan penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia, Pakan; - Restrukturasi mesin dan peralatan industri pakan dan oleokimia; - Fasilitasi prototyping produk betacarotene dan tocopherol alami berbasis minyak sawit;			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6
		- Fasilitasi pendampingan teknis pemenuhan standar industri hijau dan transformasi industri hijau untuk sektor prioritas hilirisasi; - Fasilitasi potensi usaha koperasi sektor agromaritim; - Pengembangan biofuel untuk pemenuhan kebutuhan domestic - Kekayaan intelektual hasil riset dan inovasi teknologi energi berkelanjutan.			
	Kawasan Perkotaan Malang-Batu • Kota Malang • Kota Batu • Kab. Malang	- Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Malang (Prioritas Nasional); - Penyiapan penyelenggaraan sekolah unggul.			
	Kawasan Pengembangan Industri Malang Singasari-Lawang, dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bromo Tengger-Semeru dan Lingkar Kawi (Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger Semeru) • Kota Malang • Kab. Malang • Kota Batu • Kab. Pasuruan • Kab. Probolinggo • Kota Probolinggo • Kab. Lumajang	- Pengembangan koridor industri Malang Singasari-Lawang (sektor industri prioritas: Industri tekstil dan produk tekstil); - Masterclass for Game Developers di Kota Malang; - Women for Indonesian Game di Kota Malang; - Inkubasi startup gim di Kota Malang; - Fasilitasi Akses Pendanaan dan Pembiayaan Industri Gim di Kota Malang; - Fasilitasi dan Promosi Industri Gim Nasional di Kota Malang; - Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja di Kab. Probolinggo dan Kab. Pasuruan; - Pengurangan risiko bencana gunung api di Gunung Semeru			
	Kawasan Perkotaan Kediri • Kota Kediri • Kab. Kediri • Kota Blitar • Kab. Blitar • Kab. Tulungagung	- Pembangunan TPST Skala Regional Kediri; - Pembangunan Jalan Tol Kertosono Kediri - Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi pada RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Gambiran Kediri (PHTC); - Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Kediri; - Preservasi jalan ruas Kediri Tulungagung–Trenggalek dan Kediri Tulungagung–Blitar - Pengurangan risiko bencana gunung api di Gunung Kelud; - Pengurangan risiko bencana gunung api di Gunung Kelud;			
	Kawasan Perkotaan Madiun • Kota Madiun • Kab. Madiun • Kab. Magetan	- Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. Soedono Madiun (PHTC); - Preservasi jalan ruas Madiun-Magetan dan Madiun-Ponorogo-Pacitan; - Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya; - Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan biodefense pada RSAU dr. Efram Harsana (Kab. Magetan); - Revitalisasi sarana dan prasarana Politeknik Negeri Madiun melalui pembiayaan SBSN; - Penyiapan penyelenggaraan sekolah unggul			
	Kawasan Perkotaan Jember • Kab. Jember	- Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis - Kompetensi di RSUD Provinsi dan - Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. - Soebandi Jember (PHTC);			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6
		- Preservasi Banyuwangi, jalan ruas Jember Jember-Bondowoso Situbondo, dan Jember-Lumajang; - Perencanaan dan persiapan reaktivasi jalur KA segmen Kalisat-Situbondo; - Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja di Kab. Jember; - Penyiapan penyelenggaraan sekolah unggul.			
	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bengawan Solo Jawa Timur • Kab. Pacitan • Kab. Ponorogo • Kab. Magetan • Kab. Madiun • Kab. Ngawi • Kab. Bojonegoro • Kab. Tuban • Kab. Lamongan • Kab. Gresik	- Pembangunan jaringan Irigasi pada D.I Tugu; - Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Colo, D. I. Asin Bawah, D.I. Bendo, D. I. Bengawan Jero, D. I. Gondang, D. I. Prijetan, D. I. Sim, D. I. Waduk Pondok, D. I. Jejeruk, D. I. Sungkur, D. I. Beron, dan D. I. Pacal; - Lahan Garam yang difasilitasi di Kab. Tuban, Kab. Lamongan, dan Kab. Gresik; - Kawasan Bawang Merah di Kab. Bojonegoro; - Kawasan Aneka Cabai di Kab. Pacitan, Kab. Magetan, Kab. Tuban, dan Kab. Lamongan; - Prasarana Perbibitan Ternak di Kab. Magetan dan Kab. Tuban; - Peningkatan Sentra IKM Pengolahan Kelapa di Kab. Pacitan; - Prasarana jaringan pengendali risiko daya rusak air di Perkotaan Pesisir Utara Jawa (Kab. Gresik); - Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Kali Madiun, Sub-DAS Bengawan Solo Hilir, DAS Grindulu, DAS Prumpung, DAS Kali Lamong, dan DAS Kali Corong, Waduk Pacal, Waduk Pondok, Waduk Sangiran, Waduk Prijetan, dan Telaga Sarangan; - Pembangunan infrastruktur PLTP Tegala Ngebel; - Pembangunan infrastruktur PLTA PS Grindulu; - Pengembangan Kilang Minyak Bumi GRR Tuban - Pembangunan kilang olefin di Tuban; - Penyiapan Jalan Tol Tuban-Babat Lamongan-Gresik; - Preservasi jalan ruas Bojonegoro-Babad Lamongan-Gresik dan Tuban-Babad; - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota (IPLT) di Kab. Pacitan; - Penyiapan calon lokasi dan calon petani penerima; - Pelatihan dan penguatan kelembagaan petani; - Penyediaan input dan alat mesin produksi pertanian - Pengawalan produksi dan pengendalian OPT/DPI; - Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi; - Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; - Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.			
	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Brantas • Kab. Malang • Kab. Blitar • Kab. Kediri • Kab. Nganjuk • Kab. Jombang	- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan - Irigasi pada D. I. Delta Brantas, D.I. - Bendung Jatimlerek, D.I. Siman, D. I. Is - Kedung Kandang, D. I. Menturus, D. I. - Mrican, D. I. Padi Pomahan, D. I. Is - Molek, dan D. I. Waduk Bening; - Kawasan Bawang Merah di Kab. Malang dan Kab. Nganjuk;			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6
	• Kab. Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Tulungagung • Kab. Trenggalek	- Prasarana Perbibitan Ternak di Kab. Kediri dan Kab. Malang; - Prasarana pengendali risiko daya rusak air di Perkotaan Pesisir Utara Jawa (Kab. Sidoarjo); - Pengembangan sentra/kawasan perikanan; - Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Brantas Hulu, Sub-DAS Lekso, Sub-DAS Konto, Sub DAS Brangkal, Waduk Karangkates, Waduk Widas, Waduk Selorejo; - Peningkatan operasi dan pemeliharaan bendungan-bendungan pada DAS Brantas; - Pembangunan infrastruktur PLTP Arjuno Welirang; - Pembangunan Bendungan Bagong; - Pengembangan Kawasan Perdesaan Agrowisata Pertanian Terpadu Kecamatan Gondang (Kab. Mojokerto); - Penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur; - Penyiapan calon lokasi dan calon petani penerima; - Pelatihan dan penguatan kelembagaan petani; - Penyediaan input dan alat mesin produksi pertanian; - Pengawalan produksi dan pengendalian OPT/DPI; - Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi; - Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; - Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria			
	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Tapal Kuda • Kab. Pasuruan • Kab. Probolinggo • Kab. Lumajang • Kab. Jember • Kab. Situbondo • Kab. Bondowoso • Kab. Banyuwangi	- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Bondoyudo, D. I. Sampean Baru, D. I. Baru, D.I Baulmati, D. I. Setail, D. I. Porolinggo, D. I. Setail Teknik, D. I. Bedadung, D. I. Pondok Waluh, D. I. Talang, D. I. Jatiroto, D. I. Pekalen, D. I. Banyuputih, dan D. I. Sampean; - Lahan Garam yang difasilitasi di Kab. Pasuruan; - Kawasan Bawang Merah di Kab. Probolinggo; - Kawasan Aneka Cabai di Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Banyuwangi; - Prasarana Perbibitan Ternak Kab. Jember; - Pembangunan Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi - Pembangunan TPST Banyuwangi; - Penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur; - Penyiapan calon lokasi dan calon petani penerima; - Pelatihan dan penguatan kelembagaan petani; - Penyediaan input dan alat mesin produksi pertanian; - Pengawalan produksi dan pengendalian OPT/DPI; - Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi; - Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; - Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.			
	Kawasan Afirmasi Madura (D1) dan Kepulauan (Percepatan Pengentasan Kemiskinan) dan Kawasan Perkotaan	- Preservasi Jalan Lintas Selatan Madura; - Kawasan Aneka Cabai di Kab. Sampang; - Replacement fasilitas Pelabuhan Sapudi;			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6
	Sumenep (A5) • Kab. Bangkalan • Kab. Sampang • Kab. Pamekasan • Kab. Sumenep	- Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota di RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep (PHTC); - Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan di Kab. Sumenep; - Prasarana Perbibitan Ternak di Kab. Pamekasan; - Bantuan Operasional RS Kapal di Kab. Sumenep; - Lahan Garam yang difasilitasi di Kab. Bangkalan; - Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja di Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan Kab. Sumenep; - Kawasan Bawang Merah di Kab. Sampang dan Kab. Pamekasan; - Penyiapan penyelenggaraan sekolah unggul; - Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; - Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria			
	Kawasan Afirmasi Pegunungan Sewu Jawa Timur (Pemerataan Pembangunan) • Kab. Pacitan • Kab. Trenggalek	- Penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur dan preservasi Jalan Lintas Selatan Wonogiri–Pacitan Trenggalek–Tulungagung, serta jalan ruas Ponorogo–Pacitan dan Ponorogo Trenggalek; - Pembangunan SPAM Kabupaten Pacitan; - Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota di RSUD dr. Darsono Pacitan (PHTC); - Penyiapan penyelenggaraan sekolah unggul; - Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; - Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.			
	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pacitan Trenggalek Tulungagung • Kab. Pacitan • Kab. Trenggalek • Kab. Tulungagung	- Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Tamperan dan PPN Prigi; - Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Pacitan, Trenggalek, dan Tulungagung; - Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; - Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria			
	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Lamongan Tuban • Kab. Lamongan • Kab. Tuban	- Pengembangan pelabuhan perikanan PPN Brondong dan PPP Bulu; - Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri garam di Lamongan dan Tuban; - Lahan Garam yang difasilitasi di Kab. Lamongan dan Kab. Tuban; - Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; - Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.			
	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Sumenep • Kab. Sumenep	- Pengembangan pelabuhan perikanan Pelabuhan Perikanan Pasongsongan; - Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri garam di Sumenep; - Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; - Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.			
		- Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Muncar;			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6
	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Banyuwangi • Kab. Banyuwangi	- Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Banyuwangi; - Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; - Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.			
	Kawasan Konservasi TN Bromo-Tengger Semeru (E1) • Kab. Pasuruan • Kab. Probolinggo • Kab. Malang • Kab. Lumajang Kawasan Konservasi TN Meru Betiri (E2) • Kab. Jember • Kab. Banyuwangi Kawasan Konservasi TN Alas Purwo (E3) • Kab. Banyuwangi Kawasan Konservasi Baluran (E4) • Kab. Situbondo	- Penguatan dan pengendalian perencanaan kawasan hutan nasional dan daerah; - Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH; - Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH; - Pengamanan Kawasan Hutan ; - Penanganan aduan atas usaha dan/atau kegiatan bidang kehutanan; - Pengembangan Hutan Adat.			
	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat di Jawa Timur	- Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismisk di Kota Blitar.			
	Provinsi Jawa Timur	- BMHP untuk Skrining Kesehatan di Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur; - Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU); - Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Miskin dan Rentan di Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur; - Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat; - Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong Peran dan Kepemimpinan Perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan; - Peningkatan pelatihan petugas penjamah makanan; - Revitalisasi bangunan Satuan PAUD yang mengalami kerusakan; - Pembangunan unit sekolah baru satuan PAUD; - Revitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan; - Pembangunan unit sekolah baru SD; - Revitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan - Pembangunan unit sekolah baru SMP; - Revitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan; - Pembangunan unit sekolah baru SMA; - Penyediaan sarana Madrasah untuk menunjang pembelajaran; - Bantuan pembangunan rumah swadaya dan pemugaran perumahan kumuh; - Sertifikasi dengan pemeriksanaan dan/atau pengujian;		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6
		- Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha;		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
		- Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM; - Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal; - Akreditasi lembaga halal; - MoU kemitaan jaminan produk halal; - Peningkatan kapasitas SDM Iptekin; - Penguatan infrastruktur Iptekin strategis; - Penguatan proses bisnis, skema insentif, serta kerjasama pemanfaatan dan komersialisasi hasil Iptekin; - Penguatan kapasitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM); - Penguatan kapasitas Science Techno Park (STP); - Pengembangan pilot project hub ekosistem Iptekin di daerah; - Pengembangan pilot project hub ekosistem Iptekin di K/L pengampu bidang prioritas; - Pengembangan pilot project hub prioritas tematik Iptekin di BRIN; - Optimalisasi pemanfaatan Iptekin secara masif khususnya dalam mendukung bidang-bidang prioritas;			
		- Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir;		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
		- Tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA;			
		- Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
		- Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis;			
		- Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		- Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Operasional Pelayanan Puskesmas	
		- Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis;			
		- Pelestarian Cagar Budaya, ODCB dan OPK;		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
				Pengembangan Cagar Budaya	
		- Desa pemajuan kebudayaan;			
		- Pengembangan dan pemanfaatan konten budaya digital;		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
		- Penguatan industri kreatif berbasis seni dan budaya.		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
		- Penyelenggaraan event film, musik, dan seni;		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		- Fasilitasi dan kemitraan warisan budaya;		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
		- Peningkatan kebudayaan; kompetensi SDM		Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	
		- Pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya dan/atau objek pemajuan kebudayaan;			
		- Giat warisan budaya;			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB VII
PENUTUP

RKPD sebagai dokumen perencanaan daerah dalam jangka waktu satu tahun, berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD, serta dasar pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah. Dokumen ini menjabarkan RPJMD yang mencakup prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi makro yang menggambarkan kondisi perekonomian daerah secara keseluruhan, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kerja Perangkat Daerah dalam bentuk regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kota Madiun Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan APBD untuk tahun tersebut.

Proses penyusunan RKPD melibatkan koordinasi antar instansi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan melalui Forum Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Forum-forum ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pelaku pembangunan terkait arah dan kebijakan pembangunan yang dirancang. Selain itu, Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk mencapai kesepakatan, terutama dalam menyelaraskan rencana kegiatan serta program yang tercantum dalam agenda pembangunan provinsi dan nasional.

Penyusunan RKPD 2026 mengadopsi berbagai pendekatan, antara lain pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, serta pendekatan *top down* dan *bottom up*. Pendekatan-pendekatan ini mencerminkan bahwa seluruh ruang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan telah dimanfaatkan oleh semua pihak untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2026. Selain itu, dalam proses penyusunannya, RKPD Kota Madiun Tahun 2026 juga senantiasa memperhatikan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselarasan, sinergi, dan harmonisasi antara dokumen perencanaan pembangunan di berbagai tingkat pemerintahan.

Apabila dalam pelaksanaan RKPD Kota Madiun Tahun 2026 terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, maka akan dilakukan penyesuaian melalui penyusunan Perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2026, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara